



WALIKOTA BIMA

**PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BIMA TAHUN 2019**



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2019;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode tahunan, dalam rangka mengimplementasikan target kinerja Tahun 2019 sebagai bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Pemerintah Daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di daerah yang berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
 18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
 19. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.

Pasal 2

1. RKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Bima dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
 - BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
 - BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
 - BAB VI Penutup
3. Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

1. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun dukungan dari Pemerintah serta program prioritas yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2019.

Pasal 4

1. Perangkat Daerah membuat laporan kinerja semesteran dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian,

dan Pengembangan (Bappeda Litbang) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya semester yang berkenaan.

3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan program tahun berikutnya.

Pasal 5

REPD Tahun 2019 menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bima Tahun 2019.

Pasal 6

REPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 5 Juli 2018

WALIKOTA BIMA



M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum	I - 2
1.3. Hubungan antar Dokumen	I - 4
1.4. Maksud, Tujuan dan Fungsi	I - 5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I - 6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II - 1
2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	II - 1
2.1.1.1. Kondisi Administrasi dan Geografis.....	II - 1
2.1.1.2. Topografi	II - 3
2.1.1.3. Klimatologi.....	II - 4
2.1.1.4. Geologi.....	II - 6
2.1.1.5. Hidrologi.....	II - 7
2.1.1.5. Kondisi Demografis	II - 8
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 13
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 13
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II - 17
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II - 21
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II - 22
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II - 55
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II - 62
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II - 62
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II - 63
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II - 68
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II - 70
2.1.5. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah.....	II - 72

2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD	II - 74
2.2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD.....	II - 74
2.2.2.	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD	II - 308
2.3.	Permasalahan Pembangunan.....	II - 377

**BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH**

3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III - 1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Makro Kota Bima.....	III - 1
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 6
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III - 6
3.2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 7

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.2.	Prioritas Pembangunan.....	IV - 4

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH..... V - 1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI - 1

BAB VII PENUTUP..... VII - 1

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1.	Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD	I- 5
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kota Bima	II - 3
Gambar 2.2.	Geomorfologi Kota Bima	II - 7
Gambar 2.3.	Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II - 10
Grafik 1	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Tahun 2012 – 2016 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	II - 16
Grafik 2	Tingkat Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2012- 2016	II - 16
Grafik 3	Pertumbuhan (%) PDRB Per Kapita Tahun 2012 - 2016	II - 17
Grafik 4	Tingkat IPM Kota Bima Tahun 2012 -2016	II - 319
Grafik 5	Capaian Angka HarapanHidup Kota Bima Tahun 2013 - 2016	II - 322
Grafik 6	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Bima Tahun 2014 - 2017	II - 323
Grafik 7	PDRB Kota Bima Tahun 2012 - 2016	II - 335
Bagan 1	Operasionalisasi Pendekatan Tematik – Holistik dalam Mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia	IV - 6

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMD, yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/ataulintas SKPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan .

Pada tahun 2018 ini Kota Bima merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak pada bulan Juli 2018, oleh karena itu dokumen RKPD 2019 ini

merupakan dokumen transisi sebelum RPJMD 2019-2023 ditetapkan, sehingga penyusunannya mengacu dan mempedomani program prioritas yang tertuang pada RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028, RKP 2019, dan RKPD Provinsi NTB Tahun 2019 serta mengacu pada hasil evaluasi RKPD Tahun 2017. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Terdapat beberapa dasar hukum yang mendasari penyusunan RKPD Kota Bima tahun 2017, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213)
 - 16) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
 - 17) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
 - 18) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);

- 19) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);
- 20) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 102);
- 21) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);
- 22) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
- 23) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
- 24) Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);
- 25) Peraturan Walikota Bima Nomor 11 Tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 269);

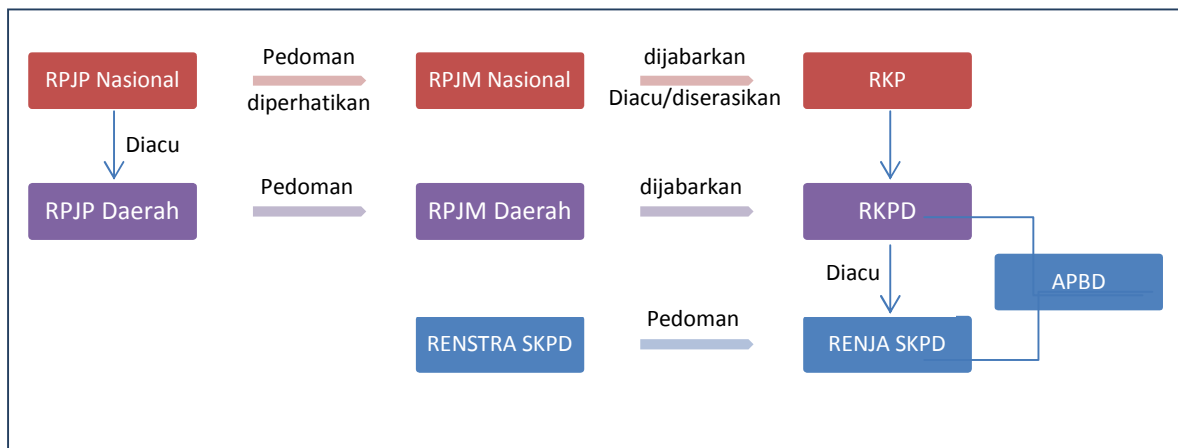
1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling member masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

Proses perencanaan dilakukan menurut wilayah yang berbeda, menurut kurun waktu yang berbeda dan menurut pendekatan yang berbeda, namun tetap dalam kerangka tujuan perencanaan nasional. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah memiliki hubungan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini.

Gambar. 1.1
Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD



1.4. Maksud, Tujuan dan Fungsi

Penyusunan RKPD Kota Bima tahun 2019 ini disusun untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan serta untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai wadah untuk mensinergikan arah dan prioritas pembangunan jangka menengah dengan kebutuhan-kebutuhan tahunan dari berbagai stakeholders pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan RKPD secara spesifik adalah sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian Walikota dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD harus mengacu pada dokumen RKP. Sedangkan fungsi RKP dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;

4. Menjadi pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan APBD;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah;
6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
7. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target standar pelayanan minimum dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;

1.5.Sistematika Dokumen RKPD

Rancangan RKPD Kota Bima tahun 2017 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
 - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis

2.1.1.1. Kondisi Administrasi dan Geografis

Secara geografis Kota Bima terletak antara 118°41'00" - 118°48'00" Bujur Timur dan 8°30'00" - 8°20'00" Lintang Selatan dengan orientasi wilayah berada pada sebelah timur Teluk Bima Pulau Sumbawa. Luas wilayah Kota Bima adalah sebesar 222,25 km² yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur, Asakota, Mpunda dan Raba dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

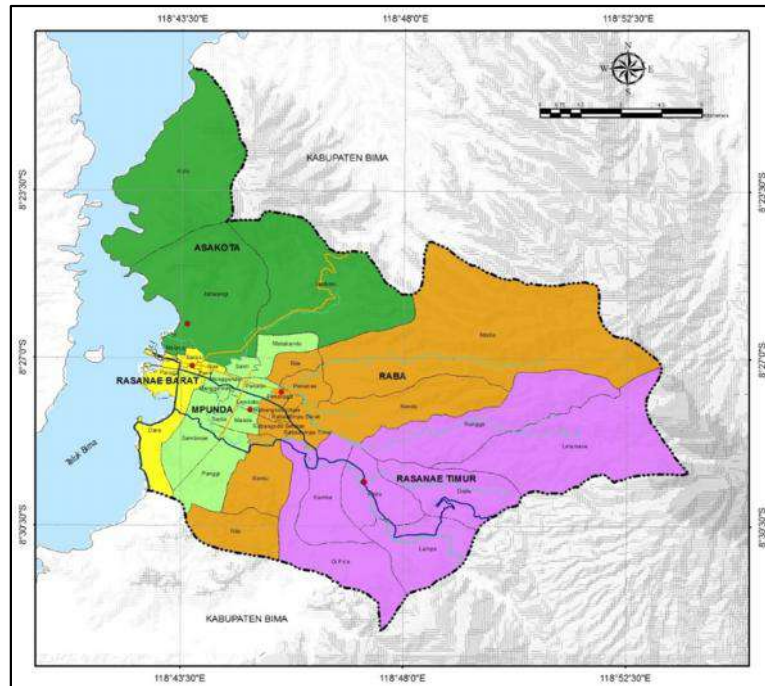
Asakota merupakan kecamatan terluas dengan luas area mencapai 31 persen dari luas Kota Bima. Diurutan kedua ada Kecamatan Rasanae Timur dengan luas area mencapai 28,83 persen, selanjutnya Kecamatan Raba dengan luas sebesar 28,67 persen, Kecamatan Mpunda sebesar 6,88 persen. Sementara itu, Rasanae Barat adalah kecamatan dengan luas area paling kecil yaitu 4,56 persen dari luas Kota Bima.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kota Bima

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (dalam km ²)
I.	Kecamatan Rasanae Barat	1. Kel. Tanjung	0,79
		2. Kel. Paruga	0,91
		3. Kel. SaraE	0,48
		4. Kel. NaE	0,31
		5. Kel. Pane	0,31
		6. Kel. Dara	7,34
Jumlah I			10,14
II.	Kecamatan Mpunda	1. Kel. Sambinae	5,43
		2. Kel. Panggi	3,51
		3. Kel. Monggonao	0,63

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (dalam km ²)
		4. Kel. Manggemaci	0,52
		5. Kel. Penatoi	0,74
		6. Kel. Lewirato	0,49
		7. Kel. Sadia	0,68
		8. Kel. Mandé	0,69
		9. Kel. Santi	0,72
		10. Kel. Matakando	1,87
Jumlah II			15,28
III.	Kecamatan Raba	1. Kel. Penaraga	0,74
		2. Kel. Penanae	5,34
		3. Kel. Rite	1,84
		4. Kel. Rabangodu Utara	0,98
		5. Kel. Rabangodu Selatan	1,43
		6. Kel. Rabadompu Timur	0,54
		7. Kel. Rabadompu Barat	1,66
		8. Kel. Rontu	4,74
		9. Kel. Ntobo	31,19
		10. Kel. Kendo	9,08
		11. Kel. Nitu	6,19
Jumlah III			63,73
IV.	Kecamatan Asakota	1. Kel. Melayu	0,76
		2. Kel. Jatiwangi	22,18
		3. Kel. Jatibaru	19,60
		4. Kel. Kolo	26,49
Jumlah IV			69,03
V.	Kecamatan Rasanae Timur	1. Kel. Kumbe	1,52
		2. Kel. Lampe	7,23
		3. Kel. Oi Fo'o	9,20
		4. Kel. Kodo	5,55
		5. Kel. Dodu	7,93
		6. Kel. Lelamase	21,05
		7. Kel. Nungga	11,59
Jumlah V			64,07
Jumlah I + II + III + IV + V			222,25

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2016



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bima

2.1.1.2. Topografi

a. Ketinggian

Wilayah Kota Bima umumnya didominasi oleh dataran rendah dimana daerah yang berada pada ketinggian antara 0-25 m dpl seluas 9.259 ha atau mencapai 42,62 persen dari luas Kota Bima. Sementara itu luas tanah dengan ketinggian 25-50 m seluas 5.161 ha (23,75%) dan di atas 50 m seluas 7.307 ha (33,63%).

**Tabel 2.2.
Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut**

Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut	Luas Tanah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kota Bima (%)
0 – 25	9.259	42,62
25 – 50	5.161	23,75
> 50	7.307	33,63
Jumlah	21.727	100,00

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2017

b. Kelerengan

Untuk tahun 2015, Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan datar dengan kelerengan 0-40 persen, yaitu seluas 9.242 ha, kemudian lahan bergelombang seluas 4.994 ha, lahan dengan kemiringan curam seluas 4.534 ha, dan lahan dengan kondisi sangat curam dengan luas 2.957 ha.

Tabel 2.3.
Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima

No	Kecamatan	Datar (0 - 2 %)	Bergelombang (2 - 15 %)	Curam (15 - 40 %)	Sangat Curam (> 40 %)
1	Rasanae Barat	854	35	75	50
2	Mpunda	658	132	563	175
3	Rasanae Timur	2.555	1.793	935	1.024
4	Raba	2.950	1.850	848	627
5	Asakota	2.225	1.184	2.113	1.081
Jumlah		9.242	4.994	4.534	2.957

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

Wilayah Kecamatan Rasanae Timur memiliki kelerengan > 40% mencapai 39,07%. Luas Kecamatan Raba dengan kemiringan diatas 40% mencapai 44,36%. Sebaliknya, Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda didominasi wilayah yang relatif datar dan bergelombang. Sementara itu, 29,91% dari wilayah KecamatanAsakotamemiliki karakteristik kelerengan bergelombang.

2.1.1.3. Klimatologi

Wilayah Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2015 sebesar 117,78 mm/th, di mana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember yaitu 379,4 mm dan terendah pada bulan Agustus dan September, yaitu 0,0 mm.Jumlah hari hujan selama tahun 2015 tercatat 164 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada Bulan Januari yaitu 30 hari dan terendah pada bulan Agustus dimana tidak terdapat hari hujan.

Kelembaban udara rata-rata pada tahun 2015 sebesar 80%, tertinggi 87% pada Bulan Januari dan terendah 69% pada Bulan Oktober. Temperatur berkisar pada interval antara suhu minimal 20,8°C pada Bulan Agustus dan suhu maksimum 35,2°C pada Bulan Oktober, dengan rata-rata suhu 27,13°C.

Tabel 2.4
Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2017

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan (hh)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	337,7	30	35
Pebruari	123,0	19	54
Maret	72,0	15	80
April	79,9	13	74
Mei	158,2	15	61
Juni	103,1	13	53
Juli	20,6	6	73
Agustus	0,0	0	92
September	0,0	1	97
Oktober	19,3	4	92
Nopember	119,7	21	65
Desember	379,4	27	43
Rata-Rata	117,78	14	68,25

Sumber : Stasiun Meteorologi Muhammad Salahudin Bima, 2016

Tabel 2.5
Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan Tekanan Udara Dirinci per bulan di Kota Bima Tahun 2017

Bulan	Suhu Udara (°C)			Lembab Nisbi (%)	Tekanan Udara(mb)
	Rata-rata	Max	Min		
1. Januari	27,00	32,50	25,00	87,00	1008,40
2. Pebruari	27,10	33,60	24,70	86,00	1008,40
3. Maret	27,50	33,60	24,20	82,00	1010,20
4. April	27,40	33,10	23,90	82,00	1009,80
5. Mei	27,40	33,00	24,30	83,00	1010,10
6. Juni	26,80	32,10	23,70	85,00	1010,00
7. Juli	25,70	30,50	22,20	79,00	1011,20
8. Agustus	25,40	31,80	20,80	74,00	1012,90
9. September	26,90	32,70	22,90	71,00	1012,60
10. Oktober	28,80	35,20	24,20	69,00	1012,10
11. Nopember	28,30	34,50	24,70	77,00	1000,30
12. Desember	27,30	32,30	24,50	85,00	1008,50
Rata-Rata	27,13	32,91	23,76	80	1009,54

Sumber : Stasiun Meteorologi Muhammad Salahudin Bima, 2017

2.1.1.4. Geologi

Wilayah Kota Bima dan sekitarnya secara geomorfologi dan berdasarkan morfometri dan morfogenesis dapat dikelompokkan ke dalam 4 satuan geomorfologi, yaitu:

1. Satuan geomorfologi dataran fluvial.

Di daerah Kota Bima ini terhampar diantara perbukitan disekitarnya dan Teluk Bima yang terletak di tengah-tengah daerah Kota Bima memanjang dari Barat ke Timur melalui celah antara Dora Pokah dengan Doro Kolo. Satuan geomorfologi ini menempati $\pm 20\%$ dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian utara dan bagian selatan lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran fluvial, meliputi daerah Jatibaru, Sadia, Sambinae, Monggonao, Paruga, Nae, Santi, Penatoi, Penaraga, Raba Ngodu, Raba Dompou, Kumbe, Sadia, Kendo, Tato, Lampe, dan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran fluvial ini memiliki nilai beda tinggi rata - rata 3 meter dan kemiringan lereng rata - rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir dan lempung.

2. Satuan Geomorfologi Dataran Endapan Pantai

Satuan geomorfologi ini menempati $\pm 10\%$ dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian barat Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai, meliputi: daerah Tanjung, Melayudan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai ini memiliki nilai beda tinggi rata - rata 2 meter dan kemiringan lereng rata - rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir.

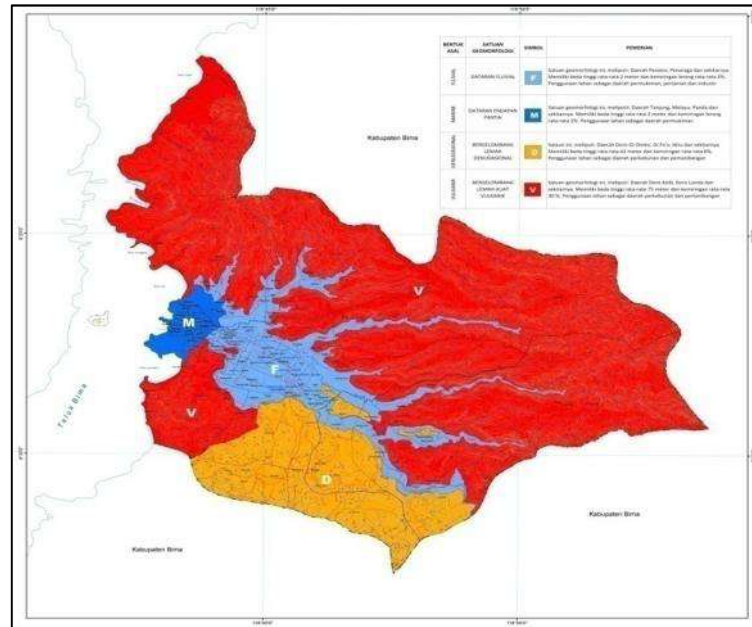
3. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional.

Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua, batuan sedimen dan setempat-setempat oleh batugamping koral. Satuan geomorfologi ini menempati $\pm 30\%$ dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional, meliputi: daerah Doro Oi'ombo, Doro Oi'si,i, Doro Jati Oi'ifoo, Nitu dan sekitarnya. memiliki nilai beda tinggi rata - rata 42 meter dan kemiringan lereng rata - rata sebesar 6 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah batugamping dan batupasir.

4. Satuan geomorfologi bergelombang lemah-kuat vulkanik.

Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua berupa breksi, lava, tuf dan batuan beku terobosan. Satuan geomorfologi ini menempati $\pm 40\%$ dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah dan bagian selatan lokasi Kota Bima

satuan geomorfologi bergelombang lemah–kuat vulkanik, meliputi: daerah Doro Kolo, Doro Lewamori, Doro Lalepa, Doro Londa dan sekitarnya. Memiliki nilai beda tinggi rata – rata 75 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 13 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah andesit dan tuf.



Gambar 2.2. Geomorfologi Kota Bima

2.1.1.5. Hidrologi

Wilayah Kota Bima dilewati oleh 7 (tujuh) sungai. Sungai-sungai tersebut memiliki hulu di sebelah utara dan timur Kota Bima, dan bermuara menuju Teluk Bima. Sungai terpanjang adalah Sungai Lampe yang memiliki panjang 25 km. Air sungai dimanfaatkan antara lain sebagai sumber air minum dan pengairan/irigasi.

**Tabel 2.6.
Sungai di Kota Bima**

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)	Lebar Sungai (m)	Kecamatan	
				Hulu	Hilir
1	Sungai Lampe	25	30	Rasanae Timur	Rasanae Barat
2	Sungai Dodu	12	20	Rasanae Timur	Rasanae Timur
3	Sungai Nungga	22	20	Rasanae Timur	Mpunda
4	Sungai Kendo	15	15	Raba	Rasanae Barat
5	Sungai Ntobo	12	20	Raba	Rasanae Barat
6	Sungai Jatiwangi	16	15	Asakota	Asakota
7	Sungai Romo	2	12	Asakota	Asakota

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima, 2016

Mata air yang ada di Kota Bima teridentifikasi berada di beberapa lokasi, terutama di Kecamatan Rasanae Timur, Raba dan Asakota.

2.1.1.6. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2016 mencapai 163.101 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 80.103 jiwa dan perempuan sebanyak 82.998 jiwa.

Tabel 2.7.
Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Rasanae Barat	18.233	19.034	37.267
2.	Mpunda	18.827	19.471	38.298
3.	Raba	19.766	20.540	40.306
4.	Rasanae Timur	8.456	8.622	17.078
5.	Asakota	14.821	15.331	30.152
Jumlah Total		80.103	82.998	163.101

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

b. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Umur

Berdasarkan kelompok umur, kelompok usia muda (0-14 tahun) berjumlah 46.168 jiwa atau 28,30 %. Sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 109.062 jiwa atau 66,87 % dan kelompok usia non produktif (65 tahun keatas) berjumlah 7.871 jiwa (4,82%).

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Tahun 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	8.124	7.728	15.852
5-9	7.909	7.660	15.569
10-14	7.486	7.261	14.747
15-19	8.331	8.459	16.790
20-24	9.003	9.023	18.026
25-29	6.761	6.744	13.505
30-34	6.084	6.723	12.807
35-39	5.401	5.779	11.180
40-44	5.068	5.795	10.863
45-49	4.309	4.645	8.954

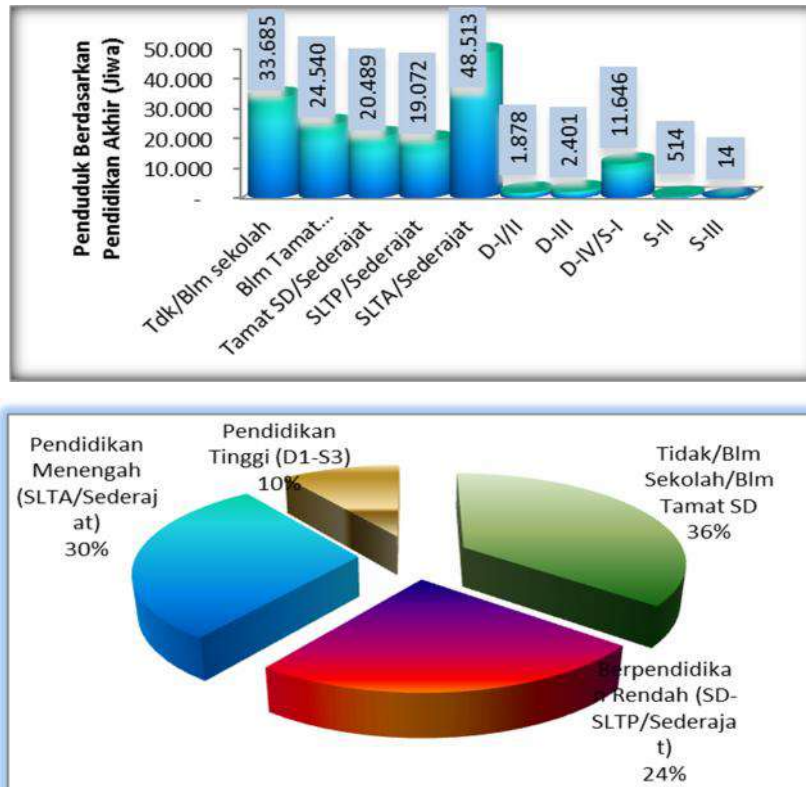
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
50-54	3.472	3.710	7.182
55-59	2.774	3.125	5.899
60-64	1.789	2.067	3.856
65-69	1.434	1.558	2.992
70-74	944	1.107	2.051
75+	1.214	1.614	2.828
Jumlah	80.103	82.998	163.101

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

Dari data komposisi penduduk menurut kelompok umur ini diketahui rasio ketergantungan total adalah sebesar 49,54 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 49,54 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 - 64 tahun) sebesar 42,33 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua (perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun) sebesar 7,21 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2016, penduduk usia kerja di Kota Bima masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

c. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, jumlah penduduk Kota Bima tahun 2016 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan secara umum didominasi oleh lulusan SLTA/ sederajat yang mencapai 48.513 jiwa atau sebesar 30 persen dari total penduduk. Angka penduduk berpendidikan rendah yang merupakan tamatan SD sampai SLTP sederajat mencapai 24 persen. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi hanya sebesar 10 persen.



Gambar 2.3. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, 2017

d. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk

Indikator penting untuk melihat persebaran penduduk adalah rasio kepadatan penduduk (*density ratio*), yang sangat berkaitan erat dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah.

Berdasarkan persebaran penduduk, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Barat dengan jumlah kepadatan 3.675 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah dengan jumlah kepadatan 267 jiwa/km².

Tabel 2.9.
Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan (jiwa/ km ²)
1	Rasanae Barat	37.267	10,14	3.675
2	Mpunda	38.297	15,28	2.506
3	Raba	40.307	63,73	632
4	Rasanae Timur	17.078	64,07	267

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan (jiwa/ km ²)
5	Asakota	30.152	69,03	437
	Jumlah	163.101	222,25	734

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

e. Pencatatan Sipil

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran. Sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah penduduk Kota Bima yang memiliki KTP-Elektronik dan telah melakukan penyerapan/perekaman KTP-Elektronik adalah 92.852 jiwa atau 95.62%. Kepala keluarga di Kota Bima, yang sudah memiliki Kartu Keluarga Nasional sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 38.237 atau 97.38 %. Jumlah pencatatan kelahiran tahun 2016 yaitu sebanyak 52.359 jiwa.

Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2016

Uraian	Jumlah
Jumlah Penduduk Wajib KTP	97.107
Jumlah Penduduk sudah cetak KTP	92.852
Rasio Penduduk ber-KTP	95,62 %
Jumlah Penduduk ber-akte lahir	52.359
Jumlah KK	39.304
Sudah Cetak KK	38.273
Rasio Kepemilikan KK	97,38 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

f. Ketenagakerjaan

Berdasarkan undang - undang ketenagakerjaan, yang termasuk dalam kategori tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia diatas 15 tahun ke atas. Sedangkan menurut ILO yang termasuk dalam katagori tenaga kerja adalah penduduk yang berusia mulai dari umur diatas 10 tahun. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan pada komponen Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Yang dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah Penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sifatnya sementara, tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah

Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lansia (penerima pensiun).

Pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja di Kota Bima mencapai 76,867 Jiwa. Angkatan kerja laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah angkatan kerja perempuan. Dari jumlah tersebut, 89,85 persen angkatan kerja dalam kondisi sudah bekerja sedangkan 10,15 persen menganggur. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja adalah sebesar 37,821 Jiwa. Penduduk bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga yang besarnya mencapai 59,57 persen, selebihnya merupakan penduduk yang masih bersekolah sebesar 30,69 persen dan kegiatan lainnya 3,64 persen.

Tabel 2.11.
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
1	JUMLAH PENDUDUK ≥ 15 THN (JIWA)	55,441	59,247	114,688
2	ANGKATAN KERJA (JIWA)	43.735	33.132	76,867
	Bekerja (%)	87,48	92,97	89,85
	Pengangguran/TPT (%)	12,52	7,03	10,15
3	BUKAN ANGKATAN KERJA (JIWA)	11,706	26,115	37,821
	Sekolah (%)	45,22	24,06	30,69
	Mengurus RT (%)	33,91	71,21	59,67
	Lainnya (%)	20,87	4,61	3,64

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kota Bima pada tahun 2016 didominasi oleh 4 (empat) sektor lapangan pekerjaan. Penduduk yang bekerja di sektor jasa adalah yang paling dominan yaitu mencapai 31,65 persen. Lapangan pekerjaan selanjutnya pada sektor perdagangan yaitu sebesar 27,41 persen, sektor lain sebesar 16,26 persen, sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan 13,37 persen. Sementara penduduk yang bekerja di sektor Perindustrian tercatat dengan persentasenya hanya 11,32 persen.

Tabel 2.12.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Lapangan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,61	10,58	13,37
2. Industri Pengolahan	6,12	17,77	11,32

Lapangan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3. Perdagangan Besar, Hotel dan Rumah Makan	17,86	39,27	27,41
4. Jasa Kemasyarakatan, sosial dan Perorangan	32,33	30,80	31,65
5. Lainnya	28,07	1,58	16,26
Jumlah	100	100	100

Sumber : BPS Kota Bima, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan memang merupakan lapangan pekerjaan dominan bagi penduduk Kota Bima. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika Kota Bima memiliki pandangan ke depan untuk bisa berkembang menjadi Kota Perdagangan dan Jasa sebagaimana Visi Pembangunan Kota Bima Tahun 2013-2018.

Kota Perdagangan dan Jasa memiliki makna sebuah Kota yang bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Adapun sebagai Kota Jasa, Kota Bima akan lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat transaksi dan distribusi.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan yang terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, yang meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan seni budaya.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan,

angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dilihat dari pertumbuhan PDRB, kinerja ekonomi Kota Bima menunjukkan tren yang cukup menggembirakan, karena terjadi pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Bima tercatat sebesar 5,60 terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya dan hingga tahun 2016 menjadi 5,78.

Tabel 2.13. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

Kategori	2012		2013*		2014**		2015****		2016****	
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	329.910,43	16,00	336.300,89	15,44	348.300,89	15,11	362.720,26	14,87	369.683,03	14,33
B Pertambangan dan Penggalian	9.435,46	0,46	8.954,16	0,41	9.541,55	0,41	10.247,07	0,42	10.883,88	0,42
C Industri Pengolahan	76.078,28	3,69	80.022,40	3,67	83.091,96	3,60	86.266,01	3,54	91.305,57	3,54
D Pengadaan Listrik dan Gas	3.219,54	0,16	4.023,22	0,18	5.624,75	0,24	5.329,26	0,22	6.253,89	0,24
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	797,75	0,04	812,44	0,04	839,68	0,04	860,19	0,04	899,57	0,03
F Konstruksi	193.122,28	9,36	206.177,73	9,47	219.580,18	9,52	234.125,70	9,60	253.666,65	9,83
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	442.759,90	21,47	483.862,68	22,22	519.252,59	22,52	556.890,99	22,84	601.525,03	23,32
H Transportasi dan Pergudangan	222.056,88	10,77	233.209,92	10,71	246.169,98	10,68	260.664,79	10,69	274.842,66	10,65
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50.255,68	2,44	53.703,74	2,47	57.118,64	2,48	60.993,37	2,50	65.947,50	2,56
J Informasi dan Komunikasi	36.788,75	1,78	38.284,13	1,76	40.903,95	1,77	43.826,09	1,80	47.570,24	1,84
K Jasa Keuangan dan Asuransi	46.608,37	2,26	50.203,07	2,31	53.276,78	2,31	56.748,34	2,33	60.363,84	2,34
L Real Estate	102.889,31	4,99	109.062,67	5,01	115.390,71	5,01	122.808,55	5,04	129.988,46	5,04
M,N Jasa Peahaan	7.231,60	0,35	7.585,39	0,35	8.106,89	0,35	8.524,27	0,35	8.979,99	0,35
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	233.356,63	11,31	241.203,93	11,08	253.082,08	10,98	262.778,38	10,78	269.722,21	10,46
P Jasa Pendidikan	159.813,13	7,75	167.086,93	7,67	177.858,43	7,71	189.031,70	7,75	200.136,14	7,76

Kategori	2012		2013*		2014**		2015****		2016****	
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
	Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72.551,71	3,52	75.729,13	3,48	79.558,07	3,45	83.773,40	3,44	88.707,45
R,S,T,U Jasa lainnya	75.621,65	3,67	81.321,41	3,73	87.701,70	3,80	92.992,43	3,81	99.127,45	3,84
PDRB	2.062.497,35	100	2.177.543,21	100	2.305.405,52	100	2.438.560,80	100	2.579.603,45	100

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

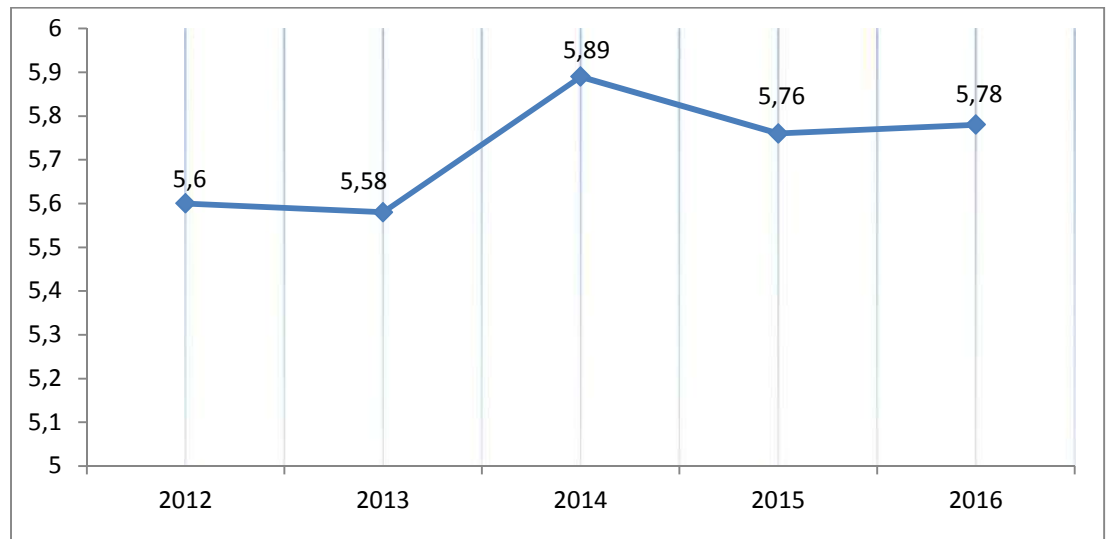
*) Angka Sementara ; ****) Angka Sangat Sangat Sementara

Tabel 1.14. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2012-2016

Kategori	2012	2013	2014	2015****	2016****
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,01	1,94	3,57	4,14	1,92
B Pertambangan dan Penggalian	6,44	(5,10)	6,56	7,39	6,21
C Industri Pengolahan	4,78	5,18	3,84	3,82	5,84
D Pengadaan Listrik dan Gas	12,43	24,96	39,81	(5,25)	17,35
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,20	1,84	3,35	2,44	4,58
F Konstruksi	6,03	6,76	6,50	6,62	8,35
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,55	9,28	7,32	7,25	8,01
H Transportasi dan Pergudangan	4,52	5,02	5,56	5,88	5,45
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,63	6,86	6,36	6,78	8,12
J Informasi dan Komunikasi	7,65	4,06	6,84	7,14	8,54
K Jasa Keuangan dan Asuransi	8,70	7,71	6,12	6,52	6,37
L Real Estate	5,32	6,00	5,80	6,43	5,85
M,N Jasa Perusahaan	7,37	4,89	6,88	5,15	5,35
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,48	3,36	4,92	3,83	2,64
P Jasa Pendidikan	3,23	4,55	6,45	6,28	5,87
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,87	4,38	5,06	5,30	5,89
R,S,T,U Jasa lainnya	7,50	7,54	7,85	6,03	6,60
PDRB	5,60	5,58	5,89	5,76	5,78

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

*) Angka Sementara ; ****) Angka Sangat Sangat Sementara



Sumber : BPS Kota Bima, 2017

Grafik 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

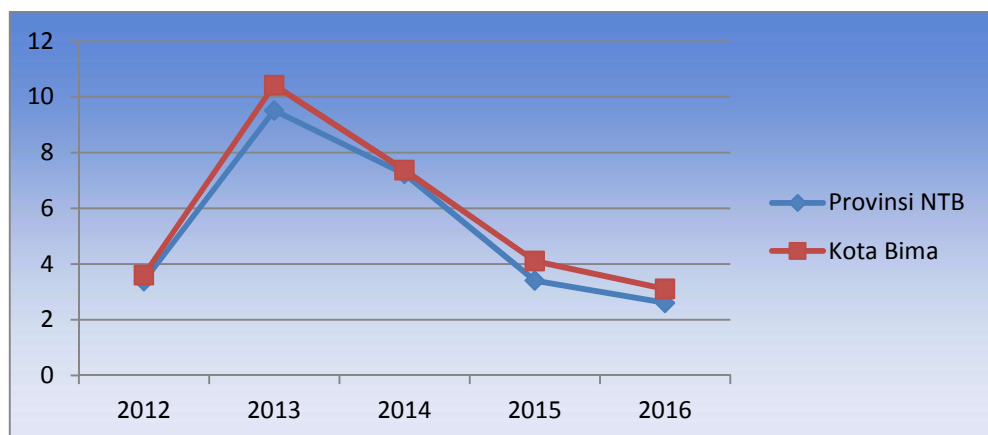
b. Laju Inflasi

Angka inflasi Kota Bima periode 5 tahun terakhir trennya cenderung menurun. Hingga tahun 2016 inflasi Kota Bima mencapai 3,11 persen. Angka ini masih sedikit lebih tinggi dibanding inflasi Provinsi NTB yang sebesar 2,61 persen.

Tabel 2.15. Nilai inflasi rata-rata Tahun 2012-2016 Kota Bima

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Provinsi NTB	3,99	9,51	7,23	3,41	2,61
Kota Bima	3,61	10,42	7,37	4,11	3,11

Sumber : BPS Kota Bima, 2017



Grafik 2 Tingkat Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2012-2016

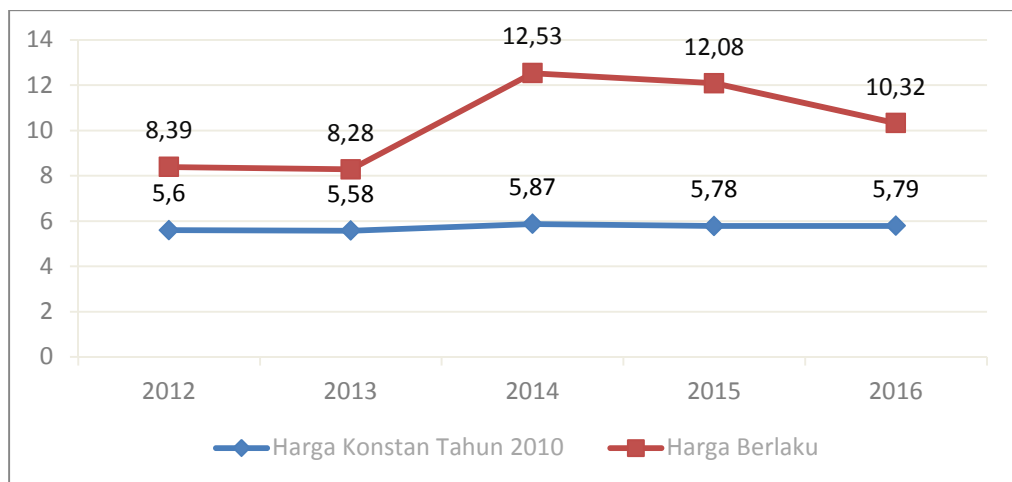
c. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bima selama periode 2012-2016 tumbuh pada kisaran angka 6-10 persen, sementara pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 dalam periode yang sama tumbuh sebesar 3-6 persen.

Tabel 2.16. PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015****	2016****
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rp)	2.062.497,35	2.177.543,21	2.305.405,52	2.438.560,78	2.579.603,57
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	2.192.206,83	2.373.685,91	2.671.111,92	2.993.901,62	3.302.931,48
Jumlah Penduduk (jiwa)	149.800	153.101	156.400	159.736	163.101
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp/jiwa/Tahun)	13,77	14,22	14,74	15,27	15,82
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp/jiwa/Tahun)	14,63	15,50	17,08	18,74	20,25

Sumber : BPS Kota Bima, 2017



Grafik 3. Pertumbuhan (%) PDRB Per Kapita Tahun 2012-2016

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kota Bima mengalami peningkatan selama periode 2011-2015. Pada tahun 2015, AMH penduduk Kota Bima sudah mencapai 96,40 persen, artinya masih terdapat kurang

dari 3,60 persen penduduk yang buta huruf. Pencapaian AMH Kota Bima ternyata merupakan pencapaian angka melek huruf penduduk tertinggi di tingkat Provinsi NTB. Angka Melek Huruf NTB mencapai 86,96 persen pada tahun 2015.

Tabel 2.17.
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bima Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	102.121	103.745	105.407	111.538	114.794
2	Angka melek huruf (%)	83,77	93,80	95,91	96,42	96,40
3	Angka buta huruf (%)	6,23	6,20	4,09	3,58	3,60

Sumber : BPS Kota Bima, 2016

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani, rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Bima selalu meningkat selama beberapa periode terakhir. Pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah Kota Bima tercatat sebesar 9,3 tahun, meningkat menjadi 10,13 tahun pada tahun 2016. Data juga menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah Kota Bima masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka Provinsi NTB yang tercatat sebesar 9,25 tahun pada periode 2016.

Tabel 2.18. Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2012-2016

Rata-Rata Lama Sekolah	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Bima	9,3	9,46	9,58	9,96	10,13
Provinsi NTB	8,61	9,04	9,04	9,05	9,25

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 2.19. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	15.461	18.075	19.259	18.702	17.379
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.715	19.154	19.151	19.154	17.577
1.3.	APM SD/MI (%)	92,49	94,37	100,56	96,66	97,88
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	7.134	9.209	9.240	9.368	9.609
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.162	7.892	7.892	7.892	9.050
2.3.	APM SMP/MTs (%)	87,40	116,69	117,08	117,52	105,12
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	8.375	11.220	10.790	10.154	11.688
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	9.302	9.572	11.433	9.572	9.960
3.3.	APM SMA/MA/SMK (%)	90,03	117,22	94,38	105,02	116,18

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017 (diolah)

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.20. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012-2016 Kota Bima

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	18.140	19.945	20.827	18.702	17.379
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.715	19.154	19.151	19.154	17.577
1.3.	APK SD/MI (%)	108,52	104,13	108,75	97,64	98,87
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	9.333	13.133	12.527	9.368	9.609
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.162	7.892	7.892	7.892	9.050
2.3.	APK SMP/MTs (%)	114,34	166,41	158,73	118,70	106,18
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa yang bersekolah di	11.623	13.621	13.616	10.154	11.688

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
	jenjang pendidikan SMA/MA/SMK					
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	9.302	9.572	11.433	9.572	9.960
3.3.	APK SMA/MA/SMK (%)	124,95	142,31	119,09	106,08	117,35

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017 (diolah)

5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Tabel 2.21. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (Orang) Tahun 2013-2016

No	Tingkat Pendidikan	Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan (Jiwa)				APT (%)			
		2013	2014	2015*)	2016*)	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI	2.730	2.710	2.813	2.949	1,74	1,66	2,04	2,12
2.	SMP/MTs	2.901	2.878	2.990	2.831	1,85	1,76	2,17	2,03
3.	SMA/MA/SMK	7.749	1.946	3.190	3.364	4,94	1,19	2,31	2,41
Jumlah Penduduk		156.820	163.337	137.851	139.366				

Ket : *) Jumlah Penduduk versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017 (diolah)

b. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kota Bima selama kurun tahun 2012–2016 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2012, AKB di Kota Bima tercatat sebesar 9,27 per 1.000 KH. Pada tahun 2014 AKB di Kota Bima turun menjadi 5,75 per 1.000 KH, dan terus turun menjadi 5,14 per 1.000 KH pada tahun 2015, akan tetapi pada tahun 2016 naik menjadi 7,42 per 1000 KH. Artinya, terjadi peningkatan angka kematian bayi di Kota Bima dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

Tabel 2.22. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kematian Bayi (Berumur <1 Tahun)			19 KSS	17 KSS	25 KSS
Jumlah Kelahiran Hidup			3.306	3.306	3.370
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	9,27	9,3	5,75	5,14	7,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2017 (diolah)

2. Angka Usia Harapan Hidup

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, AHH penduduk Kota Bima senantiasa mengalami peningkatan. AHH penduduk Kota Bima pada periode waktu 2012–2016 selalu berada di atas angka Provinsi, yang berarti rata-rata harapan hidup penduduk Kota Bima lebih tinggi dibandingkan penduduk NTB, Namun jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional masih berada dibawah angka Nasional. Pada tahun 2016, AHH penduduk Provinsi NTB meningkat menjadi 65,38 tahun dan AHH penduduk Kota Bima juga meningkat menjadi 69,35 tahun.

Tabel 2.23. Angka Harapan Hidup Kota Bima

Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
68,58	68,88	69,03	69,12	69,35

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

3. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi balita gizi buruk di Kota Bima mengalami perbaikan yang cukup signifikan selama periode 5 tahun terakhir. Hingga tahun 2016 prevalensi balita gizi buruk tercatat sebesar 0,077 persen.

Tabel 2.23. Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Bima Tahun 2016

Jenis Data	Tahun 2016
Jumlah Balita (Jiwa)	19.329
Jumlah Balita Gizi Buruk (Kasus)	15
Prevelensi Gizi Buruk (%)	0,077

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2017

c. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kota Bima selama kurun waktu 2011– 2015 menunjukkan trend yang terus menurun sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.24.
Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima
Tahun 2011– 2015

Kota Bima	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	18.146	18.069	17.362	16.412	15.312
Tingkat Kemiskinan (%)	12,60	12,35	9,91	9,74	9,85

Sumber : TKPKD Kota Bima, 2016

2.1.3. Aspek Pelayanan umum

Aspek pelayanan umum adalah semua produk pelayananan umum yang berupa bentuk barang publik sebagai bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum meliputi fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan, yang terdiri dari infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup serta layanan yang menyangkut kinerja aparatur pemerintahan

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Urusan Pendidikan

Gambaran umum kondisi layanan urusan wajib bidang pendidikan di Kota Bima akan mencakup keadaan yang meliputi tinjauan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Disamping itu juga akan mencakup tinjauan rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk, rasio guru dengan murid, rasio guru dengan murid per kelas rata-rata serta sebaran bangunan sekolah berdasarkan kecamatan.

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. APS di Kota Bima adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.25.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	15.461	18.075	19.259	18.702	17.379
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.715	19.154	19.151	19.154	17.577
1.3.	APS SD/MI	92,50%	94,37%	100,56%	97,64%	98,87%
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	7.134	9.209	9.240	9.368	9.609
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.162	7.892	7.892	7.892	9.050
2.3.	APS SMP/MTs	87,41%	116,89%	117,08%	118,70%	106,18%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2016

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Hal yang penting dalam rangka pembangunan dan pelayanan umum urusan wajib bidang pendidikan adalah mengetahui apakah bangunan sekolah yang ada sekarang telah memenuhi standar dan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah tingkat pendidikan (dasar dan menengah). Untuk itu perlu diketahui rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.26.
Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Bima Tahun 2012-2016

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	88	85	90	94	94
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.715	19.154	19.151	19.154	17.577
1.3.	Rasio	180,94	225,34	212,79	203,77	186,99
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	31	31	32	38	38
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.162	7.892	7.892	7.892	9.050
2.3.	Rasio	263,29	254,63	246,63	207,68	238,16

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2016

Dari tabel tersebut diatas bahwa penduduk usia sekolah pendidikan 7-12 tahun (SD/MI) pada 2015 perbandingan satu gedung sekolah menampung 203 orang, kemudian pada penduduk usia sekolah 13-15 tahun (SMP/MTs) perbandingan satu sekolah menampung 207 orang.

3. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.27.
Rasio Guru/Murid di Kota Bima 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	2.233	2.359	2.870	2.466	2.366
1.2.	Jumlah Murid	18.140	19.945	20.827	18.702	17.379
1.3.	Rasio	123,09	118,27	137,80	131,86	131,86
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.186	1.707	1.950	1.340	1.374
2.2.	Jumlah Murid	9.243	13.133	12.527	9.368	8.609
2.3.	Rasio	128,31	129,97	155,66	143,04	143,04

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2016

4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 28. Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-rata per 1000 Jumlah Murid di Kota Bima Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Jumlah ruang kelas jenjang SD/MI	774 ruang kelas	852 ruang kelas	768 ruang kelas	832 ruang kelas
Jumlah ruang kelas jenjang SMP/MTs	334 ruang kelas	371 ruang kelas	370 ruang kelas	408 ruang kelas
Total Jumlah ruang kelas pendidikan dasar	1.108 ruang kelas	1.223 ruang kelas	1.138 ruang kelas	1.240 ruang kelas
Jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar	4.066 orang	4.820 orang	3.806 orang	3.740 orang
Rata-rata jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas	3,67 guru/kelas	3,94 guru/kelas	3,34 guru/kelas	3,02 guru/kelas
Jumlah murid jenjang	33.078 orang	33.354 orang	28.070 orang	26.988 orang

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
pendidikan dasar				
Rata-rata jumlah murid pendidikan dasar per kelas	29,85 murid/kelas	27,27 murid/kelas	24,67 murid/kelas	21,76 murid/kelas
Rasio guru per kelas rata-rata per 1.000 jumlah murid	0,111	0,118	0,119	0,112

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , 2017

b. Urusan Kesehatan

1. Rasio Posyandu per satuan balita

Strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus khusus pada ibu dan anak dapat dilakukan pada Posyandu. Analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita perlu dilakukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pada kondisi ideal, satu Posyandu melayani 100 balita. Artinya, minimal terdapat 10 posyandu per 1000 balita.

Untuk kondisi di Kota Bima, rasio ketersediaan posyandu terhadap balita terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2014, satu posyandu telah mampu melayani 114 balita, sedangkan pada tahun 2015 peningkatan jumlah pelayanan posyandu meningkat terus, sehingga perbandingan satu posyandu hanya melayani 91 balita, artinya perbandingan rasio posyandu dengan jumlah balita telah terpenuhi.

Tabel 2.3. Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah Balita (Jiwa)
1	Kecamatan Rasanae Barat	32	4.219
2	Kecamatan Rasanae Timur	26	2.196
3	Kecamatan Mpunda	35	4.406
4	Kecamatan Raba	40	4.723
5	Kecamatan Asakota	30	3.784
	Jumlah	163	19.329

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Puskesmas adalah sarana pelayanan dasar dan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju

peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam system pelayanan kesehatan harus mampu dijangkau dan diakses oleh masyarakat secara luas dan mudah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah dengan mengetahui rasio puskesmas per 100.000 penduduk. Sampai dengan tahun 2015, puskesmas di Kota Bima adalah sejumlah 5 (lima) unit yang tersebar secara merata di 5 kecamatan dan didukung oleh 19 puskesmas pembantu.

Tabel 2.4. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Puskesmas	5	5	5	5	5
2.	Jumlah Poliklinik	n/a	n/a	3	3	3
3.	Jumlah Pustu	19	18	19	19	19
4.	Jumlah Penduduk	146.308	158.820	163.337	137.851	139.366
5.	Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	3,42	3,19	3,06	3,63	3,59
6.	Rasio Poliklinik per 100.000 penduduk	n/a	n/a	1,84	2,18	2,15
7.	Rasio Pustu per 100.000 penduduk	12,99	11,48	11,63	13,78	13,63

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Tabel 2.51. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per 10.000 Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	0	0	0	0
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah*)	0	0	0	0	0
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	0	0	0	0	0

6.	Jumlah Penduduk	146.308	156.820	163.337	137.851	139.366
7.	Rasio per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-

*) Kota Bima belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah yang ada dalam wilayah Kota Bima sekarang, masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

Sampai dengan tahun 2016, rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah berupa RSUD Bima pengelolaannya masih dibawah Pemerintah Kabupaten Bima meskipun lokasinya berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Bima. Sedangkan yang dikelola oleh swasta masih dalam bentuk klinik yaitu PKU Muhammadiyah dan Klinik Sari Farma.

4. Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.32. Jumlah Dokter di Kota Bima Tahun 2012–2016

No	Uraian	2012*)	2013**)	2014**)	2015**)	2016**)
1	Jumlah Dokter	55	60	24	26	26
2	Jumlah Penduduk	146.308	156.820	163.337	137.851	139.366
	Rasio	1 : 2.660	1 : 2.614	1 : 6.806	1 : 5.302	1 : 5.360

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017; Data BPS*) Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**), (diolah)

Tabel 2.33. Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Kecamatan Rasanae Barat	28.743	6	1 : 4.791
2	Kecamatan Rasanae Timur	16.956	5	1 : 3.391
3	Kecamatan Mpunda	28.932	5	1 : 5.786
4	Kecamatan Raba	35.826	4	1 : 8.957
5	Kecamatan Asakota	29.909	6	1 : 4.818
	Jumlah	139.366	26	1 : 5.360

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017; Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (diolah)

5. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Tabel 2.34. Jumlah Tenaga Medis di Kota Bima Tahun 2016

No.	Uraian	2016
1	Jumlah Tenaga Medis	286
2	Jumlah Penduduk	139.366
3	Rasio per 1.000 penduduk	2,05

Sumber : Dinas Kesehata, 2017

Tabel 2.35. Jumlah Tenaga Medis (Perawat, Bidan) Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis*)	Rasio per 1.000 penduduk
1	Kecamatan Rasanae Barat	28.743	59	2,05
2	Kecamatan Rasanae Timur	16.956	43	2,54
3	Kecamatan Mpunda	28.932	62	2,14
4	Kecamatan Raba	35.826	55	1,54
5	Kecamatan Asakota	29.909	67	2,32
		139.366	286	2,05

*) dikecualikan yang bertugas pada Dinas Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

c. Urusan Lingkungan Hidup

1. Persentase penanganan sampah

Dalam urusan penanganan sampah, sampai dengan akhir tahun 2016 cakupan penanganan persampahan mencapai 65,89 persen dari 38 kelurahan.

Tabel 2.36. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah sampah yang ditangani (M3)	33,21	206	64.774	47.616	268,56
2.	Jumlah volume produksi sampah (M3)	162	365,77	71.970,70	50.082,87	407,73
3.	Persentase	20,5%	56,32%	90 %	95,07%	65,87%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017

Tabel 2.37. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani (M3)	Jumlah volume produksi sampah (M3)	Persentase (%)
1	Kecamatan Rasanae Barat	56,64	89,03	65,87

2	Kecamatan Mpunda	61,23	92,96	65,87
3	Kecamatan Raba	65,65	99,67	65,87
4	Kecamatan Rasanae Timur	30,53	46,35	65,87
5	Kecamatan Asakota	52,51	79,72	65,87
Jumlah		268,56	407,73	65,87

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017

2. Persentase penduduk berakses air minum

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. Dalam bidang pelayanan air minum, penduduk Kota Bima yang memiliki akses air minum pada tahun 2016 mencapai 92,07 %.

Tabel 2.38. Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
Jumlah penduduk yang berakses air Minum (Jiwa)	137.912	141.577	150.173
Jumlah penduduk (Jiwa)	156.400	155.281	163.101
Persentase penduduk berakses air minum (%)	88,18	91,17	92,07

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017 (diolah)

Tabel 2.39. Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	
1	Kecamatan Rasanae Barat	91,18
2	Kecamatan Rasanae Timur	90,35
3	Kecamatan Mpunda	92,91
4	Kecamatan Raba	90,74
5	Kecamatan Asakota	94,76

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

3. Persentase luas permukiman yang tertata

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 2.39. Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
----	--------	------	------	------	------	------

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	luas area permukiman tertata (Ha)	1.411	1.736	1.715,52	1.694,94	1.656,61
2.	luas area permukiman keseluruhan (Ha)	1.659	1.775	1.775	1.755,13	1.804
3.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata (%)	85,05	97,80	96,65	96,57	91,83

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017

Tabel 2.40. Persentase Luas Permukiman yang Tertata Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Area Permukiman Keseluruhan	Luas Area Permukiman Tertata	Persentase
1	Kecamatan Rasanae Barat	511	438,6	85,83
2	Kecamatan Rasanae Timur	190	190	100,00
3	Kecamatan Mpunda	382	365,61	95,71
4	Kecamatan Raba	494	474,75	96,10
5	Kecamatan Asakota	227	187,65	82,67
Jumlah		1.775,13	1.656,61	91,83

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017

d. Urusan Pekerjaan Umum

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Total panjang jalan (meliputi jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten/kota) di Kota Bima hingga tahun 2016 adalah sepanjang 311,425 km. Dari total panjang jalan tersebut, jalan yang status pengelolaannya berada di Pemerintah Kota Bima adalah sepanjang 258,105 km.

Tabel 2.41. Panjang Jalan Berdasarkan Kelas di Kota Bima tahun 2016

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					Total
		Rasanae Barat	Asakota	Mpunda	Raba	Rasanae Timur	
1.	Jalan Nasional						33,13
2.	Jalan Propinsi						20,19
3.	Jalan Kabupaten/Kota	15,24	55,225	37,490	76,585	73,565	258,105
Jumlah							311,425

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang, 2017

Berdasarkan kondisi jalan yang ada, jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik sepanjang 109,055 km, kondisi sedang 60,10 km, rusak 40,69 km dan rusak berat 48,26 km. Artinya, jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik dan sedang

mencapai 65,54 persen, sedangkan sisanya sebesar 34,46 persen kondisi jalan masih kategori rusak ringan maupun rusak berat.

Tabel 2.42. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kondisi Baik	108,03	123,34	125,925	137,225	109,055
2.	Kondisi Sedang	34,51	27,94	24,150	23,880	60,10
3.	Kondisi Rusak	19,63	30,84	32,235	21,205	40,69
4.	Kondisi Rusak Berat	33,96	20,86	22,030	22,030	48,26

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang, 2017

Tabel 2.43. Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

Kondisi Jalan (Km)	Kecamatan					Jumlah
	Rasanae Barat	Asakota	Mpunda	Raba	Rasanae Timur	
Aspal	15,24	29,37	25,105	31,955	52,62	154,29
Kerikil	-	7,48	2,375	22,16	7,39	39,405
Tanah	-	18,375	10,01	22,47	13,555	64,41
Lainnya	-	-	-	-	-	-
Baik	7,76	21,020	17,685	34,18	28,41	109,055
Sedang	3,39	11,125	9,96	14,555	21,07	60,10
Rusak Sedang	2,3	8,5	5,77	12,61	11,51	40,69
Rusak Berat	1,79	14,58	4,075	15,24	12,575	48,26

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang, 2017

2. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Pada tahun 2015, rasio pelayanan jaringan irigasi di Kota Bima baru mencapai angka 24,78.

Tabel 2.44. Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2016

No	Uraian	Jaringan Irigasi (M)
1.	Jaringan primer	9.631
2.	Jaringan Sekunder	36,841
3.	Jaringan Tersier	-
4.	Luas lahan budidaya (Ha)	2.420
	Rasio	19,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang, Bidang SDA 2017

Tabel 2.45. Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan tahun 2016 Kota Bima

No.	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi (M)			Total Panjang Jaringan Irigasi (M)	Luas lahan budidaya (Ha)	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	Rasanae Barat	-	-	-	-	-	-
2	Mpunda	320	3.380	-	3.700	100	37
3	Raba	3.337	7.340	-	10.685	775	13,78
4	Rasanae Timur	4.513	19.394	-	23.907	1.240	19,28
5	Asakota	1.461	6.719	-	8.180	305	26,82
	Kota Bima	9.631	36.841	-	46.472	2.420	19,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang SDA, 2017

Didalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini efisiensi teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Sedangkan efektifitas ditunjukkan oleh indeks luas areal (IA).

Tabel 2.46. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2016

No	Pasokan Irigasi	Tahun 2016
1.	Pasok Irigasi per Area	0,59
2.	Pasok Irigasi Relatif	0,18
3.	Pasok Air Relatif	1,36
4.	Indek Luas Areal	97,91
5.	Rancangan Luas Areal	2.420

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang SDA, 2017

Tabel 2.47. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Rancangan (Ha)	Luas Lahan Terairi (Ha)	Kebutuhan Air Tanaman (Ha)	Pasok Air Irigasi (lt/ dtk)	Pasok Air Irigasi Total (lt/ dtk)	Total Pasok Air (lt/ dtk)	PIA (lt/ dtk/ha)	PIR (lt/ dtk/ha)	PAR (lt/ dtk/ha)	IA (%)
1	Rasanae Barat	Tidak terdapat daerah irigasi									
2	Mpunda	100	95	1,66	184,64	75,34	0,75	0,18	1,65	1,65	95,00
3	Raba	775	759	1,53	1.114,35	463,55	0,56	0,15	1,36	1,36	97,94
4	Rasanae Timur	1.240	1.240	2,14	1.546,44	352,72	0,48	0,05	0,72	0,72	100
5	Asakota	305	301	1,32	432,14	243,33	0,55	0,24	1,70	1,70	98,69

Kota Bima	2.420	2.359	6,65	3.277,5 7	1.134,9 4	0,59	0,18	0,36	1,36	97,9 1
-----------	-------	-------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	-----------

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang SDA, 2017

3. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Tabel 2.48. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2016

No	Bangunan tempat Ibadah	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1.	Masjid (Tampa Langgar/Mushola)	142	137.284	1,03
2.	Gereja	5	1.811	2,76
3.	Pura	3	236	12,71
4.	Vihara	0	35	0
Jumlah		152	139.366	1,09

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Bima, 2017

Tabel 2.49. Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Masjid			Gereja			Pura			Vihara		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1	Rasanae Barat	24	27.683		2	988		1	41		0	31	
2	Rasanae Timur	25	16.946		-	8		1	2		0	0	
3	Mpunda	31	28.462		-	344		0	100		0	3	
4	Raba	31	35.495		2	269		0	62		0	0	
5	Asakota	31	28.698		1	202		1	31		0	1	
Jumlah		142	137.284		5	1.811		3	236			35	

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Bima, 2017

4. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, yaitu fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), dan pembuangan sampah.

Tabel 2.50. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Bima Tahun 2015-2016

No	Uraian	2015	2016
1.	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	30.695	31.868
2.	Jumlah rumah tinggal	39.020	39.854
3.	Persentase (%)	78,66	79,96

Sumber : Dinas Perumahan dan kawasan permukiman, 2017

5. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk

keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Tabel 2.51. Tempat Pemakaman Umum Tahun 2016

No	Kecamatan	Tempat pemakaman umum (TPU)		Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)		Tempat pemakaman khusus (TPK)		Lain-Lain		Jumlah Total	
		Jmlh	Daya tampung	Jmlh	Daya tampung	Jmlh	Daya tampung	Jmlh	Daya tampung	Tmpt Pemakaman	Daya tampung
1.	Rasanae Barat	15	9.342	-	-	2	525	-	-	17	9.867
2.	Rasanae Timur	25	20.564	-	-	-	-	-	-	25	20.564
3.	Mpunda	19	15.203	-	-	-	-	-	-	19	15.203
4.	Raba	11	9.985	-	-	1	250	-	-	12	10.235
5.	Asakota	17	9.550	-	-	-	-	-	-	17	9.550
	Jumlah	87	64.644	-	-	3	775	-	-	90	65.419

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017

c. Urusan Perumahan

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

1. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.52. Jumlah Rumah Layak Huni Kota Bima Tahun 2014-2016

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Jumlah rumah	33.984	34.444	34.564
	- Layak huni	31.829	31.521	30.720
	- Tidak layak huni	2.955	2.923	3.844

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017

2. Rasio permukiman layak huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman. Adapun luas areal permukiman tertata tahun 2016 adalah seluas 1.656,64 Ha dan luas areal permukiman tahun 2016 adalah 1.804 Ha.

$$\text{Rasio permukiman layak huni Kota Bima 2016} = \frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} = \frac{1.656,64 \text{ Ha}}{1.804 \text{ Ha}} = 0,92\%$$

3. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Daya tampung TPS dihitung dengan satuan Ton. Dengan menggunakan konversi maka 1 ton setara dengan 3 M3.

Tabel 2.53. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016

No	Uraian	Tahun 2016
1.	Jumlah TPS	58 unit
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (Ton)	135,33 Ton
3.	Jumlah Penduduk	139.366
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,97

Ket : Data TPS yaitu Tempat Pembuangan Sementara yang berupa Kontainer yang ditempatkan di masing-masing lokasi.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017 (diolah)

Tabel 2.54. Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS		Rasio (Per 1000 Penduduk)
			Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (Ton)	
1.	Rasanae Barat	28.743	13	30,33	1,06
2.	Mpunda	28.909	13	30,33	1,05
3.	Raba	35.826	14	32,67	0,91
4.	Rasanae Timur	16.956	7	16,33	0,96

5.	Asakota	28.932	11	25,67	0,89
Jumlah		139.366	58	135,33	0,97

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017(diolah)

f. Urusan Penataan Ruang

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang seperti tertuang pada pasal 3 disebutkan bahwa bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara danKetahanan Nasional. Penyelenggaraan penataan ruang tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan.

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Tabel 2.55. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Tahun 2015-2016

No.	Uraian	2015	2016
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	21.868,07	21.868,07
2.	Luas Wilayah ber HPL/HGB (Ha)	20.449,95	20.449,95
3.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (%)	1,069	1,069

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang, 2017

Tabel 2.56. Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah ber HPL/HGB (Ha)	Luas RTH (Ha)	Rasio RTH
1.	Kecamatan Rasanae Barat	928,21	13.564	14,613
2.	Kecamatan Mpunda	1.371,66	173,76	0,126
3.	Kecamatan Raba	5.506,58	61,27	0,011
4.	Kecamatan Rasanae Timur	5.807,48	4.035,6	0,694
5.	Kecamatan Asakota	6.836,02	4.033,4	0,590
Jumlah		20.449,95	21.868,07	1,069

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang, 2017

2. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada.

Tabel 2.57. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	1.007	1.119	1.331	1.605	274
2.	Jumlah Bangunan	33.668	33.342	33.788	34.444	34.474
	Rasio bangunan ber-IMB (1/2)	0,030	0,034	0,039	0,047	0,058

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang, 2017

Tabel 2.58. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan ber-IMB	Rasio bangunan ber-IMB
1.	Kecamatan Rasanae Barat	6.354	483	0,076
2.	Kecamatan Mpunda	7.453	603	0,081
3.	Kecamatan Raba	9.084	429	0,0047
4.	Kecamatan Rasanae Timur	4.569	144	0,0032
5.	Kecamatan Asakota	7.014	349	0,0050
	Jumlah	34.474	2.008	0,0058

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang, 2017

g, Urusan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi bagian dari system perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana kerja (Renja) SKPD. Oleh

karena itu ketersediaan dokumen maupun konsistensi antar dokumen perencanaan tersebut menjadi ukuran penting dalam pelaksanaan urusan wajib bidang perencanaan pembangunan ini.

h. Urusan Perhubungan

Prasarana perhubungan yang terdapat di Kota Bima sampai dengan tahun 2015 terdiri dari 1 pelabuhan laut dan 3 terminal.

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum.

Jumlah penumpang angkutan umum di Kota Bima selama periode tahun 2011 – 2015 terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di mana pada tahun 2011 jumlah penumpang sebanyak 911.352 jiwa naik menjadi 1.038.560 jiwa pada tahun 2015 yang terdiri dari 991.265 jiwa penumpang Bus AKAP dan 47.295 jiwa jumlah penumpang kapal laut.

Tabel 2.59. Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penumpang Bis	899.352	Na	991.265	2.896.350	2.820.000
2.	Jumlah penumpang Kapal laut	12.000	39.413	47.295	60.795	540.000
Total Jumlah Penumpang		911.352	39.413	1.038.560	2.957.145	3.360.000

Sumber : Dinas Perhubungan,, 2017

2. Rasio ijin trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

Tabel 2.60. Rasio Ijin Trayek Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Izin Trayek perkotaan	85	126	126	247	247
2.	Izin Trayek perdesaan	-	49	49	63	223
3.	Jumlah Izin Trayek	85	175	175	310	470
4.	Jumlah penduduk	146.308	156.820	163.337	137.851	139.366
5.	Rasio Izin Trayek	0,000581	0,001116	0,001071	0,002249	0,003372

Sumber : Dinas Perhubungan , 2017 (diolah)

3. Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- a. uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- b. uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Tabel 2.61. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Angkutan Umum	Jumlah KIR				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Mobil penumpang umum	70	357	80	91	360
2.	Mobil bus	68	136	86	107	138
3.	Mobil barang	593	1.242	818	895	920
Jumlah		731	1.735	984	1.093	1.418

Sumber : Dinas Perhubungan , 2017

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Tabel 2.62. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Bima Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pelabuhan laut	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	2
Jumlah		4	4	4	4	3

Sumber : Dinas Perhubungan,, 2017

i. Urusan Pertanahan

Prosentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Tabel 2.63. Luas Lahan Bersertifikat (Ha) Kota Bima Tahun 2016

No	Uraian	2016
1.	Luas wilayah daratan	437.465
2.	Luas tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)	1.232
3.	Luas tanah bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU)	-
4.	Luas tanah bersertifikat Hak Milik	31.415
5.	Luas tanah bersertifikat Hak Pakai	0,685
Total luas tanah bersertifikat		437.498,33
6.	Persentase HGB dibanding luas daratan	0,000000028
7.	Persentase HGU dibanding luas daratan	-
8.	Persentase Hak Milik dibanding luas daratan	0,000000718
9.	Persentase Hak Pakai dibanding luas daratan	0,000000016
Persentase total luas tanah bersertifikat		0,000000762

Sumber : Kantor BPN Kota Bima, 2017

Prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.

j. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan. Tingkat Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah karena berkaitan dengan daya tarik investor untuk berinvestasi. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga bisa menjadi beban bagi pemerintah daerah apabila tidak bisa diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai.

Tabel 2.64.

Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah(km ²)	Kepadatan
1	Rasanae Barat	32.421	10,14	3.197
2	Mpunda	32.141	15,28	2.103
3	Raba	40.145	63,73	630
4	Rasanae Timur	18.839	64,07	294
5	Asakota	31.735	69,03	460
Jumlah se-Kota Bima		162.752	155.281	222,25

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, 2015

2. Pengelompokan Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan (penduduk laki-laki dibagi penduduk perempuan dikali 100 persen). Dari rumusan tersebut dapat diketahui distribusi penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah.

Tabel 2.65. Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur di Kota Bima Tahun 2012-2016

Kelompok Umur	2012 ^{*)}	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}	2015 ^{**)}	2016 ^{**)}
0-4	7.106	7.233	5.689	5.178	5.237
5-9	6.886	7.009	7.296	6.584	6.223
10-14	6.703	6.823	7.504	6.821	6.637
15-19	7.608	7.744	6.915	6.611	5.242
20-24	8.750	8.907	7.276	6.894	5.886
25-29	6.981	7.106	8.422	7.659	6.072
30-34	6.001	6.109	8.086	7.630	6.727
35-39	5.236	5.330	6.810	6.362	5.837
40-44	4.526	4.607	5.468	5.346	5.367
45-49	3.937	4.008	4.871	4.761	4.497
50-54	3.119	3.175	3.776	3.734	3.771
55-59	2.261	2.302	2.977	3.230	2.989
60-64	1.642	1.671	2.258	2.112	2.148
65-69	1.316	1.340	1.613	1.720	1.534
70-74	932	949	1.078	1.177	1.084
75+	1.392	1.417	1.230	1.426	1.039
Jumlah	74.397	75.730	81.269	77.723	70.209

Sumber : ^{*)} BPS Kota Bima, 2014

^{**)} Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, 2017

Tabel 2.66. Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur di Kota Bima Tahun 2012-2016

Kelompok Umur	2012 ^{*)}	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}	2015 ^{**)}	2016 ^{**)}
0-4	7.591	7.679	6.077	5.662	5.559
5-9	7.254	7.355	7.945	7.087	6.798
10-14	7.023	7.121	7.683	7.151	7.031
15-19	7.448	7.552	7.325	6.780	5.125
20-24	7.298	7.400	7.379	7.135	5.799
25-29	6.695	6.789	8.209	7.493	5.946
30-34	5.674	5.753	7.888	7.347	6.396
35-39	5.179	5.251	6.549	6.135	5.426
40-44	4.283	4.343	5.387	5.222	5.030
45-49	3.666	3.717	4.603	4.455	4.253
50-54	3.030	3.072	3.745	3.508	3.436
55-59	2.184	2.215	2.873	3.135	2.782

Kelompok Umur	2012*)	2013*)	2014**)	2015**)	2016**)
60-64	1.515	1.536	2.247	2.066	2.102
65-69	1.191	1.208	1.449	1.576	1.404
70-74	795	806	1.027	1.074	978
75+	1.085	1.100	1.097	1.259	1.011
Jumlah	71.911	72.915	81.483	77.588	69.076

Sumber : *) BPS Kota Bima, 2014 **) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, 2017

Tabel 2.67. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis kelamin
Rasanae Barat	14.226	14.517	28.743	98,00
Mpunda	14.258	14.674	28.932	97,17
Raba	17.667	18.159	35.826	97,29
Rasanae Timur	8.364	8.592	16.956	97,35
Asakota	14.561	14.348	28.909	101,48
Jumlah Total	69.076	70.290	139.366	98,27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, 2017

3. Pengelompokan Penduduk berdasarkan persebaran penduduk/geografis

Tabel 2.68. Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Bima Menurut Luas wilayah Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah(km ²)	Kepadatan
1	Rasanae Barat	28.743	10,14	2.835
2	Mpunda	28.932	15,28	1.893
3	Raba	35.826	63,73	562
4	Rasanae Timur	16.956	64,07	265
5	Asakota	28.909	69,03	419
	Jumlah se-Kota Bima	139.366	222,25	627

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, 2017

4. Pengelompokan Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.69.
Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 2016

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah	Persentase(%)
1	Tidak punya ijazah SD	51.516	36,97
2	SD/MI sederajat	16.780	12,04
3	SMP	15.965	11,46
4	SMA	40.595	29,13

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah	Persentase(%)
5	Perguruan tinggi	14.510	10,41
Jumlah		139.366	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016

5. Pencatatan Sipil

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan KTP, KK, dan Akte lahir.

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Tabel 2.70. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2016

Uraian	Jumlah
Jumlah Penduduk keseluruhan	139.366
Jumlah Penduduk Wajib KTP	97.107
Jumlah Penduduk Pemegang e-KTP	92.852
Jumlah Penduduk Pemegang KTP Manual (non e-KTP)	-
Total Penduduk ber-KTP	92.852
Kepemilikan KTP (%)	66,62
Jumlah Penduduk ber-akte lahir	52.359
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk (%)	375,69

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, 2017

k, Ketenagakerjaan

1. Angkatan Kerja (*labor force*)

Tabel 2.71. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA			
	Bekerja	38.912	30.802	69.063
	Pengangguran	5.474	2.330	7.804
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	43.735	33.132	76.867
2	BUKAN ANGKATAN KERJA			
	Sekolah	5.293	6.316	11.609
	Mengurus RT	3.970	18.596	22.566

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Lainnya	2.443	1.203	3.646
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	11.706	26.115	37.821
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)	55.441	59.247	114.688
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	69,01	51,99	60,22
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	12,52	7,03	10,15

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2017 (diolah)

Tabel 2.72. Penduduk Angkatan Kerja Kota Bima Tahun 2016

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
15-19	2.882	574	3.456
20-24	9.471	950	10.421
25-29	9.582	747	10.329
30-34	9.697	1.076	10.773
35-39	8.986	881	9.867
40-44	8.105	917	9.022
45-49	5.738	996	6.734
50-54	5.180	704	5.884
55-59	4.130	625	4.755
60-64	5.292	334	5.626
Total	69.063	7.804	76.867

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2017

2. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari Persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bima Tahun 2016 :

$$= \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 = \frac{7.804}{76.867} \times 100 = 10,15\%$$

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan akan mencakup tentang partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta dan kekerasan dalam rumah tangga.

Disamping itu juga yang terkait dengan perlindungan anak akan berkaitan dengan jumlah pekerja anak.

1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Bima pada tahun 2013 adalah sebesar 2.353 jiwa dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 2.331 jiwa dan meningkat kembali menjadi 2.523 pada tahun 2015. Namun jika dilihat dari persentasenya terjadi penurunan selama tahun 2013 – 2015.

Tabel 2.73. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2.353	2.331	2.523	2.294
2	Jumlah pekerja perempuan	4.506	4.628	5.027	5.108
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	52,22	50,37	50,19	44,91

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.

Tabel 2.74. Rasio KDRT di Kota Bima Tahun 2014-2016

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	2016
1	Jumlah KDRT	8	18	28
2	Jumlah Rumah Tangga	32.536	34.974	32.668
3	Rasio KDRT	0,25	0,51	0,86

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

3. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Tabel 2.75.

Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2015

NO	Kecamatan	Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun	Jumlah Pekerja Usia 5 Tahun Keatas	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur
1	Rasanae Barat	16	4.247	0,38
2	Mpunda	40	4.616	0,87
3	Raba	367	3.981	9,22

NO	Kecamatan	Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun	Jumlah Pekerja Usia 5 Tahun Keatas	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur
4	Rasanae Timur	217	2.019	10,75
5	Asakota	17	3.617	0,47
	Jumlah	657	18.480	3,56

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016

m. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan keluarga berencana dan keluarhga sejahtera tidak akan terlepas dari penyelenggaraan program keluarga berencana (KB) denagn tujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang terkenal dengan jargon 2 (dua) anak cukup. Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka mengetahui rata-rata jumlah anak per keluarga menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengukur keberhasilan program KB.

1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Tabel 2.76.

Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kota Bima Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah anak	45.161	56.812	57.664	35.879	82.471
2	Jumlah keluarga	31.399	31.870	33.464	34.457	34.980
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,43	1,78	1,72	1,01	2,4

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 2016

2. Rasio akseptor KB

Tabel 2.77.

Rasio Akseptor KB di Kota Bima Tahun 2011- 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah akseptor KB	20.369	21.974	20.026	18.629	21.336
2	Jumlah pasangan usia subur	24.290	26.023	26.013	24.812	26.309
3	Rasio akseptor KB	83,86	84,44	76,98	75,08	81,20

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 2015

n. Urusan Sosial

Penyelnggaran urusan sosial akan berkaitan erat dengan penanganan masalah sosial seperti pemberian perlindungan kepada PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial) dan penyandang disabilitas. Pembangunan Sosial yang

dilaksanakan di Kota Bima tampaknya sudah semakin meningkat. Secara umum derajat kesejahteraan masyarakat sudah mengalami peningkatan kearah yang lebih baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 2.78.
Pelayanan Umum Urusan Sosial di Kota Bima Tahun 2013 – 2015

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	2013	2014	2015
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:				
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	1 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	42	44	70
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	3	6	3
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:				
	a. Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota	3 Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	46	38	100
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4 Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	0	0	0
3	Penanggulangan korban Bencana:				
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100
	b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota	6 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	0

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	2013	2014	2015
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:				
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7 Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	32	40

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2015

o. Urusan Koperasi dan UKM

Koperasi dan UKM di Kota Bima merupakan pilar pembangunan ekonomi lokal karena memiliki daya tahan yang baik menghadapi berbagai krisis ekonomi. Oleh karena itu pembangunan koperasi dan UKM menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2013 – 2018. Berikut disajikan beberapa aspek terkait pembangunan urusan koperasi dan UKM di Kota Bima.

1. Presentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Jumlah koperasi aktif di Kota Bima selama periode 2012-2016 belum mengalami perkembangan yang berarti. Meskipun jumlah koperasi mengalami penambahan jumlah setiap tahun, namun data menunjukkan bahwa jumlah koperasi yang aktif mengalami perkembangannya fluktuas dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.79.

Persentase Koperasi Aktif di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah koperasi aktif	97	78	72	73	93
2	Jumlah koperasi	142	144	144	163	173
3	Persentase koperasi aktif	68,31	55,71	50,00	44,79	53,76

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2016

2. Jumlah UKM non BPR/LKM

Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) 2016 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015, dimana pada 2016 jumlahnya mencapai 6.303 unit. Adapun jumlah UKM non BPR/LKM pada tahun 2016 sejumlah 6.227 unit.

Tabel 2.80.
Jumlah UKM non BPR/LKM di Kota Bima Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah seluruh UKM	1874	897	3.535	4.599	6.303
2	Jumlah UKM non BPR/LKM	760	760	3.215	4.070	6.227

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2016

p. Urusan Penanaman Modal

Pelayanan umum bidang penanaman modal pada dasarnya mencakup keadaan jumlah investasi di daerah baik yang berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Hingga saat ini Pemerintah Kota Bima terus mengupayakan peningkatan pelayanan bidang penanaman modal.

q. Urusan Kebudayaan

Salah satu indikator pencapaian pembangunan kebudayaan di Kota Bima dapat dilihat berdasarkan jumlah grup kesenian yang ada. Jumlah grup kesenian/sanggar seni di Kota Bima pada tahun 2015 adalah sebanyak 40 unit, mengalami peningkatan yang signifikan dibanding dengan jumlah grup kesenian pada tahun 2010 yang hanya berjumlah 25 unit. Sedangkan organisasi Dewan Kesenian yang mewadahi kreatifitas seni dan budaya di Kota Bima telah dibentuk dan memiliki sekretariat yang baik. Hanya saja sampai tahun 2015 di Kota Bima belum ada Gedung Kesenian atau Gedung Budaya. Selama ini kegiatan seni dan budaya lebih banyak memanfaatkan Museum ASI Mbojo yang merupakan Istana Kesultanan Bima.

r. Urusan Kepemudaaan dan Olahraga

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda maupun organisasi olahraga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Jumlah lapangan olah raga di Kota Bima tahun 2015 sebanyak 72 (tujuh puluh dua)

dan 2 (dua) gelanggan olah raga. Sedangkan organisasi pemuda berjumlah 9 (Sembilan) dan organisasi olah raga sejumlah 17 (tujuh belas).

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.81. Rasio Jumlah Polisi Pamong Prajadi Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah polisi pamong praja	58	58	68	68	117
2.	Jumlah penduduk	146.308	158.820	163.337	137.851	139.366
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	3,96	3,70	4,16	4,93	8,40

Sumber : Sat. Pol. PP, 2017

2. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.

Tabel 2.82.

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk di Kota Bima Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Linnmas	70	70	70	70	70
2.	Jumlah penduduk	144.018	146.308	148.645	155.281	162.752
3.	Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk	0,00049	0,00048	0,00047	0,00045	0,00043

Sumber : Badan Kesbanglinmas Kota Bima, 2015

3. Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan

Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah kelurahan. Pada tahun 2016, di Kota Bima terdapat 237 poskamling yang tersebar di 38 kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemda

dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

Tabel 2.83. Rasio Pos Siskamling di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Poskamling	165	161	183	185	237
2	Jumlah Kelurahan	38	38	38	38	38
	Rasio Poskamling Per Kelurahan	4,34	4,24	4,82	4,87	6,24

Sumber : Sat. Pol. PP, 2017

t. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Kota Bima adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai salah satu ujung tombak pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dan pada tahun 2014 dan 2015 Kota Bima telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku eksternal auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap penyajian laporan keuangan Kota Bima. Opini WTP Tahun 2016 dan 2015 sekaligus mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh sejak tahun 2014.

u. Urusan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya.

v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa difokuskan pada upaya pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan peningkatan partisipasi dalam perencanaan maupun pembangunan, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi produktif

Di Kota Bima sudah terbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di 38 kelurahan. Sementara LSM yang aktif yang mendaftar/melaporkan masih sangat sedikit yaitu 5 LSM pada tahun 2015 sesuai dengan data yang terdapat di Bakesbangpol Kota Bima.

w. Urusan Statistik

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka perumusan kebijakan dan perencanaan harus didukung dan berdasarkan data dan informasi statistik yang akurat. Data dan informasi statistik yang akurat akan dapat diperoleh bila system statistik dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional maupun daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa statistik memiliki arti penting bagi upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan disegenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Urusan statistik di Kota Bima dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan data/informasi/statistik daerah. Pelaksanaan urusan statistik ini mencakup pengembangan data statistik daerah, pengelolaan system informasi pembangunan daerah, pengembangan profil daerah dan pengembangan data-data bagi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

x. Urusan Kearsipan

Pembangunan kearsipan daerah berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip autentik, utuh, terpercaya dan mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi semua organisasi kehidupan. Penetapan sistem kearsipan ini meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam sistem kearsipan daerah meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Pelaksanaan urusan kearsipan di Kota Bima dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

y. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah jaringan komunikasi

Pada tahun 2016 jumlah jaringan telepon genggam sebanyak 51 unit, mengalami kenaikan dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2015 yang hanya 46 unit.

Tabel 2.84. Jaringan Komunikasi Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah jaringan telepon genggam	31	46	46	51
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	n/a	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017 (diolah)

2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel atau warung telekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Selama periode lima tahun terakhir, jumlah wartel di Kota Bima cenderung menurun. Hal sebaliknya justru tampak pada perkembangan jumlah warnet yang mengalami peningkatan jumlah.

Tabel 2.85. Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2015-2016

No	Kecamatan	Tahun 2015					Tahun 2016				
		Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio wartel	Rasio warnet	Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio wartel	Rasio Warnet
1.	Rasanae Barat	28.849	2	3	0,07	0,10	28.743	-	4	-	0,14
2.	Mpunda	27.358	2	4	0,07	0,15	28.932	-	5	-	0,17
3.	Raba	36.067	3	5	0,08	0,14	35.826	-	5	-	0,14
4.	Rasanae Timur	16.979	-	-	-	-	16.956	-	3	-	18
5.	Asakota	28.598	-	-	-	-	28.909	-	2	-	0,07
	Jumlah	137.851	7	12	0,05	0,09	139.366	-	19	-	0,14

Sumber : Dinas Komunkasi dan Informatika, 2017 (diolah)

3. Jumlah surat kabar nasional/lokal

Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Secara umum jumlah surat kabar terbitan nasional maupun terbitan lokal yang masuk di Kota Bima mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2016 jumlah surat kabar di Kota Bima sebanyak 47 jenis.

Tabel 2.86. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Bima Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun 2013	2014	2015	2016
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	1	1	1	2
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	10	10	24	45
3	Total jenis surat kabar (1+2)	11	11	25	47

Sumber : Dinas Komunkasi dan Informatika, 2017

4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah.

Tabel 2.87. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penyiaran radio lokal	5	4	4	4
2	Jumlah penyiaran radio	-	1	1	1

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
	nasional				
3	Jumlah penyiaran TV lokal	1	1	1	1
4	Jumlah penyiaran TV nasional	-	1	1	1
5	Total penyiaran radio/TV lokal	6	7	7	7

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

z. Perpustakaan

1. Jumlah perpustakaan

Tabel 2.88. Jumlah Perpustakaan di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	651
3.	Jumlah Perpustakaan milik SKPD pemerintah	-	-	-	-	206
4.	Total Perpustakaan (1+2+3)	1	1	1	1	858

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2017

2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Tabel 2.89. Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	2.304	1.656	2.075	2.404	3.874
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	-
3.	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	2.304	1.656	2.075	2.404	3.874

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2017

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

1. Luas lahan pertanian

Sektor pertanian masih menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk di Kota Bima. Namun, seiring dengan makin berkembangnya Kota Bima sebagai pusat pelayanan wilayah, alih fungsi lahan-lahan pertanian produktif terutama di kawasan pusat kota menjadi kawasan permukiman baru pun tidak terhindarkan. Lahan pertanian yang kian menyempit dengan banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan, juga berdampak pada kontribusi hasil pertanian di Kota Bima.

Sebagai lahan untuk bercocok tanam komoditas pertanian, lahan sawah terbagi menjadi sawah dengan irigasi teknis, dengan luas 2.030 ha dan sawah tadah hujan dengan luas 241 ha. Lahan sawah terbesar terdapat di Kecamatan Rasanae Timur dan di Kecamatan Raba.

Tabel 2.90.
Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Irigasi di Kota Bima Tahun 2015

Jenis Pengairan	Luas Sawah (Ha)					
	Rasanae Barat	Mpunda	Rasanae Timur	Raba	Asakota	Kota Bima
1. Irigasi Teknis	3	320	814	647	246	2.030
2. Tadah Hujan	-	-	153	58	30	241
3. Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
4. Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
Total Tahun 2015	3	320	967	705	276	2.271
Total Tahun 2014	3	321	968	706	246	2.244

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Peternakan Kota Bima, 2015

Pada umumnya luasan sawah di Kota Bima terus mengalami tren penurunan pada setiap tahunnya. Seiring dengan berkurangnya luas sawah, terjadi pula pergeseran dalam pola tanam padi oleh petani di Kota Bima. Luas sawah dengan frekuensi penanaman padi 3 kali setahun cenderung berkurang, sementara luas sawah dengan penanaman 2 kali dan sekali setahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan berkurangnya luas sawah yang terjadi hamper pada semua kecamatan baik lahan sawah dengan irigasi teknis maupun sawah tadah hujan, sehingga berdampak pula dengan menurunnya frekuensi jumlah penanaman padi pada lahan sawah tersebut.

2. Pertanian Tanaman Pangan

Komoditas pertanian yang utama di Kota Bima meliputi padi, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi-ubian. Wilayah pertanian di Kota Bima terkonsentrasi di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Raba dan Rasanae Timur. Lahan pertanian di dua kecamatan ini masih luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Lahan pertanian yang kian menyempit dengan banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan, juga berdampak pada kontribusi hasil pertanian di Kota Bima.

Tabel 2.91.
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Bima Tahun 2015

Jenis Data	Komoditas							
	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kacang Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi kayu	Ubi Jalar
1. Luas Panen (Ha)	4.907	2.504	724	1.483	9	245	120	8
2. Produksi (Ton)	32.130	9.837	3.747	2.049	10	319	3.372	95
3. Produktivitas (Kw/Ha)	65,54	39,29	51,88	13,82	11,25	13,02	281	118,75

Sumber : SIPD Kota Bima, 2015

Luas panen padi sawah di Kota Bima tahun 2015 seluas 4.907 Ha dengan produksi gabah sebesar 32.130 ton. Total luas panen tanaman jagung pada tahun 2015 adalah seluas 724 Ha. Hasil produksi komoditas jagung cukup tinggi di banding komoditas lain yang besarnya mencapai 3.747 ton. Komoditas tanaman pangan lain yang cukup besar kontribusinya adalah kacang kedelai. Total luas panen kacang kedelai adalah 1.483 Ha dengan total produksi sebesar 2.049 ton.

b. Kehutanan

Sub sektor kehutanan mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam penyediaan pangan (*food production*), juga sebagai penjagaan terhadap keseimbangan tata guna air, iklim mikro dan menjaga keanekaragaman hayati. Menurut fungsinya, kawasan hutan yang ada di Kota Bima terbagi menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas dan enclave. Hingga tahun 2015, hutan produksi terbatas merupakan kawasan hutan yang paling luas yaitu mencapai 1.926,89 Ha (41%), kemudian diikuti oleh hutan produksi seluas 1.787,61 Ha (38%), hutan lindung dengan luas 1.006,75 Ha (21%) dan enclave seluas 13,51 Ha. Dari luasan hutan tersebut, 44 persen merupakan kawasan hutan Maria, kemudian 37 persen adalah

kawasan hutan Nanganae, dan sisanya sebesar 19 persen merupakan kawasan hutan Donggomasa.

c. Kelautan dan Perikanan

Posisi geografis Kota Bima yang berada di Teluk Bima menjadikan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk terutama di wilayah pesisir. Produksi perikanan dibagi menjadi perikanan tangkap dan budidaya, di mana pada tahun 2015 produksi ikan mencapai 2.160,30 ton. Produksi perikanan tangkap yang bersumber dari laut mencapai 1.630,50 ton atau mencapai 78 persen, sedangkan produksi perikanan budidaya sebagian besar dihasilkan dari tambak yang mencapai 274 ton. Selengkapny produksi ikan di Kota Bima pada tahun 2015 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.92.
Produksi Ikan Menurut Sub Sektor dan Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015

Kecamatan	Perikanan Budi Daya (Ton)			Perikanan Tangkap (Ton)			Jumlah Seluruh
	Tambak	Kolam/ Karamba	Jumlah	Laut	Perairan Umum	Jumlah	
1. Rasanae Barat	226,3	49,40	275,4	682,20	7,0	654,20	837,80
2. Mpunda	-	88,00	88,00	-	8,5	3,50	51,50
3. Rasanae Timur	-	146,00	146,00	-	9,6	4,60	100,60
4. Raba	-	92,80	92,80	-	9,6	3,60	56,40
5. Asakota	271	64,00	64,00	998,30	13,1	980,40	1.114,00
Jumlah	498,2	478,5	976,7	1.680,50	32,8	1.712,6	2.689,3

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, 2015

d. Energi dan Sumber daya mineral

Kota Bima memiliki potensi bahan galian berupa batu marmer, andesit dan lain-lain yang cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal. Pengolahan bahan galian tersebut di Kota Bima saat ini masih tradisional dengan menggunakan peralatan tradisional seperti linggis dan martil sebagai bahan pemecah batu. Sedangkan dari segi pemanfaatan hanya digunakan sebagai bahan batu belah dan bahan bangunan/konstruksi lainnya seperti dalam pembangunan jalan dan pondasi gedung/rumah. Dengan pertimbangan kelayakan usaha dan prospek bisnis di bidang pertambangan ini, maka Pemerintah Kota Bima saat ini terus berupaya turut serta dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertambangan khususnya pengolahan dan pemanfaatan bahan galian.

Ketersediaan energi yang memadai berperan penting dalam pembangunan kota, karena berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian dan penduduknya. Ketersediaan akses energi yang memadai menjadikan daerah Kota Bima cukup potensi sebagai daerah tujuan investasi sehingga akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebutuhan ketenagalistrikan di Kota Bima dipasok oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yaitu PLTD Raba dan PLTD Ni'u. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, saat ini sedang dibangun PLTU di Bonto, Kelurahan Kolo yang akan memasok kebutuhan listrik Kota Bima dan kabupaten/kota sekitarnya.

e. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki posisi penting dalam perekonomian Kota Bima. Kegiatan perdagangan di Kota Bima tidak hanya melayani kebutuhan penduduk lokal, tapi juga bagi penduduk wilayah sekitarnya. Ketersediaan infrastruktur yang menunjang sektor perdagangan, seperti pelabuhan dan pusat perdagangan menjadikan Kota Bima menjadi pusat arus distribusi barang dan jasa. Jenis sarana perdagangan di Kota Bima pada tahun 2015 meliputi: 6 unit pasar umum, 457 unit toko, 481 unit kios/warung, 51 unit rumah makan.

Adapun perkembangan perusahaan perdagangan di Kota Bima menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, pada tahun 2015 tercatat 2.409 perusahaan perdagangan yang ada di Kota Bima, dengan rincian 57 perusahaan perdagangan besar, 171 perusahaan perdagangan menengah, dan 2.181 perusahaan perdagangan kecil. Kawasan perdagangan di Kota Bima terdapat di Kecamatan Rasanae Barat, di mana di kawasan ini terdapat Pasar Raya, dan kawasan pertokoan. Skala pelayanan kawasan perdagangan di Kecamatan Rasanae Barat adalah skala regional. Selain itu kawasan perdagangan juga terdapat di Kecamatan Raba, yaitu dengan adanya Pasar Raba, Pasar Penaraga dan Pasar Kumbe. Kemudian di Kecamatan Asakota terdapat Pasar Jatibaru, namun skala pelayanannya masih lokal dan terbatas pada wilayah sekitar pasar tersebut.

f. Industri

Pembangunan industri di Kota Bima bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang dan kuat guna menciptakan landasan perekonomian yang

kokoh. Sektor industri terbagi atas industri besar, sedang, kecil, dan rumah tangga. Pengelompokan didasarkan atas banyaknya pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan industri yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih dikategorikan sebagai industri besar, antara 20-99 orang sebagai industri sedang, 5-19 orang sebagai industri kecil, dan kurang dari 5 orang sebagai industri rumahtangga. Kegiatan industri yang dominan di Kota Bima adalah industri kecil dan

menengah. Kegiatan industri dijalankan oleh sejumlah UKM dengan kegiatan usaha industri antara lain meliputi indsutri tenun ikat tradisional, industri kerajinan, industri meubel dan furniture, industri pengolahan makanan, industri genteng press, dan usaha yang lainnya. Dilihat dari jenis industrinya, terlihat adanya pola persebaran industri kecil yang berbeda di masing-masing kecamatan. Sebagai contoh Kecamatan Rasanae Timur dan Raba merupakan sentra industri tenun, sementara Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda sentra industri makanan.

Dilihat dari kelompok industri, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terus meningkat dalam 2 (dua) tahun terakhir, demikian juga dengan nilai investasi dan nilai produksinya. Kelompok Industri bidang IKAHH pada tahun 2015 berjumlah 823 dengan nilai produksi Rp.86.556.998,-. Sedangkan kelompok Industri ILMEA pada tahun 2015 berjumlah 582 dan nilai produksi Rp. 198.064.171,-. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap dari pengembangan industri ini adalah 10.773 orang.

Tabel 2.93.
Jumlah Perusahaan Industri dan Kerajinan Menurut Jenis Perusahaan dan Nilai Produksi di Kota Bima Tahun 2015

Kelompok Industri/Jenis Perusahaan	Banyak Perusahaan		Nilai Produksi (Rp.000)	
	2014	2015	2014	2015
I. BIDANG IKAHH (Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan)	756	823	85.236.098	86.556.998
II. BIDANG ILMEA (Industri Logam, Mesin, Perekayasaan)	565	582	33.378.483	198.064.171
A. INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN PEREKAYASAAN	91	103	11.270.618	175.679.473
1 Pandai Besi/Alat Pertanian	36	36	767.233	767.233
2 Pertukangan Mas/PerakPerhiasan	7	7	1.397.385	167.686.200
3 Perkalengan	12	21	297.000	302.940
4 Reparasi Mesin Tik	3	3	2.410.000	24.100
5. Pengelasan	32	34	6.255.000	6.755.000
5. Penggilingan Batu	1	2	144.000	144.000
B. INDUSTRI TEKSTIL	318	321	10.282.215	10.446.465
1 Penjahitan/konveksi	115	118	6.333.335	6.497.585
1 Pertenunan	200	200	3.932.500	3.932.500
3 Bordir	3	3	16.380	16.380
C. INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN ANEKA	34	34	1.284.620	1.344.703

Kelompok Industri/Jenis Perusahaan	Banyak Perusahaan		Nilai Produksi (Rp.000)	
	2014	2015	2014	2015
1 Reparasi Radio, Tape, dan Amplifier	10	10	19.500	19.500
2 Arloji	4	4	20.700	20.700
3 Komputer	16	16	1.202.850	1.262.933
4 Dinamo dan Transformator	2	2	34.070	34.070
5 Kulkas	2	2	7.500	7.500
D. INDUSTRI ALAT ANGKUT	122	124	10.541.030	10.593.530
1 Reparasi Kendaraan Roda 2 dan 4	120	122	10.534.530	10.587.030
2 Reparasi Diesel dan Radiator	2	2	6.500	6.500

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, 2015

Tabel 2.94.
Perkembangan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Menurut Kelompok Industri Formal dan Non Formal di Kota Bima Tahun 2015

No	Kelompok Industri	Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp. 000)
1.	Industri Logam, Mesin dan Perekayasaan	582	6.426	34.905.126	198.064.171
	- Formal	82	219	3.984.500	7.543.670
	- Non Formal	500	6.207	30.920.626	190.520.501
2.	Industri Kimia Agro Industri dan Hasil Hutan	823	4.347	17.357.000	85.556.998
	- Formal	124	431	3.984.500	23.817.595
	- Non Formal	699	3.916	13.372.500	62.739.403
	Jumlah	1.405	10.773	51.036.550	118.614.581
	2015	1.321	10.715	47.247.400	76.496.627

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, 2015

g. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Pembangunan sektor pariwisata tidak bisa berjalan sendiri dan parsial dari sektor lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembangunan sektor pariwisata di Kota Bima, pada tahun 2014 telah disusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Bima. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

h. Transmigrasi

Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang dimaksud Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk

meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi dengan diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Dengan demikian, program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja tapi juga meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dalam meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang bersangkutan.

Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Angka Konsumsi Per Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.95. Angka Konsumsi RT per Kapita di Kota Bima Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Total Pengeluaran RT (Rp)	513.138	558.009	625.693	784.094	916.405	803.976
2.	Jumlah RT	35.606	35.930	37.374	38.197	39.020	39.854
3.	Rasio (1/2)	14,41	15,53	16,74	20,53	23,49	20,17

Sumber : BPS Kota Bima, 2016

2. Konsumsi non pangan

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Tabel 2.96.

Persentase Konsumsi RT non-Pangan di Kota Bima Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Total Pengeluaran RT non Pangan (Rp)	283.354	303.550	390.174	469.931	587.289
2.	Total Pengeluaran (Rp)	558.009	625.693	784.094	916.405	758.875
3.	Rasio (%)	50,78	48,51	49,76	51,28	77,29

Sumber : BPS Kota Bima, 2016

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Aksesibilitas daerah

- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Bima pada tahun 2010-2014 umumnya mengalami penurunan disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) setiap tahunnya.

Tabel 2.97.

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Bima Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2016
1.	Panjang Jalan (Km)	369,49	369,49	258,60	258,60	258,5
2.	Jumlah Kendaraan (roda 2 + roda 4)	29.973	37.265	34.089	32.530	32.287
3.	Rasio	1,23	0,99	0,76	0,79	0,80

Sumber : BPS Kota Bima, 2015

- Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun sebagaimana tertera pada tabel dibawah.

Tabel 2.98. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011-2016

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah orang (Jiwa)	973.000	1.081.800	1.412.362	1.054.096	2.947.434	2.871.809
2.	Jumlah Barang (Ton)	251.446	505.673	554.556	585.127	334.328	545.376

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017 dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima, 2017

- Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/terminal selama kurun waktu tahun 2015–2016 terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.99. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2015-2016

No	Uraian	2015				2016			
		Orang		Barang (ton)		Orang		Barang (ton)	
		Turun	Naik	Bongkar	Muat	Turun	Naik	Bongkar	Muat
1.	Dermaga	51.084	38.918	220.429	113.899	51.809	31.923	460.850	84.526
2.	Terminal	2.896.350	NA	NA	NA	2.820.000	NA	NA	NA
	Jumlah	2.947.434	38.918	220.429	113.899	2.871.809	31.923	460.850	84.526

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017 dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima, 2017

2. Penataan wilayah

- Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tataruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.100. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Realisasi RTRW	15.557,7	15.557,7	Na	Na	17.025

2.	Rencana Peruntukan RTRW	22.225	22.225	22.225	Na	19.917,2
3.	Rasio (1/2)	70,001	70,001	Na	Na	85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017

- Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.101. Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s.d 2014 Kota Bima

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Luas Wilayah produktif	10.909	10.909	10.909	10.909	na
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	11.669	11.669	11.669	11.669	na
3.	Rasio (1/2)	93,48	93,48	93,48	93,48	na

Sumber : Bappeda Kota Bima

- Luas Wilayah Industri

Tabel 2.102. Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2010 s.d 2014 Kota Bima

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Luas Wilayah Industri (Ha)	18,72	18,63	60,94	Na	na
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	11.669	11.669	11.669	Na	na
3.	Rasio (1/2)	0,16	0,16	0,52	Na	na

Sumber : Bappeda Kota Bima

- Luas Wilayah Kekeringan

Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.103. Rasio Luas Wilayah Kekeringan di Kota Bima Tahun 2011- 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas Wilayah Kekeringan/ Kritis (Ha)	4.811	4.511	4.488	437	517
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	11.669	11.669	11.669	11.669	11.669
3.	Persentase (%)	41,23	38,65	38,46	3,74	4,43

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2015

- Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW. Adapun luas wilayah

perkotaan di Kota Bima selama kurun waktu tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 rasio luas wilayah perkotaan sebesar 13,07 kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 16,40.

Tabel 2.104. Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Bima Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Luas Wilayah Perkotaan	1.757	1.914	1.914	na	na
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	11.669	11.669	11.669	na	na
3.	Rasio (1/2)	15,06	16,40	16,40	na	na

Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan

3. Fasilitas bank dan non bank

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya.

- Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya

Jumlah bank di Kota Bima adalah sebanyak 16 unit. Adapun secara rinci fasilitas bank dan non bank dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105. Jenis dan Jumlah Bank di Daerah Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Sektor	Jumlah				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Bank Umum	7	7	7	8	8
2.	Bank Syariah	1	1	1	4	4
3.	BPR	5	4	4	4	4
Jumlah		13	12	12	16	16

Sumber : Bagian Perekonomidan Usaha Daerah Setda, 2017

- Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Adapun di Kota Bima hingga tahun 2015 belum memiliki perusahaan asuransi syariah.

Tabel 2.106.

Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Daerah Kota Bima

No	Sektor	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perusahaan Asuransi Jiwa					
2	Konvensional	4	4	4	4	4

3	Syariah	-	-	-	-	-
Jumlah		4	4	4	4	4

Sumber : BPS Kota Bima

4. Ketersediaan air bersih

- Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Air Bersih (*clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (*drinking water*) Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Pada tahun 2015, Persentase penduduk yang menggunakan air bersih adalah sebanyak 88,81 persen.

Tabel 2.107. Sumber Air Bersih bagi Rumah Tangga

No	Sumber Air Bersih	2012*)	2013*)	2014*)	2015**)	2016**)
1.	Leding (Perpipaan)	9.373	9.920	20.449	109.080	29.622
2.	Sumur Lindung	1.470	1.470	1.375	17.429	16.203
3.	Sumur Tidak Terlindung	13	13	-	-	-
4.	Mata Air Terlindung	39	20	29	-	2.357
5.	Mata Air Tidak Terlindung	-	-	-	-	-
6.	Sungai	-	-	-	-	-
7.	Danau/Waduk	-	-	-	-	-
8.	Air Hujan	14	14	-	459	-
9.	Air Kemasan	19	-	-	-	-
10.	Lainnya	-	-	-	10.944	232
11.	Total Jumlah Rumah Tangga/Penduduk yang menggunakan air bersih	23.152	23.233	23.037	137.912	150.173
12.	Persentase Rumah Tangga/Penduduk yang menggunakan air bersih	78,51	78,35	70,80	88,81	92,07

Ket : *) Menggunakan Data Jumlah Rumah Tangga **) Menggunakan Data Jumlah Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2017

5. Fasilitas listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

Rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan.

Tabel 2.108. Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Bima

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Rumah Tangga dengan daya 450 watt	8.972	9.700	9.991	9.873
2.	Rumah Tangga dengan daya 900 watt	8.690	10.558	12.305	13.200
3.	Rumah Tangga dengan daya 1.300 watt	6.949	6.749	6.680	7.428
4.	Rumah Tangga dengan daya 2.200 watt	550	588	635	675
5.	Rumah Tangga dengan daya > 2.200 watt	195	206	212	237
	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	25.356	27.801	31.838	33.429

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Area Bima, 2017

Tabel 2.109. Daya Listrik Terpasang dan Jumlah Kebutuhan Listrik Kota Bima

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Daya Listrik Terpasang (VA)	35.395.975	38.660.820	41.453.170	44.896.620
2.	Jumlah Kebutuhan Listrik (Kwh)	5.340.488	5.024.202	5.801.215	5.606.851

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Area Bima, 2017

6. Ketersediaan restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

7. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Di Kota Bima sendiri, hingga tahun 2016 jumlah hotel sudah mencapai 17 unit dengan jumlah kamar sebanyak 383 kamar.

Tabel 2.110. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Bima

No	Jenis Penginapan/Hotel	2015			2016		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1.	Hotel Bintang 5	0	0	0	0	0	0
2.	Hotel Bintang 4	0	0	0	0	0	0
3.	Hotel Bintang 3	0	0	0	0	0	0
4.	Hotel Bintang 2	0	0	0	0	0	0
5.	Hotel Bintang 1	0	0	0	0	0	0
6.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	16	369	NA	17	383	NA
7.	Total Jumlah penginapan/Hotel	16	369	NA	17	383	NA

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bima, 2017

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Indikator kriminalitas berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tabel 2.111. Angka Kriminalitas Kota Bima

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Laporan Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	938	524	967	1.081	1.020
2.	Jumlah Penduduk	146.308	148.645	162.752	159.736	159.736
	Angka Kriminalitas	0,0064	0,0035	0,0059	0,0078	0,0081

Sumber : Kepolisian Resor Bima Kota, 2017 (diolah)

2. Kemudahan perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

Tabel 2.112. Lama Proses Perijinan Kota Bima

No	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
----	--------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

No	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	SIUP	3 hari kerja	5	Gratis
2.	TDP	3 hari kerja	5	Gratis
3.	TDG	3 hari kerja	5	Gratis
4.	TDI	3 hari kerja	5	Gratis
5.	IMB	7 hari kerja	7	Disesuaikan dengan kelas jalan serta fungsi dan luas bangunan
6.	HO	4 hari kerja	10	Biaya dihitung berdasarkan luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan, dan nilai per m ² .
7.	SIUJK	3 hari kerja	6	Gratis
8.	BBMT	3 hari kerja	8	Biaya dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha dikalikan indeks lokasi dan dikalikan indeks gangguan serta dikalikan luas tempat usaha

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2017

3. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Jumlah dan macam serta retribusi daerah selama kurun waktu tahun 2015-2016 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.113. Jumlah & Macam Insentif Pajak/ Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2015-2016

No	Uraian	2015	2016
1.	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	11.229.060.740	12.341.769.989
2.	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	-	-
3.	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	5.268.437.826	5.132.141.660
4.	Jumlah Pajak yang mendukung iklim investasi	11.229.060.740	12.341.769.989

Sumber : BPPKAD Kota Bima, 2017

4. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Adapun jumlah perda terkait perijinan sebanyak 4 perda. Sedangkan perda terkait lalu lintas barang sebanyak 2 perda.

5. Persentase kelurahan berstatus swasembada

Berdasarkan kriteria status, kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni kelurahan swadaya (tradisional); kelurahan swakarya (transisional); dan kelurahan

swasembada (berkembang). Dalam kurun lima tahun terakhir, kelurahan swasembada di Kota Bima tercatat berjumlah 24 kelurahan.

Tabel 2.114. Jumlah Kelurahan Swasembada Kota Bima

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Kelurahan Swadaya	0	0	0	0	0
2.	Jumlah Kelurahan Swakarya	14	14	14	14	14
3.	Jumlah Kelurahan Swasembada	24	24	24	24	24
4.	Jumlah Kelurahan (1) + (2) + (3)	38	38	38	38	38
Persentase Desa berstatus swasemda dibagi jumlah kelurahan (3)/(4)		63,16%	63,16%	63,16%	63,16	63,16

Sumber : BPS Kota Bima, 2016

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Bima pada 2012 tercatat sebesar 712 per 10.000 penduduk dan pada tahun 2016 tercatat sebesar 842 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.115. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2012-2016
(Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan S1	11.073	11.962	11.689	11.257	11.257
2.	Jumlah lulusan S2	480	532	515	486	471
3.	Jumlah lulusan S3	13	14	14	12	12
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	11.566	12.508	12.218	11.755	11.108
5.	Jumlah penduduk	162.511	156.820	163.337	137.851	139.366
Rasio lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk		712	798	748	853	842

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

2. Tingkat ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah

produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya persentase *dependencyratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.116. Rasio Ketergantungan Tahun 2012-2016 Kota Bima

No	Uraian	2012*)	2013**)	2014**)	2015**)	2016**)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	41.897	31.973	39.382	36.500	37.485
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	6.607	7.303	8.697	6.932	7.050
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	48.504	39.276	48.079	43.432	44.535
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	95.514	117.544	115.258	94.419	94.831
	Rasio ketergantungan (3) / (4)	50,78	33,41	41,71	46,00	46,96

Sumber : *) BPS Kota Bima, 2016 (diolah)

**)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017 (diolah)

2.1.5. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

Tabel 2.117.

Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah / Berkurang	Proyeksi	
			Tahun (n-3)	Tahun (n-2)		Tahun (n-1)	Tahun n
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PDRB (Harga Berlaku)	Juta	2.993.332,48	3.053.199		3.129.529,11	3.214.026
2.	PDRB (Harga Konstan)	Juta	2.437.609,58	2.578.990,9		2,629,861.9	2,790,377.81
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu	%	5,74	5.80-6	0,21	5,85-6	5,88-6
4.	Tingkat Inflasi	%	4,07				

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah / Berkurang	Proyeksi	
			Tahun (n-3)	Tahun (n-2)		Tahun (n-1)	Tahun n
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral						
6.	Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan						
7.	Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)						
8.	Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)						
9.	Jumlah Penduduk Miskin						
10.	Tingkat Pengangguran						
11.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Perkapita - Kemampuan Investasi - Besaran Indeks Gini (<i>Gini Ratio Index</i>) - Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan sebagainya 						
12.	Berbagai macam						

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah / Berkurang	Proyeksi	
			Tahun (n-3)	Tahun (n-2)		Tahun (n-1)	Tahun n
1	2	3	4	5	6	7	8
	besaran rasio dan perbandingan-perbandingan						
	- Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,48	0,48	-	0,53	0,55
	- Biaya pendidikan Terhadap PDRB	%	-	-	-	-	-
	- Biaya kesehatan terhadap PDRB	%	24,49	23,01		27,85	29,65
	- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)	%	1,45	1,35		1,22	1,32
	- Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRBD						

1.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Pada sub bab ini akan diuraikan realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan maupun yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja.

1.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaksanakan

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **39.016.529.900,00** dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **37.069.6190,27** (95,01%).

Anggaran urusan Pendidikan ini terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan wajib pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel Tabel 2.118. Program/ Kegiatan Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.712.520.950,00	1.608.796.432,00	93,94
1	Penyediaan jasa surat menyurat	90.300.000,00	80.800.000,00	89,48
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81.100.000,00	51.853.483,00	63,94
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	84.790.000,00	67.500.000,00	79,61
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	52.000.000,00	48.691.447,00	93,64
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	161.760.000,00	152.100.000,00	94,03
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.370.000,00	25.370.000,00	100
7	Penyediaan alat tulis kantor	244.148.500,00	239.400.000,00	98,06
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	101.650.000,00	84.250.000,00	82,88
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	282.190.000,00	280.825.000,00	99,52
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28.240.000,00	17.080.000,00	60,48
11	Penyediaan makanan dan minuman	11.200.000,00	11.175.000,00	99,78
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	449.772.450,00	449.761.502,00	100
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100.000.000,00	99.990.000,00	99,99
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.007.074.000,00	986.607.250,00	97,97
1	Pembangunan gedung kantor	705.620.000,00	694.825.000,00	98,47
2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	39.954.000,00	39.954.000,00	100

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55.500.000,00	55.349.500	99,73
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.200.000,00	56.218.750,00	93,39
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20.800.000,00	15.460.000,00	74,33
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	125.000.000,00	124.800.000,00	99,84
III	Program peningkatan disiplin aparatur	45.000.000,00	45.000.000,00	100
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	45.000.000,00	45.000.000,00	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	118.131.000,00	117.731.000,00	99,66
1	Pelaksanaan penilaian AKJG	118.131.000,00	117.731.000,00	99,66
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	141.500.000,00	141.250.000,00	99,82
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.600.000,00	21.600.000,00	100
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	0,00	0,00	0
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	69.900.000,00	69.650.000,00	99,64
4	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100
VI	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.165.806.250,00	2.107.033.750,00	97,29
1	Penambahan ruang kelas sekolah	445.080.000,00	441.650.000,00	99,23
2	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	40.000.000,00	40.000.000,00	100
3	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	338.400.000,00	336.825.000,00	99,53
4	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1.193.620.000,00	1.193.620.000,00	100
5	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	111.866.250,00	58.098.750,00	51,94
6	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	25.380.000,00	25.380.000,00	100
7	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	11.460.000,00	11.460.000,00	100
VII	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	27.048.337.700,00	25.437.260.414,00	94,04
1	Penambahan ruang kelas sekolah	363.000.000,00	363.000.000,00	100
2	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	108.660.000,00	107.000.000,00	98,47
3	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	169.617.000,00	169.616.000,00	100
4	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	1.736.314.000,00	1.727.193.400,00	99,47
5	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1.605.067.200,00	1.522.603.614,00	94,86
6	Pengadaan mebeluer sekolah	261.020.000,00	260.950.000,00	99,97
7	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	4.228.935.000,00	4.228.927.000,00	100
8	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	17.457.132.000,00	16.041.969.150,00	91,89
9	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	442.800.000,00	391.800.000,00	88,48
10	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	379.516.500,00	349.053.250,00	91,97
11	Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa	296.276.000,00	275.148.000,00	92,87
VIII	Program Pendidikan Non Formal	101.687.500,00	76.772.400,00	75,50
1	Pengembangan Pendidikan Non Formal	101.687.500,00	76.772.400,00	75,50

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
IX	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.220.051.000,00	1.139.347.281	93,39
1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	104.704.000,00	104.604.000,00	100
2	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1.115.347.000,00	1.034.743.281,00	92,77
X	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	450.013.500,00	404.267.500,00	89,83
1	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	55.910.000,00	44.510.000,00	79,61
2	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	159.467.500,00	130.912.500,00	82,09
3	Koordinasi hari-hari besar nasional bidang pendidikan, pemuda dan olah raga	94.310.000,00	94.310.000,00	100
4	Pendataan Pendidikan	77.572.000,00	77.072.000,00	99,36
5	Unit Pelaksana Akreditasi	62.754.000,00	57.463.000,00	91,57
X	Program Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya	5.006.408.000,00	5.005.553.000,00	99,98
1	Pengembangan Taman Budaya	5.006.408.000,00	5.005.553.000,00	99,98
Jumlah Anggaran		39.016.529.900,00	37.069.619.027,00	95,01

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis urusan pendidikan ini menghasilkan beberapa keluaran (*output*) penting, yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program pendidikan anak usia dini sebesar Rp. 2.165.806.250,00 yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penambahan Ruang Kelas dengan alokasi anggaran Rp. 445.080.000,00 dan teralisasi sebesar Rp. 441.650.000,00 atau sebesar 99,23%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah TKN 13 Monggonao Kota Bima, TKN 09 Monggonao Kota Bima, TKN 07 Pane Kota Bima.
- 2) Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,00 atau sebesar 100%. Hasil pelaksanaan Kegiatan tersebut yaitu terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Sanitasi, Jamban Siswa / Guru TK Pembina Raba Kota Bima.
- 3) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 338.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

336.825.000,00 atau sebesar 99,53%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat (Aula) TKN Pembina Kolo Kota Bima, Rehabilitasi Sedang / Berat (Rabat) TKN 25 Kota Bima, Rehabilitasi Sedang / Berat TKN 19 Santi Kota Bima.

- 4) Kegiatan Pengembangan Pendidikan anak usia dini yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.193.620.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.193.620.000,00 atau sebesar 100%.
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 111.866.250,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 58.098.750,00 atau sebesar 51,94%.
- 6) Kegiatan Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 25.380.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 25.380.000,00 atau sebesar 100%.
- 7) Kegiatan Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.460.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 11.460.000,00 atau sebesar 100%. Capaian hasil kegiatan ini pemantauan proses pelaksanaan program berjalan dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program wajib belajar pendidikan 9 tahun sebesar Rp. 27.048.337.700,00 yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penambahan ruang kelas sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 363.000.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 363.000.000,00 atau sebesar 100%. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu berupa penambahan ruang kelas sekolah SMPN 4 Kota Bima;
- 2) Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan upacara dan Fasilitas Parkir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.660.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 107.000.000,00 atau sebesar 98,47%. Output dari pelaksanaan kegiatan adalah terpasangnya Paving Block SDN 49 Kota Bima dan Penimbunan / Urukun SDN 40 Kota Bima;
- 3) Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitari dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 169.617.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 169.616.000, atau sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan

adalah rehabilitasi / pembangunan sanitasi, jamban siswa / guru SD di SDN 18 Kota Bima dan SDN 20 Kota Bima;

- 4) Kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa dengan anggaran sebesar Rp. 1.736.314.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.727.193.400,00 atau sebesar 99,47%. Output dari pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya buku-buku perpustakaan dan buku muatan lokal di 29 Sekolah Dasar di Kota Bima;
- 5) Kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.605.067.200,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.522.603.614,00 atau sebesar 94,86%. Output dari pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya media pendidikan, alat praktek/peraga matematika di 10 SMPN dan SMP, Peralatan media pembelajaran SMP di 20 SMPN dan SMP, Peralatan TIK Laboratorium Komputer di 5 SMPN, Peralatan media pendidikan di 6 SDN, Pengadaan peralatan Laboratorium IPA di 5 SMPN, Peralatan pendidikan IPS SMP;
- 6) Kegiatan pengadaan meubelair sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 261.020.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 260.950.000,00 atau sebesar 99,97%. Output dari pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Meubelair meja dan kursi guru dan siswa di 5 SDN di Kota Bima;
- 7) Kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 4.228.935.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 4.228.927.000,00 atau sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu perbaikan fasilitas sarana belajar SDN dan SMPN yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan;
- 8) Kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.457.132,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 17.457.132,00 atau sebesar 100 %. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan TIM Manajemen BOS di 72 SDN dan 15 SMPN di Kota Bima;
- 9) Kegiatan pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar dengan anggaran sebesar Rp. 442.800.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 391.800.000,00

atau sebesar 88,48%. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu peningkatan pemahaman kelembagaan sekolah berbasis MBS pada SDN dan SMPN di Kota Bima;

- 10) Kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa dengan anggaran sebesar Rp. 379.516.500,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 349.053.250,00 atau sebesar 91,97%. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terlaksananya 11 jenis lomba peningkatan minat bakat dan prestasi siswa Tk. Nasional dan Internasional;
- 11) Kegiatan penyelenggaraan ujian nasional dan ujian kompetensi siswa dengan anggaran sebesar Rp. 296.276.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 275.148.000,00 atau sebesar 92,87%. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terselenggaranya Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar Kota Bima.

3. Program Pendidikan Non Formal

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program pendidikan non formal sebesar Rp. 101.687.500,00 dengan capaian sebesar Rp 76.772.400,00 atau sebesar 75,50%. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya kegiatan pengembangan pendidikan non formal antara lain : Pelaksanaan kegiatan jambore PTK PNFI, Gebyar Hari Anak Nasional, kegiatan seleksi lembaga PAUD dan PKBM berperstasi.

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program pendidikan non formal sebesar Rp. 1.220.051.000,00 yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik dengan anggaran sebesar Rp. 104.704.000,00 dengan capaian realisasi Rp. 104.604.000,00 atau sebesar Rp. 100%. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sertifikasi tenaga pengajar;
- 2) Kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.115.347.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian

sebesar Rp. 1.034.743.281,00 atau sebesar 92,77%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa peningkatan mutu dan kualitas tenaga kependidikan kepada tenaga pengajar sebanyak 7 kali diklat.

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program pendidikan non formal sebesar Rp. 450.013.500,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebesar Rp. 404.267.500,00 atau sebesar 89,83%. Dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 55.910.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebesar Rp. 44.510.000,00 atau sebesar 79,61%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi terkait kebijakan pendidikan sebanyak 4 kali;
- 2) Kegiatan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 159.467.500,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebesar Rp. 130.912.500,00 atau sebesar 82,09%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu dokumen informasi manajemen pendidikan;
- 3) Kegiatan koordinasi hari-hari besar nasional bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 94.310.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebesar Rp. 94.310.000,00 atau sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terdatanya jumlah peringatan hari besar nasional bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 4) Kegiatan pendataan pendidikan yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 77.572.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebesar Rp. 77.072.000,00 atau sebesar 99,36%. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terlaksananya pendataan dan tersusunnya Data Pokok dan Profil Pendidikan Kota Bima;
- 5) Kegiatan Unit Pelaksana Akreditasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.754.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebesar Rp. 57.463.000,00 atau sebesar 91,57%. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan unit pelaksana akreditasi sebanyak 2 kali.

6. Program Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program pembangunan sarana prasarana seni dan budaya sebesar sebesar Rp 5.006.408.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 5.005.553.000,00 atau sebesar 99,98% dalam kegiatan Pengembangan Taman Budaya. Hasil dari pelaksanaan dari kegiatan ini yaitu tercapinya pembangunan Gedung Seni dan Budaya serta penataan luar dalam gedung.

b. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja urusan pendidikan pada Dinas Dikpora Kota Bima Tahun 2017 dideskripsikan sebagai berikut.

1. Layanan PAUD (formal dan non formal) yang bermutu

a. Angka Partisipasi Kasar PAUD

APK anak usia dini Kota Bima pada tahun 2017 hanya sebesar 48,23% lebih rendah dari target tahun 2017 sebesar 58,56% dengan tingkat capaiannya sebesar 82,36%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 56,01% maka terjadi penurunan yang sangat signifikan. Penurunan ini terjadi sebagai akibat adanya koreksi atau perbaikan data partisipasi anak usia dini.

b. Angka Partisipasi Murni PAUD

APM anak usia dini Kota Bima pada tahun 2017 hanya sebesar 48,22% lebih rendah dari target tahun 2017 sebesar 58,54% dengan tingkat capaiannya sebesar 82,37%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 56% maka terjadi penurunan yang sangat signifikan. Penurunan ini terjadi sebagai akibat adanya koreksi atau perbaikan data partisipasi anak usia dini.

2. Kepastian memperoleh Layanan Pendidikan Dasar yang bermutu

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) per 1000 penduduk jenjang pendidikan:

Angka Partisipasi Sekolah Kota Bima tahun 2017 pada berbagai jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sebesar 94,71 dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sebesar 93,76.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan:

Angka Partisipasi Kasar Kota Bima tahun 2017 pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sebesar 94,71 dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sebesar 93,76.

- c. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan:
Angka Partisipasi Murni Kota Bima tahun 2017 pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sama dengan angka APK yaitu sebesar 94,71 dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sebesar 93,76.
- d. Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah di Kota Bima pada tahun 2017 adalah 10,13 tahun dari target tahun 2017 sebanyak 10,00 tahun dengan tingkat capaiannya sebesar 101,30%.

3. Tata kelola manajemen pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan

pencapaian sasaran Meningkatkan Mutu Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan perbandingan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya:

- a. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf Kota Bima pada tahun 2017 sebesar 96,45 % lebih Rendah dari target tahun 2017 sebesar 95,45% dengan tingkat capaiannya sebesar 120,00%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 96,26% maka terjadi Kenaikan sebesar 2%.
- b. Rata-rata Nilai Ujian Nasional
Rata-rata Nilai Ujian Nasional Kota Bima tahun 2017 pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sebesar 7,25 dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket A sebesar 4,7.
- c. Persentase Angka Kelulusan
Persentase Angka Kelulusan Kota Bima tahun 2017 pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sebesar 99,61% dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sebesar 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang masih dihadapi sekaligus menjadi tantangan kedepan yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah sebagai berikut :

- 1. Permasalahan
 - Kondisi sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan yang masih perlu ditingkatkan;

- Tidak adanya data yang cukup akurat untuk memantau lulusan dari sekolah dan kursus yang telah bekerja atau telah terserap di bursa tenaga kerja, sehingga tidak dapat diketahui tingkat relevansi antara pendidikan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat industri dan dunia usaha;
- Masih kurangnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

2. Solusi

- Menyiapkan sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan yang memadai;
- Meningkatkan kualitas tenaga pendidik sehingga dapat memenuhi standar kualifikasi, pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 33.534.311.341,00,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 31.096.247.311,00,- atau sebesar 92,73%.

Pelaksanaan Urusan Kesehatan ini tersebar pada beberapa SKPD yaitu Dinas Kesehatan Kota Bima dengan alokasi anggaran Rp. 33.236.311.341,00,-. Bagian Umum dan Kota Bima dengan alokasi anggaran Rp. 48.000.000,00,-. Kecamatan Asakota Kota Bima dengan alokasi anggaran Rp. 40.000.000,00,-. Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,00,-. Kecamatan Raba Kota Bima dengan alokasi anggaran Rp. 110.000.000,00,-.

1. Dinas Kesehatan

Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 33.236.311.341,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 30.804.073.311,00 atau sebesar 92,68%.

2. Bagian Umum Setda Kota Bima

Urusan Kesehatan pada Bagian Umum Setda Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 48.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 42.300.000,00 atau sebesar 88,13%.

3. Kecamatan Asakota Kota Bima

Urusan Kesehatan pada Kecamatan Asakota Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 40.000.000,00 atau sebesar 100%.

4. Kecamatan Mpunda Kota Bima

Urusan Kesehatan pada Kecamatan Mpunda Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 99.874.000,00 atau sebesar 99,87%.

5. Kecamatan Raba Kota Bima

Urusan Kesehatan pada Kecamatan Raba Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 110.000.000,00 atau sebesar 100%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan wajib kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel Tabel 2.119. Program/ Kegiatan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bima
Tahun Anggaran 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.824.629.650,00	1.712.056.548,00	93,83
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	321.600.000,00	248.780.733,00	77,35
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	34.916.000,00	27.030.000,00	77,41
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	86.700.000,00	73.688.800,00	84,99
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	123.600.000,00	123.566.000,00	99,97
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	422.400.000,00	405.600.000,00	96,02
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.500.000,00	5.875.000,00	90,38
8	Penyediaan alat tulis kantor	178.961.400,00	178.960.663,00	99,99
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.286.500,00	24.956.250,00	94,93
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.690.000,00	2.650.000,00	98,51
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.800.000,00	11.800.000,00	100
12	Penyediaan makanan dan minuman	14.520.000,00	14.520.000,00	100
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	554.855.750,00	554.829.102,00	99,99
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	38.600.000,00	38.600.000,00	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	617.116.750,00	612.522.600,00	99,25
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	130.258.000,00	129.393.000,00	99,33
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	114.566.750,00	114.079.000,00	99,57
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	368.992.000,00	365.750.600,00	99,12
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	100
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	144.289.000,00	135.255.500,00	93,73
1	Pelaksanaan Penilaian AKJG	144.289.000,00	135.255.500,00	93,73
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	170.485.250,00	169.585.250,00	99,47
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19.580.000,00	19.580.000,00	100
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	30.210.000,00	29.850.000,00	98,80
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.330.250,00	49.790.250,00	98,92
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	40.690.000,00	40.690.000,00	100
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	29.675.000,00	29.675.000,00	100
V	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.572.565.250,00	1.501.365.203,00	95,47
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.454.776.000,00	1.399.186.453,00	96,17
2	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	64.085.000,00	63.635.000,00	99,29
3	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	16.500.000,00	15.800.000,00	95,75
4	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	27.003.750,00	19.533.750,00	72,33

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.200.500,00	3.210.000,00	31,46
VI	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	6.448.142.843,00	6.024.998.634,00	93,43
1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	94.482.500,00	80.494.369,00	85,19
2	Peningkatan kesehatan masyarakat	124.427.000,00	66.211.000,00	53,21
3	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	752.335.000,00	590.632.000,00	78,50
4	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	3.057.679.000,00	2.969.937.785,00	97,13
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	16.738.000,00	15.468.000,00	92,41
6	Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja (UKK)	9.125.000,00	3.780.000,00	41,42
7	Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta	16.217.500,00	16.197.500,00	99,87
8	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan	751.138.843,00	749.242.000,00	99,74
9	Pelayanan kesehatan penduduk dipuskesmas dan jaringannya	1.626.000.000,00	1.533.035.980,00	94,28
VII	Program Pengawasan Obat dan Makanan	60.597.100,00	59.897.100,00	98,84
1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	19.025.000,00	19.025.000,00	100
2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	29.652.500,00	28.952.500,00	97,63
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11.919.600,00	11.919.600,00	100
VIII	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	23.989.500,00	23.839.500,00	99,37
1	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri	23.989.500,00	23.839.500,00	99,37
IX	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	910.832.000,00	872.157.500,00	95,75
1	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	68.020.000,00	66.970.000,00	98,45
2	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	45.886.000,00	45.386.000,00	98,91
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.940.000,00	5.590.000,00	94,10
4	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	70.443.000,00	70.043.000,00	99,43
5	Peningkatan Kesehatan Institusi	21.720.000,00	14.185.000,00	65,30
6	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	568.395.000,00	549.495.000,00	96,67
7	Komunikasi Informasi dan Edukasi	64.888.000,00	64.538.000,00	99,46
8	Penjaringan Kesehatan anak pra sekolah dan anak sekolah / deteksi dini penyakit anak usia pra sekolah dan usia sekolah	29.335.000,00	27.885.000,00	95,05
9	Pengembangan Sekolah Sehat	36.205.000,00	28.065.500,00	77,51
X	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	176.762.500,00	166.997.150,00	94,47
1	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	64.005.000,00	61.091.000,00	95,44
2	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	71.838.750,00	65.337.500,00	90,95
3	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	28.676.250,00	28.326.250,00	98,77
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.242.500,00	12.242.400,00	99,99
XI	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	141.397.500,00	137.517.500	97,25

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	30.867.500,00	29.807.500,00	96,56
2	Pengawasan dan Pembinaan Tempat-Tempat Umum	5.440.000,00	5.440.000,00	100
3	Pembinaan Kebersihan Lingkungan	29.075.000,00	28.725.000,00	98,79
4	Pembinaan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga	64.495.000,00	62.745.000,00	97,28
5	Pengawasan dan Pengendalian Penyediaan Air Bersih dan Air Minum	11.520.000,00	10.800.000,00	93,75
XII	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	546.886.500,00	507.559.000,00	92,80
1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	43.390.000,00	42.000.000,00	96,79
2	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	83.920.000,00	82.567.500,00	98,38
3	Peningkatan imunisasi	57.665.000,00	55.885.000,00	96,91
4	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	83.805.000,00	68.515.000,00	81,75
5	Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	46.151.500,00	44.005.500,00	95,35
6	Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (DBD, Malaria)	64.682.500,00	60.038.500,00	92,82
7	Pencegahan dan Pemberantasan Diare	49.950.000,00	47.492.500,00	95,08
8	Pencegahan dan Pemberantasan Ispa	22.265.000,00	21.565.000,00	96,85
9	Pencegahan dan Pemberantasan TB Paru	60.132.500,00	51.265.000,00	85,25
10	Pencegahan dan Pemberantasan Kusta	34.925.000,00	34.225.000,00	97,99
XIII	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	817.807.000,00	684.675.100,00	83,72
1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	672.207.000,00	559.911.600,00	83,29
2	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	63.620.000,00	62.420.000,00	98,11
3	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan	81.980.000,00	62.343.500,00	76,04
XIV	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	9.610.224.000,00	9.569.320.783,00	99,57
1	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	678.429.192,00	677.140.000,00	99,80
2	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	5.050.838.000,00	5.020.738.000,00	99,40
3	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas	3.880.956.808,00	3.871.442.783,00	99,75
XV	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	9.889.601.198,00	8.362.669.193,00	84,56
1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	9.889.601.198,00	8.362.669.193,00	84,56
XVI	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	133.135.800,00	118.314.800,00	88,86
1	Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium	56.520.000,00	56.488.000,00	99,94
2	Penyediaan Biaya Operasional Laboratorium	76.615.800,00	61.826.800,00	80,69
XVII	Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan dan Reproduksi dan KB	147.849.500,00	145.341.950,00	98,30
1	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	119.799.500,00	118.381.950,00	98,81
2	Peningkatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Remaja	18.800.000,00	18.060.000,00	96,06
3	Pelayanan Kesehatan Usila	7.000.000,00	6.650.000,00	95

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
4	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	2.250.000,00	2.250.000,00	100
SEKRETARIAT DAERAH				
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN		48.000.000,00	42.300.000,00	88,13
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	48.000.000,00	42.300.000,00	88,13
	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	48.000.000,00	42.300.000,00	88,13
KECAMATAN ASAKOTA		40.000.000,00	40.000.000,00	100
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	100
	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	100
KECAMATAN MPUNDA		100.000.000,00	99.874.000,00	99,87
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	100.000.000,00	99.874.000,00	99,87
	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	100.000.000,00	99.874.000,00	99,87
KECAMATAN RABA		110.000.000,00	110.000.000,00	100
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	110.000.000,00	110.000.000,00	100
	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	110.000.000,00	110.000.000,00	100
Jumlah Anggaran		33.534.311.341,00	31.096.247.311,00	92,73

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2016 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis urusan kesehatan ini menghasilkan beberapa keluaran (*output*) penting, yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program Obat dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp. 1.572.565.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.501.365.203,00 atau 95,47% yang telah dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.454.776.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.399.186.453,00 atau sebesar 96,17%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah tersedianya pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar sebanyak 1 paket dan terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Obat Terpadu (POT)

- 2). Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 64.085.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 63.635.000,00 atau sebesar 99,29%.
Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah : dilaksanakannya Pemusnahan Obat Rusak/Kadaluwarsa dan pendistribusian obat
- 3). Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit dengan anggaran sebesar Rp. 16.500.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 15.800.000,00 atau sebesar 95,75%.
Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :
 - a. Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis pengelolaan obat puskesmas dan jaringannya sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 60 orang
 - b. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi penggunaan obat sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 20 orang
- 4). Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 27.003.750,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp 19.533.750,00 atau sebesar 72,33%.
Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah : Terselenggaranya pertemuan peningkatan penggunaan obat yang rasional sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 75 orang.
- 5). Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 10.200.500,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 3.210.000,00 atau sebesar 31,46%.
Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah : Terselenggaranya pertemuan evaluasi pengelolaan obat puskesmas sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 18 orang dan terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring pelayanan kefarmasian di puskesmas.

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program upaya kesehatan masyarakat sebesar Rp. 6.448.142.843,00 dan telah terrealisasi sebesar Rp. 6.024.998.634,00 atau sebesar 93,43% yang telah dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya dengan anggaran sebesar Rp. 94.482.500,00, yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 80.494.369,00,- atau sebesar 85,19%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya sosialisasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 62 orang
 - b. Terselenggaranya rapat koordinasi pelaksanaan program Jamkesmas tingkat Kota Bima sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 37 orang
 - c. Terselenggaranya rapat evaluasi tim pengelola BPJS tingkat Kota Bima sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 32 orang
- 2). Peningkatan Kesehatan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 124.427.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 66.211.000,00 atau sebesar 53,21%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya pertemuan koordinasi Program Kesehatan Jiwa Tingkat kota Bima sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang
 - b. Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Puskesmas sebanyak 1 kali selama 3 hari dengan jumlah peserta 20 orang
 - c. Terselenggaranya pertemuan Kesehatan Indera sebanyak 1 kali selama 1 hari dengan jumlah peserta 18 orang
 - d. Terselenggaranya pertemuan Kesehatan Khusus Gigi dan Rekam Medik sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 25 orang
- 3). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 752.335.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 590.632.000,00 atau sebesar 78,50%

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya Koordinasi Evaluasi Manajemen Puskesmas sebanyak 1 kali dengan peserta 25 orang
- b. tersedianya dokter PTT daerah sebanyak 10 orang selama 12 bulan dan dokter spesialis 4 orang selama 3 bulan

- 4). Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan dengan anggaran sebesar Rp. 3.057.679.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.969.937.785,00 atau sebesar 97,13%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. terselenggaranya Pertemuan Sosialisasi Kegiatan BOK sebanyak 2 kali
 - b. diterimanya Bantuan Operasional Kesehatan di 6 puskesmas
- 5). Monitoring evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 16.738.000,00 yang telah dilaksanakan dengan tingkat realisasi sebesar 15.468.000,00 atau sebesar 92,41%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah : Terselenggaranya pertemuan SP2TP sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 66 orang yang terdiri dari perwakilan 6 puskesmas .

- 6). Peningkatan usaha kesehatan kerja (UKK) dengan anggaran sebesar Rp. 9.125.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 3.780.000,00 atau sebesar 41,42%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya pelatihan kesehatan kerja bagi kader UKK sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang.
 - b. Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan kader UKK dan monev program kesehatan kerja
- 7). Sertifikasi dan perizinan pelayanan kesehatan swasta dengan anggaran sebesar Rp. 16.217.500,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 16.197.500,00 atau sebesar 99,87%

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya sosialisasi sertifikasi dan perijinan praktek pelayanan kesehatan swasta sebanyak 1 kali kegiatan dengan jumlah peserta 3 orang.
 - b. Terselenggaranya rapat persiapan monev tim pengendali perijinan praktek pelayanan swasta
 - c. Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendataan dan pemetaan perijinan praktek pelayanan kesehatan swasta
- 8). Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.

751.138.843,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 749.242.000,00 atau sebesar 99,74%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Tersedianya Bahan2 Laboratorium Dalam rangka penanganan penyakit akibat rokok sebanyak 1 paket
 - b. Tersedianya alat untuk penanganan penyakit akibat rokok sebanyak 1 paket
- 9) Pelayanan kesehatan penduduk dipuskesmas dan jaringannya dengan anggaran sebesar Rp. 1.626.000.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.533.035.980,00 atau sebesar 94,28%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya pertemuan evaluasi pelaksanaan kartu sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang.
- b. Tersusunnya Administrasi kartu jujur dikes.
- c. Terlaksananya Operasional pelayanan kartu jujur, pembelian barang habis pakai di puskesmas

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program promosi kesehatan masyarakat sebesar Rp. 910.832.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 872.157.500,00 atau 95,75%, yang telah dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat dengan anggaran sebesar Rp. 68.020.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 66.970.000,00 atau 98,45%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya penyuluhan gaya hidup sehat di kelompok potensial kelurahan sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta 40 orang.
 - b. Terselenggaranya Penyuluhan indikator PHBS dalam rangka peningkatan indikator KIA dan giz
- 2). Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 45.886.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 45.386.000,00 atau 98,91%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya Lomba Penyuluhan/Promosi Kesehatan bagi Kader tk.Kota.
 - b. Terselenggaranya Lomba Cerdas Terampil Kader Promkes tk.kota
 - c. Terselenggaranya Lomba Cerdas tangkas Kader Posketren tk.kota
- 3). Monitoring evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 5.940.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 5.590.000,00 atau sebesar 94,10%

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah : terselenggaranya pertemuan monitoring dan evaluasi terpadu program promkes sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 48 orang.

- 4). Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan anggaran sebesar Rp. 70.443.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 70.043.000,00 atau sebesar 99,43%

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya pembekalan survey PHBS sebanyak 1 kali kegiatan.
 - b. Terselenggaranya Rakor Capaian survey PHBS tk. Kot dengan jumlah peserta 35 orang.
- 5). Peningkatan kesehatan institusi dengan anggaran sebesar Rp. 21.720.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 14.185.000,00 atau sebesar 65,30%

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya Sosialisasi Perwali ttg UKS.
 - b. Terselenggaranya pertemuan koordinasi dengan petugas koordinator UKS Tk. Puskesmas.
 - c. Terselenggaranya Pelatihan Kader Inspektur Cilik (Pajak RokoK).
 - c. Terselenggaranya Kampanye Bahaya Narkoba (Pajak RokoK)
 - c. Terselenggaranya Aksi gosok gigi masal (Pajak RokoK)
- 6). Unit kegiatan bersumber daya masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 568.395.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi Rp. 549.495.000,00 atau sebesar 96,67%

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya Pertemuan kelompok kerja dalam rangka revitalisasi posyandu sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 35 orang .
 - b. Terselenggaranya Pertemuan advokasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang.
 - c. Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi dan advokasi Tim Pembina Kelurahan Siaga Tk. kota sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang.
 - d. Terselenggaranya Pelatihan tenaga surveilans kelurahan siaga tk kota sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang.
 - e. Terselenggaranya Pelatihan Kader Poskestren dalam rangka penguatan poskestren sebagai UKBM 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang.
- 7). Komunikasi informasi dan edukasi dengan anggaran sebesar Rp. 64.888.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 64.538.000,00 atau sebesar 99,46%
- Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :
- a. Terselenggaranya Kampanye CTPS DI Kelurahan Siaga
 - b. Terselenggaranya Pertemuan Rutin Kelompok Media Potensial.
 - c. Terselenggaranya Pemutaran Film Kesehatan di lingkup organisasi kemitraan/swasta.
 - d. Terselenggaranya Kampanye dan Deklarasi anti narkoba.
- 8). Penjaringan kesehatan anak pra sekolah dan anak dengan anggaran sebesar Rp. 29.335.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 27.885.000,00 atau sebesar 95,05%
- Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :
- a. Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Penjaringan anak sekolah sebanyak 20 kali dengan jumlah peserta 5 orang
 - b. Terselenggaranya Penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS Tk. SMP dan SMA sebanyak 5 kali dengan jumlah peserta 41 orang.
 - c. Terselenggaranya Pertemuan Monitoring & Evaluasi Hasil penjaringan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 10 orang

- 9). Pengembangan sekolah sehat dengan anggaran sebesar Rp. 36.205.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 28.065.500,00 atau sebesar 77,51%

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya Sosialisasi pemanfaatan tanaman obat tradisional di sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang.
- b. Terselenggaranya Rapat koordinasi tim penilai penentuan pemenang LSS Tk Kota sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 20 orang.
- c. Terselenggaranya Pertemuan evaluasi Pelaksanaan sekolah model promkes sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 15 orang

4. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 9.889.601.198,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.569.320.783,00 atau 99,57% yang telah dilaksanakan dengan kegiatan kemitraan asuransi kesehatan masyarakat.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah:

- a. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Kapitasi BPJS Kesehatan di 6 puskesmas
- b. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Klaim BPJS Kesehatan
- c. Tersedianya alat perkantoran berupa fiulling cabinet, lemari dan meubelair di 6 puskesmas

5. Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan Reproduksi dan KB

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program Kesehatan Keluarga , Kesehatan Reproduksi dan KB sebesar Rp. 147.849.500,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 145.341.950,00 atau 98,30 % yang telah dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). Pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan anggaran sebesar Rp. 119.799.500,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 118.381.950,00 atau sebesar 98,81 %

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya Koordinasi, validasi dan sinkronisasi data ANC Terpadu sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang
 - b. Terselenggaranya Pertemuan Kemitraan Bidan dengan Kader dan Dukun. selama 1 hari dengan jumlah peserta 30 orang
 - c. Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan dalam penanganan komplikasi Maternal dan Neonatal dengan Narasumber Ahli (SpOG/SpA) sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang
 - d. Terselenggaranya DRK (Diskusi Reflek Kasus) Tingkat Kota Bima sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang
 - e. Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor untuk peningkatan Cakupan Kunjungan bayi/balita sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang
- 2). Peningkatan keluarga berencana dan kesehatan remaja dengan anggaran sebesar Rp. 18.800.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 180.60.000,00 atau sebesar 96,06%
- Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :
- a. Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi pelaksanaan Program Remaja, KtA, KtP sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 25 orang
 - b. Terselenggaranya Pertemuan Pengelola Kelas Remaja untuk peningkatan Kesehatan Remaja sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 25 orang
 - c. Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Pelayanan KB Pasca Salin dan MKJP dengan Lintas Sektor sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang
- 3). Pelayanan kesehatan Usila dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 6.650.000,00 atau sebesar 95%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. terselenggaranya Pertemuan Evaluasi pelaksanaan Puskesmas santun Lansia sebanyak 1 kali dengan peserta sejumlah 38 peserta.
 - b. terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Puskesmas Santun Lansia sebanyak 1 kali dengan peserta sejumlah 38 peserta.
 - c. terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Program Usila dengan Lintas Program dan Lintas Sektoral 1 KL sebanyak 1 kali dengan peserta sejumlah 30 peserta.
- 4). Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 2.250.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.250.000,00 atau sebesar 100%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya laporan tahunan Dinas Kesehatan tahun 2017 sebanyak 1 dokumen.

b. Capaian Kinerja

Hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

1. Angka balita gizi buruk

Balita gizi buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor).

Angka balita gizi diperoleh dari membandingkan jumlah balita gizi buruk yang terjadi pada periode tertentu dengan Jumlah balita yang ada pada periode yang sama.

Angka balita gizi buruk di Kota Bima tahun 2017 adalah sebesar 0,078% dari target 0,09%, sama dengan capaian pada tahun 2017 yaitu sebesar 86%. Angka balita gizi buruk di Kota Bima sama dengan target, hal ini menjukan keberhasilan program dalam rangka menekan kejadian kasus gizi buruk yang ada di Kota Bima. Adapun keberhasilan capaian indikator tersebut karena adanya kegiatan penjangingan kasus secara bekala,

surveilans gizi, konsultasi, pemeriksaan balita oleh dokter ahli, pemantauan ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kelas gizi di puskesmas.

Program lain yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan gizi buruk, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) gizi kurang, Pemberian Makanan Tambahan (PMT)-ASI, pemberian biaya perawatan gizi buruk, diskusi refleksi kasus gizi buruk rakorcam tentang hasil penimbangan balita.

2. Menurunnya kasus kematian ibu (Maternal)

Kasus kematian ibu adalah Kematian perempuan pada saat hamil, melahirkan sampai dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh.

Indikator tersebut menggambarkan kasus kematian ibu selama tahun 2017. Indikator ini diberikan dalam rangka upaya menurunkan jumlah kasus kematian pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas di Kota Bima.

Jumlah kasus kematian ibu (maternal) di Kota Bima pada tahun 2017 sebanyak 188/100.000 kasus. Cakupan ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun target 2017 sebesar 58/100.000 kasus.

Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bima mengalami peningkatan jumlah kasus kematian ibu. Sesuai dengan target Kota Bima Tahun 2017 untuk indikator penurunan jumlah kasus kematian ibu, maka target tersebut belum mampu dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima. Namun bila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018 sebanyak 1 kasus, maka Dinas Kesehatan Kota Bima memiliki kewajiban untuk upaya penurunan jumlah kasus kematian ibu tersebut.

Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal yang diselenggarakan untuk mengkaji hal - hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan

persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai.

Hasil kajian audit didapatkan kematian ibu dengan adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung, asma dan kanker. Penyebab kematian ibu sebesar 50% karena penyebab langsung yaitu perdarahan dan eclampsia, hal ini dapat menjadi petunjuk bagi perencanaan program di tahun yang akan datang agar lebih difokuskan kepada kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan kewaspadaan dini masyarakat terhadap tanda bahaya serta risiko. Selain itu juga dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal teamwork yang solid serta response time yang cepat dalam hal pengenalan risiko, penegakan diagnosa dan ketepatan dalam pengambilan keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan tindakan dan kesalahan intervensi sehingga kematian ibu dapat dicegah dan diturunkan.

Program yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah program kesehatan reproduksi dan KB dengan kegiatan antara lain: Pertemuan Koordinasi, Validasi dan Sinkronisasi Data ANC Terpadu - Pertemuan Refresing APN - Pertemuan Kemitraan Bidan dengan Kader dan Dukun - DRK (Diskusi Refleksi Kasus) Tk. Kota Bima - Pengadaan Buku-buku Register KIA - Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Bayi ke Puskesmas - Pertemuan Peningkatan Pelayanan KB pasca Salin dan MKJP dengan Lintas Sektor - Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Puskesmas PKPR.

3. Menurunnya kasus kematian bayi, balita (0-59 bln)

Kematian yang terjadi pada bayi/anak balita usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita). Jumlah kasus kematian bayi, balita (0-5tahun) di Kota Bima pada tahun 2017 sebanyak 6/1000 kasus. Sesuai dengan target Kota Bima Tahun 2017 untuk indikator penurunan jumlah kasus kematian bayi, balita (0-5tahun) sebanyak 6/1000 kasus, maka tersebut mampu dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima. Hal ini menunjukan adanya progress yang maju dari program dalam rangka menekan kejadian kasus kematian bayi, balita di Kota Bima. Namun bila dibandingkan dengan

target RPJMD tahun 2018 sebanyak 16 kasus, maka Dinas Kesehatan Kota Bima masih memiliki kewajiban untuk upaya penurunan jumlah kasus kematian bayi, balita (0-5tahun) tersebut.

Program yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah program kesehatan reproduksi dan KB dengan kegiatan antara lain: Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam Penanganan Komplikasi Maternal dan Neonatal dengan Narasumber Ahli (SpOG/SpA) - Pertemuan Koordinasi Pemantauan Tumbang Bayi/Balita dengan Menggunakan Buku KIA pada Kelompok Potensial - Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor untuk Peningkatan Cakupan Kunjungan Bayi/Balita - Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Bayi ke Polindes - Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Remaja, KtA, KtP - Pertemuan Pengelola Kelas Remaja untuk Peningkatan Kesehatan Remaja.

b. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

Rumah tangga ber PHBS adalah rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi 10 indikator, yaitu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, balita diberi ASI eksklusif, mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan, tersedia air bersih, tersedianya jamban, kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni, lantai rumah bukan dari tanah (indikator terpilih); tidak merokok, melakukan aktivitas fisik setiap hari, makan sayur dan buah setiap hari.

Cakupan indikator ini diperoleh dari membandingkan antara jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat di suatu wilayah pada periode waktu tertentu dengan jumlah rumah tangga yang dipantau/disurvei di wilayah dan pada kurun waktu yang sama.

Cakupan Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS tahun 2016 adalah sebesar 10%, masih dibawah dari target 36%, masih sama bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 10%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 50%, masih sekitar 40% yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima, sehingga untuk tahun berikutnya perlu ditingkatkan capaiannya. Adapun kendala yang dihadapi sehingga belum tercapainya target

tersebut adalah kurangnya dukungan masyarakat dan anggaran, sehingga kesadaran masyarakat ber PHBS perlu ditingkatkan lagi dan penambahan anggaran. Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS diukur dari 10 (sepuluh) indikator, dimana apabila terdapat satu saja indikator yang belum terpenuhi dari sepuluh indikator tersebut, maka rumah tangga tersebut belum dikategorikan rumah tangga ber PHBS. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kesehatan khususnya Bidang Promosi Kesehatan dalam menjalankan program PHBS tersebut. Program yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan antara lain survey PHBS RT dan evaluasi hasil capaian survey PHBS RT.

2. Meningkatnya akses sanitasi dasar yang layak

Sanitasi dasar yang dimaksud adalah meliputi rumah sakit, air minum berkualitas, dan jamban sehat. Sanitasi dasar yang layak adalah sarana sanitasi yang memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Cakupan indikator ini diperoleh dari membandingkan antara jumlah sarana sanitasi dasar yang memenuhi syarat dengan jumlah sarana sanitasi dasar yang ada.

Cakupan akses sanitasi dasar yang layak di Kota Bima tahun 2016 target sebesar 86,3%, realisasinya sebesar 90,23% dan mampu melebihi yang ditargetkan. Cakupan ini mengalami peningkatan 4,23% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 86%. Untuk target jangka menengah sebesar 96,6%, Dinas Kesehatan Kota Bima masih sekitar 5,37% yang harus dipenuhi. Program yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah program pengembangan lingkungan sehat, dengan kegiatan antara lain: pengawasan sarana air bersih (SGL,SPT,SPT-DK, SPT-DL), pengawasan mata air, pengawasan sarana air perpipaan(PDAM), pengawasan DAM&AMDK.

3. Meningkatnya cakupan TTU dan TPM yang memenuhi syarat laik Hygiene Sanitasi

Tempat-tempat umum (TTU) adalah Tempat atau sarana yang diselenggarakan pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat yang meliputi: sarana kesehatan

(rumah sakit, puskesmas), sarana sekolah (SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA), dan hotel (bintang dan non bintang). Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) adalah Usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasa boga atau catering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan. TTU dan TPM yang memenuhi syarat laik higiene sanitasi adalah TTU yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi dengan bukti dikeluarkannya sertifikasi laik higiene sanitasi.

Cakupan indikator ini diperoleh dari membandingkan antara jumlah TTU dan TPM yang memenuhi syarat laik higiene sanitasi dengan jumlah TTU dan TPM yang ada. Cakupan TTU dan TPM yang memenuhi syarat laik Hygiene Sanitasi tahun 2016 target sebesar 92%, realisasinya sebesar 77,38% dan belum mencapai dari target. Cakupan ini mengalami penurunan 14,62% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 91%. Untuk target jangka menengah sebesar 99%, Dinas Kesehatan Kota Bima masih sekitar 21,62% yang harus dipenuhi. Program yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, dengan kegiatan antara lain: pengawasan & pembinaan tempat-tempat umum, pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga, pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant, pertemuan koordinasi dan konsolidasi STBM dengan Toga, Toma, Pertemuan advokasi pilar I STBM pada kelompok tidak memiliki jamban, pembinaan kelompok pemakai mck dan pokmair, pertemuan lintas sektor evaluasi STBM tingkat kelurahan.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kesehatan adalah sebagai berikut.

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang menyebabkan capaian kinerja masih dibawah target yaitu :

- Cakupan penggunaan injeksi pada kasus terpilih tahun 2017 adalah sebesar 0,01%, masih dibawah dari target 1%, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan injeksi pada kasus terpilih di Kota Bima lebih baik karna penggunaannya tidak lebih dari 1%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 0%, maka masih ada yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima untuk mencapai target tersebut. . Adapun penyebab tercapainya target tersebut adalah adanya kesadaran dari pihak medis maupun paramedis dalam menggunakan obat secara rasional dan penyediaan obat injeksi yang sering digunakan pada kasus myalgia sudah dikurangi.
- Cakupan rawat inap tahun 2017 adalah sebesar 0,01%, dibawah dari target 1,5%, mengalami penurunan 1% jika dibanding dengan capaian tahun 2013 sebesar 1,35%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 5%, masih sekitar 5% yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima. Belum terpenuhinya target indicator ini disebabkan keterbatasan ruang rawat Inap dikarenakan puskesmas perawatan hanya ada 2 di Kota Bima, sehingga masyarakat lebih banyak yang langsung ke RSUD Kab. Bima yang letaknya di Kota Bima.
- Cakupan pelayanan kesehatan indera tahun 2017 adalah sebesar 2,6%, masih dibawah dari target 100%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100%, masih sekitar 92% yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima. Adapun kendala yang dihadapi sehingga belum tercapainya target tersebut adalah sulit dibedakan antara masyarakat miskin dengan yang lainnya karena semua tercover dalam kartu BPJS.
- Persentase ketersediaan sarana & prasarana rumah sakit tahun 2017 adalah sebesar 0%, masih dibawah dari target 30%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100%, maka 100% yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima pada tahun berikutnya. Adapun kendala yang dihadapi sehingga belum tercapainya target tersebut adalah tidak adanya lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit.

2. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

- Melakukan pertemuan peningkatan penggunaan obat yang rasional dan monitoring penggunaan obat rasional di puskesmas.
- Melakukan kegiatan pelayanan kartu jujur sehati dan kegiatan pelayanan BPJS
- Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan BPJS dan kegiatan pelayanan rujukan yang ditanggung APBD pemerintah Kota Bima
- Mengajukan usulan anggaran yang bersumber dari dana DAK maupun Dana TP serta mengajukan pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit tersebut pada pemerintah Kota Bima.

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 177.203.015.550,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 175.736.683.068,00 atau sebesar 99,17%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan wajib pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.120. Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.533.423.250,00	2.468.180.559,00	97,42
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.452.000,00	63.209.043,00	73,97
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	61.220.000,00	45.171.100,00	73,78
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	130.200.000,00	130.200.000,00	100,00
4	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
5	Penyediaan alat tulis kantor	93.284.250,00	92.788.050,00	99,47
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	126.140.000,00	125.322.125,00	99,35
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	457.292.000,00	456.050.000,00	99,73
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	138.280.000,00	130.585.000,00	94,44
9	Penyediaan makanan dan minuman	51.640.000,00	50.990.000,00	98,74
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.242.115.000,00	1.233.575.241,00	99,31
11	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	142.800.000,00	135.290.000,00	94,74
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	430.940.000,00	390.044.032,00	90,51
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	190.000.000,00	189.300.000,00	99,63
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	209.040.000,00	170.337.032,00	81,49
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	31.900.000,00	30.407.000,00	95,32
III	Program peningkatan disiplin aparatur	130.800.000,00	129.890.000,00	99,30
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	130.800.000,00	129.890.000,00	99,30
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	0,00
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	218.300.000,00	215.150.000,00	98,56
1	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24.650.000,00	24.650.000,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	24.650.000,00	24.650.000,00	100,00
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	12.350.000,00	12.350.000,00	100,00
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	24.650.000,00	24.000.000,00	97,36
5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	98.500.000,00	96.000.000,00	97,46
6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	33.500.000,00	33.500.000,00	100,00
VI	Program peningkatan jalan dan jembatan	72.765.688.000,00	72.604.171.800,00	99,78
1	Peningkatan jalan	72.765.688.000,00	72.604.171.800,00	99,78
VII	Program pembangunan jalan dan jembatan	7.429.736.000,00	7.359.519.000,00	99,05
1	Pembangunan jalan	7.429.736.000,00	7.359.519.000,00	99,05
VIII	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3.551.018.000,00	3.490.783.158,00	98,30
1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.671.597.000,00	2.667.356.000,00	99,84
2	Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	879.421.000,00	823.427.158,00	93,63

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
IX	Program pembangunan turap/talud/bronjong	8.942.796.000,00	8.924.919.000,00	99,80
1	Pembangunan turap/talud/bronjong	8.942.796.000,00	8.924.919.000,00	99,80
X	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	16.009.856.000,00	15.999.981.000,00	99,94
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	15.910.156.000,00	15.900.281.000,00	99,94
2	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	99.700.000,00	99.700.000,00	100,00
XI	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	241.000.000,00	239.760.000,00	99,49
1	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	241.000.000,00	239.760.000,00	99,49
XII	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	522.330.000,00	510.234.000,00	97,68
1	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	319.150.000,00	308.794.000,00	96,76
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	203.180.000,00	201.440.000,00	99,14
XIII	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	7.096.617.000,00	6.753.885.700,00	95,17
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.	2.080.400.000,00	2.049.978.000,00	98,54
2	Pembangunan Jaringan Irigasi.	5.016.217.000,00	4.703.907.700,00	93,77
XIV	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	8.729.003.000,00	8.602.010.000,00	98,55
1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	5.506.453.000,00	5.380.419.000,00	97,71
2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah.	3.178.360.000,00	3.177.491.000,00	99,97
3	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah.	44.190.000,00	44.100.000,00	99,80
XV	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	27.465.894.800,00	27.430.512.000,00	99,87
1	Pembangunan/peningkatan infrastruktur.	26.716.173.000,00	26.699.940.000,00	99,94
2	Pendampingan NUSP-phase 2.	557.763.200,00	555.902.000,00	99,67
3	Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).	191.958.600,00	174.670.000,00	90,99
XVI	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	14.975.773.000,00	14.912.123.500,00	99,57
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan.	87.300.000,00	87.262.000,00	99,96
2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan.	14.888.473.000,00	14.824.861.500,00	99,57
XVII	Program peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum	4.617.827.000,00	4.427.714.319,00	95,88
1	Peningkatan dan pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan umum.	4.617.827.000,00	4.427.714.319,00	95,88

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
XVIII	Program Perencanaan Tata Ruang	958.598.500,00	705.911.700,00	73,64
1	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL.	388.490.000,00	147.240.000,00	37,90
2	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.	401.505.900,00	399.892.900,00	99,60
3	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang.	93.516.000,00	86.154.200,00	92,13
4	Survey dan pemetaan.	75.086.600,00	72.624.600,00	96,72
XIX	Program Pemanfaatan Ruang	419.147.000,00	417.339.650,00	99,57
1	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang.	365.958.000,00	365.223.750,00	99,80
2	Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan.	53.189.000,00	52.115.900,00	97,98
XX	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	164.268.000,00	154.553.650,00	94,09
1	Penerbitan Sertifikat IMB.	65.668.000,00	58.096.900,00	88,47
2	Penerbitan Sertifikat SLF (Sertifikat Layak Fungsi).	49.300.000,00	48.120.000,00	97,61
3	Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).	49.300.000,00	48.336.750,00	98,05

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ini menghasilkan beberapa keluaran (*output*) penting, yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Program ini diwujudkan melalui kegiatan peningkatan jalan. Adapun keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya peningkatan jalan dan jembatan di Kota Bima, yang meliputi :

Tabel 2.121. Output Kegiatan pada Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

NO	Item Pekerjaan	Panjang
1	Peningkatan jalan lingkaran Dorokumbe	1,6 km
2	Peningkatan jalan Toloweri - Kabanta	7,1 km
3	Peningkatan jalan Kodo - Dodu	4,67 km
4	Peningkatan jalan Kendo - Kabanta	5,5 km
5	Peningkatan jalan Rite - Ntobo	6,1 km
6	Peningkatan jalan Kodo - Lelamase	5,3 km
7	Peningkatan jalan Dorokumbe - Nungga	1,8 km
8	Peningkatan jalan Abubakar Husein, Cs	1,85 km
9	Peningkatan jalan So Tolo Lalu Kel. Oi Fo'o	0,35 km
10	Peningkatan jalan Nggaro Te	0,3 km

NO	Item Pekerjaan	Panjang
11	Peningkatan jalan Lingkungan Matakando	0,3 km
12	Peningkatan jalan Rabantala Matakando	0,15 km
13	Peningkatan jalan Kel. Matakando	0,3 km
14	Peningkatan jalan Sambinae - Sadia	0,2 km
15	Peningkatan jalan depan peskesmas Jatiwangi	0,35 km
16	Peningkatan jalan belakang kantor perhubungan kab.	0,2 km
17	Peningkatan jalan Bonto Kel. Kolo 1	0,2 km
18	Peningkatan jalan Oi Mbo Lampe	0,2 km
19	Peningkatan jalan perempatan sebelah selatan Masjid Uswatun Hasanah	0,2 km
20	Peningkatan jalan RT Kel. Kolo	0,2 km
21	Peningkatan jalan Bonto Kel. Kolo 2	0,3 km
22	Peningkatan jalan Penanae-Wenggo	0,15 km
23	Peningkatan jalan Jatiwangi	0,2 km
24	Peningkatan jalan Ntobo - Busu	0,2 km
25	Peningkatan jalan Melayu - Kolo	0,2 km
26	Peningkatan Jalan Oi Fo'o - Wangge	0,25 km
27	Peningkatan jalan Penanae - Kendo	0,2 km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini diwujudkan melalui kegiatan pembangunan jalan. Adapun keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan di Kota Bima, yang meliputi :

Tabel 2.122. Output Kegiatan pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

NO	Item Pekerjaan	Panjang
1	Pembukaan jalan So Naru Kel. Oi Fo'o	0,20 km
2	Pembangunan jalan Nggaro Bae 1	0,25 km
3	Pembangunan jalan Rontu	0,25 km
4	Pembangunan jalan Nggaro Bae 2	0,35 km
5	Pembukaan jalan Baru Jl. Oi Si'i-Nggaro Dungga	0,35 km
6	Lanjutan Pembangunan jalan lingkungan Kel. Rabadompu Timur	0,20 km
7	Pembukaan jalan ekonomi so Risa Kel. Lelamase	0,40 km
8	Lanjutan pembukaan jalan ekonomi so Oi Lubu Kel. Dodu	0,40 km
9	Pembukaan jalan ekonomi so Sipi Kel. Dodu	0,40 km
10	Pembukaan jalan ekonomi so Manta	0,20 km
11	Lanjutan Pembukaan jalan Lingkungan Bonto	0,40 km
12	Lanjutan Pembukaan jalan ekonomi Kel. Kodo	0,20 km
13	Lanjutan Pembukaan jalan Barudi Torotompa	0,40 km
14	Pembukaan jalan So Lembo	0,20 km
15	Pembukaan jalan Baru Rontu – Oi Si'i Rontu	2,50 km

NO	Item Pekerjaan	Panjang
16	Pembukaan jalan ekonomi Kel. Matakando	0,30 km
17	Pembukaan jalan lingkungan Ni'u	0,30 km
18	Pembukaan jalan so Sanumbe	2,00 km
19	Pembangunan jalan Ncai Kapenta - Ndano Nae	2,50 km
20	Pembukaan jalan so Gantu Nitu	2,50 km
21	Pembukaan jalan so Sori Nonto Nitu	2,50 km
22	Pembukaan jalan so Laju Nitu	2,50 km
23	Pembukaan jalan so Mangge Pajo Nitu	2,50 km
24	Peningkatan Jalan Nggaro Nenggu - Rontu	2,50 km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

3. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan serta rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong. Adapun keluaran (output) dari program ini adalah terlaksananya pembangunan saluran drainase yang meliputi :

Tabel 2.123. Output Kegiatan pada Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

NO	Item Pekerjaan	Panjang
1	Cor Plat Penutup Saluran Drainase Link. Gindi depan SDN 58 Jatiwangi	200 m
2	Pembangunan Drainase Lingkungan Era Baru Kel. Mandé	150 m
3	Pembangunan Drainase Lingkungan Mandé	300 m
4	Pembangunan Drainase Lingkungan Monggonao	200 m
5	Pembangunan Drainase Depan Kantor POLRES (Gunung dua)	300 m
6	Cor Plat Penutup Saluran Drainase RT 07 Kel. Kodo	200 m
7	Pembangunan Drainase RT.05 Kel. Penanae	300 m
8	Pembangunan Drainase Perumahan Rontu	200 m
9	Pembangunan Drainase Rabantala Kel. Matakando	200 m
10	Pembangunan Drainase Rabantala Kel. Santi	200 m
11	Pembangunan Drainase Link. Belakang kantor pengadilan Raba	200 m
12	Lanjutan Drainase Mandé III	200 m
13	Pembangunan Drainase Rabangodu Utara	200 m
14	Talud RT 05 RW 03 Kel. Panggi	1 pkt
15	Pembangunan Drainase Lingkungan Mekar Baru	200 m
16	Peningkatan Drainase RT 03 Kel. Penaraga	200 m
17	Peningkatan Drainase Lingkungan Penatoi sebelah barat masjid	400 m
18	Pembangunan Drainase di BTN Gudang Pupuk	100 m
19	Peningkatan Drainase RW 04 Kel. Rabadompu Barat	200 m
20	Normalisasi Drainase dan cor plat penutup saluran drainase Rontu	100 m

NO	Item Pekerjaan	Panjang
21	Pembangunan Drainase BTN Sadia	200 m
22	Pasangan saluran Kel. Rabangodu Selatan	300 m
23	Pembangunan Drainase BTN Gindi Kel. Jatiwangi	275 m
24	Pembangunan Drainase Lingkungan Sadia	350 m
25	Lanjutan Pembangunan Drainase Kel. Matakando	100 m
26	Pembangunan Drainase Lingkungan Bonto Kel. Kolo	200 m
27	Pembangunan Drainase Wenggo Kel. Penanae	300 m

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

4. Program Pembangunan Turap/Talud/bronjong

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong. Adapun keluaran (output) dari program ini adalah terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong yang meliputi :

Tabel 2.124. Output Kegiatan pada Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

NO	Item Pekerjaan	Panjang
1	Perkuatan tebing sungai Kodo	200 m
2	Bronjong sungai Melayu 2	400 m
3	Perkuatan tebing saluran pembuang Gindi	160 m
4	Perkuatan tebing sungai Mada Oi Fo'o	200 m
5	Perkuatan tebing sungai Jatiwnagi 1	200 m
6	Perkuatan tebing sungai Kendo	200 m
7	Perkuatan tebing saluran pembuang Penaraga	200 m
8	Perkuatan tebing sungai Penanae	200 m
9	Perkuatan tebing saluran Pembuang Rontu-Rabangodu	170 m
10	Perkuatan tebing sungai Penanae 2	200 m
11	Talud di Link. Rabantala samping kantor lurah	320 m
12	Perkuatan tebing saluran pembuang BTN Sambinae	200 m
13	Perkuatan tebing saluran Pembuang Nggaronangga	200 m
14	Perkuatan tebing Pantai Kolo	200 m
15	Perkuatan tebing sungai Lingk. Na'e	200 m
16	Perkuatan tebing sungai Lingk. Monggonao	200 m
17	Perkuatan tebing sungai Ntobo (Tolokolo)	200 m
18	Perkuatan tebing sungai Jatiwangi 2	200 m
19	Perkuatan tebing sungai Salewi	200 m
20	Perkuatan tebing sungai Matakando	200 m
21	Bronjong sungai Santi	286 m
22	Lanjutan Talud sungai Santi RT 06 Kel. Santi	114 m
23	Perkuatan Bronjong sungai lingk. Wenggo	143 m
24	Perkuatan tebing sungai Mandé	143 m

NO	Item Pekerjaan	Panjang
25	Bronjong sungai Rt 01 Kel. Rontu	286 m
26	Perkuatan tebing saluran Pembuang Rt 4 dan RT 6 Kel. Rontu	286 m
27	Perkuatan tebing saluran Pembuang Rontu - Panggi	286 m
28	Perkuatan tebing saluran Pembuang samping kantor lurah Rontu	200 m
29	Perkuatan tebing / bronjong sungai Ntobo	286 m
30	Perkuatan tebing saluran pembuang Naggaro Bae	143 m
31	Perkuatan tebing sungai Kendo Depan Lurah Kendo	214 m
32	Perkuatan tebing saluran pembuang Kel. Jatibaru	143 m
33	Bronjong sungai So Sipi Kel. Dodu	214 m
34	Perkuatan tebing sungai Dodu (lanjutan)	286 m
35	Perkuatan tebing Sungai Dodu I	286 m
36	Bronjong sungai lingk. Toloweri Nungga	143 m
37	Bronjong perkuatan tebing sungai Kodo (lanjutan)	143 m
38	Perkuatan tebing lingk. Salama Kel. Na'e	105 m
39	Talud sungai Santi	100 m
40	Lanjutan Bronjongnisasi sungai santi	286 m
41	Perkuatan tebing sungai lampe	286 m
42	Bronjongnisasi sungai BTN Santi	143 m
43	Bronjong sungai RT 2 Kel. Rontu	143 m
44	Pemasangan bronjong/talud sungai santi	286 m
45	Pemasangan talud sungai Santi	100 m
46	Perkuatan tebing saluran pembuang kel. Pane	100 m
47	Perkuatan tebing sungai lingkungan Lela Kel. Jatibaru	143 m
48	Perkuatan tebing sungai Kolo Kel. Kolo	286 m
49	Perkuatan tebing sungai Nggarolo	143 m
50	Talud RT 08 sebelah kuburan Penatoi	300 m
51	Bronjongnisasi RT 10. Kel. Penatoi	300 m
52	Perkuatan tebing saluran pembuang Nungga	50 m
53	Perkuatan tebing RT 13 Salama	109 m
54	Perkuatan tebing sungai Sapaga	143 m
55	Perkuatan tebing sungai So Ati Kel. Kolo	143 m
56	Perkuatan tebing sungai Lampe	75 m
57	Bronjongnisasi sungai Ntobo Kel. Ntobo	300 m
58	Pemasangan jaringan irigasi perpipaan so Ra'u ke so Rea Kel. Ntobo	200 m
59	Bronjongnisasi sungai Santi Kel. Santi	100 m
60	Perkuatan tebing sungai Salama Kel. Na'e	200 m
61	Pemeliharaan Tebing DAM Tolokodo	1 pkt
62	Perkuatan tebing DAM Risa	1 pkt
63	Perkuatan tebing DAM Dadi Rabadompu	1 pkt
64	Perkuatan tebing DAM Lara	1 pkt
65	Rehabilitasi DAM Mango	1 pkt

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

5. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.900.281.000,00 atau 99,94%.
- b. Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.700.000,00 atau 100%.

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, yang meliputi :

Tabel 2.125. Output Kegiatan pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

NO	Item Pekerjaan	Panjang
1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan (Ruas tersebar)	0,30 km
2	Pemeliharaan Jalan Lingkar Nggarolo	0,30 km
3	Pemeliharaan Jalan Oi Sii - Nitu	0,30 km
4	Pemeliharaan Jalan Nitu - Radendeu	0,20 km
5	Pemeliharaan Jalan Kamboja	0,32 km
6	Pemeliharaan Jalan Kumbe – Oi Fo’o	0,20 km
7	Pemeliharaan Jalan Mawar	0,25 km
8	Pemeliharaan Jalan Rontu - Nitu	0,26 km
9	Pemeliharaan Jalan Mongisid, Cs	1,80 km
10	Pemeliharaan Jalan Kompi Karantina	4,16 km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.049.978.000,- atau 98,54%.
- b. Pembangunan jaringan irigasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.703.907.700,- atau 93,77%.

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.126. Output Kegiatan pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

NO	Item Pekerjaan	Volume
----	----------------	--------

NO	Item Pekerjaan	Volume
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		
1	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi (ruas tersebar)	1 kgt
2	Rehabilitasi daerah irigasi Keci Ntobo	1,60 km
3	Rehabilitasi daerah irigasi Risa	1,80 km
4	Rehabilitasi daerah irigasi Sari	1,80 km
Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi		
1	Peningkatan Saluran Irigasi Rangga	300 m
2	Peningkatan Saluran Irigasi Rontu	250 m
3	Peningkatan Saluran Irigasi Nungga	200 m
4	Peningkatan Saluran Irigasi Dodu	300 m
5	Peningkatan Saluran Irigasi Sangga	300 m
6	Peningkatan Saluran Irigasi Prambanan	300 m
7	Pembangunan Saluran Irigasi Dadimboda	200 m
8	Pembangunan Saluran Irigasi Tolo Kodo	200 m
9	Pembangunan Saluran Irigasi Dam Mango	70 m
10	Pembangunan Saluran Irigasi Dam Nae	70 m
11	Pembangunan Saluran Irigasi Dam Dadi Bou	70 m
12	Pembangunan Saluran Irigasi Dam Tolotike	70 m
13	Pembangunan Saluran Irigasi Dam Busu	70 m
14	Pembangunan Saluran Irigasi Nggaro Nangga	70 m
15	Pembangunan Saluran Irigasi dadi Bou Jatibaru	70 m
16	Pembangunan Saluran Irigasi Soncolela	70 m
17	Pembangunan Saluran Irigasi Rabangodu Selatan	100 m

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

Adapun hasil (*outcomes*) nya meliputi:

- a. Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Pengairan.
- b. Normalnya Kelancaran Saluran D.I.

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi MBR dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.380.419.000,- atau 97,71%.

- b. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.177.491.000,- atau 99,97%.
- c. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.100.000,- atau 99,80%.

Tabel 2.127. Output Kegiatan pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

NO	Item Pekerjaan	Volume
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi MBR		
1	Optimalisasi SPAM Perdesaan Lingk. Tolotando Kel. Matakando	500 jiwa
2	Optimalisasi SPAM Perdesaan Kel. Monggonao	500 jiwa
3	Optimalisasi SPAM Perdesaan Kel. Rontu	500 jiwa
4	Optimalisasi SPAM Perdesaan Kel. Penatoi	625 jiwa
5	Optimalisasi SPAM Perdesaan Kel. Rite	625 jiwa
6	Optimalisasi SPAM Perdesaan Kel. Jatibaru	300 jiwa
7	Pemasangan Pipa Tersier dan Sambungan Rumah Kel. Dodu	1500 jw
8	Pemasangan Pipa Tersier dan Sambungan Rumah Kel. Tanjung	625 jiwa
9	Pemasangan Pipa Tersier dan Sambungan Rumah Oi Niu Kel. Dara	625 jiwa
10	Pembangunan Reservoir SPAM Pedesaan Kel. Lelamase	1000 jwa
11	Pembangunan SPAM Kel. Kendo	1300 jwa
12	Pembangunan SPAM Lingk. Wenggo Kel. Penanae	1300 jwa
13	Pembangunan SPAM Kel. Jatibaru	650 jiwa
14	Pembangunan SPAM RW 01 Kel. Rontu	650 jiwa
15	Pembangunan SPAM Lingk. Penanae Kel. Penanae	1300 jwa
16	Pembangunan SPAM Kel. Matakando	650 jiwa
17	Optimalisasi SPAM Sori Baru Kel. Lelamase	1000 jwa
18	Pembangunan SPAM So Ati Kel. Kolo	1 pkt
19	Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Kel. Sambinae	1 pkt
20	Optimalisasi SPAM Ndanonae	400 jiwa
21	Pemeliharaan Sarana Air Bersih Kota Bima	1 pkt
22	Peningkatan Jaringan Distribusi Air Bersih SPAM Kadole	1 pkt
23	Pengadaan Sarana Air Bersih	1 pkt
24	Pemeliharaan Sumur Temba Bedi Kel. Manggemaci	1 pkt
25	Pengadaan Bak HU untuk lokasi Berdampak Banjir	300 jiwa

NO	Item Pekerjaan	Volume
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah		
1	Pembangunan IPAL Komunal dan SR Kel. Ntobo	500 jiwa
2	Pembangunan IPAL Komunal dan SR Kel. Dodu	500 jiwa
3	Pembangunan IPAL Komunal dan SR Kel. Oi Fo'o	500 jiwa
4	Pembangunan IPAL Komunal dan SR Kel. Jatibaru	500 jiwa
5	Pembangunan IPAL Komunal dan SR Kel. Kendo	500 jiwa
6	Pembangunan IPAL Komunal dan SR Kel. Rabadompu Barat	500 jiwa
7	Pembangunan IPAL Komunal dan SR Kel. Lelamase	500 jiwa
8	Pembangunan IPAL Pasar Amahami	1000 jiwa

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

Adapun hasil (*outcomes*) nya adalah Meningkatnya cakupan layanan air minum dan air limbah perkotaan.

8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- Pembangunan/peningkatan infrastruktur dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.699.940.000,- atau 99,94%.
- Pendampingan NUSP- phase 2 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 555.902.000,- atau 99,67%.
- Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 174.670.000,- atau 90,99%.

Tabel 2.128. Output Kegiatan pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

No.	Item Pekerjaan	Volume
1	Penataan Tipikal bangunan Komersil Lawata	1 pkt
2	Penataan Parkir Lawata	1 pkt
3	Penataan Taman Lawata	1 pkt
4	Penataan lahan Lawata	25 m
5	Pagar lingkungan markas Brimob	40 m
6	Penataan Kawasan Ni'u (lanjutan)	1 pkt
7	Penataan Kawasan Amahami	1 pkt
8	Pembuatan talud lingk. RT 11 dan 12 Kel. pane	30 m

No.	Item Pekerjaan	Volume
9	Pembangunan talud lingkungan Kel. Ntobo	400 m
10	Talud permukiman RT 01/RW.02 Kendo	200 m
11	Talud di lingkungan Lela Kel. Jatibaru	400 m
12	Penataan lapangan Lelamase	200 m
13	Penataan lapangan Dodu	200 m
14	Penataan lapangan Bedi Kel. Manggemaci	1 pkt
15	Penataan lingkungan permukiman Rabadompu Barat	1 pkt
16	Penataan lingkungan Kel. Ntobo	200 m

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan. Adapun keluaran (output) dari program ini adalah dibangunnya Akses Jalan lingkungan yang meliputi :

Tabel 2.129. Output Kegiatan pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

NO	Item Pekerjaan	Volume
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Kota Bima Tersebar	10 km
2	Rabat Gang RT 05 Kel. Kodo	200 m
3	Rabat Gang lokasi Kuburan Kel. Paruga	1 pkt
4	Pembukaan jalan lingkungan Sabali	150 m
5	Pembangunan drainase jalan lingkaran Nggaro Lo	100 m
6	Peningkatan jalan lingkaran So Nggela	100 m
7	Talud jalan lingkaran Ntobo	200 m
8	Rabat Gang saluran di Bedi RW 03 Kel. Manggemaci	200 m
9	Pembukaan jalan lingkungan Kel. Dodu	100 m
10	Talud dan rabat gang Kel. Dodu	100 m
11	Peningkatan jalan lingkungan Dusun Bonto Kel. Kolo (lanjutan)	380 m
12	Rabatnisasi Jalan Lingk. Pelita	180 m
13	Peningkatan jalan lingkungan Ke kuburan Tolotongga	180 m
14	Pelebaran jalan Ekonomi dari lingkungan Lela ke Spada II	380 m
15	Pembukaan jalan baru Kel. Rabangodu Utara	350 m
16	Peningkatan jalan Dusun Bonto	400 m
17	Pembukaan jalan baru Lingk. Ni'u	280 m

NO	Item Pekerjaan	Volume
18	Pembangunan jalan Torotompa Kel. Jatiwangi	400 m
19	Jembatan Gantung Melayu Rasa Pali Kel. Melayu	1 pkt
20	Pembukaan jalan Kel. Rontu	400 m
21	Pembukaan jalan Lingkungan Matakando	400 m
22	Rabat Gang Kel. penaraga	400 m
23	Pembukaan Jalan Lingkungan	300 m
24	Drainase/rabat gang Santi	500 m
25	Pembukaan Jalan Lingkungan Rabadompu	200 m
26	Pembangunan drainase/rabat gang Lewirato	400 m
27	Pemasangan drainase/rabat gang Matakando	500 m
28	Peningkatan jalan lingk. Kolo	400 m
29	Pembangunan jembatan gantung Kel. Rontu	1 pkt
30	Pembangunan jembatan Lingkungan Salama Kel. Na'e	1 pkt
31	Pembangunan jalan lingkungan Penaraga	1 pkt
32	Talud jalan lingkungan Sabali Kel. Kumbe	200 m
33	Pembukaan jalan lingkungan Nggarobae Kel. Rabadompu Barat	300 m
34	Peningkatan jalan lingkungan So Nggela (lanjutan)	300 m

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

10. Program Perencanaan Tata Ruang

Program perencanaan tata ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 958.598.500,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 705.911.700,00,- atau sebesar 73,64%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- Penetapan kebijakan tentang RDTR Perkotaan.
- Penyusunan RTBL Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bima.
- Survei dan Pemetaan (Wilayah Sempadan Sungai)

Adapun keluaran (*output*) penting dari program ini adalah:

- Terlaksananya pembahasan dokumen RDTRK Kecamatan Rasana'e Barat di BKPRN.

- Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bima.
- Tersedianya dokumen hasil Survei dan Pemetaan (Wilayah Sempadan Sungai Padolo dan Melayu).

11. Program Pemanfaatan Ruang

Program Pemanfaatan Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 419.147.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 417.339.650,00,- atau sebesar 99,57%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan Ruang. Adapun keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah terlaksananya monev pemanfaatan ruang di Kecamatan Rasana'e Barat yang telah terdokumentasi dalam 1 (satu) laporan.

12. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- a. Penerbitan Sertifikat IMB dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58.096.000,- atau 88,47%. Adapun keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah telah dikeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan sebanyak 432 IMB pada tahun 2017.
- b. Penerbitan Sertifikat SLF (Sertifikat Layak Fungsi) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.120.000,- atau 97,61%. Adapun keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah belum ada dikeluarkannya Sertifikat Layak Fungsi pada tahun 2017.
- c. Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.336.750,- atau 98,05%. Adapun keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah terbentuknya tim ahli dalam menganalisis kelayakan bangunan gedung.

Adapun hasil (*outcomes*) nya adalah terlaksananya tertib tata ruang kota oleh berbagai pihak yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga dapat mewujudkan Kota Bima yang Bersih, Tertib dan Aman.

b. Capaian Kinerja

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi beberapa indikator kinerja penting sebagaimana dideskripsikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.130. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Penduduk terlayani IPAL, SPAM dan SR	3.470 KK	2.504 KK	72,17
-	Jumlah Penduduk yang terlayani IPAL dan SR	3.853 KK	2.685 KK	69,69
-	Jumlah Penduduk Terlayani Kebutuhan Air Minum	3.086 KK	2.323 KK	75,28
2	Panjang jaringan Jalan yang dibangun	7,10 Km	9,60 Km	135,25
3	Panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik	3.717,68 m	799,80 m	21,51
-	Panjang jaringan irigasi terpelihara	1.089,85 m	204,46 m	18,76
-	Panjang jaringan irigasi terbangun	2.627,82 m	594,60 m	22,62
4	Panjang jaringan jalan yang berfungsi baik	8,33 Km	8,19 Km	98,36
-	Panjang jalan yang dipelihara	8,33 Km	8,19 Km	98,36
-	Jumlah jembatan yang dipelihara	1 bh	1 bh	100
9	Peningkatan jalan dan jembatan	38,13 Km	41,31 Km	108,36
10	Dokumen data dasar jalan dan jembatan yang disusun	5 kali	5 kali	100
-	Jumlah dokumen yang disusun	5 dok	5 dok	100
11	Penerangan jalan umum yang berfungsi baik	334 T.Lp	334 T.Lp	100
12	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	5.312 m	7.792,43 m	146,69
-	Panjang Saluran Drainase Terbangun	4.262 m	7.259,57 m	170,33
-	Panjang Saluran Drainase Terpelihara	1050 m	532,85 m	50,75
13	Panjang sungai yang berfungsi baik	2.080 m	3.759 m	180,72
-	Panjang turap/talud/bronjong terbangun	2.080 m	3.759 m	180,72
14	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	17,34 Km	26,25 Km	151,38
-	Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan	17,34 Km	26,25 Km	151,38
15	Luas Penanganan wilayah kumuh	6,50 Ha	5,86 Ha	90,15
-	Luas wilayah strategis yang terbangun	3,5 Ha	5,7 Ha	162,89
-	Luas wilayah penanganan program NUSP	1,75 Ha	0,12 Ha	6,74
-	Luas wilayah penanganan program Tanpa Kumuh (KOTAKU)	1,25 Ha	0,04 Ha	3,25
16	Jumlah Dokumen Tata Ruang Kota Bima	3 Dok	2 Dok	73,06

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
-	Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan RDTRK, RTRK, dan RTBL	1 Dok	0 Dok	0
-	Jumlah dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan	1 Dok	1 Dok	100
-	Jumlah Dokumen data dasar dan pemetaan	1 Dok	1 Dok	100
17	Jumlah Standar Acuan Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	5 Dok	4 Dok	80
18	Kelayakan bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB dan SLF	250 IMB	250 IMB	100
-	Jumlah dokumen pengajuan IMB yang direkomendasikan	250 IMB	250 IMB	100
-	Jumlah SLF yang direkomendasikan	150 SLF	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum tidak ditemui masalah yang berarti. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan ruang adalah sebagai berikut.

- Target fisik pembahasan RDTRK Kecamatan Rasana'e Barat dan Mpunda hingga menjadi Peraturan daerah pada tahun 2017 belum tercapai karena permasalahan belum selesainya penyusunan Peta RDTRK yang sedang dikonsultasikan ke BIG. Untuk itu, perlu dipersiapkan kembali anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian Perda RDTRK Kecamatan Rasana'e Barat untuk penyelesaian Peta RDTRK Rasana'e Barat.
- Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia baik untuk perencanaan maupun melaksanakan teknis kegiatan, sehingga perlu dilakukan penambahan personil dan penguatan kapasitas SDM.
- Kurang optimalnya pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang dan bangunan serta lemahnya penerapan sanksi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata ruang. Untuk itu perlu dibuat peraturan turunan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima berupa Peraturan Walikota Bima untuk implementasi Perda tersebut.
- Kurangnya koordinasi dan sosialisasi lintas sektor baik pada tingkat kelurahan, kecamatan dan SKPD terkait lainnya serta dengan badan pertanahan nasional dalam upaya pemanfaatan ruang serta penguasaan lahan secara tidak terkendali.

- Belum tersedianya Penyidik PNS Tata Ruang dan Bangunan Gedung untuk dapat melakukan tahapan penegakan hukum tata ruang dan bangunan gedung. Untuk itu perlu dipersiapkan pada tahun 2018 personil yang akan mengikuti pelatihan sebagai penyidik PNS tata ruang dan Bangunan Gedung.

4. Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.304.944.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.198.850.231,00 atau sebesar 98,32%. Urusan wajib perumahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.131. Program/Kegiatan Urusan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2017

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	793.926.100,00	780.962.925,00	98,37
1	Penyediaan jasa surat menyurat	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47.580.000,00	43.073.550,00	90,53
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	92.400.000,00	92.300.000,00	99,89
4	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	48.282.300,00	48.270.350,00	99,98
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.150.000,00	30.150.000,00	100,00
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	107.941.000,00	101.336.000,00	93,88
8	Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	351.668.600,00	351.668.025,00	100,00
10	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	19.904.200,00	18.165.000,00	91,26
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.920.000,00	81.481.400,00	92,68
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	64.920.000,00	58.601.400,00	90,27
2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	23.000.000,00	22.880.000,00	99,48
III	Program peningkatan disiplin aparatur	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	177.675.000,00	177.263.000,00	99,77
1	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33.985.000,00	33.985.000,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	23.112.000,00	22.700.000,00	98,22
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	20.773.000,00	20.773.000,00	100,00
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20.572.000,00	20.572.000,00	100,00
5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	45.772.000,00	45.772.000,00	100,00
6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	33.461.000,00	33.461.000,00	100,00
V	Program pengembangan Perumahan	3.880.410.000,00	3.830.885.606,00	98,72
1	Pendampingan Bantuan rumah swadaya	120.995.500,00	120.630.000,00	99,70
2	Pendataan perumahan	55.879.000,00	55.379.500,00	99,11
3	Pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni (DAK)	2.789.000.000,00	2.785.768.850,00	99,88
4	Peningkatan Sarana dan prasarana Rusunawa	914.535.000,00	869.107.256,00	95,03
VI	Program Lingkungan Sehat Perumahan	69.275.800,00	69.225.800,00	99,93
1	Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Rumah Sederhana Sehat	69.275.800,00	69.225.800,00	99,93
VII	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	91.719.400,00	85.039.000,00	92,72
1	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan (Pokja)	91.719.400,00	85.039.000,00	92,72
VIII	Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	664.900.000,00	655.179.000,00	98,54
1	Inventarisasi perumahan akibat bencana alam/sosial	150.250.000,00	147.910.000,00	98,44
2	Fasilitasi dan stimulasi pembanguna perumahan swadaya.	514.650.000,00	507.269.000,00	98,57
IX	Program Perencanaan Permukiman kumuh	274.002.700,00	257.129.500,00	93,84
1	Rencana teknis kawasan permukiman kumuh	274.002.700,00	257.129.500,00	93,84
X	Program Pengembangan Kawasan	250.865.000,00	247.434.000,00	98,63
1	Perencanaan pengembangan kawasan permukiman baru.	250.865.000,00	247.434.000,00	98,63
	Total	6.304.944.000,00	6.198.850.231,00	98,32

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis urusan perumahan dan kawasan permukiman ini menghasilkan beberapa keluaran (*output*) penting, yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Program Pengembangan Perumahan

Program ini dijabarkan melalui beberapa kegiatan yaitu :

- a. Pendampingan Bantuan Rumah Swadaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 120.630.000,- dan terealisasi sebesar 99,70%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Kota Bima.
- b. Pendataan perumahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.379.500,- dan terealisasi sebesar 99,11%. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya data Rumah Tidak Layak Huni Kota Bima sebagai data dasar untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada tahun berikutnya baik yang bersumber dari pendanaan APBD Kota Bima, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun APBN.
- c. Pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.785.768.850,- dan terealisasi sebesar 99,88%. Output dari kegiatan ini adalah pembangunan baru (sebanyak 51 unit @ Rp. 30.000.000,-) dan peningkatan kualitas perumahan (sebanyak 60 unit @ Rp. 15.000.000,-).
- d. Peningkatan sarana dan prasarana Rusunawa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 869.107.256,- dan terealisasi sebesar 95,03%. Output dari kegiatan ini adalah pembangunan pagar rusunawa agar tercipta lingkungan di rusunawa yang aman dan nyaman.

2. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Program ini dijabarkan melalui beberapa kegiatan yaitu :

- a. Inventarisasi perumahan akibat bencana alam/sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.250.000,- dan terealisasi sebesar 98,44%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya database mengenai jumlah perumahan yang terdampak bencana alam/banjir bandang.
- b. Fasilitasi dan stimulasi pembanguna perumahan swadaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 514.650.000,- dan terealisasi sebesar 98,57%. Output dari kegiatan ini adalah membantu penyediaan bahan bangunan

untuk pembangunan rumah layak huni kepada masyarakat yang kurang mampu.

3. Program Pengembangan Permukiman Baru

Program Perencanaan pengembangan kawasan permukiman baru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.865.000,- dan terealisasi sebesar 98,63%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen kajian rencana pengembangan kawasan permukiman baru di Kota Bima tahun 2017.

b. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja urusan perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2017 dideskripsikan sebagai berikut.

Tabel 2.132. Capaian Kinerja Urusan Perumahan yang Dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUNAN			
			2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	% Rumah Layak Huni.	%	92,00	92,82	95,03	95,64
2	% Rumah Tidak Layak Huni yg tertangani.	%	35,00	35,01	55,45	55,73
3.	% Rumah Rusak terdampak bencana yang ditangani.	%	0,00	0,00	62,99	5,00
4.	% Rumah di sempadan yang direlokasi.	%	0,00	0,00	25,48	0,00
5.	% Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	%	94,74	35,01%	97,37	35,01%

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bima, 2017

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak terlaksananya dengan maksimal urusan wajib bidang perumahan berdasarkan PP No. 38/2007. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 terdapat banyak sekali urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh SKPD yang menangani bidang perumahan, tapi dalam implementasinya

sangat minimal yang dapat dituangkan dalam APBD Kota Bima, walaupun hal tersebut sudah diusulkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman lewat Renja maupun RKA.

- 2) Belum tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang harus ditangani oleh SKPD yang menangani bidang perumahan, yaitu :
 - a. Rumah layak huni dan terjangkau
 - b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU)

Di dalam Permen tersebut sudah secara jelas dinyatakan bahwa jenis pelayanan tersebut secara operasional dikoordinasikan oleh dinas perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. (pasal 4 (2), tapi pada implementasinya selama ini, kegiatan yang berkaitan dengan jenis pelayanan dasar tersebut dilaksanakan oleh SKPD lain.

- 3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Perumahan, baik dalam kuantitas maupun kualitas.
- 4) Sulitnya pembebasan lahan dikarenakan harga tanah yang tinggi.

4.1.5. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 7.500.368.010 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sepuluh Sen) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.421.371.689,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 98,12%. Program dan kegiatan pada urusan wajib pelayanan umum Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bima bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima dan Kecamatan Asakota dan Raba Kota Bima.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Pada tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.277.873.810,00 (*lima milyar dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 5.237.912.735,00 (*lima milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) atau 99,24%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dalam rangka melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.133. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.601.265.100,00	2.597.414.095,00	99,85
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.200.000,00	6.345.819,00	88,14
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.320.000,00	7.036.800,00	96,13
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	42.992.000,00	42.986.000,00	99,99
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00	11.966.000,00	99,72
5	Penyediaan alat tulis kantor	34.500.000,00	34.439.000,00	99,82
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.852.600,00	33.784.000,00	99,80
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36.000.000,00	34.220.000,00	95,06
8	Penyediaan bahan logistik kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	1.669.600.000,00	1.669.315.000,00	99,98
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	233.880.500,00	233.701.476,00	99,92
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	511.920.000,00	511.620.000,00	99,94
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	575.871.000,00	573.697.370,00	99,62
1	Pembangunan Gedung Kantor	152.261.000,00	152.261.000,00	100,00
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	177.510.000,00	176.535.000,00	99,45
3	Pengadaan mebeleur	33.400.000,00	32.400.000,00	97,01

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	39.850.000,00	39.847.000,00	99,99
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	165.850.000,00	165.817.370,00	99,98
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.000.000,00	6.837.000,00	97,67
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	57.013.000,00	56.950.000,00	99,89
1	Pendidikan dan pelatihan formal	30.392.000,00	30.334.000,00	99,81
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	26.621.000,00	26.616.000,00	99,98
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	63.100.710,00	59.569.500,00	94,40
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.637.000,00	5.637.000,00	100,00
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	26.216.000,00	26.184.000,00	99,88
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	20.347.710,00	20.335.500,00	99,94
V	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	977.277.000,00	963.846.500,00	98,63
1	Pengendalian keamanan lingkungan	965.554.000,00	952.194.000,00	98,62
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11.723.000,00	11.652.500,00	99,40
VI	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	347.642.000,00	347.120.614,00	99,85
1	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	192.545.000,00	192.444.500,00	99,95
2	Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Krantibum dan Hari-hari Besar	155.097.000,00	154.676.114,00	99,73
VII	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	25.125.000,00	25.065.000,00	99,76
1	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	25.125.000,00	25.065.000,00	99,76
VIII	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	630.580.000,00	610.762.656,00	96,86
1	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	630.580.000,00	610.762.656,00	96,86
Jumlah		5.277.873.810,00	5.237.912.735,00	99,18

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 977.277.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 963.846.500,00(98,63%), dilaksanakan oleh Kantor Satpol PP Kota Bima melalui kegiatan :

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 965.554.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 952.194.000,00 atau sebesar 98,62%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya operasi pemantauan wilayah sebanyak 2 kali
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 11.723.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 11.652.500,00 atau sebesar 99,40%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi serta pendataan daerah rawan gangguan trantib

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 347.642.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 347.120.614,00. (99,85%), dilaksanakan oleh Kantor Satpol PP Kota Bima melalui kegiatan :

1. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/ Polri Dan Kejaksaan. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 192.545.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 192.444.500,00 (99,95%)

Adapun output dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya operasi pengawasan dan penertiban tempat umum sebanyak 2 kali
2. Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Krantibum dan Hari-hari Besar. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 155.097.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 154.676.114,00 (99,73%)

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan krantibum dan hari hari besar sebanyak 4 kali.

3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 25.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.065.000,00(99.76%), dilaksanakan oleh Kantor Satpol PP Kota Bima melalui kegiatan penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 1 kali

Tabel 2.134. Capaian Kinerja Satpol PP Kota Bima Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	≤ 15 menit	≤ 15 menit	100%
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	98,63%	98,63%
Meningkatnya peran satuan linmas	Persentase anggota satuan linmas yang kompeten dalam bencana dan pengamanan	80%	99,76%	124,70%
Meningkatnya penegakan peraturan perundang - undangan	Persentase penegakan PERDA	90%	99,85%	110,94%

Sumber : Satpol PP Kota Bima, 2017

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.970.124.200,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.932.090.454 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) atau 98,07%. Adapun jumlah anggaran dan realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesbangpol Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	684,505,900.00	674,516,200.00	98.54
1	Penyediaan jasa surat menyurat	24,800,000.00	23,100,000.00	93.15

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22,200,000.00	22.014.500	99.16
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27,300,000.00	25,370,100.00	92.93
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45,960,000.00	45,960,000.00	100.00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9,890,000.00	8,690,000.00	87.87
6	Penyediaan alat tulis kantor	22,114,500.00	22,114,500.00	100.00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24,750,000.00	24,750,000.00	100.00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,225,000.00	3,225,000.00	100.00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	114,650,000.00	113,650,000.00	99.13
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22,000,000.00	21,465,000.00	97.57
11	Penyediaan makanan dan minuman	11,543,000.00	9,125,000.00	79.05
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	315,648,400.00	314,852,100.00	99.75
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40,425,000.00	40,200,000.00	99.44
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83,703,600.00	81,319,754.00	97.15
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	42,250,000.00	40,018,154.00	94.72
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36,453,600.00	36,401,600.00	99.86
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000.00	4,900,000.00	98.00
III	Program peningkatan disiplin aparatur	30,900,000.00	30,900,000.00	100.00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	13,900,000.00	13,900,000.00	100.00
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	144,100,000.00	142,600,000.00	98.96
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	24,570,000.00	24,570,000.00	100.00
2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	15,570,000.00	14,070,000.00	90.37
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18,070,000.00	18,070,000.00	100.00
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	61,320,000.00	61,320,000.00	100.00
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD			100.00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
		24,570,000.00	24,570,000.00	
V	Program pengembangan wawasan kebangsaan	274,213,700.00	260.445.500.00	94,98
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	65,801,000.00	58,376,000.00	88.72
2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	156,932,700.00	154,879,500.00	98.69
3	Koordinasi Forum antar Etnis	51,480,000.00	47,190,000.00	91.67
VI	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	471,112,000.00	466,299,300.00	98.98
1	Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis	340,710,000.00	336,164,500.00	98.67
2	Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	55,790,000.00	55,735,000.00	99.90
3	Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	74,612,000.00	74,399,800.00	99.72
VII	Program pendidikan politik masyarakat	281,589,000.00	276,009,700.00	98.02
1	Penyuluhan kepada masyarakat	137,464,000.00	136,791,500.00	99.51
2	Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	144,125,000.00	139,218,200.00	96.60
Jumlah		1,970,124,200.00	1,932,090,454.00	98,07

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bima dalam rangka melaksanakan urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 274,213,700.00 dengan realisasi sebesar Rp. 260.445.500.00 atau 94,98% dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bima melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, mendapat alokasi anggaran Rp. 65,801,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 58,376,000.00 (88,72%)

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya rapat koordinasi forum toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 150 Orang
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, mendapat alokasi anggaran Rp. 156,932,700.00 dengan realisasi sebesar Rp. 154,879,500.00 (98.69%)
Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya kegiatan orientasi bela negara, pendidikan karakter bangsa dan wawasan kebangsaan bagi siswa siswi SMA/MA/SMK se Kota Bima sebanyak 2 kali selama 2 hari dengan jumlah peserta 50 Orang
- 3) Koordinasi Forum antar Etnis, mendapat alokasi anggaran Rp. 51,480,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 47,190,000.00 (91,67%)
Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:
 - a. Terselenggaranya rapat koordinasi forum antar Etnis sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 50 Orang
 - b. Terlaksananya Pembinaan terhadap Forum antar Etnis selama 6 bulan

2) **Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan**

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 471,112,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 466,299,300.00 (98,98%), dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bima melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 340,710,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 336,164,500.00 (98,67%).

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a. Terselenggaranya rapat koordinasi timpengendali kamtribmas sebanyak 2 kali
- b. Penanganan gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota Bima
- 2) Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pagu anggaran sebesar Rp. 55,790,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 55,735,000.00 (99.90%).

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a. Kegiatan rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebanyak 2 kali jumlah peserta 50 orang.

- 3) Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, pagu anggaran sebesar Rp. 74,612,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 74,399,800.00 (99,72%)

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Terlaksananya rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebanyak 4 kali dengan jumlah peserta 50 orang
- b) Terlaksananya Monev penanganan konflik sosial.

3) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program pendidikan politik masyarakat pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 281,589,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 276,009,700.00 (98.02%), dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bima melalui kegiatan :

- 1) Penyuluhan kepada masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 137,464,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 136,791,500.00 (99.51%)

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a. Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan partai politik kepada masyarakat sebanyak 1 kali.
 - b. Terlaksananya verifikasi Penetapan Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) LSM/Ormas dan Yayasan yang bersumber dari dana APBD Kota Bima
 - c. Terlaksananya Pengawasan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik, LSM, Ormas dan Yayasan
- 1) Penyelesaian Perselisihan Partai Politik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 144,125,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 139,218,200.00 (96.60%).

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah

- a. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 85 orang.

Capaian Kinerja kinerja wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.136. Capaian Kinerja Badan Kesbangpol tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Persentase
		Target	Realisasi	
a.	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	30%	20%	66,67%
b.	Persentase gejala konflik yang diatasi	30%	30%	100%
c.	Persentase cakupan wilayahpotensi konflik	15%	15%	100%
d.	Jumlah konflik sosial	0%	0%	100%
e.	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	60%	40%	66,67%
f.	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat	20%	20%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima TA 2017

a. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Kurangnya nilai moral dikalangan pemuda terhadap bangsa dan negara, sehingga memberi kesan seakan-akan semangat kebangsaan telah menjadi dangkal atau terobsesi terutama dikalangan generasi muda, sehingga dapat mengubah idealisme yang merupakan jiwa kebangsaan.
- Menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga ada kekuatiran ancaman disintegrasi bangsa, dengan melihat gejala yang terjadi di berbagai wilayah Kota Bima, seperti yang terjadi konflik antar masyarakat kelurahan Tanjung dan kelurahan Dara, dimana terdapat kecenderungan paham kebangsaan merosot sehingga menjadi paham kesukuan atau kelompok
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bima
- Masih Kurangnya pemahaman bagi dan wawasan kader Parpol tentang Sistematika penyusunan dan kelengkapan Dokumen Pengajuan Dana Bantuan Keuangan parpol.
- Masih Kurangnya pemahaman bagi kelompok agama, masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur Ormas dan LSM.

2) Solusi

- Kegiatan Pendidikan wawasan Kebangsaan (PWK) sebagai upaya mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan penguatan kesadaranberbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR) perlu ditingkatkan
- Perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan bagi pengurus dan anggota ormas dan LSM

3. Kantor Kecamatan

Selain Badan Kesbangpol dan Kantor Satpol PP, Urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat juga dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Asakota dan Kecamatan Raba

Tabel 2.137. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1	Kecamatan Asakota	82.750.000,00	81.748.500,00	98,79
2	Kecamatan Raba	169.620.000,00	169.620.000,00	100
JUMLAH		252.370.000,00	251.368.500,00	99.60

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

b. Program dan Kegiatan

Seperti yang tergambar pada tabel bahwa pada tahun 2017 Urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Asakota Kecamatan Raba mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 252.370.000,00 atau sebesar 99,60%.

Program yang dilaksanakan yang dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan melalui kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalaam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan.Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat.

Indikator Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dari target mencapai kategori baik, dapat terealisasi sesuai target. Tidak terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang menonjol selama tahun 2017 di wilayah Kota Bima (konduusif). Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target adalah :

- Adanya komitmen yang kuat dari masyarakat, tokoh masyarakat, ormas, dan pemerintah untuk menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban di Kota Bima.
- Adanya sinergi yang baik antara unsur penegakkan keamanan dan ketertiban (Polisi, TNI, dan Satpol PP).
- Peran Serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Masih kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan walikota yang berlaku di Kota Bima.
- Masih lemahnya perlindungan hukum bagi aparatur dalam menegakkan Perda/Perwali.
- Belum Optimalnya koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan ketentraman dan ketertiban.

2) Solusi

- Melakukan sosialisasi dan informasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang Perda dan Perwali yang berlaku di Kota Bima melalui tatap muka, papan informasi, serta media cetak dan elektronik.
- Melindungi aparatur penegak sesuai ketentuan hukum yang berlaku
- Meningkatkan komitmen bersama dengan pihak-pihak terkait (TNI, Polri, Kejaksaan) dan masyarakat dalam penanganan ketentraman dan ketertiban.

5. Urusan Sosial

Urusan Wajib Sosial pada tahun anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.136.545.800,00

dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.994.180.161,00 atau sebesar 93,34% melalui beberapa program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program kegiatan yang dilaksanakan

Tabel 2.138. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	510.438.450,00	497.938.250,00	97,55
1	Penyediaan jasa surat menyurat	19.416.000,00	19.416.000,00	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.800.000,00	16.369.000,00	63,44
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.300.000,00	22.020.500,00	90,61
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	52.900.000,00	52.900.000,00	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.430.000,00	7.430.000,00	100
6	Penyediaan alat tulis kantor	42.265.000,00	42.265.000,00	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.201.250,00	16.173.250,00	99,82
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.488.300,00	4.487.500,00	99,98
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	32.250.000,00	32.250.000,00	100
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.972.000,00	3.970.000,00	99,94
11	Penyediaan makanan dan minuman	20.640.000,00	20.640.000,00	100
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	197.350.800,00	196.652.000,00	99,64
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	63.425.100,00	63.365.000,00	99,90
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.265.000,00	33.684.427,00	98,31
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	18.000.000,00	17.421.427,00	96,79
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.765.000,00	1.765.000,00	100
3	Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.500.000,00	4.498.000,00	99,96
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80.485.850,00	79.953.650,00	99,34
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.420.800,00	8.405.800,00	99,82
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6.168.100,00	6.168.100,00	100
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	11.378.000,00	11.378.000,00	100
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18.269.000,00	17.752.000,00	97,17
5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	100
6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	13.749.950,00	13.749.950,00	100
IV	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	761.090.000,00	648.766.000,00	85,24
1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	28.944.000,00	28.944.000,00	100

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
2	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	183.799.000,00	183.576.000,00	99,88
3	Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan Kube Jasa	56.740.000,00	56.675.000,00	99,89
4	Monitoring dan Evaluasi	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90
5	Pendataan penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	43.722.000,00	43.722.000,00	100
6	Penyuluhan Sosial	19.885.000,00	19.885.000,00	100
7	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	418.000.000,00	305.974.000,00	73,20
V	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	525.805.000,00	509.646.334,00	96,93
1	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	21.990.000,00	21.990.000,00	100
2	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	0,00	0,00	0
3	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	168.934.000,00	160.554.000,00	95,04
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10.000.000,00	9.895.000,00	98,95
5	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	300.000.000,00	292.426.334,00	97,48
6	Pendampingan Kegiatan Keserasian Sosial	24.881.000,00	24.781.000,00	99,60
VI	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	37.165.000,00	37.126.000,00	99,90
1	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	27.165.000,00	27.126.000,00	99,86
2	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	10.000.000,00	10.000.000,00	100
VII	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)	27.996.500,00	27.931.500	99,77
1	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	27.996.500,00	27.931.500	99,77
VIII	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	159.299.000,00	159.134.000,00	99,90
1	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	21.779.000,00	21.779.000,00	100
2	Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	59.111.000,00	59.006.000,00	99,82
3	Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)	7.882.000,00	7.882.000,00	100
4	Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	55.527.000,00	55.527.000,00	100
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.000.000,00	14.940.000,00	99,60
Jumlah		2.136.544.800,00	1.994.180.161,00	93,34

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

- Kelompok sasaran pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang antara lain meliputi :
- Anak Balita Terlantar
 - Anak Terlantar dan anak akal
 - Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
 - Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)

- e. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
- f. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan salah
- g. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
- h. Korban Tindak Kekerasan
- i. Lanjut Usia Terlantar
- j. Penyandang Disabilitas (Cacat)
- k. Tuna Susila
- l. Pengemis dan Gelandangan
- m. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)
- n. Korban Penyalagunaan Napza
- o. Keluarga Fakir Miskin
- p. Keluarga yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni
- q. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
- r. Korban Bencana Alam
- s. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi
- t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
- u. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)
- v. Keluarga Rentan
- w. Eks. Pengidap Penyakit Kusta, dan
- x. Penduduk di Daerah Rawan Bencana.

b. Capaian Kinerja

Pada tahun 2017 terdapat 7.481 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial dari jumlah 9.334 orang PMKS yang ada di Kota Bima. Bahwa jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial tersebut sebesar 80,14 % .

Pencapaian target kinerja urusan sosial tahun 2017 dapat dikatakan berhasil. Persentase realisasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial mencapai 80,14%.

Pencapaian indikator sasaran urusan sosial pada Dinas Sosial Kota Bima, dipengaruhi oleh meningkatnya dukungan anggaran dan kemampuan sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Sosial Kota Bima dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait.

Selain itu, terdapat beberapa program yang bersumber dari APBN dan Dekonsentrasi yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Beberapa program dan kegiatan tersebut, antara lain:

Tabel 2.139. Program dan Kegiatan yang didukung oleh pendanaan Non APBD

No	Program / Kegiatan	Sasaran		Jumlah Bantuan	Sumber Dana
1	2	3		4	5
1.	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	20	Kelompok	400.000.000	DEKON
2.	Bantuan Pengembangan Usaha melalui E-Warong dan KUBE Jasa	12	Kelompok	360.000.000	APBN
3.	Asistensi sosial kesejahteraan sosial bagi orang dengan kecacatan berat (odk berat)	198	Orang	594.000.000	APBN
4.	Asistensi lanjut usia terlantar (aslut)	40	Orang	80.000.000	APBN
5.	Program pemenuhan kebutuhan dasar orang dengan kecacatan	-	-	-	-
6.	Program lembaga kesejahteraan sosial anak (asistensi) sosial	75	Orang	75.000.000	DEKON
7.	Program lembaga kesejahteraan sosial anak (asistensi) sosial	15	orang	15.000.000	APBN
8.	Program lembaga kesejahteraan sosial dan lanjut usia (asistensi) sosial	-	-	-	-
9.	Kebutuhan dasar melalui home care	-	-	-	-
10.	Program lembaga kebutuhan dasar bagi korban napza	10	Orang	50.000.000	APBN
11.	Kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat	1	Kelurahan	109.000.000	APBN
12.	Forum harmonisasi sosial meci angi kearifan lokal, sanggar melayu	1	Forum	50.000.000	APBN
13.	Program keluarga harapan (pkh)	3.745	Orang	7.146.380.000	APBN
14.	Kegiatan Tanggap darurat terhadap korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	381	KK	1.379.700.000	APBN
TOTAL				10.259.080.000	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.061.395.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.048.995.656,00 atau sebesar 98,83% yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Program kegiatan

Tabel 2.140. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan TA 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	348.570.000,00	339.139.413,00	97,29
1	Penyediaan jasa surat menyurat	20.250.000,00	19.800.000,00	97,77
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.700.000,00	14.013.513,00	67,69
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	100
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11.750.000,00	11.750.000,00	100
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.700.000,00	45.700.000,00	100
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100
7	Penyediaan alat tulis kantor	18.690.000,00	18.675.000,00	100
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.490.000,00	8.429.000,00	100
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	100
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	44.705.000,00	44.705.000,00	100
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.160.000,00	5.160.000,00	100
12	Penyediaan makanan dan minuman	6.125.000,00	4.000.000,00	65,30
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	159.000.000,00	158.906.900,00	99,94
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0,00	0,00	0
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21.440.000,00	21.430.243,00	99,95
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16.440.000,00	16.430.243,00	99,94
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	79.080.000,00	79.080.000,00	100
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	100
2	Penyusunan pelaporan prognosis laporan keuangan	10.080.000,00	10.080.000,00	100
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.500.000,00	10.500.000,00	100
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	50.500.000,00	50.500.000,00	100
IV	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	151.000.000,00	148.680.000,00	98,46
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta	10.000.000,00	10.000.000,00	100

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	141.000.000,00	138.680.000,00	98,35
V	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	194.150.000,00	194.040.000,00	99,94
1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	13.200.000,00	13.200.000,00	100
2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	10.600.000,00	10.490.000,00	98,96
3	Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	25.000.000,00	25.000.000,00	100
4	Padat Karya Infrastruktur	117.350.000,00	117.350.000,00	100
5	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	100
6	Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	7.000.000,00	7.000.000,00	100
VI	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	267.155.000,00	266.626.000,00	99,80
1	Pemeriksaan Norma Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	113.514.500,00	113.255.500,00	99,77
2	Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	47.164.000,00	47.164.000,00	100
3	Fasilitasi Operasional Dewan Pengupahan Daerah	38.011.000,00	37.741.000,00	99,28
4	Survey Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	37.927.000,00	37.927.000,00	100
5	Sosialisasi Undang - Undang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	30.538.500,00	30.538.500,00	100
Jumlah		1.061.395.00,00	1.048.995.656,00	98,83

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2016 (data sebelum audit BPK)

b. Capaian Kinerja

Adapun rincian pencapaian target kinerja urusan ketenagakerjaan di Kota Bima pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- **Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**

Sasaran meningkatnya kualitas dari target penetapan kinerja sebanyak 100%, dapat terealisasi 100%, maka capaian kinerja rata-rata 100 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran stratejik tersebut didukung oleh keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah lembaga pelatihan tenaga kerja swasta yang dibina target 12 Lembaga terealisasi 12 Lembaga
2. Jumlah Tenaga kerja yang dilatih berdasarkan jenis pelatihan, pendidikan dan ketrampilan di target sebanyak 60 Orang terealisasi 60 Orang.

- **Sasaran Peningkatan dan perluasan lapangan kerja**

Sasaran peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dari target penetapan kinerja sebanyak 100%, dapat terealisasi 100%, maka capaian kinerja rata-rata 100 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik tersebut didukung oleh keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut :

1. Pendaftar Pencari Kerja/ Lowongan, target 269 Orang pencari kerja terealisasi 269 Orang.
2. iklan /Brosur/ Pamflet , papan informasi target 594 brosur/ pamflet terealisasi 594 brosur/ pamphlet.
3. Jumlah Peserta Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja target 100 Orang terealisasi 100 Orang.
4. Jumlah PPTKIS yang dibina target 7 Lembaga terealisasi 7 lembaga
5. Jumlah tenaga kerja yang dilibatkan dalam padat karya infrastruktur target 68 Orang terealisasi 68 Orang.
6. Ketersediaan Data base tenaga kerja daerah target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen.

- ***Sasaran Meningkatkan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja***

Sasaran meningkatkan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dari target penetapan kinerja sebanyak 100%, dapat terealisasi 100%, maka capaian kinerja rata-rata 100 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik tersebut didukung oleh keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut :

1. jumlah perusahaan yang diperiksa K3, target 30 perusahaan terealisasi 30 perusahaan.
2. Jumlah Perusahaan yang menerapkan UMK, target 231 perusahaan terealisasi 231 Perusahaan

- ***Sasaran Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial ketenagakerjaan***

Sasaran meningkatkan harmonisasi hubungan industrial ketenagakerjaan, dari target penetapan kinerja sebanyak 100%, dapat terealisasi 100%, maka capaian kinerja rata-rata 100 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik tersebut didukung oleh keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Perusahaan yang di Survei yang menerapkan standar KHL, target 30 Perusahaan terealisasi 30 perusahaan.

2. Jumlah Perusahaan Peserta BPJS, target 80 Perusahaan terealisasi 80 Perusahaan.
3. Jumlah perselisihan hubungan industrial yang dimediasi, target 10 Kasus terealisasi 10 Kasus.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang masih dihadapi terkait dengan urusan ketenagakerjaan adalah masih terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di Kota Bima. Adapun solusi berkenaan dengan permasalahan tersebut diantaranya Pemerintah Kota Bima perlu membangun lembaga pelatihan kerja pemerintah, seperti Balai Latihan Kerja (BLK), dan mendorong Lembaga Pelatihan Swasta untuk melaksanakan pelatihan terhadap pencari kerja di Kota Bima. Keberadaan Lembaga Pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketrampilan (skill) bagi masyarakat sebagai pencari kerja. Berkenaan dengan pelatihan melalui lembaga pelatihan kerja tersebut diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja sehingga menurunkan angka pengangguran di Kota Bima.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.186.076.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.089.245.721,00 (91,84%). Program dan kegiatan pada urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, yang capaian realisasinya sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.141. Program/ Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	389.433.750,00	382.867.771,00	98,31
1	Penyediaan jasa surat menyurat	26.430.000,00	26.430.000,00	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.279.000,00	5.302.500,00	84,45
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.800.000,00	12.293.500,00	83,06

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	41.040.000,00	41.040.000,00	100,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.962.000,00	21.962.000,00	100,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	27.988.500,00	27.987.750,00	100,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.170.000,00	38.161.750,00	99,98
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000,00	3.590.000,00	66,48
11	Penyediaan makanan dan minuman	14.350.000,00	13.845.000,00	96,48
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.410.500,00	174.655.271,00	99,57
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.303.750,00	15.300.000,00	99,98
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	123.561.000,00	95.376.000,00	
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	47.298.000,00	47.298.000,00	100
3	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67.913.000,00	39.728.000,00	58,50
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.350.000,00	8.350.000,00	100,00
III	Program peningkatan disiplin aparatur	10.500.000,00	10.500.000,00	100
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.500.000,00	10.500.000,00	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0
1	Pelaksanaan Penilaian AKJG	0,00	0,00	0
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	94.376.750,00	94.033.750,00	99,64
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.613.500,00	20.579.500,00	99,84
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	9.600.000,00	9.600.000,00	100
	Penyusunan pelaporan realisasi anggaran triwulan	17.589.000,00	17.280.000,00	98,24
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.916.000,00	9.916.000,00	100

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	36.658.250,00	36.658.250,00	100
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	0,00	0,00	0
VI	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	158.082.000,00	130.965.000,0	82,85
1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5.851.000,00	5.851.000,00	100
2	Penyusunan dan Penertiban Produk Hukum Daerah Dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak	152.231.000,00	125.114.000,00	82,19
VII	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	257.374.500,00	252.816.200,0	98,23
1	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	5.730.000,00	5.730.000,00	100
2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	24.107.500,00	23.159.500,00	96,07
3	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	108.628.000,00	108.328.000,00	99,72
4	Evaluasi pelaksanaan PUG	18.030.500,00	17.360.500,00	96,28
5	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	26.966.000,00	26.766.000,00	99,26
6	Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	73.912.500,00	71.472.200,00	96,70
VIII	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	109.965.500,00	79.904.000,00	72,66
1	<i>Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah</i>	20.353.000,00	18.554.000,00	91,16
2	<i>Penyusunan perlindungan bagi perempuan</i>	17.607.500,00	17.595.000,00	99,93
3	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	31.470.000,00	31.470.000,00	100
4	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	10.110.000,00	9.835.000,00	97,28
5	Pembinaan dan Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI)	30.425.000,00	2.450.000,00	8,05
IX	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	42.783.000,00	42.783.000,00	100
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	42.783.000,00	42.783.000,00	100
Jumlah Anggaran		1.186.076.500,00	1.089.245.721,0	91,41

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pokok bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (selain program dan kegiatan yang bersifat rutinitas), capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Program dan Kegiatan

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.158.082.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 130.965.000,00 (82,85%), dilaksanakan oleh BPP-KB Kota Bima melalui kegiatan :

- a) Pelaksanaan sosialisasi yg terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.851.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 5.851.000,00 (100,00%).
- b) Penyusunan dan Penertiban Produk Hukum Daerah di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.152.231.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 125.114.000,00 (100,00%).

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- 1) Terlaksananya Rapat tehnis Kegiatan sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
- 2) Terbitnya Produk Hukum Daerah di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.257.374.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.252.816.200,00 (98,23%), dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.730.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.730.000,00 (100%).
- 2) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.073.500,00 direalisasikan sebesar 100%.
- 3) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 108.628.000,00 direalisasikan sebesar Rp 108.328.000,00 (99,72%).
- 4) Evaluasi pelaksanaan PUG, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.030.500,00 direalisasikan sebesar Rp 17.360.500,00 (96,28%).
- 5) Pengembangan sistem informasi gender dan anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 26.966.000,00 direalisasikan sebesar Rp 26.766.000,00 (99,26%)
- 6) Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.912.500,00 direalisasikan sebesar Rp 71.472.200,00 (96,70%).

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Terlaksananya Rapat teknis Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Organisasi Perempuan.
- b) Terlaksananya Rapat teknis Kegiatan Pembinaan kelompok P2TP2A dan Data organisasi/Lembaga masyarakat.
- c) Terlaksananya Rapat teknis Kegiatan Pertemuan Adfokasi peningkatan dan memperluas jaringan kelembagaan Perempuan dan belanja bantuan untuk diberikan kepada masyarakat.
- d) Terlaksananya rapat teknis Kelompok Fokal Point PUG dan Kegiatan Pendataan Kekerasan Perempuan.
- e) Terlaksananya rapat teknis Kegiatan pendataan Kekerasan Anak, Rapat teknis Kegiatan Sosialisasi pencegahan dan pemulihan korban Kekerasan dan rapat teknis Kegiatan pengumpulan data korban Kekerasan perempuan dan Anak.
- f) Terlaksananya Rapat teknis penyusunan kegiatan pengembangan KLA.

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 109.965.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 79.904.000,00 (72,66%) melalui kegiatan :

- 1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.353.000,00 direalisasikan sebesar Rp 18.554.000,00 (91,16%).
- 2) Penyusunan perlindungan bagi perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.607.500,00 direalisasikan sebesar Rp 17.595.000,00 (99,93%).
- 3) Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 31.470.000,00 direalisasikan sebesar Rp 31.470.000,00 (100%).
- 4) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.110.000,00 direalisasikan sebesar Rp 9.835.000,00 (97,28%).
- 5) Pembinaan dan Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.425.000,00 direalisasikan sebesar Rp 2.450.000,00 (8,05%).

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Terlaksananya rapat teknis dan sosialisasi Hak Tumbuh Kembang Anak (TKA).
- b) Terlaksananya Rapat teknis kegiatan sosialisasi sistem perlindungan Perempuan.
- c) Rapat Tehnis Kegiatan Pendataan dan Pencatatan Kekerasan Perempuan (KDRT).
- d) Terlaksananya Peserta Rapat teknis Pertemuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
- e) Terlaksananya Kegiatan Lomba KSI dan RS Sayang Ibu serta pemantapan Lomba KSI dan RSSI.

4. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.42.783.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.783.000,00 (100%), dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.783.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 42.783.000,00 (100%).

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Terlaksananya kegiatan perayaan Hari Ibu.

b. Capaian Kinerja

Adapun capaian kinerja Badan PP dan KB Kota Bima Tahun 2017 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.142. Capaian Kinerja Badan PP dan KB Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	2017		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	52,74%	37,31%	70,74%
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	49,63%	57,94%	116,74%
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12,00%	12,00%	100%
4	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	67,74%	100,00%	147,62%
5	% Kelompok Forum anak yang aktif	100,00%	100,00%	100,00%
	Rata-rata			107,02%

c. Permasalahan dan Solusi

1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan, Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan PP dan PA. Kekurangan dan keterbatasan data dan informasi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan Dinas PP dan PA.
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima.

3. Belum optimalnya pelayanan prima dalam Dinas PP dan PA.
4. Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang PP dan PA, maka sudah tentu Dinas PP dan PA. Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima, terutama masyarakat Kota Bima.
5. Belum optimalnya kapasitas aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima.
6. Keberadaan aparatur PP dan PA merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang PP dan PA.

d. Solusi

1. Dinas PP dan PA. Kota Bima. harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas PP dan PA. Kota Bima
2. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).
3. Peningkatan sosialisasi dan motivasi melalui jaring aspirasi dan tutor sebaya (lembaga peduli yang ada di masyarakat).

3. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang

terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya.

Selaras dengan hal tersebut diatas pembangunan ketahanan pangan di Kota Bima pada hakikatnya mempunyai beban tugas dan tanggung jawab untuk mampu menyelenggarakan pengaturan dalam penyediaan pangan yang cukup bagi kebutuhan masyarakat Kota Bima. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kota Bima yang memiliki tipologi geografi dan kondisi sosiologis yang beragam harus memperhatikan aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan, dan keamanan serta halal sampai di tingkat rumah tangga.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Kota Bima menyelenggarakan sejumlah operasionalisasi kebijakan urusan ketahanan pangan, melalui 2 program dan 16 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.930.012.000,00,-

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Kota Bima disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.143. Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun Anggaran 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	697.006.600,00	600.651.902,00	86,2
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	74.932.200,00	73.485.000,00	98,1
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	58.400.000,00	39.071.784,00	66,9
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.767.800,00	2.804.800,00	20,4
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	44.388.000,00	42.930.000,00	96,7
5.	Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000,00	39.775.000,00	99,4
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65.000.000,00	43.927.000,00	67,6
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	62.580.000,00	62.460.000,00	99,8
8.	Penyediaan makanan dan minuman	34.000.000,00	23.700.000,00	69,7
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	278.938.600,00	247.538.318,00	88,7

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi
10.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	25.000.000,00	24.960.000,00	99,8
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	136.490.000,00	82.331.731,00	60,3
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	46.490.000,00	45.331.500,00	97,5
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	25.076.231,00	83,6
3.	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	5.424.000,00	18,1
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.000.000,00	6.500.000,00	21,7
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000,00	24.786.000,00	99,1
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.000.000,00	24.786.000,00	99,1
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.950.000,00	12.950.000,00	100,0
1.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	12.950.000,00	12.950.000,00	100,0
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	133.500.000,00	133.500.000,00	100,0
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	100,0
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15.750.000,00	15.750.000,00	100,0
3.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.750.000,00	15.750.000,00	100,0
4.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	100,0
5.	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	54.000.000,00	54.000.000,00	100,0
VI	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	832.415.400,00	811.577.000	97,5
1.	Penanganan daerah rawan pangan	76.565.000,00	76.350.000	99,7
2.	Penyusunan data base potensi produk pangan	26.175.000,00	26.175.000,00	100,0
3.	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	25.410.400,00	25.410.000	100,0
4.	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	26.750.000,00	26.750.000	100,0
5.	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	77.695.000,00	77.382.000	99,6
6.	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	37.600.000,00	37.600.000	100,0
7.	Pengembangan cadangan pangan daerah	55.790.000,00	53.060.000	95,1
8.	Pengembangan desa mandiri pangan	64.540.000,00	64.435.000	99,8
9.	Pengembangan diversifikasi pangan	89.240.000,00	88.790.000,00	99,5
10.	Pengembangan lumbung pangan desa	26.800.000,00	26.800.000,00	100,0

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi
11.	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	40.950.000,00	40.850.000	99,8
12.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	51.275.000,00	42.985.000	83,8
13.	Penyuluhan sumber pangan alternatif	23.675.000,00	23.665.000,00	100,0
14.	Lomba cipta menuberagam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	165.000.000,00	156.815.000	95,0
15.	Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	44.950.000,00	44.510.000	99,0
VII	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	92.650.000,00	91.020.400	98,2
1.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	92.650.000,00	91.020.400	98,2
	Total	1.930.012.000,00	1.756.817.033	91,0

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Target dan Realisasi anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Tahun 2017 sebesar Rp. 1.930.012.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.756.817.033,- atau mencapai 91,00%. Dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Ketahanan Pangan** didukung oleh 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 832.415.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 811.577.000,00 atau 97,5% dari total anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan dari program ini yaitu:
 - a) Kegiatan penanganan daerah rawan pangan dengan alokasi anggaran Rp. 76.565.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 76.350.000,00 atau 99,7% dengan Output jumlah kepala keluarga yang dapat ditingkatkan kualitas dan kapasitas pangan (Target 150 KK, realisasi 120 KK).
Outcomes : meningkatnya kualitas dan kapasitas pangan dan terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup.
 - b) kegiatan penyusunan data base potensi produk pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.175.000,00 dengan realisasi 100%. Output dari kegiatan ini adalah jumlah produk pangan yang tersedia di masyarakat (target 1 Dokumen, realisasi 1 dokumen).
Outcomes : tersedianya data base jumlah produk pangan yang tersedia di masyarakat.

- c) Kegiatan analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan dengan anggaran Rp. 25.410.400,00 dan terealisasi 100%, dan output dari kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang memahami pola konsumsi dan suplai pangan (target 92 %)
Outcomes : meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pola konsumsi dan suplai pangan.
- d) Terselenggaranya laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah dengan anggaran Rp. 26.750.000,00 dan terealisasi sebesar 100%, adapun output dari kegiatan ini adalah terdatanya kondisi ketahanan pangan pada tingkat kelurahan (1 Dokumen)
Outcomes : tersedianya data base kondisi ketahanan pangan.
- e) Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan alokasi anggaran Rp. 77.695.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 77.382.000,00 atau 99,6%, output kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah kelompok yang memanfaatkan pekarangan rumah (target 7 kelompok)
Outcomes : termanfaatkannya pekarangan rumah untuk pengembangan pangan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
- f) Kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok dengan alokasi anggaran Rp. 37.600.000,00, terealisasi 100%. Output yang diharapkan adalah jumlah bahan pangan yang terpantau harganya di tingkat pedagang.
Outcomes : terpantaunya ketersediaan kebutuhan dan harga pangan.
- g) Kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah, alokasi anggaran Rp. 55.790.000,00 terealisasi Rp. 53.060.000,00 atau 95,1%. Output dari kegiatan ini adalah ketersediaan jumlah cadangan pangan di daerah (dengan target 15 ton).
Outcomes : Tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan secara berkelanjutan.
- h) Kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, alokasi anggaran 64.540.000,00 terealisasi 64.435.000 atau 99,8%. Dengan output terbentuknya kelurahan mandiri pangan yang dikembangkan. (Dengan target 5 Kelurahan)
Outcomes : Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya setempat secara optimal dan berkelanjutan.
- i) Kegiatan pengembangan diversifikasi pangan, alokasi anggaran Rp. 89.240.000,00 terealisasi Rp. 88.790.000,00 atau 99,5%. Dengan output

jumlah jenis tanaman yang dapat dikembangkan di masyarakat. (dengan target 1 kelompok)

Outcomes : keragaman jenis tanaman yang dikembangkan sebagai alternatif pemenuhan pangan masyarakat.

- j) Kegiatan pengembangan lumbung pangan desa, alokasi anggaran Rp. 26.800.000,00 terealisasi 100%, output kegiatan ini adalah ketersediaan lumbung pangan pada tingkat desa.

Outcomes : tersedianya cadangan pangan serta fisik lumbung pangan.

- k) Kegiatan pengembangan model distribusi pangan yang efisien, alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 40.950.000,00 terealisasi Rp. 40.850.000,00 atau 99,8%. Output kegiatan ini adalah penanganan/pengembangan kelompok LDPM (dengan target 4 kelompok).

Outcomes : Meningkatnya kemampuan kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dalam pemenuhan pangan serta terselenggaranya ketahanan pangan masyarakat.

- l) Kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan, dengan alokasi anggaran Rp. 51.275.000,00 terealisasi Rp. 42.985.000,00 atau 83,8%. Output kegiatan ini adalah jumlah pangan yang memiliki mutu dan keamanan untuk dikonsumsi.

Outcomes : Meningkatnya mutu pangan dan terpenuhinya pangan yang aman, merata, halal dan terjangkau berdasarkan daya beli masyarakat.

- m) Kegiatan penyuluhan sumber pangan alternatif, dengan alokasi anggaran Rp. 23.675.000 terealisasi Rp. 23.665.000,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah masyarakat mengenal sumber pangan lokal sebagai alternatif pangan selain beras.

Outcomes : meningkatnya pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang sumber pangan Lokal sebagai alternatif pangan selain beras.

- n) Kegiatan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), dengan alokasi anggaran Rp. 165.000.000,00 terealisasi Rp. 156.815.000,00 atau 95%. Output kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah kelurahan peserta lomba cipta menu serta terciptanya menu makanan alternatif yang berasal dari komoditi lokal.

Outcomes : meningkatnya minat masyarakat terhadap sumber komoditi lokal sebagai menu makanan alternatif yang aman dan sehat.

- o) Kegiatan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), dengan alokasi anggaran Rp. 44.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 44.510.000,00 atau 99%. Output kegiatan ini adalah jumlah balita kurang gizi yang ditangani di kelurahan.

2. **Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan** didukung oleh 1 kegiatan yaitu kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggul daerah dengan anggaran Rp. 92.650.000,00 terealisasi Rp. 91.020.400,00 atau 98,2 %. Dengan output jumlah produk pangan yang dapat dipromosikan.

Outcomes : Dikenalnya produk pangan unggulan daerah di tingkat regional dan nasional.

b. Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun 2017 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.144. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2017

No	Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
I	Program Peningkatan Ketahanan pangan				
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	kk	150	120	80
2	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	Dokumen	1	1	100
3	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	%	92	92	100
4	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Dokumen	1	1	100
5	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Kelompok	7	7	100
6	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Komoditi	9	9	100
7	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Ton	15	2,6	17
8	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	kelurahan	5	5	100
9	Pengembangan Deservikasi Tanaman	Kelompok	1	1	100
10	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	%	1	0	0
11	Pengembang Model Distribusi Pangan Yang Efisien	Kelompok	4	4	100
12	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	%	9	9	100

No	Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
13	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Kelompok	5	5	100
14	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Kelurahan	38	38	100
15	Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Kel	12	12	100
II	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				
1	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	Jenis	34	34	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Masih rendahnya pendapatan masyarakat mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat apabila terjadi kenaikan harga pangan.
- Konsumsi beras per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat.
- Teknologi pengolahan pangan lokal masih rendah.
- Belum maksimalnya kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan.
- Beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang murah.
- Kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah
- Terdapatnya konsep makan yang salah dalam masyarakat yaitu “belum makan kalau belum makan nasi”.
- Pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi dan jagung masih rendah.
- Bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim.

Solusi

- Adanya Dukungan dari pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP). Hal ini berkaitan dengan dukungan anggaran,

program, dan SDM, sehingga dapat menguatkan berbagai instrument yang ada di dalam SKPG dan PDRP.

- Memberikan informasi dan sosialisasi tentang perubahan nomenklatur dan penghematan kepada daerah.
- Fasilitasi kepada kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional.
- Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
- Peningkatan kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan institusi yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.
- Sinkronisasi kebijakan baik antar kementerian maupun dengan pihak swasta yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung.
- Mengembangkan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
- Melaksanakan kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L).
- Perlu upaya kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara terstruktur dan komprehensif guna mendorong percepatan diversifikasi pangan.
- Meningkatkan peran swasta dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal.
- Mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal, melalui: fasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan bisnis pangan lokal, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal dan advokasi, sosialisasi dan penerapan standar keamanan dan mutu pangan bagi pelaku usaha pangan terutama usaha rumah tangga dan UMKM.
- Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), pengembangan kemitraan dengan dunia usaha (bekerja sama dengan Ditjen PPHP), pengembangan gerai atau outlet pangan lokal, pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan Balitbang dan Perguruan Tinggi) dan memastikan peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah.

4. Urusan Pertanahan

Pelaksanaan urusan wajib pertanahan pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima dengan alokasi anggaran Rp. 12.397.745.220,00 dan dapat direalisasikan Rp. 9.895.305.109,00 (79,82 %).

Tabel 2.145. Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2017

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
I	Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	12.282.105.220,00	9.796.114.800,00	79,76
1.	Pembebasan/Pengadaan Tanah	12.282.105.220,00	9.796.114.800,00	79,76
II	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	115.640.000,00	99.190.309,00	85,78
1.	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	115.640.000,00	99.190.309,00	85,78
	Jumlah	12.397.745.220,00	9.895.305.109,00	79,82

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis urusan pertanahan ini menghasilkan beberapa keluaran (*output*) penting antara lain untuk pengadaan dan pembebasan tanah seperti :

1. Pengadaan tanah untuk relokasi perumahan di So Ndano Wau Kel. Sambinae 4,3 Ha.
2. Pengadaan tanah untuk relokasi perumahan di So Ndano Wawo Kel. Jatibaru 1,02 Ha.
3. Pengadaan jasa penilai tanah (*appraisal*).

5. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan wajib lingkungan hidup di Kota Bima dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Ekonomi Setda Kota Bima dan Kantor Kelurahan. Secara keseluruhan anggaran yang dialokasikan pada urusan lingkungan hidup pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 9.883.576.200 (Sembilan milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 9.820.935.856,00 (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau 99,37%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.394.235.200,- (sembilan milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah). Realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 9.350.644.620,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) atau 99,50%. Realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusi atas pelaksanaan belanja langsung tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Program dan Kegiatan

Tabel 2.146. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	Persentase Realisasi
<i>I</i>	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	768,088,000.00	758,607,701.00	98.8
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	28,711,000.00	28,711,000.00	100.0
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31,200,000.00	25,240,722.00	80.9
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	38,350,000.00	36,850,000.00	96.1
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	65,160,000.00	64,800,000.00	99.4
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5,275,000.00	5,275,000.00	100.0
6.	Penyediaan alat tulis kantor	51,240,000.00	51,240,000.00	100.0
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,400,000.00	25,400,000.00	100.0
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,240,000.00	9,240,000.00	100.0
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	28,000,000.00	27,960,000.00	99.9
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25,040,000.00	24,895,000.00	99.4
11.	Penyediaan makanan dan minuman	44,308,000.00	44,308,000.00	100.0
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	362,648,000.00	361,442,979.00	99.7
13.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	53,516,000.00	53,245,000.00	99.5
<i>II</i>	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	73,873,500.00	73,671,900.00	99.7

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi
1.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000.00	14,976,000.00	99.8
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona	52,773,500.00	52,595,900.00	99.7
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,100,000.00	6,100,000.00	100.0
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatu	776,000.00	500,000.00	64.4
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	776,000.00	500,000.00	64.4
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	166,500,000.00	166,500,000.00	100.0
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20,000,000.00	20,000,000.00	100.0
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	20,000,000.00	20,000,000.00	100.0
3.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0
4.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12,500,000.00	12,500,000.00	100.0
5.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	66,500,000.00	66,500,000.00	100.0
6.	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	37,500,000.00	37,500,000.00	100.0
V	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3,446,174,700.00	3,443,203,600.00	99.9
1.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	90,250,000.00	90,250,000.00	100.0
2.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	3,181,974,700.00	3,179,354,600.00	99.9
3.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	173,950,000.00	173,599,000.00	99.8
VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	594,483,000.00	589,342,146.00	99.1
1.	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	68,375,000.00	68,365,000.00	100.0
2.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	85,305,000.00	83,130,000.00	97.5
3.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	48,045,000.00	48,020,000.00	99.9
4.	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0
5.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	292,249,000.00	289,318,146.00	99.0
6.	Koordinasi penyusunan AMDAL	50,509,000.00	50,509,000.00	100.0
VII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	82,900,000.00	82,405,000.00	99.4

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi
1.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	33,885,000.00	33,515,000.00	98.9
2.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	49,015,000.00	48,890,000.00	99.7
VIII	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	131,525,000.00	131,525,000.00	100.0
1.	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk	131,525,000.00	131,525,000.00	100.0
IX	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	84,200,000.00	83,745,000.00	99.5
1.	Pengembangan data dan informasi lingkungan	84,200,000.00	83,745,000.00	99.5
X	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1,825,266,000.00	1,803,108,665.00	98.8
1.	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	1,716,891,000.00	1,695,117,250.00	98.7
2.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	108,375,000.00	107,991,415.00	99.6
XI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan	2,220,449,000.00	2,218,035,608.00	99.9
1.	Pemeliharaan rutin / berkala Sarana dan Prasarana Pertamanan	1,085,004,000.00	1,083,518,608.00	99.9
2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan	1,135,445,000.00	1,134,517,000.00	99.9
TOTAL		9,394,235,200.00	9,350,644,620.00	99.5

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Beberapa output penting dari pelaksanaan program dan kegiatan utama urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- a. Terselenggaranya kebersihan kota menuju kota sehat.
- b. Terlaksananya pelaksanaan kebijakan khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup.
- c. Tertatanya kali bersih sehingga terlihat indah.
- d. Tersusunnya panduan tentang pelaksanaan amdal.

Adapun hasil (outcomes) nya meliputi:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat.

- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya masalah lingkungan.
- c. Meningkatnya jumlah sungai yang bersih dan teduh.
- d. Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang peduli dengan kajian lingkungan.

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Telah dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan memiliki beberapa keluaran (output), yaitu:

- a. Terselenggaranya perlindungan sumber-sumber air.
- b. Terselenggaranya perlindungan pantai dan laut.
- c. Terlaksananya upaya-upaya pengurangan dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim.
- d. Terciptanya partisipasi masyarakat dalam perlindungan SDA.

Adapun hasil (outcomes) nya meliputi:

- a. Kawasan sumber-sumber mata air dan sumber daya alam terlindungi melalui partisipasi aktif masyarakat.
- b. Meningkatnya pemanfaatan kawasan pantai dan laut sebagai kawasan perdagangan, jasa dan pariwisata maupun sebagai kawasan lindung.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup yang diwujudkan dalam kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan dengan keluaran (output) adalah tersusunya data dan informasi lingkungan.

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.446.174.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.443.203.600,- atau 99,90%. Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Adapun keluaran (output) dari kegiatan ini adalah:

- 1) terlaksananya kegiatan kebersihan rutin pada ruas jalan utama dan ruang publik kota.
- 2) terlaksananya kegiatan kebersihan rutin pada pemukiman warga
- 3) Tersedianya peralatan kebersihan
- 4) Terselenggaranya pengelolaan sampah di TPA

Sedangkan hasil (*outcomes*) terwujudnya kebersihan kota dan lingkungan masyarakat.

2. Program Pengelolaan Area Pemakaman

Program Pengelolaan Area Pemakaman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.825.266.000,- dan direalisasikan Rp. 1.803.108.655,- atau sebesar 98,80%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman serta kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah terlaksananya penataan pemakaman serta pemeliharaan pagar kuburan.

Hasil (*outcomes*) dari kegiatan ini adalah tertatanya pemakaman sehingga terlihat indah dan rapi.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pemeliharaan taman-taman Kota selama 12 bulan. Sedangkan hasil (*outcomes*) terwujudnya taman kota bima yang lebih asri, hijau dan tertata.

b. Capaian Kinerja

Adapun capaian kinerja urusan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Cakupan presentase penanganan sampah mencapai 62,5% dari target penanganan persampahan yang juga 62,5 % di tahun 2017 atau dengan kata lain mampu memenuhi 100 % target penanganan persampahan.
2. Meningkatnya cakupan penghijauan dan perlindungan sumber mata air
3. Meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk
4. Tertatanya RTH di Kota Bima
5. Terus meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman sehingga tercipta keindahan kota.
6. Cakupan pelayanan kebersihan kota sebesar 70%.

c. Permasalahan dan Solusi

1. Kurangnya alokasi anggaran APBD Kota Bima untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Permasalahan ini diatasi melalui pelaksanaan koordinasi dengan tim TAPD Kota Bima sehingga alokasi anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sesuai dengan kebutuhan.
2. Belum adanya regulasi berupa Perda lingkungan hidup yang mengatur retribusi lingkungan hidup. Permasalahan dapat diatasi dengan menyusun Perda Lingkungan Hidup untuk menarik retribusi Lingkungan Hidup untuk tahun berikutnya.
3. Laboran (tenaga teknis laboratorium) belum ada sehingga alat-alat laboratorium belum dioperasikan secara optimal. Upaya mengatasi masalah ini adalah dengan menyampaikan permohonan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk menempatkan tenaga analis kimia sebagai pejabat pengelola laboratorium Lingkungan Hidup.
4. Pemerintah Kota Bima masih mengambil peran yang sangat dominan dalam pengelolaan persampahan. Hal ini menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah pada tingkat lingkungan. Hal ini juga berdampak pada cakupan pelayanan kebersihan kota hanya terbatas pada angka 70%. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan tersebut perlu dilakukan pembenahan kinerja pelayanan persampahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta lebih melibatkan partisipasi masyarakat agar memperoleh hasil yang maksimal.
5. Tingkat realisasi retribusi sampah masih rendah dari yang ditargetkan. hal ini disebabkan karena masih tumpang tindihnya pelayanan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dengan motor sampah tiga roda sehingga sebagian besar masyarakat langsung membayar pada operator. tidak melalui penagih retribusi yang seharusnya. untuk itu perlu dilakukan perbaikan pengelolaan retribusi sampah sejalan dengan upaya peningkatan kinerja pelayanan persampahan.

2. Kantor Kecamatan

Selain Dinas Lingkungan Hidup dan Sekretariat Daerah, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup juga dilaksanakan oleh Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba

Tabel 2.148. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup pada Kantor Kecamatan Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
	KECAMATAN ASAKOTA	82.504.000,00	69.817.800,00	84,62
I	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	82.504.000,00	69.817.800,00	84,62
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	82.504.000,00	69.817.800,00	84,62
	KECAMATAN MPUNDA	106.534.000,00	103.128.800,00	96,80
II	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	106.534.000,00	103.128.800,00	96,80
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	106.534.000,00	103.128.800,00	96,80
	KECAMATAN RABA	154.803.000,00	154.803.000,00	100,00
III	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	154.803.000,00	154.803.000,00	100,00
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	154.803.000,00	154.803.000,00	100,00
JUMLAH		343.841.000,00	327.749.600,00	95,32

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Program dan Kegiatan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dilaksanakan oleh Kecamatan Asakota, Mpunda dan Raba dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **343.841.000,00** dan jumlah yang direalisasikan sebesar Rp. **327.749.600,00** atau 95,32%; dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Terpenuhinya biaya operasional motor sampah yang ada di tingkat kelurahan yang ada di kecamatan asakota sebanyak 4 kelurahan, mpunda 10 kelurahan dan raba 11 kelurahan;
- b) Tersedianya sarana dan prasarana serta peralatan kebersihan di tingkat kelurahan yang ada di kecamatan asakota sebanyak 4 kelurahan, mpunda 10 kelurahan dan raba 11 kelurahan.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas gundukan (tumpukan) sampah di tingkat kelurahan.

b. Capaian Kinerja

Adanya peningkatan prosentase penanganan sampah di tiap-tiap kelurahan pada akhir tahun 2017.

c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Masih kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan sehingga masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah rumah tangganya di sungai.
- Tidak terkoordinir dengan baiknya penarikan retribusi sampah pada tingkat kelurahan karena pada tahun 2017 kelurahan bukan lagi sebagai OPD

2. Solusi

- Pengalihan operasional pengelolaan sampah dan penarikan retribusi sampah dari tingkat kelurahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima
- Meningkatkan kinerja pelayanan persampahan dengan memperbaiki sistem pengelolaan persampahan pada tingkat lokal yang berbasis pada partisipasi masyarakat
- Menyediakan sarana prasarana pendukung pengelolaan persampahan pada tingkat lokal baik melalui APBD maupun swadaya.
- Perlu dilakukan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan sungai.
- Pengenaan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik berupa denda, sanksi administratif maupun sanksi moral

c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Masih kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan sehingga masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah rumah tangganya di sungai .

2. Solusi

- Meningkatkan kinerja pelayanan persampahan dengan memperbaiki sistem pengelolaan persampahan pada tingkat lokal yang berbasis pada partisipasi masyarakat

- Menyediakan sarana prasarana pendukung pengelolaan persampahan pada tingkat lokal baik melalui APBD maupun swadaya.
- Perlu dilakukan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan sungai.
- Pengenaan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik berupa denda, sanksi administratif maupun sanksi moral.

6. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan capil pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.976.306.500,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.891.928.195,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau 97,16%. Program dan kegiatan pada urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. Untuk lebih jelasnya capaian realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.149. Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2017

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	875.450.250,00	844.485.574,00	96,46
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.572.000,00	3.294.000,00	72,05
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72.000.000,00	58.518.924,00	81,28
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18.400.000,00	17.101.400,00	92,94
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	48.831.000,00	48.829.000,00	100,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	79.621.750,00	79.466.750,00	99,81
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.830.000,00	18.830.000,00	100,00
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	236.520.000,00	222.895.000,00	94,24
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.120.000,00	1.995.000,00	63,94
9	Penyediaan bahan logistik kantor	11.721.750,00	11.721.750,00	100,00
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	337.283.750,00	337.283.750,00	100,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	44.550.000,00	44.550.000,00	100,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	169.978.000,00	166.326.350,00	97,85
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	111.560.000,00	110.980.000,00	99,48
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.918.000,00	31.846.350,00	91,20
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	34.500.000,00	33.982.000,00	98,50
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	34.500.000,00	33.982.000,00	98,50
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	104.765.000,00	104.765.000,00	100,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42.193.000,00	42.193.000,00	100,00
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	7.968.000,00	7.968.000,00	100,00
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.968.000,00	7.968.000,00	100,00
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA SKPD	30.968.000,00	30.968.000,00	100,00
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	15.668.000,00	15.668.000,00	100,00
V	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.791.613.250,00	1.742.369.271,00	97,25
1	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	25.746.000,00	21.729.750,00	84,40
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	37.576.000,00	37.036.000,00	98,56
3	Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil	64.747.000,00	56.502.000,00	87,27
4	Profil Kependudukan	23.113.000,00	22.723.000,00	98,31
5	Pemutahiran Data Kependudukan	51.756.000,00	51.756.000,00	100,00
6	Penyediaan Informasi yang dapat di Akses Masyarakat	20.899.000,00	20.899.000,00	100,00
7	Pemutahiran Data Pencatatan Sipil Non SIAK	57.069.000,00	56.513.971,00	99,03
8	Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga	275.144.000,00	266.244.000,00	96,77
9	Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	120.378.000,00	120.375.000,00	100,00
10	Pelayanan Penerbitan Mutasi/Pindah	27.514.000,00	27.514.000,00	100,00
11	Penyusunan Buku Agregat	42.667.000,00	42.645.000,00	99,95
12	Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	68.818.000,00	65.073.500,00	94,56
13	Pelayanan Penerbitan KTP-el	31.429.000,00	30.349.000,00	96,56
14	Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	61.634.000,00	60.717.000,00	98,51
15	Pelayanan Pengaduan	32.510.500,00	32.510.000,00	100,00
16	Peningkatan Penerbitan Akta Kematian dan	61.351.000,00	61.201.000,00	99,76

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	Pengangkatan Anak			
17	Pelayanan Perekaman KTP el	82.699.500,00	82.699.500,00	100,00
18	Pelayanan Dokumen Kependudukan	317.372.250,00	317.354.250,00	99,99
19	Penerbitan Dokumen Kependudukan	293.547.000,00	273.532.000,00	93,18
20	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	24.975.000,00	24.975.000,00	100,00
21	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi	70.668.000,00	70.020.300,00	99,08
Jumlah		2.976.306.500,00	2.891.928.195,00	97,16

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan utama, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Program dan Kegiatan

Program utama urusan wajib bukan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. Untuk melaksanakan program penataan administrasi kependudukan, pada tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.791.613.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.742.369.271,00 (97,25%) yang dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a) Pelatihan tenaga pengelola SIAK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.746.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 21.729.750,00 (84,40%).
Out put Kegiatan ini Terlatihnya tenaga pengelola SIAK sebanyak 30 orang
- b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.576.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 37.036.000,00 (98,56%).
Out put Kegiatan ini adalah Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan sebanyak 9 kali.
- c) Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.747.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 56.502.000,00 (94,49%).
Out put Kegiatan ini adalah Terlaksananya sosialisasi pelayanan publik bidang pencatatan sipil sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta 100 orang

- d) Profil Kependudukan sebesar Rp. 23.113.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 22.723.000,00 (98,31%).
Out put Kegiatan ini adalah Tersusunnya profil kependudukan sebanyak 1 dokumen
- e) Pemutahiran Data Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.756.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 51.756.000,00 (100,00%).
Out put Kegiatan ini adalah Tersedianya data Kependudukan sebanyak 1 dokumen
- f) Penyediaan Informasi yang dapat di Akses Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.899.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 20.899.000,00 (100,00%).
Out put Kegiatan ini adalah Tersedianya informasi yg dpt diakses masyarakat
- g) Pemutahiran Data Pencatatan Sipil Non SIAK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.069.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 56.513.971,00 (99,03%).
Out put Kegiatan ini adalah Tersedianya data Pencatatan Sipil Non SIAK sebanyak 1 dokumen
- h) Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 275.144.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 266.244.000,00 (96,77%).
Out put Kegiatan ini adalah Terlayannya penerbitan Kartu Keluarga bagi masyarakat.
- i) Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 275.144.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 266.244.000,00 (96,77%).
Out put Kegiatan ini adalah Terlayannya penerbitan Akta Kelahiran bagi masyarakat
- j) Pelayanan Penerbitan Mutasi/Pindah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.514.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 27.514.000,00 (100%).
Out put Kegiatan ini adalah terlayannya penerbitan Mutasi/pindah bagi masyarakat
- k) Penyusunan Buku Agregat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.667.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 42.645.000,00 (99,95%).
Out put Kegiatan ini adalah Tersusunnya buku agregat sebanyak 50 buah

- l) Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.818.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 65.073.500,00 (94,56%).
Out put Kegiatan ini adalah Terlayannya penerbitan akta perkawinan dan perceraian bagi masyarakat
- m) Pelayanan Penerbitan KTP-el dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.429.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 30.349.000,00 (96,56%).
Out put Kegiatan ini adalah Terlayannya penerbitan KTP-el bagi masyarakat
- n) Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.634.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 60.717.000,00 (98,51%).
Out put Kegiatan ini adalah Terlaksananya kerjasama dan inovasi pelayanan dengan adanya aplikasi system online akta pencatatan sipil
- o) Pelayanan Pengaduan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.429.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 30.349.000,00 (96,56%).
Out put Kegiatan ini adalah Terlayannya Pengaduan dari masyarakat
- p) Peningkatan Penerbitan Akta Kematian dan Pengangkatan Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.351.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 61.201.000,00 (99,76%).
Out put Kegiatan ini Terlaksananya penerbitan akta kematian dan pengangkatan anak masyarakat
- q) Pelayanan Perekaman KTP el dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.699.500,00 direalisasikan sebesar Rp. 82.699.500,00 (100%).
Out put Kegiatan ini adalah Terlayannya perekaman KTP-el bagi masyarakat
- r) Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 317.372.250,00 direalisasikan sebesar Rp. 317.354.250,00 (99,99%).
Out put Kegiatan ini adalah Terlayannya dokumen kependudukan dengan pelayanan keliling kepada masyarakat
- s) Penerbitan Dokumen Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 293.547.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 273.532.000,00 (93,18%).
Out put Kegiatan ini adalah Tersedianya blangko-blangko untuk penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- t) Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.975.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 24.975.000,00 (100%).

Out put Kegiatan ini adalah Tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan bagi masyarakat.

- u) Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.668.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 70.020.300,00 (99,08%).

Out put Kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan administrasi bagi masyarakat.

b) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan capil pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.150. Capaian Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk yang telah memiliki KTP-el	85%	83%	97%
		Presentase jumlah pelayanan di bidang pendaftaran penduduk yang telah sesuai dengan standar pelayanan di tetapkan	19 Jenis Pelayanan/85 %	17 Jenis Pelayanan/75 %	93,75 %
		Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel	Ada	Ada	Ada
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan Akte Kelahiran	80%	70,%	87%
		Rasio pasangan ber Akte Nikah	70%	53%	75%
		Peresentase penerbitan Akte Kematian	80%	60%	75%

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bima, 2017

c) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Banyaknya pengajuan/permohonan pelayanan dokumen administrasi kependudukan baik pindah datang, pindah keluar, data penduduk yang masih blank, perekaman KTP-el, permohonan Akta-akta Catatan sipil maupun peristiwa penting lainnya, serta keterbatasan Blangko KTP-el.

- Belum tersimpannya arsip dokumen kependudukan dengan baik yang sesuai dengan standar kearsipan nasional.
- Belum maksimalnya pemanfaatan Akta Kematian sebagai persyaratan Pengalihan Hak Waris dan Pencatatan Perkawinan (status cerai mati).
- Belum ada pengembangan jaringan aplikasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh di tingkat desa/kelurahan, serta stabilnya kondisi jaringan tidak menentu (kadang baik/kadang buruk)menjadikan salah satu penyebab utama terhambatnya pelayanan, sehingga terkadang melampoi SOP standar pelayanan minimal.
- Keterbatasan tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dokumen kependudukan ;
 - ✓ Sarana berupa bangunan gedung kantor yang belum sesuai dengan standar bangunan/gedung pelayanan yang memadai.
 - ✓ Prasarana berupa Mobil keliling sebagai fasilitas pendukung dalam pelayanan keliling kepada masyarakat yang belum ada.
 - ✓ Sarana prangkat keras berupa Server masih mengandalkan pengadaan pusat yang telah berusia lebih 5 tahun.
- Keterbatasan tersedianya aparatur PNS untuk mendukung kelancaran kinerja perkantoran ;
- Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima mempunyai 2 (dua) bidang sebagai pelayanan yaitu Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk dan Bidang pelayanan pencatatan sipil pada kedua bidang tersebut belum memiliki staf sebagai operator dan staf administrasi(staf PNS), pada bidang pelayanan pendafrana penduduk dibutuhkan sebanyak 15 (lima belas) orang operator PNS, dan dibidang pelayanan pencatatan sipil sebanyak 10 (sepuluh) orang operator PNS, sedangkan dibidang pengolahan informasi administrasi dan pemanfaatan data dibutuhkan sebanak 3 (tiga) orang PNS, serta ditambah 2 (dua) staf administrasi.
- ASN yang memiliki motivasi kerja tinggi sebagai pelayan masyarakat rata-rata masih kurang/tidak sesuai harapan.

2) Solusi

- Meningkatkan kualitas petugas operator/entry data, verifikator ditingkat desa/kelurahan, puskesmas dengan memberikan pelatihan dalam pelayanan permohonan Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting lainnya

pendaftaran penduduk, permohonan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru.

- Menambah pengadaan Server, software dan hardware untuk meningkatkan kualitas koneksifitas jaringan semakin lancar.
- Melakukan sosialisasi undang-undang No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan berikut aturan pelaksanaannya secara luas kepada penduduk, melalui talk show di Radio-radio, media cetak maupun dalam forum rapat-rapat koordinasi Kecamatan.
- Dilakukan rehab berat / pembangunan gedung sebagai tempat ruang pelayanan yang representatif, nyaman, aman dan tertib.
- Pengembangan jaringan aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara menyeluruh di tingkat desa / kelurahan.

7. Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.931.266.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.801.147.629,00 (95,56%). Program dan kegiatan pada urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima dimana capaian realisasinya digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.151. Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	524.544.500,00	497.468.766,00	94,84
1	Penyediaan jasa surat menyurat	27.318.000,00	27.317.000,00	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	66.060.000,00	57.200.826,00	86,59
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27.050.000,00	21.890.700,00	80,93
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.780.000,00	51.780.000,00	100,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.810.000,00	13.803.000,00	99,95
6	Penyediaan alat tulis kantor	31.902.500,00	31.901.900,00	100,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.840.000,00	25.515.000,00	95,06
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.105.000,00	2.102.000,00	99,86
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	kantor			
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000,00	3.490.000,00	96,94
11	Penyediaan makanan dan minuman	18.660.000,00	14.884.000,00	79,76
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	227.334.000,00	219.574.340,00	96,59
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	9.585.000,00	9.510.000,00	99,22
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	825.262.000,00	797.066.950,00	96,58
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	663.970.000,00	639.082.000,00	96,25
2	Pengadaan mebeleur	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.349.000,00	12.349.000,00	100,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	97.628.000,00	94.320.950,00	96,61
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	23.265.000,00	23.265.000,00	100,00
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.450.000,00	24.450.000,00	100,00
III	Program peningkatan disiplin aparatur	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	17.780.000,00	17.780.000,00	100,00
1	Pelaksanaan Penilaian AKJG	17.780.000,00	17.780.000,00	100,00
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99.960.000,00	99.960.000,00	100,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.760.000,00	21.760.000,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	9.520.000,00	9.520.000,00	100,00
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.520.000,00	9.520.000,00	100,00
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	40.120.000,00	40.120.000,00	100,00
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	19.040.000,00	19.040.000,00	100,00
VI	Program Keluarga Berencana	288.880.000,00	286.675.520,00	99,24
1	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	91.970.000,00	90.220.000,00	98,10
2	Pelayanan KIE	119.425.000,00	119.425.000,00	100,00
3	Pembinaan Keluarga Berencana	51.270.000,00	51.270.000,00	100,00
4	Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana	26.215.000,00	25.760.520,00	98,27
VII	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	115.724.600,00	115.012.500,00	99,38
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	23.850.000,00	23.850.000,00	100,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
2	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	91.874.600,00	91.162.500,00	99,22
VIII	Program pelayanan kontrasepsi	747.428.000,00	695.406.393,00	93,04
1	Pelayanan konseling KB	546.375.000,00	495.317.393,00	90,66
2	Pengadaan alat kontrasepsi KB	201.053.000,00	200.089.000,00	99,52
IX	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	194.215.000,00	174.305.000,00	89,75
1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	54.819.500,00	51.331.000,00	93,64
2	Orientasi Kader Pendataan Keluarga	43.858.000,00	41.127.000,00	93,77
3	Operasional Kader pendataan keluarga	45.960.000,00	44.880.000,00	97,65
4	Monitoring kegiatan pendataan keluarga	15.060.000,00	10.260.000,00	68,13
5	Koordinasi Pengelolaan Program	34.517.500,00	26.707.000,00	77,37
X	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	23.112.500,00	23.112.500,00	100,00
1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	15.872.500,00	15.872.500,00	100,00
2	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	7.240.000,00	7.240.000,00	100,00
XI	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	11.010.000,00	11.010.000,00	100,00
1	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	11.010.000,00	11.010.000,00	100,00
XII	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	29.280.000,00	29.280.000,00	100,00
1	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	29.280.000,00	29.280.000,00	100,00
XIII	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	21.070.000,00	21.070.000,00	100,00
1	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	21.070.000,00	21.070.000,00	100,00
	JUMLAH	2.931.266.600,	2.801.147.629,	95,56

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Program dan Kegiatan

1. Program Keluarga Berencana

Program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada

tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 288.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 286.675.520,00 (99,24%), dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.970.000,00 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.220.000,00 (98,10%).
- 2) Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119.425.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 119.425.000,00 (100,00%)
- 3) Pembinaan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.270.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 51.270.000,00 (100%)
- 4) Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.215.000,00 dan jumlah yang direalisasikan sebesar Rp. 25.760.520,00 (98,27%).

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Terlaksananya kegiatan Lomba Pengelola PPKS/UPPKS/Kader BKB tingkat Kota.
- b) Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Fafsedu, Toga/Toma Tk. Kota, Penilaian Lomba PKB dan IMP Teladan di Tingkat Kota Bima, dan Kegiatan Pembinaan Program Kampung KB, jambore PLKB dan kader serta pembentukan Kampung KB 4 Kec.
- c) Terlaksananya kegiatan Lomba Bidan Praktek Mandiri(BPM)/MKJP/promosi Kes.R ep. Rumaah sakit Type C dan D, Kelompok KB Pria dan Lomba Motivator KB Tingkat. Kota.
- d) Terlaksananya rapat kerja daerah program Keluarga Berencana di Ibukota Propinsi.

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program kesehatan reproduksi remaja yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 115.724.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 115.012.500,00 (99,38%), dilaksanakan melalui kegiatan:

- a) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.850.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 23.850.000,00 (100%).
- b) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.874.600,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 90.220.000,00 (99,22%)

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah

- 1. Terlaksananya Advokasi & KIE Program Kesehatan Reproduksi Remaja serta terlaksananya lomba Generasi Berencana sebanyak 2 kali kegiatan.
- 2. Terlaksananya Kegiatan Hari Besar (Hari Keluarga Nasional) Tahun 2017.

3. Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Pelayanan Kontrasepsi yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 747.428.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 695.406.393,00 (93,04%), dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Pelayanan Konseling KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 546.375.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 495.317.393,00 (90,66%).
- b) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 201.053.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 200.089.000,00 (99,52%)

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah

- 1. Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Program KKBPK.
- 2. Terlaksananya Belanja Tempat Penyimpanan KIT /alat dan obat Kontrasepsi dan Termometer (termohyrometer) pengukur suhu ruangan gudang alakon DAK 2017.

4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 194.215.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 174.305.000,00 (89,75%), dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.819.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 51.331.000,00 (93,64%).
- 2) Orientasi Kader Pendataan Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.960.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 41.127.000,00 (93,77%).
- 3) Operasional Kader pendataan keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.960.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 44.880.000,00 (97,65%)
- 4) Monitoring kegiatan pendataan keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.060.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 10.260.000,00 (68,13%).
- 5) Koordinasi pengelolaan program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.517.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp 26.707.000,00 (77,37%).

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Terlaksananya rapat evaluasi program kependudukan KB dan terfasilitasinya biaya operasional anggota PPKBD sebanyak 50 orang dan biaya operasional Sub PPKBD sebanyak 263 orang.
- b) Terlaksananya orientasi pemutahiran data keluarga terhadap 220 orang kader pendataan keluarga yang dilaksanakan dalam 4 angkatan dan rapat tehnik kegiatan pencatatan pelaporan F/II/KB sebanyak 40 orang serta F/I/DAK sebanyak 27 orang.
- c) Tersedianya biaya operasional petugas SIDUGA (Sistim Informasi Kependudukan dan Keluarga), Operasional pemutahiran data keluarga dan Operasional petugas pemutar film KB layar lebar.
- d) Terlaksananya Monitoring Kegiatan pengelolaan data dan informasi program KB dan monitoring kegiatan pencatatan dan pelaporan (F/I/DAL) bagi PLKB.
- e) Terlaksananya rapat tehnik kegiatan lomba pidato kependudukan dan kegiatan kuliah umum bagi mahasiswa tingkat Kota Bima

5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 23.112.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.112.500,00 (100%), dilaksanakan oleh BPP-KB Kota Bima melalui kegiatan Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.

- a) Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.872.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp 15.872.500,00 (100%).
- b) Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.240.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 7.240.000,00 (100%).

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Terlaksananya rapat pembinaan Pusat Informasi Konseling (PIK) KRR.
- b) Terlaksananya rapat persiapan lomba kelompok Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) Tk. Kota Bima

6. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 29.280.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.280.000,00 (100%), dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a. Terlaksananya Pembinaan kelompok kegiatan (POKTAN) Tk. Kota
- b. Terselenggaranya kegiatan lomba BKB Tk. Provinsi di Kota Bima

7. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 21.070.000,00 dengan realisasi sebesar 21.070.000,00 (100%) dilaksanakan melalui Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya pelatihan bagi tenaga pendamping kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS sebanyak 1 kali kegiatan

8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP&KB) Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.010.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.010.000,00 (100%). Keluaran (output) program ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.

b. Capaian Kinerja

Tabel 2.152. Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana

NO	URAIAN	2017		
		TARGET	REALISASI	%
1	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15 - 49 Tahun)	2,61	2,36	90,42
2	Porsentase Pemakaian kontrasepsi (CPR)	61,27	50,31	82,11
3	Porsentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi	25,30	13,28	190,51
4	Porsentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	6,27	8,86	70,767
5	Cakupan Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	85,00	86,63	101,92
6	Peserntase Peserta KB aaktif MKJP	51,15	50,31	98,36
7	Jumlah peserta KB aktif tambahan	2,74	11,12	405,84
8	Porsentase keluarga prasejahtera dan Keluarga sejahtera I	45	32	71,11

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Tingkat unmeet need yang masih tinggi, dimana target 6,26% realisasi 8,86%, hal ini dikarenakan :
 - 1. Ingin ber KB tapi tidak bias ber KB
 - 2. BerKB tapi masih ingin mempunyai anak
- b. Masih tingginya PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan KB cara tradisional seperti (sistem kalender, senggama terputus) cara ini tidak efektif untuk mencegah kehamilan. Hal ini masih digunakan karena masih adanya paradigma yang tidak benar terhadap alat KB modern MKJP (Menggunakan Kontrasepsi Jangka Panjang)
- c. Kurangnya SDM yang terlatih yaitu tenaga medis (bidan) dalam pemasangan alat KB model MKJP
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung (alkes) seperti sterilisator uap dan lampu sorot pada sebagian fasilitas kesehatan pelayanan KB
- e. Rasioa perbandingan jumlah penyuluh terhadap wilayah penyuluhan yang tidak sebanding (1:2) dimana jumlah penyuluh yang ada sebanyak 23 orang sedangkan jumlah kelurahan sebanyak 38 kelurahan
- f. Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam mendukung program nasional KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga) dan pengembangan Kampung KB.

2) Solusi

- a. Meningkatkan dukungan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dengan penyuluhan melibatkan lintas sektoral seperti Toga, Toma, Towa
- b. Promosi Alkon KB modern seperti MKJP (IUD, Implan, MOW, MOP) Non MKJP (suntik, Pil KB dan kondom).
- c. Melakukan diklat terhadap sejumlah tenaga medis (bidan) yang ada di 66 fasilitas kesehatan yang ada.
- d. Pengadaan Alkes yang dibutuhkan.
- e. Penambahan personil penyuluh.
- f. Melaksanakan Rakor KB lintas sektoral untuk sinkronisasi program pusat dan daerah

4.2.8. Perhubungan

Urusan wajib perhubungan di Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.070.385.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 2.971.199.233,- atau 96,77%.

Urusan wajib perhubungan dilaksanakan oleh Dinas perhubungan Kota Bima. Realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusi dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan di Kota Bima tahun 2017 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.153. Program/ Kegiatan Urusan Perhubungan Kota Bima Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	666.060.000,00	618.462.477,00	92,85
1	Penyediaan jasa surat menyurat	68.700.000,00	63.500.000,00	92,43
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	41.610.000,00	26.684.526,00	64,13
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	33.990.000,00	25.917.500,00	76,25
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	37.800.000,00	37.800.000,00	100,0
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.000.000,00	12.465.000,00	69,25
6	Penyediaan alat tulis kantor	50.760.000,00	50.715.100,00	99,91
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	110.500.000,00	98.034.500,00	88,72
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	2.930.000,00	97,67
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19.200.000,00	19.196.500,00	99,98
10	Penyediaan makanan dan minuman	51.900.000,00	50.724.000,00	97,73
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	190.000.000,00	189.935.351,00	99,97
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40.600.000,00	40.560.000,00	99,90
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	188.428.000,00	188.156.756,00	99,86
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	27.000.000,00	26.900.000,00	99,63
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	161.428.000,00	161.256.756,00	99,89
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	67.500.000,00	66.825.000,00	99,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	67.500.000,00	66.825.000,00	99,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	123.850.000,00	123.415.400,00	99,65
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.750.000,00	14.750.000,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15.750.000,00	15.747.000,00	99,98
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	15.500.000,00	15.490.000,00	99,94
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.750.000,00	15.677.000,00	99,54
5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	35.750.000,00	35.441.600,00	99,14
6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	26.350.000,00	26.309.800,00	99,85
VI	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	93.072.000,00	93.005.700,00	99,93
1	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	15.422.000,00	15.416.000,00	99,96
2	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	32.300.000,00	32.289.200,00	99,97
3	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	19.850.000,00	19.800.500,00	99,75
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.500.000,00	25.500.000,00	100,0
VII	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	215.400.000,00	212.673.000,00	98,73
1	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	215.400.000,00	212.673.000,00	98,73
VIII	Program peningkatan pelayanan angkutan	494.150.000,00	493.063.400,00	99,78
1	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	13.600.000,00	13.600.000,00	100,0
2	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan peralatan	15.750.000,00	15.639.900,00	99,30
3	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	17.750.000,00	17.710.000,00	99,77
4	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	179.100.000,00	179.100.000,00	100,0
5	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	20.050.000,00	19.997.500,00	99,74
6	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,0
7	Survei Sarana dan Prasarana Angkutan Laut	57.000.000,00	57.000.000,00	100,0
8	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Parkir	163.900.000,00	163.016.000,00	99,46
IX	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	910.875.000,00	905.322.500,00	99,39
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	183.400.000,00	181.916.000,00	99,19
2	Pengawasan rutin dan operasi lalu lintas	256.800.000,00	256.800.000,00	100,0
3	Penertiban dan pemeriksaan lalu lintas	25.125.000,00	25.092.500,00	99,87
4	Revitalisasi Traffic Light	445.550.000,00	441.514.000,00	99,09

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
X	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	104.650.000,00	104.275.000,00	99,64
1	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	104.650.000,00	104.275.000,00	99,64
XI	Program Peningkatan Pelayanan Jasa Terminal	206.400.000,00	166.000.000,00	80,43
1	Pengaturan dan Penarikan Retribusi terminal	206.400.000,00	166.000.000,00	80,43
Total Urusan Perhubungan		3.070.385.000,00	2.971.199.233,00	96,77

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Bima Tahun 2017

Penjelasan terkait output/outcome dari program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Program ini diwujudkan melalui kegiatan:

- 1) Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur bidang Perhubungan.
- 2) Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- 3) Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan.
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- 1) Tersusunnya kebijakan, norma, standar dan prosedur di bidang perhubungan.
- 2) Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan.
- 3) Meningkatnya pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan.
- 4) Monitoring rutin pengelolaan terminal dan fasilitas perhubungan yang ada di Kota Bima

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program ini diwujudkan melalui kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan.

Adapun keluaran (output) dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung sayap terminal Kumbe.

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- a. Penyuluhan para sopir/juru mudi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.600.000,00,-, atau 100%.
- b. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan peralatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.639.900,00,-, atau 99,30%.
- c. Uji kelayakan sarana transportasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.710.000,00,-, atau 99,77%.
- d. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 179.100.000,- atau 100%.
- e. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.997.500.000,- atau 99,74%.
- f. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.000.000,- atau 100%.
- g. Survei Sarana dan Prasarana Angkutan Laut dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.000.000,- atau 100%.
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 163.016.000,-, atau 99,46%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- 1) Terlaksananya penyuluhan kepada sopir/juru mudi tentang disiplin angkutan umum.
- 2) Terlaksananya operasi dan pengawasan disiplin angkutan umum di jalan raya secara rutin.
- 3) Terlaksananya sosialisasi mengenai ketertiban lalu lintas dan angkutan.
- 4) Tersedianya mobil penumpang pedesaan.
- 5) Tersedianya data mengenai sarana dan prasarana angkutan laut.
- 6) Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di seluruh titik di Kota Bima .

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 181.916.000,00,- atau 99,19 %.
- b. Pengawasan rutin dan operasi lalu lintas dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 256.800.000,00 atau 100%.
- c. Penertiban dan Pemeriksaan Lalu Lintas dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.092.500,00 atau 99,87%.

d. Revitalisasi Traffic Light dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 441.514.000,00 atau 99,09%.

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- 1) Tersedianya rambu-rambu lalu lintas jalur 1 (satu) arah dalam wilayah Kota Bima.
- 2) Terlaksananya pengawasan dan operasi lalu lintas.
- 3) Terlaksananya revitalisasi traffic light di Cabang Ranggo dan Cabang Masjid Raya Kota Bima.

5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.275.000,00,- atau 99,64 %. Adapun keluaran (*output*) dari program ini adalah terlaksananya kegiatan pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor di Kota Bima.

6. Program Peningkatan Pelayanan Jasa Terminal

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan dan penarikan retribusi terminal dengan fokus kegiatan pada belanja jasa non pegawai retribusi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 166.000.000,00,- atau 80,43%. Adapun keluaran (*output*) dari program ini adalah meningkatnya retribusi terminal yang ada di Kota Bima.

b. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan perhubungan tahun 2017 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.154. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi capaian	%
1	Program pelayanan administrasi perkantoran .	12 bulan	12 bulan	100
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	12 bulan	12 bulan	100
3	Program peningkatan disiplin aparatur.	1 paket	1 paket	100
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	0	0	0
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	12 bulan	12 bulan	100
6	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.	1 paket	1 paket	100
7	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	4 kegiatan	4 kegiatan	100

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi capaian	%
8	Program peningkatan pelayanan angkutan.	12 bulan	12 bulan	100
9	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.	12 bulan	12 bulan	100
10	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.	12 bulan	12 bulan	100
11	Program peningkatan pelayanan jasa terminal	12 bulan	12 bulan	100

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017

c. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Masih minimnya pengetahuan penggunaan jalan terhadap rambu-rambu lalu lintas.
2. Masih dijumpai adanya pelanggaran Jalur Trayek Angkutan Umum;
3. Masih dijumpai pelanggaran oleh para sopir karena rendahnya pendidikan dan kesadaran berlalu lintas;
4. Kurang tertibnya kendaraan tradisional roda 2 yaitu Benhur dan Gerobak;
5. Lebar jalan dan kemampuan tonase jalan dan jembatan tidak sesuai dengan besar dan beratnya kendaraan pemakai jalan sehingga cepat rusaknya jalan/ jembatan dan sering terjadi kecelakaan;
6. Belum tertibnya pengaturan jalur Ojek sehingga jalur trayek maupun pemungutan biaya operasinya masih kurang tertib.

Beberapa strategi untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengubah jalur dua arah menjadi jalur satu arah di jalan utama yaitu Jalan Soekarno-Hatta dan jalan Gadjah Mada yang dilengkapi dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
2. Mengadakan operasi terpadu/razia pada pagi hari (rawan macet) pada beberapa titik kegiatan, berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Intensifikasi retribusi izin trayek dan pengujian kendaraan angkutan umum dan kendaraan bermotor, serta melakukan penyuluhan di jalan dan sosialisasi kepada sopir dan pengguna jalan umum.
3. Mendata jumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 serta kendaraan tradisional tidak bermotor (benhur dan gerobak), sehingga dapat ditetapkan target PAD yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan.

4. Menyusun Sistem Tataran Transportasi Lokal yang betul-betul handal secara profesional sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang rencana di sektor perhubungan secara Lokal, Regional dan Nasional.

8. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Urusan wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, pada tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.689.958.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 3.190.962.220, atau 86,48%. Realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusi dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Beberapa program dan kegiatan pada urusan wajib informatika dan Komunikasi seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.155. Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2017

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.241.612.000,00	1.221.546.897,00	98,38
1	Penyediaan jasa surat menyurat	169.500.000,00	169.499.000,00	100,0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	338.952.000,00	323.179.811,00	95,35
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	100,0
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.000.000,00	852.800,00	85,28
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	43.200.000,00	42.100.000,00	97,45
6	Penyediaan alat tulis kantor	54.175.000,00	54.175.000,00	100,0
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	89.394.000,00	88.339.000,00	98,82
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.572.100,00	10.572.100,00	100,0
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.450.000,00	98.825.000,00	98,38
10	Penyediaan makanan dan minuman	21.450.000,00	21.430.000,00	99,91
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	340.918.900,00	340.849.186,00	99,98
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	48.000.000,00	47.725.000,00	99,43
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	191.986.000,00	188.564.000,00	98,22
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	29.964.000,00	99,88
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.536.000,00	45.227.000,00	95,14
3	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	114.450.000,00	113.373.000,00	99,06

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.375.000,00	23.375.000,00	100,0
1	Pengadaan pakaian Olah Raga	23.375.000,00	23.375.000,00	100,0
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	34.450.000,00	34.450.000,00	100,0
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	34.450.000,00	34.450.000,00	100,0
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	149.350.000,00	149.341.100,00	99,99
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.000.000,00	17.000.000,00	100,0
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15.500.000,00	15.500.000,00	100,0
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	15.000.000,00	15.000.000,00	100,0
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18.300.000,00	18.300.000,00	100,0
5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	61.300.000,00	61.291.100,00	99,99
6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	22.250.000,00	22.250.000,00	100,0
VI	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	459.800.000,00	457.712.666,00	99,55
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	353.500.000,00	352.312.666,00	99,66
2	Pengadaan alat studio dan komunikasi	56.400.000,00	55.500.000,00	98,40
3	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.	49.900.000,00	49.900.000,00	100,0
VII	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	40.000.000,00	39.930.200,00	99,83
1	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	40.000.000,00	39.930.200,00	99,83
VIII	Program kerjasama informasi dengan mas media	140.100.000,00	139.953.400,00	99,90
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	140.100.000,00	139.953.400,00	99,90
IX	Program Pengadaan Perangkat Aplikasi dan Telematika	1.225.375.000,00	752.818.957,00	61,44
1	Pengembangan/pembenahan Aplikasi Website	148.975.000,00	148.975.000,00	100,0
2	Pengembangan Fasilitas dan Prasarana Media Centre.	1.076.400.000,00	603.843.957,00	56,10
X	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	49.520.000,00	49.500.000,00	99,96
1	Penguatan Kelembagaan Pengelola Informasi Publik	49.520.000,00	49.500.000,00	99,96
XI	Program Peningkatan Tata laksana Komunikasi dan Informatika	76.350.000,00	75.730.000,00	99,19
1	Pengelolaan Proses Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	41.450.000,00	40.930.000,00	98,75
2	Pengolahan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	34.900.000,00	34.800.000,00	99,71
XII	Program Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Postel	58.040.000,00	58.040.000,00	100,0

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Monitoring Menara Telekomunikasi	58.040.000,00	58.040.000,00	100,0
Total Urusan Komunikasi dan Informatika		3.689.958.000,00	3.190.962.220,00	86,48

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Penjelasan terkait *output/outcome* dari program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa memiliki anggaran sebesar Rp. 457.712.666,- dengan realisasi anggaran sebesar 99,55%. Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:
 - i. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 352.312.666,00,-, atau 99,66%.
 - ii. Pengadaan alat studio dan komunikasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.500.000,00,-, atau 98,40%.
 - iii. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.900.000,00,-, atau 98,40%.

Adapun keluaran (*output*) dari program ini adalah terlaksananya kerja sama dengan media massa yang menyebarkan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi berupa kegiatan pelatihan SDM, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 39.930.200,- atau 99,83%. Adapun keluaran (*output*) dari program ini adalah tersosialisasinya peraturan tentang Komunikasi dan Informatika kepada SKPD dan masyarakat.
3. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media memiliki anggaran sebesar Rp. 139.953.400,- atau 99,90%. Adapun keluaran (*output*) dari program ini adalah tersebarnya informasi mengenai pembangunan dan pemerintahan daerah melalui website pemerintah Kota Bima.
4. Program Pengadaan Perangkat Aplikasi dan Telematika, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 752.818.957,- atau 61,44%. Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- i. Pengembangan/pembenahan aplikasi website dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 148.975.000,00,-, atau 100%.
- ii. Pengembangan fasilitas dan prasarana media centre dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 603.843.957,00,-, atau 56,10%.

Adapun keluaran (*output*) dari program ini adalah tersusunnya grand design media centre di Kota Bima.

b. Capaian Kinerja

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib Komunikasi dan Informatika meliputi beberapa indikator kinerja penting sebagaimana dideskripsikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.156. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% capaian
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan aplikasi				
-	Website yang aktif dan up to date	%	40	35	87,50
-	Jumlah fasilitas dan prasarana media centre.	%	20	20	100,00
2.	Persentase ASN yang menguasai aplikasi teknologi informasi				
-	Jumlah ASN yang dilatih	%	16	16	100,00
3.	Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi dan informatika.				
-	Jumlah publikasi data dan informasi	%	100	87	87,00
4.	Persentase tenaga pengawas				
-	Intensitas pelaksanaan monitoring	Bulan	6	6	100,00
5.	Tersedianya data dan informasi yang memadai				
-	Jumlah CCTV yang tersebar	Titik	5	5	100,00
-	Tersedianya Alat Studio	Unit	2	2	100,00
-	Tersedianya dokumen hasil pengkajian	Dok.	1	1	100,00
6.	Tersebarluasnya informasi ke masyarakat				
-	Pokja PPID	Kgt	1	1	100,00
7.	Tercapainya E-Government dan keterbukaan informasi publik				
-	Pokja Tim Pengelola Informasi Publik	Kgt	1	1	100,00

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Website Pemerintah Kota Bima belum terlaksana dengan baik karena terbatasnya SDM yang ada.
- SDM aparatur dalam bidang teknologi komunikasi dan informatika masih sangat terbatas sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan dan pengembangan bidang teknologi komunikasi dan informatika.
- Pengembangan Media Center belum dilaksanakan secara optimal.

2) Solusi

- Meningkatkan keterampilan SDM Pengelola *website* Pemerintah Kota Bima.
- Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam bidang teknologi komunikasi dan informatika melalui sosialisasi ataupun pelatihan.
- Perlu dukungan pendanaan yang memadai untuk penyelenggaraan Media Center pada tahun 2018.

9. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Perkembangan koperasi ditunjukkan dengan peningkatan data keragaan koperasi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif ditargetkan sebanyak 101 unit, realisasi sebanyak 105 unit atau 103,96% dibandingkan dengan tahun 2016 realisasinya sebanyak 93 unit dan terdapat peningkatan sebanyak 12 unit atau 11,42% dan apabila dibandingkan lagi dengan target jangka menengah yang memiliki target 101 unit maka realisasi untuk tahun 2017 melebihi dari target sebanyak 4 unit.

Tabel 2.157. Persentase Koperasi Aktif di Kota Bima 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	78	80	85	93	105
2.	Jumlah Koperasi (unit)	144	150	185	193	205

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, 2016

Untuk jumlah UMKM tahun 2017 ditargetkan sebanyak 1.559 UMKM terealisasi sebanyak 1.332 UMKM atau 85,44% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang realisasinya sebanyak 575 UMKM, sehingga terdapat peningkatan

sebanyak 757 UMKM atau 131,65%. dan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang memiliki target 1.609 UMKM maka realisasi untuk tahun 2017 dibawah target sebanyak 277 UMKM.

Urusan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Dinas Koperindag Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.241.659.657,- dan tersealisasi sebesar Rp.2.197.184.159,- atau 98,69%.

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran

Pembangunan di bidang koperasi dan UKM tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 program yaitu 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM; 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Realisasi program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.158. Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.236.904.557	1.221.747.865	98,77
-	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	346.500.000	335.185.000	96,73
-	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	116.480.000	92.604.424	79,50
-	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1.600.000	1.179.700	73,73
-	Penyediaan jasa administrasi keuangan	54.000.000	49.800.000	92,22
-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.380.000	26.378.000	99,99
-	Penyediaan alat tulis kantor	39.294.000'	39.294.000	
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	154.900.000	154.900.000	100,00
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.160.000	51.248.000	96,40
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	4.995.000	99,11
-	Penyediaan Makan dan Minuman	38.305.000	38.457.200	100,40

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
-	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	393.846.357	381.066.541	96,76
-	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	46.693.200	46.640.000	99,89
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	136.807.000	135.110.000	98,76
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	89.500.000	89.500.000	100,00
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	25.876.000	25.560.000	98,78
-	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.431.000	20.050.000	93,56
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.260.000	24.260.000	100,00
-	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	24.260.000	24.260.000	100,00
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	89.200.000	89.200.000	100,00
-	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	16.500.000	16.500.000	100,00
-	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	55.200.000	55.200.000	100,00
-	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	17.500.000	17.500.000	100,00
5	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	155.410.000	154.596.000	99,48
-	Operasional dan Pengembangan UPT PLUT	155.410.000	154.596.000	99,48
6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	103.313.300	84.170.000	81,47
-	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	17.078.600	10.918.000	63,93
-	Penyelenggaraan bimbingan teknis bagi UMKM	86.234.700	73.252.000	84,94
7	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	292.370.500	290.150.614	99,24

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
-	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	61.025.000	60.574.000	99,26
-	Penyelenggaraan promosi usaha mikro kecil menengah	191.220.000	189.548.614	99,13
-	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40.125.500	40.028.000	99,76
8	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	156.440.200	151.609.680	96,91
-	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	101.275.200	101.135.680	99,86
-	Pendampingan bagi kelembagaan koperasi	55.165.000	50.474.000	91,50
9	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi dan UMKM	46.954.100	46.340.000	98,69
-	Pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM	46.954.100	46.340.000	98,69

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program kegiatan tersebut, antara lain :

1. **Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif.**
2. **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.** Didukung oleh 2 kegiatan, terlaksananya penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan penyelenggaraan Bimbingan teknis bagi UMKM. *Keluaran (output)* dari kegiatan tersebut adalah, bertambahnya pemahaman peserta diklat kewirausahaan (50 orang selama 1 hari). Dan bertambahnya pemahaman peserta Bimbingan Teknis bagi UMKM (90 orang selama 3 hari).
Adapun hasil (outcomes) program tersebut dilaksanakan untuk mendukung penumbuhan UMKM baru dan pengelolaan UMKM yang inovatif dan mandiri.
3. **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.** Dengan Output kegiatan:
 - 1) Pembinaan UMKM pengelolaan jaringan pemasaran produk yang dihasilkan dan jaringan koordinasi kelembagaan antar UMKM.
 - 2) Terlaksananya penyelenggaraan promosi produk UMKM (2 Kali) di Provinsi dan luar provinsi.

- 3) Terlaksananya monitoring dan pembinaan UMKM dan Koperasi.
4. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.** Keluaran (Output) dari kegiatan tersebut adalah:
- 1) Pelaksanaan sosialisasi serta penanaman prinsip-prinsip perkoperasian sehingga koperasi bisa berkembang dan mandiri
 - 2) Terselenggaranya Pendampingan, pembinaan dan monitoring koperasi dan UKM (laporan penilaian kesehatan dan pemeringkatan Koperasi) tahun 2017, updating data KUMKM, pembuatan katalog dan tersedianya dokumen profil koperasi dan UMKM.
- Adapun hasil (*Outcomes*) nya meliputi:
- Meningkatnya tatakelola kelembagaan *koperasi aktif*, target capaian kinerja sebesar 101 unit dan terealisasi sebanyak 105 unit atau 103,96%.

b. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

Tabel 2.158. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

No.	Indikator	Target	Realisasi Capaian 2017	%
1	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	101	105	103,96
2	Jumlah Pelaku UMKM	1.559	1.332	85,44

Capaian indikator kinerja untuk jumlah pelaku UMKM hanya 85,44% atau 1.332 UMKM, Tidak tercapainya realisasi yang target ini disebabkan karena tidak terlaksanakannya berbagai diklat dan pelatihan bagi masyarakat calon wirausaha baru oleh aparat yang membidangnya seperti diklat dan pelatihan perbengkelan, konveksi, pangan jajan, pangan kuliner, dll.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang masih dihadapi sekaligus menjadi tantangan ke depan yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Profesionalisme dan kemampuan teknis aparat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terpadu terhadap ekonomi rakyat yang masih harus terus ditingkatkan. Karena secara umum kelembagaan KUKM di Kota Bima terus berkembang namun belum didukung dengan pola pemberdayaan untuk meningkatkan daya kompetitif KUKM guna

meningkatkan minat para investor untuk menanamkan modalnya pada usaha KUKM.

2. Fungsi dan kewajiban dari lembaga koperasi belum berjalan dengan optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada anggota/masyarakat, begitu pula sebaliknya peran serta anggota/masyarakat dalam mengembangkan koperasi masih perlu ditingkatkan.

Solusi

Untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan tersebut maka diperlukan upaya-upaya pemecahan sebagai berikut :

1. Pemerintah bersama Lembaga penggerak pertumbuhan ekonomi di sektor KUMKM perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya peranan KUMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian kerakyatan yang berpihak pada usaha keci dan Usaha menengah; membuka akses pemasaran produk KUMKM sehingga seluruh KUMKM yang mempunyai potensi namun tidak memiliki jaringan pasar yang luas dapat memperoleh akses dengan usaha dagang/ industry.
2. Solusi atas permasalahan koperasi tersebut adalah memberikan informasi yang jelas dan gencar kepada masyarakat mengenai Program KUMKM yang dilakukan pemerintah sehingga masyarakat dapat membantu pengembangan dan pertumbuhan ekonomi bagi koperasi serta usaha kecil dan Menengah. Dan mengoptimalkan pelatihan manajerial dan kewirausahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan bagi pengelola KUMKM dengan.

10. Penanaman Modal

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima mendukung **Misi ke-3** dan **ke-4** RPJMD 2013-2018 yaitu Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintah yang prima, dengan sasaran *Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima* serta Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan

stabilitas sosial politik, dengan sasaran sasaran *Meningkatnya pertumbuhan ekonomi*. Pencapaian indikator daerah pada Misi ketiga terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kota Bima yaitu Rata-rata Lama Proses Lama Perijinan, sedangkan pada Misi Keempat yaitu Jumlah kerjasama penanaman modal dalam negeri.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima menyelenggarakan sejumlah operasionalisasi kebijakan urusan Penanaman Modal, melalui 5 program dan 10 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.350.231.000.

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.159. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	564.241.000	532.723.533	94,41
	- Penyediaan Jasa Surat-menyurat	59.400.000	57.225.000	96,34
	- Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37.200.000	30.930.475	83,15
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	4.500.000	4.294.000	95,42
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	41.508.000	41.508.000	100,00
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.915.000	7.915.000	100,00
	- Penyediaan alat tulis kantor	35.397.000	35.397.000	100,00
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49.251.000	46.901.000	95,23
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.575.000	8.575.000	100,00
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.760.000	3.810.000	66,15
	- Penyediaan Makan dan Minuman	9.900.000	5.995.000	60,56
	- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	221.315.000	219.788.058	99,31

No	Nama Program/ Kegiatan	Angaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	83.520.000	70.385.000	84,27
2.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	133.661.000	133.160.847	99,63
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7.750.000	7.750.000	100,00
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	74.380.000	74.380.000	100,00
	- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	21.205.700	21.205.700	100,00
	- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	21.925.300	21.469.147	97,92
	- Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	2.000.000	2.000.000	100,00
	- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	6.400.000	6.356.000	99,31
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	0	0	0
	- Pengadaan Pakaian PDH	0	0	0
	- Pengadaan Pakaian olah raga	0	0	0
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	53.250.000	48.750.000	91,55
	- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	9.000.000	4.500.000	50,00
	- Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000	3.000.000	100,00
	- Penyusunan RENJA Tahunan, RKA-DPA/PRKA-DPPA	26.250.000	26.250.000	100,00
	- Penyusunan LAKIP dan LPPD	15.000.000	15.000.000	100,00
5.	Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi	33.300.000	28.050.000	84,23
	- Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	33.300.000	28.050.000	84,23
6.	Program Pembuatan Aplikasi Perijinan Online	0	0	0
	- Pembuatan Aplikasi Perijinan Online	0	0	0
7.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	172.790.000	167.130.000	96,72
	- Pengembangan Potensi Daerah	72.695.000	72.695.000	100,00

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	- Publikasi peraturan perundang-undangan	59.510.000	59.510.000	100,00
	- Penyusunan pedoman peningkatan sistem dan prosedur pelayanan perijinan	40.585.000	34.925.000	86,05
8.	Program Rencana Umum Penanaman Modal	112.080.000	111.037.592	99,07
	- Penyusunan rencana Umum Penanaman Modal Kota Bima	112.080.000	111.037.592	99,07
9.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	280.909.000	255.508.500	90,96
	- Penyediaan informasi/database perijinan	46.250.000	45.250.000	97,84
	- Monitoring dan evaluasi kegiatan pendataan perijinan	156.894.000	132.639.000	84,54
	- Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan satu Pintu	49.500.000	49.354.500	99,71
	- Pelayanan Proses penertiban dokumen perizinan usaha	28.265.000	28.265.000	100,00
	Total	1.350.231.000	1.277.360.472	94,60

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Target dan Realisasi anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2017 sebesar Rp. 1.350.230.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.277.360.472 atau mencapai 94,60 %. Dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi*, meliputi kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi Pemerintahan dan Dunia Usaha yang memiliki Alokasi anggaran sebesar Rp. 33.300.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.050.000,- atau mencapai 84, 23 % dengan output terlaksananya peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha

2. *program Pembuatan Aplikasi Perizinan Online*

Output dari kegiatan ini diharapkan layanan aplikasi transportasi online bisa bersaing secara sehat dengan angkutan umum konvensional. Layanan aplikasi online tidak bisa dihindari pada era digital seperti saat ini. Untuk itu harus dicari jalan tengah agar bisa menguntungkan segala pihak.

3. *Program Penataan Peraturan Perundang-undangan meliputi kegiatan :*
 - a. Pengembangan potensi daerah dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 72.695.000 dengan realisasi keuangan Rp. 72.695.000 atau mencapai target 100 %. Output kegiatan berupa terlaksananya sosialisasi pengembangan potensi daerah.
 - b. Publikasi peraturan perundang undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.510.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.510.000 atau mencapai 100%. Output kegiatan terlaksananya sosialisasi publikasi perundang-undangan.
 - c. Penyusunan pedoman peningkatan sistem dan prosedur pelayanan perizinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.585.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.925.000,- atau mencapai 86,05 %. Output kegiatan, terlaksananya kegiatan penyusunan pedoman peningkatan sistem dan prosedur pelayanan perizinan.
4. *Program Penyusunan Rencana Umum penanaman modal* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 112.080.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.037.592 atau mencapai 99,07 %. Output kegiatan ini yaitu tersusunya rencana umum Penanaman modal Kota Bima.
5. *Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan*, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 280.909.000 yang dibagi menjadi 4 kegiatan meliputi:
 - a. *Penyediaan informasi/Data Base perizinan*. Alokasi anggaran sebesar Rp. 46.250.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.250.000 atau mencapai 97,84%. Output kegiatan ini yaitu tersedianya informasi dan database perizinan.
 - b. *Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pendataan perizinan*. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 156.894.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 132.639.000 atau mencapai 84,54% dari anggaran yang tersedia. Output kegiatan ini yaitu monitoring dan evaluasi tentang database perizinan yang dilakukan setiap bulannya.
 - c. *Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan*, alokasi anggaran sebesar Rp. 49.500.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.354.500 atau mencapai 99,71% dari anggaran yang tersedia. Output kegiatan ini yaitu penyelenggaraan Pelayanan perizinan satu pintu.
 - d. *Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan usaha*, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.265.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.265.000 atau

mencapai 100% sesuai dengan target. Output kegiatan ini yaitu tertib dokumen perizinan usaha.

b. Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima tahun 2017 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.160. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN	Rp. 158.168.020	Rp. 793.655.000	501,78
Jumlah Investor PMDN	751 Investor	813 Investor	108.12
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Baik (62,51-81.25)	81.25	100.00

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu Kota Bima, tahun 2017

c. Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dalam pencapaian kinerja tahun 2017, antara lain:

1. Alur pelayanan perizinan belum murni satu pintu (PTSP) dan masih dilaksanakan secara manual (belum online).
2. Berdasarkan data IKM pada tahun 2017 terdapat unsur pelayanan yang memiliki nilai indikator yang masih sangat rendah. Unsur pelayanan yang dimaksud adalah persyaratan dengan nilai indikator sebesar 71,83. Hal ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan masih terdapat persyaratan perizinan yang dirasakan oleh masyarakat/pemohon yang cukup memberatkan dan menghambat proses permohonan perizinan sehingga perlu dilakukan pembenahan terhadap unsur persyaratan yang dimaksud dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat/pemohon dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dalam pencapaian kinerja tahun 2017, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh DMPPTSP antara lain:

1. Segera dibentuk Satgas Percepatan Kesempatan Berusaha serta kesiapan server dan tenaga operator (admin) harus segera dipenuhi.

2. Dengan melakukan penyederhanaan persyaratan baik yang bersifat administrasi maupun teknis sehingga akan memberikan kemudahan kepada masyarakat/pemohon dalam memenuhi semua persyaratan permohonan dokumen perizinan termasuk penyederhanaan SOP perizinan agar semua bentuk pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi perizinan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11, Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **982,327,500.00** dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **758,443,558.00** atau sebesar 77.21 % yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2017 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.161. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	Persentase Realisasi
I	Program peningkatan peran serta kepemudaan	595,525,000.00	581,868,558.00	97.71
1.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	595,525,000.00	581,868,558.00	97.71
II	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	346,802,500.00	137,615,000.00	39.68
1.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	118,270,000.00	0.00	0.00
2.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	228,532,500.00	137,615,000.00	60.22
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	40,000,000.00	38,960,000.00	97.40
	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga	40,000,000.00	38,960,000.00	97.40
Total		982,327,500.00	758,443,558.00	77.21

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

1) *Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan*

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dengan pelaksanaan pelatihan bagi 180 orang anggota paskibraka. Adapun hasil (*outcome*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terbentuknya jiwa kepemimpinan pada generasi muda.

2) *Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga*

Pada program ini ada satu kegiatan yang tidak dilaksanakan karena sudah dilaksanakan oleh KONI Kota Bima.

3) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga*

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terselenggaranya Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Bima.

b. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur salah satunya dengan terselenggaranya beberapa kompetisi olahraga di Kota Bima,.

12. Statistik

Urusan Statistik pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.777.845.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.598.210.200 atau sebesar 89,90 %. yang dilaksanakan oleh Dinas Statistik Kota Bima.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.162. Output Program/Kegiatan Urusan Statistik pada Dinas Statistik Kota Bima Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	% Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	370,832,800.00	335,472,100.00	90.5
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	7,990,000.00	5,200,000.00	65.1
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19,800,000.00	12,186,200.00	61.5
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3,660,000.00	683,000.00	18.7
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	38,400,000.00	38,400,000.00	100.0
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1,500,000.00	0.00	0.0

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi
6.	Penyediaan alat tulis kantor	41,765,800.00	41,749,000.00	100.0
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28,712,000.00	28,712,000.00	100.0
8.	Penyediaan makanan dan minuman	12,600,000.00	9,900,000.00	78.6
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200,005,000.00	183,326,900.00	91.7
10.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	16,400,000.00	15,315,000.00	93.4
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	338,675,800.00	322,397,300.00	95.2
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10,526,000.00	10,515,000.00	99.9
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	258,249,800.00	256,799,800.00	99.4
3.	Pengadaan mebeleur	17,700,000.00	17,700,000.00	100.0
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000.00	9,750,000.00	97.5
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	42,200,000.00	27,632,500.00	65.5
III	Program Peningkatan disiplin aparatur	20,800,000.00	20,800,000.00	100.0
1.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	20,800,000.00	20,800,000.00	100.0
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	140,000,000.00	139,250,000.00	99.5
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15,000,000.00	14,250,000.00	95.0
3.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
4.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
5.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	80,000,000.00	80,000,000.00	100.0
V	Program Pengembangan Statistik Daerah	456,611,400.00	413,716,000.00	90.6
1.	Penyusunan data statistik kependudukan	38,400,000.00	37,955,000.00	98.8
2.	penyusunan data statistik kesejahteraan sosial	44,595,000.00	44,485,000.00	99.8
3.	Penyusunan data statistik ekonomi	79,296,000.00	77,565,000.00	97.8
4.	Penyusunan data statistik infrastruktur	38,195,000.00	37,915,000.00	99.3
5.	Penyusunan data tabel input-output (I-O)	84,250,000.00	81,130,000.00	96.3
6.	Penyusunan Peta PBDT Berbasis SIG	142,760,000.00	106,240,000.00	74.4
7.	Workshop Statistik Sektoral	15,846,400.00	15,157,000.00	95.6
8.	Bimtek Pengembangan Data Statistik Sektoral	13,269,000.00	13,269,000.00	100.0
9.	Pelatihan Petugas Lapangan Kegiatan Statistik Sektoral	0.00	0:00	

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi
VI	Program Pengembangan Data / Informasi	274,990,000.00	198,215,000.00	72.1
1.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	29,325,000.00	29,325,000.00	100.0
2.	Penyusunan Profil Daerah	31,160,000.00	30,285,000.00	97.2
3.	Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	73,750,000.00	48,750,000.00	66.1
4.	Pembaharuan (Updating) Data Capaian Kinerja RPJMD	59,130,000.00	55,605,000.00	94.0
5.	Pembuatan Website	24,950,000.00	24,950,000.00	100.0
6.	Pembaharuan (Updating) Data Kemiskinan	46,675,000.00	0.00	0.0
7.	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	10,000,000.00	9,300,000.00	93.0
TOTAL		1,601,910,000.00	1,429,850,400.00	89.3

b. Capaian Kinerja

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2017 semuanya telah direalisasikan dengan kategori **berhasil** dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 86,94%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Kinerja Keuangan) sebesar 93,82 %.

Rata-rata capaian sasaran strategis I adalah sebesar 81,25% yang terukur melalui 2 (dua) indikator kinerja. Capaian sasaran strategis II yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 98,33%

Rata-rata capaian sasaran strategis I, dan II, terhadap target jangka menengah Dinas Statistik Daerah Kota Bima masing-masing sebesar 162,5%, indikator kedua sasaran I belum bisa diukur, dan 98,33% indikator kinerja Sasaran strategis II. Sehingga rata-rata capaian kinerja tahun 2017 terhadap target jangka menengah Dinas Statistik Daerah Kota Bima adalah sebesar 86,94%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian target terhadap indikator kinerja Dinas Statistik Daerah Kota Bima Tahun 2017 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan.

Beberapa permasalahan dan alternatif solusinya:

1. Masih terbatasnya data statistik sektoral yang terinci dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan;

solusi : Intensitas koordinasi dengan setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk menyediakan data Sektoral.

2. Masih rendahnya kesadaran responden akan pentingnya memberikan informasi yang akurat yang dapat menyebabkan belum optimalnya kualitas data yang dihasilkan.

Solusi : membangun kesadaran responden melalui kegiatan- kegiatan bintek, workshop, dan diskusi, koordinasi dengan pihak –pihak Stakeholder yang ada di Kota Bima.

3. Belum dapat terpenuhinya kebutuhan data dan informasi statistik hingga ke wilayah terkecil, termasuk data mikro.

Solusi: pelatihan tenaga teknis (Operator) data pada setiap OPD.

4. Belum optimalnya kapasitas ASN khususnya dalam pengelolaan system akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang juga menjadi bagian penting dalam kinerja teknis Dinas Statistik Daerah

Solusi: pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan statistik sektoral Aparatur Sipil Negara (ASN)

5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung serta belum adanya tenaga fungsional statistik.

Solusi : Dinas Statistik Daerah harus memiliki ASN tenaga Fungsional statistik

13. Pemberdayaan Masyarakat

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa juga dilaksanakan oleh Kecamatan RasanaE Timur, Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba

Tabel 2.163. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desapada Kantor Kecamatan Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
A.	KECAMATAN RASANA E TIMUR	283.530.000,00	281.941.000,00	99,44
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	283.530.000,00	281.941.000,00	99,44
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	250.200.000,00	248.625.000,00	99,37
2	Penyusunan Profil Kelurahan	33.330.000,00	33.316.000,00	99,96

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
	KECAMATAN ASAKOTA	765.207.900,00	762.202.000,00	99,61
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	350.243.400,00	350.243.400,00	100,00
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	330.300.000,00	330.300.000,00	100,00
2	Penyusunan Profil Kelurahan	19.943.400,00	19.943.400,00	100,00
II	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	414.964.500,00	411.958.600,00	99,28
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	59.317.300,00	59.036.000,00	99,53
2	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	66.897.200,00	66.897.200,00	100,00
3	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00
4	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	68.750.000,00	66.025.400,00	96,04
	KECAMATAN MPUNDA	402.181.500,00	400.181.500,00	99,50
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	402.181.500,00	400.181.500,00	99,50
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	351.300.000,00	349.300.000,00	99,43
2	Penyusunan Profil Kelurahan	50.881.500,00	50.881.500,00	100,00
	KECAMATAN RABA	1.273.156.500,00	1.273.156.500,00	100,00
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	443.666.000,00	443.666.000,00	100,00
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	396.900.000,00	396.900.000,00	100,00
2	Penyusunan Profil Kelurahan	46.766.000,00	46.766.000,00	100,00
II	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	829.490.500,00	829.490.500,00	100,00
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	127.596.500,00	127.596.500,00	100,00
2	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	139.702.000,00	139.702.000,00	100,00
3	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ	430.000.000,00	430.000.000,00	100,00
4	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	132.192.000,00	132.192.000,00	100,00
JUMLAH		2.724.075.900,00	2.717.481.000,00	99,76

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kecamatan dalam melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah sebesar Rp. 2.724.075.900,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.717.481.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah). Masing-masing anggaran tersebut tersebar pada Kecamatan RasanaE Timur dengan pagu sebesar Rp. 283.530.000,00 dan realisasi Rp. 281.941.000,00 atau 99,44%, Kecamatan Asakota pagu sebesar Rp. 765.207.900,00 realisasi Rp. 762.202.000,00 atau 99,61%, Kecamatan Mpunda pagu Rp. 402.181.500,00 dengan Rp. 400.181.500,00 atau 99,50% dan Kecamatan Raba dengan pagu sebesar Rp. 1.273.156.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.273.156.500,00 atau 100%.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan meliputi :

- a. **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** dengan kegiatan :
 - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. Output dari kegiatan ini adalah optimalisasi tugas dan fungsi RT, RW dan LPM di tingkat kelurahan
 - Penyusunan Profil Kelurahan. . Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya profil kelurahan di tingkat kelurahan
- b. **Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**
 - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
 - Pelaksanaan Lomba Kelurahan Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
 - Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya lomba STQ/MQ di tingkat kelurahan dan kecamatan.
 - Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga. . Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan PKK di tingkat kelurahan dan kecamatan.

13. Kebudayaan

a. Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan pada tahun anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 228.110.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 228.110.000,00 atau sebesar 100%. melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.164. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
		(Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi
I	Program Pengembangan Nilai Budaya	171.220.000,00	171.220.000,00	100
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	137.340.000,00	137.340.000,00	100
2	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	8.880.000,00	8.880.000,00	100
3	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	25.000.000,00	25.000.000,00	100
II	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	26.020.000,00	26.020.000,00	100
1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	12.340.000,00	12.340.000,00	100
2	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	13.680.000,00	13.680.000,00	100
III	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	30.870.000,00	30.870.000,00	100
1	Penyusunan system informasi database bidang kebudayaan	30.870.000,00	30.870.000,00	100
	Jumlah	228.110.000,00	228.110.000,00	100

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2016 (data sebelum audit BPK)

Capaian Kinerja

Pesatnya pembangunan di segala bidang kehidupan membawa pengaruh terhadap budaya dan perilaku masyarakat. Gaya hidup modern dengan meniru budaya asing yang sedang trend menjadi ikon baru dalam kehidupan masyarakat khususnya kalangan remaja. Kebudayaan lokal yang sarat makna filosofi dan historis menjadi semakin tertinggalkan bahkan

dilupakan. Menanggapi situasi tersebut maka pelestarian dan pengembangan nilai budaya daerah harus terus menerus dilakukan agar generasi muda kita tidak lupa akan budaya dan sejarah bangsa sendiri.

Dalam upaya untuk melestarikan dan pengembangan nilai budaya daerah telah pelaksanaan event-event lomba / kesenian.

Benda-benda cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya daerah senantiasa diupayakan untuk dipelihara, dirawat dan diinventarisasi serta mendokumentasikan keberadaannya. Hal ini penting untuk dilakukan agar jangan sampai generasi mendatang belajar budaya dan sejarah daerah sendiri ke luar negeri karena semua bukti sejarah dan dokumentasinya telah berpindah tangan ke pihak asing.

Permasalahan dan solusi

Beberapa permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan urusan kebudayaan antar lain :

- Pemahaman nilai – nilai budaya tradisional local dan pelestariannya beserta makna yang tersirat di dalamnya masih rendah oleh generasi muda.
- Belum adanya keterlibatan semua pihak dalam upaya pelestarian nilai dan keaneka ragaman terhadap warisan budaya.
- Belum berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya daerah.
- Kekayaan budaya belum terkelola dengan baik yang ditandai dengan kondisi bangunan yang rusak.

Adapun langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan budaya daerah adalah :

- Perlu adanya pemahaman yang nyata dari generasi muda untuk tetap melestarikan budaya tradisonal yang merupakan warisan budaya ditengah arus derasnya budaya asing yang masuk dalam kehidupan sekarang ini.
- Perlu adanya pengenalan budaya daerah melalui pendidikan formal pada materi muatan local pengenalan budaya.
- Keterlibatan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pelestarian nilai dan keanekaragaman terhadap nilai – nilai budaya.

- Pemberdayaan asset budaya lokal untuk memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
- Identifikasi, dokumentasi dan inventarisasi benda cagar budaya perlu dilakukan agar kelestariannya bisa terpelihara.

14, Perpustakaan

Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dengan anggaran yang disediakan Rp. 990.626.500,00 dan realisasi Rp. 971.873.153,00 (98,11%).

Tabel 2.165. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	658.813.500,00	645.403.253,00	97,96
1	Penyediaan jasa surat menyurat	83.625.000,00	83.625.000,00	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000,00	7.532.566,00	41,85
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.000.000,00	10.461.000,00	80,47
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	32.400.000,00	32.400.000,00	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.642.000,00	4.641.700,00	99,99
6	Penyediaan alat tulis kantor	25.243.500,00	25.243.500,00	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.182.200,00	13.182.200,00	100
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.275.000,00	3.275.000,00	100
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52.460.000,00	52.110.000,00	99,33
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.300.000,00	16.300.000,00	100
11	Penyediaan makanan dan minuman	15.300.000,00	15.300.000,00	100
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	278.188.300,00	278.188.287,00	100
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	103.197.500,00	103.144.000,00	99,95
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95.485.000,00	95.485.000,00	100
1	Pengadaan mebeleur	43.500.000,00	43.500.000,00	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13.985.000,00	13.985.000,00	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	24.000.000,00	24.000.000,00	100

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	dinas/operasional			
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	100
III	Program peningkatan disiplin aparatur	21.000.000,00	21.000.000,00	100
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	21.000.000,00	21.000.000,00	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	37.306.000,00	31.962.900,00	85,68
1	Pendidikan dan pelatihan format	37.306.000,00	31.962.900,00	85,68
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	91.716.000,00	91.716.000,00	100
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	18.000.000,00	18.000.000,00	100
2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	13.000.000,00	13.000.000,00	100
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	19.750.000,00	19.750.000,00	100
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	22.750.000,00	22.750.000,00	100
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	18.216.000,00	18.216.000,00	100
VI	Penyelamatan dan Pelestaria Dokumen/Arsip Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	100
1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan Arsip	21.000.000,00	21.000.000,00	100
VII	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	34.096.000,00	34.096.000,00	100
1	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	34.096.000,00	34.096.000,00	100
VIII	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	31.210.000,00	31.210.000,00	100
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	31.210.000,00	31.210.000,00	100
JUMLAH		990.626.500,00	971.873.153,00	98,11

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Seperti yang tergambar pada tabel tersebut diatas bahwa selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang masuk dalam Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan adalah :

- 1) **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah** dengan kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dengan output tersedianya rak/lemari penyimpan arsip sebanyak 2 unit dan 1 unit komputer jaringan.

- 2) **Program peningkatan kualitas pelayanan informasi** dengan kegiatan yang dilaksanakan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta. Dari kegiatan ini telah dilaksanakan sosialisasi/bimtek kearsipan bagi SKPD lingkup Pemerintah Kota Bima sebanyak 2 (dua) kali dengan peserta masing-masing 50 orang.
- 3) **Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipandengan** kegiatan yang dilaksanakan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip. Dari kegiatan ini output nya adalah Jumlah SKPD yang sudah menerapkan pengolahan arsip secara baku sejumlah 15 SKPD

Capaian Kinerja kinerja wajib bukan pelayanan dasar bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.166. Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Persentase
		Target	Realisasi	
a.	jumlah koleksi bahan pustaka	550 Judul	802 Judul	145,82%
b.	Jumlah pengunjung perpustakaan	3000 Pengunjung	4124 Pengunjung	137,47%
c.	Jumlah anggota perpustakaan pertahun	300 Anggota	346 Anggota	115,33%
d.	Jumlah perpustakaan binaan	73 Perpustakaan	73 Perpustakaan	100%
e.	Indeks kepuasan pengunjung	95 %	87 %	91,58%
f.	% kelengkapan sarana dan prasarana	100 %	90%	90,00%
g.	% kelurahan pinggiran yang masyarakatnya dapat mengakses perpustakaan	50 %	31,58 %	63,16%
h.	% perpustakaan yang dibina memiliki SDM pengelola yang tetap	100 %	35 %	35%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima TA 2017

15. Kearsipan

Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dengan anggaran yang disediakan Rp. 748.000.000,00 dan realisasi Rp. 760.916.095,00 (97,72%).

Tabel 2.167. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kearsipan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	406.496.000,00	401.494.000,00	98,77
1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	98.998.000,00	98.998.000,00	100
2	Pengembangan minat dan budaya baca	26.498.000,00	25.548.000,00	96,41
3	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	7.035.000,00	7.035.000,00	100
4	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	50.890.000,00	47.158.000,00	92,67
5	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	119.875.000,00	119.755.000,00	99,9
6	Digitalisasi e-pustaka	103.200.000,00	103.000.000,00	99,81
II	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	40.000.000,00	35.000.000,00	87,5
1	Penyusunan Perda Kearsipan	40.000.000,00	35.000.000,00	87,5
JUMLAH		446.496.000,00	436.494.000,00	97,76

Seperti yang tergambar pada tabel tersebut diatas bahwa selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang masuk dalam Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan adalah :

- 1) **Program perbaikan sistem administrasi kearsipan** dengan kegiatan yang dilaksanakan Penyusunan Perda kearsipan. Dari kegiatan ini output nya adalah 1 Peraturan Daerah tentang kearsipan.
- 2) **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan** dengan kegiatan yang dilaksanakan :
 - Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar. Hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakannya lomba menggambar/mewarnai Tingkat Kota Bima, lomba bercerita Tingkat Kota Bima dan Provinsi NTB dan Lomba Duta Baca Tingkat Kota Bima.

- Pengembangan minat dan budaya baca. Output Kegiatan ini adalah Jumlah anggota perpustakaan sebanyak 300 orang.
- Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. Dari kegiatan ini telah dilaksanakan Pembinaan pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. Out put kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan yang mengelola perpustakaan secara baik sesuai standar yaitu sebanyak 73 perpustakaan
- Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca. Dari kegiatan ini telah dilaksanakan sosialisai minat dan budaya baca dengan peserta sebanyak 75 orang.
- Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah. Out put kegiatan ini adalah tersedianya bahan pustaka perpustakaan daerah yaitu sebanyak 500 judul buku
- Digitalisasi e-pustaka Out put kegiatan ini adalah tersedianya perangkat jaringan untuk digitalisasi e-pustaka.

Capaian Kinerja kinerja wajib bukan pelayanan dasar bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.168. Capaian Kinerja Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Persentase
		Target	Realisasi	
a.	% SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip secara baku	10 %	17,05 %	170,50
b.	Jumlah SKPD yang mengirim kan arsip	5%	8,56%	171,20
c.	Jumlah tenaga pengelola kearsipan yang kompeten	2%	11,43%	571,50
d.	Jumlah SKPD yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai	5%	2,86%	57,20

C, Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Kelautan Dan Perikanan

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bima menyelenggarakan sejumlah operasionalisasi kebijakan

urusan Kelautan dan Perikanan, melalui 6 program dan 15 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.143.891.000.

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Urusan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bima disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.169. Program/ Kegiatan Urusan Perikanan dan Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun Anggaran 2017

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	411.560.350	395.049.932	95,99
	- Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.440.000	105.650	7,34
	- Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37.555.450	27.729.912	73,84
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	17.590.000	13.284.200	75,52
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	44.400.000	43.750.000	98,54
	- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	9.000.000	9.000.000	100
	- Penyediaan alat tulis kantor	31.210.900	31.210.800	99,99
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.150.000	18.150.000	100
	- Penyediaan Makan dan Minuman	22.737.000	22.724.000	99,94
	- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	208.477.000	208.130.370	99,83
	- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	21.000.000	20.965.000	99,83
2.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	222.599.850	221.958.121	99,71
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	36.211.300	35.942.854	99,26
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.796.000	10.426.000	96,57
	- Pengadaan Peralayan Gedung Kantor	67.398.550	67.398.550	100,00
	- Pengadaan Mebeleur	18.894.000	18.894.000	100,00
	- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	8.000.000	8.000.000	100,00
	- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	81.300.000	81.296.717	100,00
3.	Program Peningkatan Disiplin aparatur	23.530.000	23.530.000	100,00

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	23.530.000	23.530.000	100,00
4.	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.079.400	15.079.400	100,00
	- Sosialisasi peraturan perundang-undangan	15.079.400	15.079.400	100,00
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	141.500.000	141.500.000	100,00
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	100
	- Penyusunan laporan keuangan semesteran	15.000.000	15.000.000	100
	- Penyusunan prognosis realisasi anggaran	15.000.000	15.000.000	100
	- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	12.500.000	12.500.000	100
	- Penyusunan RENJA Tahunan RKA/ DPA-SKPD	50.000.000	50.000.000	100
	- Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD	39.000.000	39.000.000	100
6.	Program Pemberdayaan masyarakat pesisir	30.000.000	29.622.750	98,74
	- Pengembangan lanjutan pendampingan PNPM MKP	30.000.000	29.622.750	98,74
7	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan wawasan Maritim Kepada Masyarakat	21.121.900	20.496.900	97,04
	- Koordinasi Hari Nusantara	21.121.900	20.496.900	97,04
8.	Program Pengembangan budidaya perikanan	661.267.000	659.812.890	99,78
	- Pengembangan Bibit ikan unggul	183.492.000	183.040.000	99,75
	- Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	21.150.000	21.100.000	99,76
	- Peng. Sarana pengembangan kebun rumput laut	10.350.000	10.074.000	97,33
	- Pembangunan/Rehab sarana Prasarana Fisik UPR & HSRT	34.800.000	34.800.000	100,00

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	- Pengadaan Sarana Prasarana penunjang perikanan Budidaya	411.475.000	410.798.890	99,84
9.	Program Pengembangan perikanan tangkap	1.244.665.000	1.241.165.300	99,72
	- Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	28.044.000	28.014.000	99,89
	- Pengembangan Lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	20.390.000	20.260.000	99,36
	- Pengadaan sarana prasarana pendukung perikanan tangkap	1.196,231.000	1.192.891.300	99,72
10.	Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan	112.398.000	106.770.295	94,99
	- Pendataan Potensi Perikanan (Statistik)	47.200.000	46.732.295	99,01
	- Kontak Tani Nelayan	65.198.000	60.038.000	92,09
11.	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	260.169.500	258.543.042	99,37
	- Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	14.950.000	14.940.000	99,93
	- Penyediaan Sarana Prasarana Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	131.800.000	131.458.800	99,74
	- Penyelenggaraan Kegiatan Forum Konsumsi Ikan (FORIKAN)	113.419.500	112.144.242	98,88
	Total	3.143.891.000	3.113.528.630	99,03

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Target dan Realisasi anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tahun 2017 sebesar Rp. 3.143.891.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.113.528.630,- atau mencapai 99,03%. Dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Melalui kegiatan Pengembangan Lanjutan Pendampingan PNPM MKP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000 terealisasi sebesar Rp. 29.622.750 atau 98,74 % dari alokasi anggaran yang telah disediakan.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah pengembangan lanjutan PNPM MKP sebanyak 20 Kelompok .

- 2) **Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat.** Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.121.900,- terealisasi sebesar Rp. 20.496.900,- atau mencapai 97.04% dari alokasi yang telah disediakan.

Output kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran aparatur dan masyarakat tentang wawasan maritim dan kelautan dengan terselenggaranya kegiatan hari nusantara .

- 3) **Program Pengembangan budidaya perikanan.**

Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 661.267.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 659.812.890 atau mencapai 99,78% dari alokasi anggaran yang telah disediakan. Adapun program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

- Pengembangan Bibit ikan unggul memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 183.492.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 183.040.000 atau mencapai 99,75 dari jumlah alokasi anggaran yang telah disediakan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah bibit ikan unggul yang tersedia;
- Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 21.150.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.100.000 atau mencapai 99,76% dari alokasi anggaran yang tersedia. Adapun output dari kegiatan ini terbinanya 7 Kelompok tani ikan, sehingga terwujudnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan kelompok pembudidayaan ikan;
- Pengadaan Sarana Pengembangan Kebun Rumput Laut metode long Line dan rakit apung memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 10.350.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.074.000 atau mencapai 97,33% dari alokasi anggaran yang telah tersedia. Output dari kegiatan ini jumlah rumput laut yang telah dikembangkan sebanyak 2 Kwintal.
- Kegiatan Pengadaan sarana prasarana penunjang perikanan budidaya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 411.475.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 410.798.890 atau 99,84% dari alokasi anggaran yang telah tersedia. Output dari kegiatan ini tersedianya sarana dan prasarana penunjang perikanan budidaya sebanyak 17 Unit.

4) ***Program Pengembangan Perikanan Tangkap .***

Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. **1.244.665.000** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **1.241.165.300** atau mencapai **99,72%** dari alokasi anggaran yang telah disediakan. Adapun program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

- Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 28.044.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.014.000 atau mencapai 99,89% dari alokasi anggaran yang telah tersedia. Output dari kegiatan ini adalah jumlah nelayan yang mendapatkan kartu asuransi nelayan sebanyak 1.266 orang;
- Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 20.390.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.260.000 atau mencapai 99,36% dari alokasi anggaran yang telah tersedia. Output dari kegiatan ini adalah jumlah lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap yang dikembangkan sebanyak 3 lembaga Koperasi;
- Pengadaan sarana prasarana pendukung perikanan tangkap memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.196,231.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.192.891.300 atau mencapai 99,72% dari alokasi anggaran yang telah tersedia. Output dari kegiatan ini adalah jumlah sarana prasarana perikanan budidaya yang tersedia sebanyak 10 unit.

5) ***Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan***

Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar RP. **112.398.000** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **106.770.295** atau mencapai **94,99%** dari alokasi anggaran yang telah disediakan. Adapun Program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

- Pendataan Potensi Perikanan (Statistik) memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 47.200.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.732.295 atau mencapai 99,01% dari alokasi anggaran yang tersedia. Output kegiatan ini adalah terciptanya data statistik potensi perikanan yang akurat;
- Kontak Tani Nelayan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 65.198.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.038.000 atau mencapai 92,09% dari alokasi anggaran yang tersedia. Output kegiatan ini adalah telah terbentuknya 1 kelompok kontak tani nelayan.

6) **Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**

Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. **260.169.500** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **258.543.042** atau mencapai **99,37%** dari alokasi anggaran yang disediakan. Adapun program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

- Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 14.950.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.940.000 atau mencapai 99,93% dari alokasi anggaran yang tersedia. Output kegiatan ini adalah telah terbentuknya kelompok pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan sebanyak 19 kelompok.
- Penyediaan Sarana Prasarana Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 131.800.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.458.800 atau mencapai 99,74% dari alokasi anggaran yang telah tersedia. Output kegiatan ini adalah pemeliharaan pabrik es dan pemeliharaan *cold storage*.
- Penyelenggaraan Kegiatan Forum Konsumsi Ikan (FORIKAN) memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 113.419.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 112.144.242 atau mencapai 98,88% dari alokasi anggaran yang tersedia. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan lomba cipta menu olahan dari ikan yang diikuti oleh 40 peserta dari masing-masing OPD

b. Pencapaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima tahun 2017 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.170. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Jumlah produksi perikanan :	2.947,03	2.484,27	84,30
a. Produksi perikanan tangkap (ton)	1.995,34	1.774,8	88,95
b. Produksi perikanan budidaya (ton)	951,69	709,47	74,55
Jumlah produk Olahan yang dihasilkan perikanan per tahun (ton)	1.415	1.576,43	111,41
Tingkat Konsumsi Ikan per kapita per tahun (Kg/ kapita/thn)	39,57	38,83	98,13
Cakupan bina kelompok kelautan dan	18	15	83,33

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
perikanan (Klpk):			
a. Kelompok pemula	8	8	100,00
b. Kelompok madya	5	4	80,00
c. Kelompok utama	5	3	60,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

c.. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Belum mampu memenuhi/melayani kebutuhan masyarakat terkendala ketersediaan anggaran.
2. Banyak sarana prasarana terdampak banjir sehingga mempengaruhi produktifitas kelautan dan perikanan.

Adapun solusi yang dapat ditempuh dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Membuat rencana berdasarkan skala prioritas
2. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelompok kelautan dan perikanan baik melalui anggaran yang bersumber dari DAU, DAK dan APBN.

2. Urusan Pariwisata

Anggaran seluruh kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bima tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp8.519.123.483,60 dan terealisasi sebesar Rp8.119.048.629,00 atau sebesar 95,30%. Anggaran ini terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dari target belanja operasi sebesar Rp6.341.411.433,60, Dinas Pariwisata Kota Bima merealisasikan sebesar Rp6.000.730.629,00 atau sebesar 94,63%. Adapun belanja modal, dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.177.712.050,00, direalisasikan sebesar Rp2.118.318.000,00 (97,27%).

Tabel 2.171. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	Persentase Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	592,291,300.00	580,992,725.00	98.1
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	14,400,000.00	14,400,000.00	100.0
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18,600,000.00	17,409,857.00	93.6

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	Persentase Realisasi
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13,750,000.00	13,350,000.00	97.1
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45,132,000.00	45,130,000.00	100.0
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,200,000.00	13,100,000.00	99.2
6.	Penyediaan alat tulis kantor	44,161,135.00	44,100,000.00	99.9
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,314,000.00	30,208,000.00	99.7
8.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	28,015,165.00	27,840,000.00	99.4
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	87,619,000.00	79,678,000.00	90.9
10.	Penyediaan makanan dan minuman	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250,000,000.00	248,681,868.00	99.5
12.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	37,100,000.00	37,095,000.00	100.0
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	714,777,100.00	673,756,602.00	94.3
1.	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	77,080,000.00	47,080,000.00	61.1
2.	Pengadaan mebeleur	68,382,050.00	66,100,000.00	96.7
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000.00	19,940,000.00	99.7
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33,220,000.00	33,209,302.00	100.0
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17,600,000.00	17,490,000.00	99.4
6.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	498,495,050.00	489,937,300.00	98.3
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	51,014,000.00	50,290,800.00	98.6
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	36,214,000.00	36,190,800.00	99.9
2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	14,800,000.00	14,100,000.00	95.3
3.	Konsultasi dan Studi Banding	0.00	0.00	0.00
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	83,673,750.00	83,273,750.00	99.5
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12,053,250.00	12,053,250.00	100.0
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6,173,300.00	6,173,300.00	100.0
3.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6,769,000.00	6,769,000.00	100.0

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	Persentase Realisasi
4.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	43,215,200.00	43,215,200.00	100.0
5.	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	15,463,000.00	15,063,000.00	97.4
V	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1,130,395,100.00	1,124,072,824.00	99.4
1.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	30,810,600.00	30,810,600.00	100.0
2.	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	79,795,000.00	79,530,000.00	99.7
3.	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	15,000,000.00	14,965,000.00	99.8
4.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	291,710,000.00	290,891,024.00	99.7
5.	MICE	215,000,000.00	215,000,000.00	100.0
6.	Partisipasi Pelestarian dan Aktualisasi Atraksi Wisata Budaya	247,116,300.00	245,965,700.00	99.5
7.	Fasilitasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Festival Atraksi Kesenian Tradisional	250,963,200.00	246,910,500.00	98.4
VI	Program pengembangan destinasi pariwisata	2,118,488,000.00	2,071,523,234.00	97.8
1.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	1,000,000,000.00	983,353,000.00	98.3
2.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	11,950,000.00	11,945,000.00	100.0
3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	836,800,000.00	829,955,000.00	99.2
4.	Pendataan dan Perencanaan Site, Destinasi, ODTW dan Kawasan Pariwisata	10,000,000.00	9,975,000.00	99.8
5.	Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	15,600,000.00	15,160,000.00	97.2
6.	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Pemeliharaan dan Pengelolaan Destinasi dan ODTW	55,000,000.00	54,922,923.00	99.9
7.	Pengelolaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	139,138,000.00	116,225,000.00	83.5
8.	MONEV Perencanaan dan Pembanguna Destinasi, ODTW dan Kawasan	50,000,000.00	49,987,311.00	100.0
VII	Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata	95,104,150.00	95,061,800.00	100.0
1.	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	0.00	0.00	0.0

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	Persentase Realisasi
2.	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	0.00	0.00	0.0
3.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	65,889,150.00	65,886,800.00	100.0
4.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha dan Industri Jasa Pariwisata Lembaga dan Mitra Pariwisata	29,215,000.00	29,175,000.00	99.9
VIII	Program Pengembangan SDM Kepariwisataaan	175,384,000.00	175,372,023.00	100.0
1.	Pengembangan SDM Bidang Pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	138,384,000.00	138,381,600.00	100.0
2.	Pengembangan SDM dan BIMTEK Profesionalisme Bidang Pariwisata	37,000,000.00	36,990,423.00	100.0
IX	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata	57,030,800.00	55,245,000.00	96.9
1.	Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata, Lembaga Kepariwisataaan dan rekomendasi Ijin Pemandu Wisata	14,030,800.00	14,021,000.00	99.9
2.	Standarisasi dan Sertifikasi Segala Bentuk Usaha dan Industri Jasa Pariwisata	20,000,000.00	19,875,000.00	99.4
3.	Fasilitasi dan pembentukan Kelompok Masyarakat dan Mitra	23,000,000.00	21,349,000.00	92.8
TOTAL		5,018,158,200.00	4,909,588,758.00	97.8

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam proses pelayanan umum daerah yang masih dihadapi hingga saat ini dan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan Dinas Pariwisata Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana proses pelayanan umum daerah yang lebih baik di masa yang akan datang, maka perlu beberapa langkah tindaklanjut yang dapat diupayakan untuk tahun berikutnya seperti sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan lebih meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antar bidang dalam rangka peningkatan kinerja.
2. Mendorong dan lebih meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pendidikan format maupun pendidikan non format kepariwisataan.
3. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana objek daya tarik wisata secara prioritas.
4. Peningkatan jumlah personil yang profesional dibidang kepariwisataan.
5. Peningkatan kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kepariwisataan.

3. Urusan Pertanian

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Jumlah total anggaran yang dibiayai melalui APBD Kota Bima untuk urusan pertanian adalah Rp. 6.950.748.850,- dengan realisasi anggaran sebesar 6.116.761.341,- atau sebesar 96,39 % yang didukung oleh 12 program dan 53 kegiatan. Dari keseluruhan anggaran tersebut, terbagi atas anggaran yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Bima.

1. Dinas Pertanian Kota Bima

Urusan pilihan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.172. Penyerapan anggaran per program dan kegiatan tahun 2017

NO.	URAIAN BELANJA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	APBD KOTA BIMA	13.296.327.643,56	12.732.010.168,00	95,76
	BELANJA DAERAH	13.296.327.643,56	12.732.010.168,00	95,76
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.345.578.793,56	6.116.761.341,00	96,39
	BELANJA PEGAWAI	6.345.578.793,56	6.116.761.341,00	96,39
II	BELANJA LANGSUNG	6.950.748.850	6.615.248.827	95,17
	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.433.559.850	5.099.415.827	93,85
	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	1.517.189.000	1.515.833.000	99,91
A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	801.460.100	659.640.000	82,30
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	79.400.000	45.766.698	57,64
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	12.950.000	7.016.600	54,18
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	64.272.000	64.272.000	100,00
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31.200.000	28.800.000	92,31

NO.	URAIAN BELANJA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.800.000	6.300.000	71,59
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.400.000	96.248.600	95,87
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.447.000	44.943.700	96,76
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.426.400	3.334.550	97,32
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.200.000	12.200.000	100,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.440.000	3.720.000	83,78
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.987.500	14.987.500	100,00
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	386.637.200	295.750.352	76,49
15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	35.100.000	35.100.000	100,00
B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	705.055.850	665.730.150	94,42
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	182.500.000	169.455.000	92,85
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	74.405.600	68.129.500	91,57
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	140.308.250	140.087.250	99,84
4	Pengadaan Mebeleur	62.450.000	54.670.000	87,54
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50.392.000	39.818.400	79,02
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	195.000.000	193.570.000	99,27
C.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	73.515.000	72.710.000	98,90
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	73.515.000	72.710.000	98,90
D.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	45.615.000	31.538.000	69,14
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000	5.928.000	29,64
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	20.815.000	20.810.000	99,98
3	Pelaksanaan Penilaian AKJG	4.800.000	4.800.000	100,00
E.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	117.700.000	117.425.000	99,77
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.700.000	36.425.000	99,25
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	8.000.000	8.000.000	100,00
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.000.000	8.000.000	100,00
4	Penyusunan Rencana Kerja/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	100,00
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	25.000.000	25.000.000	100,00
F.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	532.621.700	509.367.700	95,63
1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	36.192.900	36.132.900	99,83
2	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	134.920.000	117.126.000	86,81
3	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	7.365.000	7.365.000	100,00
4	Pelaksanaan PEDANA PENAS dan Kontak Tani Andalan	278.798.800	278.798.800	100,00
5	Pelaksanaan Lomba Kelompok Tani, Petani, Kelompok PUAP dan Pekarangan	75.345.000	69.945.000	92,83
G.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN	3.507.818.800	3.439.964.227	98,07

NO.	URAIAN BELANJA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN)			
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	148.550.000	122.080.077	82,18
2	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian	34.836.300	34.095.800	97,87
3	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	135.186.000	126.733.700	93,75
4	Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan	224.131.500	211.576.000	94,40
5	Pengembangan Sistim Informasi Pasar	64.378.000	51.998.000	80,77
6	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	2.900.737.000	2.893.480.650	99,75
H.	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	62.290.150	61.870.650	99,33
1	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	42.918.900	42.636.900	99,34
2	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	19.371.250	19.233.750	99,29
I.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	262.661.500	234.969.300	89,46
1	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	51.424.500	48.582.000	94,47
2	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	39.515.000	39.515.000	100,00
3	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	171.722.000	146.872.300	85,53
J.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	78.222.500	76.317.000	97,56
1	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	78.222.500	76.317.000	97,56
K.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	428.499.500	411.968.400	96,14
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	254.100.000	252.631.000	99,42
2	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	71.825.000	64.262.900	89,47
3	Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan	102.574.500	95.074.500	92,69
L.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	335.288.750	333.748.400	99,54
1	Pembibitan dan Perawatan Ternak	72.970.000	71.519.900	98,01
2	Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak	17.448.750	17.448.500	100,00
3	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan	244.870.000	244.780.000	99,96

Beberapa keluaran (output) dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pertanian dapat dideskripsikan sebagai berikut.

1) Program peningkatan kesejahteraan petani.

Output yang dihasilkan antara lain :

- a. Meningkatnya pemahaman 40 orang petani agribisnis melalui pelatihan pengolahan hasil peternakan selama 2 hari (pelatihan pengolahan brownisi abon sapi).
- b. Meningkatnya kemampuan/pemahaman pada 30 anggota lembaga petani dalam pengoperasian traktor roda 4

2) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

Terlaksananya Program peningkatan ketahanan pangan terdiri atas 5 kegiatan antara lain:

- a. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian pada beberapa kegiatan; kegiatan pengawasan penyaluran kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai prosedur dan tepat sasaran, dengan jumlah penyaluran Pupuk bersubsidi adalah sebanyak 2523 ton dari rencana 2656 ton atau sekitar 94,99%; kegiatan penyusunan dokumen RDKK pupuk, kegiatan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi.
- b. Meningkatnya pemahaman 50 orang pelaku pengolahan hasil pertanian (1 kali pelatihan selama 2 hari).
- c. Terlaksananya pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija dengan :
 - Pengadaan benih jagung hibrida dan benih padi.
 - Pengadaan obat-obatan (insektisida dan pestisida) mendukung program intensifikasi tanaman padi, palawija.
- d. Terlaksananya Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dengan pembinaan pelaksanaan gerakan upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. (laporan hasil kegiatan untuk 1 tahun, dokumen Proksimantap)
- e. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan. Tersedianya/ tersalurnya bantuan 4.200 bibit sawo; 400 pohon nangka (okulasi); 600 bibit Mangga (okulasi); 600 bibit Garoso; 400 benih padi Gogo; 1.500 bibit Alpokat; 200 pohon bibit buah naga; 200 pohon bibit Rambutan; 200 pohon bibit buah Klengkeng.
- f. Terlaksananya program pengembangan sistem informasi pasar dengan dibentuknya tim pengumpul data sehingga terhimpun data informasi akan harga pasar (informasi harga pasar per minggu/ 4 kali perbulan).
- g. Terlaksananya program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu perkebunan, produk pertanian dengan ;
 - Dibentuk Tim SID dan CP/CL kegiatan DAK

- Pembangunan Gudang Produsen Benih (DAK) Pembangunan Gedung Produsen Benih (DAK)/ Gudang Produsen Benih
- Rehabilitasi Pagar Kebun Bibit Hortikultura Kota Bima
- Pembangunan 37 paket Jalan Usaha Tani (lokasi tersebar)
- Peningkatan 10 paket Jalan Usaha Tani (lokasi tersebar)
- Pengembangan irigasi air permukaan (4 unit embung)
- 2 unit Dam parit
- Terlaksananya/ tersedianya: Pengembangan Irigasi Air Tanah (DAK): Pengembangan Air Irigasi Tanah Dangkal Wilayah RasanaE Timur (7 Lokasi); Pengembangan Air Irigasi Tanah Dangkal Wilayah Asakota (7 Lokasi); Pengembangan Air Irigasi Tanah Dangkal Wilayah Raba (7 Lokasi); Pengembangan Air Irigasi Tanah Dangkal Wilayah Mpunda (7 Lokasi)

3) ***Terlaksananya program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak terdiri*** dari 3 kegiatan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular.
 - Pelaksanaan kegiatan vaksinasi ternak (AT/SE) (lokasi di 5 Kecamatan) dan tersedianya 1 paket obat-obatan keswan dan bahan kimia. Dengan rincian pelayanan yang dilakukan sebanyak 2.152 ekor ternak oleh puskesmas; pelayanan vaksinasi ternak sebanyak 21.970 ekor; pelayanan diagnosa penyakit 1.280 ekor.
 - Terlaksananya kegiatan pemeriksaan dan pengawasan daging hewan Qurban (lokasi di 5 Kecamatan), Jumlah ternak qurban yang diawasi dan diperiksa sebanyak 1.035 ekor
 - Terlaksananya kegiatan pengiriman spesimen organ ke Mataram; monitoring pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular dengan terlaksananya kegiatan eliminasi Terhadap Penyebaran Anjing Liar sebagai bentuk antisipasi terhadap penyebaran penyakit rabies sebanyak 52 Ekor; pengawasan terhadap ternak yang di antar pulaukan yang terdiri dari 995 ekor sapi jantan dan 25 ekor kerbau jantan;
 - Koordinasi, konsultasi, rapat dan pertemuan di luar daerah.
- b. Terlaksananya pengawasan perdagangan ternak antar daerah dengan hasil ternak yang di antar pulaukan terdiri dari 995 ekor sapi jantan dan 25 ekor kerbau jantan. Dan koordinasi, konsultasi, rapat dan pertemuan luar daerah

- c. Terlaksananya kegiatan Pencacahan dan Pengkartuan Ternak antara lain:
 - Kegiatan identifikasi CP/CL Dana Tugas Pembantuan, Dekon dan APBD Propinsi.
 - Kegiatan pendampingan pendataan/updating data tingkat Propinsi.
 - Kegiatan sosialisasi pengkartuan ternak.
- d. Terlaksananya kegiatan pengendalian dan penertiban ternak dengan perbaikan dan pembangunan kandang penampungan.
- e. Terlaksananya pengawasan produk bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (1 tahun), Output:
 - Mengirimkan spesimen organ ke BPPV Denpasar.
 - Pemberian insentif petugas pengawasan pemotongan ternak: Pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemotongan ternak di Kota Bima (Sapi Jantan 1.288 ekor Sapi Betina 86 ekor, Kambing 1497 ekor)
 - Pencetakan kartu pemeriksaan daging

4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan didukung dengan kegiatan:

- a. Output kegiatannya:
 - Pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dengan Jumlah layanan Inseminasi Buatan: 262 Dosis dan Jumlah Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan (Sapi Simental 40 ekor; Sapi Limousin 39 ekor; Sapi Brahman 32 ekor; Sapi Bali 142 ekor ; Sapi Angus 8 ekor; Sapi Ongole 1 ekor).
 - Pengadaan 2 jenis obat-obatan Straw dan N2-Cair: Sapi Brangus 25 dosis; Sapi Simental 25 dosis; Sapi Limousin 26 dosis; Sapi Brahman 26 dosis; Sapi Bali 154 dosis; N2-Cair 60 liter
 - Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kelompok tani ternak penerima bantuan.
 - Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak, Output: Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peternak tentang pengolahan pakan ternak sebanyak 25 kelompok tani ternak, dan peningkatan pengetahuan peternak tentang pembuatan kompos sebanyak 25 kelompok tani ternak. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk Peternakan
 - Relaksananya kegiatan survey investigasi design (SID) dan CP/CL kegiatan DAK dan CP/CL penerima bantuan ternak.

- Tersalurnya bantuan bibit ternak kambing jantan 12 dan 112 kambing betina di 5 kelompok tani ternak.
- 1 unit mobil operasional keliling keswan/kesmavet.
- Sarana prasarana puskesmas
- Renovasi Rumah Potong Hewan Unggas (DAK)
- Pembangunan Puskesmas Kecamatan Asakota (DAK) di Kelurahan Jatiwangi kota Bima
- Pembangunan Pagar Puskesmas Kecamatan Asakota

c. Capaian Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian Kota Bima. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari sumber internal dan eksternal, baik data primer maupun sekunder.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan,

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2017 dengan realisasi yang diperoleh pada akhir tahun anggaran, komponen yang diukur kinerjanya adalah kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2017 tersebut berdasarkan hasil pengukurannya dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.173. Pencapaian kinerja kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2017

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1	2	3
1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Para Pelaku Usaha Pertanian Sebanyak 20 Orang.
2	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Pelaksanaan Latihan dan Kunjungan serta Rembug Tani sebanyak 20 kali
3	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah kelompok tani yang mengikuti koordinasi koordinasi pengembangan PUAP adalah 30 klp
4	Pelaksanaan PEDANA/PENAS dan Kontak Tani Andalan	Petani yang mewakili Kota Bima dalam pelaksanaan PENAS sebanyak 5 Orang
5	Pelaksanaan Lomba Bagi Kelompok Tani Dan Petani, Klp. PUAP Serta Pekarangan	Jumlah kelompok tani yang berpartisipasi adalah sebanyak 10 Kelompok
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Pelaksanaan penyaluran kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai prosedur dan tepat sasaran, dengan jumlah penyaluran Pupuk bersubsidi sebanyak 3.324,25 Kg
7	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani Peternak Tentang Penanganan Pasca Panen Sebanyak 50 Orang
8	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Pelaksanaan Gerakan Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dan Penyusunan Proksimantap.
9	Pengembangan Perbinihan/ Perbibitan	Tersalurnya Bantuan Bibit Benih Padi Gogo : 1500 Kg, Bibit Tanaman Sawo : 1000 Pohon, Mangga : 700 Pohon, Alpukat : 700 Pohon, Durian : 1000 Pohon dan Klengkeng : 400 Pohon.
10	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Tersajinya informasi harga pasar komoditi pertanian di media cetak lokal sebanyak 48 kali
11	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani di 7 Lokasi • Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Embung di 5 Lokasi • Terlaksananya Kegiatan Perbaikan DAM Parit di 2 Lokasi • Terlaksananya Pengembangan Air Irigasi Tanah Dangkal di 4 (empat) Kecamatan yang tersebar di 20 Lokasi • Terlaksananya Penyaluran Alsintan sebanyak 80 Unit
12	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah klp yang mengikuti pelatihan menerapkan teknologi pertanian tepat guna (PHT) = 2 Klp
13	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah kelompok yang dilatih pada kegiatan Demplot Padi = 1 Klp
14	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah petani yang ikut pelatihan rorak dan biopori sebanyak 40 Orang
15	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/perkebunan	Jumlah alsintan yang disalurkan adalah 80 Unit
16	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan	Jumlah bibit unggul yang disalurkan adalah Jambu Mente 12.000 Pohon dan Kemiri 4.000 Pohon
17	Penyusunan Program penyuluhan pertanian	Jumlah program adalah sebanyak 8 program
18	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah pelayanan kesehatan hewan oleh Puskesmas sebanyak 1531 ekor terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Sapi : 646 ekor • Kerbau : 1 ekor • Kuda : 60 ekor • Kambing : 534 ekor • Kucing : 27 ekor

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Ayam : 262 ekor • Anjing : 1 ekor • Rusa : - ekor <p>Perincian Pelaksanaan Vaksinasi ternak :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sapi : 9.842 ekor • Kerbau : 160 ekor • Kuda : 419 ekor • Kambing : 7.954 ekor • Domba : 13 ekor <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Total : 18.388 ekor <p>Diagnosa penyakit 824 terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE : - kasus • AT : - kasus • Scabies : 248 kasus • ND : - kasus • MCF : - kasus • Diare : - kasus • BEF : - kasus • Helmi : 90 kasus • Myas : 1 kasus • CRD : 6 kasus • Indig : 20 kasus • Maln : 365 kasus • DFI : - kasus • Dematitis : 11 kasus • ARTR : 15 kasus • Abses : 12 kasus • Tymf : 3 kasus • VUL : 1 kasus • Mastitis : 2 kasus • Pneu : 48 kasus • Disto : 2 kasus • Infla : - kasus <p>Situasi umum penyakit hewan menular berdasarkan jenis penyakit adalah sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anthrax : - kasus • Surra : - kasus • Scabies : 2 kasus • ND : - kasus • AI : - kasus <p>Pengawasan Hewan/ Daging Qurban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan dan pemeriksaan fisik (<i>ante mortem</i>) dilaksanakan H-1 2. Pengawasan dan pemeriksaan (<i>post mortem</i>) selama 3 hari, Tgl. 1 – 3 Sept. 2017 <p>Jumlah ternak qurban yang diawasi dan diperiksa sebanyak 975 ekor terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sapi : 471 ekor • Kerbau : 1 ekor • Kambing : 503 ekor
19	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	<p>Pengawasan Terhadap Ternak Yang di Antar Pulaukan yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sapi Jantan : 2000 ekor • Kerbau Jantan : 25 ekor
20	Pencacahan dan Pengkartuan Ternak	<p>Pelaksanaan pencacahan dan pengkartuan ternak, Sebanyak :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sapi : 8145 ekor • Kerbau : 566 ekor • Kuda : 1029 ekor

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Kambing : 8225 ekor • Domba : 169 ekor
21	Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan	Pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemotongan ternak di Kota Bima : <ul style="list-style-type: none"> • Sapi Jantan : 1314 ekor • Sapi Betina : 31 ekor • Kerbau : - ekor • Kambing : 1661 ekor
22	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Pengadaan straw dan N2Cair : <ul style="list-style-type: none"> • Sapi Brangus : 26 dosis • Sapi Simental : 25 dosis • Sapi Limousin : 26 dosis • Sapi Brahman : 26 dosis • Sapi Bali : 103 dosis • N2-Cair : 50 liter Jumlah Pelayanan Inseminasi Buatan : 340 Dosis Jumlah Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan : <ul style="list-style-type: none"> • Sapi Brangus : 24 ekor • Sapi Simental : 22 ekor • Sapi Limousin : 15 ekor • Sapi Brahman : 8 ekor • Sapi Bali : 162 ekor • Sapi Angus : - ekor • Sapi Ongole : - ekor
23	Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peternak tentang pengolahan pakan ternak sebanyak 8 kelompok tani ternak, dan peningkatan pengetahuan peternak tentang pembuatan kompos sebanyak 8 kelompok tani ternak.
24	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan	Terbangunnya sarana pemotongan untuk jagal lokal sebanyak 1 unit

Tabel 2.174. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan :				
	- Padi (GKP)	Ton	54.025	34.615	64,07
	- Jagung (PK)	Ton	5.113	12.106	236,77
	- Kedelai (BK)	Ton	2.716	1.309	48,20
	- Kacang Tanah(BK)	Ton	440	368	83,64
	- Kacang Hijau (BK)	Ton	12	62	516,67
Meningkatnya Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan :				
	- Tembakau	Ton	3,40	2,10	61,76
	- Jambu Menté	Ton	173,84	157,65	90,69
	- Kelapa	Ton	27,49	27,07	98,47
Meningkatnya Produksi	Produksi Peternakan :				
	- Produksi Daging	Ton	1.823	728	39,96

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Peternakan	-. Produksi Kulit	Ton	45	62	137,88
	-. Produksi Telur	Ton	258	183	70,82
Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Terampil	Persentase Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran (%)	%	45	67	148,89

Keterangan : Produksi Pertanian Tanaman Pangan adalah Angka Sementara Tahun 2017.

Pencapaian realisasi kinerja sesuai sasaran strategis untuk indikator kinerja produksi pertanian tanaman pangan melebihi dari target yang ditentukan yaitu rata-rata sebesar 152,88%, produksi perkebunan tercapai rata-rata sekitar 83,64%, produksi peternakan tercapai rata-rata sekitar 82,89 %, sedangkan untuk Persentase Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran sebesar 148,89%.

4, Perdagangan

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pembangunan sektor perdagangan di kota Bima melalui 2 program dan 6 kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.174. Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Kota Bima Tahun Anggaran 2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	297.264.000	255.352.500	85,90
	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	31.517.000	23.013.000	73,02
	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	119.020.000	106.129.500	89,17
	Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan barang-barang ilegal (CHT)	34.047.000	27.905.000	81,96
	Pengawasan peredaran Cukai Ilegal (CHT)	112.680.000	98.305.000	87,24
2	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	3.601.952.000	3.558.767.713	98,80
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	3.187.440.000	3.147.149.000	98,74

	peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	219.425.000	216.531.713	98,68
	Operasi pasar murah	195.087.000	195.087.000	100,00
	TOTAL	3.899.216.000	3.814.120.213	97,82

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Realisasi anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perdagangan tahun 2017 adalah mencapai 94,82%. Beberapa program dan kegiatan utama yang mendukung pelaksanaan urusan perdagangan, yaitu:

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Program ini menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Barang-barang Ilegal (DB-HCHT) dan Pengawasan peredaran Cukai Ilegal (DB-HCHT).

Adapun keluaran (output) dari kegiatan tersebut adalah:

- Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Barang-barang Ilegal, yang dilaksanakan di 5 kecamatan Kota Bima dan peserta sosialisasi pelaku usaha.
- Pelaksanaan pengawasan peredaran cukai ilegal yang dilakukan langsung pada pusat pertokoan, pasar, kios-kios, pedagang kaki lima di terminal, dan pergudangan besar serta distributor.

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

1) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk, anggaran pada kegiatan ini menggunakan dana DAK dengan output utamanya:

- Terlaksananya pengendalian dan pengamanan peresmian pasar raya amahami
- Pelaksanaan kegiatan pasar ramadhan
- Pelaksanaan kegiatan pasar lebaran
- 1 paket pembangunan tempat prasati (papan nama pasar)
- 1 paket tampias hujan/papan iklan
- Revitalisasi pasar Kumbe
- Instalasi jaringan listrik Kios pasar Kumbe
- Timbunan pasar raya Amahami

- 2) Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, dengan output utamanya Pelaksanaan monitoring harga sembako dan pengawasan pengendalian barang dan jasa (dan penyampaian informasi harga sembako pada masyarakat yang dilaksanakan di 5 kecamatan Kota Bima).
- 3) Kegiatan Operasi Pasar murah, dengan output utamanya Operasi pasar murah dilaksanakan 2 kali, pada bulan ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri.

b. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan perdagangan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.175. Capaian kinerja Urusan Pilihan Perdagangan Tahun Anggaran 2017

Indikator	Target	Realisasi Capaian 2017	%
Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang	220 unit	224 unit	110,91

Tahun 2017 jumlah Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang ditargetkan sebanyak 220 unit, sedangkan realisasinya sebanyak 224 unit atau 110,91%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang realisasinya sebanyak 225 unit, terdapat penurunan sebanyak 1 unit dan apabila dibandingkan lagi dengan target jangka menengah yang memiliki target 245 unit maka realisasi untuk tahun 2017 dibawah target jangka menengah. Tidak tercapainya realisasi dari target yang diinginkan ini disebabkan belum adanya aparatur teknis yang dimiliki. Dan untuk meningkatkan realisasi tersebut perlu dilakukan pelatihan/diklat teknis untuk aparatur Dinas Koperindag Kota Bima.

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Perlu diupayakan alokasi anggaran tambahan untuk memperluas daya tampung bangunan pasar tradisional serta penataan lingkungan pasar yang mendukung terwujudnya pasar tradisional yang sehat dan berwawasan lingkungan.
- 2) jumlah yang ditera dan ditera ulang mewakili aspek perlindungan terhadap konsumen. Dengan meningkatnya jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang, pemerintah Kota Bima lebih mengupayakan jaminan atas tertibnya alat ukur yang digunakan di pusat perdagangan sehingga intensitas

pengawasannya perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM teknis dengan mengikuti pelatihan/diklat teknis PPNS.

5, Perindustrian

Sektor industri memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah produk-produk Kota Bima dan penyerapan tenaga kerja. Industri di Kota Bima didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM).

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan IKM di Kota Bima dilaksanakan dalam 4 program dengan total pagu sebesar Rp. 2.353.376.143,- yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima. Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.211.138.462,- atau 93,96%, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.176. Program/ Kegiatan Urusan Industri Kota Bima Tahun Anggaran 2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	181.510.000	125.730.000	69,27
	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	181.510.000	125.730.000	69,27
2	Program pengembangan industri kecil dan menengah	203.631.000	189.284.300	92,95
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	70.995.000	60.235.000	84,84
	Lomba Rancang Busana	132.636.000	129.049.300	97,30
3	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	175.439.400	153.948.519	87,75
	Pembinaan Kemampuan teknologi industri	121.974.200	100.942.839	82,76
	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	53.465.200	53.005.680	99,14
4	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	1.792.795.743	1.742.175.643	97,18
	Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat	33.140.100	14.127.000	42,63
	Promosi produk kerajinan	47.195.643	44.667.643	94,64

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penyediaan Sarana dan prasarana pengembangan sentra industri	1.712.460.000	1.683.381.000	98,30
	TOTAL	2.353.376.143	2.211.138.462	93,96

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program ini diwujudkan melalui kegiatan penguatan kemampuan Industri berbasis teknologi dengan output utamanya:

Pelaksanaan diklat pengelasan, peningkatan kualitas produk pangan dan diversifikasi tenun (30 orang selama 10 hari), diklat manajemen sederhana (30 orang selama 3 hari) diharapkan mampu meningkatkan diversifikasi dan jaminan pengolahan, penerapan manajemen pada IKM.

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri.

Keluaran (Output) dari kegiatan tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan Lomba Rancang Busana diharapkan dapat lebih dikenalnya produk tenun Kota Bima dan menumbuh kembangkan kreatifitas pengrajin tenun dan olahan hasil tenun/diversifikasi tenun
- b. Monitoring rutin IKM dalam rangka pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah.

3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

4) Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri, yang didukung dengan Output dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya pembinaan kemampuan teknologi industri pelaksanaan kegiatan temu usaha.

5) kegiatan Pengembangan dan Pelayanan teknologi industri.

Output dari kegiatan tersebut adalah dilaksanakannya pendampingan langsung pada IKM antara lain pendampingan diagnosis/shindansi dan pendampingan pada industri kemasan, pendampingan IKM.

4. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Program ini diwujudkan dengan kegiatan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat dan kegiatan promosi produk industri kerajinan.

Output dari kegiatan tersebut adalah:

- a. Dokumen profil IKM dan sentra IKM, Katalog IKM
- b. Terlaksananya penyelenggaraan promosi produk UMKM (2 kali pameran dalam kota dan dalam Provinsi).

b. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan Industri pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.177. Capaian kinerja Urusan Pilihan Perindustrian Tahun Anggaran 2017

Indikator	Target	Realisasi Capaian 2017	%
Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	157	94	59,87
Jumlah Sentra Industri yang ditangani (sentra)	74	73	98,65

Sumber Data: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima 2017

- Indikator kinerja Tahun 2017 ini memiliki target sebanyak 157 IKM dan realisasinya sebesar 94 IKM atau 59,87%.
- Indikator kinerja Tahun 2017 ini memiliki target sentra industri yang ditangani sejumlah 74 sentra dan realisasinya sebesar 73 IKM atau 98,65%.

c. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- 1) Perkembangan Industri khususnya IKM cukup berkembang namun perkembangan industri non formal ke industri formal masih kecil diakibatkan karena terkendala pada penerbitan legalitas (Izin);
- 2) Pembinaan dan pengembangan Industri kecil dan menengah terkendala pada:
 - a. Kualitas Sumber Daya Manusia masih cukup rendah,
 - b. Kualitas Produk IKM masih tertinggal dari daerah lain;
 - c. Pemasaran produk masih terbatas;
 - d. Jumlah apartur pembina tidak berimbang dengan jumlah IKM yang cukup besar;
 - e. Ilmu, Skill dan sepsifikasi teknis apartur Masih kurang.

Solusi

- 1) Perlu ada kemudahan dalam perizinan khususnya IKM dengan memberikan perizinan gratis bagi IKM;
- 2) Kendala Pembinaan dan Pengembangan IKM dapat diatasi dengan :

- a) Melaksanakan pembinaan berupa pemberian pelatihan/Diklat pengembangan ilmu dan keterampilan bagi pelaku usaha Industri;
- b) Peningkatan kemampuan SDM harus dibarengi dengan Peningkatan wawasan usaha melalui kegiatan Magang serta peningkatan teknologi melalui bantuan peralatan/mesin;
- c) Melaksanakan pameran produk IKM dalam Kota Bima serta mengikuti pameran produk IKM diluar daerah;
- d) Mengajukan penambahan jumlah aparatur Pembina IKM kepada pemerintah Kota Bima;
- e) Mengirim/mengikut sertakan aparatur dalam pelatihan/diklat pengembangan dan peningkatan kemampuan aparatur.

D. Urusan Penunjang

Administrasi Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan pada tahun 2017 Sekretariat Daerah Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.833.938.950,00 dengan realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 46.491.225.678,00 atau 95,20% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.178. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2017

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.895.185.075	11.350.839.508	95,42
	Penyediaan jasa surat menyurat	296.540.000	273.679.226	92,29
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.301.604.000	1.275.697.154	98,01
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	381.441.000	339.690.000	89,05
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	450.000.000	294.655.353	65,48
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	88.185.800	69.900.600	79,27
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	713.272.400	692.674.983	97,17

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	491.750.000	404.630.000	82,28
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	55.400.000	42.800.000	77,26
	Penyediaan alat tulis kantor	795.613.650	782.162.150	96,85
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	838.854.500	815.713.288	96,10
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	558.000.000	557.500.700	99,91
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	565.450.000	548.362.150	96,98
	Penyediaan barang bacaan dan perundang-undangan	199.510.000	182.870.000	91,66
	Penyediaan bahan logistik kantor	421.068.000	420.966.500	99,98
	Penyediaan makanan dan minuman	1.830.084.000	1.786.958.142	97,56
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.913.172.125	1.901.826.262	95,30
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	995.239.600	960.753.000	94,54
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.108.327.000	12.390.375.941	94,52
	Pembangunan gedung kantor	3.945.892.000	3.822.110.450	96,86
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	3.861.000.000	3.787.133.000	98,09
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	161.200.000	159.500.000	98,95
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	140.402.500	114.038.000	81,22
	Pengadaan peralatan gedung kantor	394.765.000	379.405.000	96,11
	Pengadaan mebeleur	371.100.000	368.885.000	99,40
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.118.077.000	1.104.627.660	98,80
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	410.160.000	219.990.023	53,64
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.544.830.500	1.347.494.558	87,23
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	145.000.000	144.516.675	99,67
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	227.050.000	223.824.000	98,58
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	168.850.000	161.464.800	95,63
	Penyediaan/ sewa gedung kantor/rumah jabatan/dinas	620.000.000	557.386.775	89,90
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	214.700.000	214.700.000	100,00
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	153.000.000	153.000.000	100,00
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	21.200.000	21.200.000	100,00

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Pengadaan pakaian olahraga	40.500.000	40.500.000	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	545.142.000	464.413.595	85,19
	Seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah	80.702.000	-	-
	Koordinasi pelaksanaan kegiatan korps pegawai negeri	350.000.000	349.973.595	99,99
	Pengadaan pakaian seragam dinas	110.940.000	110.940.000	100,00
	Tanda pengenal area khusus bandara	3.500.000	3.500.000	100,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.428.293.825	1.371.887.680	96,05
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	21.000.000	21.000.000	100,00
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	28.000.000	28.000.000	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	23.750.000	23.750.000	100,00
	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah	194.246.000	192.046.000	98,87
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	589.884.325	538.059.325	91,21
	Penyusunan standar harga kota bima tahun 2018	118.275.500	116.115.000	98,17
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana DAK dan TEPRA	453.138.000	452.917.355	99,95
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	7.873.852.000	7.805.694.480	99,13
	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	1.414.253.500	1.380.457.600	97,61
	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah/sekda/staf ahli/humas protokol	446.000.000	446.000.000	100,00
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	1.226.300.000	1.205.945.399	96,58
	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	2.130.000.000	2.129.920.981	100,00
	Optimalisasi pelayanan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	162.000.000	161.250.000	99,54
	Stimulan pembangunan daerah	1.623.435.000	1.620.799.000	99,84
	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	871.863.500	861.321.500	68,28
7	Program Promosi Daerah	374.230.000	373.935.000	99,92
	Promosi daerah melalui media cetak/TV/radio/fasilitas umum pemerintah/non pemerintah lainnya	349.230.000	348.935.000	99,92

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Pameran pembangunan/promosi/investasi	25.000.000	25.000.000	100,00
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	258.870.000	243.636.100	94,12
	Pembinaan perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah	173.870.000	166.072.700	95,52
	Pembinaan kelembagaan perekonomian daerah	85.000.000	77.563.400	91,25
9	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV AIDS	99.900.000	99.900.000	100,00
	Penguatan kelembagaan komisi penanggulangan AIDS Daerah	50.450.000	50.450.000	100,00
	Pencegahan pemberantasan penanggulangan peredaran gelap narkoba (P4GN)	49.450.000	49.450.000	100,00
10	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.512.010.050	1.504.108.792	99,48
	Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah	139.053.450	134.058.113	96,41
	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	539.699.398	539.274.398	99,92
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	204.581.202	204.135.228	99,78
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	432.122.000	432.062.000	99,99
	Publikasi peraturan perundang-undangan	61.630.000	61.630.000	100,00
	Penyelesaian sengketa dan bantuan hukum	134.924.000	132.949.053	98,54
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	44.900.000	44.900.000	100,00
	Koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan mewabah	44.900.000	44.900.000	100,00
12	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	364.173.000	288.566.848	79,24
	Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	179.319.000	110.012.848	61,35
	Rapat koordinasi asosiasi pemerintah joga seluruh indonesia (APEKSI)	184.854.000	178.554.000	96,59
13	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.122.355.600	1.090.112.481	97,13
	Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	308.370.000	277.529.281	90,00
	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa (POKJA ULP)	813.985.600	812.583.200	99,83
14	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	2.933.730.000	2.739.561.750	93,38

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	444.530.000	444.461.750	99,98
	Penyusunan kalender tahunan pemerintah kota bima	162.700.000	120.700.000	74,19
	Koordinasi peringatan hari besar keagamaan dan nasional	320.600.000	320.100.000	99,84
	Kerjasama informasi dengan mas media (pembinaan dan pendampingan pers)	1.519.300.000	1.518.300.000	99,93
	Penyusunan buletin pemerintah kota bima	486.600.000	336.000.000	69,05
15	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	49.000.000	48.650.000	99,29
	Penilaian lomba sekolah sehat(LSS)	49.000.000	48.650.000	99,29
16	Program Penataan daerah otonomi baru	1.076.963.000	736.910.275	68,42
	Fasilitasi Percepatan penyelesaian tapak batas wilayah administrasi antar daerah	273.347.000	172.188.250	62,99
	Optimalisasi kecamatan dan kelurahan	166.807.000	143.940.500	86,29
	Pembakuan nama rupa bumi	335.267.000	233.707.450	69,71
	Pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan	301.542.000	187.074.075	62,04
17	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	3.527.337.900	3.342.862.649	94,77
	Pembinaan peningkatan pelayanan publik	249.356.000	204.888.000	82,17
	Koordinasi peringatan hari besar (keagamaan dan nasional)	73.500.000	73.500.000	100,00
	Pengantaran dan penjemputan jamaah haji	108.250.000	108.250.000	100,00
	Pendataan sarana pendidikan agama dan tempat ibadah	3.750.000	3.750.000	100,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	8.600.000	8.600.000	100,00
	Koordinasi bidang perekonomian	272.855.000	163.109.149	59,78
	Koordinasi peringatan hari besar	2.811.026.900	2.780.765.500	98,92
18	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	591.766.500	589.356.000	99,59
	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	465.996.000	463.586.000	99,48
	Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan aparatur	125.770.500	125.770.000	100,00
19	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	1.230.200.000	1.209.410.000	98,31
	Pelaksanaan sosialisasi keagamaan STQ/MQ	113.675.000	113.575.000	99,91

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Pembinaan petugas keagamaan dan guru ngaji	585.500.000	578.935.000	98,88
	Verifikasi dan rekomendasi bantuan sosial dan keagamaan	60.000.000	60.000.000	100,00
	Rumpun kesra	21.025.000	21.025.000	100,00
	Pembinaan majelis taklim tingkat kota bima	450.000.000	435.875.000	96,86
20	Program Administrasi Kerjasama Pembangunan	583.003.000	581.404.579	99,73
	Koordinasi pembinaan administrasi pembangunan	413.950.000	412.446.279	99,64
	Pembinaan jasa konstruksi	169.053.000	168.958.300	99,94
	Jumlah	48.833.938.950	46.491.225.678	95,20

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bima menghasilkan beberapa keluaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 11.895.185.075,00 dengan realisasi Rp. 11.350.839.508,00 (95,42%) dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 13.108.327.000,00 dengan realisasi Rp. 12.390.375.941 (94,52%). Melalui program ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- Pembangunan gedung kantor, antara lain rehabilitasi kantor, pembangunan talud dan pagar beberapa kantor Kecamatan dan Kelurahan.
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional, antara lain pengadaan mobil dinas, mobil jabatan, pengadaan mobil sampah dan motor sampah tiga roda.
- Pemeliharaan rutin/berkala pada kantor, rumah jabatan dan kendaraan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 214.700.000,00 dengan realisasi Rp. 214.700.000,00 (100,00%).

Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah dihasilkan output pengadaan pakaian dinas, pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dan pengadaan pakaian olah raga pada beberapa bagian di Sekretariat Daerah Kota Bima.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 545.142.000,00 dengan realisasi Rp. 464.413.595,00 (85,19%). Kegiatan utama yang berhasil dilaksanakan adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan korps pegawai negeri dan pengadaan pakaian seragam dinas.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.428.293.825,00 dengan realisasi Rp. 1.371.887.680,00 (96,05%). Dari kegiatan ini dihasilkan beberapa output yaitu :

- Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD Kota Bima dapat disusun dan disampaikan tepat waktu;
- Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun;
- Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Sekretariat Daerah Kota Bima;
- Standar Harga Kota Bima Tahun 2018;
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana DAK dan TEPR.

6. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 7.873.852.000,00 dengan realisasi Rp. 7.805.694.480,00 (99,13%). Beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah :

- Terlaksananya dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat;
- Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri;
- Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah;

- Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya;
- Optimalisasi pelayanan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Stimulan Pembangunan Daerah; dan
- Terlaksananya rapat Koordinasi dengan unsur Muspida.

7. Program Promosi Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 374.230.000,00 dengan realisasi Rp. 373.935.000,00 (99,92%). Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah promosi daerah melalui media cetak maupun fasilitas umum pemerintah lainnya serta kegiatan pameran pembangunan/promosi/investasi.

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 258.870.000,00 dengan realisasi Rp. 243.636.100,00 (94,12%). Output dari pelaksanaan program ini adalah :

- Terlaksananya Pembinaan perusahaan daerah dan Badan usaha milik daerah; dan
- Terlaksananya Pembinaan kelembagaan perekonomian daerah.

9. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV AIDS

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 99.900.000,00 dengan realisasi Rp. 99.900.000,00 (100,00%). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Dengan kegiatan ini telah diadakan sosialisasi penanggulangan AIDS dan operasional Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.
- Pencegahan Pemberantasan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dengan kegiatan ini sosialisasi dalam rangka pencegahan peredaran gelap narkoba.

10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.512.010.050,00 dengan realisasi Rp. 1.504.108.792,00 (99,79%). Output dari pelaksanaan kegiatan ini, antara lain :

- Tersusunnya rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan;
- Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan;
- Terfasilitasinya sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelesaian sengketa dan bantuan hukum; dan

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 44.900.000,00 dengan realisasi Rp. 44.900.000,00 (100%). Kegiatan yang dilaksanakan adalah Koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan mewabah melalui rapat koordinasi yang melibatkan stakeholder terkait.

12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 364.173.000,00 dengan realisasi Rp. 288.566.848,00 (79,24%). Output dari pelaksanaan program ini adalah keikutsertaan pada rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) serta fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan public.

13. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.122.355.600,00 dengan realisasi Rp. 1.090.112.481,00 (97,13%). Output dari program ini tergambar dari pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, antara lain :

- Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Pokja ULP).

14. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 2.933.730.000,00 dengan realisasi Rp. 2.739.000.000,00 (93,38%). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
- Penyusunan kalender tahunan pemerintah kota bima
- Koordinasi peringatan hari besar keagamaan dan nasional
- Kerjasama informasi dengan mas media (pembinaan dan pendampingan pers)
- Penyusunan buletin pemerintah kota bima

15. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 49.000.000,00 dengan realisasi Rp. 48.650.000,00 (99,29%). Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penilaian Lomba Sekolah Sehat.

16. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.076.963.000,00 dengan realisasi Rp. 736.910.275,00 (68,42%). Output penting dari pelaksanaan program ini dirinci menurut kegiatannya, yaitu :

- Terfasilitasinya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah;
- Terlaksananya optimalisasi kecamatan dan kelurahan;
- Pembakuan nama rupa bumi wilayah Kecamatan Rasanae Timur.
- Pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan, yaitu pemekaran kelurahan Jatiwangi menjadi Kelurahan Jatiwangi dan Kelurahan Ule, Kelurahan Jatibaru menjadi Kelurahan Jatibaru dan Kelurahan Jatibaru Timur, serta Kelurahan Kumbe menjadi Kelurahan Kelurahan Kumbe dan Kelurahan Oi Mbo.

17. Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 3.527.337.900,00 dengan realisasi Rp. 3.342.862.649,00 (94,77%). Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini adalah Koordinasi Peringatan hari besar dan Koordinasi Bidang Ekonomi.

18. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 591.766.500,00 dengan realisasi Rp. 589.356.000,00 (99,59%). Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Tersusunnya instrumen analisis jabatan PNS; dan

- Penguatan Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur.

19. Program Pembinaan dan peningkatan pelayanan keagamaan dan sosial kemasyarakatan

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.230.200.000,00 dengan realisasi Rp. 1.209.410.000,00 (98,31%). Keluaran (output) dari pelaksanaan program Pembinaan dan peningkatan pelayanan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, adalah :

- Terlaksananya STQ/MQ;
- Terlaksananya pembinaan petugas keagamaan dan guru ngaji.
- Verifikasi dan rekomendasi bantuan sosial dan keagamaan.
- Rumpun kesra
- Pembinaan Majelis taklim tingkat Kota Bima.

20. Program Administasi Kerjasama Pembangunan

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 583.003.000,00 dengan realisasi Rp. 581.404.579,00 (99,73%). Output penting dari pelaksanaan program ini dirinci menurut kegiatannya, yaitu :

- Koordinasi pembinaan administrasi pembangunan; dan
- Terlaksananya Kegiatan Bina Jasa Konstruksi.

b. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja dari seluruh Bagian yang ada didukung dengan program masing-masing Bagian. Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan dengan pengukuran kinerja yang membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya.

1) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Ajaran Agama

a) Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Penerimaan ZIS Kota Bima pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.230.456.000 atau mengalami penurunan dibanding penerimaan tahun 2016 yang sebesar Rp. 4.335.858.840. Meskipun mengalami penurunan namun secara umum telah memenuhi target ZIS tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu Rp. 4.000.000.000. Beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan ZIS di Kota Bima, antara lain

dukungan pemerintah yang bermitra dengan BAZNAS dan meningkatnya kesadaran maupun kepercayaan masyarakat Kota Bima terhadap BAZNAS sebagai penyalurnya. Daftar penerimaan ZIS di Kota Bima selama Tahun 2014-2017 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.179. Daftar Penerimaan ZIS di Kota Bima Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah
(1)	(2)
2014	785.000.000
2015	1.391.336.000
2016	4.335.858.840
2017	4.230.456.000

b) Perolehan Nilai MTQ tingkat Provinsi

Pada Tahun 2017 nilai MTQ tingkat Provinsi sebesar 55 poin dengan predikat juara III tingkat Provinsi NTB. Adapun pencapaian indikator kinerja sebesar 142,86 %. Selama tahun 2014 sampai 2016 Kota Bima selalu memperoleh juara umum di tingkat Provinsi NTB namun pada tahun 2017 mengalami penurunan peringkat. Adapun faktor yang mempengaruhi jumlah poin sangat tergantung pada jumlah cabang lomba, bahwa semakin banyak cabang lomba maka semakin banyak jumlah poin, dan sebaliknya. Untuk pelaksanaan MTQ Tahun 2017 Kafilah Kota Bima memperoleh 7 emas, 8 Perak, dan 4 Perunggu. Selanjutnya untuk perkembangan daftar perolehan nilai MTQ selama Tahun 2014-2017 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.180: Daftar Perolehan nilai MTQ Kota Bima selama Tahun 2014-2017

Tahun	Nilai	Tingkat Provinsi
2014	54 poin	Juara I (Umum)
2015	84 poin	Juara I (Umum)
2016	31 poin	Juara I (Umum)
2017	55 poin	Juara III

c) Rasio Kenaikan penduduk haji yang mendaftar haji

Penduduk yang mendaftar haji di Kota Bima pada Tahun 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya, khusus Tahun 2017 rasio penduduk yang mendaftar haji 4,4 per 1000 penduduk dengan

pencapaian sebesar 105,75 % dari target. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran beragama dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima semakin meningkat pada Tahun ini. Dalam rangka membantu jamaah haji pemerintah setiap Tahunnya menanggung biaya transportasi PP dari Kota Bima ke Bandara embarkasi.

2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

a) Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

SAKIP Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2017 kembali memperoleh hasil **Baik (B)**. Dengan perolehan **predikat B (Baik)** tersebut menunjukkan bahwa Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bima semakin baik dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2016, khusus Tahun 2016 nilai SAKIP Kota Bima diperoleh sebesar 62,58 poin dengan peningkatan jumlah poin sebanyak 2,37 poin dibanding Tahun 2015. Selanjutnya perolehan nilai B tersebut dengan capaian kinerja sebesar 96,26 %. Adapun daftar rincian peningkatan nilai SAKIP selama 4 Tahun terakhir sebagaimana terlihat tabel berikut :

Tabel 2.181: Daftar Nilai SAKIP Kota Bima selama Tahun 2013-2016

Tahun	Nilai	Status
2013	45,54	C
2014	51,51	CC
2015	60,21	B
2016	62,58	B

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan nilai SAKIP Kota Bima, antara lain pelaksanaan sinkronisasi seluruh dokumen perencanaan, evaluasi kinerja internal, peningkatan komitmen Walikota dan seluruh pejabat eselon II hingga IV sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja setiap Tahunnya.

b) Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Status penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 yang diperoleh Kota Bima meningkat dari Tahun 2014 berstatus **Tinggi** menjadi **Sangat Tinggi** dengan capaian kinerja sebesar 119%. Bahwa meningkatnya status LPPD Kota Bima tersebut menunjukkan bahwa

kualitas data pendukung dan pelaksanaan pelayanan oleh SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut semakin baik. Adapun rincian perkembangan perolehan nilai selama 3 Tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.182: Daftar Nilai LPPD Kota Bima selama Tahun 2013-2015

Tahun	Nilai	Status
2013	2,5671	Tinggi
2014	2,8716	Tinggi
2015	3,5822	Sangat Tinggi

Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai LPPD pada Tahun ini antara lain komitmen pimpinan dan seluruh SKPD untuk melaporkan dan mendokumentasikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan LPPD. Selain itu untuk menunjang pencapaian indikator telah melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan secara nasional hingga daerah yang didukung oleh sistem penganggaran yang berbasis kinerja.

c) Produk Hukum dibahas dan mendapat persetujuan

Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2017 menargetkan rancangan Peraturan Daerah yang disahkan sebanyak 13 Perda dengan tingkat realisasi sebanyak 13 Perda. Adapun capaian kinerja indikator Tahun 2017 sebesar 100 %.Beberapa Perda yang telah berhasil mendapat persetujuan pada Tahun 2017 antara lain;

- 1) Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima;
- 2) Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana diubah dengan peraturan daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan pencatatan sipil ;

- 3) Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa Umum;
- 4) Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima;
- 5) Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air tanah;
- 6) Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan;
- 7) Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peranggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 8) Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bima;
- 9) Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang APBD Kota Bima Tahun 2016;
- 10) Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan kelurahan Jatibaru Timur;
- 11) Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan kelurahan Ule;
- 12) Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan kelurahan Oimbo;
- 13) Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Kota Bima Tahun 2018;

Penurunan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh kesibukan lembaga legislatif dan terjadinya perubahan struktur perangkat daerah dengan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

d) Pelayanan pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan pelayanan barang dan jasa di Kota Bima sebanyak 96 Paket dengan tingkat capaian indikator kinerja sebesar 96 %. Selama pelaksanaan Tahun anggaran Tahun 2017 Pemerintah Kota Bima telah menggunakan pelayanan pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi. Penggunaan sistem yang dikelola oleh LPSE dapat membantu

terwujudnya akuntabilitas pelayanan pengadaan barang dan jasa. Selain itu kurangnya jumlah paket dari target Tahun ini dipengaruhi oleh adanya pengurangan anggaran dan jumlah paket proyek yang seharusnya dilaksanakan.

e) Cakupan Produk Hukum disosialisasikan

Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2017 menargetkan 6 kali produk hukum yang disosialisasikan dengan terealisasi sebanyak 7 Perda. Adapun capaian kinerja indikatornya Tahun 2017 sebesar 100 %.

f) Jumlah Media Massa yang menjalin kemitraan dengan Pemerintah

Pada Tahun 2017 bahwa Pemerintah Kota Bima melaksanakan kemitraan dengan media massa sejumlah 41 media massa. Adapun tingkat pencapaian indikator kinerjanya mencapai 97,56%. Bahwa kontribusi media massa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi berbagai program pemerintah sangat besar, oleh karenanya pelaksanaan kemitraan dengan media massa kedepan akan diusahakan lebih optimal.

c. Permasalahan dan solusi

Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Peranan sekretariat yang begitu besar dan luas dilaksanakan oleh masing-masing sub bagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian, dan kepala bagian ini akan bertanggung jawab kepada asisten, dimana asisten-asisten ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah langsung. Permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Bima, antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas dan intensitas koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugasnya.
3. Kurangnya keterlibatan sumber daya aparatur dalam pelatihan dan pendidikan sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat.

4. Kurangnya Koordinasi dan penyelenggaraan kebijakan administrasi program dan pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2017 Sekretariat DPRD Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.780.450.000,00 untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan. Realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar Rp. 21.062.914.538,00 atau 96,71% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.183. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% realisasi
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.034.546.000,00	9.934.014.319,00	99,00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	328.000.000,00	311.113.722,00	94,85
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	65.000.000,00	58.663.047,00	90,25
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	200.320.000,00	195.891.000,00	97,79
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	138.100.000,00	133.635.000,00	96,77
5	Penyediaan alat tulis kantor	153.766.000,00	153.593.000,00	99,89
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	180.000.000,00	177.001.800,00	98,33
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	154.000.000,00	145.000.000,00	94,16
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	1.026.400.000,00	978.091.750,00	95,29
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.582.960.000,00	7.582.960.000,00	100,00
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	150.000.000,00	142.165.000,00	94,78

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% realisasi
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.586.404.000,00	1.556.643.842,00	98,12
1	Pembangunan gedung kantor	1.098.904.000,00	1.069.607.000,00	97,33
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.000.000,00	79.810.000,00	99,76
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	297.500.000,00	297.226.842,00	99,91
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
III	Program peningkatan disiplin aparatur	332.590.000,00	332.090.000,00	99,85
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	239.590.000,00	239.090.000,00	99,79
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	93.000.000,00	93.000.000,00	100,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.265.000.000,00	3.215.947.446,00	98,50
1	Konsultasi dan Studi Banding	2.865.000.000,00	2.861.598.546,00	99,88
2	Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah	400.000.000,00	354.348.900,00	88,59
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	124.750.000,00	124.750.000,00	100,00
1	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
2	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	71.500.000,00	71.500.000,00	100,00
3	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	39.750.000,00	39.750.000,00	100,00
VI	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	6.437.160.000,00	5.899.468.931,00	91,65
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	612.110.000,00	586.049.000,00	95,74
2	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	1.267.650.000,00	897.490.284,00	70,80
3	Rapat-rapat Paripurna	161.400.000,00	146.500.000,00	90,77
4	Kegiatan Reses	2.550.000.000,00	2.492.460.000,00	97,74
5	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.846.000.000,00	1.776.969.647,00	96,26
	Jumlah	21.780.450.000,00	21.062.914.538,00	96,71

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Output penting dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Pekantoran

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 10.034.546.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.934.014.319,00 atau 99,00%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun,
- b) Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk 8 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2 selama 1 tahun,
- c) Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun,
- d) Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun,
- e) Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun,
- f) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
- g) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun,
- h) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa 3 unit kulkas, 4 unit televisi, 5 unit printer, 2 unit meja kerja ½ biro, 1 unit meja tanda tangan, 2 unit lemari arsip, 2 unit rak buku, 1 unit camera digital, 1 unit CCTV dan 1 set kabel kontrol
- i) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun,
- j) Tersedianya makanan dan minuman untuk anggota DPRD, keamanan, makan minum rapat maupun makan minum tamu selama 1 tahun,
- k) Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun,
- l) Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 1 tahun

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.586.404.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.556.643.842,00 atau 98,12%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a. Terlaksananya rehabilitasi pagar dan pengaspalan halaman kantor DPRD,
- b. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 1 tahun,
- c. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebanyak 8 unit kendaraan roda dan 10 unit kendaraan roda 2 selama 1 tahun,
- d. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor berupa AC, Sound system, meubelair selama 1 tahun,
- e. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor berupa 10 unit computer, 10 unit laptop dan 10 unit printer selama 1 tahun.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 332.590.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 332.090.000,00 atau 99,85%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Tersedianya pakaian dinas (PSH, PDH, PDU dan tenun ikat) beserta perlengkapannya bagi 25 orang anggota DPRD sebanyak 100 Steel.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur dan anggota DPRD dalam hal berpakaian.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.265.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.215.947.446,00 atau 98,50%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Terlaksananya Konsultasi dan Studi Banding keluar daerah sebanyak 3 kali
- b) Terlaksananya Seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah (ADEKSI sebanyak 1 kali dan ASDEKSI sebanyak 1 kali)

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan anggota DPRD yang profesional.

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 124.750.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 124.750.000,00 atau 100%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen,
- b) Tersusunnya dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA sebanyak 4 dokumen,
- c) Tersusunnya dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD sebanyak 3 dokumen.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian kinerja program

6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.437.160.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.899.468.931,00 atau 91,65%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 48 kegiatan.
- b) Terlaksananya Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan sebanyak 20 Kali.
- c) Terlaksananya Kegiatan Reses anggota DPRD sebanyak 3 (tiga) kali.
- d) Terwujudnya Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD (Bimtek) sebanyak 2 kali.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terwujudnya Produktifitas Lembaga DPRD Kota Bima yang tinggi dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dalam memberntuk kebijakan daerah.

3. Kecamatan

Selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan juga dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan se Kota Bima dengan jumlah total pagu anggaran sebesar Rp. 8.504.088.800,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.8.354.186.082,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Dua Sen) atau 98,24%.

a. Kecamatan RasanaE Barat

Pada tahun 2017 Kecamatan RasanaE Barat dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.339.015.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.337.171.000,00 (99,92%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan RasanaE Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.184. Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan RasanaE Barat Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
A.	KECAMATAN RASANA E BARAT	2.339.015.100,00	2.337.171.000,00	99,92
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	653.967.000,00	652.322.300,00	99,75
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	67.440.000,00	67.423.550,00	99,98
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	23.429.500,00	21.875.000,00	93,37
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	68.670.000,00	68.670.000,00	100,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	32.780.000,00	32.780.000,00	100,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	94.099.250,00	94.099.250,00	100,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.398.250,00	22.397.500,00	100,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.225.000,00	29.225.000,00	100,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.980.000,00	7.975.000,00	99,94
9	Penyediaan bahan logistik kantor	22.760.000,00	22.760.000,00	100,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	56.945.000,00	56.880.300,00	99,89
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	195.000.000,00	194.996.700,00	100,00
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	33.240.000,00	33.240.000,00	100,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138.046.300,00	137.980.800,00	99,95
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	54.566.300,00	54.566.000,00	100,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	57.680.000,00	57.614.800,00	99,89
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.800.000,00	25.800.000,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
III	Program peningkatan disiplin aparatur	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.936.000,00	30.936.000,00	100,00
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	9.976.000,00	9.976.000,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.451.000,00	5.451.000,00	100,00
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	15.509.000,00	15.509.000,00	100,00
V	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	487.356.300,00	487.327.400,00	99,99
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	248.700.000,00	248.700.000,00	100,00
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	238.656.300,00	238.627.400,00	99,99
VI	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
1	Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
VII	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	629.339.500,00	629.239.500,00	99,98
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	136.000.500,00	136.000.500,00	100,00
2	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	122.544.000,00	122.544.000,00	100,00
3	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ	277.745.000,00	277.745.000,00	100,00
4	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	73.930.000,00	73.830.000,00	99,86
5	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	19.120.000,00	19.120.000,00	100,00
VIII	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	163.100.000,00	163.095.000,00	100,00
1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	163.100.000,00	163.095.000,00	100,00
IX	Program peningkatan sarana/prasarana dan penataan administrasi pemerintah kelurahan	34.502.000,00	34.502.000,00	100,00
1	Penyusunan profil kelurahan	34.502.000,00	34.502.000,00	100,00
X	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	66.768.000,00	66.768.000,00	100,00
1	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	33.384.000,00	33.384.000,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
2	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	33.384.000,00	33.384.000,00	100,00
XI	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
1	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan :

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. Output dari kegiatan ini adalah optimalisasi tugas dan fungsi RT, RW dan LPM sebanyak 6 kelurahan di Kecamatan RasanaE Barat
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya biaya operasional motor sampah yang ada di tingkat kelurahan yang ada di kecamatan RasanaE Barat sebanyak 6

2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan :

Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 6 kelurahan di Kecamatan RasanaE Barat

3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan :

- Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di 6 kelurahan dan kecamatan.
- Pelaksanaan Lomba Kelurahan Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di 6 kelurahan dan kecamatan.
- Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya lomba STQ/MQ di 6 kelurahan dan kecamatan.

- Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga. . Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan PKK di 6 kelurahan dan kecamatan
- Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kecamatan RasanaE Barat.

4. **Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**dengan kegiatan :

Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan.Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat di 6 kelurahan di kecamatan RasanaE Barat

5. **Program peningkatan sarana/prasaranan dan penataanadministrasi pemerintah kelurahan**dengan kegiatan :

Penyusunan Profil Kelurahan. . Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya profil kelurahan di 6 kelurhandi kecamatan RasanaE Barat

6. **Program Penataan Daerah Otonomi Baru**dengan kegiatan :

- Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan. Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan di kecamatan RasanaE Barat.
- Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan . Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di kecamatan RasanaE Barat

7. **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**dengan kegiatan :

Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kgiatan kelurahan siaga di 6 kelurahan di kecamatan RasanaE Barat

b. Kecamatan RasanaE Timur

Pada tahun 2017 Kecamatan RasanaE Timur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.904.086.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.877.774.515,00 (98,62%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan RasanaE Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.185. Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan RasanaE Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
	KECAMATAN RASANA E TIMUR	1.904.086.300,00	1.877.774.515,00	98,62
I	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	302.802.400,00	300.360.000,00	99,19
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	102.352.200,00	101.197.000,00	98,87
2	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	109.922.000,00	109.722.000,00	99,82
3	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	77.853.200,00	77.116.000,00	99,05
4	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	12.675.000,00	12.325.000,00	97,24
II	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	688.670.800,00	669.679.215,00	97,24
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	29.430.000,00	26.731.515,00	90,83
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.322.400,00	14.420.000,00	88,34
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	127.945.600,00	114.205.000,00	89,26
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	49.650.000,00	49.650.000,00	100,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	114.815.450,00	114.815.300,00	100,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.742.350,00	37.740.500,00	100,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.165.000,00	23.716.500,00	98,14
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.560.000,00	7.490.000,00	99,07
10	Penyediaan makanan dan minuman	36.160.000,00	36.160.000,00	100,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	174.700.000,00	174.600.400,00	99,94
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	62.680.000,00	62.650.000,00	99,95
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	179.738.800,00	175.637.000,00	97,72
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	22.975.000,00	22.975.000,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	48.250.000,00	44.250.000,00	91,71
3	Pengadaan mebeleur	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.625.000,00	21.533.000,00	99,57
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	58.388.800,00	58.383.000,00	99,99
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.500.000,00	17.496.000,00	99,98
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.600.000,00	17.600.000,00	100,00
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.425.000,00	3.425.000,00	100,00
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	5.525.000,00	5.525.000,00	100,00
4	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
V	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	56.280.000,00	56.070.000,00	99,63
1	Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	56.280.000,00	56.070.000,00	99,63
VI	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	81.620.000,00	81.620.000,00	100,00
1	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	3.620.000,00	3.620.000,00	100,00
2	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00
VII	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Masyarakat	307.065.300,00	307.065.300,00	100,00
1	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ	307.065.300,00	307.065.300,00	100,00
VIII	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	184.174.500,00	183.610.000,00	99,69
1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	114.174.500,00	113.610.000,00	99,51
2	Unit kegiatan bersumber daya masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
IX	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	86.134.500,00	86.133.000,00	100,00
1	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	80.634.500,00	80.633.000,00	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan :

- Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di 7 kelurahan dan kecamatan.
- Pelaksanaan Lomba Kelurahan Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di 7 kelurahan dan kecamatan.
- Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga. . Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan PKK di 7 kelurahan dan kecamatan
- Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kecamatan RasanaE Timur.

2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan :

Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 7 kelurahan di Kecamatan RasanaE Timur

3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan :

- Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan. Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan di kecamatan RasanaE Timur.
- Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan . Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di kecamatan RasanaE Timur

4. Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan dengan kegiatan :

Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ.Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya lomba STQ/MQ di 7 kelurahan dan kecamatan.

5. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan kegiatan :

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan. Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat di 7 kelurahan di kecamatan RasanaE Timur
 - Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan kelurahan siaga di 7 kelurahan di kecamatan RasanaE Timur
6. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** dengan kegiatan :
- Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan informasi kependudukan di 7 kelurahan di kecamatan RasanaE Timur
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya biaya operasional motor sampah yang ada di tingkat kelurahan yang ada di kecamatan RasanaE Timur sebanyak 7 kelurahan.

c. Kecamatan Asakota

Pada tahun 2017 Kecamatan Asakota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 685.374.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 630.083.100,00 (91,93%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Asakota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.186. Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Asakota Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
	KECAMATAN ASAKOTA	685.374.200,00	630.083.100,00	91,93
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	540.766.100,00	504.311.000,00	93,26
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.048.000,00	12.550.300,00	41,77
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.500.000,00	11.813.000,00	76,21

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	93.492.700,00	90.926.400,00	97,26
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	31.250.100,00	31.250.100,00	100,00
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	62.921.600,00	60.182.400,00	95,65
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.470.700,00	19.672.400,00	91,62
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.334.500,00	11.334.500,00	100,00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.050.000,00	20.050.000,00	100,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000,00	2.500.000,00	69,44
11	Penyediaan makanan dan minuman	28.682.500,00	22.846.000,00	79,65
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	138.916.000,00	138.845.900,00	99,95
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	68.000.000,00	66.840.000,00	98,29
14	Penyediaan Jasa Kebersihan Halaman Kantor	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	104.229.600,00	85.393.600,00	81,93
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.400.000,00	7.550.000,00	72,60
2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2.045.000,00	2.045.000,00	100,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.774.200,00	27.250.600,00	91,52
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	54.710.400,00	41.251.000,00	75,40
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.300.000,00	7.297.000,00	99,96
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	18.570.500,00	18.570.500,00	100,00
1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	16.270.500,00	16.270.500,00	100,00
2	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
IV	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	21.808.000,00	21.808.000,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
1	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	9.958.000,00	9.958.000,00	100,00
2	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat	11.850.000,00	11.600.000,00	97,89

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Untuk kecamatan Asakota, seperti yang tergambar pada table tersebut diatas bahwa selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang masuk dalam Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan adalah :

Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan :

- Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan. Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan di kecamatan Asakota.
- Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat . Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat di kecamatan Asakota

d. Kecamatan Mpunda

Pada tahun 2017 Kecamatan Mpunda dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.266.607.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.205.192.916,00 (97,29%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mpunda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.187. Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Mpunda Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
	KECAMATAN MPUNDA	2.266.607.100,00	2.205.192.916,00	97,29
I	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	867.782.000,00	865.710.000,00	99,76

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	139.237.000,00	139.030.000,00	99,85
2	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	202.926.000,00	201.061.000,00	99,08
3	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
4	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	115.619.000,00	115.619.000,00	100,00
5	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
II	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	716.458.800,00	672.729.516,00	93,90
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	78.855.500,00	64.072.052,00	81,25
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.850.000,00	14.774.300,00	87,68
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	153.059.000,00	144.297.000,00	94,28
4	Penyediaan alat tulis kantor	123.644.000,00	121.330.750,00	98,13
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.318.500,00	26.318.500,00	100,00
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23.299.700,00	23.294.600,00	99,98
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.280.000,00	13.675.000,00	95,76
8	Penyediaan bahan logistik kantor	12.723.100,00	12.723.100,00	100,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	51.980.000,00	48.269.000,00	92,86
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	186.289.000,00	179.585.214,00	96,40
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	29.160.000,00	24.390.000,00	83,64
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	320.923.000,00	306.143.350,00	95,39
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	129.413.000,00	120.165.000,00	92,85
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	121.859.000,00	120.957.000,00	99,26
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.877.000,00	41.309.350,00	90,04
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	23.774.000,00	23.712.000,00	99,74
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	62.894.300,00	62.860.300,00	99,95
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.614.000,00	3.614.000,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.460.300,00	4.460.300,00	100,00
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	32.886.500,00	32.852.500,00	99,90
4	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	21.933.500,00	21.933.500,00	100,00
V	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	99.850.000,00	99,85
1	Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	99.850.000,00	99,85
VI	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	44.270.500,00	44.270.500,00	100,00
1	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	22.412.000,00	22.412.000,00	100,00
2	Pendataan / Penyusunan Potensi Kecamatan serta Inventarisasi Proyek Masuk Kelurahan	21.858.500,00	21.858.500,00	100,00
VII	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	154.278.500,00	153.629.250,00	99,58
1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	154.278.500,00	153.629.250,00	99,58

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Untuk kecamatan Asakota, seperti yang tergambar pada table tersebut diatas bahwa selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang masuk dalam Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan adalah :

1. **Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa** dengan kegiatan :

- Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di 10 kelurahan dan kecamatan.
- Pelaksanaan Lomba Kelurahan Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di 106 elurahan dan kecamatan.
- Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya lomba STQ/MQ di 10 kelurahan dan kecamatan.

- Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga. . Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan PKK di 10 kelurahan dan kecamatan
- Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kecamatan Mpunda

2. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** dengan kegiatan :

Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 10 kelurahan di Kecamatan Mpunda.

3. **Program Penataan Daerah Otonomi Baru** dengan kegiatan :

- Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan. Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan di kecamatan Mpunda.
- Pendataan / Penyusunan Potensi Kecamatan serta Inventarisasi Proyek Masuk Kelurahan. Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pendataan / Penyusunan Potensi Kecamatan serta Inventarisasi Proyek Masuk Kelurahan di kecamatan Mpunda.

4. **Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan** dengan kegiatan :

Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan.Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat di 10 kelurahan di kecamatan Mpunda.

e. **Kecamatan Raba**

Pada tahun 2017 Kecamatan Raba dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.309.006.100,00dengan realisasi sebesar Rp. 1.303.964.551,00(99,61%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Raba dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.188. Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Raba Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
	KECAMATAN RABA	1.309.006.100,00	1.303.964.551,00	99,61
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	825.123.100,00	820.081.801,00	99,39
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	52.340.000,00	48.757.887,00	93,16
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19.175.000,00	17.846.200,00	93,07
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	118.500.000,00	118.500.000,00	100,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	45.878.000,00	45.878.000,00	100,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	178.803.750,00	178.803.500,00	100,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.736.750,00	53.736.750,00	100,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	31.244.500,00	31.244.500,00	100,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.060.000,00	8.060.000,00	100,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	45.590.000,00	45.590.000,00	100,00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	227.215.100,00	227.214.964,00	100,00
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	44.580.000,00	44.450.000,00	99,71
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	231.933.000,00	231.932.750,00	100,00
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	89.000.000,00	89.000.000,00	100,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	69.250.000,00	69.250.000,00	100,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.983.000,00	52.982.750,00	100,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.700.000,00	20.700.000,00	100,00
III	Program peningkatan disiplin aparatur	42.380.000,00	42.380.000,00	100,00
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	11.380.000,00	11.380.000,00	100,00
2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	51.450.000,00	51.450.000,00	100,00
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	28.250.000,00	28.250.000,00	100,00
4	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00
V	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00
1	Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00
VI	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	48.120.000,00	48.120.000,00	100,00
1	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat	48.120.000,00	48.120.000,00	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Untuk kecamatan Asakota, seperti yang tergambar pada table tersebut diatas bahwa selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang masuk dalam Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan adalah :

1. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** dengan kegiatan :
Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 10 kelurahan di Kecamatan Raba.
5. **Program Penataan Daerah Otonomi Baru** dengan kegiatan :
Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat . Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat di kecamatan Raba.

PENGAWASAN

a. Inspektorat Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2017 Inspektorat Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **3.474.311.250,00** (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk melaksanakan

urusan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan. Realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar Rp. **3.403.719.091,00** (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau 97,97% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.189. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	912.428.250,00	910.770.999,00	99,82
1	Penyediaan jasa surat menyurat	51.525.000,00	51.075.000,00	99,13
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.500.000,00	17.868.428,00	96,59
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.600.000,00	6.580.000,00	99,70
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	500.000,00	362.000,00	72,40
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	63.735.000,00	63.712.000,00	99,96
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	51.588.000,00	51.584.000,00	99,99
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000,00	11.993.000,00	99,94
8	Penyediaan alat tulis kantor	44.383.500,00	44.382.000,00	100,00
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54.000.000,00	53.994.500,00	99,99
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	45.240.000,00	45.240.000,00	100,00
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.500.000,00	11.470.000,00	99,74
12	Penyediaan makanan dan minuman	48.500.000,00	48.494.500,00	99,99
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	504.356.750,00	504.015.571,00	99,93
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	42.430.000,00	42.329.197,00	99,76
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	16.330.000,00	16.330.000,00	100,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.000.000,00	8.996.000,00	99,96
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17.100.000,00	17.003.197,00	99,43
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36.750.000,00	36.750.000,00	100,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	19.600.000,00	19.600.000,00	100,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2	Pengadaan pakaian olah raga	17.150.000,00	17.150.000,00	100,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	111.800.000,00	100.569.428,00	89,95
1	Pendidikan dan pelatihan formal	96.000.000,00	84.792.228,00	88,33
2	Pelaksanaan Penilaian AKJG	15.800.000,00	15.777.200,00	99,86
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	136.217.500,00	105.385.000,00	77,37
1	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12.725.000,00	11.951.000,00	93,92
2	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	34.040.000,00	33.268.000,00	97,73
3	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	21.500.000,00	20.483.000,00	95,27
4	Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	24.335.000,00	23.978.000,00	98,53
5	Review LAKIP Kota Bima	16.205.000,00	15.705.000,00	96,91
6	Review RKA	27.412.500,00	-	0,00
VI	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	37.664.251,00	37.518.751,00	99,61
1	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	37.664.251,00	37.518.751,00	99,61
VII	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.993.416.337,00	1.985.546.502,00	99,61
1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	767.550.000,00	762.380.000,00	99,33
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	286.106.128,00	285.996.128,00	99,96
3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	281.250.000,00	280.952.000,00	99,89
4	Inverisasi temuan pengawasan	23.585.000,00	23.286.000,00	98,73
5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	341.625.000,00	340.325.000,00	99,62
6	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	142.010.209,00	141.987.874,00	99,98
7	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	32.575.000,00	31.950.000,00	98,08
8	Pemantauan LHKASN	118.715.000,00	118.669.500,00	99,96
VIII	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	133.764.912,00	127.226.214,00	95,11

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	53.365.000,00	50.855.000,00	95,30
2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	56.399.912,00	56.399.912,00	100,00
3	Bimtek pengawasan operasional	24.000.000,00	19.971.302,00	83,21
IX	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	42.140.000,00	37.633.000,00	89,30
1	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	42.140.000,00	37.633.000,00	89,30
X	Program mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat	27.700.000,00	19.990.000,00	72,17
1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	27.700.000,00	19.990.000,00	72,17
Jumlah		3.474.311.250,00	3.403.719.091,0	97,97

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Output penting dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Pekantoran

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 912.428.250,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 910.770.999,00 atau sebesar 99,827%

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Pemenuhan kebutuhan surat menyurat selama 12 bulan,
- b) Pemenuhan kebutuhan untuk komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan,
- c) Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
- d) Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan,
- e) Pelaksanaan penatausahaan keuangan selama 12 bulan
- f) Pelaksanaan kebersihan kantor selama 12 bulan,
- g) Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan,
- h) Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan
- i) Pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan dan dokumen selama 12 bulan

- j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa Scanner 1 unit dan laptop 5 unit.
- k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan
- l) Penyediaan makanan dan minuman harian tamu selama 12 bulan,
- m) Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pengawasan sebanyak 15 kali setiaptahun.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 42.430.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.329.197,00 atau sebesar 99,76%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Penyediaan peralatan kantor berupa AC sebanyak 2 unit
- b) Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 1 tahun
- c) Penyediaan pemeliharaan dinas/operasional selama 1 tahun

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 36.750.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.750.000,00 atau sebesar 100%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas 59 paket
- b) Pelaksanaan pengadaan pakaian olah raga 59 paket

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 111.800.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.569.428,00 atau sebesar 89,95%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- c) Terlaksananya diklat fungsional auditor ahli sebanyak 21 orang,
- d) Terlaksananya penilaian AKJG bagi 3 orang tenaga fungsional,

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah peningkatan sumber daya aparatur melalui diklat jabatan fungsional.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 136.217.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 105.385.000,00 atau sebesar 77,37%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Dokumen laporan keuangan akhir tahun lingkup Inspektorat Kota Bima sebanyak 1 (satu) dokumen.
- b) Dokumen perencanaan lingkup Inspektorat Kota Bima sebanyak 4 (empat) jenis dokumen, yang terdiri dari dokumen Renja SKPD, dokumen DPA SKPD, dokumen DPPA SKPD dan dokumen RKA SKPD.
- c) Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD lingkup Inspektorat Kota Bima masing-masing sebanyak 1 (satu) dokumen.
- d) Pelaksanaan evaluasi terhadap LAKIP Pemerintah Kota Bima.
- e) Pelaksanaan reviu LAKIP Pemerintah Kota Bima
- f) Pelaksanaan reviu RKA OPD Pemerintah Kota Bima

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: Meningkatnya kualitas pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta peningkatan kualitas perencanaan SKPD lingkup Inspektorat Kota Bima dalam rangka terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 37.664.251,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.518.751,00 atau sebesar 99,61%.

Pada program ini ada satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah SKPD dapat membuat Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dan SPIP.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.993.416.337,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.985.546.502,00 atau sebesar 99,61%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala terhadap obrik selama 1 tahun.
- b) Pelaksanaan Penanganan kasus pengaduan masyarakat sebanyak 45 obrik setiap 1 tahun
- c) Pelaksanaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah TP4D Kota Bima selama 1 tahun
- d) Pelaksanaan inventarisasi temuan pengawasan 1 selama 1 tahun
- e) Pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut LHP terhadap 80 obrik selama 12 bulan
- f) Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang lebih komprehensif selama 1 tahun
- g) Pelaksanaan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 80 obrik selama 1 tahun
- h) Pelaksanaan monitoring LHKASN pada OPD lingkup Pemerintah Kota Bima

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah menurunnya tingkat kerugian daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

8) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 133.764.912,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 127.226.214,00 atau sebesar 95,11%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

6. Pelaksanaan pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur setiap tahun.
7. Pelaksanaan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja setiap tahun.
8. Pelaksanaan bintek pengawasan operasional dalam satu tahun

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan.

9) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 42.140.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.633.000,00 atau sebesar 89,30%.

Pada program ini dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Adapun Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut tersusunnya akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sebanyak 1 dokumen

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pelayanan dalam pengawasan sesuai dengan standar baku pengawasan.

10) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 27.700.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.990.000,00 atau sebesar 72,17%.

Pada program ini dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Adapun Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut pelaksanaan pembentukan unit penanganan pengaduan masyarakat.

Hasil (outcome) dari terbentuknya unit yang menangani pengaduan masyarakat.

b. Perencanaan Dan Penelitian Pengembangan

Urusan perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.946.217.800,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.920.886.693,00 atau sebesar 99,63 %.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan wajib perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bima melalui sejumlah program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.189. Program/ Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.500.816.927,00	1.493.801.671,00	99,53
1	Penyediaan jasa surat menyurat	57.330.000,00	57.280.000,00	99,91
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.300.000,00	39.296.161,00	86,75
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.100.000,00	14.100.000,00	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	80.730.000,00	80.730.000,00	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	100
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	36.450.000,00	36.450.000,00	100
7	Penyediaan alat tulis kantor	86.040.000,00	86.040.000,00	100
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65.600.000,00	65.600.000,00	100
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.979.000,00	20.979.000,00	100
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	75.450.000,00	75.240.000,00	99,72
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65.500.000,00	65.500.000,00	100
12	Penyediaan makanan dan minuman	108.000.000,00	108.000.000,00	100
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	795.132.927,00	794.771.510,00	99,95
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	49.005.000,00	48.615.000,00	99,20
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	358.356.000,00	358.301.000,00	99,98
1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	91.160.000,00	91.160.000,00	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	148.500.000,00	148.445.000,00	99,96
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	118.696.000,00	118.696.000,00	100
III	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	0,00	0
1	Pengadaan Pakaian Olah Raga	0,00	0,00	0
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	334.309.500,00	334.309.500,00	100
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	75.683.000,00	75.683.000,00	100
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	37.978.000,00	37.978.000,00	100
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	56.065.500,00	56.065.500,00	100
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	100.283.000,00	100.283.000,00	100
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	64.300.000,00	64.300.000,00	100
V	Program pengembangan data/informasi	138.793.300,00	138.718.077,00	99,94
1	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	102.253.300,00	102.178.077,00	99,93
2	Pelayanan Pendataan Ijin Penelitian	36.540.000,00	36.540.000,00	100
VI	Program Kerjasama Pembangunan	602.650.000,00	602.060.240,00	99,90
1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	207.335.000,00	207.278.273,00	99,97
2	Koordinasi Program NUSP - Phase 2	97.665.000,00	97.387.973,00	99,72

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
3	Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah	297.650.000,00	297.393.994,00	99,91
VII	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	589.800.000,00	586.233.495,00	99,39
1	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	88.000.000,00	88.000.000,00	100
2	Perencanaan Pengembangan Kota Hijau	345.800.000,00	343.778.623,00	99,42
3	Penyusunan KLHS RPJMD	156.000.000,00	154.454.872,00	99,01
VIII	Program perencanaan pembangunan daerah	1.971.618.572,00	1.967.941.409,00	99,81
1	Penyusunan rancangan RKPD	181.586.868,00	181.586.868,00	100
2	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	464.269.705,00	464.269.705,00	100
3	Penetapan RKPD	161.453.500,00	161.453.500,00	100
4	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	210.668.000,00	210.668.000,00	100
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	154.446.000,00	153.741.336,00	99,54
6	Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	200.000.000,00	197.946.769,00	98,97
7	Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	29.564.500,00	29.564.500,00	100
8	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	122.025.000,00	121.673.325,00	99,71
9	Rivew Perda RPJMD	250.000.000,00	249.744.635,00	99,90
10	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50.000.000,00	49.921.303,00	99,84
11	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	33.975.000,00	33.829.000,00	99,57
12	E - Planning	113.630.000,00	113.542.468,00	99,92
IX	Program perencanaan pembangunan ekonomi	245.950.000,00	244.770.000,00	99,52
1	Pengembangan Ekonomi Lokal	86.650.000,00	86.510.000,00	99,84
2	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100.000.000,00	100.000.000,00	100
3	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	59.300.000,00	58.260.000,00	98,25
XI	Program perencanaan sosial dan budaya	754.938.500,00	749.812.797,00	99,32
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	362.236.205,00	357.127.700,00	98,59
2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	77.779.271,00	77.769.271,00	99,99
3	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	130.707.198,00	130.700.000,00	99,99
4	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	87.352.826,00	87.352.826,00	100
5	Penyusunan Profil Kelurahan	96.863.000,00	96.863.000,00	100
XII	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	448.985.000,00	444.938.504,00	99,09
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi	351.150.000,00	347.113.504,00	98,85
2	Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	49.985.000,00	49.975.000,00	99,98
3	Pemetaan Teknologi Tepat Guna	47.850.000,00	47.850.000,00	100

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
Jumlah Anggaran		6.946.217.800,00	6.920.886.693,00	99,63

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis urusan perencanaan pembangunan ini menghasilkan beberapa keluaran (*output*) penting, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.190. Output Program/Kegiatan Perencanaan Sektor Strategis

No	Program/Kegiatan	Output
1	2	3
1	• Penyusunan rancangan RKPD	Dokumen Rancangan RKPD
2	• Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Forum musrenbang RKPD
3	• Penetapan RKPD	Perwali tentang RKPD Kota Bima
4	• Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota Bima Tahun 2016
5	• Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dokumen Laporan Triwulan
6	• Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	Rapat koordinasi DBH Cukai Tembakau dan Sosialisasi DBH Cukai Tembakau
7	• Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	Pengendalian tugas pembantuan oleh Tim
8	• Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Rapat koordinasi Penanaman Modal dan Litbang
9	• Sinkronisasi dan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Review dokumen perencanaan OPD bidang koordinasi pembangunan ekonomi
10	• Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
11	• Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Prasarana, SDA, dan Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Prasarana, SDA, dan Ekonomi
12	• Reviu PERDA RPJMD	Review dokumen PERDA RPJMD
13	• Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dokumen Laporan triwulan
14	• Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	Dokumen rencana umum penelitian dan pengembangan Kota Bima
15	• E-Planning	Bimtek E - Palnning
16	• Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen Laporan
17	• Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan
18	• Penyusunan Rencana Kerja/RKA/DPA/DPPA SKPD	Dokumen Laporan

No	Program/Kegiatan	Output
1	2	3
19	• Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	Dokumen program penanggulangan kemiskinan di Kota Bima
20	• Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Rapat koordinasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan
21	• Pengembangan Ekonomi Lokal	Rapat koordinasi
22	• Sinkronisasi dan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Review dokumen perencanaan OPD bidang koordinasi pembangunan ekonomi
23	• Sinkronisasi dan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Review dokumen perencanaan OPD bidang koordinasi pembangunan Sosial Budaya
24	• Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah	Dokumen
25	• Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Rapat koordinasi dan sosialisasi percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)
26	• Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dokumen laporan
27	• Koordinasi Program NUSP - Phase 2	Rapat koordinasi NUSP – phase 2

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kota Bima Tahun 2017

Keuangan

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pembangunan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan tahun 2017 didukung oleh 3 program dan 37 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 14.860.647.155,- terealisasi sebesar Rp. 14.479.137.401,- atau 97,43%. Adapun realisasi program dan kegiatan BPKAD Kota Bima Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.191. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Kota Bima Tahun 2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.984.964.298	2.899.564.183	97,14
	Penyediaan jasa surat menyurat	67.720.000	54.547.747	80,55
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	48.000.000	38.610.695	80,44
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	66.700.000	47.340.399	70,98
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	469.752.000	444.028.350	94,52
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.950.000	29.843.000	96,42
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	79.000.000	78.945.000	99,93

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penyediaan alat tulis kantor	296.800.000	296.554.000	99,92
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	161.250.000	161.248.350	100,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	11.000.000	10.994.247	99,95
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantoe	189.608.000	182.108.000	96,04
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	57.000.000	52.260.000	91,68
	Penyediaan makan dan minum	468.900.000	465.001.867	99,17
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	914.254.298	914.212.528	100,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	124.030.000	123.870.000	99,87
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	442.872.800	424.149.135	95,77
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	54.000.000	48.720.000	90,22
	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.000.000	10.500.000	95,45
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	277.872.800	264.929.135	95,34
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000	50.000.000	100,00
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	50.000.000	50.000.000	100,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem	1.032.650.626	989.074.694	95,78
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	72.960.151	72.960.000	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	179.309.000	177.562.100	99,03
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	130.170.626	130.161.626	99,99
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	457.985.849	416.181.068	90,87
	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	131.850.000	131.834.900	99,99
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	60.375.000	60.375.000	100,00
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan	6.038.986.776,15	5.929.425.621	98,19
	penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	1.287.842.000	1.281.950.766	99,54
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	232.464.000	232.444.000	99,99
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	945.876.500	943.334.500	99,73
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran	383.876.500	383.311.950	99,85
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang	157.779.093	157.665.143	99,93
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran	116.543.876	115.784.376	99,36

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penyusunan Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah	221.360.000	209.660.000	94,71
	Bimbingan Teknis implementasi paket regulasi tentang	128.888.000	91.228.104	70,78
	Pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	29.765.000	29.465.000	98,99
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pedoman anggaran	411.545.000	410.045.000	99,64
	Pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah	1.168.384.700	1.151.120.000	98,52
	Penyusunan laporan DAK	96.000.000	96.000.000	100,00
	Pelaksanaan penata usahaan gaji pegawai	367.180.000	366.340.182	99,77
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	220.994.107	200.136.100	90,56
	Pelaksanaan Proses TPTGR Aset/Barang Milik Daerah	270.497.000	260.940.500	96,47
6	Program Peningkatan pengelolaan aset/barang milik	1.600.490.039	1.585.453.203	99,06
	Penyusunan sistem dan prosedur aset/barang daerah	200.871.039	200.816.400	99,97
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	279.766.000	279.185.100	99,79
	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	104.500.000	100.581.300	96,25
	penyusunan data inventarisasi daerah	335.727.000	331.609.600	98,77
	Pendataan ulang/pemutahiran kepemilikan, penggunaan, dan	92.843.000	92.733.000	99,88
	Penyusunan laporan tahunan aset/barang daerah	93.725.000	93.222.600	99,46
	Penyusunan analisa kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan	144.220.000	142.225.300	98,62
	Pemindah tangganan Barang Milik Daerah	240.080.000	239.928.000	99,94
	Bimbingan Teknis SIMDA BMD	108.758.000	105.151.903	96,68
7	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan	2.810.682.616	2.704.470.565	96,22
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan	100.558.000	100.318.500	99,76
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan	206.585.700	201.765.606	97,67
	Sosialisasi dan pembekalan jurupungut PBB	78.849.000	78.296.500	99,30
	Penagihan PBB pada seluruh kelurahan	539.577.500	537.993.000	99,71
	Pendataan ulang/pemutahiran data PBB sektor perkotaan	281.964.250	278.155.473	98,65
	Pengelolaan dan Penagihan Pajak daerah/Retribusi daerah/sewa	325.009.000	321.835.938	99,02
	Pemeliharaan Data dan system PBB	240.500.000	236.072.600	98,16
	Sosialisasi pajak daerah dan Retribusi daerah	90.201.000	81.565.450	90,43

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Uji petik terhadap objek pajak dan retribusi daerah	57.235.666	42.010.000	73,40
	Pendapatan Objek pajak dan retribusi daerah dan lain-lain	199.578.000	186.894.109	93,64
	penetapan objek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan	206.089.000	201.066.999	97,56
	Penata usahaan/rekonsiliasi pendapatan daerah	392.493.000	349.438.390	89,03
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah	92.042.500	89.058.000	96,76
	TOTAL	14.910.656.155	14.532.137.401	97,46

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Adapun realisasi pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah, didukung oleh 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.038.986.776,15 dan terealisasi sebesar Rp. 5.929.425.621,00 atau 98,19% dari total anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan dari program ini yaitu:

- a) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.287.842.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.281.950.766,00 atau mencapai 99,54%. Output kegiatan ini yaitu dokumen Rancangan PERDA APBD 2017.
- b) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 232.464.000,15 terealisasi sebesar Rp. 232.444.000,00 atau mencapai 99,99%. Output kegiatan ini yaitu Peraturan walikota tentang penjabaran APBD 2017.
- c) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 945.876.500,00 terealisasi sebesar Rp. 943.334.500,00 atau mencapai 99,73%, output kegiatan ini yaitu dokumen PERDA tentang Perubahan APBD 2017.
- d) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 383.876.500,00 terealisasi sebesar Rp. 383.311.950,00 atau mencapai 99,85%, output kegiatan ini yaitu dokumen PERWALI tentang penjabaran perubahan APBD 2017.
- e) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 157.779.093,00 terealisasi sebesar Rp. 157.665.143,00 atau mencapai 99,93%, output

kegiatan ini yaitu dokumen raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.

- f) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.534.876,00 terealisasi sebesar Rp. 115.784.376,00 atau mencapai 99,36%, output kegiatan ini yaitu dokumen perwali tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.
- g) Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 221.360.000,00 terealisasi sebesar Rp. 209.660.000,00 atau mencapai 94,71%, output kegiatan ini yaitu Dokumen SIKD.
- h) Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.888.000,00 terealisasi sebesar Rp. 91.228.104,00 atau mencapai 70,78%, output kegiatan ini yaitu terlaksananya bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah (akuntansi) terhadap 180 peserta.
- i) Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.765.000,00 terealisasi sebesar Rp. 29.465.000,00 atau mencapai 98,99%, output kegiatan ini yaitu laporan penyertaan modal pemerintah daerah.
- j) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pedoman anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 411.545.000,00 terealisasi sebesar Rp. 410.045.000,00 atau mencapai 99,64%, output kegiatan ini yaitu dokumen Perwali tentang pedoman anggaran.
- k) Pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.168.384.700,00 terealisasi sebesar Rp. 1.151.120.000,00 atau mencapai 98,52%, output kegiatan ini yaitu terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan daerah.
- l) Penyusunan laporan DAK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 96.000.000,00 atau mencapai 100%, output kegiatan ini yaitu terlaksananya pelaporan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.
- m) Pelaksanaan penata usahaan gaji pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 367.180.000,00 terealisasi sebesar Rp. 366.340.182,00 atau

mencapai 99,77%, output kegiatan ini yaitu terlaksananya penatausahaan gaji pegawai (12 bulan dan 12 laporan).

- n) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.994.107,00 terealisasi sebesar Rp. 200.136.100,00 atau mencapai 90,56 %, output kegiatan ini yaitu laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan dan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- o) Pelaksanaan proses TPTGR Aset/Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 270.497.000,00 terealisasi sebesar Rp. 260.940.500,00 atau mencapai 96,47%, output kegiatan ini yaitu penyelesaian kasus kerugian daerah melalui kegiatan sidang kasus kerugian daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi penyelesaian kerugian daerah (APH, BPKP dan BPK).

2) Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah, didukung oleh 9 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.600.490.039,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.585.453.203,00 atau 99,06% dari total anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan dari program ini yaitu:

- a) Penyusunan sistem dan prosedur Aset/Barang daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.871.039,00 terealisasi sebesar Rp. 200.816.400,00 atau mencapai 99,97%, output kegiatan ini yaitu Perda Pengelolaan BMD.
- b) Peningkatan manajemen aset/barang daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 279.766.000,00 terealisasi sebesar Rp. 279.185.100,00 atau mencapai 99,79%, output kegiatan ini yaitu dokumen Laporan Tahunan Aset/Barang Daerah.
- c) Revaluasi/appraisal aset/barang daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 104.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 100.581.300,00 atau mencapai 96,25%, output kegiatan ini yaitu laporan pemanfaatan barang milik daerah.
- d) Penyusunan data inventarisasi aset daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 335.727.000,00 terealisasi sebesar Rp. 331.609.600,00 atau mencapai 98,77%, output kegiatan ini yaitu Dokumen hasil pendataan BMD hasil serah terima/hibah pusat/provinsi/pihak ketiga, laporan cek fisik pemasangan KIR dan stiker barang SKPD, laporan Inventarisasi BMD

terkait perubahan struktur organisasi dan laporan penertiban penggunaan BMD.

- e) Pendataan ulang/pemutakhiran kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan bangunan pemerintah kota bima dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.843.000,00 terealisasi sebesar Rp. 92.733.000,00 atau mencapai 99,88%, output kegiatan ini yaitu 3 dokumen (laporan penertiban pemanfaatan barang milik pemerintah daerah, laporan pemasangan plang kepemilikan tanah dan laporan hasil pendataan gedung/bangunan milik pemerintah Kota Bima).
 - f) Penyusunan laporan tahunan aset/barang daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.725.000,00 terealisasi sebesar Rp. 93.222.600,00 atau mencapai 99,46%, output kegiatan ini yaitu laporan neraca aset Pemerintah Kota Bima.
 - g) Penyusunan Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD Kota Bima dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.220.000,00 terealisasi sebesar Rp. 142.225.300,00 atau mencapai 98,62%, output kegiatan ini yaitu dokumen rencana kebutuhan pengadaan dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD.
 - h) Pemindah Tangan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 240.080.000,00 terealisasi sebesar Rp. 239.928.000,00 atau mencapai 99,94%, output kegiatan ini yaitu dokumen penilaian / penaksiran harga barang milik pemerintah kota bima terhadap sisa hasil bongkaran.
 - i) Bimbingan Teknis SIMDA BMD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.758.000,00 terealisasi sebesar Rp. 105.151.903,00 atau mencapai 96,68%, output kegiatan ini yaitu terlaksananya Bimtek Simda BMD.
- 3) Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**, didukung oleh 13 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.810.682.616,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.701.470.565,00 atau 96,11% dari total anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan dari program ini yaitu:
- a) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.558.000,00 terealisasi sebesar Rp. 100.318.500,00 atau mencapai 99,76%, output kegiatan ini yaitu Perwali tentang SOP pengelolaan Pajak Daerah.

- b) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 206.585.700,00 terealisasi sebesar Rp. 201.765.606,000 atau mencapai 97,67%, output kegiatan ini yaitu dokumen Intensifikasi dan Eksentifikasi Potensi PAD dan Dokumen Penagihan Pajak Daerah.
- c) Sosialisasi dan pembekalan juru pungut PBB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.849.000,00 terealisasi sebesar Rp. 78.296.500,00 atau mencapai 99,30%, output kegiatan ini yaitu dokumen PAD dan terlaksananya sosialisasi dan pembekalan juru pungut PBB.
- d) Penagihan PBB pada seluruh kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 539.577.500,00 terealisasi sebesar Rp. 534.993.000,00 atau mencapai 99,15%, output kegiatan ini yaitu laporan penagihan PBB pada seluruh kelurahan.
- e) Pendataan ulang/pemutakhiran data PBB sektor perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 281.964.250,00 terealisasi sebesar Rp. 278.155.473,00 atau mencapai 98,65%, output kegiatan ini yaitu dokumen hasil penilaian individu PBB serta laporan verifikasi dan pendataan PBB.
- f) Pengelolaan dan penagihan pajak daerah/retribusi daerah/sewa aset daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 325.009.000,00 terealisasi sebesar Rp. 321.835.938,00 atau mencapai 99,02%, output kegiatan ini yaitu laporan Pengelolaan dan Penagihan Pendapatan Daerah Lainnya, laporan Pelayanan Pengaduan dan Keberatan dan laporan Pemeriksaan objek /subjek PDRD.
- g) Pemeliharaan data dan sistem PBB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 240.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 236.072.600,00 atau mencapai 98,16%, output kegiatan ini yaitu laporan hasil Perekaman Basis Data PBB dan BPHTB, laporan Penerbitan NPWPD/NPWRD bagi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dokumen NJOP PBB di Kota Bima.
- h) Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.201.000,00 terealisasi sebesar Rp. 81.565.450,00 atau mencapai 90,43%, output kegiatan ini yaitu terlaksananya Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- i) Uji petik terhadap objek pajak dan retribusi daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.235.666,00 terealisasi sebesar Rp. 42.010.000,00

atau mencapai 73,40%, output kegiatan ini yaitu terlaksananya uji petik terhadap objek pajak dan retribusi daerah.

- j) Pendataan objek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199.578.000,00 terealisasi sebesar Rp. 186.894.109,00 atau mencapai 93,64%, output kegiatan ini yaitu dokumen pendataan objek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.
- k) Penetapan Objek Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 206.089.000,00 terealisasi sebesar Rp. 201.066.999,00 atau mencapai 97,56%, output kegiatan ini yaitu laporan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah serta laporan Perhitungan dan Penetapan Retribusi Daerah dan Dana Transfer.
- l) Penatausahaan/rekonsiliasi pendapatan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 392.493.000,00 terealisasi sebesar Rp. 349.438.390,00 atau mencapai 89,03%, output kegiatan ini yaitu dokumen rekonsiliasi PAD.
- m) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.042.500,00 terealisasi sebesar Rp. 89.058.000,00 atau mencapai 96,76%, output kegiatan ini yaitu laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan dan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan per triwulan.

b. Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis program dan kegiatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima tahun 2017 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.192. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017

No.	Indikator	Target	Realisasi	%
1.	Waktu Penerbitan SP2D yang tepat waktu	100%	100%	100
2.	Penyampaian LRA Bulanan Yang Tepat Waktu	100%	100%	100
3.	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tiap Tahunnya	5.676.301.000	5.855.438.933	103,16
4.	Persentase Peningkatan Penerimaan	1.090.000.000	704.826.980	64,66

No.	Indikator	Target	Realisasi	%
	Retribusi Daerah Tiapa Tahunnya			
5.	Persentase Peningkatan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	800.000.000	750.087.297	93,76
6.	Persentase Peningkatan Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Tiap Tahunnya	4.424.220.000	3.752.618.132	84,82
7.	Informasi data asset yang terupdate	100%	100%	100

Sumber Data : BPKAD Kota Bima, tahun 2017

a. Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kota Bima dalam pencapaian kinerja tahun 2017, antara lain:

- a) Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.
- b) Wajib pajak tidak memberikan informasi yang sebenarnya terhadap omset yang mereka miliki.
- c) Masih terdapat beberapa kelurahan pemekaran yang belum diselaraskan letak objek pajak dengan batas wilayah kelurahan pemekaran sehingga masih banyak Wajib Pajak yang harus dilakukan penyesuaian, dan keadaan ini kadang dijadikan alasan untuk tidak membayar pajak.
- d) Data mengenai peta blok masih banyak yang belum dilengkapi, sehingga terdapat kesulitan untuk mengetahui posisi objek pajak. Sebagai gambaran up date peta blok oleh KPP Pratama terakhir dilakukan pada tahun 2010.
- e) Ketentuan mengenai Zona Nilai Tanah sudah ada, tetapi peta tentang Zona tersebut belum disediakan.
- f) Data Piutang yang diserahkan pada saat pengalihan, terdapat perbedaan nilai antara hard copy dan soft copy, sehingga membingungkan dalam upaya penentuan wajib pajak penanggung utang.
- g) Masih terdapat SPPT tercetak yang bermasalah dan perlu diklarifikasi dan diselesaikan lebih awal, sehingga mempengaruhi hasil penagihan.
- h) Masih dirasakan kesulitan untuk mengukur validitas harga transaksi pada saat pelayanan terhadap pengalihan hak dalam bentuk jual beli, karena penentuan nilai perolehan adalah antara penjual dan pembeli.

Dari kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kota Bima dalam pencapaian kinerja tahun 2017, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh BPKAD antara lain:

- a) Melakukan komunikasi awal dengan BPKP Perwakilan NTB untuk persiapan penggunaan SIMDA Pendapatan pada tahun 2017.
- b) Melakukan sosialisasi secara langsung (personal) kepada wajib pajak pada saat penagihan PAD.
- c) Melakukan kegiatan pendampingan dan penyederhanaan tata kelola administrasi pada petugas pajak kelurahan.
- d) Melaksanakan konsolidasi dan penguatan kelembagaan terhadap tim penagihan pada kelurahan dengan melibatkan kasi pemerintahan pada seluruh kelurahan.
- e) Melakukan pemeliharaan data, perbaikan peta blok dan penyelesaian masalah batas wilayah sehingga seluruh objek dan subjek pajak se Kota Bima dapat menjadi target PBB.
- f) Melakukan penyesuaian Zona Nila Tanah pada wilayah tertentu pada triwulan II tahun 2017 sehingga dapat menjadi dasar penyesuaian NJOP bumi pada wilayah tersebut.
- g) Melakukan sosialisasi secara intens pada 38 kelurahan.

Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.646.635.000,00 untuk melaksanakan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar Rp. 5.012.725.466,00 atau 88,77% dari total alokasi anggaran.

Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.193. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%

1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan administrasi perkantoran	1.083.014.700,00	1.036.608.552,00	95,72
	- Penyediaan jasa surat-menyurat	86.782.500,00	86.707.500,00	99,91
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000,00	25.930.600,00	86,44
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19.700.000,00	15.955.700,00	80,99
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.124.000,00	30.124.000,00	100,00
	- Penyediaan alat tulis kantor	70.639.200,00	59.459.200,00	84,17
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	120.655.800,00	98.294.950,00	81,47
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.516.800,00	13.516.800,00	100,00
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.720.000,00	14.935.000,00	89,32
	- Penyediaan makanan dan minuman	85.160.000,00	84.160.000,00	98,83
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	439.266.400,00	439.184.802,00	99,98
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	111.950.000,00	109.840.000,00	98,12
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	280.353.000,00	262.864.450,00	93,76
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	98.749.000,00	97.264.000,00	98,50
	- Pengadaan mebeleur	23.259.000,00	21.447.000,00	92,21
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	47.945.000,00	46.903.000,00	97,83
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	91.200.000,00	78.050.450,00	85,58
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
III	Program Peningkatan disiplin aparatur	251.470.000,00	245.250.000,00	97,53
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	45.850.000,00	43.055.000,00	93,90
	- Pelaksanaan Sidak Pegawai Negeri Sipil	205.620.000,00	202.195.000,00	98,33
IV	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	105.748.000,00	105.617.000,00	99,88
	- Penyusunan laporan keuangan semesteran	9.630.000,00	9.630.000,00	100,00
	- Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	9.602.000,00	9.602.000,00	100,00
	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	14.963.000,00	14.963.000,00	100,00
	- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	42.556.000,00	42.425.000,00	99,69
	- Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	28.997.000,00	28.997.000,00	100,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
V	Program Pendidikan Kedinasan	1.469.676.100,00	1.438.938.628,00	97,91
	- Pendidikan dan pelatihan teknis	212.145.500,00	182.707.028,00	86,12
	- Pendidikan penjenjangan struktural	1.206.389.000,00	1.205.090.000,00	99,89
	- Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	51.141.600,00	51.141.600,00	100,00
VI	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	0,00
	- Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	0	0	0,00
VII	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	2.456.373.200,00	1.923.446.836,00	78,30
	- Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	456.484.700,00	429.897.411,00	94,18
	- Seleksi penerimaan calon PNS	213.033.600,00	0	0,00
	- Penempatan PNS	178.944.700,00	157.458.400,00	87,99
	- Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	203.060.200,00	193.997.129,00	95,54
	- Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	70.735.400,00	70.235.400,00	99,29
	- Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	56.162.000,00	56.162.000,00	100,00
	- Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	34.359.600,00	26.650.400,00	77,56
	- Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	157.170.100,00	152.714.900,00	97,17
	- Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	290.664.700,00	190.626.700,00	65,58
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	327.808.200,00	225.758.200,00	68,87
	- Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line	126.162.600,00	120.639.200,00	95,62
	- Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	94.784.000,00	85.943.300,00	90,67
	- Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural	44.279.800,00	44.279.800,00	100,00
	- Penyusunan Gaji Berkala PNS	47.400.000,00	47.400.000,00	100,00
	- Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	71.224.800,00	43.839.396,00	61,55
	- Pengelolaan, Pengurusan, dan Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Tapperum	57.364.800,00	52.327.400,00	91,22
	- Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS	26.734.000,00	25.517.200,00	95,45
	JUMLAH	5.646.635.000,00	5.012.725.466,00	88,77

Sumber Data : BKPSDMD Kota Bima, tahun 2017

Output penting yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan di atas adalah :

1) Program Pendidikan Kedinasan

Pagu Anggaran pada Program Pendidikan Kedinasan adalah sebesar Rp. 1.469.676.100,00 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.438.938.628,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 97,91%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Terlaksananya diklat pelayanan prima dan diikuti oleh 40 orang Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kota Bima dan Pelatihan Kompetensi Bidan Tentang Midwifery Up Date yang di ikuti oleh 40 orang selama 4 hari.
- b) Terlaksananya Diklat Kepemimpinan II sebanyak 3 orang, Diklatpim III sebanyak 10 orang dan Diklatpim IV sebanyak 20 orang PNS lingkup Pemerintah Kota Bima.
- c) Terlaksananya ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas untuk PNS Lingkup Pemerintah Kota Bima sebanyak 89 orang.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Peningkatan keterampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat teknis dan fungsional, diklat kepemimpinan serta diklat prajabatan bagi CPNS. Hal ini ditandai dengan jumlah Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis, diklatpim dan ujian dinas sebanyak 183 orang PNS lingkup Pemerintah Kota Bima.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun 2017 melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah tidak dapat dilaksanakan karena tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (0%).

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pagu Anggaran pada Program Pendidikan Kedinasan adalah sebesar Rp. 2.456.373.200,00 (Dua Milyar Empat ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.923.446.836,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 78,30%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Terlaksananya kegiatan pemetaan kompetensi pemetaan jabatan administrator (eselon III), Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Kota Bima serta tersedianya pedoman penilaian kompetensi.
- b) Seleksi penerimaan CPNSD tidak dapat dilaksanakan karena pemerintah pusat belum membuka penerimaan CPNS baru.
- c) Penempatan dan penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural/fungsional PNS Lingkup Pemerintah Kota Bima baik yang di mutasi maupun rotasi sebanyak 184 orang.
- d) Terlaksananya proses Kenaikan Pangkat PNS Lingkup Pemerintah Kota Bima sebanyak 633 orang .
- e) Terlaksananya pengelola informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) dan terlaksananya pengarsipan data secara elektronik.
- f) Terlaksananya penyusunan instrumen analisis jabatan PNS untuk perhitungan analisis kebutuhan pegawai lingkup pemerintah Kota Bima.
- g) Menurunnya pelanggaran disiplin PNS dalam lingkup Pemerintah Kota Bima.
- h) Meningkatnya kompetensi pendidikan melalui pengiriman tugas belajar dan pemberian ijin belajar sebanyak 13 orang PNS lingkup Pemerintah Kota Bima dari target 18 orang.
- i) Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang kepegawaian dan terlaksananya bintek e-kinerja bagi Subag Umum dan Kepegawaian lingkup pemerintah Kota Bima.
- j) Peningkatan pengembangan pembangunan sarana prasarana pelayanan kepegawaian melalui SAPK dan data elektronik Lingkup Pemerintah Kota Bima.
- k) Jumlah PNS yang memasuki masa purna tugas/pensiun sebanyak 130 orang PNS lingkup Pemerintah Kota Bima.
- l) Terlaksananya kegiatan penyusun standar kompetensi manajerial jabatan tinggi Pratama.
- m) Jumlah PNS yang memperoleh SK Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 260 orang PNS lingkup Pemerintah Kota Bima.
- n) Terlaksananya Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebanyak 75 LHKPN.

- o) Jumlah PNS yang mengurus administrasi Karis/Karsu, Taspen/Bapertarum sebanyak 105 orang PNS lingkup Pemerintah Kota Bima.
- p) Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 18 orang dilingkup pemerintah Kota Bima.

b. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dirinci menurut sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.194. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya ASN yang berkompeten	Persentase ASN yang Berkompeten	28,87%	28,87%	100%
Terwujudnya Pegawai ASN Kota Bima yang memiliki budaya kerja positif	Persentase kasus pelanggaran di kalangan ASN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase ASN yang kariernya terbina dengan baik	10%	8%	80%
Tersedianya informasi kepegawaian yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Persentase SKPD yang terhubung dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima	100%	100%	100%

Sumber : BKPSDM Kota Bima, 2017

2.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD

Evaluasi capaian indikator kinerja sasaran dimulai dengan pengukuran realisasi capaian setiap indikator kinerja sasaran dibandingkan dengan target setiap tahunnya maupun terhadap target pada kondisi akhir RPJMD dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bima.

Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.195. Skala Ordinal sebagai Perangkat Penilaian

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1.	85 sampai dengan 100	Berhasil

2.	70 s/d kurang dari 85	Cukup Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Kurang Berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak Berhasil

4.1. Capaian Kinerja

Penyajian capaian kinerja Pemerintah Kota Bima, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2017, dan membandingkan dengan target akhir tahun perencanaan RPJMD.

Kategori keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2017, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.196. Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No.	Kategori	Sasaran	Persentase Capaian
1.	Berhasil	13	92,86%
2.	Cukup Berhasil	1	7,14 %
3.	Kurang Berhasil	0	0,00 %
4.	Tidak Berhasil	0	0,00 %

Dari capaian indikator kinerja yang dihasilkan bahwa sasaran dikategorikan berhasil sebesar 92,86% dan yang cukup berhasil sebesar 7,14%. Rincian pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut dideskripsikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.197. Pencapaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Strategis Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	108,72
2.	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	100,00
3.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	100,00
4.	Meningkatnya mutu pendidikan	107,42
5.	Meningkatnya daya saing	93,31
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	91,72
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	102,15
8.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	107,09

No	Sasaran Strategis	Persentase Capaian
9.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	100,63
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	96,33
11.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	106,89
12.	Meningkatnya produksi pertanian	104,31
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	94,64
14.	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	72,83

Dari capaian kinerja masing-masing sasaran strategis, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase capaian 14 sasaran tersebut sebesar 99,00%. Persentase capaian terendah adalah Sasaran Strategis ke-14, yaitu Terpeliharanya keamanan dan ketertiban yakni sebesar 72,83%. Adapun persentase capaian tertinggi dicatatkan oleh Sasaran Strategis ke-1, yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama yang mencapai angka 108,72%.

Kategori keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2017, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.198. Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No.	Kategori	Indikator Kinerja	Persentase Capaian
1.	Berhasil	26	89,66 %
2.	Cukup Berhasil	3	10,34 %
3.	Kurang Berhasil	-	-
4.	Tidak Berhasil	-	-
Jumlah		29	100,00 %

Capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dikategorikan 89,29% berhasil tercapai, 10,34 cukup berhasil, dengan rincian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran sebagaimana termuat pada tabel berikut.

Tabel 2.199. Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kepatuhan	Jumlah penerimaan	Rupiah	4.000.000.000	4.230.456.000	105,76

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	terhadap ajaran agama	zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)				
		Rasio Rumah Ibadah	Per 1.000 penduduk	3	3,35	111,67
2	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Jumlah konflik SARA	kasus	0	0	100,00
3	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Persentase nilai budaya yang ditinggalkan	%	5,00	5,00	100,00
4	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	10,00	10,13	101,13
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SD	nilai	5,50	7,25	131,81
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SMP	nilai	5,50	4,7	85,46
5	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai	73	73,67	100,92
		Persentase penduduk miskin	%	9,30	9,27	100,32
		Pengangguran terbuka	%	7,50	8,89	84,36
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	69,15	69,35	100,29
		Angka Balita Gizi Buruk	%	0,075	0,078	96,15
		Angka kematian ibu melahirkan	Per 100.000 kelahiran hidup	148	188	78,72
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Rumah tangga pengguna berakses air bersih	%	90,00	93,25	103,61
		Persentase Rumah Layak Huni	%	92,50	91,30	98,70

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
		Rumah tangga pengguna bersanitasi baik	%	90	96,92	107,69
		Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat distribusi	%	100,00	98,61	98,61
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai	65,00	62,58	96,28
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	100,00
		Persentase SKPD dengan Indeks SAKIP bernilai baik	%	80	100	125,00
9	Meningkatnya pelayanan publik prima	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	hari	1,25	1,25	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	80	81,00	101,25
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	5,70	5,78	101,40
11	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	14,80	15,82	106,89
12	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan)	ton	55.000	57.371	104,31
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	%	75,00	76,18	101,57
		Persentase luas permukiman kumuh	%	29,56	32,06	108,45

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
		Persentase luas kota yang tertata	%	10,00	7,39	73,90
14	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas	%	97,50	133,87	72,83

Dari hasil Capaian Indikator Kinerja tahun 2017 pada tabel di atas, rata-rata persentase capaian adalah sebesar 99,66%, dengan nilai persentase capaian terendah sebesar 72,88% yaitu pada capaian Indikator Kinerja Angka Kriminalitas, dan capaian persentase tertinggi adalah sebesar 131,81% yaitu pada capaian indikator kinerja Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) SD.

Pencapaian masing-masing indikator kinerja tersebut, didukung oleh sejumlah program dan kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan berikut kendala/hambatan, upaya dan dukungan yang terjadi pada masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dideskripsikan sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan terhadap Ajaran Agama

Pada tahun 2017, telah ditetapkan target jumlah penerima JMD Kota Bima sebesar 4 milyar rupiah dan berhasil melampaui target, yaitu sebesar Rp. 4.230.456.000 atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,7%.

Tabel 2.200. Capaian Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Tahun 2014-2017

Tahun Capaian Kinerja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
Tahun 2014	750.000.000	785.000.000	104,67%
Tahun 2015	750.000.000	1.391.336.000	185,51%
Tahun 2016	4.000.000.000	4.335.858.840	108,39%
Tahun 2017	4.000.000.000	4.230.456.000	105,7%.

Sumber : Bagian Kesra Setda Kota Bima, 2017

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penerimaan jumlah zakat, infaq dan shodaqoh tahun 2017 sedikit menurun dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya orang

atau dermawan yang menyetorkan zakat mal maupun infaq disebabkan oleh kebutuhan setiap individu yang cukup tinggi untuk kebutuhan penanganan pasca banjir bandang yang terjadi diakhir tahun 2016 di Kota Bima. Namun demikian, sosialisasi kepada para dermawan khususnya dan masyarakat Kota Bima pada umumnya tentang pentingnya berzakat, infaq dan sedekah semakin intens dilaksanakan. Capaian kinerja tahun 2017 ini apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kota Bima pada tahun 2018 sebesar 4 milyar rupiah, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja sampai tahun 2017 telah melampaui target RPJMD pada tahun 2018 dengan tingkat capaian 105,7%.

Kemudian indikator kinerja Rasio Rumah Ibadah pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 3 per 1000 jumlah penduduk, dan berhasil dicapai sebesar 3,35 per 1000 jumlah penduduk atau dengan tingkat capaian 111,67%.

Tabel 2.201. Capaian Kinerja Rasio Rumah Ibadah Tahun 2014-2017

Tahun Capaian Kinerja	Target (per 1000 penduduk)	Realisasi (per 1000 penduduk)	% Capaian
Tahun 2014	2,7	2,66	98,52
Tahun 2015	2,9	2,85	98,28
Tahun 2016	3	3	100
Tahun 2017	3	3,35	111,67

Sumber : Bagian Kesra Setda Kota Bima, 2018

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa rasio rumah ibadah pada tahun 2017 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh makin meningkatnya dukungan dari berbagai pihak terkait dengan pembangunan rumah ibadah di Kota Bima, baik dari Pemerintah Kota Bima, Hibah dari Pemerintah Daerah lain, maupun swadaya masyarakat, Lebih khusus lagi Pemerintah Kota Bima membangun Masjid terapung yang berada dikawasan strategis pantai Amahami. Capaian kinerja tahun 2017 3,35 per 1000 jumlah penduduk ini juga sudah melampaui target RPJMD Kota Bima tahun 2018 yang hanya sebesar 3 per 1000 jumlah penduduk.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama

Sasaran strategis Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama diukur melalui satu indikator kinerja utama yaitu jumlah konflik SARA yang terjadi. Seperti diketahui bahwa konflik yang bernuansa SARA sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Hal ini telah banyak mempengaruhi situasi psikologis dan sosiologis keagamaan masyarakat, sehingga dikhawatirkan antara kelompok agama akan diliputi perasaan tidak aman dan tidak nyaman. Dengan demikian, merupakan sesuatu hal yang penting untuk tetap menjaga persaudaraan kemanusiaan dan persaudaraan kebangsaan.

Meskipun Kota Bima dilabelkan sebagai zona merah yang rentan terhadap konflik sara dan terorisme, namun kenyataannya bahwa pada tahun 2017 tidak ada konflik SARA yang terjadi di Kota Bima. Sehingga capaian indikator kinerja sasaran ini tercapai 100%. Capaian tahun 2017 ini mempertahankan capaian tahun 2014-2016 yang juga tidak terjadi kasus konflik bernuansa SARA di Kota Bima.

Tabel 2.202. Capaian Kinerja Jumlah Konflik SARA yang terjadi di Kota Bima

Tahun Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tahun 2014	0 kasus	0 kasus	100,00%
Tahun 2015	0 kasus	0 kasus	100,00%
Tahun 2016	0 kasus	0 kasus	100,00%
Tahun 2017	0 kasus	0 kasus	100,00%

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Bima, 2018

Keberhasilan Pemerintah Kota Bima untuk memelihara kerukunan umat beragama ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Bima yang senantiasa membangun, mempertahankan, memperkuat dan melestariakan kerukunan umat beragama dengan berupaya melakukan beberapa program atau agenda penting; diantaranya adalah melalui pemberdayaan forum kerukunan umat beragama.

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dibentuk oleh unsur-unsur pemuka agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bima. Tugasnya adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh

masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan walikota, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal

Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2017, terdapat 40 pranata adat yang masih lestari yang meliputi tradisi-tradisi, termasuk daur hidup, tarian dan tradisi sosial keagamaan sedangkan tradisi yang ditinggalkan ada 2 jenis. Dengan demikian persentase nilai budaya yang ditinggalkan sebesar 5% pada tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini lebih baik dibandingkan tahun 2016 dimana terdapat 3 tradisi budaya yang ditinggalkan yaitu Raju, cepe kanefe, dan arugele sagele. Sedangkan nilai budaya atau tradisi yang masih lestari sebanyak 39 pranata adat. Dengan demikian persentase nilai budaya yang ditinggalkan pada tahun 2016 sebesar 7,69%. Arugele sagele pada tahun 2017 dapat dihidupkan kembali berkat upaya lembaga Makembo yang menggerakkan masyarakat petani di Ncai Kapenta Kelurahan Jatibaru untuk tradisi tersebut pada waktu menanam.

Tabel 2.203. Capaian Kinerja Persentase Nilai Budaya yang ditinggalkan

Tahun Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tahun 2016	5%	7,69%	65,02%
Tahun 2017	5%	5 %	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima, 2018

Tabel 2.204. Daftar tradisi yang masih lestari di Kota Bima

No	Daftar Tradisi yang masih lestari	Daftar Tradisi yang hampir punah dan ditinggalkan	Keterangan
1	Cafi sari boru ro dore	Raju	
2	Compo sampari	Cepe kanefe	
3	Compo baju		
4	Tekara nee		

5	Waa coi/Terima Coi	
6	Jambuta	
7	Kiri loko	
8	Ngaji made	
9	Mbolo rasa	
10	Kapanca	
11	Kalondo wei	
12	Boho oi ndeu	
13	Hanta ua pua	
14	Lenggo	
15	Mpaa gantao	
16	Ndiri biola	
17	Ngaha karedo	
18	Ampa fare	
19	Arugele Sagele	
20	Bela leha	
21	Kolondo lopi	
22	Muna cepe rahi	
23	Soka	
24	Doa oma	
25	Doa soro olo	
26	Hadrah rebana	
27	Ntumbu Parise	
28	Doa bola	
29	Khata Karoa	
30	Mpaa sampari	
31	Tumba kambata	
32	Buja kadanda	
33	Ziki rati	
34	Mpaa peda	
35	Doa Rasu	
36	Kasaro	

37	Tumba kambata	
38	Mpaa toja	
39	Ngaji tua	
40	Ncala lanca	
	40	2

Sumber: Lembaga Adat Makembo, 2018

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Pendidikan

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan ini dioperasionalkan melalui sejumlah indikator kinerja, yaitu angka rata-rata lama sekolah, rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) untuk SD dan SMP.

Adapun pencapaian masing-masing indikator tersebut dideskripsikan secara lebih terperinci sebagaimana pembahasan berikut.

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia, khususnya pada aspek pendidikan. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki.

Menurut data BPS tahun 2017, Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima hingga tahun 2017 adalah 10,13 tahun. Angka ini terus meningkat selama kurun empat tahun terakhir, dimana rata-rata lama sekolah pada tahun 2014 sebesar 9,46 tahun, pada tahun 2015 mencapai 9,58 tahun dan pada tahun 2016 mencapai 9,96.

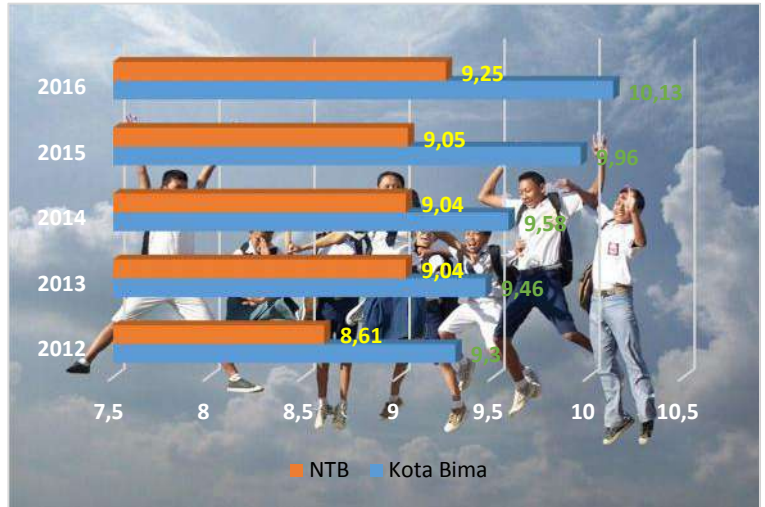
Tabel 2.205. Capaian Kinerja Rata-rata Lama Sekolah

Tahun Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tahun 2014	9,20	9,46	102,82
Tahun 2015	9,60	9,58	99,79
Tahun 2016	9,80	9,96	101,63
Tahun 2017	10	10,13	101,3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima, 2018

Angka rata-rata lama sekolah Kota Bima yang terus meningkat pada setiap tahun didukung oleh :

- makin membaiknya sarana-sarana pendidikan
- dukungan beasiswa
- biaya operasional sekolah (BOS)
- serta makin sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan.



b. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional biasa disingkat UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima menyebutkan bahwa rata-rata nilai UN untuk SD yang diselenggarakan pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar 7,25 dari target rata-rata nilai UN sebesar 5,50 atau dengan tingkat capaian 131,81%. Sedangkan nilai rata-rata UN untuk tingkat SMP hanya sebesar 4,7 dari target 5,50 atau dengan tingkat capaian 85,46%. Artinya, capaian kinerja rata-rata nilai UN tahun 2017 sebesar 5,98 atau dengan capaian 108,87%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian kinerja rata-rata nilai UN tahun 2017 mengalami kenaikan. Rata-rata nilai UN yang diselenggarakan pada tahun 2016 telah terealisasi sebesar 5,32 dari target rata-rata nilai UN sebesar 5,50. Artinya, capaian kinerja rata-rata nilai UN tahun 2016 sebesar 96,73%.

Tabel 2.206. Capaian Kinerja Rata-Rata Nilai UN Tahun 2017

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017
--------------------	------	------	------

SD/MI/Paket A	5,60	6,89	7,25
SMP/MTs/Paket B	5,71	3,75	4,70

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima, 2018

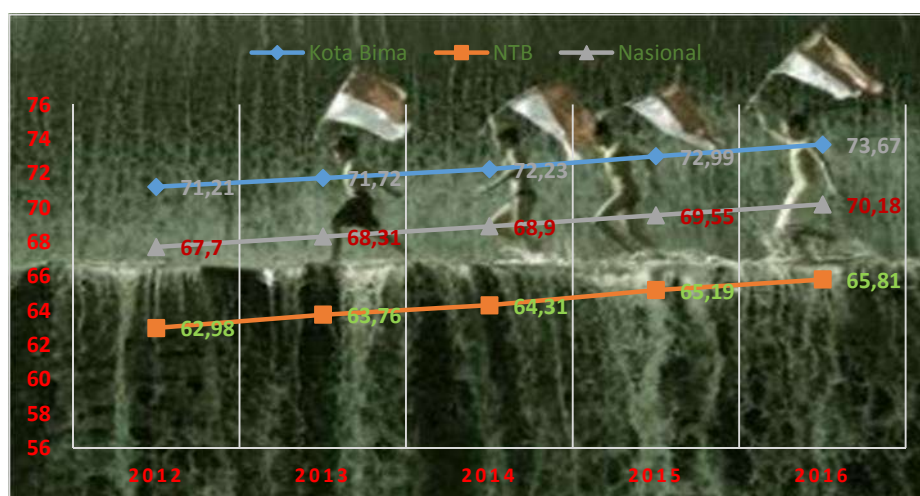
5. Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing

Pencapaian sasaran strategis ini diimplementasikan ke dalam sejumlah indikator kinerja utama, yaitu :

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian hasil dari pembangunan suatu daerah atau wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan yaitu : (1) lamanya hidup, (2) pengetahuan/tingkat pendidikan dan (3) standar hidup layak. Dimensi umur yang panjang dapat diukur dari indikator Angka Harapan Hidup, dimensi pengetahuan diukur dari indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, dan dimensi hidup layak diukur dari nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Data IPM yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2017 merupakan data capaian IPM Kota Bima untuk tahun 2016. Berdasarkan data, capaian IPM Kota Bima untuk tahun 2016 mencapai 73,67 dari target sebesar 73 atau dengan tingkat capaian sebesar 100,92%. Angka IPM ini apabila dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Grafik 4 Tingkat IPM Kota Bima Tahun 2012 -2016

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir IPM Kota Bima mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari 71,21 pada tahun 2012 menjadi 73,67 pada tahun 2016. Kenaikan IPM Kota Bima selama 2012-2016, sejalan dengan kenaikan IPM di Provinsi NTB dari 62,98 pada tahun 2012 menjadi 65,81 pada tahun 2016.

b. Persentase Penduduk miskin

Persentase penduduk miskin di Kota Bima pada tahun 2017 mengalami penurunan, dimana sesuai dengan data yang dirilis oleh BPS bahwa data persentase penduduk miskin tahun terakhir adalah sebesar 9,23% dari target yang ditetapkan sebesar 9,00% atau tercapai sebesar 97,50%. Angka kemiskinan di Kota Bima selama empat tahun terakhir terus mengalami penurunan.

Tabel 2.207. Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2017

Tahun Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tahun 2014	10,93	9,74	110,88
Tahun 2015	9,93	9,85	90,55
Tahun 2016	9,11	9,51	94,64
Tahun 2017	9,00	9,23	97,50

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

Beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bima diarahkan untuk pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar manusia sebagai berikut : pemenuhan hak atas pangan, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan, pemenuhan hak atas pelayanan pendidikan, pemenuhan hak atas pekerjaan, pemenuhan hak atas rumah, pemenuhan hak atas tanah, pemenuhan hak atas air bersih, pemenuhan hak untuk berpartisipasi, pemenuhan hak atas layanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan pemenuhan hak rasa aman.

c. Pengangguran Terbuka

Data Pengangguran Terbuka yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2017 merupakan data pengangguran terbuka Kota Bima untuk tahun 2016. Ini berarti bahwa data capaian Angka Melek Huruf Kota Bima untuk tahun 2017 hingga saat ini belum tersedia karena data tersebut baru akan di-*release* oleh BPS Kota Bima pada pertengahan tahun 2018.

Capaian kinerja indikator pengangguran terbuka ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya mengalami sedikit perbaikan. Pada tahun 2013 angk pengangguran terbuka sebesar 9,13 persen, kemudian turun menjadi 8,69 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 naik lagi menjadi 10,15 persen. Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari dua per tiga penduduk kota Bima termasuk dalam angkatan kerja. Tingginya proporsi penduduk usia kerja yang bekerja yaitu di atas 90% menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Kota Bima sudah cukup baik. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bima mengalami fluktuatif.

Gambaran karakteristik ketenagakerjaan Kota Bima pada kurun empat tahun terakhir dapat dilihat dari hasil olah data Sakernas sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.208. Statistik Ketenagakerjaan Kota Bima Tahun 2012-2015

Uraian	2013	2014	2015	2016
TPAK (%)	66,39	69,32		
Tingkat Pengangguran (%)	9,13	8,69	10,15	8,89
Bekerja	90,87	91,31	89,85	91,11

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bima (BPS, 2017)

6. Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pencapaian sasaran strategis ini diimplementasikan ke dalam sejumlah indikator kinerja utama, yaitu :

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya,

dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

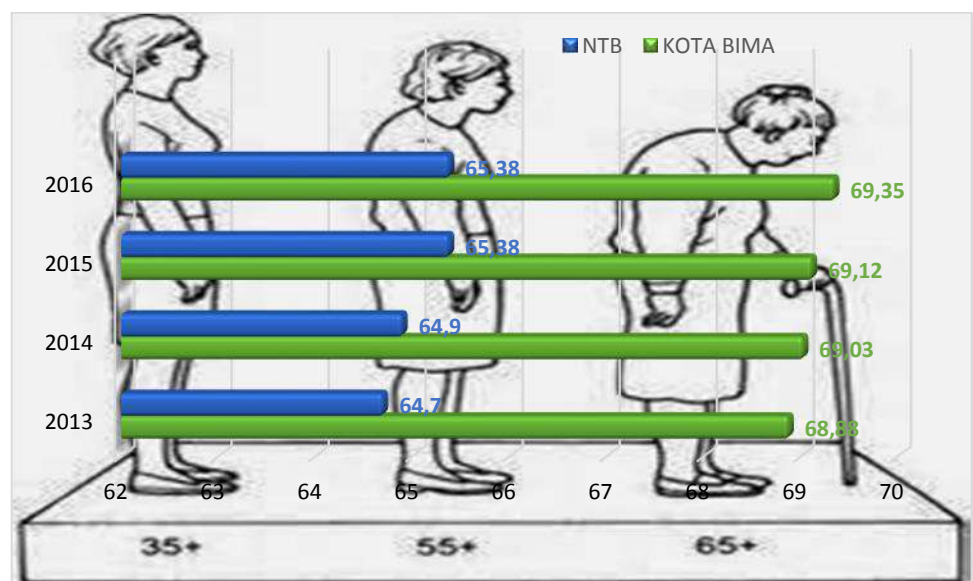
Data Angka Harapan Hidup yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2017 merupakan data capaian Angka Harapan Kota Bima untuk tahun 2016. Ini berarti bahwa data capaian Angka Harapan Hidup Kota Bima untuk tahun 2017 hingga saat ini belum tersedia karena data tersebut baru akan di-release oleh BPS Kota Bima pada pertengahan tahun 2018.

Menurut data BPS tahun 2017, Angka Harapan Hidup di Kota Bima hingga tahun 2016 adalah 69,35 tahun.

Tabel 2.209. Capaian Angka Harapan Hidup Kota Bima Tahun 2014-2015

No	Angka Harapan Hidup	Target	Realisasi	% Capaian
1.	AHH Tahun 2013	68,80 tahun	68,88 tahun	100,12
2.	AHH Tahun 2014	69,00 tahun	69,03 tahun	100,04
3.	AHH Tahun 2015	69,20 tahun	69,12 tahun	99,88
4.	AHH Tahun 2016	69,30 tahun	69,35 tahun	100,07

Sumber : BPS Kota Bima, 2016



Grafik 5 Capaian Angka HarapanHidup Kota Bima Tahun 2013 - 2016

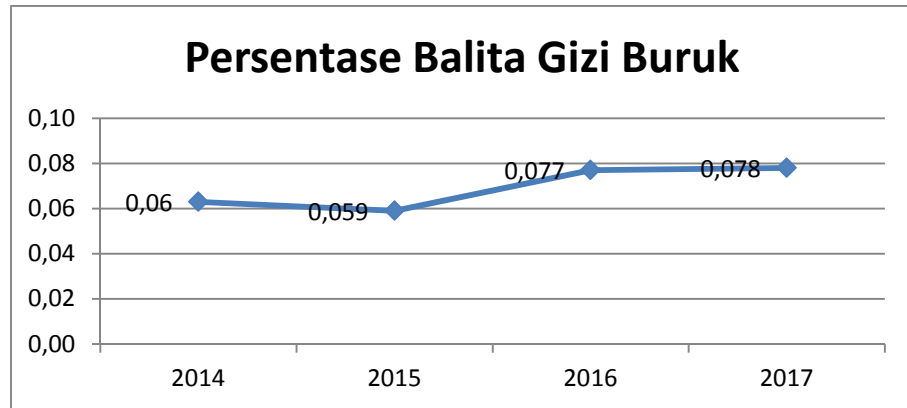
b. Angka balita gizi buruk

Balita gizi buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor).

Data Dinas Kesehatan Kota Bima menyebutkan bahwa dari jumlah aksus balita gizi buruk di Kota Bima pada tahun 2017 adalah sebanyak 13 kasus gizi buruk dari 13.601 balita. Sedangkan pada tahun 2016 dengan jumlah kasus sebanyak 15 kasus dari 14.089 balita.

Persentase balita gizi buruk diperoleh dari membandingkan jumlah balita gizi buruk yang terjadi pada periode tertentu dengan Jumlah balita yang ada pada periode yang sama.

Persentase balita gizi buruk pada tahun 2017 sebesar 0,078 dari target 0,075. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016, Persentase balita gizi buruk di Kota Bima tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,059 % dari target 0,085%, dan pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,077% dari target 0,080. hal ini menjukan tingkat keberhasilan program dalam rangka menekan kejadian kasus gizi buruk yang ada di Kota Bima masih kurang. Demikian pula jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2018 sebesar 0,070%, capaian Dinas Kesehatan Kota Bima masih sekitar 0,05% yang harus dipenuhi. Adapun Angka kematian bayi di Kota Bima Tahun 2014 s/d 2017 dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 6 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Bima Tahun 2014 - 2017

Adapun kegiatan –kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program yaitu adanya kegiatan penjarangan kasus secara berkala, surveilans gizi, konsultasi, pemeriksaan balita oleh dokter ahli, pemantauan ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kelas gizi di puskesmas. Program lain yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan gizi buruk, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) gizi kurang, Pemberian Makanan Tambahan (PMT)-ASI, pemberian biaya perawatan gizi buruk, diskusi refleksi kasus gizi buruk rakorcam tentang hasil penimbangan balita.

Penyebab masih terjadinya kasus gizi buruk di Kota Bima ada 2 hal yaitu asupan gizi dan penyakit infeksi. Asupan gizi dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, daya beli, tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi ibu. Sedangkan Infeksi dipengaruhi oleh hygiene dan sanitasi serta pelayanan kesehatan. Adapun Dilihat dari aspek penanganannya, cakupan penanganan kasus balita gizi buruk tahun 2017 adalah sebesar 100%, sama dengan capaian pada tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, maka target tersebut mampu dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima.

Tabel 2.210. Capaian Kinerja Angka Kasus Balita Gizi Buruk Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2015	0,085 %	0,059 %	144,07%

Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2016	0,080 %	0,077 %	103,89%
Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2017	0,075 %	0,078 %	96,15%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2018

c. Angka kematian ibu melahirkan

Angka kematian ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu serta kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Tabel 2.211. Capaian Kinerja Angka Kematian Ibu Melahirkan

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Angka kematian ibu melahirkan	2015	148/100.000	87/100.000	170,11
	2016	148/100.000	148/100.000	100,00
	2017	148/100.000	188/100.000	78,72

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2018

Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit *Maternal Perinatal* yang diselenggarakan untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai.

Hasil kajian audit didapatkan penyebab kematian ibu sebesar 50% karena tidak terdeteksinya komplikasi pada ibu hamil yang disebabkan oleh status sosial ibu seperti hamil diluar nikah, istri siri dan single parent. penyebab langsung yaitu perdarahan dan eclampsia, hal ini dapat menjadi petunjuk

bagi perencanaan program di tahun yang akan datang agar lebih difokuskan kepada kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan kewaspadaan dini masyarakat terhadap tanda bahaya serta risiko. Selain itu juga perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin dan pemanfaatan jampersal tanpa memandang status sosial. Serta dibutuhkan peningkatan kualitas SDM dalam hal teamwork yang solid serta response time yang cepat dalam hal pengenalan risiko, penegakan diagnosa dan ketepatan dalam pengambilan keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan tindakan dan kesalahan intervensi sehingga kematian ibu dapat dicegah dan diturunkan.

7. Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar diukur melalui kinerja sejumlah indikator utama, yaitu :

a. Persentase rumah tangga berakses air bersih

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat.

Air bersih dengan standar air minum adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan air Bersih di kawasan perkotaan dan juga perdesaan.

Capaian kinerja program pengembangan pengelolaan Air Bersih yang didukung oleh APBD dan APBN pada tahun 2017 telah memfasilitasi jumlah rumah tangga berakses air bersih layak dengan tingkat pencapaian sebesar 35.790 rumah tangga dari target 36.478 rumah tangga atau sebesar 98,15% pada tahun 2017.

Pada tahun 2016 dapat memfasilitasi rumah tangga berakses air bersih layak sebanyak 33.467 atau sebesar 100,22% dari target 33.392 rumah tangga maka terjadi penurunan sebesar 6.97% dari capaian tahun lalu. Namun bila diukur capaian Renstra, maka mengalami peningkatan, pada tahun 2016 telah mencapai 87,19% dan ditahun 2017 telah mencapai 93,25% maka terjadi peningkatan sebesar 6,05%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Akhir RPJMD 2018 sebesar 38.414 rumah tangga atau 100%, maka capaian kinerja rumah tangga berakses air minum layak 93,25%.

Tabel 2.212. Realisasi Kinerja Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (Rumah Tangga)	Realisasi (Rumah Tangga)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1.	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	87,19	36.478	35.790	98,15	93,25

b. Persentase Rumah Layak Huni yang dibangun

Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun di Kota Bima pada tahun 2017 sesuai data yang ada di Kota Bima mencapai 502 unit, dari yang ditargetkan sebesar 466 unit. Ini berarti persentase realisasi ini sebesar 92,77%.

Rumah layak huni yang dibangun ini meningkat bila dibandingkan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 ditargetkan Rumah layak huni yang dibangun sebanyak 500 unit dengan realisasi hanya 302 unit atau hanya 60,40%. Pembangunan rumah layak huni ini antara lain dilaksanakan melalui bantuan sosial bedah rumah.

Tabel 2.213. Rumah Layak Huni yang Dibangun Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
Rumah Layak Huni	502 unit	466 unit	92,77 %

Sumber : BPMPK Kota Bima

c. Rumah Tangga Bersanitasi Baik

Program pengembangan pengelolaan Sanitasi yang didukung oleh APBD baik bersumber dari dana DAK maupun DAU pada tahun 2017 jumlah rumah tangga (RT) di Kota Bima sebanyak 38.382 RT. Dari program pengembangan pengelolaan sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memfasilitasi penanganan jumlah rumah tangga bersanitasi mencapai 33.479 RT dari capaian yang ditargetkan sebanyak 34.558 rumah tangga, sehingga tingkat pencapaian pada indikator rumah tangga bersanitasi di tahun 2017 sebesar 96,92%.

Pada tahun 2016 telah memfasilitasi rumah tangga bersanitasi sebanyak 30.794 rumah tangga atau sebesar 100,29% dari target 30.705, maka capai jumlah rumah tangga bersanitasi pada tahun 2017 menunjukkan penurunan 3,37% dari capaian tahun lalu ini disebabkan karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk memperbanyak SR (sambungan rumah).

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra dan akhir RPJMD 2018 sebesar 38,414 rumah tangga atau sebesar 100%, maka capain program/kegiatan telah mencapai 87,32% rumah tangga bersanitasi. Ini dapat disimpulkan capaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan mengalami peningkatan dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian target indikator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

Tabel 2.214. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rumah Tangga Bersanitasi

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (RT)	Realisasi (RT)	%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1.	Persentase rumah tangga Bersanitasi	80,23	34.558	33.479	96,92	87,32

d. Persentase Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi

Konektivitas wilayah merupakan salah satu indikator utama yang menunjukkan adanya pemerataan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap wilayah dalam Kota Bima telah memiliki aksesibilitas yang baik dan tidak ada terdapat lagi wilayah yang terisolir. Konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi dikontribusikan oleh adanya pembangunan jalan dan jembatan serta peningkatan jalan.

Pencapaian indikator Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi yang diwujudkan melalui program pembangunan jalan dan jembatan. Telah terealisasi sebesar 101,45% atau sepanjang 265,13 Km dari yang ditargetkan sepanjang 261,22 Km. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 yang terealisasi 255,52 Km dari target 254,23 Km atau 100,51%, maka capaian tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,94% dari tahun lalu,

Capaian target indikator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

Tabel 2.215. Realisasi Kinerja Indikator Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (km)	Realisasi (km)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
3.	Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi	95,04	261,33	265,13	101,45	98,61

Terdapat beberapa faktor yang menghambat percepatan konektivitas wilayah, yaitu antara lain kondisi topografi wilayah terutama di sebagian

wilayah Kota Bima yang memiliki kemiringan dan kelerengan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan kendala dalam pembukaan jalan baru karena memerlukan anggaran dan teknologi yang besar.

Adapun beberapa faktor kunci keberhasilan capaian kinerja konektivitas wilayah adalah antara lain adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan wilayah dan pemerataan pembangunan secara lebih luas.

8. Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

a. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bima pada tahun 2017 merupakan penilaian atas kinerja instansi pemerintah kota Bima Tahun 2016 dengan target nilai 65,00 dan terealisasi sebesar 62,58 (kategori B/Baik) atau capaian kinerja sebesar 96,28%.

Kategori B menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang dinilai baik dalam penggunaan anggaran jika dihubungkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di pemerintah Kota Bima.

Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bima Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,37 poin jika dibandingkan dengan capai kinerja tahun 2016.

b. Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bima yang dikeluarkan pada tahun 2017 merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bima tahun 2016 dengan target opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dan terealisasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian kinerja 100%.

Hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mempertahankan capaian kinerja di tahun 2016 yang juga berpredikat WTP. Status opini dari BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD Kota Bima menandakan semakin baiknya pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bima dari tahun ketahun.

Sebagai tolak ukur capaian kinerja tahun 2017 atas Opini BPK RI terhadap LKPD diambil dari hasil opini BPK RI tahun anggaran 2016. Adapun gambaran Opini yang dicapai selama 5 tahun dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kota Bima belum mampu menerapkan Prinsip akuntansi dalam laporan keuangan secara konsisten sehingga belum bisa keluar dari opini disclaimer. Pada tahun 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Bima mulai melakukan perubahan berupa perbaikan terhadap penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan opini dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Upaya perbaikan terhadap penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh pemerintah daerah terutama atas pengelolaan aset daerah, sampai akhirnya pada tahun 2014,2015 dan 2016 pemerintah Kota Bima meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Faktor yang mendukung capaian hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kota Bima adalah sebagai berikut :

- 1) Komitmen yang sangat tinggi kepala daerah dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan LKPD bekerja sama dengan BPKP perwakilan NTB
- 3) Pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi SIMDA dan SIMBADA

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima untuk meningkatkan capaian kinerja opini hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Bima pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Memperbaiki pengelolaan Aset Daerah
- 3) Memperbaiki sistem penganggaran dan realisasi belanja , agar tidak terjadi salah penganggaran dan salah realisasi belanja
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Persentase OPD dengan SAKIP baik

Persentase Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bagi OPD di Kota Bima merupakan penilaian atas kinerja OPD Tahun 2017 dengan target sebanyak 20 OPD bernilai baik (kategori B) dan mampu terealisasi sesuai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja sebesar 100,00 %. Bahkan ada 1(satu) OPD yang memperoleh nilai A yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi, serta 3 (dua) OPD yang berkategori BB yaitu Bappeda, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

9. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

Pemerintah daerah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang. Tingkat keberhasilan peningkatan pelayanan publik di Kota Bima tergambar dari pencapaian beberapa indikator kinerja utama sebagai berikut :

a. Rata-rata lama proses pelayanan perijinan

Bahwa rata-rata lama setiap proses pelayanan perijinan di Kota Bima ditargetkan selama 1,25 hari dengan tingkat realisasi sebesar 1,25 hari. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 100%. Adapun jenis pelayanan perijinan yang ada di Kota Bima Tahun 2017 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel

Tabel 2.216. Capaian Kinerja Lama Proses Perijinan di Kota Bima

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
Rata-rata lama proses perijinan	2014	2-4 hari	2,25
	2015	2-3 hari	2
	2016	1-3 hari	1,25
	2017	1-2 hari	1,25

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dengan penetapan target dengan hasil BAIK (62,51-81,25) dan Realisasi capaian sebesar 100%. Adapun beberapa jenis Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi Indikator penilaian yang mendukung sebagai berikut :

- Unsur **Persyaratan** , dengan dilakukan nya penyederhanaan persyaratan baik yang bersifat administrasi maupun yang bersifat teknis dan sarana penunjang lainnya sebagai syarat dalam melaksanakan pelayanan sehingga mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat dengan Nilai 71,83
- Unsur **Prosedur** mengacu kepada SOP Pelayanan perizinan sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik dan adil dengan Nilai 74,83
- Unsur **waktu penyelesaian** dapat dilakukan pengaturan waktu pelayanan sehingga pelayanan dapat lebih efektif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, dengan Nilai 74,67
- Terhadap unsur Biaya/Tarif, dapat dilakukan penyesuaian regulasi agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan hal ini, nilai 88,00
- Unsur **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**,dapat ditingkatkan dengan senantiasa menggunakan format buku mengikuti perkembangan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga produk setiap jenis pelayanan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan Nilai 89,00
- Unsur **Kompetensi Pelaksana**, dapat ditingkatkan dengan menempatkan petugas pelayanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan Nilai 81,00

- Unsur **Perilaku Pelaksana**, dapat ditingkatkan dengan senantiasa memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pelayanan yang berdedikasi tinggi, berpenampilan baik, ramah, sopan dan memahami prinsip-prinsip pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dengan Nilai 81,83
- Unsur Maklumat pelayanan, dapat dilaksanakan dengan baik apabila sarana dan prasaranan penunjang kegiatan pelayanan termasuk penganggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit pelaksanaan pelayanan, dengan Nilai 85,83
- Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, bahwa terhadap penanganan pengaduan, saran dan masukan telah ditindak lanjuti dengan baik namun masih perlu ditingkatkan lagi dengan menempatkan petugas yang memiliki kemampuan untuk menangani hal itu, dengan nilai 84,83

Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan tersebut berjalan efektif adalah : tersedianya anggaran yang cukup; adanya Kemitraan dan koordinasi dengan Dinas/badan teknis terkait; tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup memadai; tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

10. Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

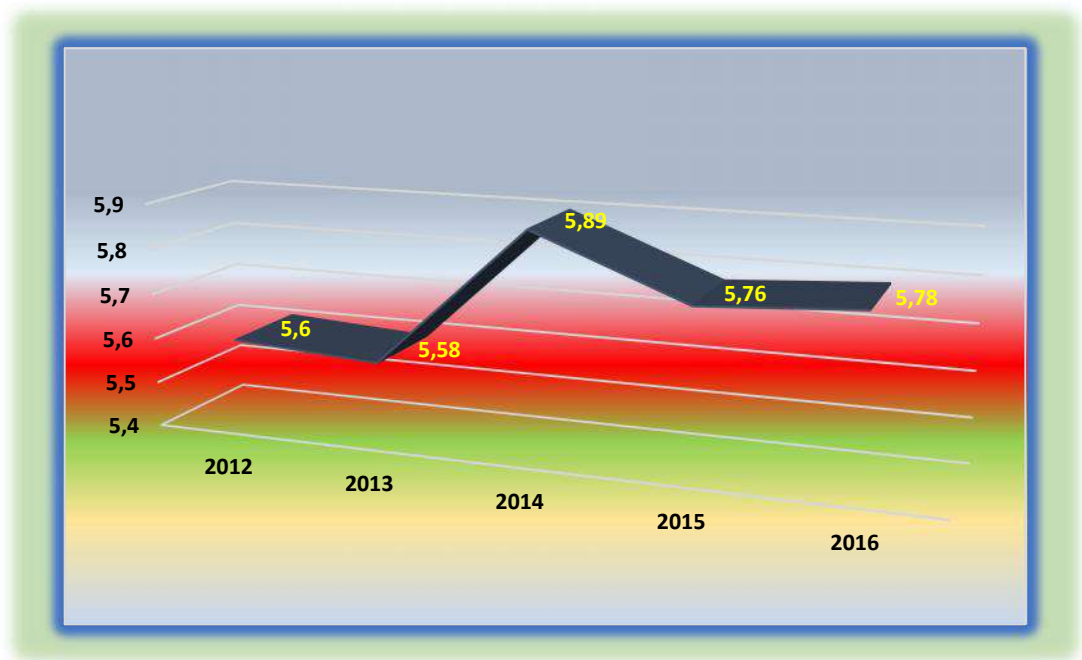
Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan memperhatikan Produk Domestik Regional bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Pengukuran capaian kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 di Kota Bima dapat ditunjukkan dari hasil data PDRB yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima Tahun 2017 yang isinya memuat kinerja pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2016.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga konstan dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Kota Bima pada tahun 2016 adalah sebesar **5,78 persen**. Dengan demikian capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Kota

Bima adalah sebesar 96,33 persen dari target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan yaitu sebesar 6,00 persen.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, maka Angka pertumbuhan tersebut mengalami fluktuasi. Secara rinci laju pertumbuhan ekonomi Kota Bima Tahun 2012 – 2016 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.



Grafik 7 PDRB Kota Bima Tahun 2012-2016

Lebih lanjut, capaian kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima 2013 – 2018 yaitu sebesar 6,0 persen pada tahun 2018, dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian sampai saat sekarang adalah baru mencapai 88,31 persen. Dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dari PDRB tersebut serta pengelolaan pembangunan ekonomi di Kota Bima yang cukup baik dan dengan pertumbuhan yang positif, maka target jangka menengah sebesar 6,00 persen tersebut sangat mungkin dicapai pada tahun 2018 sebagai akhir periode RPJMD 2013-2018.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kota Bima yaitu antara lain :

- a. Kondisi ekonomi dan stabilitas regional dan nasional sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seperti tingkat inflasi, kenaikan harga BBM, serta stabilitas politik .
- b. Pertumbuhan sektor pertanian, kelautan dan perikanan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrim seperti kemarau panjang dan gagal panen .

Adapun sejumlah faktor keberhasilan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi adalah antara lain :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan reformasi birokrasi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang berdampak pada membaiknya iklim investasi daerah.
- b. Tersedianya sumber daya alam yang baik sebagai modal dasar pembangunan daerah dimana ketersediaan lahan pertanian yang subur dan kekayaan laut memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan PDRB Kota Bima setiap tahunnya.
- c. Membaiknya kualitas infrastruktur perkotaan serta sarana dan prasarana pendukung sektor perdagangan dan jasa serta transportasi.

11. Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kota Bima dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi lokal, salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah PDRB Per Kapita.

Pendapatan per kapita pada suatu daerah dapat diindikasikan oleh nilai PDRB per kapita pada tahun tertentu. PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dari nilai tambah yang tercipta selama satu tahun. PDRB per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang melebihi angka inflasi mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat lebih baik, dan sebaliknya pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih rendah dari inflasi mencerminkan kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Angka PDRB

perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Untuk mengetahui adanya pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat, dihitung dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDRB dapat terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pertumbuhan penduduk dan atau perubahan harga yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB-nya. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bima selama periode 2012-2016 tumbuh pada kisaran angka 6-10 persen, sementara pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 dalam periode yang sama tumbuh sebesar 3-6 persen.

Pendapatan perkapita penduduk berdasarkan harga konstan ditargetkan sebesar 14,80 juta rupiah dengan realisasi sebesar 15,82 juta rupiah atau dengan tingkat capaian 106,89 persen. Pertumbuhan pendapatan perkapita dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.217. PDRB Per Kapita Kota Bima Tahun 2012- 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rp)	2.062.497,35	2.177.543,21	2.305.405,52	2.438.560,78	2.579.603,57
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	2.192.206,83	2.373.685,91	2.671.111,92	2.993.901,62	3.302.931,48
Jumlah Penduduk (jiwa)	149.800	153.101	156.400	159.736	163.101
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp/jiwa/Tahun)	13,77	14,22	14,74	15,27	15,82
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp/jiwa/Tahun)	14,63	15,50	17,08	18,74	20,25

Pada tahun 2017 PDRB per kapita Kota Bima atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan menjadi 20,25 juta rupiah dari tahun 2016 sebesar 18,74 juta rupiah. Jika dilihat atas dasar harga konstan maka PDRB perkapita pada tahun 2017 adalah sebesar 15,82 juta atau mengalami kenaikan 0,55 juta

dibandingkan dengan PDRB Perakpita tahun 2016 yang hanya sebesar 15,27 juta.

Pendapatan perkapita yang dicapai sampai saat ini sebesar 20,25 juta rupiah jika dibandingkan dengan target RPJMD sampai dengan 2018 yang sebesar 20 juta rupiah telah melebihi target atau dengan capaian 101,25 persen

12. Sasaran Strategis Meningkatnya produksi pertanian

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein. Indikator kinerja produksi pertanian tanaman pangan dalam konteks ini akan mencakup akumulasi dari produksi dari beberapa jenis komoditi yang meliputi: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Adapun capaian kinerja produksi tanaman pangan Kota Bima tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.218. Capaian Kinerja Produksi Tanaman Pangan Kota Bima Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan :				
	-. Padi (GKP)	Ton	54.025	41.169	76,20
	-. Jagung (PK)	Ton	5.113	12.106	236,77
	-. Kedelai (BK)	Ton	2.716	1.309	48,20
	-. Kacang Tanah (BK)	Ton	440	368	83,64
	-. Kacang Hijau (BK)	Ton	12	62	516,67
	-. Ubi Kayu (UB)	Ton	2.849	2.313	81,19
	-. Ubi Jalar (UB)	Ton	111	44	39,64

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, maka capaian kinerja produksi pertanian tanaman pangan mengalami fluktuasi dimana untuk beberapa komoditi seperti padi, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan produksi jika dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun 2015. Sedangkan komoditi jagung dan kacang tanah mengalami peningkatan produksi. Adapun perbandingan jumlah produksi tanaman pangan pada tahun 2016 dengan beberapa tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.219. Capaian Produksi Tanaman Pangan Kota Bima Tahun 2013-2017

No	Komoditi	Produksi (Ton)
----	----------	----------------

	Tanaman Pangan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi (GKP)	36.900	41.879	42.425	35.808	41.169
2	Jagung (PK)	2.466	3.710	8.028	9.955	12.106
3	Kedelai (BK)	1.855	2.129	2.228	1.697	1.309
4	Kacang Tanah (BK)	212	319	281	383	368
5	Kacang Hijau (BK)	6	11	11	110	62
6	Ubi Kayu (UB)	1.374	3.372	2.679	2.600	2.313
7	Ubi Jalar (UB)	76	95	79	0	44

Lebih lanjut, capaian kinerja produksi pertanian tanaman pangan tahun 2017 ini apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima 2013 – 2018 dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi produksi pertanian tanaman pangan pada beberapa komoditi khususnya padi adalah antara lain :

- 1) terjadinya konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun. Data BPS menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017 telah terjadi pengurangan luas lahan pertanian.
- 2) produksi pertanian tanaman pangan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrim seperti kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen para petani di Kota Bima.
- 3) Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang dapat mengancam kelestarian sumberdaya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian tanaman pangan.

Sedangkan beberapa faktor kunci keberhasilan tercapainya beberapa komponen indikator kinerja produksi pertanian adalah meliputi :

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menetapkan lahan pertanian berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima sehingga lahan pertanian tanaman pangan yang ada di bagian timur Kota Bima ditetapkan sebagai kawasan penyangga yang tidak boleh dialihfungsikan.

2) Adanya partisipasi dan komitmen para penyuluh dan tenaga teknis untuk terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani dalam upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.

3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi pertanian.

Terkait dengan penggunaan sumber daya, maka sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada telah digunakan secara efisien dan efektif dalam pencapaian indikator kinerja ini.

13. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang baik

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik diukur melalui kinerja sejumlah indikator utama sebagaimana berikut.

a. Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik

Berdasarkan SK Walikota Bima Nomor 482 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kota Bima, menetapkan Panjang Jalan Kota Bima 204,34 Km, di pertengahan tahun 2016 terjadi perubahan atas Penetapan Status Ruas Jalan Kota melalui Perwali nomo 381 Tahun 2016 tentang Penetapan Status dan Fungsi Jalan Kota Bima, dengan Panjang 258,11 Km. sehingga membawa dampak pada perubahan target kinerja pada RPJMD Kota Bima dan Perubahan Realisasi RPJMD Kota Bima.

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pada tahun 2017 ditargetkan jalan dalam kondisi baik sepanjang 189,50 Km, dan terealisasi sepanjang 196,62 Km atau sebesar 103,8%. berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dalam kondisi baik.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik sebesar 147,14 Km. atau sebesar 102,9% dari target 143,04 Km, maka ditahun 2017 capaian keinerja mengalami peningkatan sebesar 0,90% dari tahun lalu. Berdasarkan indikator ini juga kinerja Dinas PUPR menunjukkan kinerja tahun 2017 lebih baik dari tahun sebelumnya.

Bila diukur dengan target capaian kinerja renstra pada tahun pengukuran sebesar 76,8% dari yang ditargetkan sebesar 73,42% ini juga menunjukkan pencapaian melampaui target renstra tahun pengukuran.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Target akhir RPJMD 2018 yang semula sebesar 173,69 Km atau 85%, dengan Penetapan Status Ruas Jalan Kota Sepanjang 204,43 Km, dan melalui SK penetapan Status Ruas Jalan Kota Bima tahun 2016 tersebut menjadi 258,11 Km, atau 85%, maka pencapaian sasaran tahun pengukuran sebesar 76,18%.

Tabel 2.220. Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Porsentase Luas Permukiman Kumuh Tertangani	24,04	29,56	32,06	108,45	100,00	52,35

b. Persentase luas pemukiman kumuh

Persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan.

Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor ketidakberdayaanlah yang membuat

mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterahkan.

Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan. Terbentuknya permukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slum area* sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan.

Pada Tahun awal perencanaan permukiman kumuh tercatat seluas 108,98 Ha. Pada tahun 2017 direncanakan penanganan pengurangan wilayah kumuh mencapai 29,56 Ha atau sebesar 27,13% dan terealisasi mencapai 32,06 Ha atau 29,42%. Maka capaian kinerja tahun 2017 sebesar 108,45%

Jika dibandingkan pada tahun 2016 sudah terealisasi sebesar 26,20 Ha atau 24,04%. dari target 23,06 Ha dengan peningkatan 3,37 Ha. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 5,86 Ha atau 5,38% dari tahun sebelumnya.

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 sebesar 108,98 Ha atau 31,71% maka pencapaian kinerja pada indikator ini sudah mencapai 29,42%. Dengan luas Kawasan Kumuh Tertangani sebesar 32,06 Ha.

Tabel 2.221. Persentase Luas Permukiman Kumuh Tertangani

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Porsentase Luas Permukiman Kumuh Tertangani	24,04	29,56	32,06	108,45	100,00	52,35

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh, telah dilaksanakan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh serta Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Dari

program-program tersebut antara lain telah dilaksanakan pembangunan maupun peningkatan kualitas jalan lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja, antara lain :

- Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
- Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program prakarsa permukiman 100 0 100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.
- Adanya kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengurangi rumah tidak layak huni antara lain melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

Adapun sejumlah hambatan/masalah yang dihadapi, anatra lainsebagai berikut :

- Pengelolaan sampah yang belum terpadu.
- Masih adanya masyarakat yang kurang sadar tentang perilaku pola hidup bersih dan sehat.
- Masih adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program untuk sasaran strategis ini antara lain ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

c. Persentase luas kawasan tepian air yang tertata

Konsep kota tepian air (*waterfront city*) merupakan salah satu pendekatan yang diadopsi oleh Pemerintah Kota Bima dalam mendorong pertumbuhan kawasan strategis Kota di sepanjang pesisir Teluk Bima khususnya mulai dari Perbatasan Kota di Kawasan Niu sampai dengan Kawasan Pelabuhan Laut Bima dengan luas keseluruhan 138,15 hektar. *Waterfrot city* (Kota Tepian) adalah bagian kota yang berbatasan fisik dengan air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Sedangkan secara khusus di Kota Bima *waterfront city* Teluk Bima adalah bagian kota yang berbatasan fisik dengan tepi pantai yaitu mulai dari Niu – Lawata sampai Amahami. Penataan dan pembangunan kota tepian air diartikan sebagai

suatu proses pembangunan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota berorientasi ke perairan. Kawasan *waterfront city* biasanya berupa area pelabuhan, perdagangan, pariwisata, permukiman atau industri.

Penataan kawasan Kota Tepian Air Teluk Bima pada tahun 2017 mampu terealisasi seluas sekitar 3,1 hektar, dari target sebesar 4,20 hektar kawasan tepian air teluk Bima yang diperjanjikan atau terealisasi 7,39 persen dari target 10 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penataan kawasan kota tepian air pada tahun 2017 direalisasikan seluas 7,39% dari total kawasan rencana yang berupa penataan Lawata, taman perbatasan Niu, Masjid Terapung Amahami dan Penataan Pantai Kolo.

Tabel 2.222. Capaian Kinerja Persentase Luas Kawasan Tepian Air yang Tertata

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2015	2,71 %	2,53 %	93,37 %
2016	10,00 %	3,98 %	39,78 %
2017	10,00%	7,39%	73,90 %

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima, 2018

Capaian kinerja penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima sampai dengan tahun 2017 memang dirasakan melambat. Terdapat beberapa faktor yang menghambat percepatan penataan dan pembangunan kawasan kota tepian air Teluk Bima yaitu antara lain :

- Belum tuntasnya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Detail tata Ruang Kecamatan Rasanae Barat di tingkat BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) sehingga pembahasan raperda pada Badan legislasi belum bisa dilakukan. Hal ini sedikit menghambat investasi pada lahan-lahan privat dikarenakan arahan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi wilayah yang belum ditetapkan dalam bentuk perda RDTR.
- Pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat menyebabkan investasi di bidang infrastruktur perkotaan dan pembangunan kawasan juga berpengaruh.

- Dampak banjir bandang tahun 2016 sehingga alokasi anggaran lebih difokuskan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

14. Sasaran Strategis Terpeliharanya keamanan dan ketertiban

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bima menargetkan penurunan jumlah kriminalitas dengan menetapkan indeks kriminalitas dibawah 100%. Data menyebutkan bahwa jumlah kriminalitas tahun 2017 sebanyak 936 kasus. Dari jumlah kasus tersebut yang sudah diselesaikan adalah sebanyak 274 kasus kemudian yang masih dalam penyelidikan 621 kemudian penyidikan 41 kasus. Dengan menggunakan formula perhitungan indeks kriminalitas maka diperoleh angka kriminalitas di Kota Bima adalah lebih dari 100 dari target 97,50 atau kurang dari 100. Jumlah kasus ini naik secara signifikan dibandingkan dengan jumlah tindak kriminalitas pada tahun 2016 yaitu sebanyak 201 kasus, dan tahun jumlah kriminalitas tahun 2015 yang tercatat sebanyak 185 kasus. Dengan menggunakan formulasi yang telah ditentukan dalam menghitung indeks kriminalitas, diketahui indeks kriminalitas tahun 2017 sebesar 108,64%. Indeks kriminalitas tahun 2016 bernilai lebih dari 100%, artinya terjadi kenaikan jumlah kasus dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.223. Capaian Kinerja Indeks Kriminalitas Kota Bima Tahun 2015-2017

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Angka Kriminalitas 2015	96,25	118,29	81,37
Angka Kriminalitas 2016	96,25	125,83	76,49
Angka Kriminalitas 2017	97,50	133,87	72,83

Dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, terjadi kenaikan jumlah kasus kriminalitas dibanding tahun sebelumnya.

Capaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja SKPD dalam menjalankan program-programnya. Selain itu merupakan akumulasi kinerja SKPD. Indikator kinerja daerah ini merupakan target pimpinan daerah yang harus dikejar dan didukung SKPD. Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya. Oleh

karena itu indikator kinerja daerah untuk RPJMD ini memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-program yang dilaksanakan SKPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya.

Pada aspek, fokus dan urusan tertentu, indikator kinerja SKPD langsung dijadikan indikator RPJMD. Disadari bahwa penentuan indikator kinerja RPJMD dengan sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah. Karena hal ini dipengaruhi capaian kegiatan atau program tertentu dengan sasaran tertentu pula, yang dilaksanakan SKPD maupun lintas SKPD. Indikator kinerja RPJMD ini dibuat sebagai acuan indikator kinerja SKPD, meski demikian penyusunannya bersifat timbal balik. Dengan kata lain meski menjadi acuan SKPD, tetapi penentuan indikator kinerja RPJMD juga memperhatikan kemampuan SKPD berdasarkan analisa SWOT.

Indikator kinerja RPJMD pada dasarnya merupakan kompromi antara apa yang diinginkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Bima dengan kemampuan dan kesanggupan SKPD. Indikator kinerja ini memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada. Salah satu rujukan ukuran kemampuan daerah adalah melihat kondisi eksisting pencapaian indikator kepemimpinan sebelumnya. Pertimbangan demikian perlu dilakukan karena bagaimanapun juga apa yang diinginkan oleh Walikota dan Wakil Walikota itu tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan kemampuan SKPD, partisipasi masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh daerah.

Dengan kondisi sekarang, maka evaluasi pencapaian kinerja indikator kinerja daerah menjadi sangat penting menurut aspek-aspek dan urusan yang sudah diklasifikasikan dalam RPJMD. Informasi hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah menjadi sangat penting saat ini mengingat masa berlaku RPJMD Kota Bima 2013-2018 sudah hampir berakhir sehingga dalam proses penyusunan RPJMD periode berikutnya maupun penyusunan RKPD tahun 2019 memerlukan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2017. Berikut capaian indikator kinerja Daerah Pemerintah Kota Bima dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 2.224. Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Bima Periode Tahun 2013-2018

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi													
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
1.1.	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	5,46%	5,50%	5,58%	5,60%	5,89%	5,658%	5,76%	5,70%	5,78%	6,00%	6,20%	
1.2.	PDRB Per Kapita (Juta Jiwa)	Rp. 3,51	Rp. 3,63	Rp. 2,17	Rp. 3,76	Rp. 2,29	Rp. 3,91	Rp. 2,42	Rp. 4,08	Rp. 4,25	Rp. 4,25		
1.3.	% penduduk miskin	9,91%	9,74%	9,74%	9,11%	9,85%	8,53%	9,51%	7,90%	9,27%	7,00%	7,00%	
1.4.	IPM	71,72	72,23	71,72	72,75	72,23	73,27	72,99	73,79	73,67	74,31	74,31	
Fokus Kesejahteraan Masyarakat													
1.	Urusan Pendidikan												
1.1.	Angka melek huruf	92,00	93,15	96,40	94,30	96,42	95,45	96,26	96,55	99,85	97,76	97,76	
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,22	10,50	10,50	11,00	10,50	11,00	10,50	11,00	10,50	11,50	11,5	

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	280,9	280,9		299,0		305,1		313,3		320,5		320,5
	a. Angka Partisipasi Kasar (APK) anak usia dini	79,32	79,32	62,72	80,92	88,85	82,51	56,01	84,09	63,04	85,68		85,68
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) anak Usia Dini	79,30	79,30	62,70	80,99	88,83	81,77	56,00	82,55	63,04	83,33		83,33
1.4.	Rasio guru per kelas rata-rata per 1000 jumlah murid dan rasio guru dengan murid												
	a. SD/MI	1:28	1:27	1:27	1:26	1:26	1:25	1:25	1:24	22 : 1	1:23		1:23
	b. SMP/MTs	1:29	1:29	1:29	1 : 28	1:28	1:27	1:26	1:26	26 : 1	1:25		1:25
2.	Urusan Kesehatan												
2.1.	Usia Harapan Hidup	63,22	64,07	69,03	64,32	69,12	65,27	69,35	66,22		67,17		67,17
2.2.	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
2.3.	Persentase balita gizi buruk	5,60%	5,02%	0,08%	4,87%	0,06%	4,49%	0,11%	4,12%	0,10%	4,00%		4,00%
Fokus Seni Budaya dan Olahraga													
1.	Urusan Kebudayaan												

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.1	Jumlah Atraksi Budaya	2 Kali setahun	1 kali		2 kali		3 kali		4 kali	6	5 kali		5 kali
1.2	Jumlah grup kesenian (sanggar seni) per 10.000 Penduduk	4	4	32	5	40	6	64	7	65	10		10
1.3	sanggar seni yang aktif	5	7		10		15		17	26	20		20
2.	Urusan Pemuda dan Olahraga												
2.1.	Capaian prestasi pemuda dan olah raga Tingkat Provinsi	9	12	16	12	17	12	13	12		12		12
	- Capaian Prestasi Pemuda	2	5	4	5	6	5	3	5		5		5
	- Capaian Prestasi Olah Raga	7	7	12	7	11	7	10	7		7		7
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
1.	Urusan Pendidikan												
1.1.	Angka melek huruf	92,0	93,2	96,4	94,3	96,4	95,5	96,3	96,6	99,9	98,0		98,00
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	10,22 Thn	10,50	9,58	11,00	9,96	11,00	10,13	11,00	10,13	11,5		11,5
1.3.	Rata2 Nilai Ujian Nasional SD/MI/Paket A	5,91	6,51	6,51	7,01	5,60	6,51	6,89	7,00	7,51	7,51		7,15

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.4	Rata2 Nilai Ujian Nasional SMP/MTs/Paket B	5,96	6,18	6,18	6,88	5,71	7,00	3,75	7,05	4,50	7,18		7,18
	Jumlah Siswa yang berprestasi Osn Tingkat Provinsi												
	- SD/MI/Paket A	2,0	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00		3,00		3,00
	- SMP/MTs/Paket B	3,0	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00		3,00		3,00
	Jumlah Siswa yang berprestasi Osn Tingkat Nasional												
	- SD/MI/Paket A	1,0	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	0,00	1,00		1,00
	- SMP/MTs/Paket B	1,0	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	0,00	1,00		1,00
	Prosentase Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan												
	- SD/MI/Paket A	100,0	100,00	98,28	100,00	100,00	100,00	97,35	100,00	97,35	100,00		100,00
	- SMP/MTs/Paket B	100,0	100,00	99,35	100,00	100,00	100,00	98,25	100,00	98,25	100,00		100,00
	Porsentase Angka Mengulang Kelas												
	- SD/MI/Paket A	0,0	0,00	360 siswa	0,00	322 siswa	0,00	242 siswa	0,00	163 siswa	0,00		0,00
	- SMP/MTs/Paket B	0,0	0,00	15 siswa	0,00	20 siswa	0,00	3 siswa	0,00	11 siswa	0,00		0,00
	Porsentase Angka Putus Sekolah												
	- SD/MI/Paket A	0,03	0,03	51 siswa	0,02	30 siswa	0,01	47 siswa	0,01	36 siswa	0,00		0,00
	- SMP/MTs/Paket B	0,0	0,04	4 siswa	0,04	51 siswa	0,03	31 siswa	0,03	6 siswa	0,01		0,01
	Porsentase Jumlah Guru yang lulus UKG												

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	- SD/MI	-	-	-	-	0,08	-	0,10		0,14		0,14	
	- SMP/MTs	-	-	-	-	0,10	-	0,14		0,21		0,21	
	Rasio Siswa Perkelas												
	- SD/MI	25:1	24:1	25 : 1	23:1	22 : 1	"22:1	21 : 1	21 : 1	21 : 1	20:1	20:1	
	- SMP/MTs	29:1	29:1	30 : 1	28:1	21 : 1	27:1	24 : 1	26:1	26 : 1	25:1	25:1	
	Persentase Sarana Pembelajaran Teknologi Informasi												
	- SD/MI	0,0	1,00	0,00	2,00	7,00	3,00	12,00	5,00	12,00	6,00	6,00	
	- SMP/MTs	0,0	1,00	0,00	2,00	3,00	4,00	14,00	5,00	14,00	6,00	6,00	
1.5	Rasio guru per kelas rata-rata per 1000 jumlah murid dan rasio guru dengan murid												
	- SD/MI	1:28	1:27		1:26	22 : 1	1:25	21 : 1	1:24	21 : 1	1:23	1:23	
	- SMP/MTs	1:29	1:29		1:28	21 : 1	1:27	24 : 1	1:26	24 : 1	1:25	1:25	
1.6	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK												
	- SD/MI	50	50	0	60	0	70	7	80	12	100	100	
	- SMP/MTs	30	30	0	40	0	50	3	60	14	70	70	
2.	Urusan Kesehatan												
2.1	Persentase Balita Gizi Buruk	0,20%	0,17%	0,06%	0,18%	0,06%	0,17%	0,08%	0,16%	0,08%	0,15%	0,15%	

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.2	Angka Kematian Bayi	9,27/1000 kh	7.02/1000 kh	19 kss	5,81/1000 kh	17 kss	3,60/1000 kh	25 kss	2,39/1000 kh	6 kss	0,59/1000 kh		0,59/1000 kh
2.3	Angka Kematian Ibu AKI)	198,7/100.000 KH	150/100.000 KH	75/100000KH	120/100.000 KH	151/100000KH	100/100.000 KH	87/100000KH	80/100.000 KH	148/100000KH	75/100.000 KH		75/100.000 KH
2.4	Persentase Kelurahan STBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
2.5	Persentase sarana Pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	50%	50%	60%	60%	60%	70%	60%	80%	60%	90%		90%
2.6	Persentase penduduk miskin penerima kartu Jaminan Kesehatan 'JUJUR SEHATI'	65%	70%	100%	75%	100%	80%	74%	85%	100%	90%	100%	90%
2.7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	2%	9%	60%	8%	93%	7%	95%	6%		5%		5%
2.8	% Posyandu Aktif	75%	75%		75%		77%		77%		77%		77%
2.9	% Kelurahan Siaga Aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
2.10	% Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD/setingkat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
2.11	% Pemeriksaan kesehatan siswa sekolah lanjutan	0%	35,00%		35,00%		35,00%		35,00%		35,00%		35,00%
2.12	% Pembinaan Sekolah Sehat	15 sklh	15 sklh		15 sklh		15 sklh		15 sklh		15 sklh		15 sklh
2.13	Presentase balita di timbang berat badannya	56,41%	61,06%		66,86%		70,74%		75,42%		80,20%		80,20%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	(%D/S)												
2.14.	presentase penyediaan Mp- Asi untuk anak 6-24 bln Gakin	65,82%	65,82%		65,82%		65,82%		65,82%		65,82%		65,82%
2.15.	% Jumlah kelurahan KLB yg ditanggulangi <24 jam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
2.16.	% Poskesdes	97,36%	97,36%		97,36%		100%		100%		100%		100%
2.17.	% Puskesmas	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5		1/5
2.18.	% Tersedianya sarana & prasarana rumah sakit	0%	20%		20%		20%		20%		20%		20%
2.19.	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	109,13%	100%	100%	100%	104%	100%	111%	100%	114%	100%		100%
2.20.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85,98%	85,00%	91%	85%	92%	90%	83%	90%		95%		95%
2.21.	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	92,42%	95,00%	98%	95%	97%	95%	89%	97%		97%		97%
2.22.	Cakupan peserta KB aktif	28,30%	70%	83%	70%	83%	75%	88%	80%		80%		80%
2.23.	Cakupan Kunjungan Neonatus (KN3)	89,52%	97,93%	93%	90%	95%	99%	99%	100%		100%		100%
2.24.	Cakupan Kunjungan Bayi	89,47%	92%	94%	90%	95%	90%	86%	90%		95%		95%
2.25.	Cakupan Kunjungan Balita	71,35%	87,47%	72%	80%	82%	80%	73%	80%		82%		82%
3.	Urusan Pekerjaan Umum												

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3.1.	% panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	53,00%	61,63%	61,63%	67,15%	67,16%	75,00%	72,01%	80,00%	76,18%	85,00%		85%
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi Teknis	43,00%	47,00%	0,49	50,00%	0,51	52,00%	0,55	60,00%	0,72	65,00%		65,00%
3.3.	Persentase Jaringan Irigasi Teknis	43,00%	47,00%	48,75%	50,00%	51,20%	52,00%	54,53%	60,00%	71,74%	65,00%		65,00%
3.4.	% rumah tangga pengguna air bersih	70,00%	75,88%	76,21%	80,83%	80,87%	87,00%	87,19%	95,00%	93,25%	100,00%		100,00%
3.5.	% rumah tangga bersanitasi	71,00%	74,67%	74,92%	76,50%	76,50%	80,00%	80,23%	90,00%	87,23%	100,00%		100,00%
3.6.	% luas permukiman kumuh	10,33%	9,00%	3,35%	7,00%	3,43%	5,00%	8,17%	3,00%	6,03%	0,00%		0,00%
3.7.	% luas kawasan tepian air (waterfront city) yang tertata	1,00%	2,00%		2,71%		20,00%		45,00%		60,00%		60,00%
3.8.	% konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi	96,98%	97,37%		97,75%		98,50%	100,51%	99,20%	101,45%	100,00%		100,00%
3.9.	%Penerangan Jalan Umum yang berfungsi baik		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,64%	79,64%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
3.10.	% Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase	27,00%	27,00%	27,86%	35,00%	36,20%	42,00%	43,99%	46,00%	57,03%	50,00%		50,00%
3.11.	% Panjang Sungai Tertangani	12,60%	12,60%	43,97%	14,45%	45,92%	16,30%	47,26%	18,15%	50,89%	20,00%		20,00%
3.12.	Luas Wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	20,00%	20,00%	-	40,00%	-	60,00%	-	100,00%	2 dokumen	100,00%		100,00%
3.13.	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	22,31%	27,00%	4,31%	32,00%	4,81%	37,00%	5,20%	42,00%	5,54%	47,00%		47,00%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4.	Urusan Perumahan												
4.1.	% luas permukiman kumuh	10,33%	9,00%	3,35%	7,00%	3,43%	5,00%	8,17%	3,00%	6,03%	0,00%		0,00%
4.2.	% Rumah Layak Huni	92,82%	94,00%	93,66%	95,00%	91,51%	97,00%	88,88%	99,00%	91,28%	100,00%		100,00%
4.3.	Ketepatan waktu Tanggap Darurat Bencana Kebakaran	> 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit		< menit
5.	Urusan Penataan Ruang												
5.1.	Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	0%	20%	0%	40%	0%	60%	0%	100%	0%	100%		100%
5.2.	% luas permukiman kumuh	10,33%	9,00%	3,35%	7,00%	3,43%	5,00%	8,17%	3,00%	6,04%	0,00%		0,00%
5.3.	% Bangunan yang memiliki sertifikat IMB	22,31%	27,00%	4,31%	32,00%	4,81%	37,00%	5,20%	42,00%	5,54%	47,00%		47,00%
6.	Urusan Perencanaan Pembangunan												
6.1.	% SKPD yang dokumen perencanaannya selaras RPJMD	60,00%	60,00%	-	70,00%	58,43%	80,00%	83,01%	90,00%	100,00%	100,00%		100,00%
6.2.	% Program RKPD yang selaras dengan RPJMD	60,00%	70,00%	88,66%	80,00%	88,66%	90,00%	97,15%	100,00 %	88,95%	100,00%		100,00%
6.3.	% Dokumen RKPD dalam KUA PPAS	60,00%	70,00%	100,00%	80,00%	100,00%	90,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%		100,00%
6.4.	% Perencanaan SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PerPres 29/2014, Permen PAN	35,00%	50,00%	-	65,00%	-	75,00%	80,61%	85,00%	100,00%	90,00%		90,00%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	53/2014, Permendagri 54/2010)												
6.5	% Dokumen Perencanaan Strategis SKPD dalam RKPD	45,00%	48,00%	-	52,00%	-	57,00%	45,00%	60,00%	60,00%	80,00%		80,00%
6.6	Tersedianya Rencana Induk Kelitbangan sesuai dengan ketentuan penyusunan	-	-	20,00%	-	30,00%	-	40,00%	50,00%	50,00%	60,00%		60,00%
6.7	% Penyajian Basis Data Kelitbangan	-	-	10,00%	-	15,00%	-	20,00%	30,00%	30,00%	50,00%		50,00%
6.8	% Hasil Kelitbangan yang menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	10,00%	15,00%	1,00%	20,00%	3,00%	25,00%	9,00%	30,00%	35,00%	40,00%		40,00%
7.	Urusan Perhubungan												
7.1.	% ketersediaan fasilitas dan prasarana LLAJ	0,00%	100,00%	95,00%	90,00%	85,00%	80,00%	75,00%	70,00%	55,00%	0,00%		0,00%
7.2.	Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi	96,98%	97,37%		97,75%		98,50%	100,51%	99,20%	101,45%	100%		100%
7.3.	Persentase angkutan umum yang lulus uji KIR	85,00%	90,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
8.	Urusan Lingkungan Hidup												

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
8.1.	% penanganan sampah	20,50%	25,00%	90,00%	30,00%	95,07%	35,00%	65,87%	40,00%	54,10%	45,00%		45,00%
8.2.	Penurunan angka pencemaran dan perusakan lingkungan	30,00%	48,00%	50,00%	52,00%	55,00%	58,00%	65,00%	78,00%	76,00%	100,00%		100,00%
8.3.	% Sumber mata air terlindungi	60%	62%	3 lokasi	71%	4 lokasi	38%	5 lokasi	41%	5 lokasi	43%		43%
8.4.	Peningkatan jumlah lembaga masyarakat yang peduli akan kelestarian SDA	0 Pokmas	0 Pokmas	4 pokmas	2 Pokmas	4 pokmas	0 Pokmas	5 pokmas	4 Pokmas	5 pokmas	6 Pokmas		6 Pokmas
8.5.	% tersedianya RTH publik minimal 20%	6,60%	8,00%	19,00%	10,00%	20,90%	21,00%	22,80%	25,00%	23,75%	30,00%		30,00%
9.	Urusan Pertanahan												
9.1.	Cakupan lahan pemerintah daerah yang bersertifikat	2,24 Ha	1,19 Ha		3,07 Ha		2 Ha		2 Ha		2 Ha		2 Ha
10.	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil												
10.1	Rasio penduduk yang telah memiliki e-KTP	6,13%	6,13%	58,17%	7,05%	64,86%	7,98%	6,66%	8,35%	78,31%	9,73%		9,73%
10.2	% jumlah pelayanan dibidang pendaftaran penduduk yang telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan	6,13%	6,13%	4,09%	6,37%	5,71%	6,60%	6,09%	7,63%	7,25%	8,53%		8,53%
10.3	Rasio kepemilikan akta kelahiran	6,05%	6,05%	2,79%	6,37%	2,91%	7,80%	3,75%	8,59%	4,98%	9,71%		9,71%
10.4	Rasio pasangan yang	6,05%	6,05%	5,90%	7,05%	6,25%	7,05%	6,09%	7,25%	6,66%	8,18%		8,18%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	berAkta Nikah												
10.5	% Penerbitan Akte Kematian	6,15%	6,15%	3,09%	7,28%	5,39%	7,28%	375,69%	8,59%	511,90%	9,28%		9,28%
11.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
11.1	% Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	31,43%	38,26%	50,37%	43%	50%	50,04%	44,91%	52,74%	37,31%	52,74%		52,74%
11.2	% partisipasi perempuan di Lembaga Swasta	44,89%	45,68%	49,63%	48%	50%	49,02%	47,48%	49,63%	57,94%	49,63%		49,63%
11.3	% partisipasi perempuan di lembaga legislatif	4,00%	12,00%	8,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%		12,00%
11.4	% pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	58,84%	89,47%	0,02%	81,81%	0,05%	70,51%	0,09%	147,11 %	100,00%	147,11%		147,11%
11.5	Terwujudnya Kota Bima Kota Layak Anak	-	1	-	2	-	3	-	5	100,00%	10		10
12.	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera												
12.1	Cakupan peserta KB aktif	62,00%	64,00%	44,90%	65%	76,80%	66,00%	98,01%	68,00%	98,36%	69,57%		69,57%
12.2.	Jumlah peserta KB aktif tambahan	2,20%	2,54%	104,78%	3%	100,82%	2,69%	105,60%	2,74%	405,84%	2,78%		2,78%
12.3.	% keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	34,72%	35,00%	131,43%	39%	115,38%	40,00%	102,50%	45,00%	71,11%	67,50%		67,50%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
13.	Urusan Sosial												
13.1	Persentase PMKS yang ditangani	16,10%	16,10%	48,13%	18,52%	74,99%	21,30%	78,69%	24,50%	84,59%	28,18%		28,18%
14.	Urusan Ketenagakerjaan												
14.1	Persentase Pengangguran terbuka	-	-	9,21%	-	10%	10,15%	10,15%	10,05%	8,89%	10,00%		10,00%
14.2	Porsentase keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	60,00%	60,50%	69,32%	61%	67%	70,00%	67,02%	75,00%	73,24%	80,50%		80,50%
14.3	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	117,00%	100,00%		100,00%
15.	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah												
15.1	Jumlah UMKM	1874 UMKM	1956 UMKM	3535 UMKM	2042 UMKM	4944UMK M	2135 UMKM	6303 UMKM	2226 UMKM	7080 UMKM	2323 UMKM		2323 UMKM
15.2	Jumlah Koperasi Aktif	64	74	72	81	85	86	93	96	108	101		101
16	Urusan Penanaman Modal												
16.1	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	1-4 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-2,5 hari	1,25 hari	1-2,5 hari		1-2,5 hari
17.	Urusan Kebudayaan												

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
17.1	Persentase Kesenian/Seni Bima yang dilestarikan	0,35%	35,00%	-	45,00%	-	55,00%	-	65,00%	65,00%	75,00%		75,00%
17.2	Persentase Permainan Tradisional yang dilestarikan	6,67%	6,67%	-	13,33%	-	20,00%	-	26,67%	26,67%	33,33%		33,33%
17.3	Persentase Adat Tradisi dan Budaya yang dilestarikan	25,00%	25,00%	-	32,50%	-	40,00%	-	47,50%	47,00%	55,00%		55,00%
17.4	Persentase Peninggalan Sejarah yang dilestarikan	1,64%	1,64%		4,92%		8,20%		11,48%		16,39%		24,59%
17.5	Meningkatkan Destinasi Wisata Budaya	2000	2000	-	2500	-	3000	-	3500	3270	4000		5000
18.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga												
18.1.	Capaian prestasi pemuda dan olah raga	2	5		5		5		5		25		25
18.2	Jumlah Klub Olahraga	20	25		27		30		37		38		38
18.3	Jumlah gedung olahraga	1	1		2		3		3		4		4
19.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri												
19.1.	jumlah konflik SARA	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0
19.2	Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat dalam	2%	5%	15%	10%	15%	15%	20%	30%	20%	50%		50%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	menghadapi potensi konflik												
19.3	% Gejala Konflik yang diatasi	10%	15%	10%	20%	10%	25%	15%	30%	30%	30%		30%
19.4	Persentase Cakupan wilayah potensi konflik	30%	25%	5%	20%	10%	18%	5%	15%	15%	10%		10%
19.5	Persentase Pembinaan terhadap LMS dan Ormas	20%	30%	5%	40%	20%	50%	15%	60%	40%	65%		65%
19.6	Persentase pembinaan politik terhadap aparat dan masyarakat	5%	8%	10%	13%	15%	17%	25%	20%	20%	20%		20%
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
20.1.	% SKPD dengan indeks SAKIP baik	45%	52,94%	62,07%	64,71%	68,97%	76,47%	75,86%	80,00%	82,76%	88,24%		88,24%
20.2.	Indeks SAKIP	C	CC	C	B	CC	B	B	BB	B	A		A
20.3.	Cakupan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	4 MOU	10 MOU		12 MOU		12 MOU		12 MOU		12 MOU		12 MOU
20.4.	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)	350 juta	750 juta	785.000.000	1.5 M	##### ###	3 M	##### ###	4 M	4,230 M	4 M		4 M
20.5.	% APiP yang mengikuti peningkatan kapasitas	85,00%	88,00%	100,00%	90,00%	88,00%	95,00%	93,33%	96,00%	94,29%	97,00%		98,00%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
20.6.	% publikasi program pengawasan	0%	95%		100%		100%		100%		100%		100%
20.7.	Perolehan nilai pada MTQ tingkat Provinsi	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu		5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu	'9 medali emas, 6 medali perak, 5 medali perunggu	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu	'3 medali emas, 3 medali perak, 2 medali perunggu	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu	'7 medali emas, 8 medali perak, 4 medali perunggu	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu		5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu
20.8.	Pelaksanaan SIDAK pegawai untuk meningkatkan disiplin PNS	15 kali	25 kali		30 kali		35 kali		25 kali		25 kali		25 Kali
20.9.	Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan penjurangan struktural	300 org	322		445 Org		350 org		380 org		450 org		450 org
20.10.	Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi	600 org	957 org		834 org		607 org		603 org		940 org		940 org
20.11.	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	1-4 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1 -2,5 hari		1 -2,5 hari
20.12.	Jumlah Izin yng diterbitkan		1775		1954		2149		2367	2033	2591		2591
	- Izin gangguan (Ho)	54 lembar (7)	500	600	550	535	605	437	666	472	723		723
	- Surat Izin Menempati Kios (SIMK)	50	35	18	39	20	42	10	47	7 lembar	51		51
	- Bahan Bakar Minyak tanah (BBMT)	30 lembar (36,1)	75	54	83	81	92	77	102	95 lembar	112		112

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	- Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	190 lembar (99,1%)	100	117	110	112	121	105	132	129 lembar	143		143
	- Surat Izin Usaha Produksi (SIUP)	879 lembar (114%)	700	733	770	744	847	793	932	812 lembar	1025		1025
	- Izin Tand Daftar Perusahaan (TDP)	594 lembar (216 %)	250	450	275	503	303	560	333	672 lembar	366		366
	- Izin Tand Daftar Industri (TDI)	52 lembar (62,7%)	75	52	83	52	91	46	102	45 lembar	112		112
	- Izin Tanda Daftr Gudang (TDG)	13 lembar (23,6)	40	12	44	12	48	18	53	17 lembar	59		59
20.1 3	Jumlah kelurahan Tangguh Bencana	0,00%	6	6	15	15	20	20	25	26	38		38
21.	Ketahanan Pangan												
21.1	- Ketersediaan energi dan protein perkapita	93,81%	80,00%	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%	95,35%	90,00%		90,00%
21.2	- Penguatan cadangan pangan	0,00%	55,00%	0,00%	60,00%	58,33%	60,00%	62,21%	60,00%	64,12%	60,00%		60,00%
21.3	- Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan didaerah	66,67%	81,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%		90,00%
21.4	- Stabilitas harga dan pasokan pangan	97,07%	84,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%		90,00%
21.5	- Skor pola pangan dan harapan (PPH)	71,00%	87,00%	93,00%	90,00%	94,60%	90,00%	95,00%	90,00%	95,30%	90,00%		90,00%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
21.6	-Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0,00%	65,00%	100,00%	80,00%	100,00%	80,00%	100,00%	80,00%	100,00%	80,00%		80,00%
21.7.	- Penanganan daerah rawan pangan	50,00%	55.50%	100%	60,00%	100,00%	60,00%	100,00%	60,00%	100,00%	60,00%		60,00%
21.8.	- Persentase daerah rawan pangan yang mendapat penanganan	90,00%	90%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
	Ketersediaan Informasi Harga Komoditi Pertanian (minggu)	48	48	52	48	52	48	100	48	100	48		48
21.9.	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan (ton):	42.889	47.584	51.515	52.830	55.731	58.695	50.553	65.266	50.817	72.635		
	- Padi (GKP)	36.900	40.590	41.879	44.649	42.425	49.114	35.808	54.025	34.615	59.428		59.428
	- Jagung (PK)	2.466	2.959	3.710	3.551	8.028	4.261	9.955	5.113	12.106	6.136		6.136
	- Kedelai (BK)	1.855	2.041	2.129	2.245	2.228	2.469	1.697	2.716	1.309	2.987		2.987
	- Kacang Tanah (BK)	212	254	319	305	281	366	383	440	368	528		528
	- Kacang Hijau (BK)	6	7	11	9	11	10	110	12	62	15		15
	- Ubi Kayu (UB)	1.374	1.649	3.372	1.979	2.679	2.374	2.600	2.849	2.313	3.419		3.419
	- Ubi Jalar (UB)	76	84	95	92	79	101	-	111	44	122		122
21.10.	Petani yang menerapkan teknologi pertanian sesuai	10,00%	15,00%	100,00%	20,00%	100,00%	23,50%	100,00%	30,00%	100,00%	30,00%		30,00%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	anjaran												
21.11.	Penyuluh yang terampil dalam pendampingan dan pengawalan penerapan teknologi pertanian sesuai anjaran	24,00%	30,00%	100,00%	35,00%	100,00%	40,00%	100,00%	45,00%	100,00%	50,00%		50,00%
21.12.	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	18.000 ton	18.500 ton	-	19.500 ton	-	20.000 ton	5143 ton	22.567 Ton	8017 ton	24.000 ton		24.000 ton
21.13.	- Persentase kesediaan pangan utama	5,00%	8,00%	0,00%	7,00%	0,00%	10,00%	20-40%	14,00%	20-40%	14,00%		14,00%
21.14.	- Ketersediaan energi dan protein perkapita	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	95,35%	100,00%		100,00%
21.15.	- persentase cadangan pangan	7,00%	7,00%	0,00%	8,00%	0,00%	10,00%	0,00%	12,00%	60,00%	15,00%		15,00%
21.16.	Terjaganya distribusi dan akses pangan												
	- persentase kenaikan harga pangan	12,00%	10,00%	7,56%	8,00%	1,04%	6,00%	26,62%	5,00%	3,00%	3,00%		3,00%
	- persentase penurunan pasokan pangan	20,00%	20,00%	17,00%	18,00%	15,00%	16,00%	14,00%	14,00%	11,43%	12,00%		12,00%
21.17.	Meningkanya kualitas pangan masyarakat												
	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	70,00%	75,00%	80,19%	78,00%	81,28%	80,00%	82,30%	86,00%	87,50%	90,00%		90,00%
	- persentase kualitas pangan yang sesuai standar keamanan pangan	95,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	20,00%	100,00%	20,00%	100,00%		100,00%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
22.1.	Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) yang ditangani	30%	150 unit (8,20%)	75 unit (6,34%)	150 unit (8,20%)	463 unit (8,49%)	150 unit (8,20%)	534 unit (11,12)	275 unit (15,04 %)	810 unit (8,72%)	275 unit (15,04%)		50%
22.2.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
22.3.	Perolehan prestasi keikutsertaan Lomba Kelurahan	0,05	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5
22.4.	Perolehan prestasi keikutsertaan Lomba Posyandu	0,05	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5
22.5.	Jumlah Aplikasi IT dalam Tata Kelola Pemerintah	2	2	0	4	0	6	0	8	17	10		10
23.	Statistik												
23.1.	Persentase Ketersediaan data SIPD	1 paket/5 Tahun	190 Buku		140 Buku		160 Buku		140 Buku		160 Buku		790 Buku
23.2.	tersedianya data statistik daerah	0	20%	0%	25%	0%	30%	0%	40%	0%	45%		50%
23.3.	Tersedianya informasi potensi sumber daya investasi daerah	1dokumen	2 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
25.	Komunikasi dan Informatika												
25.1.	Jumlah Aplikasi IT dalam Tata Kelola Pemerintah	2	2	0	4	0	6	0	8	17	10		10
26.	Perpustakaan												
26.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan	150 orang	1000 orang	2598 orang	1700 orang	3000 orang	2500 orang	3874 orang	3000 orang	4124 orang	3500 orang		3500 orang
Fokus Layanan Urusan Pilihan													
1.	Pertanian												
1.1.	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Ton)	41.251,0	45.400,0	47.718,0	47.660,0	52.681,0	49.019,0	47.460,0	50.991,0	48.330,0	51.610,0		51.610,0
	- Padi (GKG)	36.900 ton	40.000 ton	41.879	41.072 ton	42.425	42.200 ton	35.808	43.900 ton	34.615	44.200 ton		44.200 ton
	- Jagung	2.496 ton	3.500 ton	3.710	4.625 ton	8.028	4.787 ton	9.955	4.978 ton	12.406	5.202 ton		5.202 ton
	- Kedelai	1.855 ton	1.900 ton	2.129	1.963 ton	2.228	2.032 ton	1.697	2.113 ton	1.309	2.208 ton		2.208 ton
	-Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	60,00%	65,00%	100,00%	80,00%	100,00%	80,00%	100%	80,00%	100,00%	80,00%		80,00%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.2.	Produksi Pertanian Tanaman Pangan (ton)	42.889	47.584	51.515	52.830,0	55.731,0	58.695,0	50.553,0	65.266, 0	50.817,0	72.635,0		72.635,0
	- Padi (GKP)	36.900	40.590	41.879	44.649	42.425	49.114	35.808	54.025	34.615	59.428		59.428
	- Jagung (PK)	2.466	2.959	3.710	3.551	8.028	4.261	9.955	5.113	12.106	6.136		6.136
	- Kedelai (BK)	1.855	2.041	2.129	2.245	2.228	2.469	1.697	2.716	1.309	2.987		2.987
	- Kacang Tanah (BK)	212	254	319	305	281	366	383	440	368	528		528
	- Kacang Hijau (BK)	6	7	11	9	11	10	110	12	62	15		15
	- Ubi Kayu (UB)	1.374	1.649	3.372	1.979	2.679	2.374	2.600	2.849	2.313	3.419		3.419
	- Ubi Jalar (UB)	76	84	95	92	79	101	-	111	44	122		122
1.3.	Produksi perkebunan (Ton) = Jumlah produksi perkebunan pada tahun n 1) Tembakau 2) Jambu mente 3) Kelapa	1) 3,30 2) 168,78 3) 26,69	1) 3,40 2) 173,84 3) 27,49	1) 3,40 2) 161,13 3) 25,71	1) 3,40 2) 173,84 3) 27,49	1) 2,10 2) 158,41 3) 25,56	1) 3,40 2) 173,84 3) 27,49	1) 210 2) 155,91 3) 27,45	1) 3,40 2) 173,84 3) 27,49	1) 2,10 2) 157,65 3) 27,07	1) 3,40 2) 73,84 3) 27,49		1) 3,40 2) 73,84 3) 27,49
1.4.	Pengkartuan Ternak (ekor)	18.373	20.110	15.212	21.799	15.396	23.631	15.186	25.616	18.134	27.767		27.767
1.5.	Vaksinasi Ternak	17.500	18.445	17.814	19.441	16.818	20.491	21.970	21.597	18.388	22.764		22.764
1.6.	Penurunan Angka Kematian Pedet	18%	17%	18%	16%	17%	15%	20%	14%	19%	13%		13%
1.7.	Penurunan Kasus Penyakit	10%	12%	87%	14%	26%	16%	42%	18%	99%	20%		20%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Hewan Menular												
2.	Kahutanan												
2.1.	Penanganan hutan dan lahan ="Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi" /"Luas hutan dan lahan" "x100%"	437/14.980 ,95=(2,60%)	500/14.980,95 (3,34%)		500/14.980,95 (3,34%)		500/14.980,95 (3,34%)		500/14.980,95 (3,34%)		500/14.980,95 (3,34%)		500/14.980,95 (3,34%)
2.2.	Jumlah pelanggaran di bidang kehutanan : 1. Kebakaran hutan 2. Perladangan liar 3. Peredaran hasil hutan	1. 24 kejadian 2. 17 kejadian 3. 15 kejadian	1. 5 kej. 2. 4 kej. 3. 3 kej.		1. 5 kej. 2. 4 kej. 3. 3 kej.		1. 5 kej. 2. 4 kej. 3. 3 kej.		1. 5 kej. 2. 4 kej. 3. 3 kej.		1. 5 kej. 2. 4 kej. 3. 3 kej.		1. 5 kej. 2. 4 kej. 3. 3 kej.
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral												
3.1.	Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan	13,20%	15,26%	100,00%	17,38%	99,85%	19,68%	0,00%	22,24%	0,00%	25,00%		25,00%
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	5,58%	5,78%	0,39%	5,87%	0,39%	5,90%	0,37%	5,96%		5,99%		5,99%
4.	Pariwisata												

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4.1.	Kunjungan wisata	7.785 Org	8.583 Org	18805	9.464 Org	19168	10.434 Org	19.503	11.505 Org		12.685 Org		12.685 Org
5.	Kelautan dan Perikanan												
5.1.	Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan	9 klp	9 Klp	11 klp	12 klp	14 klp	15 klp	15 klp	18 klp	22 klp	21 klp		21 klp
	- Jumlah kelompok pemula	5 klp	5 klp	5 klp	6 klp	7 klp	7 klp	7 klp	8 klp	10 klp	9 klp		9 klp
	- Jumlah kelompok madya	2 klp	2 klp	4 klp	3 klp	7 klp	4 klp	4 klp	5 klp	6 klp	6 klp		6 klp
	- Jumlah kelompok utama	2 klp	2 klp	3 klp	3 klp	0 klp	4 klp	4 klp	5 klp	6 klp	6 klp		6 klp
5.2.	Jumlah Produksi perikanan:	2370,30 Ton	2.466,92 Ton	2908,89 Ton	2622,85 (ton)	2689,30 Ton	2780.22 Ton	2526,27 Ton	2947.03 Ton	2822,61 Ton	3123.85 Ton		3123.85 Ton
	a. Perikanan tangkap	1.580,50 Ton	1.675,33 Ton	1630,50 Ton	1775,85 (ton)	1712,60 Ton	1882,40 Ton	1744,60 Ton	1995,34 Ton	1995,34 Ton	2115,06 Ton		2115,06 Ton
	b. Perikanan budidaya	789,80 Ton	791,59 Ton	1278,39 Ton	847 (ton)	976,70 Ton	897,82 ton	781,67 Ton	951,69 ton	827,27 Ton	1008,79 Ton		1008,79 Ton
5.3.	Jumlah produk olahan yang dihasilkan (ton)	16.670	16.670	1278,39 Ton	1785	976,70 Ton	18.740	781,67 Ton	19.860	827,27 Ton	20.850		20.850
5.4.	Tingkat konsumsi ikan perkapita pertahun	29,04 kg/kapita/ tahun	29,04 kg/kapita / tahun	39,35 kg/kapita / tahun	32,54 kg/kapita / tahun	33,90 kg/kapita / tahun	35,79 kg/kapita / tahun	31,96 kg/kapita / tahun	39,37 kg/kapita/ tahun	38,83 kg/kapita / tahun	43,31 kg/kapita / tahun		43,31 kg/kapita/ tahun
6.	Perdagangan												

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
6.1.	Penyediaan pasar tradisional sebagai pusat distribusi perdagangan	6	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
6.2.	Jumlah Pedagang Kaki Lima Dan Asongan yang ditangani	272 orang	246		370 orang		400 orang		440 orang		485 orang		485 orang
7.	Perindustrian												
7.1.	Jumlah industri Kecil Menengah (IKM)	121 IKM	129 IKM	-	142 IKM	-	149 IKM	275 IKM	157 IKM	94 IKM	164		164
7.2.	Jumlah sentara industri yang ditangani	73 sentra	73	-	73	-	74	73	74	73	74		74
8.	Ketransmigrasian												
8.1.	Transmigran swakarsa	70 Org	100 Org		120 Org		130 Org		140 Org		150 Org		150 Org
ASPEK DAYA SAING DAERAH													
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah													
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
1.1.	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	5,82%	6,21%	5,58%	6,52%	5,89%	6,75%	5,76%	6,92%	5,78%	7,02%		7,02%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.2.	PDRB Per Kapita	Rp. 3,51 Juta/Jiwa	Rp. 3,63 Juta/Jiwa	Rp.2,17 Juta/Jiwa	Rp. 3,76 Juta/Jiwa	Rp.2,29 Juta/Jiwa	Rp. 3,91 Juta/Jiwa	Rp.2,42 Juta/Jiwa	Rp. 4,08 Juta/Jiwa		Rp. 4,25 Juta/Jiwa		Rp. 4,25 Juta/Jiwa
2.3	Pertumbuhan PAD	20%	20%	50,76%	20%	3,86%	20%	24,19%	20%	16,27%	20%		20%
2.	Pertanian												
1.1.	Produksi Pertanian Tanaman Pangan (ton)	42.889	47.584	51.515	52.830	55.731	58.695	50.553	65.266	50.817	72.635		72.635
	- Padi (GKP)	36.900	40.590	41.879	44.649	42.425	49.114	35.808	54.025	34.615	59.428		59.428
	- Jagung (PK)	2.466	2.959	3.710	3.551	8.028	4.261	9.955	5.113	12.106	6.136		6.136
	- Kedelai (BK)	1.855	2.041	2.129	2.245	2.228	2.469	1.697	2.716	1.309	2.987		2.987
	- Kacang Tanah (BK)	212	254	319	305	281	366	383	440	368	528		528
	- Kacang Hijau (BK)	6	7	11	9	11	10	110	12	62	15		15
	- Ubi Kayu (UB)	1.374	1.649	3.372	1.979	2.679	2.374	2.600	2.849	2.313	3.419		3.419
	- Ubi Jalar (UB)	76	84	95	92	79	101	0	111	44	122		122
1.2.	Produksi Peternakan :	1.176	1.362		1.580		1.832		2.126		2.468		2.468
	- . Produksi Daging	973	1.138	825	1.332	535,5	1.558	607	1.823	728	2.133		2.133

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	- Produksi Kulit	26	30	30	34	61,87	39	47	45	62	51		51
	- Produksi Telur	177	194	177	214	528,4	235	143	258	183	284		284
1.	Perikanan												
1.1	Jumlah Produksi perikanan:	2370,30 Ton	2.466,92 Ton	2908,89 Ton	2622,85 (ton)	2689,30 Ton	2780,22 ton	2526,27 Ton	2947,03 ton	2822,61 Ton	3123,85 ton		3123,85 ton
	a. Perikanan tangkap	1.580,50 Ton	1.675,33 Ton	1630,50 Ton	1775,85 (ton)	1712,60 Ton	1882,40 ton	1744,60 Ton	1995,34 ton	1995,34 Ton	2115,06 ton		2115,06 ton
	b. Perikanan budidaya	789,80 Ton	791,59 Ton	1278,39 Ton	847 (ton)	976,70 Ton	897,82 ton	781,67 Ton	951,69 ton	827,27 Ton	1008,79 ton		1008,79 ton
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur													
1.	Urusan Pekerjaan Umum												
1.1.	% panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	53,00%	61,63%	61,63%	67,15%	67,16%	75,00%	72,01%	80,00%	76,18%	85,00%		85%
1.2.	% konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi	96,98%	97,37%		97,75%		98,50%	100,51%	99,20%	101,45%	100%		100%
2.	Urusan Perencanaan Pembangunan												
2.1	% tersedianya informasi rencana tata ruang dalam bentuk peta	0%	20%	0%	25%	0%	30%	0%	40%	0%	45%		45%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	analog dan peta digital												
3.	Lingkungan Hidup												
3.1.	% penanganan sampah	21%	25%	90,00%	30%	95,07%	35%	65,87%	40%	54,10%	45%		45%
Fokus Iklim Berinvestasi													
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
1.2.	Pertumbuhan PAD	20%	20%	50,76%	20%	3,86%	20%	24,19%	20%	16,27%	20%		20%
1.3.	Lama proses perijinan	1-4 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-2,5 hari	1,25 hari	1 -2,5 hari		1 -2,5 hari
2.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri												
2.1.	jumlah konflik SARA	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0
2.2.	Rasio penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan)	80%	77%		75%	74,00%	73%		70%		57%		57%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.3.	indeks kriminalitas	100%	100%		98%	97,36%	100%		100%		100%		100%
2.4.	Rasio penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan)	80%	77%		75%		73%		70%		57%		57%
Fokus Sumber Daya Manusia													
1.	Ketenagakerjaan												
1.1.	Rasio ketergantungan	50,78%	50,45%	41,71%	50,08%	46,00%	49,88%	46,96%	49,34%		49,05%		49,05%

Dari capaian indikator kinerja daerah tersebut diatas, dapat dideskripsikan permasalahan dan isu strategis sebagai berikut.

Aspek/Fokus	Deskripsi
Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	Dari sisi pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui PDRB. Dilihat dari pertumbuhan PDRB, kinerja ekonomi Kota Bima menunjukkan trend yang cukup menggembirakan, karena terjadi pertumbuhan yang positif. Namun demikian, angka pengangguran terbuka masih cukup tinggi yaitu masih pada kisaran angka 8 persen.
	Jumlah penduduk miskin di Kota Bima selama kurun waktu 2014–2018 menunjukkan trend yang terus menurun. Pada tahun 2014 penduduk miskin di Kota Bima sebesar 9,74% dan mengalami penurunan menjadi 9,27% pada tahun 2017. Hal ini menandakan program pemantasan kemiskinan di Kota Bima berjalan dengan baik. Namun demikian target RPJMD Kota Bima berada pada angka dibawah angka 9 persen.
Fokus kesejahteraan masyarakat	Di sektor pendidikan, angka melek huruf di Kota Bima terus mengalami kenaikan, dari 93,15% pada tahun 2014 menjadi 99,85% pada tahun 2017. Dengan demikian upaya pemberantasan buta huruf harus diteruskan dilaksanakan.
	Dari sisi kesehatan, masih terdapat kasus balita gizi buruk dan angka kematian ibu melahirkan. Sehingga prioritas pembangunan bidang kesehatan lebih difokuskan pada penanganan dua isu strategis ini.
	Ketersediaan rumah layak huni masih belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Demikian juga dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak belum terpenuhi 100%

2. 3. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan yang disajikan dalam sub bab ini hanya difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan

Tabel 2.226.

Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Prioritas Pembangunan
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	Jumlah penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh	4.000.00 0.000	4.230.45 6.000	Pengelolaan zakat masih belum optimal	Pembangunan Agama

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Prioritas Pembangunan
		(ZIS)				
		Rasio Rumah Ibadah	3	3,35	Meskipun rasio rumah ibadah sudah tercukupi, namun masih terdapat rumah ibadah dengan kondisi yang membutuhkan perhatian terutama dalam lingkungan kampung-kampung	Pembangunan Agama
2	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Jumlah konflik SARA	0	0	Meskipun konflik SARA tidak terjadi di Kota Bima namun masih ada potensi konflik horizontal antar kampung yang diakibatkan oleh kenakalan remaja dan bahaya narkoba	Pembangunan Agama Ketertiban dan Keamanan
3	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Persentase nilai budaya yang ditinggalkan	5,00	5,00	Pranata budaya yang ada kalau tidak diperhatikan dan ditangani secara intensif akan semakin berkurang	Pembangunan Pendidikan
4	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	10,00	10,13	Meskipun rata-rata lama sekolah sudah mencapai SMA, namun masih terdapat angka buta huruf yang harus ditangani lebih lanjut.	Pembangunan Pendidikan
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SD	5,50	7,25	Angka rata-rata nilai UN masih perlu ditingkatkan	Pembangunan Pendidikan
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SMP	5,50	4,7	Angka rata-rata nilai UN SMPD masih sangat rendah	Pembangunan Pendidikan
5	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73	73,67	Pengeluaran Perkapita masih perlu ditingkatkan	Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan ekonomi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Prioritas Pembangunan
		Persentase penduduk miskin	9,00	9,27	Target RPJMD untuk tahun 2018 belum tercapai	Penanggulangan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Perumahan dan Permukiman Pembangunan ekonomi Pembangunan Kesehatan
		Pengangguran terbuka	7,50	8,89	Angka pengangguran terbuka masih sangat tinggi (tertinggi di NTB dan diatas rata-rata nasional)	Penanggulangan Kemiskinan Pembangunan ekonomi
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	69,15	69,35	PHBS belum secara merata di masyarakat	Pembangunan Kesehatan
		Angka Balita Gizi Buruk	0,075	0,078	Kasus balita gizi buruk masih tinggi (10 kasus pada tahun 2017)	Pembangunan Kesehatan
		Angka kematian ibu melahirkan	148	188	Kasus kematian ibu melahirkan masih tinggi (5 kasus pada tahun 2017)	Pembangunan Kesehatan
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Rumah tangga pengguna berakses air bersih	90,00	93,25	Program 100-0-100 untuk belum tercapai. Belum semua rumah tangga sudah memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi layak.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Perumahan dan Permukiman
		Persentase Rumah Layak Huni	92,50	91,30		Pembangunan Perumahan dan Permukiman
		Rumah tangga pengguna bersanitasi baik	90	96,92		Pembangunan Infrastruktur
		Persentase konektivitas	100,00	98,61	Kondisi topografi wilayah menjadi	Pembangunan Infrastruktur

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Prioritas Pembangunan
		pusat kegiatan dan pusat distribusi			kendala untuk akselerasi peningkatan konektivitas antar kawasan dalam wilayah	
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja	65,00	62,58	Target RPJMD belum tercapai yaitu pada predikat BB	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	SPIP masih kurang optimal	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
		Persentase SKPD dengan Indeks SAKIP bernilai baik	80	100	Belum semua OPD mampu menerapkan SAKIP sesuai standard an ketentuan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
9	Meningkatnya pelayanan publik prima	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	1,25	1,25	Pelayanan masih manual belum berbasis aplikasi	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,00	Belum semua unit pelayanan publik melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam peningkatan pelayanan public	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	5,70	5,78	Sektor unggulan belum tumbuh secara signifikan	Pembangunan ekonomi
11	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita	14,80	15,82	Pengeluaran perkapita atau daya beli masyarakat masih rendah	Pembangunan ekonomi
12	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan)	55.000	57.371	Produktifitas pertanian tanaman cenderung stagnan selain jagung. Namun maraknya tanaman jagung pada dataran tinggi dan pegunungan berisiko terhadap bencana banjir	Ketahanan Pangan
13	Meningkatnya	Persentase	75,00	76,18	Persentase jalan	Pembangunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Prioritas Pembangunan
	kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	panjang jalan kota dalam kondisi baik			dalam kondisi baik 76,18% . Perlu peningkatan kualitas jalan dan jembatan secara lebih intensif	Infrastruktur
		Persentase luas permukiman kumuh	29,56	32,06	Kawasan kumuh masih cukup luas	Pembangunan Infrastruktur
		Persentase luas kota yang tertata	10,00	7,39	Kawasan strategis dan cepat tumbuh masih perlu penanganan lebih lanjut	Pembangunan Infrastruktur
14	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas	97,50	133,87	Tindakan kriminalitas cenderung meningkat di kalangan masyarakat	Ketertiban dan Keamanan
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Mitigasi Bencana				Pengelolaan sampah baru pada angka 60 persen dari seluruh wilayah Kota Bima. Degradasi lingkungan di wilayah hulu mengakibatkan kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam	Penanggulangan bencana

BAB III

**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam RKPD tahun 2019 ini memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro kota Bima serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun ekonomi global. Pada sisi yang lain proyeksi sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor yang potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien program dan kegiatan dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kota Bima

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambahan bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta dihasilkan di wilayah domestik atau negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu waktu tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besaran PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

Nilai PDRB Kota Bima dengan harga konstan 2010 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.438.560,78 milyar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78% dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.579.603,57 milyar dengan laju pertumbuhan sebesar 5,78%. Nilai proyeksi PDRB tahun 2017 sebesar Rp. 2.701.291,09 milyar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,72%, pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.830.814,09 milyar dan pada tahun 2019 diproyeksi akan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.960.337,09. Perkembangan PDRB Kota Bima mengalami kenaikan setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kota Bima semakin mengalami kemajuan. Kenaikan PDRB kota Bima disebabkan berbagai faktor, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan PDRB kota Bima adalah investasi. Investasi sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi baik perdagangan, Industri, jasa, pertanian, pariwisata ataupun pendidikan. Peningkatan PDRB diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Tabel 3.1.
Proyeksi Nilai PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan Pertumbuhan ekonomi Tahun 2014-2019

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*
PDRB (Juta Rp.)	2.305.405,52	2.438.560,78	2.579.603,57	2.701.291,09	2.830.814,09	2.960.337,09
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,87	5,78	5,78	4,72	4,79	4,58

*Keterangan * adalah angka proyeksi*

Sumber: BPS Kota Bima dan hasil analisis

Pertumbuhan positif ekonomi kota Bima tahun 2014-2019 didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah; *pertama*, terus berjalanya pembangunan di Kota Bima baik disektor publik maupun di sektor swasta; *kedua*, semakin bertambahnya tenaga terampil dan pemanfaatan teknologi yang optimal berakibat pada peningkatan kinerja sektor perindustrian dan sektor pertanian; *ketiga* faktor proses politik lokal dan nasional sebagai dampak kebijakan pemerintah baru baik di eksekutif maupun legislatif melalui visi dan misi pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Perkembangan perekonomian di kota Bima diharapkan mampu menarik investasi yang lebih besar baik dari luar maupun dari pemerintah sangat diperlukan oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor lain yang juga membutuhkan investasi adalah sektor industri, untuk dapat mengembangkan usahanya terutama pada industri-industri kecil dan menengah. Apabila terus dipacu untuk perkembangannya maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja suatu industri agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan juga tenaga yang terampil, selain faktor investasi dan tenaga kerja terampil tersebut, faktor konsumsi juga membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Bima, semakin tinggi konsumsi maka pertumbuhan ekonomi baik.

2. Inflasi

Inflasi kota Bima pada tahun 2017 sebesar 4,08 persen lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Provinsi NTB sebesar 3,70 persen. Peningkatan harga tersebut ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 7,26 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 2,37 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 2,84 persen; Kelompok Sandang sebesar 3,95 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 2,34 persen; Kelompok Pendidikan,

Rekreasi, dan Olah Raga sebesar 0,49 persen; dan Kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 4,73 persen.

Tabel 3. 2
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2012-2017 Kota Bima

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi NTB	3,99	9,51	7,23	3,37	2,61	3,70
Kota Bima	3,61	10,42	7,37	4,07	3,11	4,08

Namun demikian angka inflasi tersebut jika dilihat dari target kinerja RPJMD kota Bima tahun 2013-2018 pada tahap ke-empat berkisar 3,11 persen tidak tercapai, tapi inflasi tersebut cukup rendah karena di bawah angka psikologis inflasi, yaitu 10.

Proyeksi inflasi kota Bima tahun 2019 yang ingin dicapai adalah sebesar 3,26 persen seperti target kinerja tahap ke-lima yang tertuang dalam RPJMD kota Bima tahun 2013-2018. Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi di kota Bima, ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka pendapatan masyarakat cenderung naik dan kegiatan ekonomi juga akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan, serta kegiatan disektor moneter. Ketika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Tetapi jika terjadi sebaliknya tingkat suku bunga terlalu rendah sehingga orang cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya maka hal ini akan dapat mendorong terjadi inflasi. Oleh karena kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini hal itu telah dijalankan dengan baik oleh BI. Di samping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok oleh pemerintah daerah juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di kota Bima. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran supply dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di kota Bima.

3. ICOR

Perkembangan ICOR kota Bima selama kurun waktu 2011-2015 cenderung menurun, Pada tahun 2011 ICOR kota Bima tercatat 6,91 turun menjadi 6,62 pada tahun 2013. Angka ICOR 6,91 berarti untuk memperoleh satu unit tambahan output diperlukan

6,91 unit tambahan investasi. Meskipun terjadi penurunan angka ICOR namun jika dibandingkan dengan ICOR nasional masih diatas rata-rata ICOR nasiona. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses produksi relatif belum efisien. Angka ICOR yang dianggap ideal/efisien berada pada kisaran 3-4.

Tabel.3.3
ICOR Kota Bima dan Nasional tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Bima	7,13	6,60	6,52	6,27	6,11
Nasional	4,05	4,59	4,9	4	4,2

Sumber data BPS kota Bima 2014

Proyeksi ICOR kota Bima untuk tahun 2018 dan 2019 berada pada 5,58 dan 5,34. Penurunan angka ICOR ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan output di Kota Bima. Hal ini menunjukkan juga bahwa ketika ICOR rendah maka investasi yang sama akan dapat menghasilkan output yang lebih besar sehingga nilai PDRB akan dapat naik. Jika nilai PDRB naik maka dapat mendorong terjadinya laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Faktor-faktor lain yang dapat menentukan ICOR antara lain adalah besarnya penambahan Investasi dan komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi yang tepat.

Tabel1.3.4
Proyeksi ICOR tahun 2018-2019

Uraian	2018	2019
ICOR	5,58	5,34

4. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2016 tingkat pengangguran Kota Bima mencapai 8,89% dari total angkatan kerja, sedangkan angka pengangguran Kota Bima Tahun 2017 belum tersedia karena BPS baru akan mengeluarkan data tersebut pada pertengahan tahun 2018. Tren angka pengangguran di Kota Bima mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 angka pengangguran mencapai 9,31% mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi sebesar 8,69% kemudian pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan menjadi 10,15%. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima yang diharapkan terus meningkat, memberikan peluang semakin luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

Pada tahun 2019 jumlah pengangguran di Kota Bima diperkirakan pada angka 6-4,22 persen sesuai dengan target akhir periode RPJMD Kota Bima 2013-2018. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah harus memacu pengembangan sektor ekonomi yang

mampu menyerap tenaga kerja lebih besar seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Statistik ketenagakerjaan Kota Bima selama periode 2013 sampai 2016 hasil olah data Sakernas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.3.5
Statistik Ketenagakerjaan Kota Bima Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
TPAK (%)	66,39	69,32		
Tingkat Pengangguran (%)	9,13	8,69	10,15	8,89
Bekerja	90,87	91,31	89,85	91,11

5. Kemiskinan

Selama kurun waktu 2014-2017, persentase penduduk miskin di Kota Bima mengalami penurunan. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin Kota Bima tercatat sebesar 9,74 persen menurun menjadi sebesar 9,27 persen pada tahun 2017. Penurunan selama empat tahun tersebut belum mencapai target RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018, di mana target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 7,90 persen, namun persentase tingkat kemiskinan kota Bima tersebut masih lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional dan Provinsi NTB tahun 2017 yaitu masing-masing sebesar 10,12 persen dan 15,05 persen.

Tabel.3.6.
Persentase Penduduk Miskin Kota Bima
Tahun 2014- 2017

Kota Bima	2014	2015	2016	2017
Persentase Penduduk Miskin	9,74	9,85	9,51	9,27

Sumber: Bappeda Litbang Kota Bima, 2017

Pada umumnya Kemiskinan dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, di samping terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro kecil, menengah dan koperasi. Koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Proses penganggaran merupakan tahap penting setelah tahapan perencanaan. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan kegiatan dalam bentuk satuan uang untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian dalam melakukan analisis penganggaran keuangan daerah yang tepat harus memperhatikan tujuan organisasi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Akan tetapi, dengan kemampuan finansial yang terbatas maka perlu dilakukan pemilihan prioritas terhadap program-program yang ada di samping mengupayakan efisiensi terhadap pengalokasian anggaran dalam APBD tahun 2019 nanti. Sehingga dengan demikian program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat memberikan kepastian dampak positif dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi keuangan daerah pada sisi pendapatan pada tahun 2019 diasumsikan meningkat sebesar 17,68% dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan tersebut diasumsikan terjadi pada penerimaan Dana Perimbangan yang meningkat sebesar 20,64%, khususnya pada Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 3% dengan asumsi bahwa ada kebutuhan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 yang memerlukan tambahan Dana Alokasi Umum serta peningkatan penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diasumsikan sebesar 76,95%. Adapun proyeksi pendapatan Kota Bima pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bima Tahun 2017- 2020

No	URAIAN	JUMLAH			
		Realisasi Tahun (n-1) 2017 *	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun (n+1) 2020
01.01	Pendapatan Asli Daerah	35.490.315.120,11	33.353.699.104,00	33.353.699.104,00	36.689.069.014,41
01.01.01	Pajak daerah	13.913.270.478,00	14.850.000.000,00	14.850.000.000,00	16.335.000.000,00
01.01.02	Retribusi daerah	5.048.756.746,00	7.454.453.000,00	7.454.453.000,00	8.199.898.300,00

01.01.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.059.377.247,72	912.766.000,00	912.766.000,00	1.004.042.600,00
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	14.468.910.648,39	10.136.480.104,00	10.136.480.104,00	11.150.128.114,41
01.02	Dana Perimbangan	707.754.462.556,00	654.776.523.000,00	789.945.460.090,00	868.940.006.099,00
01.02.01	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	58.616.143.982,00	40.917.409.000,00	40.917.409.000,00	45.009.149.900,00
01.02.02	Dana Alokasi Umum	455.972.250.000,00	455.972.250.000,00	469.651.417.500,00	516.616.559.250,00
01.02.03	Dana Alokasi Khusus	193.166.068.574,00	157.886.864.000,00	279.376.633.590,00	307.314.296.949,00
01.03	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	44.119.697.140,00	76.340.584.942,00	76.340.584.942,00	108.949.643.436,21
01.03.01	Hibah	0	0	0	0
01.03.02	Dana darurat	0	0	0	0
01.03.03	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	36.619.697.140,00	48.590.584.942,00	48.590.584.942,00	53.449.643.436,21
01.03.04	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	7.500.000.000,00	27.750.000.000,00	27.750.000.000,00	55.500.000.000,00
01.03.05	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)		787.364.474.816,11	764.470.807.046,00	899.639.744.136,00	1.014.578.718.549,61

Sumber: BPKAD Kota Bima Tahun 2018, data diolah.

*angka realisasi APBD 2017

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembahasan mengenai arah kebijakan keuangan daerah akan mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi)

untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD direncanakan pada tahun 2019 sama dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

b. Dana Perimbangan;

Dana Perimbangan diperkirakan akan meningkat sebesar Rp. 135.168.937.090,00,- yang bersumber dari Peningkatan Dana Alokasi Umum yang diperkirakan akan naik sebesar 3% pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan dana alokasi khusus (DAK) diperkirakan akan menjadi sebesar Rp. 279.376.633.590,00,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 121.489.769.590,00,- jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. 157.886.864.000,00,-. Dengan demikian, secara keseluruhan dana perimbangan diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar Rp. 789.945.460.090,00,- jika dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 654.776.523.000,00,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya dan Dana penyesuaian dan otonomi khusus. Pada tahun 2019 lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan sama dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Strategi yang dapat ditempuh dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini disediakan data serta saranapenunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Kebijakan yang dapat ditempuh dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
7. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu, dan Retribusi Jasa Usaha
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (Penyertaan Modal Pada LKP dan Jamkrda dan Penyertaan Modal Pada Bank NTB).
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar

Rupiah, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Dari Pengembalian (Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas), Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN.

2. Dana Perimbangan, terdiri dari:

- a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah kab/kota/ provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dari Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi.
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus merupakan dana insentif daerah

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah kota Bima diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 50% hingga 63%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2019 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

1. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, di mana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
3. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Arah pengelolaan pendapatan daerah di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2018, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait.
2. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.
3. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.

b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil (PBB, PPH dan CHT) adalah:

1. Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah,
2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Belanja daerah pada Tahun 2019 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

a. Belanja Tidak langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis

belanja:Belanja Pegawai berupa **penyediaan gaji dan tunjangan** serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada umumnya belanja pegawai diperuntukan:

- i). Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan akses yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- ii). Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD yang disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan Pemerintah;
- iii). Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2019;
- iv). Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, dapat diberikan tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;

Pada tahun 2019, rencana alokasi belanja pegawai diasumsikan meningkat sebesar 2,5% dibandingkan dengan tahun 2018, yakni sebesar Rp. 342.668.625.877,42. Alokasi ini masih memperhitungkan kemungkinan adanya pemberian gaji ke-13 dan THR kepada ASN, dan belum memperhitungkan jika ada kebijakan kenaikan gaji.

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugastugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Rencana alokasi belanja hibah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 21.000.000.000,00. Jika diperlukan, maka efisiensi terhadap pengalokasian dana hibah harus dilakukan secara selektif terutama bagi lembaga/organisasi yang telah menerima bantuan hibah secara berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir dari pemerintah Daerah.

Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Rencana alokasi belanja Sosial adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,00,-. Pemberian bantuan sosial akan dilakukan secara selektif kepada masyarakat yang rentan dan sangat membutuhkan.

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

Seperti tahun sebelumnya, pemberian bantuan keuangan tetap sebesar Rp. 822.411.656,- yang akan diberikan kepada Partai-partai Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

Belanja tidak terduga pada tahun 2019 direncanakan akan dialokasikan sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- yang diutamakan untuk persiapan penanganan keadaan darurat bencana.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada tahun 2019 Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 547.178.938.153,14,- meningkat sebesar 15,90% jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 472.112.772.160,00,-. Adapun komponen Belanja Langsung terdiri dari jenis belanja:

- a. *Belanja pegawai* merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Dan besaran

honorarium bagi PNSD disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima, dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran dan beban kerja.

b. *Belanja barang dan jasa* merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Dimana belanja barang dan jasa pengeluarannya pada:

1. *Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya* yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi yang tidak terkait dengan aset, baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
2. *Untuk penganggaran belanja barang* yang akan diserahkan kepada masyarakat agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
3. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk *belanja barang pakai habis* agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
4. *Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah*, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi dan dilakukan pembayaran dengan sistem riil cost;
5. Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel;
6. *Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat* yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dibatasi;
7. *Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM* hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

- c. *Belanja modal* merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dengan melihat:
 - a. Penganggaran untuk belanja Modal minimal sebesar 30% dari total belanja.
 - b. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing OPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
 - c. Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Transpransi dan akuntabilitas**

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil
- b. **Disiplin anggaran**
- c. **Keadilan dan Kepatutan**
- d. **Ekonomis, efisiensi dan efektivitas**
- e. **Manfaat bagi masyarakat**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
- f. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Tabel. 3.8.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2017 - 2020

No	URAIAN	JUMLAH			
		Realisasi Tahun (n-1) 2017	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun (n+1) 2020
2	Belanja Daerah				
02.01	Belanja Tidak Langsung				
02.01.01	Belanja pegawai	319.792.429.749,00	334.310.854.514,56	342.668.625.877,42	342.668.625.877,42
02.01.02	Belanja bunga	0	0	0	0
02.01.03	Belanja subsidi	0	0	0	0
02.01.04	Belanja hibah	21.313.903.978,00	39.249.775.000,00	21.000.000.000,00	12.672.047.670,64
02.01.05	Belanja bantuan sosial	9.392.865.500,00	137.363.746.000,00	10.000.000.000,00	12.222.222.222,22
02.01.06	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	0	0	0	0
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	775.531.097,00	822.411.656,00	822.411.656,00	822.411.656,00
02.01.08	Belanja tidak terduga	1.023.875.000,00	2.095.018.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		352.298.605.324,00	513.841.805.170,56	376.491.037.533,42	370.385.307.426,29
02.02	Belanja Langsung	430.928.144.873,00	472.112.772.160,00	547.178.938.153,14	690.846.821.924,69
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		430.928.144.873,00	472.112.772.160,00	547.178.938.153,14	690.846.821.924,69
TOTAL BELANJA DAERAH		783.226.750.197,00	985.954.577.330,56	923.669.975.686,56	1.061.232.129.350,97

Sumber: Hasil Analisis

C. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

1) Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Bima selama ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Untuk itu, dalam menetapkan SiLPA agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 26.030.231.550,56,- diperkirakan sama dengan SiLPA pada tahun 2017.

2) Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan jika diperkirakan surplus anggaran. Pemanfaatan sisa lebih anggaran (surplus) diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan

sosial. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah berencana untuk meningkatkan jumlah penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Alokasi tersebut disesuaikan dengan alokasi pada APBD tahun 2018.

Tabel 3.9.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Bima Tahun 2017 - 2020

No	URAIAN	JUMLAH			
		Realisasi Tahun (n-1) 2017	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun (n+1) 2020
3	Pembiayaan Daerah				
03.01	Penerimaan pembiayaan				
03.01.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	26.030.231.550,56	37.434.688.284,56	26.030.231.550,56	25.267.739.676,98
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan				
03.01.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
03.01.04	Penerimaan pinjaman daerah				
03.01.05	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
03.01.06	Penerimaan piutang daerah				
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.030.231.550,56	37.434.688.284,56	26.030.231.550,56	25.267.739.676,98
03.02	Pengeluaran pembiayaan				
03.02.01	Pembentukan dana cadangan			-	-
03.02.02	Penyertaan modal (Investasi) daerah	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
03.02.03	Pembayaran pokok utang			-	-
03.02.04	Pemberian pinjaman daerah			-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	26.030.231.550,56	35.434.688.284,56	24.030.231.550,56	23.267.739.676,98

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima

Pembangunan Kota Bima diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat, melalui pentahapan pembangunan setiap tahun sebagai penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kota Bima Tahun 2013 -2018. Pembangunan tahun 2018 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari perencanaan jangka menengah tahun 2013-2018 dengan visi pembangunan yaitu **“Terwujudnya Kota Bima sebagai Kota perdagangan dan Jasa Yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera”**.

Namun demikian, berkaitan dengan penyusunan dan penetapan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bima tahun 2019, maka beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian adalah menjamin keberlanjutan pelaksanaan arah kebijakan dan program prioritas yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bima Tahun 2008 – 2028. Hal ini dilakukan mengingat masa berlakunya RPJMD Kota Bima 2013-2018 sudah berakhir, sementara pada sisi lain rancangan RPJMD Kota Bima 2018-2023 belum selesai disusun. Oleh karena itu, bagan alur yang menjelaskan keterkaitan antara visi/misi jangka menengah dengan tujuan serta sasaran strategis dan indikator sasaran strategis tahun 2019 belum dapat disajikan.

Disamping itu, pertimbangan lain yang diperhatikan dalam rangka merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2019 adalah hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun 2017 sebagaimana sudah diuraikan dalam Bab II dokumen RKPD ini seperti tabel berikut ini:

Tabel 4.1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	Jumlah penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)	Rupiah	4.000.000.000	4.230.456.000	105,76
		Rasio Rumah Ibadah	Per 1.000 penduduk	3	3,35	111,67
2	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Jumlah konflik SARA	kasus	0	0	100,00
3	Meningkatnya	Persentase nilai	%	5,00	5,00	100,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	pelestarian nilai-nilai budaya lokal	budaya yang ditinggalkan				
4	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	10,00	10,13	101,13
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SD	nilai	5,50	7,25	131,81
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SMP	nilai	5,50	4,7	85,46
5	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai	73	73,67	100,92
		Persentase penduduk miskin	%	9,30	9,27	100,32
		Pengangguran terbuka	%	7,50	8,89	84,36
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	69,15	69,35	100,29
		Angka Balita Gizi Buruk	%	0,075	0,078	96,15
		Angka kematian ibu melahirkan	Per 100.000 kelahiran hidup	148	188	78,72
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Rumah tangga pengguna berakses air bersih	%	90,00	93,25	103,61
		Persentase Rumah Layak Huni	%	92,50	91,30	98,70
		Rumah tangga pengguna bersanitasi baik	%	90	96,92	107,69
		Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat distribusi	%	100,00	98,61	98,61
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai	65,00	62,58	96,28
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	100,00
		Persentase SKPD dengan Indeks SAKIP bernilai baik	%	80	100	125,00
9	Meningkatnya pelayanan publik prima	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	hari	1,25	1,25	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	80	81,00	101,25

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	5,70	5,78	101,40
11	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	14,80	15,82	106,89
12	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan)	ton	55.000	57.371	104,31
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	%	75,00	76,18	101,57
		Persentase luas permukiman kumuh	%	29,56	32,06	108,45
		Persentase luas kota yang tertata	%	10,00	7,39	73,90
14	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas	%	97,50	133,87	72,83

Disamping pencapaian kinerja pembangunan sebagaimana tabel tersebut diatas, Pemerintah Kota Bima juga masih dihadapkan pada permasalahan pembangunan yang juga memerlukan perhatian seluruh stakeholder pembangunan di daerah dan menjadi pertimbangan dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan tahun selanjutnya.

Pembangunan Kota Bima tahun 2019 akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu selain mengatasi permasalahan yang masih menjadi tantangan yang dihadapi, juga melanjutkan program prioritas yang ada dalam RPJPD Kota Bima tahun 2018-2023. RKPD Kota Bima tahun 2019 juga akan memperhatikan pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan legislative tahun 2019. Disamping itu, RKPD Kota Bima tahun 2018 juga akan mengintegrasikan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 dan Prioritas Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bertitik tolak dari beberapa hal pokok tersebut, maka sasaran pembangunan Kota Bima adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Rata-rata lama sekolah	tahun	10,00
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SD	nilai	6,00
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SMP	nilai	6,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	Meningkatnya pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai	75
		Persentase penduduk miskin	%	9,00
		Pengangguran terbuka	%	5,50
3	Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	%	0,045
		Angka kematian ibu melahirkan	Per 100.000 kelahiran hidup	56
		Angka stunting		
4	Meningkatnya permukiman yang layak bagi masyarakat	Rumah tangga pengguna berakses air bersih	%	95,00
		Persentase Rumah Layak Huni	%	95,50
		Rumah tangga pengguna bersanitasi baik	%	95
		Persentase luas permukiman bebas kumuh	%	97
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai	65,00
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP
6	Meningkatnya pelayanan 4publik prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	85
7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	5,85
8	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	18,80
9	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Indeks Kriminalitas	Angka	

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, maka tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019): **“Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”** dengan 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu:

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Berdasarkan uraian tersebut, adapun prioritas pembangunan Kota Bima Tahun 2018 adalah:

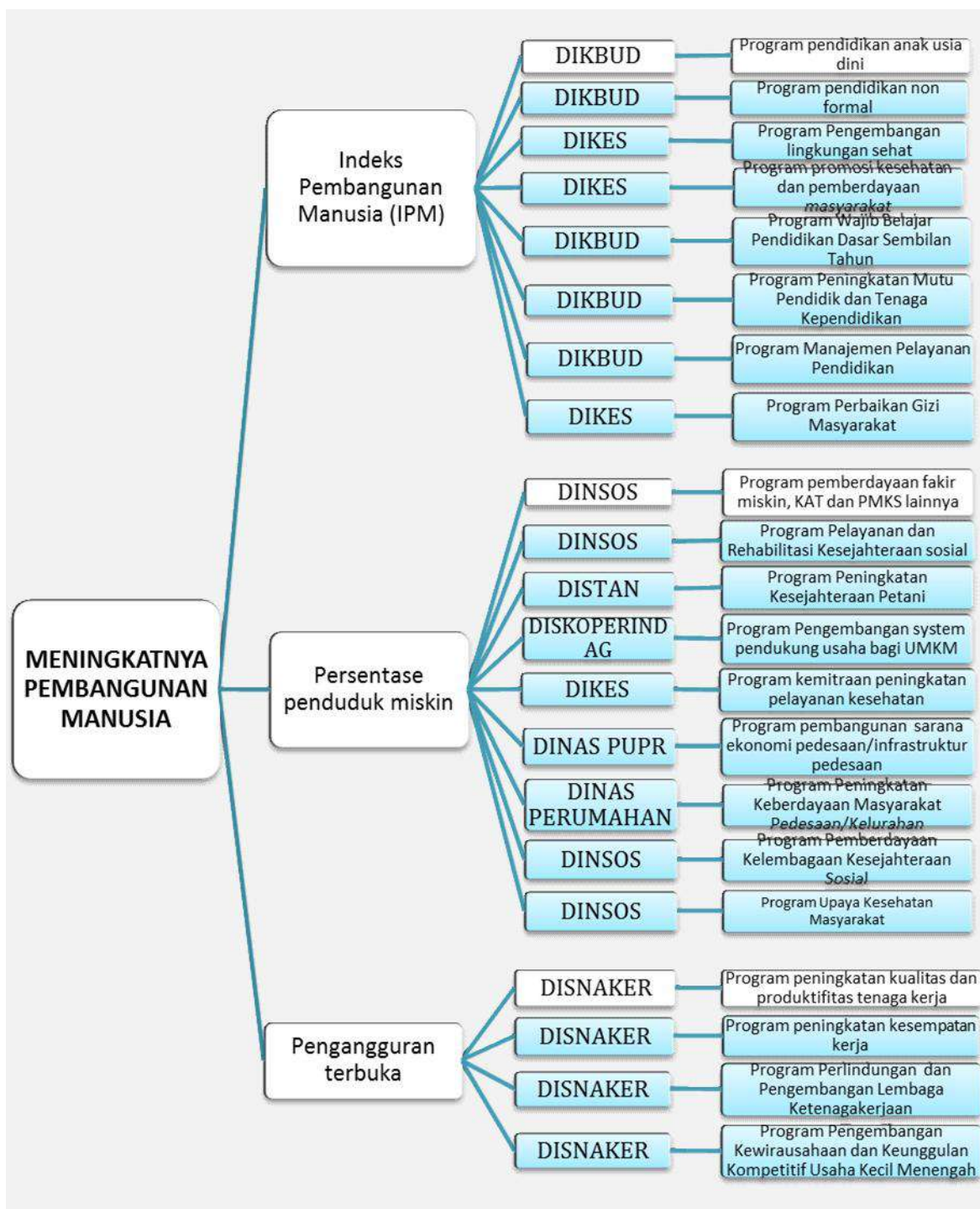
1. Pembangunan Pendidikan;
2. Pembangunan Kesehatan;
3. Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
4. Lingkungan Hidup
5. Kesejahteraan Sosial;
6. Penanggulangan Kemiskinan;
7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
8. Ketertiban dan Keamanan.
9. Pembangunan ekonomi;

4.3. Pendekatan RKPD Kota Bima Tahun 2019

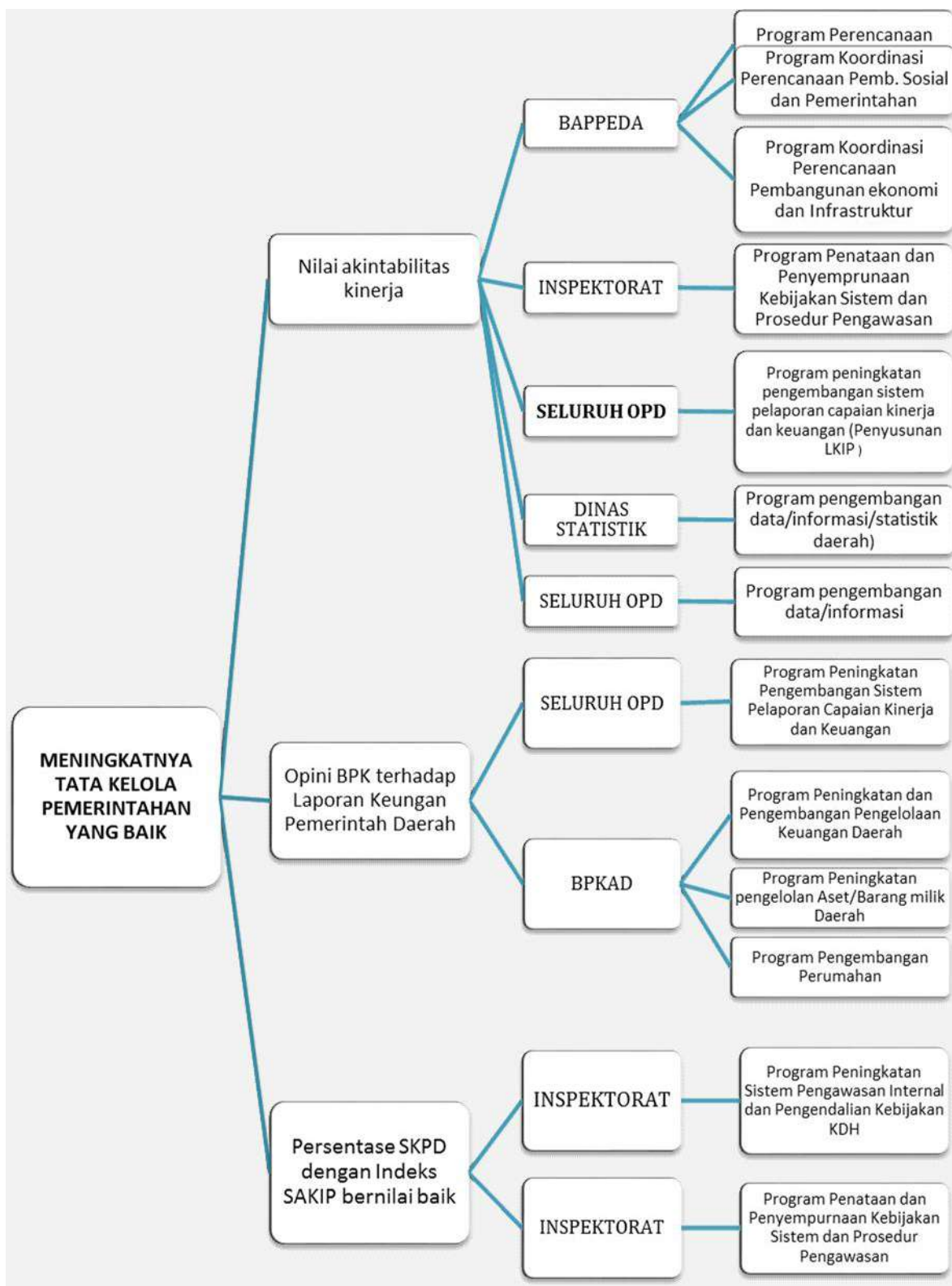
4.3.1. Pendekatan Tematik-Holistik

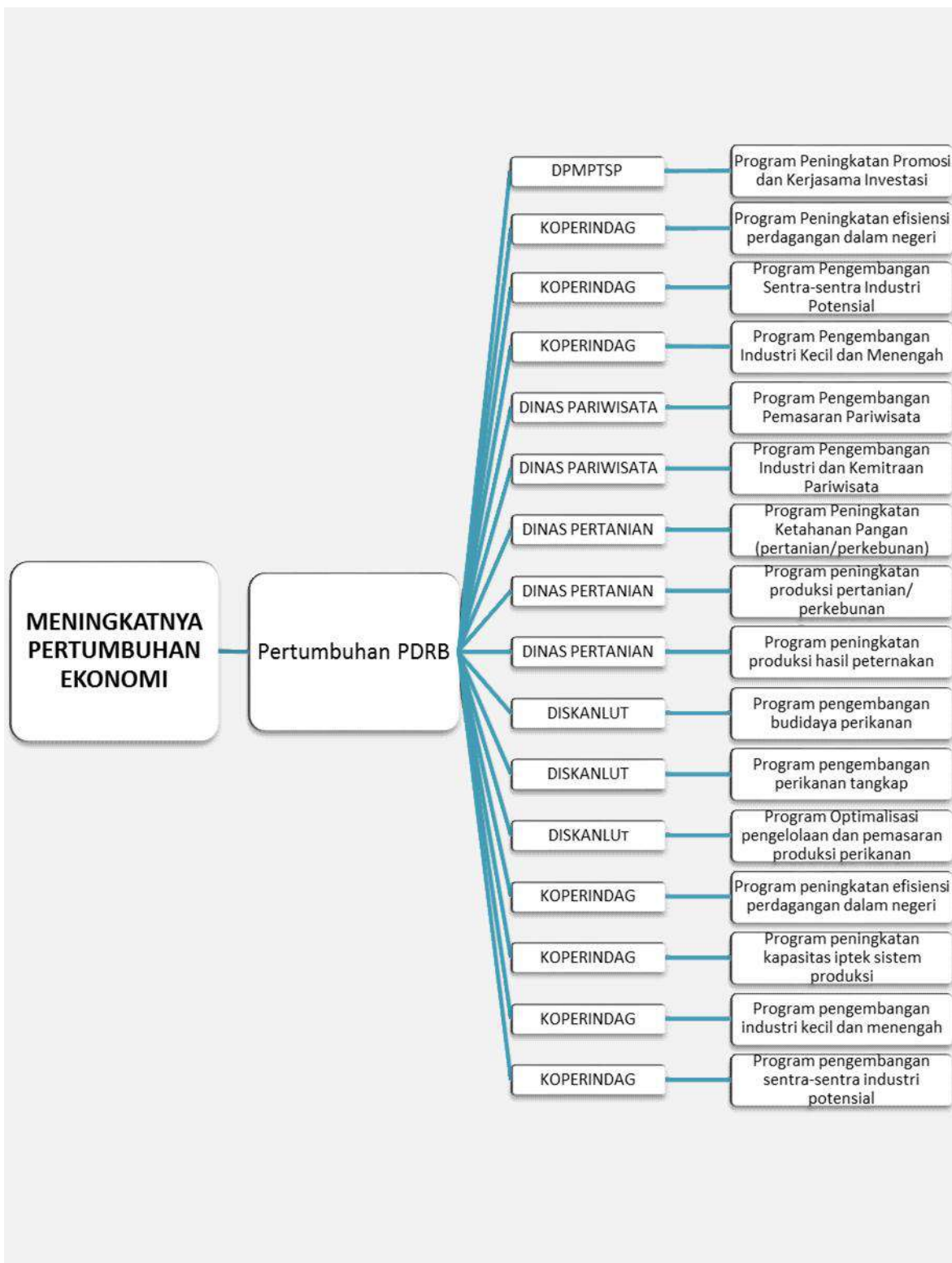
Pendekatan Perencanaan Holistik – Tematik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar OPD, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan dirancang koordinasi berbagai Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



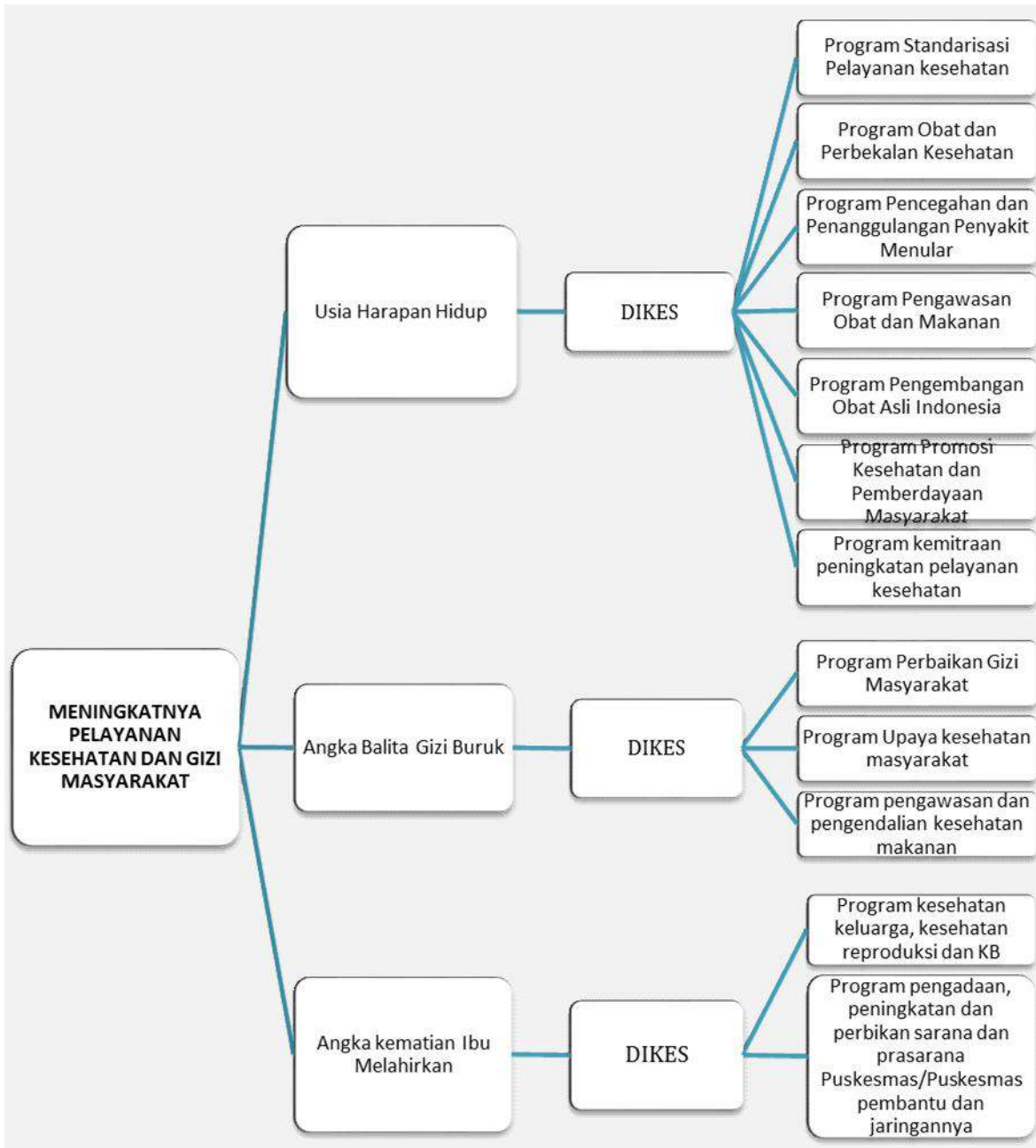
Bagan Operasionalisasi Pendekatan Tematik – Holistik dalam Mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia





4.3.2. Pendekatan Integratif:

Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi untuk mencapai sasaran spesifik secara sektoral seperti tertuang dalam gambar berikut.



TABEL 5.1 REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019
KOTA BIMA

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						299.769.322.055	314.757.788.158		
1 01	PENDIDIKAN						96.319.884.335	101.135.878.552		
1 01 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						96.319.884.335	101.135.878.552		
1 01 1.01.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1.974.299.415	2.073.014.386		DikBud Kota Bima
1 01 1.01.01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Caraka/Petugas Pengantar Surat)				Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	1 Pelayanan	139.920.000	146.916.000	lama	DikBud Kota Bima
	- Gaji pegawai tidak tetap									
	- Jasa pengantar surat									
1 01 1.01.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Pelayanan	80.960.000	85.008.000		DikBud Kota Bima
	- Belanja jasa telepon (Dinas Dikbud, UPTD dan Sanggar kegiatan belajar)									
	- Belanja jasa air kebutuhan dinas dikbud									
	- Belanja listrik (Dinas dikbud, UPTD, Kantor SKB dan gedung serba guna) dan Belanja penambahan daya listrik dinas dikbud									
	- Belanja jasa internet									
	- Belanja operasional website dan pemasangan iklan									
1 01 1.01.01 01 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah				Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	1 Pelayanan	87.329.000	91.695.450		DikBud Kota Bima
	- Belanja jasa kearsipan lingkup dinas dikbud									
1 01 1.01.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Pelayanan	57.200.000	60.060.000		DikBud Kota Bima
	- Belanja Jasa Sopir Kendaraan Operasional Dinas Dikbud									
	- Belanja jasa service Mobil Dinas dan kendaraan bermotor roda dua									
	- Belanja pajak mobil dan motor dinas									
1 01 1.01.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	1 Pelayanan	161.601.000	169.681.050		DikBud Kota Bima
	- Kegiatan verifikasi proposal bansos									
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan (Pejabat penatausaha keuangan, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, pengurus barang, bendahara penerima dan pembuat daftar gaji)									
	- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Dinas Dikbud, kantor SKB dan kantor pengawas pendidikan)									
1 01 1.01.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Cakupan ruang kantor yang bersih	1 Pelayanan	27.907.000	29.302.350		DikBud Kota Bima
	- Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (Kantor dinas dikbud, UPTD, SKB dan kantor pengawas pendidikan)									
	- elanja Jasa Kebersihan Kantor Dinas Dikbud, UPTD dan SKB									
1 01 1.01.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah ATK	1 Pelayanan	31.803.695	33.393.880		DikBud Kota Bima
	- PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR DIKBUD									
	- PENYEDIAAN ALAT TULIS KCD									
	- PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR SKB									
	- PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR PENGAWAS SEKOLAH									
1 01 1.01.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	1 Pelayanan	128.975.000	135.423.750		DikBud Kota Bima
	- BELANJA CETAK									
	- PENGANGGARAN (KEBUTUHAN DINAS DIKBUD, UPTD, SKB & PENGAWAS PENDIDIKAN)									
1 01 1.01.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah perlengkapan kantor	1 Pelayanan	310.409.000	325.929.450		DikBud Kota Bima
	- PENGADAAN AC AULA SKB									
	- PENGADAAN LAPTOP dan PC									
	- PENGADAAN MEJA KURSI AULA SKB									
1 01 1.01.01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah kerjasama dengan media	1 Pelayanan	29.678.000	31.161.900		DikBud Kota Bima
	- BELANJA SURAT KABAR (KEBUTUHAN DINAS, UPTD & SKB)									
	- BELANJA IKLAN (KONTRAK KERJA DENGAN MEDIA DI BIDANG PENDIDIKAN)									
1 01 1.01.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah Kegiatan makan minum rapat	1 Pelayanan	12.320.000	12.936.000		DikBud Kota Bima
	- BELANJA MAKAN MINUM HARIAN LINGKUP DINAS DIKBUD									
1 01 1.01.01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Pelayanan	493.696.720	518.381.556		DikBud Kota Bima
	- PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH LINGKUP DINAS DIKBUD									
1 01 1.01.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Pelayanan	412.500.000	433.125.000		DikBud Kota Bima
	- BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LINGKUP DINAS DIKBUD									
1 01 1.01.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						684.590.000	718.819.500		DikBud Kota Bima
1 01 1.01.01 02 03	Pembangunan gedung Kantor				Jumlah gedung kantor yang dibangun ba	1 Unit	350.000.000	367.500.000		DikBud Kota Bima
	- PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SKB BESERTA PERABOTNYA									
	- PEMBANGUNAN AULA SKB									
1 01 1.01.01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional				Jumlah kendaraan dinas baru	1 Unit	46.500.000	48.825.000		DikBud Kota Bima
1 01 1.01.01 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor				persentase luas gedung kantor yang dire	1 Unit	42.900.000	45.045.000		DikBud Kota Bima
	- BELANJA JASA KEAMANAN KANTOR DINAS DIKBUD									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1 01 1.01.01 02 24	Pemeliharaan gedung kantor Dinas Dikbud	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	5 Unit	77.440.000	81.312.000		DikBud Kota Bima			
	- BELANJA PENGADAAN SUKU CADANG									
	- BELANJA BAHAN BAKAR									
	- BELANJA BAHAN PELUMAS KENDARAAN DINAS									
1 01 1.01.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	4 Unit	30.250.000	31.762.500		DikBud Kota Bima			
	- BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR									
1 01 1.01.01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah bangunan kantor yang direhabilitasi	2 Unit	137.500.000	144.375.000		DikBud Kota Bima			
	- BELANJA MODAL REHABILITASI SEDANG BERAT GEDUNG KANTOR DINAS DIKBUD									
	- BELANJA MODAL PEMBANGUNAN PAGAR SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)									
1 01 1.01.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			49.500.000	51.975.000		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 03 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah seragam pakaian dinas kantor	70 pegawai	49.500.000	51.975.000		DikBud Kota Bima			
							DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			135.121.000	141.877.050		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 05 05	Pelaksanaan Penilaian AKJG	Jumlah obyek Penilaian AKJG	150 Orang	135.121.000	141.877.050		DikBud Kota Bima			
	- HONORARIUM (KEGIATAN AKJG, BIMTEK PEMBUATAN DUPAK, GURU, SOSIALISASI PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA)									
	- ATK BIMTEK PEMBUATAN DUPAK GURU									
	- PENGGAJIAN (KEGIATAN AKJG, BIMTEK PEMBUATAN DUPAK, GURU, SOSIALISASI PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA)									
	- SEWA RUANG RAPAT (BIMTEK PEMBUATAN DUPAK, GURU, SOSIALISASI PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA)									
	- MAKAN MINUM (KEGIATAN AKJG, BIMTEK PEMBUATAN DUPAK, GURU, SOSIALISASI PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA)									
	- UANG SAKU (BIMTEK PEMBUATAN DUPAK, GURU, SOSIALISASI PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA)									
	- NARASUMBER (KEGIATAN AKJG, BIMTEK PEMBUATAN DUPAK, GURU, SOSIALISASI PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA)									
1 01 1.01.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			189.925.000	199.421.250		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	4 Dokumen	24.750.000	25.987.500		DikBud Kota Bima			
	- PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI ANGGARAN									
1 01 1.01.01 06 02	Penyusunan laporan keuangan Semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	5 Dokumen	37.700.000	39.585.000		DikBud Kota Bima			
	- PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019									
	- MAKAN MINUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019									
1 01 1.01.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	5 Dokumen	71.925.000	75.521.250		DikBud Kota Bima			
	- PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUNAN 2020									
	- PENYUSUNAN RKA/DPA									
	- PENYUSUNAN RENSTRA 2018 - 2023									
	- PENYUSUNAN RKA/DPA PERUBAHAN									
	- MAKAN MINUM PENYUSUNAN RKA/DPA									
1 01 1.01.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	5 Dokumen	55.550.000	58.327.500		DikBud Kota Bima			
	- PENYUSUNAN LAKIP									
	- PENYUSUNAN LPPD									
1 01 1.01.01 15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI			1.181.162.000	1.240.220.100		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 15 03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Paket Ruang Kelas baru	3 Unit	489.588.000	514.067.400		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 15 14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah Pembangunan sarana air bersih dan sanitari	1 Unit	40.000.000	42.000.000		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 15 42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah rehab Berat/Sedang Bangunan Sekolah	3 Unit	372.240.000	390.852.000		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 15 xx	Pengadaan buku2 dan alat praktek	Jumlah Buku-buku dan Alat Praktek	1 Unit	157.894.000	165.788.700		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 15 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Lomba Kreatifitas anak	76 TK dan Lembaga PAUD	108.834.000	114.275.700		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 15 66	Monitoring, evaluasi pendidikan anak usia dini	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	75 TK dan Lembaga PAUD	12.606.000	13.236.300		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBELAN TAHUN			89.766.334.170	94.254.650.879		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 16 03	Penambahan ruang kelas	Jumlah Paket RKB	69 SD, 81 SKB & 61 SMP	61.588.934.000	64.668.380.700		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 16 09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah paket taman dan tempat parkir yang terbangun		119.526.000	125.502.300		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 16 14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah Paket sarana air bersih dan sanitari	tersebar pada SD & SMP	186.578.700	195.907.635		DikBud Kota Bima			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1 01 1.01.01 16 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah sekolah yang menerima buku dan alat tulis siswa		1.009.945.400	1.060.442.670		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 16 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Sekolah yang menerima Alat Praktek dan Peraga Siswa	12 SD & 10 SMP	1.765.573.920	1.853.852.616		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 16 19	Pengadaan meubeler sekolah	Jumlah Sekolah Penerima Meubeler	7 SD & 3 SMP	287.122.000	301.478.100		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 16 41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah paket Rehabilitasi	17 SD dan 10 SMP	6.280.000.000	6.594.000.000		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 16 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Jumlah Laporan Realisasi Dana BOS Triwulan	23196 Siswa / Peserta Didik	17.296.889.200	18.161.733.660		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 16 69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah tenaga penerima pembayaran jasa keamanan, kebersihan, pengantar surat, operator sekolah, laboran dan pustakawan	23196 Siswa / Peserta Didik	538.560.000	565.488.000					
1 01 1.01.01 16 70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa	10 Lomba	436.812.650	458.653.283		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 16 79	Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa	Jumlah Ujian Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa	7193 Siswa / Peserta Didik	256.392.300	269.211.915		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL			111.856.250	117.449.063		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 18 14	Pengembangan pendidikan non formal	Jumlah Keikutsertaan PKBM	3 Kegiatan	111.856.250	117.449.063		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			1.815.657.100	1.906.439.955		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 20 01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik yang tersertifikasi	165 Tenaga Pengajar	115.174.400	120.933.120		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 20 08	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang mengikuti dilat	300 Tenaga Pengajar	1.700.482.700	1.785.506.835		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN			411.439.400	432.011.370		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 22 04	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Laporan kegiatan Sosialisasi	3 Kali	61.501.000	64.576.050		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 22 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah SOP Pelayanan	2 Kali	99.841.500	104.833.575		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 22 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			20.000.000	21.000.000					
1 01 1.01.01 22 10	Koordinasi hari-hari besar nasional bidang pendidikan, pemuda dan olahraga	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3 Kali	103.741.000	108.928.050		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 22 11	Pendataan Pendidikan	Data base Pendidikan dan profil pendidikan kota bima	1 dokumen 210 Sekolah	73.826.500	77.517.825		DikBud Kota Bima			
1 01 1.01.01 22 12	Kegiatan Unit Pelaksana Akreditasi	Jumlah Unit ter Akreditasi	180 Org / Tenaga Kependidikan	52.529.400	55.155.870		DikBud Kota Bima			
1 02	KESEHATAN			43.076.437.520	45.230.259.396					
1 02 1.02.01	DINAS KESEHATAN			43.076.437.520	45.230.259.396					
1 02 1.02.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.951.823.000	2.049.414.150		DINAS KESEHATAN			
1 02 1.02.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	12 bln	1.650.000	1.732.500		DINAS KESEHATAN			
	- Biaya Pengiriman Surat Ke luar Daerah									
1 02 1.02.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	12 bln	484.050.000	508.252.500		DINAS KESEHATAN			
	- Belanja Telepon dan internet (dinkes, PKM dan UPTD)									
	- Belanja Air Bersih (PKM Rasanae Timur)									
	- Pembayaran Rekening Listrik (dinkes, PKM dan UPTD)									
1 02 1.02.01 01 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah di dikes, puskesmas dan jaringannya	12 bln	48.237.000	50.648.850		DINAS KESEHATAN			
	- Tim inventarisasi Kondisi Aset Di Puskesmas									
	- Input Data Asset									
	- Input Data Aspek									
1 02 1.02.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis,tnk dan bpkb)	12 bln	129.954.000	136.451.700		DINAS KESEHATAN			
	- Servis Ringan Kendaraan Roda 4 (Dikes, Puskesmas dan UPT)									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
		Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 02 1.02.01 01 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas dan Puskesmas Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi Keuangan)	12 bln	143.600.000	150.780.000		DINAS KESEHATAN
	- Honorarium Pejabat Penatausaha Keuangan						
	- Honorarium Bendahara pengeluaran						
	- Honorarium Bendahara penerima						
	- Honorarium pembantu bendahara pengeluaran						
	- Honorarium Pemegang umum barang						
	- Honorarium Pembuat daftar gaji						
	- Honorarium pengurus barang						
	- Honorarium Pembantu bendahara pengeluaran UPTD						
1 02 1.02.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service)	12 bln	422.400.000	443.520.000		DINAS KESEHATAN
	- Honorarium tenaga kontrak						
	- Honorarium jasa cleaning service (PKM dan UPTD)						
	- Honorarium jasa satpam puskesmas rawat inap (PKM dan UPTD)						
1 02 1.02.01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (jasa Tukang)	12 bln	8.222.500	8.633.625		DINAS KESEHATAN
	- Jasa Service AC						
	- Jasa Service Komputer, Laptop, dan Jaringan						
1 02 1.02.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	219.600.000	230.580.000		DINAS KESEHATAN
	- ATK Dinkes, UPTD dan PKM						
1 02 1.02.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bln	30.250.000	31.762.500		DINAS KESEHATAN
	- Spanduk						
	- Dokumentasi						
	- Cetak Blangko Disposisi dan Kartu inventaris ruangan						
	- Penggandaan (Dinkes, UPTD dan PKM)						
1 02 1.02.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bln	10.000.000	10.500.000		DINAS KESEHATAN
	- Alat Listrik dan komponen Elektronik						
1 02 1.02.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 kegiatan	36.850.000	38.692.500		
1 02 1.02.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	5 jenis surat kabar	7.969.500	8.367.975		DINAS KESEHATAN
	- Belanja Surat Kabar dan Majalah						
1 02 1.02.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	12 bulan	21.600.000	22.680.000		DINAS KESEHATAN
	- Makan Minum Harian Pegawai						
	- Makan minum Tamu						
1 02 1.02.01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	350.000.000	367.500.000		DINAS KESEHATAN
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah						
1 02 1.02.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2 keg	37.440.000	39.312.000		DINAS KESEHATAN
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah						
1 02 1.02.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			610.652.000	641.184.600		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 02 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1 keg	-			
1 02 1.02.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun baru	1 keg	25.258.000	26.520.900		DINAS KESEHATAN
	- Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (Dikes, UPTD dan PKM)						
1 02 1.02.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	4 Keg	165.000.000	173.250.000		DINAS KESEHATAN
	- Pemeliharaan Gedung Kantor (rehab ruang kantor)						

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1 02 1.02.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas baru	30 Unit	400.864.000	420.907.200		DINAS KESEHATAN			
	- Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Dinkes dan puskesmas									
	- Bahan bakar kendaraan roda 4 Dinkes, puskesmas									
	- Bahan Bakar Genset PKM Perawatan									
	- Bahan bakar incinerator PKM Perawatan									
	- Pelumas Kendaraan roda 4 Dinkes									
	- Pelumas Kendaraan roda 4 puskesmas									
1 02 1.02.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	1 Keg	3.630.000	3.811.500		DINAS KESEHATAN			
	- Belanja bahan baku bangunan (grendel besar, kecil, kunci pintu, kran air dll)									
1 02 1.02.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	3 keg	15.900.000	16.695.000					
1 02 1.02.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			94.630.000	99.361.500		DINAS KESEHATAN			
1 02 1.02.01 05 05	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan fungsional	Penilaian angka Kredit Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan dan Jaringannya	1 tahun	94.630.000	99.361.500		DINAS KESEHATAN			
1 02 1.02.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			217.401.500	228.271.575		DINAS KESEHATAN			
1 02 1.02.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	2 keg	30.731.250	32.267.813		DINAS KESEHATAN			
	- Pengumpul data dan penyusunan SPM									
1 02 1.02.01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 keg	34.815.000	36.555.750		DINAS KESEHATAN			
	- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran									
	- Monitoring terkait PAD pada Tingkat Puskesmas									
	- Pembinaan Pelaporan keuangan Puskesmas									
	- Monev keuangan Smtr I di Puskesmas									
1 02 1.02.01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	1 keg	46.855.250	49.198.013		DINAS KESEHATAN			
	- Pertemuan Konsolidasi Data Keuangan									
	- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun									
1 02 1.02.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	5 keg	76.000.000	79.800.000		DINAS KESEHATAN			
	- Penyusunan RKA									
	- Penyusunan DPA									
	- Penyusunan DPPA									
	- Penyusunan Renja									
	- Penyusunan Renstra									
1 02 1.02.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ket	3 Keg	29.000.000	30.450.000		DINAS KESEHATAN			
	- Penyusunan LAKIP									
	- Penyusunan LPPD									
1 02 1.02.01 15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN			3.544.627.923	3.721.859.319		DINAS KESEHATAN			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
		Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 02 1.02.01 15 01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan	152.002 Jiwa	3.399.677.923	3.569.661.819		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 15 02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Terselenggaranya Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	7 keg	68.000.000	71.400.000		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 15 04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Porsentase Apotik yang diawasi	2 keg	22.000.000	23.100.000		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 15 05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase Penggunaan antibiotik pada kasus terpilih	3 Keg	40.950.000	42.997.500		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 15 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monev yang terlaksana	2 Keg	14.000.000	14.700.000		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			11.803.633.250	12.393.814.913		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 16 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar	10 Kegiatan	111.977.250	117.576.113		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 16 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Jumlah Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	4 Kegiatan	84.378.000	88.596.900		
1 02 1.02.01 16 07	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Jumlah Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	10 Kegiatan	102.900.000	108.045.000		
1 02 1.02.01 16 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang dilayani	6 Kegiatan	84.525.000	88.751.250		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 16 12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	9 Kegiatan	255.100.000	267.855.000		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 16 13	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	jumlah puskesmas yang menerima biaya opsional kesehatan	2 kegiatan	5.360.753.000	5.628.790.650		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 16 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan pelaporan	8 Kegiatan	56.700.000	59.535.000		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 16 16	Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja (UKK)	Jumlah pos UKK yang dibina	3 Kegiatan	19.360.000	20.328.000		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 16 17	Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta	Jumlah pelayanan kesehatan swasta yang mendapat ijin	3 Kegiatan	40.000.000	42.000.000		DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1 02 1.02.01 16 19	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan	Jumlah masyarakat kota bima yang mendapatkan pelayanan kartu jujur sehati	1 Kegiatan	1.200.000.000	1.260.000.000		DINAS KESEHATAN			
1 02 1.02.01 16 20	Pelayanan kesehatan penduduk dipuskesmas dan jaringannya	Jumlah masyarakat kota bima yang mendapatkan pelayanan kartu jujur sehati	20 Kegiatan	4.242.193.000	4.454.302.650		DINAS KESEHATAN			
1 02 1.02.01 16 21	Pencegahan dan Penanganann Penyakit Tidak Menular	Jumlah Pencegahan dan Penanganann Penyakit Tidak Menular	15 Kegiatan	245.747.000	258.034.350					
1 02 1.02.01 17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN			185.550.000	194.827.500		DINAS KESEHATAN			
1 02 1.02.01 17 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Laporan monitoring dan evaluasi pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	6 Kegiatan	74.550.000	78.277.500		DINAS KESEHATAN			
1 02 1.02.01 17 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Poesentase sarana pengolahan pangan yang diawasi	6 Kegiatan	79.000.000	82.950.000		DINAS KESEHATAN			
1 02 1.02.01 17 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan monitoring dan evaluasi	4 Kegiatan	32.000.000	33.600.000		DINAS KESEHATAN			
1 02 1.02.01 18	PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA			70.000.000	73.500.000					
1 02 1.02.01 18 03	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri	Jumlah obat asli Indonesia yang dikembangkan	4 Kegiatan	35.000.000	36.750.000					
1 02 1.02.01 18 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan monitoring dan evaluasi	4 Kegiatan	35.000.000	36.750.000					
1 02 1.02.01 19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			2.363.860.000	2.482.053.000					
1 02 1.02.01 19 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat	4 Kegiatan	68.020.000	71.421.000					
1 02 1.02.01 19 04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah Tenaga penyuluh kesehatan yang dilatih	4 Kegiatan	193.000.000	202.650.000					
1 02 1.02.01 19 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	8 Kegiatan	94.000.000	98.700.000					
1 02 1.02.01 19 06	Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah rumah tangga berPHBS	8 Kegiatan	171.300.000	179.865.000					
1 02 1.02.01 19 07	Peningkatan Kesehatan Institusi	Jumlah Institus yang di bina	21 kegiatan	560.000.000	588.000.000					
1 02 1.02.01 19 08	Unit Kegiatan Bersumberdaya Masyarakat	jumlah UKBM yang dibina	16 Kegiatan	800.000.000	840.000.000					
1 02 1.02.01 19 09	Komunikasi Informasi dan Edukasi	jumlah Penyuluhanpada kelompok masyarakat	39 Kegiatan	412.000.000	432.600.000					
1 02 1.02.01 19 10	Penjaringan Kesehatan anak pra sekolah dan anak sekolah / deteksi dini penyakit anak usia pra sekolah dan usia sekolah	Jumlah penjaringan Anak sekolah	3 Kegiatan	29.335.000	30.801.750					
1 02 1.02.01 19 11	Pengembangan Sekolah Sehat	Jumlah Sekolah yang di bina	5 Kegiatan	36.205.000	38.015.250					
1 02 1.02.01 20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT			770.325.000	808.841.250					
1 02 1.02.01 20 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah yang mendapatkan Tambahan makanan dn Vitamin	350 orang	422.000.000	443.100.000					

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
				Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1 02 1.02.01 20 03	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya			Jumlah penanggulangan KEP, Anemia, Gizi Besi, GAKY, VIT A da, Zat Gizi Mikro	7 Keg	186.450.000	195.772.500		
1 02 1.02.01 20 04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi			Jumlah Kegiatan Pemberdaan Masyarakat tentang KADARZI	3 Keg	67.875.000	71.268.750		
1 02 1.02.01 20 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Kegiatan	94.000.000	98.700.000		
1 02 1.02.01 21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT					330.800.000	347.340.000		
1 02 1.02.01 21 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	8 keg	56.100.000	58.905.000		
1 02 1.02.01 21 05	Pengawasan dan Pembinaan Tempat-Tempat Umum			Jumlah TTU yang dibina	23 Keg	43.120.000	45.276.000		
1 02 1.02.01 21 06	Pembinaan Kebersihan Lingkungan			Jumlah Pembinaan Kebersihan Lingkungan	5 Keg	61.000.000	64.050.000		
1 02 1.02.01 21 07	Pembinaan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga			Jumlah Pembinaan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga	6 Keg	76.500.000	80.325.000		
1 02 1.02.01 21 08	Pengawasan dan pengendalian penyediaan air bersih dan air minum			% penduduk yg memiliki akses thdp air minum berkualitas	44 Keg	94.080.000	98.784.000		
1 02 1.02.01 22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR					1.409.395.000	1.479.864.750		
1 02 1.02.01 22 01	Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk			Jumlah Fokus Penyemprotan Foing	50 Fokus	95.000.000	99.750.000		
1 02 1.02.01 22 08	Peningkatan Imunisasi			Jumlah Capaian Imunisasi	18 Kegiatan	325.200.000	341.460.000		
1 02 1.02.01 22 09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah			Jumlah KLB yang ditangani	6 Kegiatan	100.900.000	105.945.000		
1 02 1.02.01 22 10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit			Jumlah Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit	3 keg	41.000.000	43.050.000		
1 02 1.02.01 22 12	Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (DBD, Malaria)			Jumlah pemberantasan penyakit	21 Keg	262.950.000	276.097.500		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
		Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 02 1.02.01 22 13	Pencegahan dan Pemberantasan Diare	Jumlah Kejadian Diare yang ditangani	9 Kegiatan	130.772.000	137.310.600		
1 02 1.02.01 22 14	Pencegahan dan Pemberantasan Ispa	Jumlah Kejadian Ispa yang ditangani	4 Kegiatan	36.392.000	38.211.600		
1 02 1.02.01 22 15	Pencegahan dan Pemberantasan TB Paru	Jumlah Pencegahan dan pemberantasan TB Paru	26 Kegiatan	214.000.000	224.700.000		
1 02 1.02.01 22 16	Pencegahan dan Pemberantasan Kusta	Jumlah Pencegahan dan pemberantasan Kusta	6 Kegiatan	53.181.000	55.840.050		
1 02 1.02.01 22 17	Pencegahan dan Penanganan HIV-AIDS	Jumlah Pencegahan dan Penanganan HIV-AIDS	3 keg	150.000.000	157.500.000		
1 02 1.02.01 23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN			811.580.000	852.159.000		
1 02 1.02.01 23 01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas terakreditasi	3 PKM + 1 Labkesda	753.580.000	791.259.000		
1 02 1.02.01 23 03	Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sikda	5 PKM	58.000.000	60.900.000		
1 02 1.02.01 25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA			11.730.975.000	12.317.523.750		
1 02 1.02.01 25 05	Pembangunan posyandu	Terselenggaranya pembangunan posyandu permanen	5 paket	750.000.000	787.500.000		
1 02 1.02.01 25 07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah Pengadaan	1 kegiatan	7.650.000.000	8.032.500.000		
1 02 1.02.01 25 14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Terselenggaranya Rehabilitasi Sarana Pelayanan Dasar	1 kegiatan	4.080.975.000	4.285.023.750		
1 02 1.02.01 26	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA				-		
1 02 1.02.01 26 01	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Alat Kesehatan dalam Pembangunan Rumah Sakit	1 Rumah Sakit	2.000.000.000	2.100.000.000		
1 02 1.02.01 28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN			5.962.623.847	6.260.755.039		
1 02 1.02.01 28 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah Puskesmas yang bermitra dengan BPJS	5 Puskesmas	5.962.623.847	6.260.755.039		
1 02 1.02.01 31	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN			605.000.000	635.250.000		
1 02 1.02.01 31 05	Pengadaan sarana prasarana laboratorium	Jumlah pengadaan sarana prasarana laboratorium	5 keg	380.000.000	399.000.000		
1 02 1.02.01 31 06	Penyediaan biaya operasional laboratorium	Adanya penyediaan biaya operasional laboratorium	5 keg	225.000.000	236.250.000		
1 02 1.02.01 33	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA, KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB			177.561.000	186.439.050		
1 02 1.02.01 33 01	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	4 Keg	137.079.000	143.932.950		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						(10)	(11)	(12)	(13)
					Tolak Ukur	Target								
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)							
1 02 1.02.01 33 02	PeningkatanKeluarga Berencana dan Kesehatan Remaja	Jumlah pelayanan keluarga berencana	4 Keg	24.881.000	26.125.050									
1 02 1.02.01 33 03	Pelayanan Kesehatan Usia	Jumlah pelayanan pada usia	5 Keg	11.101.000	11.656.050									
1 02 1.02.01 33 04	Monitoring,Evaluasi dan pelaporan	jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Keg	4.500.000	4.725.000									
1 02 1.02.01 34	KEBIJAKAN KESEHATAN, PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN HUKUM KESEHATAN			6.128.142.000	6.434.549.100									
1 02 1.02.01 34 05	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6 Keg	73.672.000	77.355.600									
1 02 1.02.01 34 06	Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Terlaksanannya operasional pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	1 kegiatan	6.054.470.000	6.357.193.500									
1 02 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH			48.000.000	50.400.000									
1 02 4.01.03 19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			48.000.000	50.400.000									
1 02 4.01.03 19 06	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah rumah tangga berPHBS	48 kali	48.000.000	50.400.000									
1 02 4.01.11	KECAMATAN ASAKOTA			48.000.000	50.400.000									
1 02 4.01.11 19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			48.000.000	50.400.000									
1 02 4.01.11 19 08	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	jumlah UKBM yang dibina	4 kelurahan	48.000.000	50.400.000									
1 02 4.01.12	KECAMATAN MPUNDA			100.000.000	105.000.000									
1 02 4.01.12 19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			100.000.000	105.000.000									
1 02 4.01.12 19	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	jumlah UKBM yang dibina	10 kelurahan	100.000.000	105.000.000									
1 02 4.01.13	KECAMATAN RABA			110.000.000	115.500.000									
1 02 4.01.13 19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			110.000.000	115.500.000									
1 02 4.01.13 19	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	jumlah UKBM yang dibina	11 kelurahan	110.000.000	115.500.000									
1 02 4.01.13	KECAMATAN KECAMATAN RASANA E TIMUR			70.000.000	73.500.000									
1 02 4.01.13 19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			70.000.000	73.500.000									
1 02 4.01.13 19	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	jumlah UKBM yang dibina	7 kelurahan	70.000.000	73.500.000									
1 02 4.01.13	KECAMATAN RASANA E TIMUR			60.000.000	63.000.000									
1 02 4.01.13 19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			60.000.000	63.000.000									
1 02 4.01.13 19	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	jumlah UKBM yang dibina	6 kelurahan	60.000.000	63.000.000									
1 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			135.608.670.100	136.159.327.080									
1 03 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM PERTAMBANGAN DAN ENERGI			135.608.670.100	136.159.327.080									
1 03 1.03.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.492.100.000	1.561.455.000									
1 03 1.03.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi yang cukup	1 Pelayanan	90.000.000	94.500.000									
1 03 1.03.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas	1 Pelayanan	50.000.000	52.500.000									
1 03 1.03.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya SDM Adm. Keuangan Perkantoran	1 Pelayanan	80.000.000	84.000.000									
1 03 1.03.01 01 08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor			5.000.000										
1 03 1.03.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor yang cukup	1 Pelayanan	48.000.000	50.400.000									
1 03 1.03.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggadaan yang cukup	1 Pelayanan	130.000.000	136.500.000									
1 03 1.03.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup	1 Pelayanan	112.900.000	118.545.000									
1 03 1.03.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan	Tersediaanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Pelayanan	19.200.000	20.160.000									
1 03 1.03.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan Makan-minum kantor	1 Pelayanan	27.000.000	28.350.000									
1 03 1.03.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dihadirinya seluruh rapat-rapat dinas	1 Pelayanan	780.000.000	819.000.000									
1 03 1.03.01 01 19	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah			150.000.000	157.500.000									
1 03 1.03.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			539.600.000	566.580.000									
1 03 1.03.01 02 22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Operasional	Terawatnya seluruh sarana/prasarana kantor	1 kgt	190.000.000	199.500.000									
1 03 1.03.01 02 24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas	Terawatnya semua kendaraan dinas	3 unit	317.700.000	333.585.000									
1 03 1.03.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			31.900.000	33.495.000									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1 03 1.03.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						218.300.000	229.215.000		
1 03 1.03.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersusunnya Lap. Capaian Kinerja.	1 Dokumen	24.650.000	25.882.500		
1 03 1.03.01 06 02	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran				Tersusunnya Lap. Keuangan semesteran.	1 Dokumen	24.650.000	25.882.500		
1 03 1.03.01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran						12.350.000	12.967.500		
1 03 1.03.01 06 04	Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun				Tersusunnya Lap. Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	24.650.000	25.882.500		
1 03 1.03.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA-SKPD				Tersusunnya Lap. Program Kegiatan tahunan	4 Dokumen	98.500.000	103.425.000		
1 03 1.03.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD				Tersusunnya Lap. Lakip, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	33.500.000	35.175.000		
1 03 1.03.01 07	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN						68.737.868.000	72.174.761.400		
1 03 1.03.01 07 03	Peningkatan Jalan						68.737.868.000	72.174.761.400		
1 03 1.03.01 15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN						4.691.800.000	4.926.390.000		
1 03 1.03.01 15 03	Pembangunan Jalan				Panjang Jalan dalam kondisi baik	25 km	2.191.800.000	2.301.390.000		
1 03 1.03.01 15 05	Pembangunan jembatan				Jumlah jembatan yang ditangani	2 Unit	2.500.000.000	2.625.000.000		
1 03 1.03.01 16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG						3.739.617.600	3.926.598.480		
1 03 1.03.01 16 01	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				Panjang saluran drainase yang dibangun/ditangani	15.000 m	2.850.794.600	2.993.334.330		
1 03 1.03.01 16 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				Panjang saluran drainase yang dibangun/ditangani	15.000 m	888.823.000	933.264.150		
1 03 1.03.01 17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG						4.523.025.000	4.749.176.250		
1 03 1.03.01 17 03	Pembangunan turap/talud/bronjong				Jumlah Titik Longsor/Potensi Longsor yang ditangani	20 titik	4.523.025.000	4.749.176.250		
1 03 1.03.01 18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN/JEMBATAN						15.242.832.000	16.004.973.600		
1 03 1.03.01 18 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan				Panjang Jalan dalam kondisi baik	10 KM	15.142.632.000	15.899.763.600		
1 03 1.03.01 18 04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan				Jumlah jembatan yang ditangani	2 Unit	100.200.000	105.210.000		
1 03 1.03.01 23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN						526.830.000	553.171.500		
1 03 1.03.01 23 10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat				Jumlah Alat Berat yang ditangani	1 Kgt	358.650.000	376.582.500		
1 03 1.03.01 23 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				Laporan Hasil monitoring Prasarana Kebinamargaan	1 Dokumen	168.180.000	176.589.000		
1 03 1.03.01 24	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN JARINGAN IRRIGASI, RAWA/JARINGAN PENGAIRAN						5.208.068.000	5.468.471.400		
1 03 1.03.01 24 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi				Peningkatan Saluran Irigasi		1.482.868.000	1.557.011.400		
1 03 1.03.01 24 18	Pembangunan Jaringan Irigasi				Bertambahnya jumlah Jaringan Irigasi		3.725.200.000	3.911.460.000		
1 03 1.03.01 27	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH						7.329.084.000	7.695.538.200		
1 03 1.03.01 27 01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masy. berpenghasilan rendah				Terbangunnya Jar. Air bersih bagi masy. Berpenghasilan rendah	1000 SR	4.529.844.000	4.756.336.200		
1 03 1.03.01 27 02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah				Terbangunnya Prasarana dan sarana air limbah komunalbagi masy. Berpenghasilan rendah	800 SR	2.751.250.000	2.888.812.500		
1 03 1.03.01 27 04	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah				Jumlah KSM Pengelola Air limbah yang dibina	8 KSM	47.990.000	50.389.500		
1 03 1.03.01 29	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH						7.125.000.000	7.481.250.000		
1 03 1.03.01 29 02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur				Luas Lahan Tepian Air Yang ditata	2 Ha	7.000.000.000	7.350.000.000		
1 03 1.03.01 29 05	Pendampingan Program NUSP-Phase 2				Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	20 Ha	75.000.000	78.750.000		
1 03 1.03.01 29 06	Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)				Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	20 Ha	50.000.000	52.500.000		
1 03 1.03.01 30	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN						10.306.425.000	10.821.746.250		
1 03 1.03.01 30 01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan				Laporan hasil verifikasi Dokumen Perencanaan BG	1 Laporan	87.300.000	91.665.000		
1 03 1.03.01 30 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan				Panjang Jalan Lingkungan yang ditangani	65 km	10.219.125.000	10.730.081.250		
1 08 1.08.01 28	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENERANGAN JALAN UMUM						4.490.997.000	4.715.546.850	Program Sedang Berjalan	DKPP
1 08 1.08.01 28 01	Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum				Tercapainya rencana SJPJ yang berkesinambungan dan peningkatan kualitas penerangan jalan, taman dan hutan kota	1 keg	4.490.997.000	4.715.546.850		
1 05 1.05.01 15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG						947.406.500	994.776.825		
1 05 1.05.01 15 02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL				Jumlah Ranperda RDTRK Kec. yang diperdakan	2 Dokumen	391.690.000	411.274.500		
1 05 1.05.01 15 07	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan				Perwali Tentang RTBL Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	1 Dokumen	394.593.900	414.323.595		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1 05 1.05.01 15 12		Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Jumlah Aparatur Pemerintah yang Memiliki kualifikasi Keahlian Tata Ruang	40 Orang	86.036.000	90.337.800				
1 05 1.05.01 15 13		Survey dan pemetaan	Laporan Hasil Survey dan Pemetaan	1 Dokumen	75.086.600	78.840.930				
1 05 1.05.01 16		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG			333.017.000	349.667.850				
1 05 1.05.01 16 07		Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah Kelurahan yang dilakukan sosialisasi	5 Kelurahan	301.278.000	316.341.900				
1 05 1.05.01 16 09		Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan ruang	Laporan Hasil Movev	1 Dokumen	31.739.000	33.325.950				
1 05 1.05.01 17		PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG			156.700.000	164.535.000				
1 05 1.05.01 17 11		Penerbitan Sertifikasi IMB	Jumlah IMB yang diterbitkan	200 IMB	58.100.000	61.005.000				
1 05 1.05.01 17 12		Penerbitan Sertifikat SLF (Sertifikat Layak Fungsi)	Jumlah SLF yang diterbitkan	200 SLF	49.300.000	51.765.000				
1 05 1.05.01 17 13		Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas TABG	1 dokumen	49.300.000	51.765.000				
1 04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			10.426.804.100	11.339.021.715				
1 04 1.04.01		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			10.426.804.100	11.339.021.715				
1 4 1.05.01 01		PROGRAM PELAYANAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			678.668.000	712.601.400				
1 04 1.04.01 01 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat yg cukup	1 Pelayanan	39.000.000	40.950.000				
1 04 1.04.01 01 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik yg cukup	1 Pelayanan	50.580.000	53.109.000				
1 04 1.04.01 01 06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan perijinan kendaraan dinas	1 Pelayanan	35.000.000	36.750.000				
1 04 1.04.01 01 07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya SDM Administrasi keuangan perkantoran	1 Pelayanan	92.400.000	97.020.000				
1 04 1.04.01 01 08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Pelayanan	39.000.000	40.950.000				
1 04 1.04.01 01 10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yg cukup	1 Pelayanan	46.618.500	48.949.425				
1 04 1.04.01 01 11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan yg cukup	1 Pelayanan	34.550.000	36.277.500				
1 04 1.04.01 01 13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor yang cukup	1 Pelayanan	48.519.500	50.945.475				
1 04 1.04.01 01 17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kantor yang cukup	1 Pelayanan	18.000.000	18.900.000				
1 04 1.04.01 01 18		Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	Tersedianya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Pelayanan	255.000.000	267.750.000				
1 04 1.04.01 01 19		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Tersedianya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Pelayanan	20.000.000	21.000.000				
1 04 1.04.01 02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			78.600.000	82.530.000				
1 04 1.04.01 02 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya seluruh kendaraan dinas/operasional	10 unit	71.600.000	75.180.000				
1 04 1.04.01 02 26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya seluruh perlengkapan gedung kantor		7.000.000	7.350.000				
1 04 1.04.01 03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			18.630.000	19.561.500				
1 04 1.04.01 03 02		Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya keseragaman pakaian Dinas aparatur	35 org	18.630.000	19.561.500				
1 04 1.04.01 06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			124.102.000	130.307.100				
1 04 1.04.01 06 01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dok	22.685.000	23.819.250				
1 04 1.04.01 06 02		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Lap. Keuangan semesteran	1 Dok	23.112.000	24.267.600				
1 04 1.04.01 06 04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Lap. Keuangan Akhir tahun	1 Dok	20.572.000	21.600.600				
1 04 1.04.01 06 05		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Program Kegiatan tahunan	4 Dok	34.272.000	35.985.600				
1 04 1.04.01 06 06		Penyusunan LAKIP, LPI dan LPPD	Tersusunnya Lap. Lakip, LPI dan LPPD	1 Dok	23.461.000	24.634.050				
1 04 1.04.01 15		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			9.190.672.000	9.650.205.600				
1 04 1.04.01 15 09		Pendampingan Bantuan Rumah Swadaya	Jumlah RTLH yang ditangani	100 Unit	256.690.000	269.524.500				
1 04 1.04.01 15 11		Pendataan perumahan			50.000.000	52.500.000				
1 04 1.04.01 15 12		Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Jumlah RTLH yang ditangani	300 Unit	8.533.982.000	8.960.681.100				
1 04 1.04.01 15 13		Peningkatan Sarana dan Prasarana Rusunawa			350.000.000	367.500.000				
1 04 1.04.01 16		PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN			50.000.000	52.500.000				
1 04 1.04.01 16 03		Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Sederhana Sehat			50.000.000	52.500.000				
1 04 1.04.01 17		PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN			100.000.000	495.877.410				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						
						Tolak Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 04 1.04.01 17 10	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan (Pokja)							100.000.000	105.000.000			
1 04 1.04.01 21	Program Perencanaan Permukiman Kumuh							186.132.100	195.438.705			
1 04 1.04.01 21 01	Rencana teknis kawasan permukiman kumuh							186.132.100	195.438.705			
1 05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							11.863.692.100	12.456.876.705			
1 05 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							7.765.895.700	8.154.190.485			
1 05 1.05.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							3.104.967.000	3.104.967.000			
1 05 1.05.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat					Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	1900 lembar	20.000.000	21.000.000	Lama		
1 05 1.05.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai	12 Bulan	18.522.000	19.448.100	Lama		
1 05 1.05.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik	15 unit	61.425.000	64.496.250	Lama		
1 05 1.05.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan					Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai	100%	57.360.000	60.228.000	Lama		
1 05 1.05.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor					Cakupan ruang kantor yang bersih	100%	25.000.000	26.250.000	Lama		
1 05 1.05.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor					Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	40.000.000	42.000.000	Lama		
1 05 1.05.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	60.000 Lbr	45.000.000	47.250.000	Lama		
1 05 1.05.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Jumlah kerjasama dengan media	6 media	44.000.000	46.200.000	Lama		
1 05 1.05.01 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor					Jumlah bahan logistik kantor	12 Bulan	14.700.000	15.435.000	Lama		
1 05 1.05.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman					Jumlah Kegiatan makan minum rapat	12 Bulan	2.000.000.000	2.100.000.000	Lama		
1 05 1.05.01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	280.000.000	294.000.000	Lama		
1 05 1.05.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	498.960.000	523.908.000	Lama		
1 05 1.05.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							428.850.000	450.292.500			
1 05 1.05.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					Jumlah pengadaan perlengkapan gedung	1 paket	116.000.000	121.800.000	Lama		
1 05 1.05.01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor					Jumlah pengadaan peralatan gedung	1 paket	100.000.000	105.000.000	Lama		
1 05 1.05.01 02 10	Pengadaan mebeleur					Jumlah Pengadaan mebeleur	1 paket	35.000.000	36.750.000	Lama		
1 05 1.05.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	15 unit	170.850.000	179.392.500	Lama		
1 05 1.05.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					Persentase Pemeliharaan peralatan kantor yang berfungsi baik	100%	7.000.000	7.350.000	Lama		
1 05 1.05.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							400.000.000	420.000.000			
1 05 1.05.01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	200.000.000	210.000.000	Baru		
1 05 1.05.01 03 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan					Jumlah pakaian kerja lapangan	1 Paket	200.000.000	210.000.000	Baru		
1 05 1.05.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							110.000.000	115.500.000.000			
1 05 1.05.01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal					Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	5 org	50.000.000	52.500.000	Lama		
1 05 1.05.01 05 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan					Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan	6 kali	60.000.000	63.000.000.000	Lama		
1 05 1.05.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							87.500.000	91.875.000			
1 05 1.05.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Jumlah Dokumen yang harus disediakan	2 Dok	7.500.000	7.875.000	Lama		
1 05 1.05.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran					Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 dok	20.000.000	21.000.000	Lama		
1 05 1.05.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dok	10.000.000	10.500.000	Lama		
1 05 1.05.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 dok	30.000.000	31.500.000	Lama		
1 05 1.05.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD					Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 dok	20.000.000	21.000.000	Lama		
1 05 1.05.01 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN							1.555.563.000	1.633.341.150			
1 05 1.05.01 15 05	Pengendalian keamanan lingkungan					Jumlah Penanganan Pelanggaran Ketertiban	0 Kasus	1.450.000.000	1.522.500.000	Lama		
1 05 1.05.01 15 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan					Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2 kali	12.000.000	12.600.000	Lama		
	Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban					Dokumen Pendataan dan pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban	1 Dokumen	31.563.000	33.141.150			
	Pendataan Pengaduan dan Informasi dari Masyarakat					Dokumen Pendataan Pengaduan dan Informasi dari Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000	21.000.000			
1 05 1.05.01 15 07	Penindakan dan Pemberkasan Pelanggar Peraturan Daerah					Jumlah Berkas Penindakan dan Pemberkasan Pelanggar Perda	6 berkas	30.000.000	31.500.000	Baru		
1 05 1.05.01 15 08	Rapat Teknis PPNSD					Jumlah Rekomendasi Penindakan pelanggaran	3 kali	12.000.000	12.600.000	Baru		
1 05 1.05.01 16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL							718.600.700	754.530.735			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
				Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1 05 1.05.01 16 03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	Jumlah Kegiatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	10 Kali	230.721.750	242.257.837,50	Lama			
1 05 1.05.01 16 06	Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan krantibum dan hari-hari besar	Jumlah kegiatan Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Tramtibum dan Hari-hari Besar	6 Kali	205.441.950	215.714.047,50	Lama			
1 05 1.05.01 16 07	Peningkatan Kerjasama dengan aparat penegak hukum dan keamanan dalam teknik pencegahan pelanggaran Perda/Perkada dan kejahatan konvensional	Jumlah MOU Kegiatan dengan aparat penegak hukum dan keamanan dalam teknik pencegahan pelanggaran Perda/Perkada dan kejahatan konvensional	2 Mou	20.000.000	21.000.000	Baru			
	Pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk Pengamanan Wilayah pada Pelaksanaan Pemilihan umum (DPR, DPD, Presiden, DPRD)	Jumlah Pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk Pengamanan Wilayah pada Pelaksanaan Pemilihan umum (DPR, DPD, Presiden, DPRD)	3 kali	184.054.500	193.257.225	Lama			
	Kerjasama Peningkatan Batas Wilayah	Jumlah MOU Kerjasama Peningkatan Batas Wilayah	2 MOU	78.382.500	82.301.625	Lama			
1 05 1.05.01 20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)			145.000.000	152.250.000,00				
1 05 1.05.01 20 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	4 Kali	80.000.000	84.000.000	Baru			
1 05 1.05.01 20 02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	2 Kali	40.000.000	42.000.000	Lama			
1 05 1.05.01 20 09	Pemetaan Kawasan Rawan Penyakit Sosial	Dokumen Pemetaan Kawasan Rawan Penyakit Sosial	1 dok	25.000.000	26.250.000,00	BArU			
1 05 1.05.01 22	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA								
1 05 1.05.01 22 01	Pelatihan anggota linmas dalam penanggulangan bencana	Jumlah anggota satuan linmas dalam penanggulangan bencana	50 orang			Lama			
1 05 1.05.01 24	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			270.000.000	283.500.000				
1 05 1.05.01 24 01	Sosialisasi Peraturan Daerah	Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah	10 Perda	75.000.000	78.750.000	Baru			
1 05 1.05.01 24 02	Penindakan dan Pemberkas Pelanggar Peraturan Daerah	Jumlah Penindakan dan Pemberkas Pelanggar Peraturan Daerah	191 Kasus	50.000.000	52.500.000	Baru			
1 05 1.05.01 24 03	Rapat Teknis PPNSD	Jumlah Rapat Teknis PPNSD	12 Kali	30.000.000	31.500.000	Baru			
1 05 1.05.01 24 04	Pelatihan Aplikasi Pemberkas Bagi PPNS	Jumlah Pelatihan Aplikasi Pemberkas Bagi PPNS	2 Kali	20.000.000	21.000.000	Baru			
1 05 1.05.01 24 05	Pembinaan Masyarakat / Badan Hukum Pelanggar Peraturan Daerah	Jumlah Pembinaan Masyarakat / Badan Hukum Pelanggar Peraturan Daerah	20 Kali	30.000.000	31.500.000	Baru			
1 05 1.05.01 24 06	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah	10 Kali	40.000.000	42.000.000	Baru			
1 05 1.05.01 24 07	Penyusunan Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah	5 Kali	25.000.000	26.250.000	Baru			
1 05 1.05.01 52	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN			945.415.000	992.685.750				
1 05 1.05.01 52 01	Peningkatan pelayanan pananggulangan bahaya kebakaran	Jumlah Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 Tahun	800.415.000	840.435.750	Lama			
1 05 1.05.01 52 02	Bimtek peningkatan disiplin PMK	Jumlah SDM yang dilatih	50 rang	75.000.000	78.750.000	Baru			
1 05 1.05.01 52 03	Pemetaan Wilayah Rawan Bahaya Kebakaran	Dokumen Pemetaan Kawasan Rawan Kebakaran	1 dok	20.000.000	21.000.000	Baru			
1 05 1.05.01 52 04	Pemetaan Wilayah Rawan Bahaya Kebakaran	Sosialisasi tingkat kecamatan tentang penanggulangan bahaya kebakaran	5 kali	50.000.000	52.500.000	Baru			
1 05 1.05.02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.097.796.400	4.302.686.220				
1 05 1.05.02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			685.430.400	719.701.920				
1 05 1.05.02 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	150 lembar	23.925.000	25.121.250	Lama			
		Materai yang tersedia selama 1 tahun	1000 lembar						
		Jasa pengiriman/paket	20 paket						
		Jasa operator komputer	12 bin						
1 05 1.05.02 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	6.600.000	6.930.000	Lama			
1 05 1.05.02 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	10 unit	37.345.000	39.212.250	Lama			
		STNK Roda 4 yang diperpanjang	1 unit						
		STNK Roda 2 yang diperpanjang	9 unit						
		Jasa servis Kendaraan	10 unit						
		Jasa sopir	12 bulan						
1 05 1.05.02 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai	100%	48.532.000	50.958.600	Lama			
1 05 1.05.02 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cabangan ruang kantor yang bersih	100%	9.498.500	9.973.425	Lama			
		Cleaning Service	12 bin						
1 05 1.05.02 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	34 Jenis	20.029.900	21.031.395	Lama			
1 05 1.05.02 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	30.017 lembar 50 Dok	12.100.000	12.705.000	Lama			
		Jasa cetak spanduk/umbul-umbul	100 m						
1 05 1.05.02 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase terwujudnya penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	100%	3.410.000	3.580.500	Lama			
1 05 1.05.02 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai.	13 buah	200.000.000	210.000.000	Lama			
1 05 1.05.02 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	5 media	20.000.000	21.000.000	Lama			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT							
					Tolak Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 05 1.05.02 01 17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah Kegiatan makan minum rapat	100 orang	20.000.000	21.000.000	Lama			
					Makanan dan minuman tamu	30 orang						
1 05 1.05.02 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	30 kali	250.000.000	262.500.000	Lama			
1 05 1.05.02 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah				Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	4 kali	33.990.000	35.689.500	Lama			
1 05 1.05.02 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						590.000.000	619.500.000				
1 05 1.05.02 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional\				Jumlah kendaraan dinas baru	1 unit	400.000.000	420.000.000				
1 05 1.05.02 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Persentase terpeliharanya gedung kantor yang memadai	100%	150.000.000	157.500.000				
1 05 1.05.02 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Persentase terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang memadai	100%	40.000.000	42.000.000	Lama			
1 05 1.05.02 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						30.900.000,00	32.445.000				
1 05 1.05.02 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah Pakaian Dinas	31 Stel	17.000.000	17.850.000	Lama			
1 05 1.05.02 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	31 Stel	13.900.000	14.595.000	Lama			
1 05 1.05.02 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						120.000.000	126.000.000				
1 05 1.05.02 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	2 Dokumen	20.000.000	14.058.000	Lama			
1 05 1.05.02 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran				Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	20.000.000	14.058.000	Lama			
1 05 1.05.02 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	20.000.000	15.295.500	Lama			
1 05 1.05.02 06 05	Penyusunan Renstra, Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dokumen	40.000.000	34.496.000	Lama			
1 05 1.05.02 06 06	Penyusunan LAKIP, LPI dan LPPD				Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	2 Dokumen	20.000.000	30.000.000	Lama			
1 05 1.05.02 17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN						360.000.000	378.000.000				
1 05 1.05.02 17 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama				Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	2 dokumen	100.000.000	105.000.000	Lama			
1 05 1.05.02 17 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa				Jumlah Siswa SLTA/MAN/SMK dan Tenaga Pendidik /Guru yang telah Mengikuti TOT untuk empat Konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara	50 orang	200.000.000	210.000.000	Lama			
1 05 1.05.02 17 05	Forum Pembauran Kebangsaan				Jumlah Pertemuan Forum Pembauran Kebangsaan	4 dokumen	60.000.000	63.000.000	Lama			
1 05 1.05.02 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANNAN						1.336.466.000	1.403.289.300				
1 05 1.05.02 19 02	Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis				Jumlah Laporan Kegiatan KOMINDA	8 dokumen	300.000.000	315.000.000	Lama			
1 05 1.05.02 19 06	Penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)				Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	6 dokumen	243.390.000	255.559.500	Lama			
1 05 1.05.02 19 07	Kordinasi tim terpadu penganan konflik sosial				Jumlah laporan Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	3 dokumen	273.076.000	286.729.800	Lama			
1 05 1.05.02 19 08	Operasional Penggalangan/Jejaring				Jumlah agen penanganan konflik di tiap kelurahan	12 kali	200.000.000	210.000.000	Lama			
1 05 1.05.02 19 09	Temu Bina pencegahan konflik di kalangan pemuda pelajar dan mahasiswa				Jumlah pemuda pelajar dan mahasiswa yang mengikuti Temu Bina pencegahan konflik	150 orang	200.000.000	210.000.000	Lama			
1 05 1.05.02 19 10	Pembentukan Lembaga Mediasi				Jumlah Lembaga Mediasi yang terbentuk	5	120.000.000	126.000.000	Baru			
1 05 1.05.02 21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT						975.000.000	1.023.750.000				
1 05 1.05.02 21 01	Penyuluhan kepada masyarakat (LSM)				Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	150 orang	100.000.000	105.000.000	Lama			
1 05 1.05.02 21 02	Pendampingan Penyelesaian Perselisihan partai Politik				Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	4 dokumen	95.000.000	99.750.000	Lama			
1 05 1.05.02 21 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	8 kali	250.000.000	262.500.000	Lama			
1 05 1.05.02 21 06	Verifikasi kelengkapan dokumen administrasi permohonan Rekomendasi Bantuan Keuangan				Jumlah LSM/Ormas 'ayasan dan Parpol yang mendapat bantuan dana Pemerintah Daerah	150 LSM/ Ormas 'ayasan dan Parpol	130.000.000	136.500.000	Lama			
1 05 1.05.02 21 07	Pendidikan Politik bagi kelompok pemuda dan masyarakat dalam rangka PILEG/PILPRES				Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan Pendidikan Politik bagi kelompok pemuda dan masyarakat dalam rangka PILEG/PILPRES	380 orang	250.000.000	262.500.000	Baru			
	Sosialisasi PILEG/PILPRES bagi pemilih pemula				Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan Sosialisasi PILEG/PILPRES bagi pemilih pemula	150 orang	50.000.000	52.500.000	Baru			
	Sosialisasi PILEG/PILPRES bagi ketua RT/RW				Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan Sosialisasi PILEG/PILPRES bagi ketua RT/RW	800 orang	100.000.000	105.000.000	Baru			
05 1.05.02 21	Pemantauan PILKADA (Desk PILKADA)						124.746.200	130.983.510				
	Sekretariat Daerah											
	Bagian AP:											
	Pembentukan Tim Desk PILKADA											
	Belanja Alat tulis Kantor											
	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Baliho/Bendera											
	Belanja Penggandaan/Fotocopy											

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
				Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Belanja Cetakfoto/Dokumentasi					
				Belanja Makan dan Minum Rapat					
				Belanja Pakaian Seragam Desk PILKADA					
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring Pelaksanaan PILKADA, Evaluasi Pelaksanaan PILKADA)					
05	1.05.02	21		Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
				Sekretariat Daerah					
				Bagian AP:					
				Belanja Alat Tulis Kantor					
				Belanja Penggandaan					
				Belanja Penjilidan					
				Belanja Makan dan Minum Rapat					
				Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH (Walikota terpilih, Wakil Walikota terpilih, Pejabat Walikota)					
				Koordinasi/Konsultasi Ibu Kota RI dan Luar Propinsi NTB serta Koordinasi/Konsultasi Ibu Kota Propinsi					
1	06			SOSIAL			2.473.833.900	2.597.525.595	
1	06	1.06.01		DINAS SOSIAL			2.473.833.900	2.597.525.595	
1	06	1.06.01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			588.595.000	618.024.750	
1	06	1.06.01	01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama 1 tahun	1250 surat	32.000.000	33.600.000	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	2 rekening	35.000.000	36.750.000	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	10 unit	31.500.000	33.075.000	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	11 orang	63.500.000	66.675.000	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	1 gedung	10.920.000	11.466.000	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	50 jenis	36.750.000	38.587.500	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	60.000 lembar	15.750.000	16.537.500	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah perlengkapan kantor	200 buah	10.250.000	10.762.500	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang Terpelihara	3 unit	38.600.000	40.530.000	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	01 14	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang Terpelihara	5 unit	5.250.000	5.512.500	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	10 media	7.200.000	7.560.000	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	40 orang	18.375.000	19.293.750	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	210.000.000	220.500.000	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	36 kali	73.500.000	77.175.000	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			148.000.000	155.400.000	
1	06	1.06.01	02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang di adakan	3 unit	18.000.000	18.900.000	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang di ada	30 buah	15.000.000	15.750.000	Dinas Sosial Kota Bima
1	06	1.06.01	02 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	12 buah	30.000.000	31.500.000	Dinas Sosial Kota Bima

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1 06 1.06.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah gedung dinas yang terpelihara	1 gedung	65.000.000	68.250.000		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	10 unit	20.000.000	21.000.000		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						50.000.000	52.500.000		
1 06 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	40 Stel	25.000.000	26.250.000		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 01 04 06	Pengadaan Pakaian Olahraga				Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	40 Stel	25.000.000	26.250.000		
1 06 1.06.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						150.120.000	157.626.000		
1 06 1.06.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah Dokumen yang harus disediakan	1 Laporan	16.120.000	16.926.000		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran				Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Laporan	15.000.000	15.750.000		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran				Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	15.000.000	15.750.000		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	20.000.000	21.000.000		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	5 Laporan	52.500.000	55.125.000		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD				Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Laporan	31.500.000	33.075.000		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA						667.043.900	700.396.095		
1 06 1.06.01 15 01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya				Jumlah PSM/TKSK yang diberdayakan	10 orang	29.944.000	31.441.200		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 15 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin				Jumlah Keluarga Miskin yang terlatih	60 orang	182.490.000	191.614.500		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 15 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				Laporan Monev	20 kelompok	10.000.000	10.500.000		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 15 08	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				Jumlah PMKS seluruhnya	40 orang	31.215.000	32.775.750		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 15 09	Penyuluhan sosial				Jumlah Penyuluhan Sosial yang terlaksana	1 kegiatan	19.885.000	20.879.250		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 15 10	Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT)				Basis data Fakir miskin	56 orang	350.000.000	367.500.000		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 15 11	Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan KUBE Jasa				Jumlah program BPNT sesuai aturan berlaku	60 orang	43.509.900	45.685.395		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL						608.913.000	639.358.650		
1 06 1.06.01 16 04	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal				Jumlah anak terlantar yang terlatih	21 orang	21.990.000	23.089.500		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 16 10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa				Jumlah obyek yang tertangani masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	100 orang	180.000.000	189.000.000		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 16 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				Laporan Monev	20 kelompok	10.000.000	10.500.000		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 16 12	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)				Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan	2005 orang	276.150.000	289.957.500		Dinas Sosial Kota Bima
1 06 1.06.01 16 13	Pendampingan kegiatan keserasian sosial				Jumlah masyarakat rawan konflik sosial yang tertangani	3 kelompok	24.881.000	26.125.050		Dinas Sosial Kota Bima

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1 06 1.06.01 16 14	Asuransi Kesejahteraan Sosial dengan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	Asuransi Kesejahteraan Sosial dengan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah yang dilayani	15 orang	39.060.000	41.013.000		Dinas Sosial Kota Bima			
1 06 1.06.01 16 15	Perlindungan terhadap Korban tindak kekerasan pekerja migran (KTKPM)	Jumlah Perlindungan terhadap Korban tindak kekerasan pekerja migran (KTKPM)	14 orang	29.116.000	30.571.800		Dinas Sosial Kota Bima			
1 06 1.06.01 16 16	Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial	Meningkatnya jumlah dana dan barang bantuan sosial yang terkumpul	2 kegiatan	27.716.000	29.101.800		Dinas Sosial Kota Bima			
1 06 1.06.01 17	Program pembinaan Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	Terlaksananya program pemenuhan kebutuhan dasar anak melalui lembaga kesejahteraan anak (LKSA)		41.990.000	44.089.500					
1 06 1.06.01 17 02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal.	Terlathinya anak terlantar	21 orang	21.990.000	23.089.500		Dinas Sosial Kota Bima			
1 06 1.06.01 17 06	Pelayanan Psikososial terhadap Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	Terlaksananya program pemenuhan kebutuhan dasar anak melalui lembaga kesejahteraan anak (LKSA)	20 LKSA (900 Orang Anak)	15.000.000	15.750.000		Dinas Sosial Kota Bima			
1 06 1.06.01 17 07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Monev	218 jiwa	5.000.000	5.250.000					
1 06 1.06.01 18	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA			37.165.000	39.023.250					
1 06 01 18 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah para penyandang cacat dan eks trauma yg tertangani	10 orang	27.165.000	28.523.250		Dinas Sosial Kota Bima			
1 06 01 18 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan monev	1 dokumen	10.000.000	10.500.000		Dinas Sosial Kota Bima			
1 06 1.06.01 20	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)			37.800.000	39.690.000					
1 06 1.06.01 20 04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	30 orang	37.800.000	39.690.000		Dinas Sosial Kota Bima			
1 06 1.06.01 21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL			139.207.000	146.167.350					
1 06 1.06.01 21 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	38 orang	21.779.000	22.867.950		Dinas Sosial Kota Bima			
1 06 1.06.01 21 05	Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Jumlah elemen kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah	50 orang	59.111.000	62.066.550		Dinas Sosial Kota Bima			
1 06 1.06.01 21 07	Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	5 kegiatan	43.317.000	45.482.850		Dinas Sosial Kota Bima			
1 06 1.06.01 21 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan monev	1 dokumen	15.000.000	15.750.000		Dinas Sosial Kota Bima			
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			65.382.551.000						
2 01	TENAGA KERJA			1.985.350.000	2.084.617.500					
2 01 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA			1.985.350.000	2.084.617.500					
2 01 2.01.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR			580.700.000	609.735.000					
2 01 2.01.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	850 surat	21.400.000	22.470.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			
2 01 2.01.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rekening	28.500.000	29.925.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						(10)	(11)	(12)	(13)
						Tolak Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2	01	2.01.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	1 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2	23.000.000	24.150.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	5 orang	75.000.000	78.750.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	8 orang	36.000.000	37.800.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3 kali	5.000.000	5.250.000						
2	01	2.01.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	45 item barang	65.000.000	68.250.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	40000 lembar	24.000.000	25.200.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor	7 unit laptop / printer	35.000.000	36.750.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	10 media	7.800.000	8.190.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	10 kali	30.000.000	31.500.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 kali	200.000.000	210.000.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5 kali	30.000.000	31.500.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			175.000.000	183.750.000						
2	01	2.01.01	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang di adakan	2 Unit	35.000.000	36.750.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang di adakan	5 unit (scanner, Pc)	75.000.000	78.750.000						
2	01	2.01.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung dinas yang terpelihara	1 Unit	20.000.000	21.000.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 Unit	30.000.000	31.500.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang di pelihara	6 Unit	15.000.000	15.750.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
1	01	1.01.01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			21.000.000	22.050.000						
1	01	1.01.01	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah seragam pakaian dinas kantor	35 pegawai	21.000.000	22.050.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			195.000.000	204.750.000						
2	01	2.01.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	4 laporan	28.000.000	29.400.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Laporan	18.000.000	18.900.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	18.000.000	18.900.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				
2	01	2.01.01	06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	18.000.000	18.900.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2 01 2.01.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	5 Laporan	75.000.000	78.750.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			
2 01 2.01.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Laporan	38.000.000	39.900.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			
2 01 2.01.01 15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			231.670.000	243.253.500					
2 01 2.01.01 15 01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Jumlah dokumen data base tenaga kerja daerah	1 Dokumen	25.000.000	26.250.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			
2 01 2.01.01 15 06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah dan jenis pelatihan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	80 orang	190.000.000	199.500.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			
2 01 2.01.01 15 10	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja	Terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan tenaga kerja swasta	30 lembaga / pelatihan	16.670.000	17.503.500		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			
2 01 2.01.01 16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA			442.000.000	464.100.000					
2 01 2.01.01 16 01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Informasi bursa tenaga kerja	600 orang	15.000.000	15.750.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			
2 01 2.01.01 16 02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	712 lembar/brosur/pamflet/	35.000.000	36.750.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			
2 01 2.01.01 16 06	Pemberian Fasilitas dan mendorong sistim pendanaan pelatihan berbasis Masyarakat	Pemberian Fasilitas dan mendorong sistim pendanaan pelatihan berbasis Masyarakat	50 tenaga kerja mandiri	180.000.000	189.000.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			
2 01 2.01.01 16 07	Padat Karya Produktif	Jumlah tenaga kerja yang terlatih	60 Tenaga Kerja Yang diserap	150.000.000	157.500.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			
2 01 2.01.01 16 08	Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	25 perusahaan	52.000.000	54.600.000					
2 01 2.01.01 16 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah PPTKIS yang dimonitoring	3 Kali	10.000.000	10.500.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			
2 01 2.01.01 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			360.980.000	379.029.000					
2 01 2.01.01 17 01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	45 Perusahaan	33.000.000	34.650.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			
2 01 2.01.01 17 02	Kegiatan Pendampingan dan penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang dimediasi	12 Kasus	82.000.000	86.100.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			
2 01 2.01.01 17 03	Kegiatan Pendampingan dan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terfasilitasi	84 orang / tenaga kerja	54.000.000	56.700.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			
2 01 2.01.01 17 04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Sosialisasi	80 orang / tenaga kerja	70.000.000	73.500.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT							
					Tolak Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 01 2.01.01 17 05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja				Jumlah pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	74 Perusahaan	86.980.000	91.329.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 01 2.01.01 17 06	penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja				Jumlah standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja	1 Dokumen	35.000.000	36.750.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						2.107.801.000	2.213.191.050				
2 02 2.02.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						2.107.801.000	2.213.191.050				
2 02 2.02.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						629.992.000	661.491.600	Lama			
2 02 2.02.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat				Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat dan adanya operasional jas Non Pegawai	12 bulan	61.520.000	64.596.000	Lama	Kota Bima		
2 02 2.02.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai.	12 bulan	12.500.000	13.125.000	Lama	Kota Bima		
2 02 2.02.01 01 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)				Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	12 bulan	62.200.000	65.310.000	Lama			
2 02 2.02.01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Jumlah pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai		37.848.000	39.740.400	Lama			
2 02 2.02.01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				Jumlah terciptanya tempat kerja yang bersih dan nyaman	12 bulan	21.962.000	23.060.100	Lama			
2 02 2.02.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	40.247.000	42.259.350	Lama	Kota Bima		
2 02 2.02.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah cetakan dan penggandaan	12 bulan	35.540.000	37.317.000	Lama	Kota Bima		
2 02 2.02.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	12 bulan	4.175.000	4.383.750	Lama			
2 02 2.02.01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan				Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	12 bulan	50.600.000	53.130.000	Lama	Kota Bima		
2 02 2.02.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	12 bulan	27.650.000	29.032.500	Lama	Kota Bima		
2 02 2.02.01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 bulan	250.750.000	263.287.500	Lama	Kota Bima		
2 02 2.02.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah				Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 bulan	25.000.000	26.250.000	Lama	Kota Bima		
2 02 2.02.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						222.358.000	233.475.900	Lama			
2 02 2.02.01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DEKON)				Jumlah Honorarium Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DEKON)	4 unit	113.552.000	119.229.600				
2 02 2.02.01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Terlaksananya Pengadaan Desktop Personal Computer (PC) yang memadai Untuk sekretariat P2TP2A	1 Paket	35.646.000	37.428.300	baru			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						
					Tolak Ukur	Target					
(1)	(2)				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
					Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya kegiatan perbaikan Liplang Gedung Kantor DPP dan PA	1 Paket	9.500.000	9.975.000		
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Operasional kendaraan dinas	1 tahun	38.060.000	39.963.000		
					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	5 unit	5.250.000	5.512.500		
2	02	2.02.01	02	10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya jasa pemeliharaan peralatan Komputer kantor	30 Unit	20.350.000	21.367.500		Kota Bima
2	02	2.02.01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			12.935.000	13.581.750	Lama	
2	02	2.02.01	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pengadaan pakaian adat daerah	31 Stel	12.935.000	13.581.750	Baru	Kota Bima
2	02	2.02.01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			172.990.000	181.639.500	Lama	
2	02	2.02.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas dan kinerja SKPD yang tersusun	3 dokumen	10.000.000	10.500.000	Lama	Kota Bima
2	02	2.02.01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD	1 Laporan	9.245.000	9.707.250	Lama	Kota Bima
2	02	2.02.01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia	1 dokumen	11.595.000	12.174.750	Lama	Kota Bima
2	02	2.02.01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	3 Dokumen	80.330.000	84.346.500	Lama	Kota Bima
2	02	2.02.01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen LPJ dan LPPD SKPD (Revisi RENJA dan RENSTRA) yang tersusun	3 dokumen	23.420.000	24.591.000	Lama	Kota Bima
2	02	2.02.01	06	07	Penyusunan laporan keuangan per triwulan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan per triwulan	3 dokumen	19.200.000	20.160.000		
2	02	2.02.01	06	08	Penyusunan Laporan gaji, berkala, impasing dan KP4	Terlaksananya penyusunan Laporan gaji, berkala, impasing dan KP4	4 dokumen	19.200.000	20.160.000		
2	02	2.02.01	15		PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN			479.929.500	503.925.975	Lama	
2	02	2.02.01	15	03	Pelaksanaan sosialisasi yg terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	Jumlah sosialisasi yg terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	1 kegiatan 40 orang	77.650.000	81.532.500	Lama	
					Data Pelembagaan PUG termasuk PPRG	Jumlah kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan	1 kegiatan 60 orang	59.575.000	62.553.750		
					Pengembangan KIE pelaksanaan PUG Tingkat Kota Bima (Peringatan hari Ibu)	Terlaksananya kegiatan PUG dan Peringatan Hari Ibu	1 kegiatan 750 orang	110.874.500	116.418.225		
2	02	2.02.01	15	05	Penyusunan dan penertiban produk hukum daerah dibidang perlindungan perempuan dan anak	Jumlah produk hukum daerah dibidang perlindungan perempuan dan anak	2 Kali keg.	81.755.000	85.842.750	Baru	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
		Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelatihan pemberdayaan perempuan bidang politik hukum sosial ekonomi nbagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan	jumlah peserta Pelatihan pemberdayaan perempuan bidang politik hukum sosial ekonomi nbagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan	1 kegiatan 60 orang	59.575.000	62.553.750		
	Advokasi dan sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial bagi organisasi kemasyarakatan	jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi PP bidang politik hukum bagi organisasi kemasyarakatan di lima kecamatan	1 kegiatan 100 orang	53.575.000	56.253.750		
	Pemetaan potensi dan fasilitasi penguatan serta pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi PP bidang politik hukum bagi organisasi kemasyarakatan di lima kecamatan	1 kegiatan 40 orang	36.925.000	38.771.250		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK			212.801.500	223.441.575		
	Advokasi dan sosialisasi kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Keg. sosialisasi Kota Layak Anak Tk. Kota, dan Gugus Tugas Tk. Kota, serta Tk. Kec,	4 Keg.	123.356.000	129.523.800		
	Pengembangan jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah kegiatan Pembentukan kelompok PATBM di tingkat Kecamatan	1 Keg.	21.780.000	22.869.000		
	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Terlaksananya Pembentukan Penguatan Kelompok Forum Anak dan Remaja	1 Keg.	21.780.000	22.869.000		
	Data Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah dokumen Profil anak Kota Bima	1 dokumen	22.380.500	23.499.525		
	Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas hidup anak	Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas Ramah Anak	1 Keg.	23.505.000	24.680.250		
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN			128.935.000	135.381.750		
	Data Kekerasan terhadap Perempuan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan Pengumpulan Data dan pelaporan KDRT	1 Keg.	67.710.000	71.095.500		
	Perumusan kebijakan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Terlaksananya kegiatan Perumusan kebijakan pencegahan kekerasan, eksploitasi,perempuan	1 Keg.	14.300.000	15.015.000		
	Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah kota Bima (DIALOG WARGA)	Terlaksananya Pertemuan Kegiatan Dialog Warga PUP(pendewasaan usia pernikahan)	1 Keg.	46.925.000	49.271.250		
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			247.860.000	260.253.000		
	Pengumpulan Data kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	jumlah kegiatan Pengumpulan data kekerasan terhadap anak	1 Keg.	67.710.000	71.095.500		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
		Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelatihan Pencegahan Kekerasan, eksploitasi dan Perlakuan Salah lainnya terhadap anak bagi SDM Perencana di Kota Bima	jumlah peserta kegiatan terhadap Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	40 Orang	32.035.000	33.636.750		
	Koordinasi Pencegahan Kekerasan,Eksploitasi Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak Tingkat Daerah	Terkooordinasi dengan Stakholder di Kota Bima pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap Anak	2 Kali keg 40 orang	37.950.000	39.847.500		
	Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan, Penelantaran dan Perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat Kota Bima	jumlah pesertra kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat terhadap pencegahan Kekerasan,eksploitasi dan penelantaran terhap anak	40 Org	13.525.000	14.201.250		
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak tingkat daerah (P2TP2A)	jumlah Pertemuan pertemuan Kegiatan P2TP2A	1 Keg.	96.640.000	101.472.000		
2 03	PANGAN			2.404.000.000	2.599.450.000		
2 03 2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN			2.404.000.000	2.599.450.000		
2 03 2.03.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			597.380.000	657.118.000		BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN
2 03 2.03.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat (5 orang x 12 bulan) materai yang Rp.6.000 materai yang Rp.3.000 paket pengiriman surat, laporan dan data	12 bin 1.100 lembar 1.000 lembar 12 bin	176.700.000	194.370.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi Penyediaan kebutuhan Air Penyediaan Kebutuhan listrik	12 bin 12 bin 12 bin	37.200.000	40.920.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Roda 4 yang dibayar Jasa service kendaraan dinas	1 unit 1 unit	13.767.800	15.144.580	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah pembayaran pengelola administrasi keuangan	4 orang selama 12 bulan	35.688.000	39.256.800	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor yang tersedia	86 jenis	40.000.000	44.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan cetak notebook, blanko SPPD, lebar disposisi, kuitansi, SSP dan amplop Penyediaan penggandaan keperluan kantor	5 jenis 10.000 lembar	55.000.000	60.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia Peraturan perundang- undangan yang tersedia	5 jenis 2 jenis	22.260.000	24.486.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai Penyediaan makanan dan minuman rapat Penyediaan makanan dan minuman tamu	440 orang 150 kali rapat 180 orang tamu	25.834.200	28.417.620	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	170.000.000	187.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	20.930.000	23.023.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			148.490.000	163.339.000		BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN
2 03 2.03.01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor Penyediaan alat pendingin/Air Conditioner (AC) Penyediaan Printer Penyediaan bahan dan peralatan kebersihan	2 jenis 1 unit 4 unit 10 jenis	60.490.000	66.539.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan roda 4	1 unit	28.000.000	30.800.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 jenis	40.000.000	44.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4 jenis	20.000.000	22.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur			31.000.000	34.100.000		BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN
2 03 2.03.01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	penyediaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya	40 Org	31.000.000	34.100.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			10.000.000	11.000.000		BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN
2 03 2.03.01 05 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	40 Orang	10.000.000	11.000.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2 03 2.03.01 06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			149.500.000	149.500.000				BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN
2 03 2.03.01 06 01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen/ laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 jenis	24.000.000	24.000.000		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 06 02		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	dokumen/laporan keuangan semesteran	2 dok	15.750.000	15.750.000		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 06 04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 dok	15.750.000	15.750.000		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 06 05		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	penyediaan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran (Rentra, Renja 2019, PK, RKA TA.2019, DPA TA.2019, DPPA TA.2018)	6 jenis	40.000.000	40.000.000		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 06 06		Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Penyediaan dokumen evaluasi SKPD (L-KIP 2017 dan LPPD 2017)	2 Dokumen	54.000.000	54.000.000		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16		Program peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terlaksananya penyediaan pangan utama, energi dan protein bagi masyarakat		1.345.930.000	1.450.523.000				BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN
2 03 2.03.01 16 01		Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	Jumlah KK miskin/ rawan/rentan pangan yang ditangani	150 KK	100.000.000	80.000.000		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 02		Penyusunan data base potensi produk pangan	Data jumlah produk pangan	1 dokumen	51.875.000	57.062.500		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 03		Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Dokumen analisa pola konsumen dan suplai makanan	1 dokumen	38.400.000	42.240.000		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 05		Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	1 dokumen	101.565.000	111.721.500		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 09		Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah kelompok yang memanfaatkan pekarangan	5 KRPL (Kegiatan)	148.565.000	163.421.500		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 11		Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah komoditi pangan	9 komoditi	295.195.000	324.714.500		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 13		Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah pembangunan 1 unit gudang cadangan pangan	35 ton 1 unit	111.400.000	122.540.000		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 14		Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah kelurahan yang terpenuhi pangan	5 kelurahan	74.250.000	81.675.000		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 16		Pengembangan diversifikasi tanaman	Jumlah kelompok yang dapat dikembangkan di masyarakat	1 kelompok	60.840.000	66.924.000		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 18		Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	1 lumbung	22.950.000	25.245.000		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 19		Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Jumlah pangan yang dapat dijangkau oleh masyarakat	5 LDPM dan PUPM	57.584.000	63.342.400		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 22		Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah pangan yang memiliki mutu dan keamanan untuk dikonsumsi	9 komoditi	45.025.000	49.527.500		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 30		Penyuluhan sumber pangan alternatif	Pemanfaatan makanan alternatif	12 KRPL	67.250.000	73.975.000		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 32		Lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Jumlah kelurahan peserta lomba meningkat	38 Kelurahan	113.331.000	124.664.100		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 33		Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	Jumlah kelurahan yang teridentifikasi rawan/rentan pangan dan gizi	12 kelurahan	57.700.000	63.470.000		Kegiatan sedang berjalan		
2 03 2.03.01 16 34		Analisis dan penyusunan pola Ketersediaan pangan	Persentase Skors Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kota Bima	95%	40.000.000	44.000.000		Kegiatan baru		
2 03 2.03.01 17		Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			121.700.000	133.870.000				BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN
2 03 2.03.01 17 07		Promosi atas hasil produksi pertanian/pertanian unggul daerah	Jumlah produk pangan yang dapat dipromosikan	20 jenis	121.700.000	133.870.000		Kegiatan sedang berjalan		
2 04		PERTANAHAN			10.425.000.000	10.946.250.000				
2 04 1.04.01		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			10.425.000.000	10.946.250.000				
2 04 1.04.01 16		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah			10.200.000.000	10.710.000.000				
2 04 1.04.01 16 03		Pembebasan/Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah	Jumlah lahan yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah	6 obyek	10.200.000.000	10.710.000.000		sedang berjalan		
2 04 1.04.01 17		Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan			100.000.000	105.000.000				
2 04 1.04.01 17 01		Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah kasus pertanahan yang di tangani	12 Kasus	100.000.000	105.000.000		sedang berjalan		
2 04 1.04.01 18		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			125.000.000	131.250.000				
2 04 1.04.01 18 01		Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal	Tersedianya informasi pertanahan	6 bln	125.000.000	131.250.000		sedang berjalan		
2 05 2.05.01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			13.223.085.000	13.884.239.250				
2 05 2.05.01 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			761.235.000	799.296.750				
2 05 2.05.01 01 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	500 surat	Rp 29.700.000	Rp 31.185.000				
2 05 2.05.01 01 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rekening	Rp 34.800.000	Rp 36.540.000				
2 05 2.05.01 01 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang layak	19 unit	Rp 153.175.000	Rp 160.833.750				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
			Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2 05 2.05.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	6 orang	Rp	65.160.000	Rp	68.418.000	
2 05 2.05.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	1 unit	Rp	12.000.000	Rp	12.600.000	
2 05 2.05.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	42 jenis	Rp	60.000.000	Rp	63.000.000	
2 05 2.05.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	80000 lembar	Rp	30.000.000	Rp	31.500.000	
2 05 2.05.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	200 jenis	Rp	11.400.000	Rp	11.970.000	
2 05 2.05.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor	135 jenis	Rp	40.000.000	Rp	42.000.000	
2 05 2.05.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	7 media	Rp	20.000.000	Rp	21.000.000	
2 05 2.05.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan makan minum rapat	675 orang	Rp	30.000.000	Rp	31.500.000	
2 05 2.05.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	65 kali	Rp	250.000.000	Rp	262.500.000	
2 05 2.05.01 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40 kali	Rp	25.000.000	Rp	26.250.000	
2 05 2.05.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				170.750.000		179.287.500	
2 05 2.05.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		Rp	35.000.000	Rp	36.750.000	
2 05 2.05.01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		Rp	20.000.000	Rp	21.000.000	
2 05 2.05.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase luas gedung kantor yang direhab/dipelihara	1 unit	Rp	35.000.000	Rp	36.750.000	
2 05 2.05.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	11 unit	Rp	70.000.000	Rp	73.500.000	
2 05 2.05.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang berfungsi baik		Rp	10.750.000	Rp	11.287.500	
2 05 2.05.01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
2 05 2.05.01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas	57 orang	Rp	-	Rp	-	
2 05 2.05.01 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai yang memakai pakaian khusus	57 orang	Rp	-	Rp	-	
2 05 2.05.01 03 06	Pengadaan pakaian olah raga	Jumlah pegawai yang memakai seragam olah raga	350 orang	Rp	-	Rp	-	
2 05 2.05.01 04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				30.000.000		31.500.000	
2 05 2.05.01 04 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan		Rp	30.000.000	Rp	31.500.000	
2 05 2.05.01 04 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan	10 orang	Rp	-	Rp	-	
2 05 2.05.01 04 04	Konsultasi dan studi banding	Jumlah konsultasi dan studi banding		Rp	-	Rp	-	
2 05 2.05.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				182.500.000		191.625.000	
2 05 2.05.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja Triwulan SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	4 Dokumen	Rp	50.000.000	Rp	52.500.000	
2 05 2.05.01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semester	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Dokumen	Rp	25.000.000	Rp	26.250.000	
2 05 2.05.01 06 04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Rp	25.000.000	Rp	26.250.000	
2 05 2.05.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/DPA/DPPA Satuan Kerja	3 Dokumen	Rp	45.000.000	Rp	47.250.000	
2 05 2.05.01 06 06	Penyusunan Lakip,LJP dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Dokumen	Rp	37.500.000	Rp	39.375.000	
2 05 2.05.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				8.003.600.000		4.157.280.000	DLH
2 05 2.05.01 15 01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah		4 Perwali	Rp	50.000.000		52.500.000	Program lanjutan/turunan PERDA Persampahan 2017
2 05 2.05.01 15 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1 Paket	Rp	4.383.600.000		356.280.000	Pembangunan/Pengembangan sarana persampahan tingkat Kelurahan/Kecamatan
2 05 2.05.01 15 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah sarana dan prasarana, Operasional armada pengelolaan persampahan	30 Unit	Rp	2.660.000.000		2.793.000.000	DLH
2 05 2.05.01 15 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Kader Pengelola Sampah Kelurahan dan sarana pengelola sampah kelurahan	100 Org	Rp	800.000.000		840.000.000	DLH
2 05 2.05.01 15 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen/laporan yang disusun dan disahkan	10 dokumen	Rp	50.000.000		52.500.000	DLH
2 05 2.05.01 15 13	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat	200 Org	Rp	60.000.000		63.000.000	DLH
2 05 2.05.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPTD PERSAMPAHAN				1.400.000.000		1.470.000.000	Program Sedang Berjalan
2 05 2.05.01	Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana UPTD Persampahan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan		Rp	1.400.000.000		1.470.000.000	DLH

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT							
					Tolak Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 05 2.05.01 16				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Sosialisasi dan Koordinasi Pengelolaan DAS dan penyusunan instrumen Pencegahan pencemaran dan kerusakan LH	4 komunitas pecinta lingkungan dan pembersihan wil sungai 3 Km.	430.000.000	451.500.000		Dikbud Kota Bima		
2 05 2.05.01 16 01				Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Pencapaian skor adipura	Nilai 70	Rp 300.000.000	315.000.000		KASI. PEMANTAUAN LINGKUNGAN		
2 05 2.05.01 16 03				Pemantauan kualitas lingkungan		2 dok	Rp -	-		KASI. PEMANTAUAN LINGKUNGAN		
2 05 2.05.01 16 04				Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan izin Lingkungan Hidup	40%	Rp -	-		KASI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN		
2 05 2.05.01 16 06				Pemantauan Kualitas pengelolaan Limbah B3	Terbina dan terawasnya usaha atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3	1 Dok	Rp 50.000.000	52.500.000		DLH		
2 05 2.05.01 16 10				Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	Sosialisasi dan Pemeliharaan kebersihan sungai untuk pemulihan fungsi sungai.	2 keL. Pemerhati sungai dan pembersihan sungai 3 km	Rp 40.000.000	42.000.000		KASI PEMELIHARAAN LH		
2 05 2.05.01 16 12				Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Terlaksananya sosialisasi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan tersunnya Dokumen RPPLHD Kota Bima tahun 2018	1 kali keg. FGD dan 15 exemplar dokumen	Rp 40.000.000	42.000.000		KASI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS		
2 05 2.05.01 16 13				Koordinasi penyusunan AMDAL	Terseleenggaranya pelayanan penberitan rekomendasi lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran publik untuk pengurusan rekomendasi lingkungan.	1 kd Keg. Penyadaran publik dan peningkatan pelayanan penberitan rekomendasi izin lingkungan.	Rp -	-		KASI KAJIAN DAMPAK LH		
2 05 2.05.01 17				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Terwujudnya upaya perlindungan dan konservasi SDA	Kota Bima	210.000.000	220.500.000		KABID. TATA LINGKUNGAN		
2 05 2.05.01 17 01				Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Terlaksananya program green city dan peningkatan pengendalian kerusakan sumber-sumber air.	4 Lokasi	Rp 160.000.000	168.000.000		KASI PEMELIHARAAN LH		
2 05 2.05.01 17 14				Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Sumber daya air	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan Kel. Pemelihara sumber Mata air untuk perlindungan dan konservasi sumber daya air.	5 keL. Dengan luas areal sekitar 25 Ha.	Rp 50.000.000	52.500.000		KASI PEMELIHARAAN LH		
2 05 2.05.01 17				Peningkatan dalam perlindungan dan konservasi Hutan Mangrove dan terumbu karang di Kota Bima	Terlaksananya perluasan tutupan mangrove dan transpalatasi terumbu karang di Kota Bima.	4 Lokasi, luas Mangrove 4 Ha	Rp -	-		KASI PEMELIHARAAN LH		
2 05 2.05.01 19				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Pendataan dan penyusunan dokumen informasi SDA dan LH	Kota Bima	210.000.000	220.500.000				
2 05 2.05.01 19 01				Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah sekolah binaan Program Adiwiyata	6 sekolah	Rp 30.000.000	31.500.000		KASI PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH		
2 05 2.05.01 19 02				Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah data dan informasi lingkungan	1 Dok	Rp 30.000.000	31.500.000		KASI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS		
2 05 2.05.01 19				Penyusunan Neraca Sumber daya alam dan LH	Jumlah data dan informasi lingkungan	1 Dok	Rp -	-		KASI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS		
2 05 2.05.01 19				Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018	Jumlah data dan informasi lingkungan	1 Dok	Rp 150.000.000	157.500.000		KASI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS		
2 05 2.05.01 19				Penyusunan IKLHD Kota Bima Tahun 2018	Jumlah data dan informasi lingkungan	1 Dok	Rp -	-		KASI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS		
2 05 2.05.01 19				Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PDB dan PDRB Hijau, mekanisme insentif/disinsentif, pendanaan LH) Kota Bima Tahun 2018	Konsultasi Publik, dan penyusunan dokumen.	1 kgt FGD, dan 1 dok.	Rp -	-		KASI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS		
2 05 2.05.01 25				PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN			625.000.000	656.250.000	Program Sedang Berjalan	KABID. PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN		
2 05 2.05.01 25 06				Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah areal pemakaman terbangun	20 Lokasi	Rp 600.000.000	630.000.000		KASI. PELAYANAN PEMAKAMAN		
2 05 2.05.01 25 7				Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah areal pemakaman terpelihara	20 Lokasi	Rp 25.000.000	26.250.000		KASI. PENGEMBANGAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN		
2 05 2.05.01 27				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN			1.200.000.000	1.260.000.000	Program Sedang Berjalan	KABID. PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN		
2 05 2.05.01 27 01				Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan	Jumlah taman yang terpelihara	5 lokasi	Rp 1.200.000.000	1.260.000.000		KASI. PEMELIHARAAN OPERASIONAL PERTAMANAN		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
		Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 05 2.05.01 27 03	Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan	Jumlah taman yang terpelihara	5 lokasi	Rp	-	-	KASI. PENGEMBANGAN PERTAMAMAN DAN PEMAKAMAN
2 06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				4.323.949.150	3.880.146.608	
2 06 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.323.949.150	3.880.146.608	DINAS KEPENDUDUKAN
2 06 2.06.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				691.000.000	725.550.000	
2 06 2.06.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun Materi yang tersedia selama 1 tahun	150 lembar 850 lembar		3.600.000	3.780.000	Lama
2 06 2.06.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa pengiriman/paket	20 paket		96.000.000	100.800.000	Lama
2 06 2.06.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan		18.400.000	19.320.000	Lama
2 06 2.06.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kendaraan Dinas yang layak	5 unit		48.000.000	50.400.000	Lama
2 06 2.06.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	4 Org 12 Bln		65.000.000	68.250.000	Lama
2 06 2.06.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan ruang kantor yang bersih	33 jenis		8.000.000	8.400.000	Lama
2 06 2.06.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	58.000 Lbr 70 Dok		150.000.000	157.500.000	Lama
2 06 2.06.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah perlengkapan kantor	71 Unit		12.000.000	12.600.000	Lama
2 06 2.06.01 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kerjasama dengan media	6 media		10.000.000	10.500.000	Lama
2 06 2.06.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor	15 jenis		30.000.000	31.500.000	Lama
2 06 2.06.01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	12 Bulan		200.000.000	210.000.000	Lama
2 06 2.06.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan		50.000.000	52.500.000	Lama
2 06 2.06.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.140.949.150	1.124.496.608	
2 06 2.06.01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Mobil Perekaman KTP Keliling	1 unit		950.000.000,00	997.500.000	Baru
2 06 2.06.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket		60.949.150	63.996.608	Baru
2 06 2.06.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	5 unit		35.000.000	36.750.000	Lama
2 06 2.06.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	5 jenis		25.000.000	26.250.000	Lama
2 06 2.06.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				35.000.000	36.750.000	
2 06 2.06.01 03 02	Pengadaan pakaian Dinas dan perlengkapannya	Jumlah pegawai yang memakai seragam lengkap	75 stel		35.000.000	36.750.000	Baru
2 06 2.06.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				100.000.000	105.000.000	
2 06 2.06.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	1 Dokumen		10.000.000	10.500.000	Lama
2 06 2.06.01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semester	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	2 Dokumen		20.000.000	21.000.000	Lama
2 06 2.06.01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen		10.000.000	10.500.000	Lama
2 06 2.06.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Jenis Dokumen		40.000.000	42.000.000	Lama
2 06 2.06.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Jenis Dokumen		20.000.000	21.000.000	Lama
2 06 2.06.01 15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				2.357.000.000	1.888.350.000	
2 06 2.06.01 15 02	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah Pembinaan tenaga operator pengelola SIAK	50 orang		93.000.000	97.650.000	Lama
2 06 2.06.01 15 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah capaian pelayanan publik dalam bidang kependudukan	KTP = 6.000 keping dan KK = 6.000 lembar		400.000.000	420.000.000	
2 06 2.06.01 15 13	monitiring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 kali di 5 Kecamatan		40.000.000	42.000.000	Lama
2 06 2.06.01 15 14	Peningkatan capaian Pelayanan publik di bidang pencatatan sipil	Jumlah capaian pelayanan publik dibidang pencatatan sipil	Akta Kelahiran : 2.000 Lembar, Akta Kematian : 200 lembar, Akte Perubahan Nama : 20 Lembar dan Akta Pernikahan : 10 lembar		290.000.000	304.500.000	Lama
2 06 2.06.01 15 16	Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil	2 kali, 150 orang		50.000.000	52.500.000	Lama
2 06 2.06.01 15 17	Profil kependudukan	Jumlah dokumen Profil kependudukan	50 eksemplar		40.000.000	42.000.000	Lama
2 06 2.06.01 15 18	Pemuktahiran data kependudukan	Jumlah Pemuktahiran data kependudukan	1.000 lembar		95.000.000	75.000.000	Lama
2 06 2.06.01 15 20	Penyediaan informasi yang dapat di akses masyarakat	Jumlah Penyediaan informasi yang dapat di akses masyarakat	1 tahun		-	-	Lama
2 06 2.06.01 15 21	Pemuktahiran data pencatatan sipil non SIAK	Jumlah Pemuktahiran data pencatatan sipil non SIAK	5.500 lembar		45.000.000	47.250.000	Lama
2 06 2.06.01 15 26	Penyusunan Buku Agregat	Tersedianya buku agregat	50 buku		50.000.000	52.500.000	Lama
2 06 2.06.01 15 32	Pelayanan pengaduan	Tersedianya kotak pelayanan pengaduan masyarakat	1 tahun		27.000.000	28.350.000	Lama

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						(10)	(11)	(12)	(13)
					Tolak Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 06 2.06.01 15 36	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Pelayanan Keliling pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	6 bin (KTP 2.000 keping, Akta Kelahiran 1.000 lembar)	315.000.000	330.750.000	Lama								
2 06 2.06.01 15 37	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Tersedianya blangko KTP, KK, Akte	KK 15.000 lembar, Akte Kelahiran = 15.000 lembar	350.000.000	367.500.000	Lama								
2 06 2.06.01 15 38	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terpeliharanya peralatan dan mesin SIAG	1 tahun	27.000.000	28.350.000	Lama								
2 06 2.06.01 15 39	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi	1 tahun	140.000.000	147.000.000	Lama								
2 06 2.06.01 15 40	Penerbitan kartu identitas anak	Jumlah Penerbitan kartu identitas anak	1.000 keping	300.000.000	315.000.000	Lama								
2 06 2.06.01 15 41	Pemuktahiran Data Akte Perkawinan/Nikah	Dokumen Pemuktahiran Data Akte Perkawinan/Nikah	1 dok	45.000.000	47.250.000	Lama								
2 06 2.06.01 15 42	Pendaftaran Penduduk Rentan	Dokumen Jumlah Penduduk Rentan	1 dok	50.000.000	52.500.000	Lama								
2 08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				8.197.880.000	8.607.774.000								
2 08 2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				8.197.880.000	8.607.774.000								
2 08 2.08.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			859.050.000	902.002.500									
2 08 2.08.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	12 bulan	70.250.000	73.762.500									
2 08 2.08.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai.	12 bulan	80.000.000	84.000.000									
2 08 2.08.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik (Roda Empa : 6 dan Roda Dua : 52 unit)	58 unit	40.000.000	42.000.000									
2 08 2.08.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai	12 bulan	80.000.000	84.000.000									
2 08 2.08.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan tempat kerja yang bersih dan nyaman	12 bulan	30.000.000	31.500.000									
2 08 2.08.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	45.000.000	47.250.000									
2 08 2.08.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	12 bulan	40.000.000	42.000.000									
2 08 2.08.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	12 bulan	5.000.000	5.250.000									
2 08 2.08.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai.	12 bulan	36.000.000	37.800.000									
2 08 2.08.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	12 bulan	4.800.000	5.040.000									
2 08 2.08.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	12 bulan	40.000.000	42.000.000									
2 08 2.08.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 bulan	343.000.000	360.150.000									
2 08 2.08.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 bulan	45.000.000	47.250.000									
2 08 2.08.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.413.885.000	1.484.579.250									
2 08 2.08.01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas	Tersedianya kendaraan dinas mobil penerangan yg representatif	1 unit	800.000.000	840.000.000									
2 08 2.08.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-Pengadaan notebook	5 unit	79.825.000	83.816.250									
		- Pagar dan papan nama kantor UPT KB kec. Rasanae Timur	1 paket	136.000.000										
2 08 2.08.01 02 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan mebeleur	9 unit	26.000.000	27.300.000									
2 08 2.08.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	1 tahun	19.900.000	20.895.000									
2 08 2.08.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang memadai.	1 tahun	277.610.000	291.490.500									
2 08 2.08.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	20.000.000	21.000.000									
2 08 2.08.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	1 tahun	34.550.000	36.277.500									
2 08 2.08.01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat/ rumah gedung kantor	Tersedianya ruangan gedung kantor DPP-KB	100%	20.000.000	21.000.000									
2 08 2.08.01 04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			198.827.000	208.768.350									
2 08 2.08.01 04 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terperuhnya kebutuhan pakaian dinas harian	48 stel	65.395.000	68.664.750									
		Terperuhnya pakaian kerja kader	258 stel	133.432.000	140.103.600									
2 08 2.08.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DATA APARATUR			185.000.000	194.250.000									
2 08 2.08.01 05 05	Pelaksanaan penilaian AKJG	Jumlah penilaian AKJG	2 semester	35.000.000	36.750.000									
2 08 2.08.01 05 06	Pendidikan dan pelatihan penyuluh KB	Tersedianya aparatur penyuluh KB yg intergritas	27 orang	150.000.000	157.500.000									
2 08 2.08.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			106.800.000	112.140.000									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						(10)	(11)	(12)	(13)
					Tolak Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 08 2.08.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan akuntabilitas dan kinerja SKPD	11 Kelompok	10.000.000	10.500.000								
2 08 2.08.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersusun	2 dok	10.000.000	10.500.000								
2 08 2.08.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Dokemen	15.000.000	15.750.000								
2 08 2.08.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	5 Dokumen	48.800.000	51.240.000								
2 08 2.08.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD		jumlah dokumen LPJ dan LPPD SKPD (Revisi RENJA dan RENSTRA) yang tersusun	3 Dokumen	23.000.000	24.150.000								
2 08 2.08.01 15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA				743.440.000	780.612.000								
2 08 2.08.01 15 01	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin		jumlah akseptor kb yang dilayani	6 Kegiatan	307.500.000	322.875.000								
2 08 2.08.01 15 02	Pelayanan KIE		jumlah PPKS dan MKJP,PROMKES,Kljk KB pria dan Motivator KB	5 Kegiatan	100.000.000	105.000.000								
2 08 2.08.01 15 03	Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu		Kelancaran komunikasi masyarakat ttg kespro		63.800.000	66.990.000								
2 08 2.08.01 15 04	Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, Anak (KHIBA)		Meningkatnya pengetahuan ibu tentang pentingnya 1.000 hari fase kehidupan		50.000.000	52.500.000								
2 08 2.08.01 15 05	Pembinaan Keluarga Berencana		Terbinanya sejumlah mitra kerja, kelompok KB dan akseptor	13 Kegiatan	137.140.000	143.997.000								
2 08 2.08.01 15 07	Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana		Terlaksananya kegiatan Rakerda tahun 2018	1 Kegiatan	85.000.000	89.250.000								
2 08 2.08.01 16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA				345.000.000	362.250.000								
2 08 2.08.01 16 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)		Terlaksananya pertemuan sosialisasi pembinaan PIK RR dan remaja	1 Kegiatan	35.000.000	36.750.000								
2 08 2.08.01 16 02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat		Jumlah kegiatan dukungan dan partisipasi masyarakat	1 Kegiatan	270.000.000	283.500.000								
2 08 2.08.01 16 03	Pengelolaan Bina Keluarga Remaja		Terbentuknya sejumlah kelompok Bina Keluarga Remaja pada kelurahan	10 kelompok	20.000.000	21.000.000								
2 08 2.08.01 16 04	Satuan Karya Keluarga Berencana (Saka Kencana)		Terbentuknya kecakapan pengetahuan sikap dan perilaku para anggota pramuka dan KKBPK	1 kelompok	20.000.000	21.000.000								
2 08 2.08.01 17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI				3.496.408.000	3.671.228.400								
2 08 2.08.01 17 01	Pelayanan konseling KB		Terlaksananya kegiatan konseling pra pemasangan dan pasca pemasangan	4 Kegiatan	2.777.000.000	2.915.850.000								
2 08 2.08.01 17 03	Pengadaan alat kontrasepsi		jumlah sarana dan prasarana klinik pelayanan KB	25 unit, 3 paket	719.408.000	755.378.400								
2 08 2.08.01 18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI				659.682.500	692.666.625								
2 08 2.08.01 18 01	Facilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB		jumlah masyarakat peduli KB (PPKBD dan Sub PPKBD)	50 Orang	264.432.000	277.653.600								
2 08 2.08.01 18 02	Orientasi Kader Pendataan Keluarga		Jumlah kader (PPKBD dan sub PPKBD) terlatih	3 Kegiatan	47.407.500	49.777.875								
2 08 2.08.01 18 03	Operasional Kader pendataan keluarga		dokumen pendataan	220 Orang	260.000.000	273.000.000								
2 08 2.08.01 18 04	Monitoring kegiatan pendataan keluarga		Jumlah 'Laporan monitoring	3 Kegiatan										
2 08 2.08.01 18 05	Koordinasi Pengelolaan Program		laporan pelaksanaan koordinasi	3 Kegiatan	87.843.000	92.235.150								
2 08 2.08.01 20	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR				40.112.500	42.118.125								
2 08 2.08.01 20 01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR		jumlah forum pusat informasi konseling remaja dan forum pelayanan KRRbagi kljk sebaya	15 Kelompok	25.872.500	27.166.125								
2 08 2.08.01 20 02	Facilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah		jumlah kelompok PIK-RR dan PIK Mahasiswa	15 Kelompok	14.240.000	14.952.000								
2 08 2.08.01 21	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS				31.445.000	33.017.250								
2 08 2.08.01 21 01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah		Jumlah penyuluhan bahaya narkoba,PMS, HIV/AIDS di sekolah	2 Kegiatan	31.445.000	33.017.250								
2 08 2.08.01 22	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK				46.780.000	49.119.000								
2 08 2.08.01 22 01	Pengumpulanbahasan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		Jumlah kelompok yang mengikuti pemilihan	30 kelompok	46.780.000	49.119.000								
2 08 2.08.01 23	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA				36.450.000	38.272.500								
2 08 2.08.01 23 01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan		jumlah kader kelompok kegiatan, BKB,UPPKS,BKR dan BKL	5 Kegiatan	36.450.000	38.272.500								
2 08 2.08.01 24	PROGRAM KETAHANAN DAN Penguatan KELEMBAGAAN KELUARGA				35.000.000	36.750.000								
2 08 2.08.01 23 01	Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)		Meningkatnya kesejahteraan anggota kelompok	10 kelompok	35.000.000	36.750.000								
2 09	PERHUBUNGAN				4.415.834.000	4.419.905.700								
2 09 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN				4.415.834.000	4.419.905.700								

KODE REKENING				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 09 2.09.01 01				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			640.910.000	672.955.500		
2 09 2.09.01 01 01				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan dalam hal surat menyurat	1 Pelayanan	45.000.000	47.250.000		
2 09 2.09.01 01 02				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan dalam hal komunikasi, air dan listrik	1 Pelayanan	68.160.000	71.568.000		
2 09 2.09.01 01 06				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan perijinan kendaraan dinas	1 Pelayanan	26.950.000	28.297.500		
2 09 2.09.01 01 07				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan dalam hal administrasi keuangan	1 Pelayanan	37.800.000	39.690.000		
2 09 2.09.01 01 9				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya pelayanan dalam hal kebersihan kantor	1 Pelayanan	22.500.000	23.625.000		
2 09 2.09.01 01 10				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya peralatan alat tulis kantor	1 Pelayanan	45.000.000	47.250.000		
2 09 2.09.01 01 11				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya jasa percetakan dan penggandaan dokumen	1 Pelayanan	45.000.000	47.250.000		
2 09 2.09.01 01 12				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			3.000.000	3.150.000		
2 09 2.09.01 01 13				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Pelayanan	7.500.000	7.875.000		
2 09 2.09.01 01 17				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya biaya makan dan minum tamu	1 Pelayanan	15.000.000	15.750.000		
2 09 2.09.01 01 18				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya rapat dan koordinasi luar daerah	1 Pelayanan	300.000.000	315.000.000		
2 09 2.09.01 01 19				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam daerah	1 Pelayanan	25.000.000	26.250.000		
2 09 2.09.01 02				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			245.000.000	257.250.000		
2 09 2.09.01 02 22				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase Kondisi Gedung Kantor dalam Kondisi baik	100%	125.000.000	131.250.000		
2 09 2.09.01 02 24				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik	100%	120.000.000	126.000.000		
2 09 2.09.01 06				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			108.350.000	113.767.500		
2 09 2.09.01 06 01				Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Terusunnya Informasi dan dokumentasi (PPID) dan aset	8 bulan	14.750.000	15.487.500		
2 09 2.09.01 06 02				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Sebagai pengontrol dan bahan evaluasi penggunaan anggaran setiap semester	2 Dokumen	15.750.000	16.537.500		
2 09 2.09.01 06 04				Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dalam setahun	1 Dokumen	15.750.000	16.537.500		
2 09 2.09.01 06 05				Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA, DPA, DPPA SKPD	Tersedianya rancangan kegiatan SKPD untuk tahun yang berikutnya	4 Dokumen	35.750.000	37.537.500		
2 09 2.09.01 06 06				Penyusunan Lakip,LPJ dan LPPD	Tersedianya laporan pertanggung jawaban baik dari segi kegiatan maupun anggaran dalam setahun	3 Dokumen	26.350.000	27.667.500		
2 09 2.09.01 15				PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN			165.300.000	173.565.000		
2 09 2.09.01 15 02				Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Tersedianya Perwali SOP bidang perhubungan	3 Perwali	60.000.000	63.000.000		
2 09 2.09.01 15 03				Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Rapat Rutin dalam rangka pembangunan fasilitas perhubungan	4 Kali	45.300.000	47.565.000		
2 09 2.09.01 15 04				Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan bidang perhubungan	5 Kali	60.000.000	63.000.000		
2 09 2.09.01 15 08				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kegiatan	4 Kali	25.500.000	26.775.000		
2 09 2.09.01 16				PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ			815.400.000	856.170.000		
2 09 2.09.01 16 04				Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah Terminal dalam Kondisi baik	3 Terminal	815.400.000	856.170.000		
2 09 2.09.01 17				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN			971.800.000	1.020.390.000		
2 09 2.09.01 17 01				Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah sopir/juru mudi yang disiplin	25 Orang	50.000.000	52.500.000		
2 09 2.09.01 17 02				Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Tersedianya alat visual sosialisasi disiplin lalu lintas (videotron)	2 unit	300.000.000	315.000.000		
2 09 2.09.01 17 04				Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah Kendaraan yang diuji	25 Unit	17.750.000	18.637.500		
2 09 2.09.01 17 05				Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah Razia Angkutan Umum	4 Kali	250.000.000	262.500.000		
2 09 2.09.01 17 11				Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan			20.050.000	21.052.500		
2 09 2.09.01 17 12				Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Prosentase Peningkatan Pelayanan jasa Angkutan	85%	27.000.000	28.350.000		
2 09 2.09.01 17 21				Survei Sarana dan Prasarana Angkutan Laut	Laporan Hasil Survei	1 Dokumen	57.000.000	59.850.000		
2 09 2.09.01 17 25				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Parkir	Jumlah Titik Parkir yang dikelola secaraOptimal	10 titik/kawasan	250.000.000	262.500.000		
2 09 2.09.01 19				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS			1.080.574.000	1.134.602.700		
2 09 2.09.01 19 01				Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	tersedianya rambu lalu lintas pada area rawan laka lintas	250Unit	250.000.000	262.500.000		
2 09 2.09.01 19 02				Pengadaan marka jalan	tersedianya marka jalan pada jalan kota	10 km	350.000.000	367.500.000		
2 09 2.09.01 19 03				Pengadaan pagar pengaman jalan	tersedianya pagar pengaman jalan pada area rawan laka lintas	900 meter	450.000.000	472.500.000		
2 09 2.09.01 19 04				Pengawasan Rutin dan Operasi Lalu Lintas	Jumlah Operasi Penertiban	4 kali	350.000.000	367.500.000		
2 09 2.09.01 19 05				Penertiban dan pemeriksaan lalu lintas	Jumlah Operasi Penertiban	4 kali	25.125.000	26.381.250		
2 09 2.09.01 19 08				Revitalisasi Traffic Light	Jumlah Titik Traffic Light dalam Kondisi Baik	4 Titik	705.449.000	740.721.450		

KODE REKENING				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 09	2.09.01	20		PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN			104.650.000	109.882.500		
2 09	2.09.01	20	03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan Angkutan dalam kondisi Laik jalan	100 Unit	104.650.000	109.882.500		
2 09	2.09.01	21		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA TERMINAL			206.400.000	216.720.000		
2 09	2.09.01	21	01	Pengaturan dan Penarikan Retribusi Terminal			206.400.000	216.720.000		
2 09	2.09.01	26		PROGRAM PERHUBUNGAN LAUT			77.450.000	81.322.500		
2 09	2.09.01	26	01	Peningkatan dan Pengembangan Angkutan Laut	Jumlah Lokasi Pelabuhan Rakyat yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	77.450.000	81.322.500		
2 10				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5.050.000.000	5.189.100.000		
2 10	2.10.01			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5.050.000.000	5.189.100.000		
2 10	2.10.01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			906.530.000	951.856.500		
2 10	2.10.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan dalam hal surat menyurat	1 Pelayanan	50.000.000	52.500.000		
2 10	2.10.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan dalam hal komunikasi, air dan listrik	1 Pelayanan	250.000.000	262.500.000		
2 10	2.10.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan perizinan kendaraan dinas	1 Pelayanan	15.000.000	15.750.000		
2 10	2.10.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan dalam hal administrasi keuangan	1 Pelayanan	49.800.000	52.290.000		
2 10	2.10.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya peralatan alat tulis kantor	1 Pelayanan	30.000.000	31.500.000		
2 10	2.10.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya jasa percetakan dan penggandaan dokumen	1 Pelayanan	83.730.000	87.916.500		
2 10	2.10.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya biaya makan dan minum tamu	1 Pelayanan	18.000.000	18.900.000		
2 10	2.10.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya rapat dan koordinasi luar daerah	1 Pelayanan	400.000.000	420.000.000		
2 10	2.10.01	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam daerah	1 Pelayanan	10.000.000	10.500.000		
2 10	2.10.01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			169.536.000	64.612.800		
2 10	2.10.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	100%	35.000.000	36.750.000		
2 10	2.10.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	100%	73.000.000	76.650.000		
2 10	2.10.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik	100%	61.536.000	64.612.800		
2 10	2.10.01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			106.934.000	112.280.700		
2 10	2.10.01	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Sebagai pengontrol dan bahan evaluasi penggunaan anggaran setiap semester	2 Dokumen	20.000.000	21.000.000		
2 10	2.10.01	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dalam setahun	1 Dokumen	20.000.000	21.000.000		
2 10	2.10.01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA, DPA, DPPA SKPD	Tersedianya rancangan kegiatan SKPD untuk tahun yang berikutnya	4 Dokumen	44.500.000	46.725.000		
2 10	2.10.01	06	06	Penyusunan Lakip,LPJ dan LPPD	Tersedianya laporan pertanggung jawaban baik dari segi kegiatan maupun anggaran dalam setahun	3 Dokumen	22.434.000	23.555.700		
2 10	2.10.01	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			25.000.000	26.250.000		
2 10	2.10.01	15	03	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah SDM yang Memiliki Kompetensi IT	5 Orang	25.000.000	26.250.000		Dishubkominfo
2 10	2.10.01	15		Pengkajian dan pengembangan sistem informasi			43.200.000	45.360.000		
2 10	2.10.01	17		PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI			112.000.000	117.600.000		
2 10	2.10.01	17	01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi			112.000.000	117.600.000		
2 10	2.10.01	18		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA			393.500.000	413.175.000		
2 10	2.10.01	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersedianya Pelayanan PPID	12 kali	393.500.000	413.175.000		Dishubkominfo
2 10	2.10.01	20		PROGRAM PENGADAAN PERANGKAT APLIKASI DAN TELEMATIKA			3.000.000.000	3.150.000.000		
2 10	2.10.01	20	01	Pengembangan/Pembenahan Aplikasi Website	tersedianya aplikasi berbasis website untuk seluruh SKPD		500.000.000	525.000.000		
2 10	2.10.01	20	02	Pengembangan Fasilitas dan Prasarana Media Centre	tersedianya command center daerah	1 unit	2.500.000.000	2.625.000.000		
2 10	2.10.01	28		PROGRAM Penguatan Kelembagaan DALAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH			51.600.000	54.180.000		
2 10	2.10.01	28	05	Penguatan Kelembagaan Pengelola Informasi Publik			51.600.000	54.180.000		
2 10	2.10.01	29		PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			34.900.000	36.645.000		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2 10 2.10.01 29 03	Pengolahan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah						34.900.000	36.645.000		
2 10 2.10.01 30	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA POSTEL						250.000.000	262.500.000		
2 10 2.10.01 30 01	Monitoring Menara Telekomunikasi						250.000.000	262.500.000		
2 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						2.933.616.850	3.226.978.535		
2 11 2.11.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						2.933.616.850	3.226.978.535		
2 11 2.11.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.346.035.460	1.480.639.006		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 11 2.11.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat				Terselenggaranya jasa surat menyurat kantor Perindag tenaga kebersihan UPT tenun kemanan UPT tenun tenaga administrasi non PNS UPT PLUT tenaga kebersihan UPT PLUJ tenaga administrasi non PNS UPT PLUT tenaga kemanan UPT PLUT pegawai honor pasar se-kota bima materi yang Rp.6.000 materi yang Rp.3.000 paket pengiriman surat, laporan dan data	3 orang (12 bulan) 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang 26 org 400 lembar 400 lembar 180 bidang/kl/ bln	390.401.000	429.441.100	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik internet (kantor+plut+ tenun+upt pasar)	3 orang (12 bulan)	147.268.000	161.994.800	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	5 unit kendaraan	2.403.500	2.643.850	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tersedianya jasa administrasi keuangan: bendahara pengeluaran bendahara pembantu pengeluaran bendahara penerimaan bendahara barang bendahara daftar gaji	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	107.140.000	117.854.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Tersedianya jasa kebersihan kantor peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3 orang (12 bulan) 24 jenis	39.692.400	43.661.640	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor				Tersedianya alat tulis kantor	60 jenis	47.545.740	52.300.314	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan:		184.910.000	203.401.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor:	1 paket	61.479.000	67.626.900	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 jenis	9.240.000	10.164.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman				Makan minum Tamu Makan Minum Rapat Makan Minum Harian umum	11 kali (11bulan) 11 kali (11bulan) 11 kali (11bulan)	41.905.820	46.096.402	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar	55 Perjalanan	280.500.000	308.550.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	75 Perjalanan	33.550.000	36.905.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						238.945.000	262.839.500		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 11 2.11.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dalam 5 tahun	5 unit	150.000.000	165.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jasa service, BBM, dan suku cadang	5 unit	43.945.000	48.339.500	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	12 bulan	30.000.000	33.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya peralatan gedung kantor	7 jenis Peralatan	15.000.000	16.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur						27.750.000	30.525.000		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 11 2.11.01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan	37 stel	27.750.000	30.525.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						0	0		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 11 2.11.01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal				Pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	0	0	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						212.575.000	233.832.500		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 11 2.11.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Laporan Keuangankeuangan semesteran	2 dokumen	14.520.000	15.972.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran				laporan prognosis realisasi anggaran	4 dokumen	16.280.000	17.908.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2 11 2.11.01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan	4 dokumen	24.035.000	26.438.500					
2 11 2.11.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satu Kerja Perangkat Daerah	Dokumen Rencana kerja tahunan, RKA/DPA, RKA-P/DPA-P	5 Dokumen	100.045.000	110.049.500	Kegiatan sedang berjalan				
2 11 2.11.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	57.695.000	63.464.500	Kegiatan sedang berjalan				
2 11 2.11.01 15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			194.987.560	214.486.316					
2 11 2.11.01 15 03	Facilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah KUMKM yang berbadan hukum	150 KUMKM	75.000.000	82.500.000	Kegiatan baru				
2 11 2.11.01 15 12	Operasional dan pengembangan UPT PLUIT	Meningkatnya pelayanan dan operasional PLUIT selama 12 bulan	100%	119.987.560	131.986.316	Kegiatan baru				
2 11 2.11.01 16	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			251.234.580	276.358.038					
2 11 2.11.01 16 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Baru	Meningkatnya pertumbuhan Wirausaha Baru	150 WUB	106.171.780	116.788.958	Kegiatan baru				
2 11 2.11.01 16 07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Terlaksananya diklat koperasi	25 koperasi	80.000.000	88.000.000	Kegiatan baru				
2 11 2.11.01 16 11	Penyelenggaraan bimbingan teknis bagi UMKM	Jumlah UMKM yang dibina	30 UMKM	65.062.800	71.569.080	Kegiatan baru				
2 11 2.11.01 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			338.637.770	372.501.547		DIKOPERINDAG			
2 11 2.11.01 17 05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya pemantauan pengelolaan penggunaan dana bergulir	85%	75.000.000	82.500.000	Kegiatan baru				
2 11 2.11.01 17 07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Jumlah UMKM yang dibina	25 UMKM	68.506.020	75.356.622	Kegiatan sedang berjalan	DIKOPERINDAG			
2 11 2.11.01 17 08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga dan UKM	Pembinaan industri rumah tangga dan UKM dan bantuan modal/peralatan (Rombong 30 unit, peralatan UMKM sandang 30)	754 UMKM	0	0		DIKOPERINDAG			
2 11 2.11.01 17 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Terselenggaranya pembinaan bagi UMKM dengan pelaksanaan promosi (Mataram & Jakarta)	10 UMKM	167.967.800	184.764.580	Kegiatan sedang berjalan	DIKOPERINDAG			
2 11 2.11.01 17 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (UMKM)	Jumlah UMKM yang memiliki laporan keuangan sesuai standar	1.125 UMKM	27.163.950	29.880.345	Kegiatan sedang berjalan	DIKOPERINDAG			
2 11 2.11.01 17 12	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Pelatihan Kewirausahaan dan pemberian bantuan peralatan WUB dan UMKM	150 UMKM	0	0	Kegiatan sedang berjalan	DIKOPERINDAG			
2 11 2.11.01 15 13	Operasionalisasi dan pengembangan UPT PLUIT	Operasionalisasi dan pengembangan UPT PLUIT	500 KUMKM	0	0	Kegiatan sedang berjalan	DIKOPERINDAG			
2 11 2.11.01 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			323.451.480	355.796.628		DIKOPERINDAG			
2 11 2.11.01 18 04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Meningkatnya pengetahuan tentang perkoperasian lewat cerdas cermat	85%	164.426.130	180.868.743	Kegiatan sedang berjalan	DIKOPERINDAG			
2 11 2.11.01 18 05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi aktif	110 Koperasi	111.400.850	122.540.935		DIKOPERINDAG			
2 11 2.11.01 18 10	Pendampingan bagi kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi yang ditangani	35 Koperasi	47.624.500	52.386.950	Kegiatan sedang berjalan	DIKOPERINDAG			
2 11 2.11.01 18 11	Facilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya fasilitasi perijinan UMK, PIRT/Perijinan Industri RT, akta notaris koperasi	10 Koperasi dan 150 UMKM	0	0		DIKOPERINDAG			
2 11 2.11.01 18 12	Penyelenggaraan bimbingan teknis bagi UMKM	Terselenggaranya pelatihan Pengelolaan Koperasi/KUD syariah	30 Koperasi	0	0	Kegiatan sedang berjalan	DIKOPERINDAG			
2 11 2.11.01 18 13	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi	Bertambahnya Koperasi aktif	101 Koperasi	0	0		DIKOPERINDAG			
2 11 2.11.01 18 04	Promosi produk kerajinan KUMKM	Terlaksananya keikutsertaan IKM Dalam Pameran NTB dan Jakarta Expo dan SEMESCO	2 Pameran (luar daerah)	0	0	Kegiatan sedang berjalan	DIKOPERINDAG			
2 11 01.3.04	SEKRETARIAT DAERAH			0	0					
2 11 01.3.04 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			0	0		Bag. Ekonomi SEKRETARIAT DAERAH			
2 11 01.3.04 17 04	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dokumen laporan hasil pemantauan	12 Dokumen	0	0	Kegiatan sedang berjalan				
2 12	PENANAMAN MODAL			3.185.433.450	3.503.976.795					
2 12 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			3.185.433.450	3.503.976.795					
2 12 2.12.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			734.552.000	808.007.200		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2 12 2.12.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	275 surat masuk dan keluar	56.000.000	61.600.000	Kegiatan sedang berjalan				
		Materai 6.000	900 Lbr/Tahun							
		Materai 3.000	500 Lbr/bln							
		Tanaga Operator Komputer (S1)	4 Org/bln							
		Tanaga Administrasi (SMA)	1 Org/bln							
2 12 2.12.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemanfaatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Jasa Pelayanan	46.000.000	50.600.000	Kegiatan sedang berjalan				
2 12 2.12.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	Jumlah pemanfaatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	4 Jasa Pelayanan	25.000.000	27.500.000	Kegiatan sedang berjalan				
2 12 2.12.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	79 Dokumen	73.000.000	80.300.000	Kegiatan sedang berjalan				
2 12 2.12.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor	100 Bahan/Alat	27.000.000	29.700.000	Kegiatan sedang berjalan				
2 12 2.12.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat Tulis Kantor	3500 Pak/buah/dus	45.000.000	49.500.000	Kegiatan sedang berjalan				
2 12 2.12.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	76238 buah/lambar/blok/eks	73.010.000	80.311.000	Kegiatan sedang berjalan				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						
					Tolak Ukur	Target					
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
2	12	2.12.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	10.500.000	11.550.000	Kegiatan sedang berjalan	
2	12	2.12.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Eks	12.700.000	13.970.000	Kegiatan sedang berjalan	
2	12	2.12.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tamu dan pegawai yang dilayani	134 orang	18.792.000	20.671.200	Kegiatan sedang berjalan	
2	12	2.12.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pejabat dan pegawai yang mengikuti rapat koordinasi luar daerah	19 Orang	270.750.000	297.825.000	Kegiatan sedang berjalan	
2	12	2.12.01	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dalam daerah	10 kali	76.800.000	84.480.000	Kegiatan sedang berjalan	
#	12	2.12.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			426.114.000	468.725.400		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
##	12	2.12.01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	4 unit	100.000.000	110.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
##	12	2.12.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	10 Unit	139.100.000	153.010.000	Kegiatan sedang berjalan	
##	12	2.12.01	02	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah perlengkapan kantor	25 Buah	75.000.000	82.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
##	12	2.12.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruangan gedung yang terpelihara	12 ruangan	35.000.000	38.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
##	12	2.12.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 kendaraan	62.514.000	68.765.400	Kegiatan sedang berjalan	
##	12	2.12.01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	6 unit	4.500.000	4.950.000	Kegiatan sedang berjalan	
##	12	2.12.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	30 Unit	10.000.000	11.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
##	12	2.12.01	02	42	Rehab sedang/berat gedung kantor	rehab pagar kantor yang terdampak banjir (kerusakan 90%) rehab sedang gedung kantor yang terdampak banjir dan Penataan taman garasi kantor	2 kegiatan	0	0		
#	12	2.12.01	03		Program peningkatan disiplin aparatur			12.250.000	13.475.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
##	12	2.12.01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian khusus hari-hari tertentu	35 Stel	0	0	Kegiatan sedang berjalan	
##	12	2.12.01	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian khusus hari-hari tertentu	35 Stel	12.250.000	13.475.000	Kegiatan baru	
##	12	2.12.01	03	06	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian Pakaian Olah Raga	35 Stel	0	0	Kegiatan sedang berjalan	
##	12	2.12.01	03	07	Penilaian disiplin dan kinerja pegawai	Jumlah pegawai yang dinilai tingkat kediplinannya	35 pegawai	0	0		
2	12	2.12.01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			85.000.000	93.500.000		DPMPTSP
2	12	2.12.01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	35 orang	85.000.000	93.500.000	DPMPTSP	
#	12	2.12.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			78.900.000	86.790.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
##	12	2.12.01	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen yang laporan keuangan semesteran tersusun tepat waktu	2 dokumen	9.000.000	9.900.000	Kegiatan sedang berjalan	
##	12	2.12.01	06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sesuai dengan SAP	1 dokumen	13.500.000	14.850.000	Kegiatan sedang berjalan	
##	12	2.12.01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	4 Dokumen	39.400.000	43.340.000	Kegiatan sedang berjalan	
##	12	2.12.01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen Akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah daerah	3 Dok	17.000.000	18.700.000	Kegiatan sedang berjalan	
2	12	2.12.01	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			478.000.000	525.800.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	12	2.12.01	15	06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah pelaksanaan koordinasi kerjasama dan Penanaman Modal Dalam Negeri (Perusahaan)	7 perusahaan	120.000.000	132.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2	12	2.12.01	15	08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah dokumen kerjasama DPMPTSP dengan Instansi terkait	3 dokumen				
2	12	2.12.01	15	12	Pengembangan sistem promosi dan kerjasama penanaman modal	Jumlah pelaksanaan pameran investasi	751 perusahaan	183.000.000	201.300.000	Kegiatan sedang berjalan	
2	12	2.12.01	15	12		Jumlah dokumen potensi investasi unggulan yang terpublikasi	1 kali luar kota 4 Dokumen	175.000.000	192.500.000	Kegiatan baru	
2	12	2.12.01	16		Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi			277.000.000	304.700.000		DPMPTSP
2	12	2.12.01	16	03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen cetak biru pengembangan penanaman modal	10 buku	97.000.000	106.700.000		
2	12	2.12.01	16	11	Penyusunan Kebijakan perijinan dan penanaman modal	Jumlah dokumen kebijakan /peraturan penanaman modal dan perijinan	2 dokumen	180.000.000	198.000.000		
2	12	2.12.01	51		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan			1.093.617.450	1.202.979.195		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						(10)	(11)	(12)	(13)
						Tolak Ukur	Target								
(1)	(2)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
2	12	2.12.01	51	02	Penyediaan Informasi/ Date Base Perizinan	jumlah data base perizinan yang dipublikasikan	1 dokumen	100.000.000	110.000.000	Kegiatan sedang berjalan					
2	12	2.12.01	51	03	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendaftaran Perizinan	Jumlah usaha perizinan yang dilakukan monitoring Evaluasi perizinannya	441 usaha perizinan	64.426.600	70.869.260	Kegiatan sedang berjalan					
						jumlah survey dan peninjauan lapangan kelayakan usaha dan non usaha	40 kali	110.443.300	121.487.630						
2	12	2.12.01	51	04	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	Rata-rata Lama Proses Pelayanan Perizinan usaha	1,25 Hari	220.000.000	242.000.000	Kegiatan sedang berjalan					
2	12	2.12.01	51	.06	Penyusunan pedoman peningkatan sistem dan prosedur pelayanan perizinan	Jumlah pedoman dan Prosedur Pelayanan Perizinan yang disahkan	8 Pedoman/ SOP/SP	66.247.550	72.872.305						
2	12	2.12.01	51	07	Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang tertangani	15 pengaduan	75.000.000	82.500.000						
2	12	2.12.01	51	08	Penyusunan indek kepuasan masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	2 kali	55.000.000	60.500.000						
						Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	1 Dokumen								
2	12	2.12.01	51	09	Sosialisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Jumlah peserta sosialisasi	500 pelaku usaha dan pemerintah (5 kecamatan)	114.000.000	125.400.000						
						Jumlah bahan informasi non elektronik pelayanan perizinan dan penanaman modal	2000 Buah Brosur, papan penunjuk arah PTSP 2 buah,	89.000.000	97.900.000						
						Jumlah media dan ChaneI aspirasi dimeia sosial (elektronik)	12 media,2 aplikasi								
2	12	2.12.01	51	10	Penyusunan Profil Perusahaan	Jumlah dokumen Profil DPMPSTP	1 Dokumen	60.000.000	66.000.000						
						Jumlah Profil perusahaan yang termuat dalam WEB	1 Dokumen								
2	12	2.12.01	51	11	Penyusunan Laporan Realisasi perizinan	Jumlah dokumen laporan realisasi perizinan	1 Dokumen	47.500.000	52.250.000						
2	12	2.12.01	51	12	Pendataan potensi Objek perizinan	Jumlah lokasi pendataan potensi objek perizinan	5 kecamatan	92.000.000	101.200.000						
2	13				URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			1.023.611.600	1.074.792.180						
2	13	1.06.01			DINAS PARIWISATA			1.023.611.600	1.074.792.180						
2	13	3.02.01	16		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN			Rp 720.253.600							
2	13	3.02.01	16	02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Meningkatnya pemahaman pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	75%	Rp 720.253.600							
2	13	3.02.01	20		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA			Rp 248.935.500							
2	13	3.02.01	20	03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Meningkatnya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	20 org	Rp 40.183.000							
2	13	3.02.01	20	06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Meningkatnya penyelenggaraan kompetisi olahraga	10 cabor	Rp 208.752.500							
2	13	3.02.01	21		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA			Rp 54.422.500							
2	13	3.02.01	21	03	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya kualitas, prestasi kepemudaan dan aktivitas keolahragaan	1 gedung	Rp 54.422.500							
2	14				URUSAN WAJIB STATISTIK DAERAH			2.822.285.000	2.963.399.250						
2	14	1.06.01			DINAS STATISTIK DAERAH			2.822.285.000	2.963.399.250						
2	14	2.14.01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			466.200.000	489.510.000						
2	14	2.14.01	AM	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat (Caraka/Petugas pengantar surat)	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	31.500.000	Rp 33.075.000						
2	14	2.14.01	1	2	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rekening)	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	30.450.000	Rp 31.972.500						
2	14	2.14.01	1	6	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Jasa servis,STNK dan BPKB)	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	15.750.000	Rp 16.537.500						
2	14	2.14.01	1	7	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan (Pengelola Administrasi keuangan)	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	60 OB	Rp 55.125.000						
2	14	2.14.01	1	9	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (jasa tukang)	Cakupan ruang kantor yang bersih	1 Tahun	Rp 22.050.000						
2	14	2.14.01	1	10	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	1 Tahun	Rp 49.612.500						
2	14	2.14.01	1	11	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	1 Tahun	Rp 33.075.000						
2	14	2.14.01	1	17	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan makan minum	1 Tahun	Rp 16.537.500						
2	14	2.14.01	1	18	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	Rp 220.500.000						

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						(10)	(11)	(12)	(13)
					Tolak Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
2 14 2:14:01 1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	Rp 10.500.000	Rp 11.025.000									
2 14 2:14:01 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			379.680.000	398.664.000									
2 14 2:14:01 2 5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Baru	4 Unit	Rp 85.575.000	Rp 89.853.750									
2 14 2:14:01 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun baru	12 Bulan	Rp 21.000.000	Rp 22.050.000									
2 14 2:14:01 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	Rp 64.575.000	Rp 67.803.750									
2 14 2:14:01 2 10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair	41 Unit	Rp 105.000.000	Rp 110.250.000									
2 14 2:14:01 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	1 Unit	Rp 52.500.000	Rp 55.125.000									
2 14 2:14:01 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	9 Unit	Rp 51.030.000	Rp 53.581.500									
2 14 2:14:01 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	51.250.000	41.250.000									
2 14 2:14:01 3 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Persentase pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	40 Steel	Rp 26.250.000	Rp -									
2 14 2:14:01 3 5	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Persentase pegawai yang memakai pakaian khusus hari-hari tertentu	40 Steel	Rp 25.000.000	Rp 26.250.000									
2 14 2:14:01 3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olahraga bagi pegawai	40 Steel	Rp -	Rp 15.000.000									
2 14 2:14:01 4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			Rp 141.330.000	148.396.500									
2 14 2:14:01 4 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang berkualitas dibidang Statistik Sektoral	1 Tahun	Rp 141.330.000	Rp 148.396.500									
2 14 2:14:01 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			247.800.000	260.190.000									
2 14 2:14:01 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	4 Dokumen	Rp 21.000.000	Rp 22.050.000									
2 14 2:14:01 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	2 Dokumen	Rp 21.000.000	Rp 22.050.000									
2 14 2:14:01 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	2 Dokumen	Rp 21.000.000	Rp 22.050.000									
2 14 2:14:01 6 4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Rp 21.000.000	Rp 22.050.000									
2 14 2:14:01 6 5	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dokumen	Rp 110.250.000	Rp 115.762.500									
2 14 2:14:01 6 6	Penyusunan LAKIP, LPI dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	2 Dokumen	Rp 53.550.000	Rp 56.227.500									
1 6 1:06:01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH			933.850.000	980.542.500									
2 14 2:14:01 15 10	Penyusunan data statistik kependudukan	Jumlah laporan kegiatan hasil pengelolaan data statistik sektoral kependudukan	1 Dokumen/10 Eks	Rp 52.100.000	54.705.000									
2 14 2:14:01 15 11	Penyusunan data statistik kesejahteraan sosial	Jumlah laporan kegiatan hasil pengelolaan data statistik sektoral kesejahteraan sosial	1 Dokumen/10 Eks	Rp 118.650.000	124.582.500									
2 14 2:14:01 15 12	Penyusunan data statistik ekonomi	Jumlah laporan kegiatan hasil pengelolaan data statistik sektoral ekonomi	1 Dokumen/10 Eks	Rp 78.750.000	82.687.500									
2 14 2:14:01 15 13	Penyusunan data statistik Infrastruktur	Jumlah laporan kegiatan hasil pengelolaan data statistik sektoral infrastruktur	1 Dokumen/10 Eks	Rp 68.250.000	71.662.500									
2 14 2:14:01 15 15	Penyusunan peta PBDT berbasis SIG	Jumlah Peta PBDT yang berbasis SIG	1 Peta	Rp 143.850.000	151.042.500									
2 14 2:14:01 15 17	Workshop statistik sektoral	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	50 Orang	Rp -	-									
2 14 2:14:01 15 18	Bimtek pengembangan data statistik sektoral	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	50 Orang	Rp -	-									
2 14 2:14:01 15 19	Pelatihan petugas lapangan kegiatan statistik sektoral	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan petugas lapangan	50 orang	Rp -	-									
2 14 2:14:01 15 20	Penyusunan Indeks Gini	tersedianya dokumen indeks gini	1 Dokumen/20 Eks	Rp 110.250.000	115.762.500									
2 14 2:14:01 15 21	Pelayanan diseminasi data dan informasi statistik	Terselenggaranya pelayanan dan diseminasi data/informasi statistik daerah	1 Tahun	Rp 65.000.000	68.250.000									
2 14 2:14:01 15 22	Penyusunan analisis indikator makro daerah	Tersedianya data dan informasi analisis indikator makro daerah kota bima	1 Dokumen/20 Eks	Rp -	-									
2 14 2:14:01 15 23	Analisis IPM Kota Bima	Jumlah Dokumen Analisis IPM Kota Bima	1 Dokumen/20 Eks	Rp 79.800.000	83.790.000									
2 14 2:14:01 15 24	Koordinasi Pengumpulan Data-data Statistik Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi		Rp -	-									
2 14 2:14:01 15 25	Neraca Bahan Makanan	Dokumen Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen/20 Eks	Rp -	-									
	Penyusunan Dokumen Statistik Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Statistik Ekonomi Kreatif	1 Dokumen/10 Eks	Rp 45.000.000	47.250.000									
	Penyusunan Dokumen Statistik Perumahan	Jumlah Dokumen Statistik Perumahan	1 Dokumen/10 Eks	Rp 45.000.000	47.250.000									
	Forum Data	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi data dengan SKPD terkait untuk mewujudkan one data	1 Kegiatan	Rp 127.200.000	133.560.000									
2 14 1:06:01 16	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			602.175.000	632.283.750									
2 14 2:14:01 16 1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah laporan data dan informasi bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah	1 Dokumen/20 Eks	Rp 69.825.000	73.316.250									
2 14 2:14:01 16 2	Penyusunan profile daerah	Jumlah Laporan Profil Daerah	1 Dokumen/20 Eks	Rp 73.500.000	77.175.000									
2 14 2:14:01 16 3	Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Basis data dan informasi SIPD	1 Dokumen/20 Eks	Rp 133.875.000	140.568.750									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						(10)	(11)	(12)	(13)
					Tolak Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 14	2:14-01	16	4	Updating data capaian kinerja RPJMD	Jumlah buku <i>updating</i> data capaian kinerja RPJMD	1 Dokumen/ 20 Eks	Rp	65.100.000	68.355.000					
2 14	2:14-01	16	5	Operasional Website/Updating data dan informasi	Tersedianya Software Website	1 Sistem	Rp	24.150.000	25.357.500					
2 14	2:14-01	16	6	Pembaharuan (Updating) Data Kemiskinan	Jumlah data kemiskinan yang terupdate	1 Dokumen/ 20 Eks	Rp	90.300.000	94.815.000					
2 14	2:14-01	16	7	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah laporan pelayanan informasi publik	1 Dokumen	Rp	34.650.000	36.382.000					
2 14	2:14-01	16	8	Penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah (LP2D)	Terselenggaranya penyusunan dokumen LP2D	1 Dokumen	Rp	-	-					
2 14	2:14-01	16	9	Penyusunan ICOR	terselenggaranya penyusunan dokumen ICOR	1 Dokumen/ 20 Eks	Rp	110.775.000	116.313.750					
2 14	2:14-01	16	11	Penyusunan Peta Wilayah	tersedianya peta wilayah	0	Rp	-	-					
2 16	KEBUDAYAAN							881.404.950	925.475.198					
2 16 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							881.404.950	925.475.198					
2 16 1.01.01 16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA							253.968.000	266.666.400					
2 16	1.01.01	16	xx	Pengembangan Keragaman Budaya Daerah	Meningkatnya nilai b udaya daerah	1 kali dalam setahun		52.684.500	55.318.725					
2 16	1.01.01	16	xx	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terselenggaranya festival budaya	1 kali dalam setahun		201.283.500	211.347.675					
2 16 1.01.01 20	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA							225.961.450	237.259.523					
2 16	1.01.01	20	6	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		9 Kegiatan		174.193.250	182.902.913			baru		
2 16	1.01.01	20	xx	Pemberian dukungan, Penghargaan dan kerjasama bidang budaya	Jumlah dukungan, Penghargaan dan kerjasama bidang budaya	1 kegiatan		51.768.200	54.356.610			baru		
2 16 1.01.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA							151.475.500						
2 16	1.01.01	21	xx	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	1 kegiatan		83.275.500	87.439.275					
2 16	1.01.01	21	22	Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah museum dan peninggalan bawah air	1 kegiatan		68.200.000	71.610.000					
1 01 1.01.01 23	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SENI DAN BUDAYA							250.000.000	262.500.000			baru		
1 01	1.01.01	23	01	Pengembangan Taman Budaya	Pembangunan Taman Budaya			250.000.000	262.500.000					
2 17	PERPUSTAKAAN							2.403.300.000	2.523.465.000					
2 17 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH							2.403.300.000	2.523.465.000					
2 17 2.17.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							813.567.000	854.245.350					
2 17	2.17.01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	60 surat		113.560.000	119.238.000	Lama				
					Materai yang tersedia selama 1 tahun	500 lembar								
					Jasa pengiriman/paket	20 paket								
2 17	2.17.01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bln		23.000.000,00	24.150.000	Lama				
2 17	2.17.01	01	03	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional	jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit roda Dua, 1 Unit Roda 3 dan 2 Unit Roda Empat.		13.000.000,00	13.650.000	Lama				
2 17	2.17.01	01	04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	4 Org 12 Bln		39.900.000,00	41.895.000	Lama				
2 17	2.17.01	01	05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	100%		9.974.000,00	10.472.700	Lama				
2 17	2.17.01	01	06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	40 Jenis		61.490.000,00	64.564.500	Lama				
2 17	2.17.01	01	07	Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	7 Jenis; 1.000 Lbr 48 Dok		12.526.800,00	13.153.140	Lama				
2 17	2.17.01	01	08	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	7 Jenis		5.000.000,00	5.250.000	Lama				
2 17	2.17.01	01	09	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor	6 Jenis		218.250.000,00	229.162.500	Lama				
2 17	2.17.01	01	10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-Undangan	Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	5 media		12.000.000,00	12.600.000	Lama				
2 17	2.17.01	01	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	12 bulan		25.000.000,00	26.250.000	Lama				
2 17	2.17.01	01	12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan		199.000.000,00	208.950.000	Lama				
2 17	2.17.01	01	13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan		80.866.200,00	84.909.510	Lama				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2	17	2.17.01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			189.250.000	198.712.500	
2	17	2.17.01	02	01	Pembangunan Gedung Kantor			-	-	Lama
2	17	2.17.01	02	02	Pengadaan Meubel Kantor	Jumlah Pengadaan Meubel Kantor	5 Unit	41.200.000	43.260.000	Lama
2	17	2.17.01	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				-	Lama
2	17	2.17.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	2 Kali	60.000.000	63.000.000	Lama
2	17	2.17.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit	78.050.000	81.952.500	Lama
2	17	2.17.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	4 Kali	10.000.000	10.500.000	Lama
2	17	2.17.01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			20.000.000	21.000.000	
2	17	2.17.01	03	01	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian Olahraga	40 Stel	20.000.000	21.000.000	Lama
1	24	1.24.01	06		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR			136.913.000	143.758.650	
1	24	1.24.01	06	02	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional Arstiparis	5 org	61.913.000	65.008.650	Lama
1	24	1.24.01	06	04	Konsultasi dan Studi Banding			75.000.000	78.750.000	Lama
2	17	2.17.01	07		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			110.000.000	115.500.000	
2	17	2.17.01	07	01	Penyusunan Laporan Keuangan semester	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	2 Dokumen	10.000.000	10.500.000	Lama
2	17	2.17.01	07	02	Penyusunan Laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	10.000.000	10.500.000	Lama
2	17	2.17.01	07	03	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen	20.000.000	21.000.000	Lama
2	17	2.17.01	07	04	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dokumen	40.000.000	42.000.000	Lama
2	17	2.17.01	07	05	Penyusunan LAKIP,LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Dokumen	30.000.000	31.500.000	Lama
2	18	2.17.01	16		PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH			93.000.000	97.650.000	
2	18	2.17.01	16	01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Rak penyimpanan arsip	2 buah	10.000.000	10.500.000	Baru
2	18	2.17.01	16	04	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	Dokumen arsip elektronik (e-arsip)	1 jaringan	65.000.000	68.250.000	Baru
2	18	2.17.01	16	05	Pengolahan arsip hasil akuisisi	Jumlah arsip dari SKPD yang ditarik untuk diolah	1000 lembar	18.000.000	18.900.000	Baru
2	17	2.17.01	17		PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN			5.000.000	5.250.000	
2	17	2.17.01	17	01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	1 tahun	5.000.000	5.250.000	Lama
2	17	2.17.01	18		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI KEARSIPAN			191.335.000	200.901.750	
2	17	2.17.01	18	03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta, Pendampingan arsip	1 kali	43.896.000	46.090.800	Lama
2	17	2.17.01	18	04	Bintek Kearsipan pada instansi pemerintah/swasta	jumlah tenaga pengurus arsip di SKPD yang kompeten	30 orang	45.000.000	47.250.000	Baru
2	17	2.17.01	18	05	Pelaksanaan Audit pengawasan	% Penerapan arsip secara baku	30%	62.500.000	65.625.000	Baru
2	17	2.17.01	18	06	Penyusunan Produk Hukum Perpustakaan dan Kearsipan	Perda Perpustakaan dan Kearsipan	1 perda	39.939.000	41.935.950	Baru
2	17	2.17.01	19		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			844.235.000	886.446.750	
2	17	2.17.01	19	01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	- Lomba Duta Baca	1 kegiatan	100.000.000	105.000.000	Lama
						- Lomba Duta Cerita	1 kegiatan			
						- Lomba Menggambar	1 kegiatan			
						- Lomba Mendongeng	1 kegiatan			
2	17	2.17.01	19	02	Pengembangan minat dan budaya baca	jumlah pengunjung	3000 orang	45.192.000	47.451.600	Lama
2	17	2.17.01	19	03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	12 bulan	49.235.000	51.696.750	Lama
2	17	2.17.01	19	08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	2 kali	49.808.000	52.298.400	
2	17	2.17.01	19	09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah bahan pustaka perpustakaan umum daerah	7000	450.000.000	472.500.000	Lama
2	17	2.17.01	19	10	Monitoring dan Evaluasi	pengelolaan arsip secara baku	30	20.000.000	21.000.000	Lama
2	17	2.17.01	19	11	Digitalisasi e-pustaka	Jumlah kegiatan Digitalisasi e-pustaka	1 keg	-	-	
2	17	2.17.01	19	12	Pengolahan Bahan Perpustakaan	jumlah buku yang diolah	550 judul	10.000.000	10.500.000	Baru
2	17	2.17.01	19	13	Survey kepuasan pengunjung	% kepuasan pengunjung	100%	10.000.000	10.500.000	Baru
2	17	2.17.01	19	14	Pameran Buku	jumlah pengunjung	3000	20.000.000	21.000.000	Baru
2	17	2.17.01	19	15	Bintek Pengembangan SDM Perpustakaan	sdm pengelola yang kompeten	50 ong	50.000.000	52.500.000	Baru
2	17	2.17.01	19	16	Pelatihan Story Telling	tenaga terampil mendongeng	40 orang	40.000.000	42.000.000	Baru
3					URUSAN PILIHAN			45.689.748.558	5.679.399.183	
3	01				KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.167.181.075	5.679.399.183	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
		Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3 01 3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.167.181.075	5.679.399.183		
3 01 3.01.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			506.250.000	556.875.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 01 3.01.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terseleenggaranya jasa surat menyurat:	12 bulan	1.650.000	1.815.000	Kegiatan sedang berjalan	
		Belanja Pengiriman Surat Dinas ke Provinsi dan ke Pusat	36 Eks/Bulan				
		Pengiriman Surat Dinas ke Pusat	368 Eks/Bulan				
3 01 3.01.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi speedy, sumberdaya air dan listrik	3 jenis pelayanan/ 12 bulan	60.500.000	66.550.000	Kegiatan sedang berjalan	
		Surat Kabar/Majalah	14 jenis/ 12 bulan + iklan				
3 01 3.01.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Pelayanan	18.700.000	20.570.000	Kegiatan sedang berjalan	
		Jasa Service kendaraan roda 4	16 unit				
		Jasa Service kendaraan roda 2	23				
		Pajak Kendaraan Bermotor roda 4	4 unit				
		Pajak Kendaraan Bermotor roda 2	23 unit				
3 01 3.01.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terseleenggaranya jasa administrasi keuangan	6 jenis jasa	44.400.000	48.840.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	20 unit	25.000.000	27.500.000	Kegiatan baru	
3 01 3.01.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	50 jenis ATK,	36.000.000	39.600.000	Kegiatan sedang berjalan	
		Materai @ Rp. 6.000	350 Lmbr				
		Materai @ Rp. 3.000	350 Lmbr				
3 01 3.01.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggiliran	Terlaksananya cetakan, penggiliran dan penggiliran	3 jenis pelayanan	20.000.000	22.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
		foto copy dokumen administrasi umum	15.000n lbr				
		foto copy dokumen administrasi Keuangan	10.000 lbr				
		foto copy dokumen administrasi kepegawalan	5.000 lbr				
		Penjilidan	300 jilid				
3 01 3.01.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum	1 Pelayanan	25.000.000	27.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
		makan dan minum harian pegawai/Kegiatan	1.034 Org/Hr/Bln				
		makan dan minum rapat	385 Org/Bln				
		makan dan minum tamu	330 Org/Bln				
3 01 3.01.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terseleenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Pusat dan Provinsi	40 laporan	250.000.000	275.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terseleenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah	60 laporan	25.000.000	27.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			117.000.000	124.200.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 01 3.01.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	200 Buah	15.000.000	16.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	4 Unit	20.000.000	22.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 02 10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya Pengadaan mebeleur	5 Unit	20.000.000	22.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Thn	12.000.000	13.200.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20 Unit	50.000.000	50.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur			15.000.000	16.500.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
		Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3 01 3.01.01 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersejadinya pakaian olahraga	50 Stel	15.000.000	16.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			20.000.000	22.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 01 3.01.01 05 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan Perundang-undangan	1 Keg	20.000.000	22.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			163.000.000	179.300.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 01 3.01.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan sementara	1 Dok	21.000.000	23.100.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan sementara	1 Dok	21.000.000	23.100.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok	14.000.000	15.400.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan Dokumen Laporan Tahunan	1 Dok	13.000.000	14.300.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen Rancangan Renstra 2019-2021 Renja/DPA dan DPPA	4 Dok	62.000.000	68.200.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPI dan LPPD	Terlaksananya penyusunan Dokumen LAKIP, LPI dan LPPD	3 Dok	32.000.000	35.200.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat			22.000.000	24.200.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 01 3.01.01 19 02	Koordinasi Hari Nusantara	Cakupan Koordinasi Hari Nusantara	1 Kegiatan	22.000.000	24.200.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 20	Program pengembangan budidaya perikanan			1.503.206.075	1.653.526.683		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 01 3.01.01 20 01	Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah Bibit Ikan Unggul yang tersedia	666500 ekor	362.000.000	398.200.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 20 02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jumlah Kelompok Tani Pembudidaya Ikan yang didampingi	64 kelompok	45.000.000	49.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 20 06	Pengadaan Sarana Pengembangan Kebun Rumput Laut	Jumlah Rumput Laut yang dikembangkan	1 Kebun	50.000.000	55.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 20 07	Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Fisik UPR & HSRT	Cakupan biaya operasional UPR & HSRT	1 Unit	84.800.000	93.280.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 20 09	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Perikanan Budidaya (DAK)	Jumlah Sarana Prasarana penunjang perikanan budidaya yang tersedia	130.000 ekor	611.406.075	672.546.683	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 20 10	Revitalisasi Kelompok Perikanan Budidaya	Jumlah kelompok perikanan budidaya yang direvitalisasi	9 Klp	350.000.000	385.000.000	Kegiatan baru	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
3 01 3.01.01 21	Program pengembangan perikanan tangkap			2.022.725.000	2.224.997.500		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3 01 3.01.01 21 01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah nelayan yang mendapatkan kartu asuransi nelayan	1000 Orang	220.000.000	242.000.000	Kegiatan sedang berjalan				
3 01 3.01.01 21 05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	Jumlah lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap yang bina	2 koperasi nelayan	35.000.000	38.500.000	Kegiatan sedang berjalan				
3 01 3.01.01 21 06	Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Perikanan Tangkap (DAU, DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Perikanan Tangkap Yang Tersedia	3292 unit	1.642.725.000	1.806.997.500	Kegiatan sedang berjalan				
3 01 3.01.01 21 07	Pendataan Kapal Perikanan Tangkap	Data kapal perikanan tangkap	400 unit	30.000.000	33.000.000	Kegiatan baru				
3 01 3.01.01 21 09	Pendampingan Perijinan Kapal Perikanan Lebih Kecil Dari 7 GT	Jumlah Kapal Yang Memiliki PAS Kecil	50 unit	60.000.000	66.000.000	Kegiatan baru				
3 01 3.01.01 21 10	Revitalisasi Kelompok Perikanan Tangkap	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok	9 klp	35.000.000	38.500.000	Kegiatan baru				
3 01 3.01.01 22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan			63.000.000	69.300.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3 01 3.01.01 22 02	Pendataan Potensi Perikanan (Statistik)	Terselenggaranya Pendataan Potensi Perikanan (Statistik)	1 Kegiatan	63.000.000	69.300.000	Kegiatan sedang berjalan				
3 01 3.01.01 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			735.000.000	808.500.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3 01 3.01.01 23 01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah kelompok poklaksar yang didampingi Promosi hasil perikanan tingkat kota Bima (Hut Kota Bima)	37 klpk 1 kali	55.000.000	60.500.000	Kegiatan sedang berjalan				
3 01 3.01.01 23 06	Penyediaan sarana prasarana pemasaran dan pengolahan hsl Perikanan	Cakupan biaya operasional sarana prasarana pemasaran dan pengolahan hasil Perikanan	1 Pkt dan 66 kelompok	250.000.000	275.000.000	Kegiatan sedang berjalan				
3 01 3.01.01 23 07	Penyelenggaraan Kegiatan Forum Konsumsi Ikan (FORIKAN)	Jumlah peserta lomba masak serba ikan, dan jumlah peserta demo masak serba ikan	38 Kelurahan	300.000.000	330.000.000	Kegiatan sedang berjalan				
0 0 0 0 08	Revitalisasi Kelompok Pengolahan	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok	9 klp	30.000.000	33.000.000	Kegiatan baru				
0 0 0 0 09	Pelatihan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah kelompok pengolahan	10 klp	50.000.000	55.000.000	Kegiatan baru				
0 0 0 0 10	Pendataan dan Fasilitasi Logistik Kelautan dan Perikanan	Jumlah prasarana logistik ikan yang dimanfaatkan	3 unit	50.000.000	55.000.000	Kegiatan baru				
3 02	URUSAN PARIWISATA			13.520.963.600	14.197.011.780					

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT									
		Tolak Ukur	Target								
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
3	02	01.01	DINAS PARIWISATA		13.520.963.600	14.197.011.780					
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1.144.066.000	1.201.269.300					
3	02	3.02.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Distribusi dan Kearsipan Surat menyurat terlaksana dengan Baik	14 org	168.000.000	0		
3	02	3.02.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Kelancaran Komunikasi, tersedianya Air bersih dan Penerangan	12 bln	35.000.000	0		
3	02	3.02.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Kelancaran operasional dalam melayani masyarakat	7 unit	35.000.000	0		
3	02	3.02.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya pelayanan jasa administrasi keuangan	6 org	50.000.000	0		
3	02	3.02.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan Kantor	42 jenis	80.000.000	0		
3	02	3.02.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan kantor terhadap masyarakat	100 blok	65.000.000	0		
3	02	3.02.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	35 peralatan	150.000.000	0		
3	02	3.02.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya upaya pengembangan pariwisata yang berdasarkan perencanaan yang baik.	4 media	60.500.000	0		
3	02	3.02.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman	12 kali	23.166.000	0		
3	02	3.02.01	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 kali	438.900.000	0		
3	02	3.02.01	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	12 kali	38.500.000	0		
3	02	3.02.01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			310.000.000			
3	02	3.02.01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kinerja staf Dispar	5 unit	Rp 100.000.000			
3	02	3.02.01	02	10	Pengadaan mebeleur	Meningkatnya kinerja staf Dispar	1 pkt	Rp 70.000.000			
3	02	3.02.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kinerja staf Dispar	1 lokasi	Rp 50.000.000			
3	02	3.02.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya jasa pemeliharaan rutin berkala / kendaraan dinas / operasional	6 unit	Rp 40.000.000			
3	02	3.02.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya pemeliharaan rutin dan berkala Peralatan gedung kantor	25 peralatan	Rp 50.000.000			
								Rp 45.000.000			
3	02	3.02.01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						
3	02	3.02.01	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas	1 kegiatan	Rp 45.000.000			
								180.000.000	189.000.000		
3	02	3.02.01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						
3	02	3.02.01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal		4 kali	Rp 55.000.000			
3	02	3.02.01	05	05	Penyusunan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan undang-undang	1 kali	Rp 50.000.000			
3	02	3.02.01	05	06	Konsultasi dan Studi Banding		4 kali	Rp 75.000.000			
								Rp 210.000.000			
3	02	3.02.01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
3	02	3.02.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SRPD	Terlaksananya penyusunan laporan triwulan sesuai ketentuan	4 dok	Rp 55.000.000			
3	02	3.02.01	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis	2 dok	Rp 25.000.000			
3	02	3.02.01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 dok	Rp 25.000.000			
3	02	3.02.01	06	05	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah	Tersusunnya RKA/DPA/DPPA sesuai ketentuan	3 dok	Rp 45.000.000			
3	02	3.02.01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Tersusunnya dokumen LKIP, LPJ dan LPPD	3 dok	Rp 60.000.000			

KODE REKENING				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
(1)				(2)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	02	3.02.01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA				1.911.130.000			
3	02	3.02.01	15	02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata			Rp 35.000.000			
3	02	3.02.01	15	03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata		3 media	Rp 196.130.000			
3	02	3.02.01	15	04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Meningkatnya jaringan promosi dalam daerah maupun luar daerah	3 kali	Rp 150.000.000			
3	02	3.02.01	15	05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Meningkatnya pelaksanaan pariwisata daerah melalui koordinasi antara sektor	4 kali	Rp 450.000.000			
3	02	3.02.01	15	06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Tersebar nya informasi Objek Daya Tarik Wisata dalam dan luar negeri	3 media	Rp 30.000.000			
3	02	3.02.01	15	10	MICE	Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	4 kali	Rp 300.000.000			
3	02	3.02.01	15	11	Partisipasi Pelestarian dan Aktualisasi Atraksi Wisata Budaya	Terwujudnya event MICE	1 keg.	Rp 450.000.000			
3	02	3.02.01	15	12	Facilitasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Festival Atraksi Kesenian Tradisional	Meningkatnya partisipasi pelestarian dan aktualisasi atraksi wisata budaya	2 keg.	Rp 300.000.000			
3	02	3.02.01	20	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA EKONOMI KREATIF				1.945.767.600			
3	02	3.02.01	20	01	Penyusunan data base ekonomi kreatif	Disusun database ekonomi kreatif	1 dok	Rp 37.510.000			
3	02	3.02.01	20	02	Car free day	Terlaksananya car free day	4 keg.	Rp 108.257.600			
3	02	3.02.01	20	03	Event ekonomi kreatif	Terlaksananya kegiatan ekonomi kreatif	7 keg.	Rp 350.000.000			
3	02	3.02.01	20	04	Pelatihan, pembuatan kemasan, kerajinan pelaku ekonomi kreatif	Terlaksananya pelatihan pelaku ekonomi kreatif	10 usaha	Rp 450.000.000			
3	02	3.02.01	20	05	Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi kreatif	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana ekonomi kreatif	5 unit	Rp 1.000.000.000			
3	02	3.02.01	16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA				Rp 6.645.000.000			
3	02	3.02.01	16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Terlaksananya kegiatan peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata	3 lokasi	Rp 2.500.000.000			
3	02	3.02.01	16	04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Terlaksananya koordinasi pembangunan obyek wisata dengan lembaga / dunia usaha	1 dok	Rp 100.000.000			
3	02	3.02.01	16	08	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pariwisata	8 gedung	Rp 2.000.000.000			
3	02	3.02.01	16	09	Pendataan dan Perencanaan Site, Destinasi, ODTW dan Kawasan Pariwisata	Terciptanya data base dan sistem informasi tentang ODTW	1 dok	Rp 100.000.000			
3	02	3.02.01	16	10	Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	Terselenggaranya kegiatan Peningkatan kualitas dan pemeliharaan atraksi, destinasi dan ODTW	2 keg.	Rp 50.000.000			
3	02	3.02.01	16	11	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Pemeliharaan dan Pengelolaan Destinasi dan ODTW	Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan ODTW	4 kali	Rp 85.000.000			
3	02	3.02.01	16	12	Pengelolaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	Peningkatan pengelolaan atraksi, destinasi dan ODTW	19500 org	Rp 140.000.000			
3	02	3.02.01	16	13	MONEV Perencanaan dan Pembanguna Destinasi, ODTW dan Kawasan	Terciptanya data base dan sistem informasi tentang pembangunan destinasi ODTW	4 kali	Rp 50.000.000			
3	02	3.02.01	16	14	Pembangunan sarana penunjang dan utilitas	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana penunjang dan utilitas pariwisata	8 keg.	Rp 1.500.000.000			
3	02	3.02.01	16	15	Kerjasama peningkatan SDM pengelola Kawasan, Destinasi dan ODTW serta atraksi dengan instansi dan stakeholders terkait	Terlaksananya kerjasama dengan instansi dan stakeholders terkait	4 keg.	Rp 120.000.000			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT							
					Tolak Ukur	Target						
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
3	02	3.02.01	17		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KEMITRAAN PARIWISATA			Rp	450.000.000			
3	02	3.02.01	17	04	Facilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	terlaksananya pembentukan forum antar pelaku industri pariwisata dan budaya serta Lingkup Pemerintah Kota Bima	5 lbg	Rp	120.000.000			
3	02	3.02.01	17	08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terlaksananya pokdarwis pada masyarakat	8 kdp	Rp	150.000.000			
3	02	3.02.01	17	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha dan industri jasa pariwisata lembaga dan mitra pariwisata	Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 kali	Rp	30.000.000			
3	02	3.02.01	17	10	Koordinasi Dengan Sektor Pariwisata tentang Pelatihan pemandu wisata	Terlaksananya koordinasi tentang pelatihan pemandu wisata	4 kali	Rp	150.000.000			
3	02	3.02.01	18		PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPARIWISATAAN			Rp	460.000.000			
3	02	3.02.01	18	01	Pengembangan SDM bidang pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Pengembangan SDM Bidang Pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	5 lbg	Rp	250.000.000			
3	02	3.02.01	18	02	Pengembangan SDM dan BIMTEK profesionalisme bidang pariwisata	Terlaksananya bimtek bidang pariwisata	2 keg.	Rp	210.000.000			
3	02	3.02.01	18		PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPARIWISATAAN			Rp	220.000.000			
3	02	3.02.01	19	03	Penerbitan rekomendasi ijin usaha pariwisata, lembaga kepariwisataan dan rekomendasi ijin pemandu wisata	Adanya penerbitan rekomendasi ijin usaha pariwisata, lembaga kepariwisataan dan rekomendasi ijin pemandu wisata	10 ijin	Rp	30.000.000			
3	02	3.02.01	19	04	Standarisasi dan sertifikasi segala bentuk usaha dan industri jasa pariwisata	Adanya standarisasi bentuk usaha industri jasa pariwisata	50%	Rp	25.000.000			
3	02	3.02.01	19	05	Facilitasi dan pembentukan kelompok masyarakat dan mitra	Terlaksananya pokdarwis pada masyarakat	8 kdp	Rp	75.000.000			
3	02	3.02.01	19	06	Pendampingan dan pembentukan kelompok masyarakat dan mitra	Terlaksananya pembentukan kelompok masyarakat dan mitra pariwisata	8 kdp	Rp	90.000.000			
3	03				URUSAN WAJIB PERTANIAN				13.123.243.000	13.779.405.150		
		3.03.01			DINAS PERTANIAN				13.123.243.000	13.779.405.150		
3	03	3.03.01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				985.680.000	1.211.421.114		
3	03	3.03.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat (Caraka/Petugas pengantar surat)	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	60 kali	Rp	1.380.000	Rp	2.063.100	
3	03	3.03.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rekening)	Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	Rp	90.000.000	Rp	134.101.500	
3	03	3.03.01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	27 STNK	Rp	28.500.000	Rp	42.465.475	
3	03	3.03.01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan	Rp	83.500.000	Rp	124.593.300	
3	03	3.03.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service)	Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor	12 bulan	Rp	44.000.000	Rp	66.019.200	
3	03	3.03.01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	18 unit	Rp	15.000.000	Rp	20.974.850	
3	03	3.03.01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat-alat tulis kantor	1 tahun	Rp	145.000.000	Rp	217.098.294	
3	03	3.03.01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Rp	55.000.000	Rp	82.432.880	
3	03	3.03.01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor	1 Paket	Rp	6.000.000	Rp	7.736.625	
3	03	3.03.01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	Rp	19.000.000	Rp	25.017.330	
3	03	3.03.01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	6 Media	Rp	6.300.000	Rp	8.190.000	
3	03	3.03.01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan makanan dan minuman	11 Bulan	Rp	22.000.000	Rp	32.199.310	
3	03	3.03.01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi ke luar daerah	1 Tahun	Rp	425.000.000	Rp	390.000.000	
3	03	3.03.01	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah	1 Tahun	Rp	45.000.000	Rp	58.529.250	
3	03	3.03.01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				496.500.000	684.736.260		
3	03	3.03.01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya sistem pelayanan yang cepat dan lancar kepada masyarakat	5 unit	Rp	120.000.000	Rp	227.500.000	
3	03	3.03.01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terciptanya kondisi lokasi kerja yang nyaman	2 Paket	Rp	50.000.000	Rp	32.500.000	
3	03	3.03.01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Administrasi Kantor	10 unit	Rp	54.500.000	Rp	70.850.000	
3	03	3.03.01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya kendaraan operasional pelaksanaan kegiatan lapangan dinas/kantor	4 unit	Rp	77.000.000	Rp	100.386.260	
3	03	3.03.01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Penyediaan Ruang Kerja Untuk Pelayanan Publik Yang Baik dan Nyaman	1 Unit	Rp	195.000.000	Rp	253.500.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
3 03 3.03.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			Rp	27.100.000	Rp	9.149.400			
3 03 3.03.01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	1 Kegiatan	Rp	20.000.000					
3 03 3.03.01 05 05	Pelaksanaan penilaian AKJG	Penilaian angka kredit jabatan fungsional	1 Kegiatan	Rp	7.100.000	Rp	9.149.400			
3 03 3.03.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Porsentase SKPD dengan indeks SAKIP baik			153.900.000		207.624.625			
3 03 3'03.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tertibnya sistim admistrasi, data dan pelaporan	2 Keg.	Rp	42.000.000	Rp	62.154.625			
3 03 3'03.01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semester	1 Dok.	Rp	9.600.000	Rp	12.480.000			
3 03 3'03.01 06 04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dok.	Rp	12.000.000	Rp	15.600.000			
3 03 3'03.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	4 Dok.	Rp	60.300.000	Rp	78.390.000			
3 03 3'03.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Tersedianya LAKIP dan LPPD Tahun Anggaran 2018	2 Dok.	Rp	30.000.000	Rp	39.000.000			
3 03 3.03.01 15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Peningkatan Kemampuan SDM Petani Peternak dan Pelaku usaha (orang)	35 Orang		716.000.000		2.102.615.984			
3 03 3'03.01 15 01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Bertambahnya keterampilan, pengetahuan dan manajemen usaha para pelaku usaha peternakan	40 orang	Rp	118.000.000		1.209.532.136			
3 03 3'03.01 15 02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dan para pelaku agribisnis	36 orang	Rp	383.000.000		571.392.738			
3 03 3'03.01 15 03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani petani	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani	30 orang	Rp	105.000.000		157.462.370			
3 03 3'03.01 15 07	Pelaksanaan Lomba Kelompok Tani, Petani, Kelompok PUAP dan Pekarangan	Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani, ternak dan perkebunan	1 Keg.	Rp	110.000.000		164.228.740			
3 03 3.03.01 16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan (ton)	72635 Ton		2.409.863.000		32.067.788.995			
3 03 3'03.01 16 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Terbentuknya Komisi, Tim Pengawas dan Tim Verifikasi Pupuk dan Pesticida serta Tim Penyusunan RDKK Kota Bima	2 kegiatan/tim	Rp	60.000.000		406.217.500			
3 03 3'03.01 16 12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Bertambahnya keterampilan, pengetahuan dan manajemen usaha para pelaku usaha pertanian	50 Orang	Rp	185.863.000		241.621.900			
3 03 3'03.01 16 15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Meningkatnya produksi pertanian tanaman padi palawija	7 Komoditi Tanaman Pangan	Rp	340.000.000		732.597.840			
3 03 3'03.01 16 20	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Tersedianya benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura unggul	5 Komoditi	Rp	770.000.000		11.111.875.000			
3 03 3'03.01 16 21	Pengembangan Sistim Informasi Pasar	Terpublikasinya informasi harga pasar komoditi pertanian di media cetak lokal	1 Keg.	Rp	54.000.000		79.756.755			
3 03 3'03.01 16 29	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi produk pertanian	7 Komoditi Tanaman Pangan	Rp	1.000.000.000		19.495.720.000			
	Pengembangan Tanaman Sayur-Sayuran									
3 03 3.03.01 18	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Kelompok Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran	40%	Rp	120.000.000		718.750.000			
		Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Meningkatnya kualitas SDM Petani perkebunan	30 Orang	Rp	60.000.000	718.750.000			
		Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna		Rp	60.000.000					
3 03 3.03.01 19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Peningkatan Produksi Perkebunan (ton)	204,73 Ton	Rp	6.240.200.000		9.561.483.750			
		Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		Rp	60.000.000					
3 03 3'03.01 19 02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang Alsintan	1 Keg.	Rp	6.038.000.000		6.656.000.000			
3 03 3'03.01 19 03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Tersedianya bibit unggul yang tersertifikasi	3 komoditi	Rp	142.200.000		2.905.483.750			
3 03 3.21.01 20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN LAPANGAN	Penyuluh Yang Terampil	55%	Rp	332.000.000		1.115.959.715			
3 03 3'21.01 20 01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Meningkatnya kualitas sumber daya penyuluh di Kota Bima	1 Keg.	Rp	105.000.000		776.360.000			
	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan									
3 03 3'21.01 20 04	Penyusunan program penyuluhan pertanian	Meningkatnya kualitas program penyuluhan di Kota Bima	1 Keg.	Rp	227.000.000		339.599.715			
3 03 3.03.01 21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Kasus Penyakit Hewan Menular	Rp	956.000.000		3.077.895.275			
3 03 3'03.01 21 02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	Terlaksananya pelayanan kesehatan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan di Kota Bima	2 keg (Vak. ternak, Kartu. Ternak)	Rp	334.000.000		386.379.500			
3 03 3'03.01 21 04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Meningkatnya pengawasan perdagangan ternak dan pengiriman ternak betina produktif	1 Tim	Rp	93.000.000		2.691.515.775			
3 03 3'03.01 21 7	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah hewan ternak yang dipotong di RPH dan TPH	5 Kecamatan	Rp	285.000.000					
3 03 3'03.01 21 09	Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan	Terkontrolnya Kesehatan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan	5 Kecamatan	Rp	125.000.000					
3 03 3'03.01 21 10	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan	Jumlah hewan ternak yang dipotong di RPH dan TPH	1 Kegiatan	Rp	119.000.000					
3 03 3.03.01 22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Peningkatan Produksi Peternakan (ton)	2468 Ton	Rp	686.000.000		1.199.294.375			
3 03 3'03.01 22 02	Pembibitan dan perawatan ternak	Berkembangnya upaya-upaya pembibitan dan perawatan ternak sesuai teknik budidaya	1 Keg.	Rp	73.000.000		370.544.375			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
3 07 2.11.01 19 02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersejadinya data profile sentra industri	74 Sentra Industri	36.454.110	40.099.521	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3 07 2.11.01 19 04	Promosi produk kerajinan	Meningkatnya partisipasi IKM dalam promosi produk	10 IKM	74.833.000	82.316.300	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3 07 2.11.01 19 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sentra Industri (DAK)	Terlaksananya pembangunan gedung produksi	1 unit	2.000.000.000	2.200.000.000	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
		Terlaksananya pengadaan bantuan peralatan dan mesin untuk industri kecil dan menengah (IKM)	100 IKM	300.000.000	330.000.000					
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				142.480.408.840	149.604.429.282					
4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				109.239.658.590	114.701.641.520					
4 01 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH				72.055.796.290	48.411.086.105					
4 01 4.01.03 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlayani Kebutuhan Administrasi Perkantoran		14.669.222.090	15.402.683.195					
4 01 4.01.03 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa pengeriman dan jasa non pegawai	12 bulan	355.848.000,00	373.640.400	Lama	Bagian Humas, Bagian Umum, Bagian APP dan LPBJ			
		surat menyurat dan penggandaan surat menyurat,penjilidan dokumen,Materai	45000 buah	175.000.000,00	183.750.000		Bagian Humas, Bagian Umum, Bagian APP dan LPBJ, Bagian Organisasi			
		Cetak Map berlogo, cetak surat kop garuda	1200 buah	65.000.000,00	68.250.000		Bagian Humas, bagian APP dan LPBJ			
		Jasa pengiriman surat -surat	12000 surat	10.000.000,00	10.500.000		Bagian Humas, Bagian Umum, , Bagian Organisasi			
		Honorarium pegawai Honorrer	192 org/bulan	145.000.000,00	152.250.000		Bagian Umum, Bagian APP dan LPBJ			
4 01 4.01.03 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening Air, Telepon, Listrik, Astinet dan Si Maya	12 bulan	1.561.924.800	1.640.021.040	Lama	Bagian Adm.Pemerintahan, Bagian Umum, Bagian Kesra, Bagian Organisasi, Bagian Humas, Bagian Ekonomi, Bagian Hukum			
4 01 4.01.03 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya Honorarium Pengurus Barang, PPK, PPTK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	12 bulan	457.729.200	480.615.660	Lama	Bagian APP dan LPBJ, Bagian Umum, Bagian Kesra, Bagian Ekonomi,			
4 01 4.01.03 01 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah jasa kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah	12 bulan	540.000.000	567.000.000	Lama	Bagian Umum			
4 01 4.01.03 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran STNK dan Jasa Service Kendaraan Dinas	12 bulan	105.822.960,00	111.114.108	Lama	Bagian ekonomi, Bagian OPA, Bagian Kesra			
4 01 4.01.03 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Bendahara UUDP/TPP dan Makan Minum Penyusunan SPJ	12 bulan	855.926.880	898.723.224	Lama	Bagian APP dan LPBJ, Bagian Adm. Pmerintahan, Bagian Umum, Bagian Kesra, Bagian OPA, Bagian Humas, Bagian Ekonomi, Bagian Hukum			
4 01 4.01.03 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ketersediaan Tenaga Cleaning Service untuk Ling. SETDA, Taman Ling. Setda dan Rumah Jabatan KDH / WKDH	12 bulan	590100000	619.605.000	Lama	Bagian Humas,			
4 01 4.01.03 01 09	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Service Peralatan Elektronik Kantor	12 bulan	66.480.000	69.804.000	Lama	Bagian Kesra, Bagian Organisasi			
4 01 4.01.03 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK Kantor	12 bulan	954.736.380	1.002.473.199	Lama	Bagian Humas, Bagian Kesra, Bagian Umum, Bagian Adm.Pemerintahan			
4 01 4.01.03 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan Blanko Cetak, Penggandaan Dokumen dan Penjilidan Dokumen	12 bulan	1.006.625.400	1.056.956.670	Lama	Bagian Adm. Pemerintahan, Bagian Umum, Bagian Kesra, Bagian Humas, Bagian Ekonomi			
4 01 4.01.03 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan Komponen dan Peralatan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	669.600.000	703.080.000	Lama	Bagian Umum			
4 01 4.01.03 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pendukung Organisasi	12 bulan	678.540.000	712.467.000	Lama	Bagian Umum, Bagian Kesra			
4 01 4.01.03 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ketersediaan Sumber Informasi Berupa Surat Kabar /Majalah/Tabloid	12 bulan	239.412.000	251.382.600	Lama	Bagian Hukum, Bagian Ekonomi, Bagian Organisasi, Bagian Kesra, Bagian Umum			
4 01 4.01.03 01 16	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersejadinya Peralatan dan Bahan Pembersih	12 bulan	505.281.600	530.545.680	Lama	Bagian Umum			
4 01 4.01.03 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi Jamuan Tamu KDH/WKDH, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Belanja Dapur RT KDH/WKDH	12 bulan	2.196.100.800	2.305.905.840	Lama	Bagian Umum, Bagian Kesra			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
						Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
4 01 4.01.03 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya aparatur yang melaksanakan tugas ke pusat atau daerah lainnya	12 bulan	2.295.806.550	2.410.596.878	Lama	Bagian Adm. Pemerintahan, Bagian Umum, Bagian Kesra, bagian Organisasi, Bagian humas				
4 01 4.01.03 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terfasilitasinya Aparatur yang Melaksanakan Tugas koordinasi dalam daerah	12 bulan	1.194.287.520	1.254.001.896	Lama	Bagian Organisasi, Bagian Kesra, Bagian Umum, Bagian Administrasi				
4 01 4.01.03 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			31.915.922.000	6.684.218.100						
4 01 4.01.03 02 03	Pembangunan gedung kantor						Bagian Administrasi Pemerintah, Bagian Umum				
		Bangunan Gedung Kantor (Sayap Kantor Walikota)	2 unit	20.000.000.000,00			Bagian Administrasi Pemerintah, Bagian Umum				
		Pembangunan Pagar Kantor Lurah Jatibaru	1 unit	150.000.000,00			Bagian Administrasi Pemerintah				
		Pengaspalan Kantor Camat Raba	1 unit	150.000.000,00			Bagian Administrasi Pemerintah				
		Rehabilitasi Bangunan Kantor Lurah Pane	1 unit	150.000.000,00			Bagian Administrasi Pemerintah				
		Rehabilitasi Bangunan Kantor Lurah Penaraga	1 unit	150.000.000,00			Bagian Administrasi Pemerintah				
		Rehabilitasi Bangunan Kantor Camat Rasanae Timur	1 unit	400.000.000,00			Bagian Administrasi Pemerintah				
		Rehabilitasi Bangunan Kantor Lurah Kodo	1 unit	100.000.000,00			Bagian Administrasi Pemerintah				
		Pembangunan Talud Kantor Lurah Matakando	1 unit	100.000.000,00			Bagian Administrasi Pemerintah				
		Pembangunan Pagar Kantor Camat Mpunda	1 unit	50.000.000,00			Bagian Administrasi Pemerintah				
		Pembangunan Kantor Lurah Oi Mbo	1 unit	650.000.000,00			Bagian Administrasi Pemerintah				
		Pembangunan Pagar Kantor Lurah Rabadompu Timur	1 unit	100.000.000,00			Bagian Administrasi Pemerintah				
		Pengaspalan Kantor Walikota Bima	1 unit	-			Bagian Administrasi Pemerintah				
		Pengaspalan Jalan Masuk Kantor Lurah Nungga	1 unit	100.000.000,00							
		Rehabilitasi Eks Kantor Lurah Nungga	1 unit	300.000.000,00							
		Perencanaan Pembangunan	1 unit	100.000.000,00			Bagian Administrasi Pemerintah				
		Pengawasan Pembangunan	1 unit	50.000.000,00			Bagian Administrasi Pemerintah				
4 01 4.01.03 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional		3.000.000.000			Bagian umum				
		Pengadaan Mobil Dinas	5 unit				Bagian umum				
		Pengadaan Motor Dinas	41 unit				Bagian umum				
4 01 4.01.03 02 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	3 Paket	193.440.000	203.112.000		Bagian umum				
4 01 4.01.03 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	5 unit	54.600.000	57.330.000		Bagian Administrasi Pemerintahan				
4 01 4.01.03 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Ketersediaan perlatan gedung kantor	8 Paket	591.801.000	621.391.050		Bagian APP dan LPBJ, Bagian Organisasi, Bagian Humas				
4 01 4.01.03 02 10	Pengadaan mebeleur	Meubeler	165 unit/paket	445.320.000	467.586.000		Bagian Umum				
4 01 4.01.03 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksana Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	1.341.692.400	1.408.777.020		Bagian Umum				
4 01 4.01.03 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Ketersediaan Suku Cadang, Bahan bakar (BBM) dan Pelumas bagi Mobil Jabatan	12 bulan	492.192.000	516.801.600		Bagian Umum				
4 01 4.01.03 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Ketersediaan Suku Cadang, Bahan bakar (BBM) dan Pelumas bagi Kendaraan Dinas	12 bulan	1.853.796.600	1.946.486.430		Bagian umum, bagian organisasi, bagian Humas, bagian Ekonomi, Bgian Hukum				
		Pemeliharaan kendaraan dinas	45 unit				Bagian Umum				
		Pemeliharaan kendaraan dinas	2 unit				Bagian organisasi				
		Pemeliharaan kendaraan dinas	7 unit				Bagian Humas				
		Pemeliharaan kendaraan dinas	3 unit				Bagian Ekonomi				
		Pemeliharaan kendaraan dinas	3 unit				Bagian Adm. Pemerintahan				
		Pemeliharaan kendaraan dinas	6 unit				Bagian APP dan LPBJ				
		Pemeliharaan kendaraan dinas	4 unit				Bagian Hukum				
4 01 4.01.03 02 25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	12 bulan	174.000.000	182.700.000		Bagian Umum				
4 01 4.01.03 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	272.460.000	286.083.000		Bagian APP dan LPBJ, Bagian Umum				
4 01 4.01.03 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	202.620.000	212.751.000		Bagian Umum, bagian Hukum, Bgian Protokol, bagian Administrasi Pemerintahan				
4 01 4.01.03 02 45	Penyediaan/sewa gedung kantor/rumah jabatan/dinas	Sewa Rumah Jabatan/Dinas	4 unit	744.000.000	781.200.000		Bagian Umum				
4 01 4.01.03 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			394.968.000	414.716.400						

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
				Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4 01 4.01.03 03 02				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas KDH/WKDH/PDH Beserta Perlengkapannya	5 Paket	284.328.000	298.544.400	Bagian Umum, Bagian Kesra, Bagian Ekonomi, Bagian Hukum
4 01 4.01.03 03 05				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Penyediaan Pakaian Tenun Khas Bima dan Seragam Olahraga	4 Paket	57.840.000	60.732.000	Bagian Hukum, Bagian Ekonomi, Bagian Organisasi, Bagian Umum
4 01 4.01.03 03 06				Pengadaan pakaian olahraga	Pakaian olahraga	4 Paket	48.600.000	51.030.000	Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Ekonomi, Bagian Hukum
4 01 4.01.03 03 07				Tanda pengenal area khusus bandara	Tanda pengenal area khusus vip bandara	1 Paket	4.200.000	4.410.000	Bagian Humas dan Protokol
4 01 4.01.03 05				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			470.000.000	441.000.000	
4 01 4.01.03 05 05				Seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah	pelaksanaannya seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah	1 kegiatan	50.000.000		Bagian Administrasi Pemerintahan,
4 01 4.01.03 05 08				Koordinasi pelaksanaan kegiatan korps pegawai negeri	pelaksanaannya kegiatan korps pegawai negeri	12 bulan	420.000.000	441.000.000	Bagian Humas dan Protokol
4 01 4.01.03 06				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			787.300.000	826.665.000	
4 01 4.01.03 06 02				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	25.200.000	26.460.000	Bagian Humas dan Protokol
4 01 4.01.03 06 03				Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	33.600.000	35.280.000	Bagian Humas dan Protokol
4 01 4.01.03 06 04				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	28.500.000	29.925.000	Bagian Kesra, Bagian Humas,
4 01 4.01.03 06 05				Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA SKPD	Dokumen Renja/RKA/DPA dan DPPA SKPD	4 Dokumen	100.000.000	105.000.000	Bagian Ekonomi, Bagian APP dan LPBJ
4 01 4.01.03 06 06				Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Dokumen lakip dan LPPD	1 Dokumen	600.000.000	630.000.000	Bagian Adm Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Humas
4 01 4.01.03 06 07				Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perjanjian Kinerja Kota Bima	1 Dokumen	50.000.000.000	52.500.000	Bagian Organisasi
4 01 4.01.03 16				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH			8.980.000.000	9.429.000.000	
4 01 4.01.03 16 01				Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan Kemasyarakatan	Kuantitas terlaksananya dialog dan Audiensi dengan Masyarakat	12 bulan	1.600.000.000	1.680.000.000	Bagian Umum, Bagian Adm. Pemerintahan
4 01 4.01.03 16 02				Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Kuantitas Penerimaan Kunjungan Kerja	12 bulan	1.400.000.000	1.470.000.000	Bagian Umum, Bagian Humas
4 01 4.01.03 16 03				Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Terjalinnnya Koordinasi unsur MUSPIDA	12 bulan	1.000.000.000	1.050.000.000	Bagian Adm. Pemerintahan
4 01 4.01.03 16 04				Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah kunjungan KDH/WKDH ke wilayah kecamatan se kota bima	12 bulan	500.000.000	525.000.000	Bagian Huams dan protokol
4 01 4.01.03 16 05				Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Dokumen hasil kunjungan	12 bulan	2.300.000.000	2.415.000.000	Bagian Huams dan protokol
4 01 4.01.03 16 06				Stimulan pembangunan daerah	Ketersediaan bahan bahan material utk bantuan pembangunan kelurahan	5 kecamatan	2.000.000.000	2.100.000.000	Bagian APP dan LPBJ
4 01 4.01.03 16 07				optimalisasi pelayanan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	optimalisasi pelayanan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	180.000.000	189.000.000	Bagian Huams dan protokol
			17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			996.340.200	1.046.157.210	
4 01 4.01.03 17 02				Penyusunan Standar satuan harga 2020	Dokumen Peraturan Walikota tentang Standar Harga pemerintah daerah beserta lampirannya	1 perwali	141.930.600	149.027.130	Bagian APP dan LPBJ
4 01 4.01.03 17 30				Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana DAK dann TEPRA	dokumen laporan	2 dok	543.765.600	570.953.880	Bagian APP dan LPBJ
4 01 4.01.03 17 31				Pembinaan Perusahaan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Perusahaan Daerah yang Terbina	1 Perusahaan Daerah	208.644.000	219.076.200	Bagian Ekonomi
4 01 4.01.03 17 32				Pembinaan Kelembagaan Perekonomian Daerah	Jumlah Koordinasi	1 LKM	102.000.000	107.100.000	Bagian Ekonomi
4 01 4.01.03 23				PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI			370.044.000	388.546.200	
4 01 4.01.03 23 01				Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Sistem	370.044.000	388.546.200	Bagian Umum
4 01 4.01.03 25				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH			360.000.000	378.000.000	
4 01 4.01.03 25 01				Facilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah	50 MOU	210.000.000	220.500.000	Bagian Adm. Pemerintahan
4 01 4.01.03 25 05				Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Terlaksananya Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	1 Kali	150.000.000	157.500.000	Bagian Adm. Pemerintahan
4 01 4.01.03 26				PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			1.340.000.000	1.407.000.000	
4 01 4.01.03 26 02				Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Dokumen Daftar Usulan Raperda untuk Prolegda 2017	65 perwali, 65 perda, 686 SK, 297 MOU	500.000.000	525.000.000	Bagian Hukum

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
				Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4 01 4.01.03	26 03	Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah	Jumlah dokumen Rancangan Produk Hukum daerah	1 Dokumen	40.000.000	42.000.000	Bagian Ekonomi		
4 01 4.01.03	26 04	Penyusunan Peraturan Walikota dan Draf Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah peraturan walikota dan draf rancangan peraturan daerah	12 bulan	100.000.000	105.000.000	Bagian Organisasi		
4 01 4.01.03	26 05	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	12 bulan	200.000.000	210.000.000	Bagian Hukum		
4 01 4.01.03	26 06	Facilitasi Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peraturan yang di Sosialisasikan	12 bulan	300.000.000	315.000.000	Bagian Hukum		
4 01 4.01.03	26 07	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan yang di publikasikan	12 bulan	50.000.000	52.500.000	Bagian Hukum		
4 01 4.01.03	26 08	Penyelesaian sengketa dan bantuan hukum	Jumlah penyelesai sengketa/perkara	12 bulan	150.000.000	157.500.000	Bagian Hukum		
4 01 4.01.03	26 09	Pembinaan Keluarga Sadar Hukum	Jumlah kegiatan lomba kadarkum	1 keg	-	-			
4 01 4.01.03	27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU			550.000.000	577.500.000			
4 01 4.01.03	27 03	Facilitasi Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Terlaksananya Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	1 Kecamatan	200.000.000	210.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan		
4 01 4.01.03	27 05	Optimalisasi Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Optimalisasi Kecamatan Dan Kelurahan	1 Kali	75.000.000	78.750.000	Bagian Administrasi Pemerintahan		
4 01 4.01.03	27 07	Pelaksanaan Administrasi Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Tersediannya PERWALI Kelurahan	1 Kecamatan	100.000.000	105.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan		
4 01 4.01.03	27 08	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersediannya Survey Kepuasan Masyarakat	2 Kali	175.000.000	183.750.000	Bagian Administrasi Pemerintahan		
4 01 4.01.03	28	Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah			700.000.000	735.000.000			
4 01 4.01.03	28 01	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah	100 paket	700.000.000	735.000.000	Bagian APP dan LPBJ		
4 01 4.01.03	29	Program administrasi kerjasama pembangunan			450.000.000	472.500.000			
4 01 4.01.03	29 01	Koordinasi pembinaan administrasi pembangunan	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan	12 Bulan	300.000.000	315.000.000	Bagian APP dan LPBJ		
4 01 4.01.03	29 02	Koordinasi Bina jasa konstruksi	Terlaksananya koordinasi pembinaan jasa Konstruksi	6 Kali	150.000.000	157.500.000	Bagian APP dan LPBJ		
4 01 4.01.03	30	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Melalui Media Cetak			2.580.000.000	2.709.000.000			
4 01 4.01.03	30 01	Penyusunan kalender tahunan	Tersediannya Penyusunan Kalender Tahunan	1 paket	180.000.000	189.000.000	Bag. Humas dan Protokol		
4 01 4.01.03	30 02	koordinasi peringatan hari besar (keagamaan dan nasional)	koordinasi peringatan hari besar (keagamaan dan nasional)	12 bulan	-	-			
4 01 4.01.03	30 03	kerjasama informasi dengan mas media (pembinaan dan pendampingan pers)	Tersediannya Kerjasama Informasi dengan mas media (pembinaan dan pendampingan pers)	12 Media/12 bulan	1.500.000.000	1.575.000.000	Bag. Humas dan Protokol		
4 01 4.01.03	30 04	penyusunan buletin pemerintah Kota Bima	penyusunan buletin pemerintah Kota Bima	6 edisi	500.000.000	525.000.000	Bag. Humas dan Protokol		
4 01 4.01.03	30 05	penyusunan system informasi terhadap layanan publik	Tersediannya Penyebaran informasi terhadap layanan publik	12 bulan	400.000.000	420.000.000	Bag. Humas dan Protokol		
4 01 4.01.03	31	Program Pembinaan dan peningkatan pelayanan masyarakat			3.340.000.000	3.507.000.000			
4 01 4.01.03	31 01	Koordinasi peringatan hari besar (keagamaan dan nasional)	koordinasi peringatan hari besar (keagamaan dan nasional)	13 kegiatan	2.500.000.000	2.625.000.000	Bag. Humas dan Protokol, Bagian Humas, dan Bagian Umum		
4 01 4.01.03	31 02	Facilitasi Pembinaan peningkatan pelayanan publik	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan peningkatan pelayanan publik	12 bulan	250.000.000	262.500.000	Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Organisasi		
4 01 4.01.03	31 03	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	dokumen standar pelayanan publik	1 Dokumen	150.000.000,00	157.500.000	Bagian Organisasi		
4 01 4.01.03	31 04	Koordinasi bidang ekonomi	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi bidang perekonomian	12 bulan	350.000.000	367.500.000	Bagian ekonomi dan Usaha Daerah		
4 01 4.01.03	31 05	Pengantaran dan penjemputan jemaah haji	Rasio kenaikan jumlah penduduk yang mendaftar haji	6%	75.000.000	78.750.000	Bagian Kesra		
4 01 4.01.03	31 05	Pendataan sarana pendidikan agama dan tempat ibadah	dokumen data pelaporan yang tersusun	3 dokumen	15.000.000	15.750.000	Bagian Kesra		
4 01 4.01.03	31 06	Penyusunan Tata Naskah Dinas	dokumen tata naskah dinas	1 Dokumen	80.000.000,00	84.000.000	Bagian Organisasi		
4 01 4.01.03	31 07	Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	Dokumen Standar Oprasional Prosedur (SOP)	1 Dokumen	85.000.000,00	89.250.000	Bagian Organisasi		
4 01 4.01.03	31 08	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	60.000.000,00	63.000.000	Bagian Organisasi		
4 01 4.01.03	31 09	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	1 Dokumen	50.000.000,00	52.500.000	Bagian Organisasi		
4 01 4.01.03	32	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			50.000.000	52.500.000			
4 01 4.01.03	32 01	Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Senam Sehat aparaturn dan masyarakat dalam meningkatkan pola hidup sehat	12 kegiatan	50.000.000	52.500.000	Bagian umum		
4 01 4.01.03	33	Program Pembinaan dan pengembangan aparaturn			150.000.000	157.500.000			
4 01 4.01.03	33 01	Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah terlayannya Pendataan DUK, Impassing, Berkala dan Absensi Aparatur	12 bulan	50.000.000	52.500.000	Bagian umum, bagian organisasi		
4 01 4.01.03	33 02	Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)	Dokumen Rincian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)	1 dok	-	-	Bagian Organisasi		
4 01 4.01.03	33 03	Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan aparaturn	terlaksananya Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan aparaturn	12 bulan	100.000.000	105.000.000	Bagian Organisasi		
4 01 4.01.03	33 04	Pelaksanaan analisis beban kerja PNS	Dokumen Analisa beban Kerja	1 Dokumen	100.000.000,00	105.000.000	Bagian Organisasi		
4 01 4.01.03	33 05	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen Standar Kompetensi jabatan	1 Dokumen	50.000.000,00	52.500.000	Bagian Organisasi		
4 01 4.01.03	33 06	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Dokumen hasil evaluasi jabatan	1 Dokumen	50.000.000,00	52.500.000	Bagian Organisasi		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
		Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4 01 4.01.03 34	Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			120.000.000	126.000.000		
4 01 4.01.03 34 01	Penguatan kelembagaan komisi penanggulangan AIDS daerah	Terlaksananya Pembinaan masyarakat, pelajar dan mahasiswa tentang bahaya HIV/AIDS yang terselenggara	2 kegiatan	60.000.000	63.000.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 34 02	pengecahan pemberantasan penanggulangan peredaran gelap (P4GN)	Terlaksananya Pembinaan masyarakat, pelajar, mahasiswa dan eks. Narkoba tentang bahaya Narkoba yang terselenggara	6 kegiatan	60.000.000	63.000.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 35	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)			115.000.000	120.750.000		
4 01 4.01.03 35 01	Pembinaan/Pelatihan UKS	Terlaksananya kegiatan pembinaan sekolah yang diselenggarakan	1 kegiatan	10.000.000	10.500.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 35 02	Penunjang Operasional Sekretariat UKS	Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor Sekretariat UKS Kota Bima yang terlaksana	12 bulan	45.000.000	47.250.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 35 03	Penilaian lomba sekolah sehat (LSS)	jumlah sekolah yang dinilai	18 sekolah	60.000.000	63.000.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 36	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan			1.902.000.000	1.997.100.000		
4 01 4.01.03 36 01	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ	Perolehan Nilai Pada MTQ Tingkat Propinsi	65 poin	150.000.000	157.500.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 36 02	Pembinaan petugas keagamaan dan guru ngaji	Jumlah kegiatan Pembinaan Petugas Keagamaan dan Guru Ngaji	5 kegiatan	750.000.000	787.500.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 36 03	verifikasi dan rekomendasi bantuan sosial dan keagamaan	Prosentase Jumlah Tempat Ibadah yang mendapat bantuan	100%	72.000.000	75.600.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 36 04	Rumpun kesra	Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang terlaksana	4 kegiatan	170.000.000	178.500.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 36 07	Pengelolaan Mesjid terapan Kota Bima	Jumlah kegiatan operasional Mesjid Terapan yang terlaksana	12 bulan	300.000.000	315.000.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 36 08	Pembinaan Remaja Mesjid	Jumlah kegiatan pembinaan remaja mesjid yang terlaksana	5 kegiatan	110.000.000	115.500.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 36 09	Pembinaan Tilawah Al-Qur'an	Jumlah tahsin dan tilawah yang khatam Al-qur'an	2000 orang	150.000.000	157.500.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 36 10	Sosialisasi Perda Zakat dan Haji	Jumlah kegiatan pembinaan Perda yang terlaksana	5 kegiatan	100.000.000	105.000.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 36 11	Pembinaan Dai dan Dalayh	Jumlah kegiatan pembinaan yang terlaksana	500 orang	100.000.000	105.000.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 37	Program Pengembangan Seni dan Budaya Daerah			135.000.000	141.750.000		
4 01 4.01.03 37 01	Pelestarian Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kesenian Daerah Kota Bima	6 kegiatan	135.000.000	141.750.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 38	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan			50.000.000	52.500.000		
4 01 4.01.03 38 01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan yang terlaksana	2 kegiatan	50.000.000	52.500.000		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 39	Program Peningkatan Kesegaran Jasmani Masyarakat dan ASN			-	-		
4 01 4.01.03 39 01	Pelaksanaan Senam Sehat masyarakat dan ASN	Jumlah kegiatan senam sehat yang terlaksana	60 kegiatan	-	-		Bagian Kesra
4 01 4.01.03 40	Program Promosi Daerah			430.000.000	451.500.000		
4 01 4.01.03 40 01	Promosi daerah melalui media cetak/TV/Radio/fasilitas umum pemerintah/non pemerintah lainnya	Jumlah Promosi daerah melalui media cetak/TV/Radio/fasilitas umum pemerintah/non pemerintah lainnya	12 bulan	400.000.000	420.000.000		Bag. Humas dan Protokol
4 01 4.01.03 40 02	pameran pembangunan/promosi/investasi	terlaksananya pameran pembangunan/promosi/investasi	1 kegiatan	30.000.000	31.500.000		Bag. Humas dan Protokol
4 01 4.01.03 41	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			700.000.000	735.000.000		
4 01 4.01.03 41 01	Pelaksanaan lomba kelurahan	Terlaksananya Lomba Kelurahan	3 Kali	400.000.000	420.000.000		Bagian Administrasi Pemerintahan
4 01 4.01.03 41 02	Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	1 Kali	300.000.000	315.000.000		Bagian Administrasi Pemerintahan
4 01 4.01.03 42	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik			150.000.000	157.500.000		
4 01 4.01.03 42 01	Koordinasi/konsultasi pengendalian inflasi daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi TPID dan Perekonomian Daerah	12 bulan	150.000.000	157.500.000		Bagian Ekonomi
4 01 4.01.03 43	Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat			150.000.000	157.500.000		
4 01 4.01.03 43 01	Koordinasi dan pengawasan pendistribusian BBM dan gas elpiji	Terlaksananya Koordinasi dan pengawasan pendistribusian BBM dan gas elpiji	12 bulan	150.000.000	157.500.000		Bagian Ekonomi
4 01 4.01.03 44	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah			200.000.000,00	210.000.000		
4 01 4.01.03 44 01	Pemetaan Kelembagaan Daerah	Terlaksananya Pemetaan Kelembagaan Daerah	1 kegiatan	50.000.000,00	52.500.000		Bagian Organisasi

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
				Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.03	44	02	Asistansi Kelembagaan Daerah	Terlaksananya pembinaan kelembagaan perangkat daerah	1 kegiatan	50.000.000,00	52.500.000		Bagian Organisasi
4 01 4.01.03	44	03	Penyusunan Profil Kelembagaan	Dokumen Profil Perangkat daerah, kecamatan kelurahan dan UPDT	4 dokumen	50.000.000,00	52.500.000		Bagian Organisasi
4 01 4.01.03	44	04	Evaluasi kelembagaan perangkat Daerah	adanya hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 kegiatan	50.000.000,00	52.500.000		Bagian Organisasi
4 01 4.01.03	44	05	Evaluasi kelembagaan unit pelaksana Teknis Daerah	adanya hasil evaluasi kelembagaan UPDT	1 kegiatan	-	-		Bagian Organisasi
4 01 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD					15.507.770.000	16.283.158.500		
4 01 4.01.04 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					2.979.125.000	3.128.081.250		
4 01 4.01.04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	48 rek telepon/inter net, 24 meteran	347.500.000	364.875.000	Lama	
4 01 4.01.04	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	Roda 4 : 8 unit, Roda 2 : 10 unit	65.000.000	68.250.000	Lama	
4 01 4.01.04	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	5 orang jasa keuangan, 9 orang honorer	230.264.000	241.777.200	Lama	
4 01 4.01.04	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	100%	120.300.000	126.315.000	Lama	
4 01 4.01.04	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 paket	107.656.000	113.038.800	Lama	
4 01 4.01.04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	1 paket	193.500.000	203.175.000	Lama	
4 01 4.01.04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	1paket	15.000.000	15.750.000	Lama	
4 01 4.01.04	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai.	1 paket	25.650.000	26.932.500	Lama	
4 01 4.01.04	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	30eks koran lokal, 20 eks koran regional	36.000.000	37.800.000	Lama	
4 01 4.01.04	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	12 Bulan	720.800.000	756.840.000	Lama	
4 01 4.01.04	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	1 tahun	1.067.455.000	1.120.827.750	Lama	
4 01 4.01.04	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	1 tahun	50.000.000	52.500.000	Lama	
4 01 4.01.04 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					862.770.000	905.908.500		
4 01 4.01.04	02	03	Pembangunan gedung kantor		0	-	-	Lama	
4 01 4.01.04	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			494.770.000	519.508.500	Lama	
4 01 4.01.04	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	30.000.000	31.500.000	Lama	
4 01 4.01.04	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Roda 4 : 8 unit, Roda 2 : 10 unit	295.000.000	309.750.000	Lama	
4 01 4.01.04	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	25 Unit	28.000.000	29.400.000	Lama	
4 01 4.01.04	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20 Unit	15.000.000	15.750.000	Lama	
4 01 4.01.04 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					435.790.000	457.579.500		
4 01 4.01.04	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	63 stel	374.790.000	393.529.500	Lama	
4 01 4.01.04	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	63 stel	61.000.000	64.050.000	Lama	
4 01 4.01.04 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					5.140.000.000	5.397.000.000		
4 01 4.01.04	05	04	Konsultasi dan studi banding	Jumlah Konsultasi dan studi banding	4 kali	4.790.000.000	5.029.500.000	Lama	
4 01 4.01.04	05	06	Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah	Jumlah Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah	10 Kali	350.000.000	367.500.000	Lama	
4 01 4.01.04 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					147.250.000	154.612.500		
4 01 4.01.04	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia	1 Dokumen	18.500.000	19.425.000	Lama	
4 01 4.01.04	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dokumen	91.500.000	96.075.000	Lama	
4 01 4.01.04	06	06	Penyusunan LAKIP, LPI dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Dokumen	37.250.000	39.112.500	Lama	
4 01 4.01.04 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					5.942.835.000	6.239.976.750		
4 01 4.01.04	07	01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Pembahasan rancangan peraturan daerah	12 Kali	558.560.000	586.488.000	Lama	
4 01 4.01.04	07	02	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	4 Kali	1.196.600.000	1.256.430.000	Lama	
4 01 4.01.04	07	03	Rapat-rapat paripurna	Jumlah Rapat-rapat paripurna	2 Kali	220.175.000	231.183.750	Lama	
4 01 4.01.04	07	04	Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses	3 Kali	2.392.500.000	2.512.125.000	Lama	
4 01 4.01.04	07	05	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah kunjungan pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	4 kali	1.575.000.000	1.653.750.000		
4 01 4.01.05	KECAMATAN RASANA E BARAT					2.418.800.000	2.539.740.000		
4 01 4.01.05 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					650.500.000	683.025.000		

KODE REKENING			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT							
					Tolak Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4 01	4.01.05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan untuk 6 kelurahan dan kantor	71.000.000	74.550.000	Lama			
4 01	4.01.05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertzinaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	7 unit	31.000.000	32.550.000	Lama			
4 01	4.01.05	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	12 Bulan	102.500.000	107.625.000	Lama			
4 01	4.01.05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	100%	42.000.000	44.100.000	Lama			
4 01	4.01.05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	32 jenis,12 Bulan	70.000.000	73.500.000	Lama			
4 01	4.01.05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	12 Bulan	45.000.000	47.250.000	Lama			
4 01	4.01.05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	10 jenis	23.000.000	24.150.000	Lama			
4 01	4.01.05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	3 media, 12 bulan	17.000.000	17.850.000	Lama			
4 01	4.01.05	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12 bulan	22.000.000	23.100.000	Lama			
4 01	4.01.05	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	4 jenis,12 Bulan	37.000.000	38.850.000	Lama			
4 01	4.01.05	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 Bulan	165.000.000	173.250.000	Lama			
4 01	4.01.05	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 Bulan	25.000.000	26.250.000	Lama			
4 01	4.01.05	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			311.200.000	326.760.000				
4 01	4.01.05	02	22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 paket/6 kel	70.000.000	73.500.000				
4 01	4.01.05	02	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 paket/6 kel	70.000.000	73.500.000				
4 01	4.01.05	02	28	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	1 paket/6 kel	70.000.000	73.500.000				
4 01	4.01.05	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	1 paket/6 kel	33.700.000	35.385.000	Lama			
4 01	4.01.05	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 paket/6 kel	47.000.000	49.350.000	Lama			
4 01	4.01.05	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	1 paket/6 kel	20.500.000	21.525.000	Lama			
4 01	4.01.05	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			55.000.000	57.750.000				
4 01	4.01.05	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	1 paket/6 kel	55.000.000	57.750.000	Lama			
4 01	4.01.05	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			20.000.000	21.000.000				
4 01	4.01.05	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Dok	4.000.000	4.200.000	Lama			
4 01	4.01.05	06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD tersedia	1 Dok	4.000.000	4.200.000	Lama			
4 01	4.01.05	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dok	8.000.000	8.400.000	Lama			
4 01	4.01.05	06	06	Penyusunan LAKIP, LPI dan LPPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD	2 Dok	4.000.000	4.200.000				
4 01	4.01.05	15		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN			357.100.000	374.955.000				
4 01	4.01.05	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	RT,RW,LPM di 6 kel	323.100.000	339.255.000	Lama			
4 01	4.01.05	15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Penyediaan sarana prasarana gotong royong kebersihan di kelurahan	5 kali/kel	34.000.000	35.700.000	sedang berjalan			38 KELURAHAN
4 01	4.01.05	16		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASA KEPALA DAERAH			60.000.000	63.000.000				
4 01	4.01.05	16	05	Kunjungan kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah	Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah	6 kali/6 kel	60.000.000	63.000.000	Lama			
4 01	4.01.05	17		PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA			369.000.000	387.450.000				
4 01	4.01.05	17	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Tk kecamatan dan 6 kel	140.000.000	147.000.000	Lama			
4 01	4.01.05	17	05	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Tk kecamatan dan 6 kel	117.000.000	122.850.000	Lama			
4 01	4.01.05	17	08	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	Jumlah Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	Tk kecamatan dan 6 kel	97.000.000	101.850.000	Lama			
4 01	4.01.05	17	11	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Tk kecamatan	15.000.000	15.750.000	Lama			
4 01	4.01.05	19		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN			110.000.000	115.500.000				
4 01	4.01.05	19	02	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	6 kel	110.000.000	115.500.000				
4 01	4.01.05	20		PROGRAM PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			30.000.000	31.500.000				
4 01	4.01.05	20	01	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah dokumen Profil Kelurahan yang tersusun	6 dok/ 6 kel	30.000.000	31.500.000	Lama			
4 01	4.01.05	27		PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU			50.000.000	52.500.000				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT							
					Tolak Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4 01 4.01.05	27	09	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	Jumlah Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	di kec dan 6 kel	25.000.000	26.250.000	Lama				
4 01 4.01.05	27	11	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	di kec dan 6 kel	25.000.000	26.250.000	Lama				
4 01 4.01.05	28		PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			60.000.000	63.000.000					
4 01 4.01.05	28		Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	jumlah UKBM yang dibina	6 kelurahan	60.000.000	63.000.000					
4 01 4.01.05	31		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT			346.000.000	363.300.000					
4 01 4.01.05	31	01	Koordinasi peringatan hari besar (keagamaan dan nasional)	Peringatan hari HUT Kota Bima dan HUT RI	kec/6 kel	36.000.000	37.800.000					
4 01 4.01.05	31	06	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ	Tk kecamatan dan 6 kel	310.000.000	325.500.000	Lama				
4 01 4.01.06	KECAMATAN RASANA E TIMUR						2.921.500.000	#REF!				
4 01 4.01.06	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			779.100.000	818.055.000					
4 01 4.01.06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan untuk 6 kelurahan dan kantor	89.000.000	93.450.000	Lama				
4 01 4.01.06	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	1 mobil/ 8 unit motor	36.000.000	37.800.000	Lama				
4 01 4.01.06	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	12 Bulan	127.100.000	133.455.000	Lama				
4 01 4.01.06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	100%	46.000.000	48.300.000	Lama				
4 01 4.01.06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	32 jenis,12 Bulan	85.000.000	89.250.000	Lama				
4 01 4.01.06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	12 Bulan	55.000.000	57.750.000	Lama				
4 01 4.01.06	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	10 jenis	29.000.000	30.450.000	Lama				
4 01 4.01.06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	3 media, 12 bulan	21.000.000	22.050.000	Lama				
4 01 4.01.06	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12 bulan	26.000.000	27.300.000	Lama				
4 01 4.01.06	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	4 jenis,12 Bulan	45.000.000	47.250.000	Lama				
4 01 4.01.06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 Bulan	195.000.000	204.750.000	Lama				
4 01 4.01.06	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah.	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 Bulan	25.000.000	26.250.000	Lama				
4 01 4.01.06	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			388.200.000	407.610.000					
4 01 4.01.06	02	22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 paket/8 kel	90.000.000	94.500.000					
4 01 4.01.06	02	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 paket/8 kel	90.000.000	94.500.000					
4 01 4.01.06	02	28	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	1 paket/8 kel	90.000.000	94.500.000					
4 01 4.01.06	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	1 paket/8 kel	38.700.000	40.635.000	Lama				
4 01 4.01.06	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 paket/8 kel	55.000.000	57.750.000	Lama				
4 01 4.01.06	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	1 paket/8 kel	24.500.000	25.725.000	Lama				
4 01 4.01.06	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			70.000.000	73.500.000					
4 01 4.01.06	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	1 pa8ket/ kel	70.000.000	73.500.000	Lama				
4 01 4.01.06	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			20.000.000	21.000.000					
4 01 4.01.06	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Dok	4.000.000	4.200.000	Lama				
4 01 4.01.06	06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD tersedia	1 Dok	4.000.000	4.200.000	Lama				
4 01 4.01.06	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dok	8.000.000	8.400.000	Lama				
4 01 4.01.06	06	06	Penyusunan LAKIP, LPI dan LPPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD	2 Dok	4.000.000	4.200.000					
4 01 4.01.06	15		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN			399.200.000	419.160.000					
4 01 4.01.06	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	RT,RW,LPM di 8 kel	355.200.000	372.960.000	Lama				
4 01 4.01.06	15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Penyediaan sarana prasarana gotong royong kebersihan di kelurahan	5 kali/kel	44.000.000	46.200.000	sedang berjalan	38 KELURAHAN			
4 01 4.01.06	16		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASA KEPALA DAERAH			80.000.000	84.000.000					
4 01 4.01.06	16	05	Kunjungan kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah	Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah	8 kali/8 kel	80.000.000	84.000.000	Lama				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
				Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4 01 4.01.06 17	PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA					447.000.000	469.350.000		
4 01 4.01.06 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa			Jumlah Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Tk kecamatan dan 8 kel	170.000.000	178.500.000	Lama	
4 01 4.01.06 17 05	Pelaksanaan Lomba Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Tk kecamatan dan 8 kel	141.000.000	148.050.000	Lama	
4 01 4.01.06 17 08	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga			Jumlah Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	Tk kecamatan dan 8 kel	121.000.000	127.050.000	Lama	
4 01 4.01.06 17 11	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Tk kecamatan	15.000.000	15.750.000	Lama	
4 01 4.01.06 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN					140.000.000	147.000.000		
4 01 4.01.06 15 02	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan			Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	8 kel	140.000.000	147.000.000		
4 01 4.01.06 20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					40.000.000	42.000.000		
4 01 4.01.06 20 01	Penyusunan Profil Kelurahan			Jumlah dokumen Profil Kelurahan yang tersusun	8 dok/ 8 kel	40.000.000	42.000.000	Lama	
4 01 4.01.06 27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU					50.000.000	52.500.000		
4 01 4.01.06 27 09	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan			Jumlah Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	di kec dan 8 kel	25.000.000	26.250.000	Lama	
4 01 4.01.06 27 11	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan			Jumlah Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	di kec dan 8 kel	25.000.000	26.250.000	Lama	
4 01 4.01.06 28	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					80.000.000	84.000.000		
4 01 4.01.06 28	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat			jumlah UKBM yang dibina	8 kelurahan	80.000.000	84.000.000		
4 01 4.01.06 31	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT					428.000.000	449.400.000		
4 01 4.01.06 31 01	Koordinasi peringatan hari besar (keagamaan dan nasional)			Peringatan hari HUT Kota Bima dan HUT RI	kec/6 kel	48.000.000	50.400.000		
4 01 4.01.06 31 06	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ			Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ	Tk kecamatan dan 6 kel	380.000.000	399.000.000	Lama	
4 01 4.01.07	KECAMATAN ASAKOTA					2.630.200.000	2.761.710.000		
4 01 4.01.05 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					695.500.000	730.275.000		
4 01 4.01.05 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan untuk 6 kelurahan dan kantor	71.000.000	74.550.000	Lama	
4 01 4.01.05 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	7 unit	31.000.000	32.550.000	Lama	
4 01 4.01.05 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	12 Bulan	147.500.000	154.875.000	Lama	
4 01 4.01.05 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Cakupan ruang kantor yang bersih	100%	42.000.000	44.100.000	Lama	
4 01 4.01.05 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	32 jenis,12 Bulan	70.000.000	73.500.000	Lama	
4 01 4.01.05 01 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan			Jumlah cetakan dan pengadaan	12 Bulan	45.000.000	47.250.000	Lama	
4 01 4.01.05 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	10 jenis	23.000.000	24.150.000	Lama	
4 01 4.01.05 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	3 media, 12 bulan	17.000.000	17.850.000	Lama	
4 01 4.01.05 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor			Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12 bulan	22.000.000	23.100.000	Lama	
4 01 4.01.05 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	4 jenis,12 Bulan	37.000.000	38.850.000	Lama	
4 01 4.01.05 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 Bulan	165.000.000	173.250.000	Lama	
4 01 4.01.05 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah			Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 Bulan	25.000.000	26.250.000	Lama	
4 01 4.01.05 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					311.200.000	326.760.000		
4 01 4.01.05 02 22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 paket/6 kel	70.000.000	73.500.000		
4 01 4.01.05 02 24	Pengadaan peralatan gedung kantor			Jumlah peralatan gedung kantor	1 paket/6 kel	70.000.000	73.500.000		
4 01 4.01.05 02 28	Pengadaan mebeleur			Jumlah mebeleur	1 paket/6 kel	70.000.000	73.500.000		
4 01 4.01.05 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	1 paket/6 kel	33.700.000	35.385.000	Lama	
4 01 4.01.05 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 paket/6 kel	47.000.000	49.350.000	Lama	
4 01 4.01.05 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	1 paket/6 kel	20.500.000	21.525.000	Lama	
4 01 4.01.05 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					55.000.000	57.750.000		
4 01 4.01.05 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	1 paket/6 kel	55.000.000	57.750.000	Lama	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT							
					Tolak Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4 01 4.01.05 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						20.000.000	21.000.000				
4 01 4.01.05 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Dok	4.000.000	4.200.000	Lama			
4 01 4.01.05 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD tersedia	1 Dok	4.000.000	4.200.000	Lama			
4 01 4.01.05 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dok	8.000.000	8.400.000	Lama			
4 01 4.01.05 06 06	Penyusunan LAKIP, LPI dan LPPD				Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD	2 Dok	4.000.000	4.200.000				
4 01 4.01.05 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN						488.500.000	512.925.000				
4 01 4.01.05 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan				Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	RT,RW/LPM di 6 kel	454.500.000	477.225.000	Lama			
4 01 4.01.05 15 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan				Penyediaan sarana prasarana gotong royong kebersihan di kelurahan	5 kali/ kel	34.000.000	35.700.000	sedang berjalan		38	KELURAHAN
4 01 4.01.05 16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASA KEPALA DAERAH						60.000.000	63.000.000				
4 01 4.01.05 16 05	Kunjungan kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah				Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah	6 kali/6 kel	60.000.000	63.000.000	Lama			
4 01 4.01.05 17	PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA						369.000.000	387.450.000				
4 01 4.01.05 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				Jumlah Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Tk kecamatan dan 6 kel	140.000.000	147.000.000	Lama			
4 01 4.01.05 17 05	Pelaksanaan Lomba Kelurahan				Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Tk kecamatan dan 6 kel	117.000.000	122.850.000	Lama			
4 01 4.01.05 17 08	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga				Jumlah Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	Tk kecamatan dan 6 kel	97.000.000	101.850.000	Lama			
4 01 4.01.05 17 11	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)				Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Tk kecamatan	15.000.000	15.750.000	Lama			
4 01 4.01.05 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN						145.000.000	152.250.000				
4 01 4.01.05 19 02	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan				Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	6 kel	145.000.000	152.250.000				
4 01 4.01.05 20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						30.000.000	31.500.000				
4 01 4.01.05 20 01	Penyusunan Profil Kelurahan				Jumlah dokumen Profil Kelurahan yang tersusun	6 dok/ 6 kel	30.000.000	31.500.000	Lama			
4 01 4.01.05 27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU						50.000.000	52.500.000				
4 01 4.01.05 27 09	Pendataan dan pemutakhiran data kependudukan dan pertanahan				Jumlah Pendataan dan pemutakhiran data kependudukan dan pertanahan	di kec dan 6 kel	25.000.000	26.250.000	Lama			
4 01 4.01.05 27 11	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan				Jumlah Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	di kec dan 6 kel	25.000.000	26.250.000	Lama			
4 01 4.01.05 28	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						60.000.000	63.000.000				
4 01 4.01.05 28	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat				jumlah UKBM yang dibina	6 kelurahan	60.000.000	63.000.000				
4 01 4.01.05 31	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT						346.000.000	363.300.000				
4 01 4.01.05 31 01	Koordinasi peringatan hari besar (keagamaan dan nasional)				Peringatan hari HUT Kota Bima dan HUT RI	kec/6 kel	36.000.000	37.800.000				
4 01 4.01.05 31 06	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ				Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ	Tk kecamatan dan 6 kel	310.000.000	325.500.000	Lama			
4 01 4.01.08	KECAMATAN MPUNDA						3.713.000.000	3.898.650.000				
4 01 4.01.08 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						940.400.000	987.420.000				
4 01 4.01.08 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan untuk 10 kelurahan dan kantor	107.000.000	112.350.000	Lama			
4 01 4.01.08 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	11 unit	41.000.000	43.050.000	Lama			
4 01 4.01.08 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	12 Bulan	184.400.000	193.620.000	Lama			
4 01 4.01.08 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Cakupan ruang kantor yang bersih	100%	50.000.000	52.500.000	Lama			
4 01 4.01.08 01 10	Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	32 jenis,12 Bulan	100.000.000	105.000.000	Lama			
4 01 4.01.08 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah cetakan dan penggandaan	12 Bulan	65.000.000	68.250.000	Lama			
4 01 4.01.08 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	10 jenis	35.000.000	36.750.000	Lama			
4 01 4.01.08 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	3 media, 12 bulan	25.000.000	26.250.000	Lama			
4 01 4.01.08 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor				Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12 bulan	30.000.000	31.500.000	Lama			
4 01 4.01.08 01 17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	4 jenis,12 Bulan	53.000.000	55.650.000	Lama			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
				Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4 01 4.01.08 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 Bulan	225.000.000	236.250.000	Lama			
4 01 4.01.08 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 Bulan	25.000.000	26.250.000	Lama			
4 01 4.01.08 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			465.200.000	488.460.000				
4 01 4.01.08 02 22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 paket/10 kel	110.000.000	115.500.000				
4 01 4.01.08 02 24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 paket/10 kel	110.000.000	115.500.000				
4 01 4.01.08 02 28	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	1 paket/10 kel	110.000.000	115.500.000				
4 01 4.01.08 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	1 paket/10 kel	43.700.000	45.885.000	Lama			
4 01 4.01.08 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 paket/10 kel	63.000.000	66.150.000	Lama			
4 01 4.01.08 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	1 paket/10 kel	28.500.000	29.925.000	Lama			
4 01 4.01.08 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			85.000.000	89.250.000				
4 01 4.01.08 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	1 paket/10 kel	85.000.000	89.250.000	Lama			
4 01 4.01.08 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			20.000.000	21.000.000				
4 01 4.01.08 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Dok	4.000.000	4.200.000	Lama			
4 01 4.01.08 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD tersedia	1 Dok	4.000.000	4.200.000	Lama			
4 01 4.01.08 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dok	8.000.000	8.400.000	Lama			
4 01 4.01.08 06 06	Penyusunan LAKIP, LPI dan LPPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD	2 Dok	4.000.000	4.200.000				
4 01 4.01.08 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN			747.400.000	784.770.000				
4 01 4.01.08 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	RT,RW,LPM di 10 kel	693.400.000	728.070.000	Lama			
4 01 4.01.08 15 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Penyediaan sarana prasarana gotong royong kebersihan di kelurahan	5 kali/kel	54.000.000	56.700.000	sedang berjalan		38 KELURAHAN	
4 01 4.01.08 16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASA KEPALA DAERAH			100.000.000	105.000.000				
4 01 4.01.08 16 05	Kunjungan kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah	Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah	6 kali/10 kel	100.000.000	105.000.000	Lama			
4 01 4.01.08 17	PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA			525.000.000	551.250.000				
4 01 4.01.08 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Tk kecamatan dan 10 kel	200.000.000	210.000.000	Lama			
4 01 4.01.08 17 05	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Tk kecamatan dan 10 kel	165.000.000	173.250.000	Lama			
4 01 4.01.08 17 08	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	Jumlah Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	Tk kecamatan dan 10 kel	145.000.000	152.250.000	Lama			
4 01 4.01.08 17 11	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Tk kecamatan	15.000.000	15.750.000	Lama			
4 01 4.01.08 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN			170.000.000	178.500.000				
4 01 4.01.08 15 02	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	10 kel	170.000.000	178.500.000				
4 01 4.01.08 20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			50.000.000	52.500.000				
4 01 4.01.08 20 01	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah dokumen Profil Kelurahan yang tersusun	10 dok/ 10 kel	50.000.000	52.500.000	Lama			
4 01 4.01.08 27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU			50.000.000	52.500.000				
4 01 4.01.08 27 09	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	Jumlah Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	di kec dan 10 kel	25.000.000	26.250.000	Lama			
4 01 4.01.08 27 11	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	di kec dan 10 kel	25.000.000	26.250.000	Lama			
4 01 4.01.08 28	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			100.000.000	105.000.000				
4 01 4.01.08 28	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	jumlah UKBM yang dibina	10 kelurahan	100.000.000	105.000.000				
4 01 4.01.08 31	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT			460.000.000	483.000.000				
4 01 4.01.08 31 01	Koordinasi peringatan hari besar (keagamaan dan nasional)	Peringatan hari HUT Kota Bima dan HUT RI	kec/10 kel	60.000.000	63.000.000				
4 01 4.01.08 31 06	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ	Tk kecamatan dan 10 kel	400.000.000	420.000.000	Lama			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
		Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4 01 4.01.09	KECAMATAN RABA			3.849.500.000	4.041.975.000		
4 01 4.01.09 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.035.400.000	1.087.170.000		
4 01 4.01.09 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan untuk 11 kelurahan dan kantor	116.000.000	121.800.000	Lama	
4 01 4.01.09 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	12 unit	43.500.000	45.675.000	Lama	
4 01 4.01.09 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan.	12 Bulan	227.400.000	238.770.000	Lama	
4 01 4.01.09 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	100%	52.000.000	54.600.000	Lama	
4 01 4.01.09 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	32 jenis,12 Bulan	107.500.000	112.875.000	Lama	
4 01 4.01.09 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	12 Bulan	70.000.000	73.500.000	Lama	
4 01 4.01.09 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	10 jenis	38.000.000	39.900.000	Lama	
4 01 4.01.09 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	3 media, 12 bulan	27.000.000	28.350.000	Lama	
4 01 4.01.09 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12 bulan	32.000.000	33.600.000	Lama	
4 01 4.01.09 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	4 jenis,12 Bulan	57.000.000	59.850.000	Lama	
4 01 4.01.09 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 Bulan	240.000.000	252.000.000	Lama	
4 01 4.01.09 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 Bulan	25.000.000	26.250.000	Lama	
4 01 4.01.09 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			503.700.000	528.885.000		
4 01 4.01.09 02 22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 paket/11 kel	120.000.000	126.000.000		
4 01 4.01.09 02 24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 paket/11 kel	120.000.000	126.000.000		
4 01 4.01.09 02 28	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	1 paket/11 kel	120.000.000	126.000.000		
4 01 4.01.09 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	1 paket/11 kel	46.200.000	48.510.000	Lama	
4 01 4.01.09 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 paket/11 kel	67.000.000	70.350.000	Lama	
4 01 4.01.09 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	1 paket/11 kel	30.500.000	32.025.000	Lama	
4 01 4.01.09 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			92.500.000	97.125.000		
4 01 4.01.09 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	1 paket/11 kel	92.500.000	97.125.000	Lama	
4 01 4.01.09 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			20.000.000	21.000.000		
4 01 4.01.09 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Dok	4.000.000	4.200.000	Lama	
4 01 4.01.09 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD tersedia	1 Dok	4.000.000	4.200.000	Lama	
4 01 4.01.09 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dok	8.000.000	8.400.000	Lama	
4 01 4.01.09 06 06	Penyusunan LAKIP, LPI dan LPPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD	2 Dok	4.000.000	4.200.000		
4 01 4.01.09 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN			572.900.000	601.545.000		
4 01 4.01.09 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	RT,RW,LPM di 11 kel	513.900.000	539.595.000	Lama	
4 01 4.01.09 15 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Penyediaan sarana prasarana gotong royong kebersihan di kelurahan	5 kali/ke	59.000.000	61.950.000	sedang berjalan	38 KELURAHAN
4 01 4.01.09 16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASA KEPALA DAERAH			110.000.000	115.500.000		
4 01 4.01.09 16 05	Kunjungan kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah	Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah	6 kali/11 kel	110.000.000	115.500.000	Lama	
4 01 4.01.09 17	PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA			564.000.000	592.200.000		
4 01 4.01.09 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Tk kecamatan dan 11 kel	215.000.000	225.750.000	Lama	
4 01 4.01.09 17 05	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Tk kecamatan dan 11 kel	177.000.000	185.850.000	Lama	
4 01 4.01.09 17 08	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	Jumlah Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	Tk kecamatan dan 11 kel	157.000.000	164.850.000	Lama	
4 01 4.01.09 17 11	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Tk kecamatan	15.000.000	15.750.000	Lama	
4 01 4.01.09 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN			185.000.000	194.250.000		
4 01 4.01.09 19 02	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	11 kel	185.000.000	194.250.000		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
				Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4 01 4.01.09	20		PROGRAM PENINGKATAN SARANA / PRASARANA DAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			55.000.000	57.750.000		
4 01 4.01.09	20	01	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah dokumen Profil Kelurahan yang tersusun	11 dok/ 11 kel	55.000.000	57.750.000	Lama	
4 01 4.01.09	27		PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU			50.000.000	52.500.000		
4 01 4.01.09	27	09	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	Jumlah Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	di kec dan 11 kel	25.000.000	26.250.000	Lama	
4 01 4.01.09	27	11	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	di kec dan 11 kel	25.000.000	26.250.000	Lama	
4 01 4.01.09	28		PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			110.000.000	115.500.000		
4 01 4.01.09	28		Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	jumlah UKBM yang dibina	11 kelurahan	110.000.000	115.500.000		
4 01 4.01.09	31		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT			551.000.000	578.550.000		
4 01 4.01.09	31	01	Koordinasi peringatan hari besar (keagamaan dan nasional)	Peringatan hari HUT Kota Bima dan HUT RI	kec/11 kel	66.000.000	69.300.000		
4 01 4.01.09	31	06	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ	Tk kecamatan dan 11 kel	485.000.000	509.250.000	Lama	
4 01 4.01.14			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			6.143.092.300	6.450.246.915		
4 01 4.01.14	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			799.100.900	839.055.945		
4 01 4.01.14	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan	85.000.000	89.250.000		
4 01 4.01.14	01	02	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	44.400.000	46.620.000		
4 01 4.01.14	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, stnk dan bpkb)	3 Kendaraan roda 4 & 3 Kendaraan roda 2	15.000.000	15.750.000		
4 01 4.01.14	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	83.000.000	87.150.000		
4 01 4.01.14	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	15.382.000	16.151.100		
4 01 4.01.14	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	47.049.900	49.402.395		
4 01 4.01.14	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	26.240.000	27.552.000		
4 01 4.01.14	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	6 jenis komponen	8.029.000	8.430.450		
4 01 4.01.14	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan makan dan minum (pecah belah)	1 Pelayanan	8.000.000	8.400.000		
4 01 4.01.14	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	27.000.000	28.350.000		
4 01 4.01.14	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat - rapat koordinasi di tingkat propinsi dan pusat	12 Bulan	400.000.000	420.000.000		
4 01 4.01.14	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah			40.000.000	42.000.000		
4 01 4.01.14	02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			794.450.000	834.172.500		
4 01 4.01.14	02	03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang memadai	3 Paket	500.000.000	525.000.000		
4 01 4.01.14	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	4 Jenis	21.150.000	22.207.500		
4 01 4.01.14	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	3 Jenis	41.650.000	43.732.500		
4 01 4.01.14	02	10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	3 Jenis	21.650.000	22.732.500		
4 01 4.01.14	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			10.000.000	10.500.000		
4 01 4.01.14	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	12 Bulan	175.000.000	183.750.000		
4 01 4.01.14	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	12 Bulan	25.000.000	26.250.000		
4 01 4.01.14	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			64.650.000	67.882.500		
4 01 4.01.14	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	30 Set	34.650.000	36.382.500		
4 01 4.01.14	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	30 Set	30.000.000	31.500.000		
4 01 4.01.14	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			100.500.000	105.525.000		
4 01 4.01.14	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Dokumen laporan keuangan	1 Dokumen	8.000.000	8.400.000		
4 01 4.01.14	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun (Neraca, CALK, LRA)	3 Dokumen	12.000.000	12.600.000		
4 01 4.01.14	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja/RKA/DPA/DPPA SKPD	5 Dokumen	55.000.000	57.750.000		
4 01 4.01.14	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Tersedianya Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	25.500.000	26.775.000		
4 01 4.01.14	07		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			70.000.000	73.500.000		
4 01 4.01.14	07	07	Penyusunan dan penerbitan Produk Hukum Daerah	Tersedianya Produk hukum daerah	2 Perwali	70.000.000	73.500.000		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
				Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4 01 4.01.14 08	Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana					1.061.391.400	1.114.460.970		
4 01 4.01.14 08 01	Diklat dan penyuluhan kepada SKPD terkait	Peningkatan pemahaman tentang paradigma penanggulangan bencana	50 SKPD	133.614.200	140.294.910				
4 01 4.01.14 08 02	Diklat dan Penyuluhan Kepada anggota masyarakat (tatap muka, brosur, leaflet)	Peningkatan pemahaman tentang paradigma penanggulangan bencana kepada masyarakat	360 Orang	131.724.000	138.310.200				
4 01 4.01.14 08 03	Diklat dan penyuluhan kepada Tim Penanggulangan bencana(TRC, Tagana, Tim Sar, dll)	Peningkatan pemahaman tentang paradigma penanggulangan bencana kepada Tim PB	70 Orang	146.053.200	153.355.860				
4 01 4.01.14 08 04	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Penanggulangan bencana	Peningkatan peran PB bagi Pemerintah, Swasta dan masyarakat	4 Kelompok	650.000.000	682.500.000				
4 01 4.01.14 09	Program Penanggulangan Bencana/Pencegahan Bencana					300.000.000	315.000.000		
4 01 4.01.14 09 14	Mitigasi Bencana	Berkurangnya genangan air hujan	30 titik	300.000.000	315.000.000				
4 01 4.01.14 10	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana					55.000.000	57.750.000		
4 01 4.01.14 10 01	Pengadaan sarana prasarana dan penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya penanggulangan bencana	10 bh HT dan 4 Rak barang	55.000.000	57.750.000				
4 01 4.01.14 11	Program Pengkajian Secara Cepat Dan Tepat					85.000.000	89.250.000		
4 01 4.01.14 11 01	Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban	Terpenuhinya informasi cakupan lokasi dan jumlah korban bencana	1 Dokumen	40.000.000	42.000.000				
4 01 4.01.14 11 02	Analisa Kerusakan sarana dan prasarana	Terpenuhinya Informasi dad data tentang kerusakan sarana prasara sebagai bahan koordinasi lintas sektor	1 Dok	45.000.000	47.250.000				
4 01 4.01.14 12	Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar					150.000.000	157.500.000		
4 01 4.01.14 12 01	Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi	Tercukupinya kebutuhan air bersih dan sanitasi saat terjadi bencana kekeringan		100.000.000	105.000.000				
4 01 4.01.14 12 02	Pemenuhan sandang dan pangan	Tercukupinya kebutuhan sandang pangan bagi korban bencana	3 Jenis	50.000.000	52.500.000				
4 01 4.01.14 13	Program Rehabilitasi					433.000.000	454.650.000		
4 01 4.01.14 13 01	Monitoring dan evaluasi	TersedianyaDokumen Monev	1 dok	83.000.000	87.150.000				
4 01 4.01.14 13 02	Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum	Pendampingan (AP) dana RR BNPB		350.000.000	367.500.000				
4 01 4.01.14 14	Program Rekonstruksi					450.000.000	472.500.000		
4 01 4.01.14 14 01	Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pasca bencana	50%	100.000.000	105.000.000				
4 01 4.01.14 14 02	Pembangunan Kembali Sarana dan Parasarana Umum	Pendampingan (AP) dana RR BNPB		350.000.000	367.500.000				
4 01 4.01.14 15	Program Kesiapsiagaan					1.200.000.000	1.260.000.000		
4 01 4.01.14 15 01	Gladi tentang mekanisme tanggap darurat	Terlatihnya personil PB sesuai Protap yang disusun	50 Personil 2 kali	100.000.000	105.000.000				
4 01 4.01.14 15 02	Pembentukan Kelurahan Tangguh	Terbentuknya kelurahan tangguh	13 Kelurahan	1.100.000.000	1.155.000.000				
4 01 4.01.14 16	Program Peringatan Dini					580.000.000	609.000.000		
4 01 4.01.14 16 01	Mengamati gejala bencana	Tersedianya System peringatan dini yang terkoneksi	1 Paket	300.000.000	315.000.000				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
4 01 4.01.14 16 02	Menyebarkan luaskan Informasi potensi bencana				Tersebar nya informasi potensi bencana di Kota Bima	38 Kelurahan	180.000.000	189.000.000		
4 01 4.01.14 16 03	Program peningkatan pengelolaan pergudangan dan logistik						50.000.000	52.500.000		
4 01 4.01.14 16 04	Manajemen Logistik dan pergudangan				Terpeliharanya dan tersedianya barang logistik dan pergudangan		50.000.000	52.500.000		
4 02	PENGAWASAN						3.750.951.500	3.938.499.075		
4 02 4.02.01	INSPEKTORAT						3.750.951.500	3.938.499.075		
4 01 4.02.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						756.536.500	794.363.325		
4 01 4.02.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah surat keluar	150 lembar	60.880.000,00	63.924.000	Lama	757.444.975,00
					Materai yang tersedia selama 1 tahun	1400 lembar	-	-		52.783.100,00
					Jasa pengiriman/paket	20 paket	-	-		64.200.000,00
4 01 4.02.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	20.811.500,00	21.852.075	Lama	191.316.000,00
4 01 4.02.01 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 Bulan	4.700.000,00	4.935.000	Lama	320.649.575,00
4 01 4.02.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik	12 Bulan	7.000.000,00	7.350.000	Lama	143.727.750,00
4 01 4.02.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	12 Bulan	60.225.000,00	63.236.250	Lama	2.141.583.600,00
4 01 4.02.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Cakupan ruang kantor yang bersih	100%	64.000.000,00	67.200.000	Lama	189.582.600,00
4 01 4.02.01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah perbaikan peralatan kerja yang tersedia	12 unit	6.420.000,00	6.741.000	Lama	26.750.000,00
4 01 4.02.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1485 bh/PCS/Rim	42.500.000,00	44.625.000	Lama	29.425.000,00
4 01 4.02.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan				Jumlah cetakan dan pengadaan	155.000 lbr	32.800.000,00	34.440.000	Lama	20.330.000,00
4 01 4.02.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	6 media	13.900.000,00	14.595.000	Lama	3.937.792.600
4 01 4.02.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	85 orang	43.300.000,00	45.465.000	Lama	
4 01 4.02.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah laporan hasil rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.	20 laporan	400.000.000,00	420.000.000	Lama	
4 01 4.02.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						53.200.000	55.860.000		
4 01 4.02.01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor				Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	19.000.000	19.950.000	Lama	
4 01 4.02.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	12 bln	6.400.000	6.720.000	Lama	
4 01 4.02.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	12 Bulan	27.800.000	29.190.000	Lama	
4 01 4.02.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						64.000.000	67.200.000		
4 01 4.02.01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 stel	32.000.000	33.600.000	Lama	
4 01 4.02.01 03 06	Pengadaan Pakaian Olah Raga				Jumlah Pakaian Olah Raga	60 stel	32.000.000	33.600.000	Lama	
4 01 4.02.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						191.390.000	200.959.500		
4 01 4.02.01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal				Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal untuk APIP	100%	121.330.000	127.396.500	Lama	
4 01 4.02.01 05 05	Pelaksanaan Penilaian AKJG				Jumlah pelathan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas	9 kali	35.310.000	37.075.500	Lama	
4 01 4.02.01 05 06	Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah				Jumlah Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah	1 kali	34.750.000	36.487.500	Lama	
4 01 4.02.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						238.325.000	250.241.250		
4 01 4.02.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia	2 Dokumen	15.325.000,00	16.091.250	Lama	
4 01 4.02.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dokumen	42.000.000,00	44.100.000	Lama	
4 01 4.02.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD				Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Dokumen	31.000.000,00	32.550.000	Lama	
4 01 4.02.01 06 07	Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah				Jumlah dSKPD yang dinilai LKIPaya	24 SKPD	50.000.000,00	52.500.000	Lama	
4 01 4.02.01 06 08	Review LAKIP Kota Bima				Jumlah komponen SAKIP yang dilakukan perbaikan	5 komponen	50.000.000,00	52.500.000	Lama	
4 01 4.02.01 06 09	Review RKA				Jumlah rekomendasi perbaikan RKA	3 rekomendasi	50.000.000,00	52.500.000	Lama	
4 01 4.02.01 06 10	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi				Jumlah SKPD yang dinilai	22 SKPD	38.000.000,00	39.900.000	Lama	
4 01 4.02.01 06 11	Evaluasi Pelayanan Publik				Jumlah SKPD pelayanan yang dievaluasi	10 SKPD	25.000.000,00	26.250.000	Lama	
4 01 4.02.01 06 12	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				Jumlah dokumen laporan yang dilakukan verifikasi	11 Dok	33.000.000,00	34.650.000	Lama	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						(10)	(11)	(12)	(13)
					Tolak Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.02.01 06 13	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran			Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran hasil evaluasi	2 Dok		35.000.000,00	36.750.000	Lama					
4 01 4.02.01 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota						65.000.000	68.250.000						
4 01 4.02.01 18 07	Review laporan keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah rekomendasi perbaikan Laporan Keuangan	5 rekomendasi		65.000.000	68.250.000	Lama					
4 01 4.02.01 18 07	Review Penyerapan Anggaran			Persentase perbaikan atas rekomendasi SKPD	24,14%		50.000.000	52.500.000						
4 01 4.02.01 18 07	Review Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah dokumen Review laporan Review Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		55.000.000	57.750.000						
4 01 4.02.01 20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH						2.147.000.000	2.254.350.000						
4 01 4.02.01 20 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala			Persentase pelaksanaan pemeriksaan operasional secara berkala pada SKPD	82,76%		845.000.000,00	887.250.000	Lama					
4 01 4.02.01 20 02	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah			Persentase kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah yang tertangani			260.000.000,00	273.000.000	Lama					
4 01 4.02.01 20 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH			Jumlah kasus aduan yang koordinasikan API atas pelaksanaan proyek pembangunan	5 kasus		260.000.000,00	273.000.000	Lama					
4 01 4.02.01 20 05	inventarisasi hasil temuan pengawasan			Jumlah dokumen hasil invertisasi temuan pengawasan	2 dok		23.000.000,00	24.150.000	Lama					
4 01 4.02.01 20 06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan			Persentase pelaksanaan PTL atas pemeriksaan Krung	100%		515.000.000,00	540.750.000	Lama					
4 01 4.02.01 20 07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif			Jumlah Dokumentasi Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	8 Dok		105.000.000,00	110.250.000	Lama					
4 01 4.02.01 20 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan			Persentase Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	100% (4 dok)		29.000.000,00	30.450.000	Lama					
4 01 4.02.01 20 10	Pemantauan LHKASN			persentase ASN dan pejabat negara yang telah menyampaikan LHK	100%		110.000.000,00	115.500.000	Lama					
4 01 4.02.01 21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN						189.500.000	198.975.000						
4 01 4.02.01 21 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatir pengawasan			Jumlah APIP yang bersertifikat	14 orang		69.000.000	72.450.000	Lama					
4 01 4.02.01 21 02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja			jumlah APIP yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan operasional	24 orang		68.500.000	71.925.000	Lama					
4 01 4.02.01 21 03	Bimtek pengawasan Operasional			Jumlah pejabat fungsional yang dinilai angka kredit	19 orang		52.000.000	54.600.000	Lama					
4 01 4.02.01 22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN						27.000.000	28.350.000						
4 01 4.02.01 22 01	Penyusunan kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan			Jumlah dokumen sistem dan prosedur yang terselesaikan	3 Dokumen		27.000.000	28.350.000	Lama					
4 01 4.02.01 23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI						30.000.000	31.500.000						
4 01 4.02.01 23 02	Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik			Jumlah pengaduan masyarakat yang terdokumentasi	10 Dokumen		30.000.000	31.500.000	Lama					
4 01 4.02.01 24	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT						19.000.000	19.950.000						
4 01 4.02.01 24 01	Pembentukan Unit khusus penanganan pengaduan masyarakat			Jumlah pengaduan masyarakat yang terdokumentasi	10 dok		19.000.000	19.950.000	Lama					
4 03	PERENCANAAN						7.458.551.750	7.831.479.338						
4 03 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						7.458.551.750	7.831.479.338						
4 03 4.03.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1.113.710.000	1.169.395.500						
4 03 4.03.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	550 surat		72.130.000	75.736.500			Kota Bima			
4 03 4.03.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	2 rekening		54.600.000	57.330.000			Kota Bima			
4 03 4.03.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional			Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	10 unit		14.100.000	14.805.000			Kota Bima			
4 03 4.03.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	11 orang		80.730.000	84.766.500			Kota Bima			
4 03 4.03.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Cakupan ruang kantor yang bersih	1 gedung		1.200.000	1.260.000			Kota Bima			
4 03 4.03.01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Terselenggaranya kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11 unit		11.150.000	11.707.500			Kota Bima			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
4 03 4.03.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	50 jenis	78.500.000	82.425.000		Kota Bima			
4 03 4.03.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	60000 lembar	80.000.000	84.000.000		Kota Bima			
4 03 4.03.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 unit	25.000.000	26.250.000		Kota Bima			
4 03 4.03.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang Terpelihara	3 unit	94.100.000	98.805.000		Kota Bima			
4 03 4.03.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media massa dan publikasi iklan	8 media	65.500.000	68.775.000		Kota Bima			
4 03 4.03.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	40 orang	56.700.000	59.535.000		Kota Bima			
4 03 4.03.01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	450.000.000	472.500.000		Kota Bima			
4 03 4.03.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	36 kali	30.000.000	31.500.000		Kota Bima			
4 03 4.03.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			321.826.000	337.917.300					
4 03 4.03.01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional OPD	5 unit	85.000.000	89.250.000		Kota Bima			
4 03 4.03.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	69.330.000	72.796.500		Kota Bima			
4 03 4.03.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Berfungsinya dengan baik perlengkapan gedung kantor	1 Thn	73.500.000	77.175.000		Kota Bima			
4 03 4.03.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan operasional dinas/operasional	24 Unit	93.996.000	98.695.800		Kota Bima			
4 03 4.03.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			30.000.000	31.500.000					
4 03 4.03.01 03 06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Pengadaan Pakaian Olah Raga	50 stel	30.000.000	31.500.000		Kota Bima			
4 03 4.03.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			331.332.000	347.898.600					
4 03 4.03.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	1 Dokumen	75.683.000	79.467.150		Kota Bima			
4 03 4.03.01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semester	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Dokumen	37.978.000	39.876.900		Kota Bima			
4 03 4.03.01 06 04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	37.978.000	39.876.900		Kota Bima			
4 03 4.03.01 06 05	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	5 Dokumen	115.393.000	121.162.650		Kota Bima			
4 03 4.03.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPI dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Dokumen	64.300.000	67.515.000		Kota Bima			
4 03 4.03.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			301.250.000	316.312.500					
4 03 4.03.01 15 08	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	Jumlah Dokumen LP2D	1 Dok	60.000.000	63.000.000		Kota Bima			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
			Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
4 03 4.03.01 15 15	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima	Jumlah Pengumpulan Data dan Penyusunan Naskah/Dokumen Peneltia	1 kegiatan	241.250.000	253.312.500			
4 03 4.03.01 16	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN			267.665.000	281.048.250			
4 03 4.03.01 16 13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1 laporan	105.000.000	110.250.000		Kota Bima	
4 03 4.03.01 16 14	Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya	Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya	1 kegiatan	70.000.000	73.500.000			
4 03 4.03.01 16 16	Koordinasi Program NUSP - Phase 2	Laporan pelaksanaan koordinasi	1 laporan	92.665.000	97.298.250			
4 03 4.03.01 19	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR			208.000.000	218.400.000			
4 03 4.03.01 19 12	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembanguna Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Jumlah rencana PPSP	1 Dokumen	88.000.000	92.400.000			
4 03 4.03.01 19 21	Perencanaan Pembangunan Kota Hijau	Jumlah koordinasi Perencanaan Kota Hijau	1 Laporan	120.000.000	126.000.000			
4 03 4.03.01 19 26	Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Publik	Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Publik	1 kegiatan	126.000.000	132.300.000			
4 03 4.03.01 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			145.000.000	152.250.000			
4 03 4.03.01 20 01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Jumlah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	15 orang	35.000.000	36.750.000			
4 03 4.03.01 20 02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	3 kegiatan	25.000.000				
4 03 4.03.01 20 03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah peserta Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	30 orang	85.000.000	89.250.000			
4 03 4.03.01 21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			2.649.114.750	2.781.570.488			
4 03 4.03.01 21 05	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah rancangan RPJMD yang memenuhi kaidah penyusunan	1 Dokumen		-		Baru	
4 03 4.03.01 21 06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah Musrenbang RPJMAD	1 Dokumen		-		Baru	
4 03 4.03.01 21 07	Penetapan RPJMD	Jumlah RPJMAD yang sesuai ketentuan	1 Dokumen	167.500.000	175.875.000		Baru	
4 03 4.03.01 21 08	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah rancangan RKPD yang memenuhi kaidah penyusunan	1 Dokumen	167.500.000	175.875.000		Kota Bima	
4 03 4.03.01 21 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD	1 Dokumen	375.000.000	393.750.000		Kota Bima	
4 03 4.03.01 21 10	Penetapan RKPD	Jumlah RKPD yang sesuai ketentuan	1 Dokumen	191.500.000	201.075.000		Kota Bima	
4 03 4.03.01 21 12	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah LKPJ Walikota	2 Dokumen	454.000.000	476.700.000		Kota Bima	
4 03 4.03.01 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan	Jumlah Laporan monev perencanaan pembangunan	5 Laporan	258.108.750	271.014.188		Kota Bima	
4 03 4.03.01 21 16	Perencanaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembaku)	Jumlah koordinasi kegiatan DBH CT	4 Laporan	200.000.000	210.000.000		Kota Bima	
4 03 4.03.01 21 17	Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	Jumlah Pengendalian tugas pembantuan	2 laporan	33.550.000	35.227.500		Kota Bima	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
		Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4 03 4.03.01 21 21	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Jumlah perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan litbang	1 kegiatan	73.526.000	77.202.300		
4 03 4.03.01 21 25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Jumlah koordinasi kegiatan BKPRD	1 kegiatan	100.000.000	105.000.000		
4 03 4.03.01 21 30	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	Jumlah dokumen	1 kegiatan	26.430.000	27.751.500		
4 03 4.03.01 21 33	E - Planning	aplikasi e-planning	1 kegiatan	250.000.000	262.500.000		
4 03 4.03.01 21 34	Updating E-Monev	Pengelolaan aplikasi e-monev	1 kegiatan	37.000.000	38.850.000		
4 03 4.03.01 21 35	Pengendalian Implementasi SAKIP	Dokumen cascading perencanaan kinerja SKPD	1 kegiatan	15.000.000	15.750.000		
4 03 4.03.01 21 36	Koordinasi Program ruang terbuka publik	Dokumen Program ruang terbuka publik	1 kegiatan	75.000.000	78.750.000		
4 03 4.03.01 21 37	Reviu Kinerja dan perencanaan kinerja	Laporan Reviu Kinerja dan perencanaan kinerja	1 kegiatan	50.000.000	52.500.000		
4 03 4.03.01 21 38	Koordinasi pelaksanaan anugrah pangripta nusantara	Dokumen anugrah pangripta nusantara	1 kegiatan	25.000.000	26.250.000		
4 03 4.03.01 21 39	Penyusunan Perubahan RKP	Jumlah Perubahan RKP yang memenuhi kaidah penyusunan	1 Dokumen	150.000.000	157.500.000		Kota Bima
4 03 4.03.01 22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI			225.950.000	237.247.500		
4 03 4.03.01 22 13	Pembangunan Ekonomi Lokal	Pembangunan Ekonomi Lokal	1 Dokumen	86.650.000	90.982.500		Kota Bima
4 03 4.03.01 22 16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 kegiatan	80.000.000	84.000.000		Kota Bima
4 03 4.03.01 22 17	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	1 dokumen	59.300.000	62.265.000		
4 03 4.03.01 23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA			1.433.849.000	1.505.541.450		
4 03 4.03.01 23 01	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	Jumlah Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	1 dokumen	89.720.000	94.206.000		
4 03 4.03.01 23 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	56 SKPD	383.714.000	402.899.700		
4 03 4.03.01 23 08	Penyusunan Profile Kesehatan	Jumlah Dokumen Profile Kesehatan	1 dokumen	112.000.000	117.600.000		
4 03 4.03.01 23 12	Koordinasi dan Advokasi Kota Layak Anak			166.600.000			
4 03 4.03.01 23 13	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah pengendalian kegiatan PKH	3 kali	130.400.000	136.920.000		
4 03 4.03.01 23 16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah renja SKPD yang selaras dengan RKP dan Renstra SKPD	1 dokumen	123.000.000	129.150.000		
4 03 4.03.01 23 17	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	Jumlah koordinasi pembangunan kesra	4 kegiatan	98.239.000	103.150.950		
4 03 4.03.01 23 18	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah data profil kelurahan	1 dokumen	99.263.000	104.226.150		
4 03 4.03.01 23 26	Koordinasi Balai Mediasi	Jumlah penanganan masalah tanpa harus lewat jalur hukum dan dokumen	4 kali	86.913.000	91.258.650		
4 03 4.03.01 23 27	Koordinasi Aksi HAM Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi Aksi HAM Daerah	4 dokumen	72.000.000	75.600.000		
4 03 4.03.01 23 28	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 dokumen	72.000.000	75.600.000		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT								
					Tolak Ukur	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
4 03	4.03.01	24		PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM			311.150.000	326.707.500					
4 03	4.03.01	24	07	Penyusunan Master Plan Drainase	Dokumen Master Plan Drainase		70.000.000	73.500.000					
4 03	4.03.01	24	17	Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah, SDA dan Ekonomi	Tersedianya renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	1 Dokumen	311.150.000	326.707.500				Kota Bima	
4 03	4.03.01	24	18	Masterplan Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Dokumen Masterplan Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup		185.000.000	194.250.000					
4 03	4.03.01	24	19	Penyusunan KLHS	Dokumen KLHS		220.000.000	231.000.000					
4 03	4.03.01	28		PENGLOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			119.705.000	125.690.250					
4 03	4.03.01	28	06	Identifikasi dan sosialisasi teknologi tepat guna (TTG)	terlaksananya Identifikasi dan sosialisasi teknologi tepat guna (TTG)	2 kegiatan	49.985.000	52.484.250				Kota Bima	
4 03	4.03.01	28	09	Penyusunan Data Base Kelitbangan	tersedianya detail kawasan wasata bahari terumbu karang kota bima	2 kegiatan	69.720.000	73.206.000				Kota Bima	
4 03	4.03.01	28	10	Koordinasi Kelompok Kerja Kelitbangan	Laporan Koordinasi Kelompok Kerja Kelitbangan	1 kegiatan	69.720.000	73.206.000					
4 04	KEUANGAN							14.359.962.000	14.021.402.155				
4 04	2.11.01			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			14.359.962.000	14.021.402.155					
4 04	2.11.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.824.459.200	2.746.982.000				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
4 04	2.11.01	0	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	9000 materai dan 12 paket kiriman barang	72.720.000	75.000.000	Kegiatan sedang berjalan				
4 04	2.11.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	pembayaran telpon, air, dan listrik 12 bulan	48.000.000	48.000.000	Kegiatan sedang berjalan				
4 04	2.11.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	115 Service dan 53 STNK	66.700.000	66.700.000	Kegiatan sedang berjalan				
4 04	2.11.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan sesuai kebutuhan	12 bulan	469.752.000	469.752.000	Kegiatan sedang berjalan				
4 04	2.11.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 jenis alat dan bahan pembersih	15.950.000	15.950.000	Kegiatan sedang berjalan				
4 04	2.11.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	62 kali service	79.000.000	79.000.000	Kegiatan sedang berjalan				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
		Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4 04 2.11.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1880 jmlh atk	200.750.000	200.750.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	280000 lbr copy dan 700 eks jilid	259.750.000	259.750.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik.penerangan bangunan kantor	284 jumlah alat listrik	6.000.000	6.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	24 peralatan kantor	219.080.000	219.080.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	57.000.000	57.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	90 kali	468.900.000	500.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	87 laporan perjalanan dinas	760.857.200	650.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	254 laporan perjalanan dinas	100.000.000	100.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			312.872.800	312.872.800	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	102 spanduk/umbul2, 1 AC, 2 Kamera	24.000.000	24.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 01 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	2 Papan Visual Elektronik, 4 Lemari Arsip Kaca	11.000.000	11.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 01 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	53 kendaraan dinas	277.872.800	277.872.800	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur			50.000.000	50.000.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4 04 2.11.01 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian tenun ikat	150 buah	50.000.000	50.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			1.012.668.000	1.012.668.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT							
					Tolak Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4 04 2.11.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dokumen realisasi renja per triwulan dan 4 money SKPD per semester	71.975.000	71.975.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis	2 dok laporan keuangan semesteran	182.333.000	182.333.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok laporan prognosis skpd, 1 dok laporan prognosis pemkot bima	145.409.000	145.409.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan tepat Waktu	2 dok	445.926.000	445.926.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah	4 dokumen	106.650.000	106.650.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPPD	2 dokumen	60.375.000	60.375.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			5.944.262.000	5.702.334.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
4 04 2.11.01 17 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 dokumen/ 1 raperda	1.355.000.000	1.255.594.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 dokumen/ 1 raperda	233.000.000	232.464.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 perwali	1.014.705.000	945.876.500	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 raperda	384.000.000	383.876.500	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 perwali	170.000.000	163.438.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 raperda	120.000.000	117.738.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 12	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 perwali	130.000.000	128.460.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 kali bintek	95.000.000	95.959.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 20	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Pedoman Anggaran	Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 dokumen	212.545.000	212.545.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 21	Pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah	Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	12 bulan	1.257.650.000	1.257.650.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 25	Pelaksanaan pelayanan SP2D	Persentase SPP dan SPM yang diteliti sesuai sisdur	12 bulan	96.000.000	96.000.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 28	Pelaksanaan penatausahaan gaji pegawai	Persentase SPP dan SPM yang diteliti sesuai sisdur Persentase SPP dan SPM yang Dikembalikan Persentase LRA Bulanan SKPD Yang Berhasil di Rekon	12 laporan penatausahaan gaji pegawai	300.000.000	247.180.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 30	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	4 Laporan	81.400.000	81.306.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 43	Pelaksanaan Proses TPTGR Aset/Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian BMD	6 Sidang, 36 Kasus, 36 Dokumen	335.000.000	334.247.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 44	Penyusunan Laporan DAK	Persentase objek Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Yang berhasil di Lakukan Rekon	4 laporan	85.000.000	75.000.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 17 45	Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Persentase Lain-Lain PAD Yang Sah Yang berhasil di Lakukan Rekon	1 Dokumen	74.962.000	75.000.000	Kegiatan sedang berjalan						
4 04 2.11.01 48	Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah			1.439.700.000	1.420.182.739		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
4 04 2.11.01 48 01	Penyusunan Sistem dan Prosedur Aset/Barang Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	200.000.000	182.213.739	Kegiatan sedang berjalan						

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
			Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
4 04 2.11.01 48 02	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Meningkatnya Penatausahaan Aset SKPD	3 Dokumen	295.000.000	294.694.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 48 03	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian BMD	90 Lokasi dan 1 Laporan	104.500.000	104.500.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 48 04	Penyusunan Data Inventarisasi Aset Daerah	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Rekon Aset SKPD	19 Dokumen	235.000.000	234.227.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 48 05	Pendataan Ulang/Pemutahiran Kepemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Bima	Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan BMD	25 Lokasi	93.000.000	92.843.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 48 06	Penyusunan Laporan Tahunan Aset/Barang Daerah	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian BMD	1 dokumen	94.000.000	93.725.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 48 08	Penyusunan Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD Kota Bima	Jumlah dokumen Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD Kota Bima	1 dokumen	92.500.000	92.350.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 48 09	Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah	Dokumen Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah	1 dokumen/ Laporan	248.200.000	248.200.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 48 10	Bimbingan Teknis SIMDA BMD Online	Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan BMD	1 kali bimtek	77.500.000	77.430.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 49	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.776.000.000	2.776.362.616		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
4 04 2.11.01 49 01	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase Data Pajak daerah Yang Di Rekam	9 Dokumen	100.000.000	101.187.250	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 49 02	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase Pemeriksaan Pajak Daerah Yang Terselesaikan	10 Dokumen	190.000.000	188.185.700	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 49 03	Sosialisasi dan Pembekalan Juru Pungut PBB	Persentase Pengaduan dan Keberatan Yang Terselesaikan	38 kali	79.000.000	78.849.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 49 04	Penagihan PBB pada Seluruh Kelurahan	Persentase Piutang Pajak daerah Yang Tertagih	57000 Wajib Pajak	546.000.000	545.937.500	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 49 05	Pendataan Ulang/ Pemutahiran Data PBB Sektor Perkotaan	Persentase Data Objek Pajak daerah Yang berhasil di Data	201 Objek pajak	300.000.000	305.630.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 49 06	Pengelolaan dan Penagihan Pajak Daerah/Retribusi Daerah/Sewa Aset Daerah	Persentase Piutang Retribusi daerah Yang Tertagih	2.186 Wajib Pajak	200.000.000	190.779.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 49 09	Pemeliharaan Data dan System PBB	Persentase Data Pajak daerah Yang Di Rekam	9 Dokumen	310.000.000	300.565.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 49 11	Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Pemeriksaan Retribusi Daerah Yang Terselesaikan	3 Perwali	100.000.000	118.201.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 49 12	Uji Petik Terhadap Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya kegiatan Uji Petik Terhadap Objek Pajak dan Retribusi Daerah	1 laporan kegiatan	58.000.000	57.235.666	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 49 13	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	Terlaksananya Objek Pajak dan Retribusi Daerah Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	5 klasifikasi blok	113.000.000	112.003.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 49 14	Penetapan Objek Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	Persentase Data Objek Pajak Daerah Yang di Lakukan Penilaian	230 wajib pajak	200.000.000	199.654.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 49 15	Penatausahaan/Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	Persentase SKPD Yang Berhasil Melakukan Rekon	1 Laporan	492.000.000	491.093.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 49 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Persentase Pengaduan dan Keberatan Yang Terselesaikan	4 Laporan	88.000.000	87.042.500	Kegiatan sedang berjalan		
4 05	KEPEGAWAIAN			7.671.285.000	8.054.849.250			
4 05 4.05.07	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			7.671.285.000	8.054.849.250			
4 05 4.05.07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			929.954.600	976.452.330			
4 05 4.05.07 01 01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	12 bln	100.000.000	105.000.000			
4 05 4.05.07 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai.	12 bln	60.000.000	63.000.000			
4 05 4.05.07 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	12 bln	20.000.000	21.000.000			
4 05 4.05.07 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai	12 bln	57.000.000	59.850.000			
4 05 4.05.07 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	35.000.000	36.750.000			
4 05 4.05.07 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 Paket	63.000.000	66.150.000			
4 05 4.05.07 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	12 bln	60.000.000	63.000.000			
4 05 4.05.07 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	12 bln	20.954.600	22.002.330			
4 05 4.05.07 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	12 bln	30.000.000	31.500.000			
4 05 4.05.07 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	12 bln	80.000.000	84.000.000			
4 05 4.05.07 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 bln	320.000.000	336.000.000			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
					Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
4 05 4.05.07 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 bin	84.000.000	88.200.000					
4 05 4.05.07 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			230.090.200	241.594.710					
4 05 4.05.07 02 05	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang baru	4 unit	25.000.000	26.250.000					
4 05 4.05.07 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	4 unit	53.390.200	56.059.710					
4 05 4.05.07 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	1 Gedung	30.500.000	32.025.000					
4 05 4.05.07 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang memadai.	12 Bulan	91.200.000	95.760.000					
4 05 4.05.07 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	5 Unit	10.000.000	10.500.000					
4 05 4.05.07 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	10 Unit	20.000.000	21.000.000					
4 05 4.05.07 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			150.000.000	157.500.000					
4 05 4.05.07 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas dan kinerja SKPD yang tersusun	1 Dok	30.000.000	31.500.000					
4 05 4.05.07 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersusun	2 Dok	20.000.000	21.000.000					
4 05 4.05.07 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis SKPD yang tersusun	1 Dok	10.000.000	10.500.000					
4 05 4.05.07 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Dok	20.000.000	21.000.000					
4 05 4.05.07 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	5 Dok	40.000.000	42.000.000					
4 05 4.05.07 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen LPJ dan LPPD SKPD (Revisi RENJA dan RENSTRA) yang tersusun	3 Dok	30.000.000	31.500.000					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu		1.145.000.000	1.202.250.000					
	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah formasi CPNS yang terisi	149 Orang	215.000.000	225.750.000					
	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang dilakukan mutasi dan rotasi	200 Orang	100.000.000	105.000.000					
	Penyusunan formasi pegawai ASN di masing-masing SKPD	Data formasi pegawai ASN SKPD	1 Dokumen	75.000.000	78.750.000					
	Seleksi Jabatan ASN Secara Terbuka	Jumlah Jabatan ASN yang terisi melalui seleksi terbuka	5 Jabatan	185.000.000	194.250.000					
	Pelaksanaan Bimbingan penyusunan kinerja individu di masing-masing SKPD	Jumlah pegawai ASN yang sudah memiliki perjanjian kinerja di masing-masing SKPD	850 Orang	85.000.000	89.250.000					
	Pelaksanaan Bimbingan cara penilaian kinerja secara objektif	Jumlah pegawai ASN di masing masing SKPD yang dinilai kinerjanya	200 Orang	75.000.000	78.750.000					
	Monitoring, dan evaluasi Kinerja ASN	Laporan monitoring dan evaluasi Kinerja ASN	12 Laporan	250.000.000	262.500.000					
	Penyusunan pola karier pegawai ASN Kota Bima	Jumlah Dokumen pola karier pegawai ASN Kota Bima	2 Dokumen	75.000.000	78.750.000					
	Pelaksanaan Bimbingan dan Asistensi Penyusunan Pola Karier Pegawai ASN SKPD	Jumlah Dokumen pola karier pegawai ASN SKPD	100 Orang	85.000.000	89.250.000					
	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi	4%	3.655.390.200	3.838.159.710					
	Pemetaan kompetensi ASN	Jumlah Peta kompetensi ASN	1 Peta	175.000.000	183.750.000					
	Identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan berdasarkan peta kompetensi	Jumlah data kebutuhan diklat ASN	1 Dokumen	40.000.000	42.000.000					
	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Struktural	Jumlah Pegawai ASN yang diikuti sertakan pada Pelatihan Kepemimpinan Struktural	36 Orang	1.490.000.000	1.564.500.000					
	Pelaksanaan Pelatihan Teknis fungsional	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pelatihan teknis fungsional	40 Orang	100.000.000	105.000.000					
	Pelaksanaan Pelatihan Teknis	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti Pelatihan teknis	80 Orang	185.000.000	194.250.000					
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Laporan Hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	1 Dokumen	50.000.000	52.500.000					
	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Yang Menerima Bantuan Tugas Belajar	70 Orang	324.390.200	340.609.710					
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	124 Orang	1.116.000.000	1.171.800.000					
	Pelaksanaan Penelusuran Kader Potensial ASN (Talent Scooting)	Jumlah PNS yang mengikuti Penelusuran Kader Potensial ASN	500 Orang	175.000.000	183.750.000					
	PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL ASN	Jumlah Kasus penyimpangan yang ditindaklanjuti	5 Kasus	75.000.000	78.750.000					
	Pelaksanaan Sosialisasi, Bimbingan Rohani dan Penyuluhan Mental Bagi ASN	Jumlah ASN Yg diberikan Sosialisasi, Bimbingan Rohani dan Penyuluhan Mental Bagi ASN	100 Orang	75.000.000	78.750.000					
	PROGRAM PENEKAKAN ATURAN DISIPLIN, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN	Persentase Pelanggaran Didipin ASN yang dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan disiplin PNS	100%	382.850.000	401.992.500					
	Penerapan Kode Etik Pegawai ASN	Jumlah Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik ASN	10 Dokumen	50.000.000	52.500.000					

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT					
		Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai ASN	Jumlah SK Penjatihan Hukuman Disiplin ASN dan Rekomendasi Percepatan ASN	15 Dokumen	307.000.000	322.350.000		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	43 Steel	25.850.000	27.142.500		
	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI MASING-MASING SKPD	Persentase ASN yang memiliki database yang lengkap dan akurat	25%	100.000.000	105.000.000		
	Penyusunan dan Pemutakhiran Database ASN SKPD	Jumlah SKPD yang memiliki Data Base Pegawai	5 SKPD	100.000.000	105.000.000		
	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN KOTA BIMA	Jumlah statistik kepegawaian yang diterbitkan oleh BKPSDM	1 Dokumen	450.000.000	472.500.000		
	Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah Data Base ASN Kota Bima yang terupdate	1 Dokumen	250.000.000	262.500.000		
	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line	Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online	4 Laporan	150.000.000	157.500.000		
	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah Masalah Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian SKPD yang terselesaikan	5 Masalah	50.000.000	52.500.000		
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Indeks Kepuasan Peg. ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian		553.000.000	580.650.000		
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS	720 Dokumen	180.000.000	189.000.000		
	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah Penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diperoleh PNS	50 Dokumen	50.000.000	52.500.000		
	Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	Jumlah SK Pensiun PNS	126 Dokumen	75.000.000	78.750.000		
	Penyusunan gaji berkala PNS	Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS	286 Dokumen	48.000.000	50.400.000		
	Pengelolaan laporan harta kekayaan negara (LHKPN)	Jumlah Laporan harta kekayaan negara (LHKPN) ASN	100 Laporan	50.000.000	52.500.000		
	Pengelolaan, Pengurusan dan penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen	Jumlah Karis/Karsu/Karpeg/Taspen	150 Dokumen	50.000.000	52.500.000		
	Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Surat Keputusan Jabatan Fungsional	Jumlah SK Pengangkatan dan Pembebasan Jabatan Fungsional	250 Dokumen	50.000.000	52.500.000		
	Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS	Jumlah SK CPNS dan SK PNS ASN	124 Dokumen	50.000.000	52.500.000		


**1**

1.01
1.01.1.01.01

1.02
1.02.1.02.01

1.03
1.03.1.03.01

1.04
1.04.1.04.01

1.05
1.05.1.05.01
1.05.1.05.02

1.06
1.06.1.06.01

**2**

2.01
2.01.2.01.01

2.02
2.02.2.02.01

2.03
2.03.2.03.01

2.04
2.04.1.04.01

2.05
2.05.2.05.01

2.06
2.06.2.06.01

2.08
2.08.2.08.01

2.09
2.09.2.09.01

2.10
2.10.2.10.01

2.11
2.11.2.11.01

2.12
2.12.2.12.01

2.13
2.13.2.13.01

2.14
2.14.2.14.01

2.16
2.16.2.16.01

2.17
2.17.2.17.01

2.18
2.18.2.17.01

3

3.01
3.01.3.01.01

3.02
3.02.3.02.01

3.03
3.03.3.03.01

3.06
3.06.3.06.01

3.07
3.07.3.07.01

4

4.01

4.01.4.01.03

4.01.4.01.04

4.01.4.01.09

4.01.4.01.10

4.01.4.01.11

4.01.4.01.12

4.01.4.01.13

4.01.4.01.14

4.02

4.02.4.02.01

4.03

4.03.4.03.01

4.04

4.04.4.04.01

4.05

4.05.4.05.07

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SOSIAL

DINAS SOSIAL

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN

PERTANAHAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
DINAS PARIWISATA

STATISTIK
DINAS STATISTIK DAERAH

KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KEARSIPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

URUSAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PARIWISATA
DINAS PARIWISATA

PERTANIAN
DINAS PERTANIAN

PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERINDUSTRIAN
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
KECAMATAN RASANA E BARAT
KECAMATAN RASANA E TIMUR
KECAMATAN RASANA E ASAKOTA
KECAMATAN RASANA E MPUNDA
KECAMATAN RASANA E RABA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PENGAWASAN
INSPEKTORAT

PERENCANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEUANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

553.322.030.453

299.769.322.055

232.655.539.250

96.319.884.335 47.208.126.050,00

96.319.884.335 48.089.531.000,00

43.076.437.520 41.741.939.000,00

43.076.437.520

135.608.670.100 127.608.670.100,00

135.608.670.100

10.426.804.100 4.426.804.100,00

10.426.804.100 14.851.804.100,00

11.863.692.100 7.875.000.000,00

7.765.895.700 5.575.000.000,00

4.097.796.400 2.300.000.000,00

2.473.833.900 3.795.000.000,00

2.473.833.900

65.382.551.000

52.188.641.400

1.985.350.000 2.000.000.000,00

1.985.350.000

2.107.801.000 2.000.000.000,00

2.107.801.000

2.404.000.000 2.580.000.000,00

2.404.000.000

10.425.000.000 10.425.000.000

10.425.000.000

13.223.085.000 9.625.000.000,00

13.223.085.000

4.323.949.150 3.801.678.000,00

4.323.949.150

8.197.880.000 4.472.745.000,00

8.197.880.000

4.415.834.000 4.415.834.000,00
4.415.834.000

5.050.000.000 4.420.000.000,00
5.050.000.000

2.933.616.850 2.933.616.850
2.933.616.850 10.000.000.000,00

3.185.433.450 2.800.000.000,00
3.185.433.450

1.023.611.600 1.023.611.600
1.023.611.600

2.822.285.000 2.822.285.000,00
2.822.285.000

881.404.950 881.404.950
881.404.950

2.403.300.000 2.403.300.000,00
2.403.300.000

45.689.748.558 27.954.461.550

5.167.181.075 4.581.425.000,00
5.167.181.075

13.520.963.600 5.411.388.400,00
13.520.963.600 6.435.000.000,00

13.123.243.000 10.895.265.000,00
13.123.243.000

10.987.679.583 4.175.701.850,00
10.987.679.583

2.890.681.300 2.890.681.300
2.890.681.300

142.480.408.840 114.274.007.959

109.239.658.590	88.445.355.959
72.055.796.290	34.901.955.959,24
15.507.770.000	15.000.000.000,00
2.418.800.000	3.192.400.000,00
2.921.500.000	3.499.800.000,00
2.630.200.000	3.480.200.000,00
3.713.000.000	4.206.200.000,00
3.849.500.000	4.378.000.000,00
6.143.092.300	19.786.800.000,00
3.750.951.500	3.650.000.000,00
3.750.951.500	
7.458.551.750	5.858.367.000,00
7.458.551.750	
14.359.962.000	11.150.000.000,00
14.359.962.000	
7.671.285.000	5.170.285.000,00
7.671.285.000	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan Kota Bima tahun 2019 agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dalam pencapaian visi, misi Pembangunan Kota Bima, maka dirumuskan matriks Indikator Kinerja Daerah Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran Pemerintah Daerah Kota Bima dan Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah Kota Bima sebagai berikut.

Tabel 6.1.
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan
Tingkat Sasaran (dampak/*impact*) Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,78
2	Laju inflasi		4,08
3	PDRB per kapita	Juta Rupiah	19,85
4	Indeks Gini		
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia		
6	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	9,27
8	Rasio kesenjangan kemiskinan		
9	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari		
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,36
11	Angka melek huruf	%	98,20
12	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,14
13	Angka usia harapan hidup	tahun	69,58
14	Persentase balita gizi buruk	%	0,050
15	Prevalensi balita gizi kurang		
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	
17	Angka partisipasi angkatan kerja		
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	72,35
19	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,51
20	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,49
21	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja		
22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
23	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja		
24	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85
26	Persentase PAD terhadap pendapatan		
27	Opini BPK		WTP
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)		80
29	Penguatan cadangan pangan		
30	Penanganan daerah rawan pangan		
31	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	13,99
32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	5,87
33	Produksi sektor pertanian		
34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	0,19
35	Produksi sektor perkebunan		
36	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB		
37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,41
38	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	0,37
39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		
40	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	1,52
41	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	23,45
42	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,11
43	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri		
44	Pertumbuhan Industri	%	5,84
45	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB		
ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	rupiah	1.100.618

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
2	Nilai tukar petani		
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita		
4	Produktivitas total daerah		
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa		
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)		
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum		
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR		
9	Angka kriminalitas yang tertangani		
10	Rasio ketergantungan		49,30

Tabel 6.2.
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan
Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
ASPEK PELAYANAN UMUM			
Layanan Urusan Wajib Dasar			
1.	Pendidikan		
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
1.2.	Angka partisipasi kasar	%	65
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan		
1.4.	Angka Partisipasi Murni		
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100
1.4.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	80
1.5.	Angka partisipasi sekolah		
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.5.3.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	85
1.6.	Angka Putus Sekolah:		
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0
1.6.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,05
1.7.	Angka Kelulusan:		
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
1.7.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):		
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100
1.9.	Fasilitas Pendidikan:		
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	521
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	unit	233
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		1 : 200
1.11.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah		1 : 930
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		1 : 9
1.13.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah		1 : 9
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		1 : 35
1.15.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata		1 : 24
1.16.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	100
1.17.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki		
1.18.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	96,55
1.19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	orang	2.709
2.	Kesehatan		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1000 KH	6
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi		
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1000 KH	7
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	1000 KH	5
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	1000 KH	56
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	-	-
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	penduduk	1:30.000
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100.000 pddk	1:100.000 pddk
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000 pddk	7:100.000 pddk
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100
2.15.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	95
2.16.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 pddk	3
2.17.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	50
2.18.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	35
2.19.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	88
2.20.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	1
2.21.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	35
2.22.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	70
2.23.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100
2.24.	Penderita diare yang ditangani	%	98
2.25.	Angka kejadian Malaria	%	14

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
2.26.	Tingkat kematian akibat malaria	%	0
2.27.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida		
2.28.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	50
2.29.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	5
2.30.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	96
2.31.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	100
2.32.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	5
2.33.	Cakupan kunjungan bayi	%	96
2.34.	Cakupan puskesmas	%	100
2.35.	Cakupan pembantu puskesmas	%	100
2.36.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	98
2.37.	Cakupan pelayanan nifas	%	95
2.38.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	84
2.39.	Cakupan pelayanan anak balita	%	85
2.40.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	%	100
2.41.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100
2.42.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100
2.43.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	-	-
2.44.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1.	Pekerjaan Umum:		
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	75
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		
3.1.3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	75
3.1.5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)		
3.1.6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar		
3.1.7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	95
3.1.8.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar		
3.1.9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		
3.1.10.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun		
3.1.11.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor		
3.1.12.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		
3.1.13.	Rasio Jaringan Irigasi		
3.1.14.	Persentase penduduk berakses air minum		
3.1.15.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		
3.1.16.	Persentase areal kawasan kumuh		
3.1.17.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		
3.1.18.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		
3.1.19.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		
3.2.	Penataan Ruang:		
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		
3.2.2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		
3.2.3.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan		
3.2.4.	Ruang publik yang berubah peruntukannya		
3.2.5.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		
3.2.6.	Ketaatan terhadap RTRW		
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
4.1.	Rasio rumah layak huni		
4.2.	Rasio permukiman layak huni		
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		
4.5.	Persentase permukiman yang tertata		
4.6.	Persentase lingkungan permukiman kumuh		
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		
5.4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		
5.5.	Persentase Penegakan PERDA		
6.	Sosial		
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	80
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	80
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	80
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	50
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	50

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	80
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	80
Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
1.	Tenaga Kerja		
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		
1.4.	Keselamatan dan perlindungan		
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		
1.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan		
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan		
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3		
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	55,05
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	15
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	60,01
2.4.	Rasio KDRT		
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	62,29
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit		
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.		
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		
2.14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		
2.15.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		
2.16.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		
2.17.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi		
2.18.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		
2.19.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian		
3.	Pangan		
3.1.	Ketersediaan pangan utama	Ton	15.000
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	kcal	82
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	75
4.	Pertanahan		
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat		
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
4.3.	Penyelesaian izin lokasi		
5.	Lingkungan Hidup		
5.26.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1
5.27.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	3
5.28.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Dokumen	4
5.29.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	9
5.30.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	88
5.31.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	-	-
5.32.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Badan Usaha	70
5.33.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	2
5.34.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok Masyarakat	3
5.35.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Kelompok Masyarakat	3
5.36.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Kelompok Masyarakat	3
5.37.	Penetapan hak MHA	Kelompok Masyarakat	3
5.38.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Sekolah	5
5.39.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Sekolah	5
5.40.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Sekolah	5
5.41.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	- Sekolah - Perusahaan	- 5 - 3
5.42.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Sengketa	3
5.43.	Timbulan sampah yang ditangani	m3	80

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
5.44.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	5
5.45.	Persentase cakupan area pelayanan	%	75
5.46.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	65
5.47.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Unit	- 1 TPA - 2 TPST
5.48.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	31
5.49.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	80
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran		
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah		
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran		
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		
7.4.	Persentase LSM aktif		
7.5.	Persentase LPM Berprestasi		
7.6.	Persentase PKK aktif		
7.7.	Persentase Posyandu aktif		
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		
7.9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat		
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	kelahiran	2,7%
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	kelahiran	2,32%
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	OPD	70%
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	OPD	45%
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda	2
8.6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	4
8.7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Lembaga (%)	50
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak (%)	2,5
8.9.	Ratio Akseptor KB	WUS (%)	79,42
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	WUS (%)	62,1
8.11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	kelahiran	40/1.000
8.12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	PUS (%)	1,20
8.13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	PUS (%)	8,908
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	PUS (%)	51,33
8.15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	PUS (%)	87,50
8.16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Klp	3.750
8.17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Klp	1.540
8.18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	klp	300
8.19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	PPKS	5
8.20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	orang	10.700

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
8.21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	PKB/PLKB	22
8.22.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	PUS	800
8.23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Petugas (%)	100
8.24.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Alakon (%)	100
8.25.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Faskes (%)	95
8.26.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Data (%)	100
8.27.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Remaja (%)	0
8.28.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	KLP	6
8.29.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	klg	5.000
8.30.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Umur	23,7
8.31.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,65
9.	Perhubungan		
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	756.800
9.2.	Rasio ijin trayek	Ijin trayek	0,2
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	2.176
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit	3
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	%	20
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	90
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	unit	500
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/kendaraan	1,59

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang	756.800
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang	756.800
10.	Komunikasi dan Informatika		
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi		
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon		
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		
11.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
11.1.	Persentase koperasi aktif	koperasi	60.44
11.2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	UKM	0.91
11.3.	Persentase BPR/LKM aktif	BPR/LKM	-
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	UMK	99.09
12.	Penanaman Modal		
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja		
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		
13.	Kepemudaan dan Olah Raga		
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	25
13.2.	Persentase wirausaha muda	%	25
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	cabor	27
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	orang	10
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	kali	2
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	orang	100
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	cabor	40

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
14.	Statistik		
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"		
14.3.	Buku "PDRB"		
15.	Persandian		
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		
16.	Kebudayaan		
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	65
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	47,5
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	11,48
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		3500
17.	Perpustakaan		
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	12.500
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	judul	1.200
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	5.000
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan		
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	5
18.	Kearsipan		
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	2
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	35
Layanan Urusan Pilihan			
1.	Pariwisata		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.1.	Kunjungan wisata	orang	35.785
1.2.	Lama kunjungan Wisata	hari	2
1.3.	PAD sektor pariwisata	Rp/tahun	102.000.000
2.	Pertanian		
2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	ton	41.973,7
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB		
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		
2.4.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB		
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton	5,5
2.6.	Cakupan bina kelompok petani		
3.	Kehutanan		
3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	ha	250
3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan		
3.3.	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	%	46,2
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral		
4.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik		
4.2.	Rasio ketersediaan daya listrik		
4.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin		
5.	Perdagangan		
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp	-
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	UMKM	3.218
6.	Perindustrian		
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	sentra	74

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
7.	Transmigrasi		
7.1.	Persentase transmigran swakarsa		
8.	Kelautan dan Perikanan		
8.1.	Produksi perikanan : - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya	- ton - ton	- 2.121,40 - 988,61
8.2.	Konsumsi ikan	Kg/kapita/thn	41
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan : - Jumlah Kelompok pemula - Jumlah kelompok madya - Jumlah kelompok utama	- Klpk - Klpk - Klpk	- 10 - 4 - 5
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	ton	1.640
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		
8.6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		
8.7.	Nilai tukar nelayan		
Penunjang Urusan			
1.	Perencanaan Pembangunan		
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100
2.	Keuangan		
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP
2.2.	Persentase SILPA		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD		
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana		
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)		
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)		
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		
2.9.	Penetapan APBD		
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	bulan	3
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	20
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	4,09
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	4
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	jabatan	54
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	52
4.	Penelitian dan pengembangan		
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	30
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	30
	Penerapan SIDA:		
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.		
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.		
5.	Pengawasan		
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	90
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	%	2
5.3.	Jumlah temuan BPK	temuan	280

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET
6.	Sekretariat Dewan		
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		
6.3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		

BAB VII **P E N U T U P**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima tahun 2019 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2019. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat tahunan maka RKPD adalah kolaborasi dari dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD). Mekanisme penyusunan RKPD Kota Bima tahun 2019 dimulai dengan dilaksanakannya Musrenbang RKPD pada awal tahun 2018 mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota. Proses Musrenbang tersebut sebagai bagian proses demokratisasi mekanisme perencanaan daerah memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengajukan usulan, saran maupun rekomendasi pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian maka dokumen RKPD tahun 2019 secara substansi adalah dokumen yang memaduserasikan antara kebutuhan aktual masyarakat dengan program/kegiatan SKPD sebagai implementasi visi dan misi Pemerintah Kota Bima.

Melalui proses seperti itu diharapkan substansi RKPD Kota Bima tahun 2019 ini nantinya akan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah baik yang dipicu oleh perkembangan eksternal seperti krisis ekonomi global beserta dampak – dampak yang di timbulkannya maupun perkembangan internal yang didorong oleh terjadinya pergeseran orientasi, motivasi dan kepentingan internal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, terutama akibat dinamika politik dan strategi pembangunan di tingkat Nasional dan Daerah.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan ini disusun agar dapat dijadikan acuan bagi penyusunan dan pelaksanaan dokumen-dokumen

lain yang bersifat lebih operasional sehingga terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan program/kegiatan dan dokumen anggaran sehingga bisa terwujud sinergi diantara dokumen-dokumen yang ada. Dokumen RKPD Tahun 2019 ini akan lebih bermakna apabila adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bima. Segala masukan, evaluasi maupun rekomendasi dari semua pihak masih sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima di masa-masa mendatang.

